RECEIVED
21 AUG 1969
CLD
Acquisitions
Section

Indonesia Department of Information

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969/70 — 1973/74

I

29 SEP 1969

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

14153
v.1

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
CENTRAL LIBRARY AND
DOCUMENTATION BRANCH

31775

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 319 TAHUN 1968
TENTANG
RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. *bahwa tudjuan perdjoangan Orde-Baru adalah meningkatkan tingkat kehidupan Rakjat Indonesia, jang hanja dapat ditjapai dengan pelaksanaan pembangunan bertahap dan berentjana ;*
2. *bahwa hasil-hasil jang telah ditjapai dalam program stabilisasi politik dan ekonomi, dewasa ini telah merupakan landasan jang tjukup kuat guna pelaksanaan pembangunan ;*
3. *bahwa berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, penjusunan dan pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun mendjadi salah satu tugas Kabinet Pembangunan ;*
4. *bahwa dewasa ini Pemerintah telah berhasil menjiapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973, jang akan mendjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Ketetapan MPRS tersebut tahun-demi-tahun ;*

5. *bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973 ;*

Mengingat :

1. *Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;*
2. *Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968;*
3. *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968 ;*

Mendengar : Pertimbangan BAPPENAS dan Sidang-sidang Kabinet ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969 — 1973.

Pasal 1.

Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973 sebagaimana termuat dalam Buku I, II dan III lampiran Keputusan Presiden ini merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti jang ditugaskan oleh MPRS.

Pasal 2.

Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pelaksanaan daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun, akan dituangkan dalam Rentjana Tahunan jang tertjermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara serta kebidjaksanaan-kebidjaksanaan lainnja.

Pasal 3.

Penuangan dalam Rentjana Tahunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perobahan dan perkembangan keadaan jang memerlukan penjesuaian terhadap Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal: 30 Desember 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAL — TNI

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1969/70 — 1973/74

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 319 TAHUN 1968

tentang

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

I

REPUBLIK INDONESIA

REPELITA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1969/70 — 1973/74

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 319 TAHUN 1968

tentang

REPELITA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

I

REPUBLIK INDONESIA

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

1969/70 — 1973/74

DAFTAR ISI KESELURUHAN

BUKU PERTAMA

U M U M

Bab I Tudjuan, Sasaran dan Kebidjaksanaan
Bab II Sumber-sumber Pembiajaan
Bab III Neratja Pembajaran Internasional
Bab. IV Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa
Bab V Administrasi Pemerintah, Pelaksanaan Rentjana dan Rentjana Operasionil Tahunan

BUKU KEDUA

RENTJANA BIDANG-BIDANG

Bab VI Pertanian dan Irigasi
Bab VII Industri, Pertambangan dan Tenaga Listrik
Bab VIII Perhubungan dan Pariwisata
Bab IX A g a m a
Bab X Pendidikan dan Tenaga Kerdja
Bab XI Kesehatan dan Keluarga Berentjana
Bab XII Perumahan dan Kesedjahteraan Sosial
Bab XIII Tertib Hukum dan Penerangan
Bab XIV Transmigrasi dan Koperasi
Bab XV Pertahanan dan Keamanan Nasional
Bab XVI Penelitian dan Pengembangan Statistik

BUKU KETIGA

PERINTJIAN MENURUT DAERAH

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1969/70 — 1973/74

DAFTAR ISI

BUKU I

U M U M

Bab I Tudjuan, Sasaran dan Kebidjaksanaan 11

Bab II Sumber-sumber Pembiajaan 33

Bab III Neratja Pembajaran Internasional 69

Bab IV Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa 93

A. Pembangunan Daerah 100

B. Pembangunan Desa .....

Bab V Administrasi Pemerintah, Pelaksanaan Rentjana dan Rentjana Operasionil Tahunan 113

A. Administrasi Pemerintah 113

B. Pelaksanaan Rentjana dan Rentjana Operasionil Tahunan 127

BAB I

TUDJUAN, SASARAN DAN KEBIDJAKSANAAN

B A B I

TUDJUAN, SASARAN DAN KEBIDJAKSANAAN

Ketika dalam tahun 1945 bangsa Indonesia menjatakan kemerdekaannja, maka terbukalah harapan bahwa dalam alam kemerdekaan ini dapat diusahakan pembangunan jang sungguh-sungguh membawa rakjat Indonesia pada peningkatan taraf hidup dan kemadjuan.

Kekajaan alam, keadaan iklim dan geografi jang menguntungkan, bersama dengan tenaga kerdja jang tjukup memberikan kepada Indonesia potensi pembangunan jang besar.

Dimasa pendjadjahan potensi ini hanja dikembangkan setjara terbatas bagi kepentingan pendjadjah, dengan mengolah pertanian, chususnja perkebunan, jang hasilnja untuk bagian terbesar diolah diluar negeri. Hal ini mengakibatkan bahwa struktur ekonomi Indonesia adalah berat sebelah agraris jang berorientasi pada ekspor.

Dengan diproklamasikannja kemerdekaan Indonesia, diharapkan agar tenaga dan bakat rakjat Indonesia dapat digunakan untuk merombak ekonomi kearah pembaharuan dan kemadjuan. Harapan ini selama puluhan tahun kemerdekaan ini belum djuga terwudjud, dan menimbulkan kekesalan, putus-asa dan frustrasi jang semakin lama semakin besar.

Selama puluhan tahun dimasa lampau, ekonomi diabdikan kepada politik. Prinsip-prinsip ekonomi jang rasionil diabaikan. Sumber kekajaan dalam dan luar negeri diboroskan. Akibat langsung dari hal ini adalah kemerosotan ekonomi jang dibarengi dengan proses hyper inflasi jang semakin gawat. Kekurangan terasa dibanjak bidang, seperti pangan, tekstil, alat-alat produksi, spare-parts, bahan baku dan lain-lain. Sistim irigasi, perkebunan, pertambangan, pabrik, djaringan djalan, listrik, air minum, kereta api, landasan penerbangan, pelabuhan dan fasilitas telekomunikasi praktis terbengkalai.

Produksi pangan tidak meningkat setjepat pertumbuhan penduduk. Hasil ekspor merosot dengan tadjam, sedangkan impor dimungkinkan oleh semakin meningkatnja hutang luar negeri.

Lapangan pekerdjaan semakin sempit akibat merosotnja kegiatan ekonomi. Satu-satunja lapangan pekerdjaan jang senantiasa bertambah adalah aparat pemerintahan. Pertambahan pegawai mendorong kenaikan dalam pembiajaan routine kepegawaian. Akan tetapi djumlah jang tersedia dalam nilai riil tidak sebanding dengan besarnja kepegawaian, sehingga pendapatan jang diterima masing-masing pegawai mendjadi ketjil.

Semua ini mengakibatkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi selama puluhan tahun ini sangatlah rendah, lebih-lebih djika dibandingkan dengan tingkat pertambahan penduduk, sehingga setjara riil pendapatan per djiwa penduduk mengalami kemunduran atau stagnasi.

Keadaan serupa ini menjebabkan bahwa rupa-rupa fasilitas kehidupan sosial tidak terawat dan terladeni setjara tjukup. Fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi, ibadah dan lain-lain tidak mampu untuk mengikuti kebutuhan. Perkembangan pendidikan tidak sedjalan dengan perkembangan ekonomi, sehingga mengakibatkan pengangguran sardjana.

Semua ini menumbuhkan iklim putus asa, atjuh-tak-atjuh, kehilangan minat, serta semangat tak ambil peduli, dan keseluruhan hidup masjarakat dihinggapi kelesuan, keketjewaan dan frustrasi.

Lahirnja Orde Baru memungkinkan pendobrakan salah urus dalam segala bidang terutama dalam bidang ekonomi jang diwariskan oleh Orde Lama. Hakekat dari landasan idiil kebidjaksanaan baru ini adalah pembinaan sistim ekonomi jang mendjamin kelangsungan demokrasi ekonomi kearah terwudjudnja masjarakat adil makmur berdasarkan Pantja Sila.

Kebidjaksanaan tersebut tertuangkan dalam program djangka pendek berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXIII jang bersa-

saran pengendalian inflasi, pentjukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor dan pentjukupan kebutuhan sandang. Untuk mentjapai sasaran-sasaran tersebut, maka salah satu garis kebidjaksanaan jang terpenting adalah mentjiptakan iklim de-kontrol dan de-birokratisasi, sehingga memungkinkan berkembangnja daja kreasi masjarakat setjara optimal, tanpa mengurangi pembimbingan Pemerintah melalui berbagai kebidjaksanaan.

Tugas utama dari pemerintahan baru adalah untuk menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan jang sehat bagi pertumbuhan ekonomi jang wadjar. Untuk memungkinkan ini diperlukan terlebih dahulu pengendalian ladju inflasi dan usaha rehabilitasi ekonomi. Hanja apabila ladju inflasi telah dapat dikendalikan dan suatu tingkat stabilisasi tertjapai, barulah dapat diharapkan pulihnja kegiatan ekonomi jang wadjar serta terbukanja kesempatan bagi peningkatan produksi.

Sedjak Oktober 1966, untuk lebih dari dua tahun, setjara mantap dilakukan kebidjaksanaan stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik. Apabila ditelaah perkembangan ekonomi selama dua tahun terachir ini, maka kentaralah bahwa lambat tetapi pasti keadaan stabilisasi ekonomi mulai tertjapai.

Apabila ditahun 1966 tingkat inflasi, sebagaimana tertjermin dalam tingkat kenaikan indeks biaja hidup, mentjapai 650 persen, maka dalam tahun 1967 tertjapailah tingkat sebesar 120 persen. Sedangkan untuk tahun 1968 tertjapai tingkat inflasi sebesar 85 persen.

Sungguhpun kenaikan harga masih terdapat, akan tetapi kentaralah bahwa garis perkembangan ekonomi kita mendjurus kearah stabilisasi. Disamping itu tampaklah pula bahwa nilai ekspor kita menundjukkan kenaikan djika dibandingkan dengan tahun jang lalu. Ekspor termasuk minjak bumi dan overprice naik, sedangkan tjadangan devisa tidaklah menundjukkan garis turun. Dalam pola impor tampak pula kemadjuan dalam komposisi barang-barang. Sekarang lebih dari separoh adalah untuk bahan baku dan barang modal.

Dibidang produksipun terdapat kemadjuan djika dibandingkan dengan keadaan tahun lalu. Hal ini terutama kentara dalam produksi beras, tekstil, minjak, timah, nikel, karet dan lain-lain.

Semua ini memberi pertanda bahwa lambat tapi pasti terbinalah landasan bagi dilangsungkannja proses pembangunan. Pembangunan haruslah dilakukan setjara bertahap dan berentjana dan didasarkan pada kenjataan dan kemampuan jang ada.

Kemampuan kita dewasa ini masih sangat terbatas, sungguhpun setjara potensiil kita miliki potensi-potensi jang besar. Dalam keadaan jang serba terbatas ini maka kita tidak memiliki kesempatan untuk mengedjar pelbagai matjam kebutuhan setjara serentak. Djustru karena itulah maka diperlukan pembangunan setjara berentjana untuk mengedjar setjara bertahap pemenuhan kebutuhan itu.

Oleh karena itu maka perlu diperingatkan bahwa pembangunan tidaklah segera akan memberi kepuasan dan pemenuhan setjara menjeluruh. Lain dari pada itu perlu pula dikemukakan bahwa ichtiar pembangunan tidaklah identik dengan hasil pembangunan. Semua orang menghasrati pembangunan untuk memetik hasil-hasil dan manfaat pembangunan. Akan tetapi mengusahakan pembangunan memerlukan sikap hidup jang berani mengurangi konsumsi, berani menabung dan memupuk modal serta rela untuk dipadjak. Usaha pembangunan memerlukan tjutjuran keringat, kerdja-keras dan pengorbanan jang tidak ketjil.

Hasil pembangunan ini tidak segera akan terasa. Hasil djerihpajah hari ini baru akan terpetik beberapa waktu kemudian. Menjadari hal ini sepenuhnja maka sudah sewadjarnja apabila kita tidak mengharap terlalu banjak dalam waktu terlalu pendek.

Jang penting adalah agar masjarakat Indonesia mengetahui kearah mana bangsa dan negara kita dibawa. Apa jang dapat diharapkan terdjadi dihari esok. Apa perspektif dimasa depan. Dan apa pula jang belum dapat diharapkan dengan segera.

Maka dengan tertjapainja landasan-landasan jang memungkinkan pelaksanaan pembangunan disusunlah Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang bertudjuan untuk menaikkan taraf kehidupan Rakjat banjak dan jang sekaligus meletakkan dasar-dasar jang kuat bagi Pembangunan Nasional dalam tahap-tahap jang berikutnja. Rentjana tersebut sepenuhnja memperhatikan kemampuan jang kita miliki dewasa ini dan tetap memegang teguh perspektif tudjuan djangka pandjang. Dengan demikian Rentjana Pembangunan tersebut disusun dengan pendekatan jang realistis dan pragmatis serta berlandaskan pada aspirasi-aspirasi Rakjat.

Adapun sasaran pembangunan jang hendak ditjapai sangatlah sederhana, jaitu: pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan Rakjat, perluasan lapangan pekerdjaan dan kesedjahteraan rochani.

Dalam melaksanakan pembangunan ini maka titik beratnja dipusatkan pada bidang pertanian. Dengan demikian medan-djuang jang dipilih adalah medan pertanian. Disinilah sasaran-sentral diletakkan, ichtiar dipusatkan dan hasil diharapkan.

Pilihan pada sektor pertanian bukanlah sekedar pilihan belaka. Pilihan didasarkan pada strategi pembangunan untuk mendobrak keterbelakangan ekonomi kita melalui proses pembaharuan dibidang pertanian.

Keadaan iklim, tanah dan persediaan tenaga kerdja memungkinkan adanja kemadjuan pesat dibidang pertanian. Lebih-lebih berkat adanja tehnologi baru, bibit-bibit baru, dan tjara-tjara baru.

Peningkatan produksi dibidang pertanian-pangan ini berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harga pangan dalam negeri dapat lebih dimantapkan, dan dengan begitu turut memberi pengaruh jang positif pada stabilisasi ekonomi. Dan hanja dalam ekonomi jang stabillah dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi jang pesat.

Peningkatan produksi pangan djuga memungkinkan dikuranginja impor beras dari luar negeri, dan dengan demikian turut memberi sumbangan bagi usaha penghematan devisa.

Peningkatan produksi pertanian tidak sadja terbatas pada pangan dan chususnja beras. Tidak kurang pentingnja adalah peningkatan mutu dan produksi perkebunan. Hasil-hasil perkebunan untuk bagian terbesar masih diekspor. Peningkatan mutu dan produksi perkebunan memungkinkan peningkatan hasil-hasil ekspor.

Mengingat langkanja persediaan devisa dalam ekonomi Indonesia, maka setiap penambahan devisa selalu menguntungkan. Hasil devisa dapat kelak digunakan lebih landjut untuk mengimpor barang-barang modal dan alat-alat perlengkapan jang berguna bagi pembangunan. Bahkan devisa hasil perkebunan kemudiannja dapat dimanfaatkan untuk mengimpor kebutuhan produksi pertanian, sehingga terdjadilah hubungan timbal-balik jang setjara kumulatif mendorong pembangunan semakin madju.

Serentak dengan madjunja sektor pertanian, maka lain-lain sektor turut pula terangsang pembangunannja. Peningkatan produksi pertanian menarik sektor industri jang menghasilkan bahan-bahan baku jang diperlukan oleh sektor pertanian. Pupuk, semen, insectisida, pestisida, dan bahan kimia lainnja akan ikut terangkat oleh peningkatan produksi pertanian. Sehingga terbukalah kesempatan untuk memperluas produksi dari bahan-bahan ini.

Peningkatan produksi pertanian djuga memerlukan kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian. Mesin huller, penggilingan padi, mesin crumb rubber, ataupun industri perkajuan dan kertas, adalah beberapa tjontoh dari industri jang ikut terangsang pertumbuhannja berkat kemadjuan produksi pertanian.

Disamping itu ada kekuatan penarik lain terhadap industri. Produsen hasil pertanian, berkat kenaikan produksi ini, akan bertambah pendapatannja. Pertambahan mana lazimnja diperbelikannja untuk barang-barang jang tidak dihasilkan disektor pertanian. Hal ini berarti bahwa permintaan akan barang-barang industri mulai menampakkan diri. Sehingga merangsang pembangunan industri jang meladeni kebutuhan konsumen disektor pertanian.

Kemantapan harga pangan berkat peningkatan produksi pangan, turut memantapkan biaja upah, sehingga sektor industri dapat bekerdja dengan pola-biaja jang tidak terlalu gontjang, bahkan jang dapat mendekati stabilisasi. Iklim ini bakal merangsang aktivitas industri, sehingga dapat diharapkan timbulnja perluasan usaha, dan setjara kumulatif gerak pembangunan disektor industri.

Lain dari pada itu sektor pertanian djuga dipilih oleh karena bagian terbesar dari rakjat Indonesia hidup dari sektor ini. Sebagai petani produsen ataupun buruh tani maka bagian terbesar rakjat Indonesia bekerdja disektor pertanian. Maka pembangunan pertanian sekaligus djuga meningkatkan pendapatan dari bagian terbesar rakjat Indonesia, dan dengan demikian memungkinkan peningkatan Pendapatan Nasional.

Maka djelaslah bahwa pilihan medan-djuang disektor pertanian didasarkan pada pertimbangan strategi jang luas. Pembangunan disektor pertanian diduga dapat membuka kemungkinan bagi dirangsangnja pertumbuhan dilain-lain sektor, sehingga terbukalah kesempatan bagi usaha jang setjara serentak dapat mendobrak dinding keterbelakangan ekonomi Indonesia.

Bertolak dari strategi ini, maka lain-lain sektor merupakan penundjang dan pendorong pertanian. Baik sektor industri, djasa-djasa ataupun prasarana, diutamakan fungsinja masing-masing sebagai penundjang dan pendorong sektor pertanian. Dengan demikian terdapat pula unsur pengarahan dari pembangunan dilain-lain sektor. Dan tertjiptalah kini ukuran objektif untuk menentukan skala prioritas dari usaha dimasing-masing sektor.

Sungguhpun sektor pertanian mendjadi medan-djuang sentral dalam strategi pembangunan, namun patut dipertimbangkan faktor-faktor pembatas lainnja jang membatasi ruang gerak usaha bagi tertjapainja sasaran pertanian. Faktor-faktor pembatas jang terpenting adalah penjediaan devisa.

Posisi devisa negara kita dewasa ini menderita karena perlu melunasi hutang-hutang luar negeri jang dibuat oleh Pemerintah

jang lampau. Pelunasan hutang ini berarti bahwa devisa jang sama tidak bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara kita karena harus disisihkan untuk pembajaran hutang tersebut.

Hal ini mendorong keperluan untuk sedjauh mungkin turut meringankan beban ini, melalui usaha jang menghasilkan devisa dan usaha-usaha jang menghemat penggunaan devisa. Usaha jang merangsang ekspor dan usaha mengganti impor dengan begitu menduduki tempat jang penting.

Disamping perkebunan maka pertambangan adalah pula sektor jang menghasilkan devisa. Garis perkembangan disini adalah bahwa lambat-laun pertambangan harus mampu meningkatkan kwalitas bahan jang diekspornja. Apabila dewasa ini nickel umpamanja masih diekspor dalam wudjud lumpur, maka lambat-laun haruslah beralih keusaha pengolahan tahap permulaan. Sehingga dengan pengolahan ini kwalitas ekspor dapat ditingkatkan.

Dalam rangka kegiatan menghemat devisa, sangatlah penting kedudukan industri jang mampu menggantikan impor. Pola impor sesungguhnja memberi petundjuk mengenai komposisi dari pasaran ekonomi kita.

Hal ini berarti bahwa pasaran sudah tersedia didalam negeri. Apabila kini produksi dalam negeri menampung pasaran ini maka usaha penggantian impor dapat diselenggarakan pula. Kombinasi kebidjaksanaan bea masuk, padjak, perkreditan dan kebidjaksanaan pembangunan industri akan dapat mentjapai sasaran untuk membangun industri-industri jang menghemat devisa.

Dalam hubungan ini penting disebut disini industri tekstil. Djumlah impor jang besar ditahun-tahun jang lampau mentjerminkan besarnja kebutuhan dan luasnja pasaran akan tekstil. Djaminan adanja pasaran ini memudahkan usaha pembangunan industri tekstil didalam negeri.

Pembinaan industri tekstil tidak sadja penting dari sudut menggantikan impor tetapi djuga penting dari sudut penam-

pungan tenaga kerdja, perangsangan kegiatan ekonomi didaerah, penjebar-luasan pengertian tehnologi dalam masjarakat jang agraris, dan lain-lain. Menilik tjiri-tjiri ini, maka industri menduduki posisi penting, dan karena itu mendapat sorotan jang chusus dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini.

Bagaimana djugapun pentingnja usaha-usaha disektor pertanian, industri dan pertambangan kiranja djelas bahwa usaha ini sangat bergantung pula pada kondisi prasarana ekonomi.

Pertumbuhan masjarakat sehabis perang dunia telah menimbulkan kebutuhan akan djasa-djasa prasarana jang semakin meningkat. Berhadapan dengan meningkatnja kebutuhan dan pemakaian prasarana ini, maka usaha rehabilitasi dan perluasan prasarana berikut fasilitasnja tidak dilakukan.

Akibat semua ini adalah bahwa hampir disegala bidang prasarana tampaklah kemunduran dalam kwalitas dan kondisi prasarana. Untuk mengedjar ketinggalan dalam perbaikan djalan-djalan agar dapat memenuhi kebutuhan volume dan intensitas lalu-lintas diperlukan waktu kira-kira sepuluh tahun. Dalam masa lima tahun ini diharapkan agar ketinggalan ini dapat diperketjil.

Sedjalan dengan mundurnja prasarana djalan-djalan, maka volume angkutan membebani djasa-djasa kereta api. Dipertahankannja tarif kartjis pada suatu tingkat dalam masa inflasi menjebabkan bahwa tarif riil mendjadi murah. Hal ini meningkatkan permintaan akan angkutan kereta api ini. Akan tetapi berhadapan dengan peningkatan permintaan ini, perusahaan kereta api itu sendiri tidak mampu untuk memelihara, merawat ataupun mengembangkan fasilitas angkutan kereta api.

Akibatnja adalah bahwa kwalitas dan mutu djasa-djasa kereta api semakin mundur. Dewasa ini sebagian terbesar dari peralatan kereta api mentjapai usia 40 tahun lebih. Sehingga djelas menondjol kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh kereta api untuk menampung kenaikan volume lalu-lintas.

Apabila perhubungan darat menderita kesukaran, maka tak beda keadaannja dengan perhubungan laut. Fasilitas pelabuhan

dan lain-lain sarana perhubungan laut banjak terbengkalai tidak terawat. Ketinggalan dalam pengerukan lumpur pelabuhan misalnja sudah terlalu besar. Fasilitas jang tidak tjukup dipelabuhan menjebabkan bahwa waktu peredaran kapal-kapal tidak effisien.

Bidang penerbangan hadapi kesulitan fasilitas pelabuhan udara jang tidak memungkinkan penggunaannja setjara penuh, sehingga pesawat terbang terpaksa dipakai setjara tidak effisien.

Hubungan telekomunikasi dikepulauan jang tersebar selajaknja menduduki tempat jang penting. Akan tetapi hingga kini hubungannja hanja terbatas pada beberapa daerah dan pertumbuhannja tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan.

Setjara sepintas tampaklah bahwa kondisi prasarana sangatlah tertinggal dengan kebutuhan jang senantiasa bertambah.

Kondisi jang buruk dari prasarana ekonomi menjebabkan bahwa sangat banjak dana harus diberikan disektor ini untuk mengedjar ketertinggalan rehabilitasi prasarana ekonomi ini. Terbatasnja dana pembiajaan dan sebaliknja besarnja kerusakan prasarana ekonomi, menjebabkan bahwa perlu diadakannja pilihan mengenai lokasi dan matjam perbaikan jang diperlukan.

Dalam hubungan ini maka skala prioritas sebagaimana tertjermin dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun dapat memberi petundjuk mengenai lokasi dan matjamnja prasarana jang perlu diperbaiki.

Pembangunan prasarana djuga menimbulkan kebutuhan akan bahan baku, bengkel-bengkel, alat-alat perlengkapan dan lain-lain keperluan jang dapat pula dihasilkan didalam negeri. Ini dapat pula ditampung oleh pertumbuhan industri dalam negeri.

Maka tampaklah bahwa setjara umum strategi pembangunan mentjakupi tiga pokok bidang jang strategis, jakni pertanian, industri dan pertambangan, dan prasarana. Pertumbuhan dimasing-masing sektor itu saling kait-mengait dengan sektor-sektor lainnja. Dan dari pertumbuhan ekonomi ini, kemudiannja akan tersimpul pula kebutuhan akan komposisi tenaga kerdja

serta tenaga ahli, guna meladeni produksi dimasing-masing sektor. Sehingga tampillah kedepan suatu „pola tenaga kerdja" jang dibutuhkan.

Haruslah diakui bahwa bahan-bahan informasi masih kurang untuk memperintji lebih landjut „pola tenaga kerdja" ini. Akan tetapi dapatlah diduga bahwa usaha intensifikasi dan perluasan produksi pangan membutuhkan lebih banjak tenaga kerdja. Dalam hubungan ini patutlah diperingatkan bahwa peningkatan produksi pangan tidaklah memerlukan pertambahan tenaga kerdja setjara sebanding. Namun dapatlah diramalkan bahwa berkat „effek berganda" dari kegiatan pembangunan ini maka kesempatan-kerdja dapat bertambah.

Pembangunan pertambangan dan kehutanan akan memerlukan tenaga kerdja, dan chususnja tenaga-tenaga ahli. Rehabilitasi irigasi, rehabilitasi djalan, dan prasarana lainnja akan memerlukan alat-alat perlengkapan, akan tetapi disamping itu memerlukan pula banjak tenaga kerdja.

Dalam perentjanaan pertumbuhan industri maka tekanan utama diberikan pada penampungan tenaga kerdja. Hal ini lebih-lebih berlaku bagi industri ringan dan keradjinan rakjat.

Tumbuhnja kesempatan-kesempatan kerdja akibat investasi, lebih-lebih jang dilangsungkan didaerah-daerah jang tidak padat penduduknja diluar Djawa, sekaligus djuga mendjadi penarik bagi tenaga kerdja baru, sehingga memudahkan pemindahan atau transmigrasi daripada tenaga kerdja baru ini.

Maka muntjullah disini pendekatan atas transmigrasi jang berbeda dengan dimasa lampau. Tempo hari usaha transmigrasi merupakan ichtiar jang sadar untuk memindahkan manusia dari daerah jang padat kedaerah jang kurang padat penduduknja.

Dewasa ini usaha transmigrasi ditempatkan sebagai bahagian dari usaha pembangunan. Adanja kegiatan-kegiatan dan kesempatan kerdja mendjadi faktor penarik bagi gerakan transmigrasi. Sehingga setjara langsung transmigrasi turut mendjadi faktor penundjang bagi kegiatan pembangunan. Dan transmi-

grasi merupakan bagian dari pada penjerasian antara kesempatan kerdja dan tenaga kerdja.

Dalam usaha meningkatkan kesempatan tenaga kerdja dan mengurangi under-employment tidak kurang pula pentingnja usaha pemaduan bantuan pangan dari luar negeri untuk upah kerdja (food-for-work program). Maka djelasnja bahwa kesempatan kerdja akan bertambah dalam masa lima tahun Rentjana Pembangunan.

Salah satu segi dari masalah penduduk adalah program „keluarga berentjana". Program keluarga berentjana tidak sadja penting untuk mengurangi ketjepatan penduduk sehingga berguna bagi kenaikan pendapatan per djiwa penduduk, akan tetapi program ini djuga bermanfaat bagi peningkatan kesehatan ibu chususnja, dan keluarga pada umumnja. Program ini lazimnja tidak memerlukan biaja jang sangat besar. Jang dibutuhkan adalah kebulatan niat masjarakat untuk melaksanakannja setjara sungguh-sungguh.

Keluarga berentjana merupakan bagian daripada program kesehatan jang lebih luas. Peningkatan effisiensi dan lajanan kesehatan setjara lebih luas dikalangan rakjat merupakan sasaran jang ingin ditjapai selama lima tahun i[illegible]. Kesehatan tidak sadja penting bagi pribadi akan tetapi djuga bagi kepentingan masjarakat seluruhnja. Tingkat produktivitas kerdja akan semakin meningkat djika kesehatan semakin madju, sehingga kesehatan tidak sadja merupakan usaha jang ber-perikemanusiaan akan tetapi djuga penting bagi pertumbuhan ekonomi dan hidup kemasjarakatan jang sehat.

Skala prioritas dalam rentjana pembangunan djuga penting bagi perentjanaan pendidikan. Selama ini sistim dan program pendidikan tidak diserasikan dengan kebutuhan pembangunan, sehingga timbullah gedjala pengangguran sardjana. Dengan semakin menondjolnja usaha pembangunan semakin kentara pulalah kebutuhan jang lebih banjak akan tenaga tehnik dan kedjuruan.

Untuk meladeni kebutuhan ini maka dalam Rentjana Pembangunan ini pendidikan diarahkan kepada pengadaan lebih landjut daripada tenaga tehnik dan kedjuruan jang diperlukan ini.

Dalam mengartikan makna pendidikan perlulah dikemukakan bahwa jang dimaksudkan adalah pendidikan dalam arti luas, jang meliputi peningkatan ketrampilan dan ketjerdasan, pendidikan agama dan lain-lain.

Dalam rangka pembinaan nilai dan martabat manusia Indonesia jang mempunjai landasan falsafah Pantja Sila, maka setjara sadar perhatian diberikan pula kepada agama. Dalam hubungan ini direntjanakan agar sarana pelaksanaan agama sesuai dengan kepertjajaan masing-masing orang, seperti kitab-kitab sutji, rehabilitasi dan pembangunan tempat peribadatan dapat lebih ditingkatkan.

Disamping kebutuhan untuk membina masjarakat jang madju ekonominja, sehat djasmaniah dan rohaniahnja, berpendidikan dan beragama, maka tak kurang pentingnja adalah keperluan untuk menumbuhkan kesadaran hukum, djaminan dan kepastian hukum bagi warga negaranja, sehingga terbinalah pula Indonesia sebagai Negara Hukum. Untuk memungkinkan tertjapainja ini, maka direntjanakan agar sarana hukum dapat lebih ditingkatkan.

Pelbagai rentjana pembangunan ini lazimnja tertuang dalam projek-projek pembangunan. Oleh karena kekajaan dan sumber-sumber alam terdapat didaerah-daerah, maka sudah sewadjarnja apabila projek-projek pembangunan terletak didaerah. Dengan memperhatikan kondisi serta potensi ekonomi jang dimiliki tiap daerah, maka diperhatikan pula dalam Rentjana Pembangunan ini agar projek-projek pembangunan tersebar dalam banjak daerah, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung mentjakupi bagian terbesar daerah ditanah air kita ini.

Apabila projek-projek pembangunan jang terdapat didaerah kemudiannja digabungkan dan ditambah dengan usaha jang se-

tjara chas terdapat dalam daerah tertentu, maka dapatlah dilahirkan rentjana pembangunan daerah.

Rentjana pembangunan daerah ini pada azasnja adalah identik dengan rentjana pembangunan nasional sebagai keseluruhan, akan tetapi jang setjara chusus ditjupliki kegiatan-kegiatan didalam dimensi daerah.

Maka demikianlah tampak garis strategi pembangunan jang dianut dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Dengan tudjuan mentjapai usaha pembangunan jang memungkinkan proses pembaharuan kearah pendobrakan dinding ketertinggalan ekonomi, maka sasaran-sasaran ditjurahkan setjara sentral kepada pembangunan pertanian, untuk kemudian bertolak dari sini menjimpulkan pembangunan dilain-lain sektor, seperti industri, pertambangan, prasarana, tenaga kerdja, pendidikan, pembangunan daerah dan lain-lain.

Sifat simultanitas dan terarah dari strategi pembangunan pada sasaran jang mantap, diduga dapat memberi dorongan jang tjukup besar bagi pendobrakan ekonomi Indonesia dari perangkap keterbelakangan ekonominja. Djangka waktu jang dibutuhkan untuk dapat mentjapai tahap ini tentulah tidak dalam satu kali pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Ichtiar jang terus-menerus untuk bertahun-tahun diperlukan hingga tertjapai momentum bagi proses berandjaknja ekonomi (take-off).

Didalam melaksanakan pentjapaian sasaran ini, maka niat Pemerintah adalah untuk merangsang sebanjak mungkin dana dan tenaga, baik didalam sektor pemerintahan sendiri maupun dalam sektor swasta, dalam dan luar negeri.

Usaha pembangunan dalam makna pendobrakan perangkap keterbelakangan ekonomi tidaklah mungkin dilakukan dengan permodalan jang ketjil. Saling berkaitannja pelbagai sektor, menandakan betapa luas dan banjaknja modal jang dibutuhkan. Oleh karena itu maka keserasian dan harmoni dalam kerdjasama antara sektor Pemerintah dan swasta sangatlah dibutuhkan.

Pada azasnja Pemerintah mentjurahkan diri pada kegiatan-kegiatan jang tidak menguntungkan dan menarik minat swasta, seperti halnja dengan prasarana. Pemerintah djuga perlu terdjun kesektor dimana swasta menundjukkan keraguan berhubung dengan sifat kepeloporan jang melekat pada usaha tersebut. Akan tetapi sedjauh mungkin usaha swastalah jang dirangsang kedjurusan jang dikehendaki.

Kebidjaksanaan moneter, fiskal dan perbankan dapat membantu pengarahan investasi ini. Bila ini hendak ditjapai, tidaklah berarti bahwa lain-lain sektor ataupun tjabang industri tidak penting. Modal swasta bebas untuk memilih wilajah kegiatannja, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan. Melalui perangsang dan daja tarik digairahkan industri memasuki bidang-bidang jang ingin dibina pertumbuhannja. Untuk mendjamin hasil jang maksimal disini, maka sangatlah penting tertjiptanja iklim jang menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Pentjiptaan iklim ini tidak bergantung semata-mata pada perangsang ekonomi, akan tetapi tak kurang pentingnja adalah daja penerimaan masjarakat untuk djuga menghajati dan menghasrati pembangunan.

Untuk membiajai Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini maka digali sumber-sumber keuangan dari tabungan Pemerintah, kredit djangka menengah dan pandjang dari perbankan, penanaman modal dan re-investasi oleh perusahaan swasta nasional, perusahaan asing serta perusahaan negara, dan bantuan luar negeri berupa bantuan program, bantuan projek dan bantuan teknis.

Haruslah diakui bahwa selama kemampuan kita masih terbatas, maka perlu dimanfaatkan dana-dana luar negeri, baik berupa kredit maupun penanaman modal, selama dana-dana ini tidak diikuti ikatan-ikatan politik dan dapat dipertanggung-djawabkan penggunaannja setjara ekonomis. Hal ini sangat penting untuk memungkinkan pembajaran kembali hutang-hutang luar negeri dari hasil peningkatan pertumbuhan eko-

nomi, sehingga tidak membebani terlalu berlebihan para anak-tjutju dan generasi jang akan datang.

Sungguhpun dana-dana luar negeri memegang peranan penting, namun pusat perhatian tetap harus diletakkan pada penggalian sumber-sumber pembiajaan didalam negeri. Oleh karena itu adalah suatu perkembangan jang baik, apabila selama dua tahun terachir ini, penerimaan Pemerintah dari sumber-sumber dalam negeri semakin meningkat. Untuk tahun-tahun depan penghimpunan tabungan Pemerintah akan terus ditingkatkan. Dengan tabungan Pemerintah dimaksudkan penerimaan Pemerintah dari sumber dalam negeri jang melebihi pengeluaran routine Pemerintah.

Supaja tabungan Pemerintah meningkat maka diusahakan agar pengeluaran-pengeluaran negara jang tidak essensiil dan tidak produktif dikurangi, sungguhpun pengeluaran routine dalam tahun-tahun depan mengalami kenaikan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, biaja pemeliharaan djalan dan service lainnja.

Disamping tabungan Pemerintah maka tidak kurang pentingnja adalah tabungan perusahaan untuk keperluan re-investasi dan tabungan masjarakat umum. Untuk merangsang mobilisasi tabungan perusahaan jang lebih besar diambil langkah-langkah kebidjaksanaan dibidang penilaian kembali modal perusahaan dan ichtiar lainnja. Sedangkan gerakan tabungan deposito perbankan merupakan salah satu ichtiar untuk merangsang tabungan masjarakat.

Usaha tabungan serupa ini, baik tabungan Pemerintah, perusahaan maupun masjarakat, dapat lebih ditingkatkan apabila didukung oleh kebulatannja untuk menghajati pembangunan. Disiplin, kerdja keras dan pembatasan napsu konsumsi merupakan tjiri-tjiri dari semangat pembangunan. Pelbagai kebutuhan jang mendesak bagi kelompok atau golongan perlu dikorbankan dan dikebawahkan demi kepentingan umum untuk pembangunan.

Agar terdjamin penggunaan dana pembiajaan pembangunan setjara effisien maka projek-projek dipersiapkan setjara matang. Oleh karena itu maka tak djemu-djemunja dalam Rentjana Pembangunan ini diungkapkan bahwa suatu projek jang tertjantum belum merupakan djaminan atau kepastian akan dilaksanakan, sebelum didahului oleh suatu survey atau penelaahan feasibility jang membenarkan pembangunan projek itu.

Mengingat pentingnja survey dan penelaahan feasibility bagi pembangunan projek, maka pun dibidang penelaahan ini diusahakan perentjanaan setjara tepat.

Akan tetapi sungguhpun projek-projek ini setjara tehnis dapat dipertanggung-djawabkan, namun suksesnja sangat tergantung pada partisipasi masjarakat dalam proses ini. Dalam hubungan inilah sangat penting kebidjaksanaan penerangan untuk merangsang kegairahan masjarakat dalam proses pembangunan. Terlalu lama masjarakat diketjewakan oleh matjam-matjam rentjana dan slogan pembangunan. Terlalu sering pula usaha dimulai dengan keributan upatjara untuk kemudian hilang tak tentu.

Akibat daripada pengalaman ini timbullah rasa sjak, atjuh tak atjuh, kesangsian dan keraguan pada setiap ichtiar baru. Bahkan lebih djauh lagi masjarakat ragu-ragu akan kemampuan bangsa kita sendiri untuk membangun dan merobah nasibnja sendiri. Untuk memungkinkan pelaksanaan Rentjana Pembangunan setjara lantjar adalah suatu keharusan untuk mendobrak semangat keraguan dan kesangsian ini.

Pembangunan tidaklah semata-mata bergantung pada kegiatan investasi. Sangat penting adalah niat dan kehendak masjarakat untuk membangun. Dan lebih djauh lagi, kesadaran dan keberanian untuk menampung segala persjaratan serta akibat-akibat daripada proses pembangunan tersebut.

Untuk melaksanakan tugas pembangunan setjara sungguh-sungguh maka apparatur pemerintahan, baik dipusat maupun didaerah, akan ditingkatkan effisiensinja. Disamping itu setjara berkala ditelaah dan dinilai kemadjuan fisik jang telah

ditjapai dalam pelaksanaan Rentjana Pembangunan untuk dihadapkan pada djumlah biaja jang telah dikeluarkan. Pengawasan jang tepat dan terus-menerus akan memungkinkan pelaksanaan Rentjana Pembangunan setjara lantjar.

Oleh karena sifat Rentjana Pembangunan Lima Tahun adalah pemberian indikasi daripada arah perkembangan menurut skala prioritas pembangunan jang tertentu maka program-program pembangunan dinjatakan setjara umum dan tidak terlalu terperintji. Hal ini adalah wadjar mengingat bahwa bahan-bahan informasi masih sangat kurang, lebih-lebih untuk memperkirakan perkembangan ekonomi dimasa lima tahun depan ini. Oleh karena itu tidaklah tepat untuk memastikan angka atau usaha setjara kaku selama lima tahun jang akan datang ini.

Dalam hubungan ini maka Rentjana Pembangunan Lima Tahun setjara terperintji dan lengkap dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara sebagai perwudjudan daripada Rentjana Tahunan. Dalam rentjana tahunan inilah akan lebih terperintji projek-projek mana jang akan dikerdjakan, dengan sasaran dan biaja jang terang. Oleh karena Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara setiap tahun dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, maka otomatis materi Rentjana Pembangunan Lima Tahun mendjadi bahan pembahasan bagi lembaga perwakilan Rakjat Indonesia.

Apabila Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini berhasil dilaksanakan maka diharap akan tertjapailah beberapa sasaran tertentu dalam pelbagai bidang kegiatan. Dalam Tabel I-1 tampaklah bahwa produksi beras bersasaran kenaikan sebesar 46,5 persen, produksi bahan ekspor seperti kelapa sawit naik dengan 59,8 persen, produksi minjak bumi naik dengan 50,1 persen, produksi semen naik dengan 175 persen dan produksi pupuk naik dengan 767 persen.

Kenaikan produksi ini tentu berpengaruh baik bagi tingkat pertumbuhan ekonomi. Banjak rentjana-rentjana biasanja menggunakan tingkat pertumbuhan ekonomi jang menjeluruh

sebagai sasaran kemudian diperhitungkan kebutuhan investasi dalam kerangka pendekatan makro-ekonomi.

Dalam Rentjana Pembangunan ini terlebih dahulu ditetapkan sasaran bagi sektor-sektor tertentu sadja, untuk kemudian ditetapkan kebutuhan investasi. Keperluan investasi ini kemudian diserasikan dengan pembiajaannja jang tersedia, untuk kemudian disusun kembali dalam rangka pembatasan pembiajaan.

Sebab utama ditempuh tjara-tjara perentjanaan parsiil ini adalah akibat kurangnja data-data informasi untuk keseluruhan ekonomi. Ketjuali itu hyper-inflasi jang dalam masa lampau mengganas ditanah air kita telah merusak hubungan perbandingan antara pelbagai barang dan djasa dalam ekonomi. Dirasa kurang bidjaksana untuk dewasa ini mendasarkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun pada bahan-bahan atau data makro-ekonomi jang tidak mantap.

Sungguhpun untuk keseluruhan ekonomi tidak ditentukan sasaran tingkat pertumbuhan ekonomi, namun diperkirakan bahwa hasil jang ditjapai setjara parsiil dalam pelbagai sektor ini dapat serasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen setahun.

Oleh karena pertambahan penduduk meningkat dengan lebih kurang dua setengah persen setahun maka pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen setahun berarti kenaikan pendapatan per djiwa penduduk sebesar dua setengah persen pula. Apabila perkembangan dimasa lima tahun ini berdjalan lantjar, maka bukan tidak mungkin bahwa tingkat pertumbuhan akan lebih dari lima persen setahun.

Akan tetapi djauh lebih penting daripada perhitungan-perhitungan makro-ekonomi serupa ini adalah perentjanaan jang teliti, jang mendjamin keserasian atau konsistensi antara rentjana-rentjana berbagai sektor dan persiapan jang sungguh dapat dipertanggung-djawabkan dalam perentjanaan projek-projek serta dalam perumusan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan.

Kesemuanja ini dilakukan dalam rangka perentjanaan jang mendjamin adanja keluwesan, sehingga dapat diselenggarakan penjesuaian-penjesuaian jang diperlukan dalam menghadapi perkembangan keadaan.

Jang lebih penting lagi tentunja adalah pelaksanaan daripada Rentjana Pembangunan tersebut. Dalam hubungan inilah dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun diberikan perhatian chusus kepada aparatur pemerintahan, pelaksanaan rentjana dan rentjana operasionil tahunan.

Achirnja berhasil tidaknja Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini akan tergantung banjak dari tanggapan, pengertian, kesadaran dan partisipasi Rakjat Indonesia dalam menjambut tantangan pembangunan ini setjara positif guna meratakan djalan bagi anak-tjutju dan generasi jang akan datang untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila.

TABEL I - 1.

SARAN-SARAN FISIK RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN.

Sektor	Kesatuan	Sasaran		Persentase Kenaikan
		1969/70	1973/74	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian				
Beras	djuta ton	10,52	15,42	46,5
Kelapa Sawit				
— minjak	ribu ton	172	275	59,8
— inti	ribu ton	41	68	65,8
G u l a	ribu ton	677	907	33,9
Kopra (Perk. Negara)	ribu ton	1,1	1,5	36,3
Tjoklat (Perk. Negara)	ton	815	1.625	99,3
Djagung	djuta ton	3,37	4,23	25,5
Katjang-katjangan	djuta ton	0,95	1,40	47,3
Sajur-sajuran dan buah-buahan	djuta ton	8,30	11,20	34,9
Ubi-ubian	djuta ton	15,66	18,09	15,5
I k a n	ribu ton	1.423	1.969	38,3
K a j u	ribu m^3	2.900	7.900	172,4
S u s u	djuta kg.	2,04	5,09	149,5
Daging	djuta kg.	64,34	107,90	67,7
Telur	djuta kg.	4,69	15,12	222,3
Pertambangan				
Minjak bumi	djuta bbl.	293	440	50,1
Timah	metric ton	16,16	19,4	19,9
Bauxit	ribu ton	1.000	1.200	20
Industri				
Tekstil	djuta m.	450	900	100
Pupuk				
— N	ribu ton	46,5	403,5	767
— P	ribu ton	18 (1971)	168	833

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Semen	ribu ton	600	1.650	175
Kertas	ribu ton	16	166,5	940,6
Tenaga Listrik	ribu Kw.	659	1.084	64,4
Perhubungan				
Telekomunikasi				
— Nomor tilpun	ribu	177,1	257,5	45,4
Pos				
— Kantor Pos tambahan	buah	774	784	1,3
— Rumah Pos	buah	1.418	1.708	20,5
Rehabilitasi				
Lintas Kereta Api	km.	—	715 (dlm. 5 tahun).	—
Djumlah lokomotip diesel	buah	285	341	19,6
Rehabilitasi djalan	km.	—	11.225 (dlm. 5 tahun).	—
Upgrading djalan2	km.	—	6.000 (dlm. 5 tahun).	—
Kesehatan				
Pusat Kesehatan Masjarakat	buah	1.227	4.216	243,6
Balai Pengobatan	buah	6.800	8.000	17,6
B.K.I.A.	buah	5.600	7.500	33,9
Klinik lengkap Keluarga Berentjana	buah	300	1.200	300
Pendidikan				
Perbandingan S.M.P. dari Sekolah Tehnik/ Kedjuruan	—	100:80 (1967)	100:98	
Perbandingan S.M.A. dari S.T.M./Kedjuruan	—	100:84	100:112	

BAB II

SUMBER-SUMBER PEMBIAJAAN

BAB II

SUMBER-SUMBER PEMBIAJAAN

Untuk mentjapai perkembangan ekonomi jang lajak selama masa Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini dan untuk membangun kemampuan bagi perkembangan selandjutnja dimasa datang, maka segala sumber-sumber keuangan jang dibutuhkan, harus dimobilisir dan dimanfaatkan untuk melaksanakan rentjana tersebut. Tugas ini adalah tugas jang berat bagi setiap negara, akan tetapi chususnja di Indonesia hal tersebut adalah lebih sulit karena selama beberapa tahun jang lampau Indonesia mengalami salah satu keadaan keuangan jang paling parah jang pernah dialami oleh dunia dewasa ini.

Hiper-inflasi jang disertai dengan hantjurnja sistem pemungutan pendapatan negara, kehantjuran daripada sistem perbankan, penjelundupan jang meradjalela, pelarian modal keluar negeri serta penumpukan hutang-hutang luar negeri hampir-hampir membawa negara kepada kebangkrutan. Salah satu tugas pokok daripada Pemerintah oleh karenanja ialah menanggulangi masalah-masalah tersebut dan memulihkan kembali sistim keuangan Indonesia kepada fungsinja jang normal. Banjak kemadjuan jang telah ditjapai didalam masa dua tahun terachir ini, akan tetapi djalan jang harus ditempuh adalah masih djauh sebelum diperoleh tjara-tjara jang sepenuhnja effektif didalam memobilisir sumber-sumber keuangan, serta mengawasi penggunaannja setjara effisien untuk mendorong pembangunan negara. Oleh karenanja Pemerintah dan Rakjat Indonesia bertekad untuk bergerak madju setjepat mungkin melaksanakan tugas ini didalam lima tahun jang akan datang.

Dewasa ini sangatlah sulit untuk menentukan djumlah keseluruhan investasi dan tabungan untuk lima tahun jang akan datang. Perkiraan-perkiraan pendapatan nasional dan produksi nasional sangat meragukan serta komponen-komponen tabung-

910086-(3).

an dan investasi pun sangat lemah. Daripada mentjoba membuat rentjana atas dasar jang tidak pasti ini, maka ruang lingkup perentjanaan pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini dibatasi kepada djumlah-djumlah jang segera dapat dikwantifisir. Walaupun demikian, inflasi harga dan stagnasi produksi dimasa jang lampau telah sedemikian merusak hubungan-hubungan dasar ekonomi sehingga sangatlah sulit untuk mengukur apa jang telah terdjadi, apalagi mengadakan projeksi mengenai pola-pola dimasa jang akan datang. Perentjanaan fiskal dan keuangan didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini oleh karenanja ditekankan kepada penentuan arah kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang akan ditempuh serta beberapa daripada sasaran-sasaran jang hendak ditjapai. Semuanja ini akan ditindjau kembali setiap tahunnja dalam rangka persiapan penjusunan anggaran belandja dan pendapatan negara.

Disebabkan oleh karena kegagalan-kegagalan didalam sistim keuangan dan fiskal dimasa jang lampau, dan djuga disebabkan oleh karena kekatjauan ekonomi serta tingkat perkembangan jang rendah, maka djumlah investasi didalam ekonomi selama bertahun-tahun sangat terbatas. Persediaan modal nasionalpun malahan telah menurun didalam nilai riilnja. Dengan demikian maka investasi perlu ditingkatkan dengan tjepat didalam beberapa tahun jang akan datang ini untuk menggerakkan ekonomi Indonesia kearah perbaikan dan seterusnja menudju perkembangan jang lajak.

Landasan utama daripada perentjanaan kita ialah melaksanakan suatu usaha pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri, jang berarti bahwa sumber-sumber keuangan didalam negeri harus dimobilisir sebanjak mungkin untuk membiajai rentjana tersebut, sedangkan sumber-sumber luar negeri hanjalah dimaksudkan untuk mengisi kekurangan jang masih diperlukan. Akan tetapi harus diakui bahwa warisan keadaan keuangan jang sangat parah dari masa lampau menjebabkan bahwa dewasa ini kemampuan tabungan dalam negeri masih sangat terbatas. Keadaan objektif ini menjebabkan bahwa pada taraf permulaan ini sebagian daripada investasi harus dibiajai oleh

modal luar negeri. Sementara itu Pemerintah dengan sepenuh tenaga akan meneruskan usaha-usahanja untuk meningkatkan tabungan dalam negeri sedjalan dengan kebidjaksanaan jang telah ditempuhnja didalam meningkatkan pendapatan negara serta merangsang penjimpanan uang dibank. Dalam hubungan ini Pemerintah akan tetap memelihara suatu keseimbangan jang lajak antara tabungan melalui perpadjakan dan sistim fiskal pada satu pihak dan mobilisasi tabungan setjara sukarela melalui lembaga-lembaga keuangan dilain pihak guna mentjapai suatu potensi perkembangan maksimal daripada tabungan dalam negeri.

SUMBER-SUMBER DAN PROGRAM PEMBIAJAAN

Sumber-sumber keuangan jang diharapkan untuk membiajai investasi didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini diperkiraan akan berdjumlah Rp. 1.420 miljar didalam djangka waktu lima tahun. Dari djumlah ini pembiajaan melalui Anggaran Pembangunan Negara adalah sebesar Rp. 1.059 miljar sedangkan pembiajaan diluar Anggaran berdjumlah Rp. 361 miljar (Tabel II-1). Djumlah untuk tahun 1969/70 diperkirakan sebesar Rp. 161 miljar, diantaranja jang melalui Anggaran Pembangunan Negara adalah sebesar Rp. 123 miljar. Semua perkiraan-perkiraan ini dinjatakan dalam harga-harga konstan achir tahun 1968.

Sumber-sumber pembiajaan Anggaran Pembangunan Negara terdiri dari tabungan Pemerintah, nilai lawan bantuan program dan bantuan projek serta bantuan tehnis (Tabel II-2). Jang dimaksudkan dengan tabungan Pemerintah ialah surplus daripada anggaran routine Pemerintah, sehingga besarnja akan bergantung kepada usaha-usaha peningkatan penerimaan dan usaha-usaha penghematan pengeluaran routine Pemerintah. Diperkirakan bahwa tabungan Pemerintah didalam tahun 1969/70 adalah sebesar Rp. 24 miljar, jang merupakan perbedaan antara penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 228 miljar dan pengeluaran routine sebesar Rp. 204 miljar (Tabel II-3).

TABEL II - 1

PROGRAM PEMBIAJAAN INVESTASI RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN, 1969/70 - 1973/74

(dalam miljar rupiah, harga-harga achir 1968)

	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1969/70-1973/74
1. Anggaran Pembangunan Negara	123	153	223	264	296	1.059
2. Lain-lain	38	54	72	89	108	361
Djumlah	161	207	295	353	404	1.420

TABEL II - 2

SUMBER-SUMBER PEMBIAJAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGARA, 1969/70 - 1973/74

(dalam miljar rupiah, harga-harga achir 1968)

	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1969/70-1973/74
a. Tabungan Pemerintah 1)	24	33	43	55	71	226
b. Nilai lawan bantuan program 2)	63	75	85	85	85	393
c. Bantuan projek 3)	36	45	95	124	140	440
Djumlah	123	153	223	264	296	1.059

1) Tabungan Pemerintah = Penerimaan Dalam Negeri — Pengeluaran Routine Pemerintah.

2) Diluar jang dipergunakan untuk kredit djangka pendek.

3) Termasuk bantuan projek jang disalurkan melalui bank dan bantuan tehnis.

TABEL II - 3

TABUNGAN PEMERINTAH, 1960/70 — 1973/74
(dalam miljar rupiah, harga-harga achir 1968)

	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1969/70 1973/74
1. Penerimaan dalam negeri [1]	228	276	324	374	428	1.630
2. Pengeluaran routine [2]	204	243	281	319	357	1.404
3. Tabungan Pemerintah	24	33	43	55	71	226
(sebagai % terhadap penerimaan dalam negeri)	(10,5)	(12,0)	(13,0)	(14,7)	(16,6)	(13,9)

[1] Total Kenaikan 1969/70 - 1973/74 = 87,7 %
[2] Total Kenaikan 1969/70 - 1973/74 = 75 %

Ini adalah suatu langkah madju dari tahun 1968 dimana tidak terdapat tabungan Pemerintah. Selandjutnja diharapkan bahwa djumlah tabungan Pemerintah tersebut akan meningkat setiap tahunnja sehingga mentjapai djumlah Rp. 71 miljar didalam tahun 1973/74 sebagai akibat daripada sasaran kenaikan penerimaan dalam negeri dan pengeluaran routine masing-masing sebesar 87,7 persen dan 75 persen didalam periode 1969/70-1973/74. Perkiraan daripada tahun-tahun jang lain diperoleh berdasarkan ekstrapolasi. Dengan mengingat kepada kesanggupan jang terbatas didalam meningkatkan tabungan masjarakat didalam djangka pendek maka tabungan Pemerintah memainkan suatu peranan jang penting didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang pertama ini jang seluruhnja berdjumlah Rp. 226 miljar didalam djangka waktu lima tahun. Tabungan Pemerintah ini didalam tahun 1969/70 adalah sebesar 10,5 persen daripada penerimaan dalam negeri dan kemudian meningkat mendjadi 16,6 persen didalam tahun 1973/74. Sum-

TABUNGAN PEMERINTAH
1969/70 — 1973/74
(DALAM MILJAR RUPIAH HARGA² ACHIR 1968)

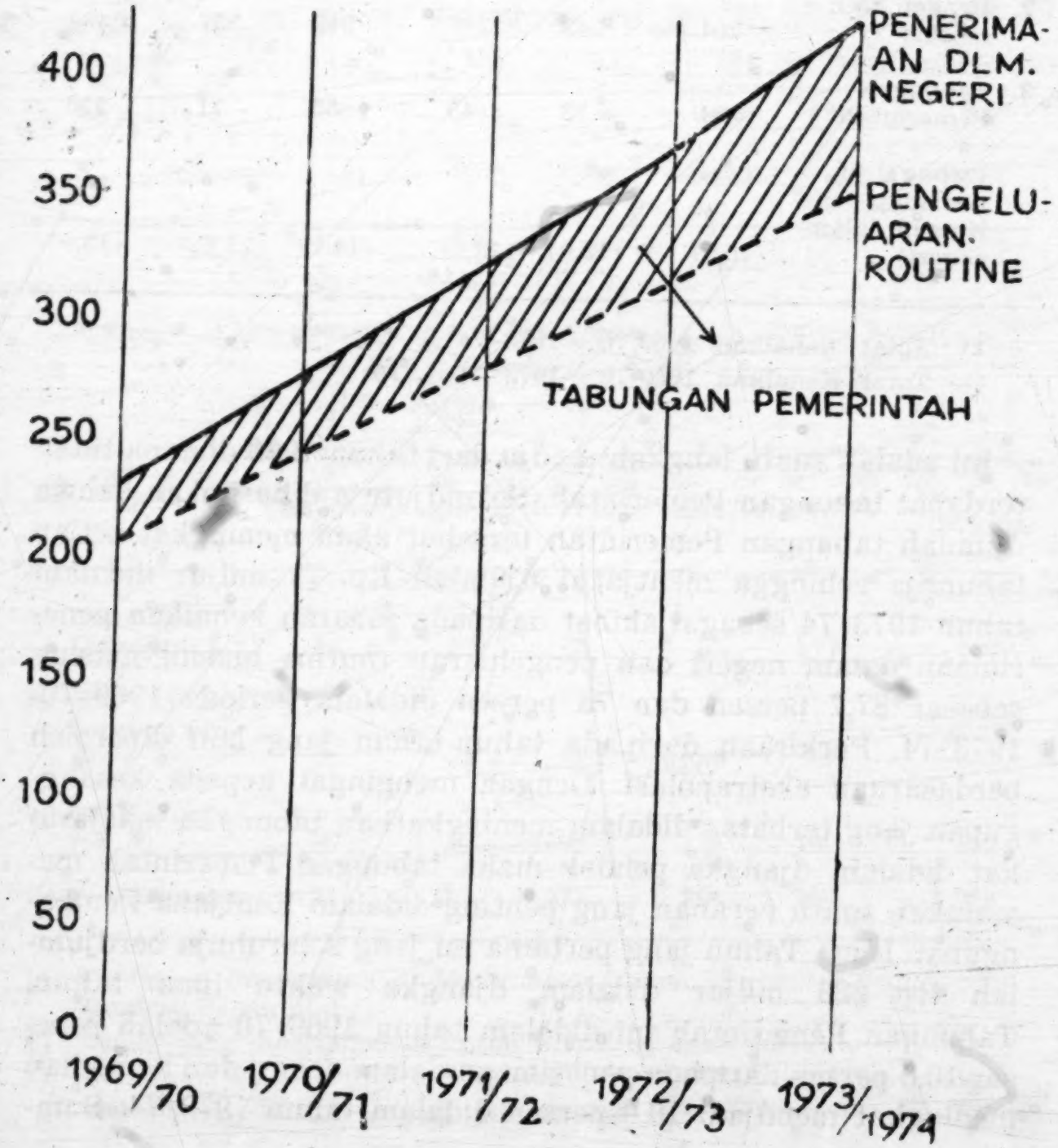

ber jang kedua adalah nilai lawan bantuan program untuk anggaran pembangunan, diluar jang dipergunakan untuk kredit djangka pendek. Termasuk disini adalah nilai lawan daripada kredit-kredit luar negeri jang di-BE-kan, bantuan-bantuan pangan dan PL-480. Didalam tahun 1969/70 dan tahun-tahun permulaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun, nilai lawan rupiah untuk anggaran pembangunan tersebut adalah rendah oleh karena adanja subsidi terhadap pengimporan beberapa bahan pangan serta kredit djangka pendek jang diberikan untuk pengimporan beberapa barang terutama pupuk dan kapas. Didalam tahun-tahun selandjutnja diharapkan bahwa pembiajaan kredit djangka pendek dari nilai lawan tersebut tidak perlu lagi bersifat penuh sedangkan pipeline-pun akan tjukup terbentuk sehingga sebagian besar daripada nilai lawan rupiah bantuan program tersebut dapat dimasukkan kedalam anggaran pembangunan untuk pembiajaan investasi-investasi pada umumnja. Sumber jang ketiga daripada anggaran pembangunan ini adalah bantuan projek dan bantuan tehnis jang djumlahnja diharapkan akan meningkat setiap tahunnja dari Rp. 36 miljar didalam tahun 1969/70 sehingga mentjapai Rp. 140 miljar didalam tahun 1973/74.

Sumber-sumber pembiajaan diluar Anggaran Pembangunan terdiri dari kenaikan kredit bank djangka menengah dan pandjang dan penanaman modal setjara langsung (Tabel II-4). Kredit bank djangka menengah dan pandjang ini diharapkan akan dibiajai sebagian dari simpanan-simpanan uang dibank sebagai akibat daripada program pemerintah dewasa ini untuk merangsang penjimpanan uang dibank. Sebagian lainnja diharapkan untuk dibiajai dari kenaikan riil djumlah uang, oleh karena dengan makin meningkatnja stabilitas harga-harga maka orang akan lebih suka menahan uangnja sehingga terdjadilah suatu kenaikan didalam permintaan riil akan uang untuk membiajai aktivitas-aktivitas pembangunan. Perkiraan-perkiraan jang dibuat masih bersifat kasar sekali. Djumlah kredit bank untuk investasi ini diharapkan akan meningkat setiap tahunnja sehingga mentjapai djumlah Rp. 95 miljar di-

dalam waktu lima tahun jang akan datang. Sumber lain adalah penanaman modal setjara langsung. Adalah sangat sulit untuk memperkirakan perkembangannja. Sesuai dengan rentjana sektor-sektor maka djumlahnja diperkirakan akan mentjapai Rp. 266 miljar didalam waktu lima tahun. Dari djumlah ini diharapkan Rp. 25 miljar akan ditanam didalam tahun 1969/70. Sumber ini meliputi penanaman modal dan penanaman kembali (re-investasi) oleh perusahaan swasta dalam negeri, perusahaan swasta asing dan perusahaan negara. Adalah sulit untuk memperkirakan sumber ini setjara kwantitatip. Pemerintah akan mendjalankan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang lebih mendorong penanaman modal swasta, baik dalam negeri maupun asing, terutama didalam bidang-bidang industri, pertambangan, perikanan dan kehutanan. Djuga akan didjalankan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang lebih mendorong re-investasi laba perusahaan, baik perusahaan negara maupun swasta.

TABEL II - 4

SUMBER-SUMBER PEMBIAJAAN DILUAR ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGARA, 1969/70 - 1973/74

(dalam miljar rupiah, harga-harga achir 1968)

	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1969/70-1973/74
a. Kenaikan kredit bank djangka menengah/ pandjang	13	15	19	22	26	95
b. Penanaman modal setjara langsung 1)	25	39	53	67	82	266
Djumlah	38	54	72	89	108	361

1) Meliputi penanaman modal dan penanaman kembali (re-investasi) oleh perusahaan swasta dalam negeri, perusahaan swasta asing dan perusahaan negara.

Segala perkiraan-perkiraan jang dibuat setjara kwantitatip mengenai sumber-sumber pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini adalah bersifat kasar sekali disebabkan oleh karena kurangnja data-data statistik, akan tetapi semuanja ini akan ditindjau kembali setiap tahunnja bilamana sudah terdapat lebih banjak informasi.

Sumber-sumber jang disebutkan diataspun belum mentjerminkan keseluruhan sumber-sumber jang ada didalam masjarakat untuk investasi, akan tetapi merupakan sumber-sumber jang langsung berada dibawah pengawasan atau sedikit banjak dapat dipengaruhi oleh pemerintah. Pembiajaan sendiri jang didjalankan oleh masjarakat setjara langsung misalnja pembangunan sekolah-sekolah setjara sukarela, pembelian alat-alat pertanian dan perbaikan saluran-saluran irigasi jang didjalankan sendiri oleh para petani, dana-dana jang dapat dikumpulkan dari pelaksanaan zakat bagi umat Islam dan lain-lain, semuanja merupakan sumber-sumber jang tersedia bagi pembangunan ekonomi, akan tetapi dewasa ini masih sangat sulit untuk mengadakan perkiraan-perkiraan setjara kwantitatip. Pemerintah akan mendjalankan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang merangsang mobilisasi dana-dana tersebut serta penggunaannja kearah investasi-investasi jang menguntungkan negara dan masjarakat. Chususnja bagi dana-dana jang dapat dikumpulkan dari pelaksanaan zakat bagi umat Islam, akan diusahakan untuk menjempurnakan penjelenggaraan pengumpulan serta penggunaannja jang effektif kearah sektor-sektor jang penting jang dibenarkan oleh agama. Selandjutnja akan ditelaah kemungkinan pengerahan dana-dana lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan adjaran agama. Ditindjau dari djumlah sumber-sumber jang disebutkan tadi, maka **investasi jang didjalankan didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini belum mentjerminkan keseluruhan investasi jang sesungguhnja ada didalam masjarakat.**

Sumber-sumber jang telah disebutkan, terdiri dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri dan sumber-sumber Pemerintah maupun swasta. Ditindjau dari segi ini maka Ren-

tjana Pembangunan Lima Tahun ini pada satu pihak mempunjai ruang lingkup jang lebih besar daripada rentjana sektor Pemerintah, walaupun pada lain pihak belum lagi merupakan suatu rentjana pembangunan makro-ekonomis jang bersifat menjeluruh.

Semua sumber-sumber luar negeri jang diperkirakan disini adalah sesuai dengan apa jang diprojeksikan didalam neratja pembajaran akan tetapi jang disini dinjatakan didalam nilai rupiah atas dasar kurs Rp. 350 = $ 1, ketjuali untuk nilai lawan bantuan program berhubung dengan unsur subsidi dan kredit djangka pendek dari nilai lawan tersebut.

Sumber-sumber jang disebutkan disini hanja meliputi sumber-sumber dana untuk investasi modal tetap. Disamping itu masih terdapat lagi sumber-sumber dana untuk pembiajaan modal kerdja jang bersifat djangka pendek. Kredit djangka pendek ini diharapkan akan dibiajai sebagian dari simpanan-simpanan uang dibank dan kenaikan riil djumlah uang serta dari nilai lawan bantuan program. Djumlah kredit djangka pendek ini didalam tahun 1969/70 diperkirakan akan berdjumlah antara Rp. 60 miljar sampai dengan Rp. 85 miljar. Kredit djangka pendek ini merupakan sumber jang komplementer dan walaupun tidak dimasukkan sebagai salah satu sumber pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun, namun setiap tahunnja akan dipersiapkan program-program kredit tahunan bagi seluruh sistim perbankan untuk mendjamin bahwa penggunaan kredit-kredit tersebut, baik kredit-kredit djangka pendek maupun djangka menengah dan pandjang, adalah konsisten dengan prioritas-prioritas daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Distribusi daripada Anggaran Pembangunan Negara menurut bidang dan sektor didalam tahun 1969/70 dan tahun 1969/70 — 1973/74 diberikan didalam Tabel II-5. Sesuai dengan prioritas program pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi rakjat maka bidang jang ditekankan adalah bidang ekonomi jang meliputi sektor-sektor pertanian dan irigasi, industri dan pertambangan, tenaga listrik, perhubungan

dan pariwisata dan desa. Bidang jang kedua adalah bidang sosial jang meliputi sektor-sektor kesehatan dan keluarga berentjana, pendidikan dan kebudajaan, agama, tertib hukum dan lain-lain. Bidang jang ketiga adalah bidang umum jang meliputi sektor-sektor pertahanan dan keamanan, administrasi pemerintahan umum dan lain-lain.

TABEL II - 5

ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT BIDANG/SEKTOR 1969/70 dan 1969/70 - 1973/74
(dalam miljar rupiah, harga-harga achir 1968)

Bidang/Sektor	1969/70	1969/70-1973/74
A. **Bidang Ekonomi**	94,4	829
1. Pertanian dan Irigasi	35,1	319
2. Industri dan Pertambangan	18,3	130
3. Tenaga Listrik	10,9	100
4. Perhubungan dan Pariwisata	27,1	230
5. Desa	3,0	50
B. **Bidang Sosial**	19,6	172
1. Kesehatan dan Keluarga Berentjana	4,6	42
2. Pendidikan dan Kebudajaan	10,5	95
3. Sosial lain-lain	4,5	35
C. **Bidang Umum**	9,3	58
1. Pertahanan dan Keamanan	4,0	28
2. Umum lain-lain	5,3	30
D j u m l a h	123,3	1.059

Setjara sektoral maka didalam tahun 1969/70, urut-urutan pembiajaan dari Anggaran Pembangunan Negara adalah pertanian dan irigasi Rp. 35,1 miljar, perhubungan dan pariwisata Rp. 27,1 miljar, industri dan pertambangan Rp. 18,3 miljar, tenaga listrik Rp. 10,9 miljar, pendidikan dan kebudajaan Rp. 10,5 miljar, sedangkan masing-masing sektor lainnja mendapatkan kurang dari Rp. 6 miljar. Setjara keseluruhan dida-

lam waktu lima tahun dimana djumlah sumber-sumber jang tersedia dari anggaran meningkat mendjadi kurang lebih 8,5 kali tahun 1969/70 maka urut-urutan pembiajaan menurut bidang dan sektor hampir tidak berobah ketjuali untuk desa jang pembiajaannja meningkat hampir 17 kali. Setjara sektoral maka didalam bidang ekonomi sektor-sektor pertanian dan irigasi, tenaga listrik dan desa masing-masing meningkat mendjadi lebih dari 8,5 kali tahun 1969/70 sedangkan sektor-sektor industri dan pertambangan, perhubungan dan pariwisata meningkat kurang dari 8,5 kali. Hal ini disebabkan oleh karena diharapkan makin meningkatnja pembiajaan dari luar Anggaran Pembangunan Negara untuk sektor-sektor tersebut terutama sektor industri dan pertambangan. Didalam bidang sosial, sektor-sektor kesehatan dan keluarga berentjana, pendidikan dan kebudajaan meningkat lebih dari 8,5 kali sedangkan sektor-sektor sosial lainnja dan sektor-sektor didalam bidang umum masing-masing meningkat kurang dari 8 kali tahun 1969/70.

Untuk sektor-sektor jang mendapat pembiajaan dari luar Anggaran Pembangunan Negara maka didalam tahun 1969/70, industri dan pertambangan mendapatkan Rp. 28 miljar, pertanian dan irigasi Rp. 8 miljar, perhubungan dan pariwisata Rp. 2 miljar sedangkan didalam djangka waktu lima tahun industri dan pertambangan mendapatkan Rp. 250 miljar, pertanian dan irigasi Rp. 76 miljar dan perhubungan dan pariwisata Rp. 35 miljar (Tabel II-6). Dengan demikian maka ditindjau dari keseluruhan sumber-sumber jang ada, maka didalam tahun 1969/70 sektor industri dan pertambangan mendapatkan Rp. 46,3 miljar, pertanian dan irigasi Rp. 43,1 miljar, perhubungan dan pariwisata Rp. 29,1 miljar, sedangkan didalam djangka waktu lima tahun, sektor pertanian dan irigasi kembali menduduki tempat teratas dengan disusuli oleh industri dan pertambangan baru kemudian sektor perhubungan dan pariwisata (Tabel II-7).

Perintjian pembiajaan dari sektor-sektor kedalam sub-sub sektor maupun kedalam program dan projek-projek, diberikan didalam bab-bab mengenai rentjana sektor-sektor.

PERSENTASE ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT BIDANG & SEKTOR 1969/70 – 1973/74

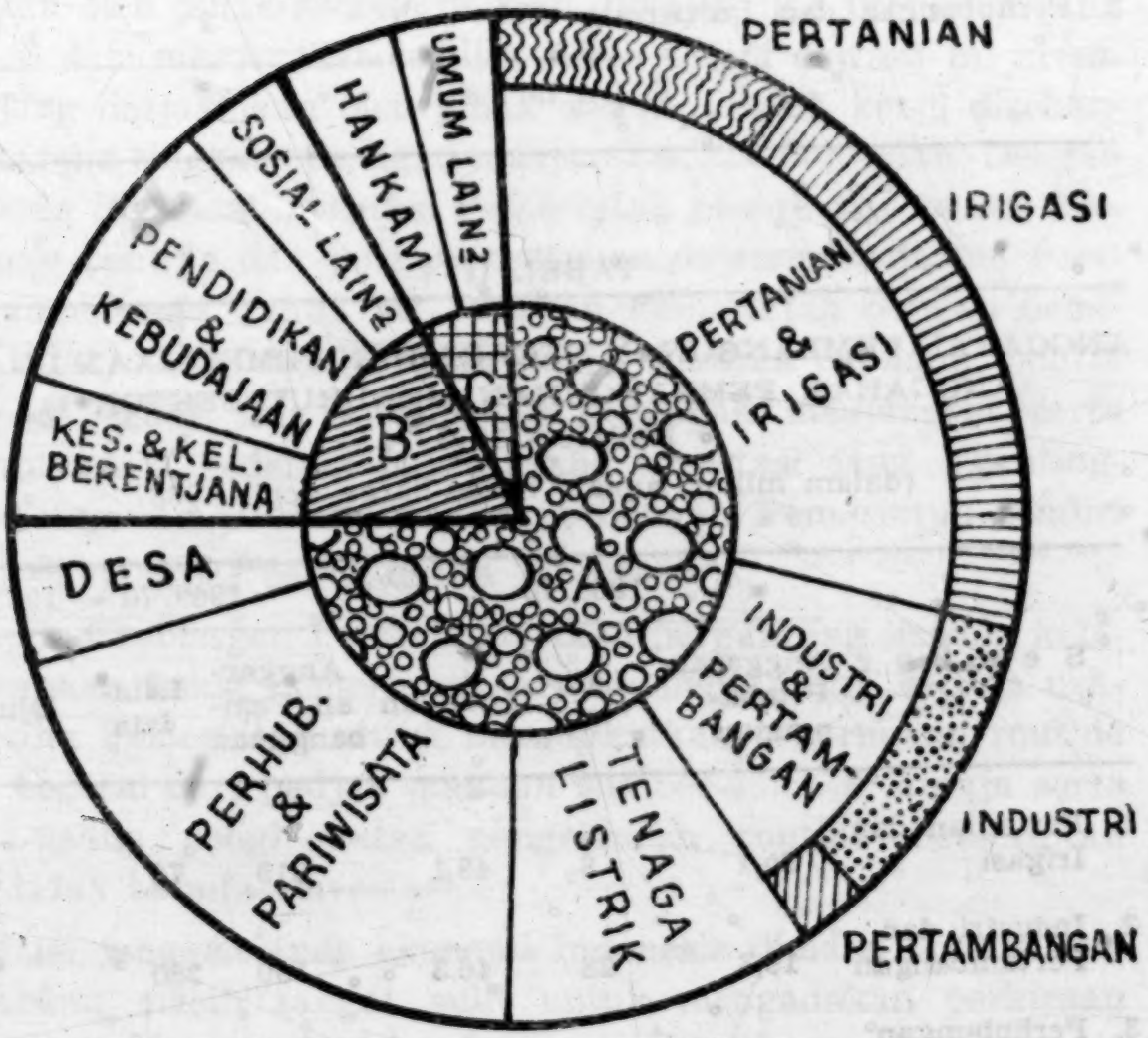

A : BIDANG EKONOMI
B : " SOSIAL
C : " UMUM

TABEL II - 6

PEMBIAJAAN DILUAR ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT SEKTOR, 1969/70 dan 1969/70 - 1973/74
(dalam miljar rupiah, harga-harga achir 1968)

Sektor	1969/70	1969/70 - 1973/74
1. Pertanian dan Irigasi	8	76
2. Industri dan Pertambangan	28	250
3. Perhubungan dan Pariwisata	2	35
Djumlah	38	361

TABEL II - 7

ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGARA DAN PEMBIAJAAN DILUAR ANGGARAN PEMBANGUNAN MENURUT SEKTOR 1), 1969/70 - 1973/74
(dalam miljar rupiah, harga-harga achir 1968)

Sektor	1969/70			1969/70 — 1973/74		
	Anggaran Pembangunan	Lain-lain	Djumlah	Anggaran Pembangunan	Lain-lain	Djumlah
1. Pertanian dan Irigasi	35,1	8	43,1	319	76	395
2. Industri dan Pertambangan	18,3	28	46,3	130	250	380
3. Perhubungan dan Pariwisata	27,1	2	29,1	230	35	265
Djumlah	80,5	38	118,5	679	361	1.040

1) Hanja untuk sektor-sektor jang djuga mendapat pembiajaan diluar Anggaran Pembangunan, jaitu Pertanian dan Irigasi, Industri dan Pertambangan, Perhubungan dan Pariwisata.

BIDANG FISKAL

Kebidjaksanaan pokok Pemerintah terhadap bidang swasta ialah sekedar memberikan bimbingan dan pengarahan agar sektor swasta berkembang setjara sehat dan wadjar. Pemerintah akan terdjun langsung kedalam bidang-bidang usaha jang vital dan jang menjangkut kesedjahteraan umum rakjat. Bidang-bidang lainnja hanja akan dimasuki oleh Pemerintah sepandjang tidak atau belum diusahakan setjukupnja oleh pihak swasta. Hal ini berarti bahwa sebagian besar investasi diharapkan agar dilaksanakan oleh pihak swasta dengan dibiajai oleh tabungan jang berasal dari masjarakat sendiri. Akan tetapi dewasa ini investasi jang didjalankan oleh pihak swasta adalah ketjil disebabkan karena tingkat tabungan masjarakat masih rendah. Dengan demikian investasi-investasi Pemerintah merupakan suatu faktor jang penting dan jang menentukan didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini. Peranan Pemerintah dengan demikian tidak sadja mentjiptakan suatu suasana ekonomi, politik maupun legaal jang mendorong tabungan masjarakat serta penjalurannja kedalam usaha-usaha investasi jang dipentingkan, tetapi djuga menghasilkan tabungan Pemerintah sendiri untuk membiajai usaha-usaha investasinja.

Tingkat tabungan Pemerintah akan bergantung kepada kebidjaksanaan fiskal Pemerintah, artinja bergantung kepada usaha-usaha Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan routine jang berasal dari padjak maupun sumber-sumber lainnja serta usaha-usaha penghematan pengeluaran routine Pemerintah jang tidak bersifat investasi.

Inflasi jang melanda ekonomi Indonesia dimasa lampau menjebabkan masih sangat sulit untuk mengadakan perkiraan kwantitatip jang tjukup tepat mengenai tabungan dalam negeri termasuk tabungan Pemerintah didalam lima tahun jang akan datang ini. Oleh karena itu perentjanaan pembiajaan sektor Pemerintah didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang pertama ini akan lebih banjak menekankan kepada penentuan arah kebidjaksanaan-kebidjaksanaan fiskal jang

akan ditempuh. Perkiraan-perkiraan kwantitatip hanja akan diadakan sepandjang dapat dibuat berdasarkan informasi-informasi jang ada serta sasaran-sasaran jang diinginkan dan jang kiranja dapat ditjapai dengan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan tersebut. Segala sesuatu dengan tjatatan bahwa semuanja kelak akan diperbaiki dan disesuaikan dengan keadaan sambil berdjalan. Hal ini adalah sesuai dengan sifat dinamis daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

1. Perkembangan fiskal sebelum 1966

Kebidjaksanaan fiskal sebelum tahun 1966 pada waktu itu adalah suatu kebidjaksanaan defisit tanpa ada batasnja. Sebagai sumber pembiajaan untuk pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, jang diutamakan adalah kredit perbankan dan kredit-kredit luar negeri jang digunakannja untuk membelandjai usaha-usaha jang non-produktip. Akibatnja, defisit Pemerintah mendjadi salah satu sumber inflasi jang utama didalam periode 1960-1965.

Didalam tahun-tahun 1955-1960 harga-harga meningkat dengan ladju rata-rata 25 persen setahun akan tetapi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah masih meningkat didalam nilai riilnja. Sebaliknja didalam periode 1960-1965 harga-harga meningkat dengan ladju rata-rata 226 persen setiap tahunnja sedang penerimaan maupun pengeluaran Pemerintah mengalami kemerosotan didalam nilai riilnja. Hal ini disebabkan karena inflasi jang tak terkendalikan mengakibatkan makin merosotnja pendapatan per-kapita, dasar pengenaan padjak kurang tepat, kapasitas administrasi padjak terbatas, dan perusahaan-perusahaan negara tidak mendatangkan laba bagi Pemerintah.

2. Keadaan fiskal dewasa ini

Warisan kebidjaksanaan fiskal dari keadaan sebelumnja djelas merupakan hal jang sangat menjedihkan. Oleh karena itu telah dilaksanakan beberapa kebidjaksanaan ekonomi jang diarahkan kepada peningkatan penerimaan Pemerintah dan menghilangkan defisit sebagai sumber inflasi.

Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara ditetapkan seimbang didalam tahun 1967, dan setjara riil mulailah terdapat suatu perbaikan didalam penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Harga naik dengan 120 persen, tetapi penerimaan naik dengan 550 persen dan pengeluaran dengan 200 persen, dibandingkan dengan tahun 1966. Salah satu hambatan jang masih ada didalam segi pengeluaran ialah belandja pegawai termasuk pensiun jang besar, walaupun penghasilan riil dari mereka tetap merosot disebabkan oleh adanja inflasi.

Perbaikan-perbaikan terus didjalankan didalam tahun 1968. Didalam tahun ini bukan sadja Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara ditetapkan seimbang, akan tetapi seluruh pengeluaran routine Pemerintah dibelandjai dari penerimaan-penerimaan dalam negeri. Pelbagai kebidjaksanaan didjalankan oleh Pemerintah, misalnja perbaikan administrasi dan pemungutan padjak; penggunaan sistim menghitung padjak sendiri (MPS) dan menghitung padjak orang lain (MPO); adanja fleksibilitas didalam penentuan golongan penghasilan; pengenaan padjak pendjualan atas barang-barang impor; kenaikan tarif dan penjesuaian kurs dasar penilaian impor dengan kurs BE dan lain-lain. Semuanja ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki sistim perpadjakan itu sendiri, akan tetapi masih mempunjai arti jang terbatas. Didalam segi pengeluaran, walaupun Pemerintah djuga telah mengadakan penghematan-penghematan jang besar, masih banjak jang perlu dilaksanakan untuk mengembalikan Anggaran Belandja Negara kepada kedudukannja sebagai alat untuk management dan kontrol daripada pengeluaran Pemerintah.

3. Pokok-pokok Kebidjaksanaan Fiskal didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun

Bagi sesuatu negara jang sedang berkembang maka instrumen-instrumen kebidjaksanaan Pemerintah jang penting adalah instrumen-instrumen fiskal jang terdiri dari padjak serta lain-lain tindakan jang memberikan penghasilan bagi Pemerintah,

910086-(4).

pengeluaran Pemerintah, dan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Melalui instrumen-instrumen ini Pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masjarakat.

Untuk membendung inflasi maka kebidjaksanaan fiskal ditekankan kepada peranan Anggaran Penerimaan dan Belandja Negara sebagai alat stabilisasi moneter. Disamping itu Anggaran Penerimaan dan Belandja Negara djuga memainkan peranan sebagai alat untuk pembangunan, artinja Pemerintah mendjalankan suatu kebidjaksanaan fiskal jang dapat memobilisir dana-dana jang tjukup bagi investasi-investasi Pemerintah dan jang mendorong tabungan masjarakat serta penjalurannja kepada pelbagai usaha investasi sesuai dengan prioritas pembangunan. Untuk itu, maka mulai dengan tahun 1969/70 ini Pemerintah akan mengusahakan adanja suatu surplus didalam anggaran routine sebagai suatu langkah madju daripada tahun 1968.

Dewasa ini masih sangat sulit untuk menentukan setjara terperintji tindakan-tindakan fiskal jang akan didjalankan oleh Pemerintah didalam lima tahun jang akan datang, sehingga apa jang dikemukakan disini hanjalah pokok-pokok dan arah umum daripada kebidjaksanaan fiskal jang akan ditempuh.

a. **Segi penerimaan**

Kebidjaksanaan pokok disini ialah suatu politik perpadjakan jang mendorong pembangunan, berupa: meningkatkan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan; merangsang tabungan masjarakat; mendorong investasi dan produksi; membantu redistribusi penghasilan kearah jang lebih seimbang, dan mudah didalam administrasinja.

Sebagaimana telah disebutkan, salah satu tudjuan politik perpadjakan ialah meningkatkan penghasilan Pemerintah. Kenaikan tersebut dapat bersifat otomatis oleh karena adanja perkembangan penghasilan nasional tanpa ada perobahan apa-apa didalam sistim perpadjakan itu sendiri. Bagi Indonesia jang

dewasa ini sangat rendah tingkat penghasilannja dengan ladju perkembangan jang rendah pula, maka amatlah sulit untuk menggantungkan diri kepada kenaikan sematjam ini. Pada lain pihak, kenaikan tersebut dapat djuga ditimbulkan oleh karena kebidjaksanaan Pemerintah didalam merobah sistim perpadjakan itu sendiri melalui perbaikan administrasi perpadjakan, perobahan tingkatan padjak, dan perobahan didalam struktur perpadjakan.

Sebagai langkah pertama jang ditempuh didalam bidang perpadjakan ini ialah perbaikan administrasi perpadjakan dengan disertai usaha intensifikasi dan ekstensifikasi daripada pemungutan padjak.

Langkah kedua sebagai suatu program djangka pandjang ialah perobahan didalam tingkatan padjak dan struktur perpadjakan. Pelaksanaan perobahan ini masih harus didahului oleh suatu penjelidikan jang menjeluruh mengenai sistim perpadjakan dewasa ini, akan tetapi sebagai prinsip umum dapatlah dikatakan disini bahwa sistim perpadjakan tersebut perlu ditindjau untuk mendjamin bahwa beban padjak tersebut ditekankan kepada konsumsi mewah, kekajaan dan pendapatan tinggi, dan dapat merangsang pula produksi dan ekspor. Arah umum daripada beberapa perobahan tersebut dapat disebutkan disini, misalnja :

Pertama, penindjauan terhadap beberapa padjak seperti padjak perseroan untuk lebih dapat mendorong investasi dan ekspor. Kedua, perobahan kearah struktur padjak jang elastis, misalnja dengan menjempurnakan sifat progresivitas daripada padjak pendapatan dan sifat progresivitas daripada beberapa padjak tidak langsung jang mempunjai dasar jang berbeda-beda. Chususnja bagi padjak-padjak jang advalorem, elastisitas tersebut dapat ditingkatkan bilamana nilai dasarnja selalu disesuaikan dengan keadaan dipasaran, misalnja tjukai dan bea masuk. Ketiga, padjak pendjualan atas impor terutama dikenakan atas barang-barang impor jang menjaingi barang produksi dalam negeri. Keempat, lebih merasionalisasi struktur

tarif melalui reklasifikasi daripada golongan-golongan impor dan golongan-golongan tarif sehingga penerimaan negara dapat ditingkatkan dan beban padjak lebih banjak djatuh kepada barang-barang djadi/barang-barang konsumsi dan impor dengan Devisa Pelengkap daripada kepada bahan-bahan baku, sparepart, barang-barang modal dan impor dengan BE-Kredit. Kelima, usaha-usaha untuk mentjari sumber-sumber padjak baru seperti padjak atas barang-barang jang tidak essensiil jang tidak sadja menaikkan penerimaan negara tetapi djuga sebagai alat untuk membatasi konsumsi jang non-essensiil.

Walaupun pola penerimaan tidak akan banjak dirobah didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini, usaha-usaha sudah mulai didjalankan kearah penekanan terhadap padjak langsung sebagai sumber utama penghasilan Pemerintah. Mengenai penerimaan-penerimaan Pemerintah jang berasal dari kredit-kredit luar negeri (bantuan program) didjalankan kebidjaksanaan jang mendjamin pemanfaatan hasil-hasil pendjualan seluruhnja bagi pembangunan, termasuk hasil-hasil pendjualan bantuan PL-480.

b. **Segi pengeluaran**

Kenaikan penghasilan Pemerintah dari penerimaan-penerimaan dalam negeri dengan sendirinja tidak diinginkan untuk digunakan seluruhnja untuk keperluan routine. Padjak-padjak seharusnja merupakan pemindahan dari konsumsi jang non-essensiil kepada Pemerintah untuk membelandjai investasi dan oleh karenanja tidak pada tempatnja apabila dipergunakan untuk membiajai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah jang non-essensiil. Oleh karena itu diadakan usaha-usaha penghematan dan pengendalian pengeluaran-pengeluaran routine setjara terus-menerus.

Pos-pos pengeluaran routine Pemerintah jang besar dewasa ini adalah belandja pegawai, belandja barang, subsidi dan pembajaran hutang-hutang. Dalam pengeluaran routine diusahakan diadakan realokasi dengan mengusahakan mengurangi atau menunda bagian-bagian daripada beberapa pos-pos tertentu,

misalnja subsidi, pembajaran hutang-hutang luar negeri dan lain-lain, serta menaikkan bagian-bagian daripada pos-pos tertentu lainnja seperti gadji pegawai/pensiun dan belandja barang.

Pembajaran hutang-hutang luar negeri diusahakan agar dapat dikurangi melalui penundaan pembajaran hutang-hutang jang berasal dari negara-negara barat maupun timur. Gadji innatura dapat lambat laun diganti dengan uang. Didalam batas kemampuan Pemerintah maka gadji pegawai negeri diusahakan untuk ditingkatkan guna menaikkan taraf hidup pegawai negeri jang masih rendah dewasa ini. Belandja barangpun ditingkatkan sesuai dengan peningkatan aktivitas Pemerintah.

Anggaran pembangunan Pemerintah mempunjai fungsi sebagai instrumen jang mendjamin implementasi daripada rentjana pembangunan sektor Pemerintah. Disamping itu, dengan djalan mempengaruhi arah daripada aktivitas-aktivitas disektor swasta dapat djuga setjara tidak langsung mempengaruhi implementasi daripada rentjana disektor tersebut. Dalam hubungan ini sistim anggaran jang sedang dikembangkan adalah suatu sistim jang mempunjai orientasi rentjana kerdja Pemerintah (program oriented), jang mentjerminkan prioritas pembangunan dan jang memudahkan pengawasan pelaksanaannja didalam bidang pembiajaan.

Masalah lainnja jang djuga penting disamping mobilisasi dana-dana oleh Pemerintah ialah penjaluran dana-dana tersebut kepada usaha-usaha investasi jang dikehendaki. Penjaluran tersebut dapat berbentuk: pertama, investasi langsung oleh Pemerintah, terutama untuk pembiajaan prasarana guna menghilangkan bottlenecks didalam pembangunan ekonomi, untuk mentjiptakan kondisi jang mendorong investasi swasta, dan untuk mentjapai suatu perkembangan ekonomi jang seimbang. Investasi sematjam ini tidak lain adalah pengeluaran-pengeluaran jang dipergunakan oleh Departemen-departemen. Kedua, pindjaman-pindjaman Pemerintah jang disalurkan setjara tidak langsung melalui bank-bank untuk membiajai investasi disektor

Pemerintah dan swasta, misalnja untuk rehabilitasi perkebunan, pembiajaan irigasi lokal, projek-projek industri ketjil dan lain-lain kegiatan. Tingkat bunga dan sjarat-sjarat pembajaran kembali pindjaman-pindjaman ini disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan investasi. Pindjaman-pindjaman jang disalurkan melalui bank ini terutama ditudjukan kepada projek-projek jang self-liquidating. Keuntungan daripada pindjaman-pindjaman ini ialah bahwa dikemudian hari Pemerintah dapat memperoleh penghasilan rupiah jang dapat disalurkan lagi kedalam usaha-usaha jang produktip.

c. **Hubungan keuangan Pusat dan Daerah**

Sebagai prinsip pokok, sesuai dengan hak-hak otonomi Daerah, Daerah berwenang untuk memobilisir dana-dana jang ada didaerah kekuasaannja terutama jang berasal dari padjak-padjak untuk membiajai urusan-urusan rumah tangganja, misalnja hasil-hasil padjak Daerah, retribusi Daerah, hasil-hasil perusahaan Daerah dan lain-lain usaha Daerah jang sah. Daerah-daerah berkewadjiban untuk memobilisir sumber-sumber tersebut dengan sepenuhnja demi perkembangan Daerah. Dewasa ini masih banjak sumber-sumber jang belum dimanfaatkan sepenuhnja meskipun wewenangnja sudah ada pada Pemerintah Daerah.

Disamping itu Pemerintah Pusat memberikan sumbangan sepandjang Daerah-daerah belum sepenuhnja berhasil memobilisir dana-dana jang ada didaerah kekuasaannja.

Sumber-sumber keuangan pembangunan Daerah jang ada dewasa ini ialah IPEDA/IREDA, jaitu padjak Pemerintah Pusat jang hasilnja langsung diserahkan kepada daerah Kabupaten, dan ADO. Padjak-padjak IPEDA/IREDA masih dapat ditingkatkan sedangkan ADO dapat lebih dimanfaatkan dalam penggunaannja.

Achirnja, untuk mendjamin adanja penggunaan dana-dana tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional, maka dipersiapkan suatu koordinasi jang serasi antara anggaran-anggaran pembangunan Daerah dengan anggaran pembangunan Pusat sehingga tertjapailah suatu kesatuan kerdja didalam

aktivitas-aktivitas pembangunan Pemerintah setjara menjeluruh.

d. **Perusahaan-perusahaan Negara**

Kebidjaksanaan pokok disini ialah menghapuskan atau mengurangi peranan daripada anggaran negara sebagai suatu sumber pembiajaan Perusahaan-perusahaan Negara dan mendorong pembiajaannja dari sumber-sumbernja sendiri. Beberapa Perusahaan Negara jang ketjil-ketjil dan jang selalu menderita rugi akan diswastakan setjara bertahap.

Perusahaan-perusahaan Negara dapat dibedakan antara public utilities dan non-public utilities. Sebagai prinsip, Perusahaan-perusahaan Negara public utilities harus dapat menutup pengeluaran-pengeluaran routinenja, sedangkan bantuan dalam bentuk penjusutan modal dapat diberikan oleh Pemerintah, demikian pula pindjaman-pindjaman dengan sjarat-sjarat jang lunak sekali untuk investasi. Bagi Perusahaan-perusahaan Negara non-public utilities diberikan pindjaman-pindjaman dan bukannja sumbangan.

Sumber pembiajaan lainnja daripada investasi Perusahaan-perusahaan Negara ialah laba perusahaan jang atas idjin Pemerintah ditanam kembali. Walaupun Perusahaan-perusahaan Negara masih harus terus membajar padjak perseroan, Pemerintah mendjalankan suatu kebidjaksanaan jang mendorong reinvestasi tersebut. Didalam hal tersebut, pengawasannja dilakukan melalui persjaratan, bahwa setiap Perusahaan Negara tiap tahunnja diharuskan untuk menjampaikan suatu usul tentang program reinvestasi kepada Pemerintah. Penggunaan laba perusahaan untuk penanaman kembali dilaksanakan atas dasar program investasi jang telah disetudjui oleh Pemerintah.

SEKTOR LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN

Tugas-tugas pokok daripada sektor ini adalah:

1. mendorong mobilisasi tabungan,
2. mengarahkan penggunaan tabungan setjara efektif produktif, dan

3. mengarahkan alokasi investasi sesuai dengan prioritas pembangunan guna menambah produktivitas dan kemakmuran perekonomian.

Sektor ini meliputi keseluruhan perlembagaan keuangan dari Bank Sentral sampai dengan tengkulak (pemberi pindjaman) didesa. Kenjataan menundjukkan bahwa tidak semua tabungan disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan — beberapa daripadanja langsung diinvestir —, tetapi sebagian besar daripadanja betul-betul mengalir melewati perantara-perantara keuangan sehingga operasinja dipengaruhi oleh perantara-perantara tersebut.

Dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun akan diadakan perbaikan setjara sungguh-sungguh fungsi daripada lembaga-lembaga keuangan tersebut, jang meliputi tidak sadja perluasan daripada aktivitas-aktivitas mereka, tetapi djuga pemberian pelajanan jang sebaik-baiknja kepada semua permintaan akan aktiva-aktiva keuangan (financial assets) dari para penabung dan permintaan pemindjam akan bermatjam-matjam bentuk kredit. Berhubung dengan itu diadakan sematjam spesialisasi diantara lembaga-lembaga keuangan guna meningkatkan profisiensi mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangan dari bermatjam-matjam sektornja. Spesialisasi tersebut hendaknja tidak begitu djauh dilaksanakan sehingga akan mengakibatkan adanja „gaps" dalam supply keuangan, dan tidak dapat memenuhi beberapa kebutuhan-kebutuhan jang mendesak. Oleh karena itu jang mendjadi fungsi utama daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun untuk sektor keuangan ini ialah merumuskan daerah dan tingkatan spesialisasi diantara lembaga-lembaga keuangan tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak terdapat gap jang tidak terisi, dan mengidentifisir kebidjaksanaan-kebidjaksanaan dan perobahan-perobahan institusionil jang dibutuhkan untuk memperbaiki bekerdjanja sistim keuangan tersebut.

1. Perkembangan keuangan diwaktu jang lalu

Membubungnja inflasi dalam tahun-tahun 1961 — 1966 jang telah menghantjurkan sistim keuangan diwaktu itu disebabkan oleh karena adanja perluasan pindjaman Bank setjara berlebih-lebihan dan nilai dari pada kredit Bank setjara riil telah merosot sedemikian rupa, sehingga mendjelang Desember 1966 nilainja hanja $^1/_3$ daripada tingkatan Desember 1961 (Tabel II-8).

TABEL II - 8

VOLUME RIIL KREDIT PERBANKAN
(dalam harga-harga konstan Desember 1965)

Achir	Kredit (miljar Rp.)	Indeks harga	Indeks dari kredit riil (1965 = 100)
1960	0,02	0,3	167
1961	0,03	0,4	188
1962	0,05	1,0	125
1963	0,09	2,4	94
1964	0,22	4,7	117
1965	1,00	25	100
1966	6,34	267	59
1967			
M a r e t	7,88	364	54
D j u n i	12,57	325	84
September	18,26	445	103
Desember	30,47	567	134
1968			
M a r e t	34,77	893	97
D j u n i	39,38	913	108

Sedjalan dengan merosotnja nilai riil daripada pindjaman tersebut, terdjadilah pula suatu peningkatan konsentrasi aktivitas pemindjaman pada Bank Sentral (BNI Unit I), oleh karena ialah jang mempunjai satu-satunja sumber jang penting daripada dana-dana jang dapat dipindjamkan, jaitu uang baru jang ditjetaknja. Bahkan lebih dari itu; djumlah pemindjaman jang

terbatas jang diberikan oleh Bank-bank Negara jang lainnja pun sebagian besar berasal dari kredit Bank Sentral.

Selama dua tahun jang lampau proses rehabilitasi sistim keuangan jang sulit itu telah dimulai. Kebidjaksanaan pertama adalah mentjoba membatasi ekspansi kredit perbankan guna memperlambat kenaikan harga dan memungkinkan kenaikan didalam nilai riil daripada kredit perbankan. Tingkat bunga pindjaman jang lebih tinggi djuga dikenakan pada achir 1966 guna menjesuaikan biaja uang dengan tingkatan inflasi. Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan ini jang dilaksanakan bersama-sama dengan perbaikan kondisi fiskal serta pemasukan bantuan-bantuan luar negeri jang baru, telah mempunjai efek jang positif didalam tahun 1967 jaitu antara lain berupa tingkatan inflasi jang menurun dengan tjepat, dan nilai riil daripada kredit bank jang meningkat lebih dari dua kali. Trend jang menggembirakan diatas telah terganggu oleh karena kekurangan pangan serta kenaikan harga-harga bahan pangan pada achir 1967 dan awal 1968, sehingga aktivitas pemindjaman bank dipandang perlu untuk dikurangi agar nilai riil daripada kredit bank tidak merosot oleh karena kenaikan harga-harga tersebut.

Achir-achir ini disamping usaha menanggulangi inflasi dengan membatasi pertumbuhan permintaan akan uang dan mendjamin persediaan bahan pangan jang setjukupnja, Pemerintah telah melantjarkan suatu program mobilisasi tabungan. Hal ini dimaksudkan untuk menarik dana-dana dari bentuk-bentuk tabungan jang lainnja seperti penjimpanan valuta asing dari pindjaman-pindjaman melalui pasar uang swasta atau jang tidak terorganisasi kedalam lembaga-lembaga perbankan.

Dengan demikian dapat djuga diharapkan adanja beberapa pergeseran daripada tabungan jang berasal dari aktiva-aktiva tetap (fixed assets) seperti tanah dan emas kedalam simpanan-simpanan Bank. Achirnja dengan diberikannja tingkatan bunga jang lebih tinggi dan djaminan keamanan jang lebih baik, Pemerintah dapat mendorong mobilisasi tabungan jang lebih besar daripada pendapatan jang ada. Pada saat ini belumlah dapat diperkirakan efektivitas daripada kebidjaksanaan-kebidjaksa-

naan baru tersebut tetapi hasil-hasil permulaan telah menundjukkan harapan baik.

2. Program untuk Rentjana Pembangunan Lima Tahun

a. Mobilisasi Tabungan

Langkah pertama daripada pelaksanaan tugas disektor keuangan telah ditempuh, jaitu dengan dikeluarkannja kebidjaksanaan baru mengenai tabungan berdjangka. Langkah pertama ini akan diperluas dengan pelbagai djalan, antara lain berupa pemberian djaminan bahwa tjara-tjara menabung adalah menguntungkan dan aman.

Pemerintah bermaksud untuk memelihara tingkatan bunga pada suatu tingkatan jang dapat menarik sebanjak mungkin tabungan-tabungan kedalam lembaga perbankan. Dalam hubungan ini Pemerintah mengusahakan terdapatnja keseimbangan antara pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan dorongan jang tjukup kepada para penabung dan biaja-biaja jang dikenakan terhadap para pemindjam.

Program tambahan guna mendorong mobilisasi tabungan akan ditampilkan djuga, diantaranja ialah suatu sistim tabungan setjara mentjitjil (installment deposits) dengan lotere berhadiah, hal mana dapat mendorong adanja penjimpanan-penjimpanan dengan teratur setjara mingguan atau bulanan. Didalam sistim ini termasuk djaminan asuransi terhadap semua simpanan-simpanan tersebut oleh Bank Sentral, Bank Negara, djuga bank-bank swasta tertentu dan Bank-bank Pembangunan Daerah. Berhubungan dengan program ini, Pemerintah bermaksud memperbaiki mutu daripada bank-bank swasta dan membantunja agar dapat berperanan setjara lebih konstruktif didalam perekonomian.

Usaha mobilisasi tabungan ini sangat tergantung dari berhasilnja usaha stabilisasi tingkat harga-harga didalam negeri. Karena hal ini sangat berpengaruh pada kepertjajaan masjarakat terhadap kebidjaksanaan ekonomi Pemerintah dan pada kesediaan mereka untuk lebih suka menahan rupiah sebagai

aktiva keuangannja (financial assets) daripada valuta asing atau barang. Ini djuga akan mendjadi faktor penting jang mempengaruhi pola investasi, chususnja didalam penggeseran investasi dari akumulasi stock djangka pendek kepada pembelandjaan modal jang akan memberi balas djasa djangka pandjang. Oleh karenanja Pemerintah akan terus mendjalankan kebidjaksanaan stabilisasi dengan tegas dan berusaha dalam tahun 1969 untuk dapat menanggulangi inflasi dengan sepenuhnja.

Apabila usaha penekanan inflasi telah mendapat kepertjajaan masjarakat, maka permintaan uang setjara riil akan berkembang selaras dengan permintaan akan aktiva-aktiva keuangan lainnja. Pada saat ini djumlah uang jang beredar adalah terlalu ketjil djika dibandingkan dengan nilai produksi total, akan tetapi ini adalah akibat daripada adanja inflasi jang tidak dapat dihindarkan. Orang tentu tidak ingin menahan uangnja djika nilai riilnja setiap hari menurun. Selandjutnja, djika masjarakat mengetahui bahwa risiko menahan uang akan berkurang, maka mereka akan lebih ingin menahan uangnja, sehingga perbandingan antara djumlah uang dengan produksi nasional bruto dapat ditingkatkan kepada suatu tingkatan perbandingan jang lebih normal. Kenaikan djumlah uang jang ditahan seperti ini akan merupakan suatu bentuk jang penting daripada tabungan jang dapat digunakan untuk membiajai pembangunan. Akan tetapi tidak mungkin untuk memaksakan tabungan tersebut hanja dengan mentjetak uang baru, sebab dengan bertambahnja djumlah uang terlalu tjepat, timbul perkiraan akan adanja inflasi. Akibatnja orang akan menukar uangnja dengan barang-barang, sehingga harga-harga meningkat dan perkiraan inflasi tersebut mendjadi kenjataan.

Untuk beberapa tahun jang akan datang, tantangan bagi kebidjaksanaan keuangan Pemerintah berupa pengawasan terhadap perkembangan djumlah uang agar perkembangan tersebut tidak terlalu tjepat sehingga akan mendorong adanja inflasi, tapi djuga tidak terlalu lambat dalam memenuhi perkembangan permintaan riil akan uang dalam ekonomi. Djika tantangan ini

dapat diatasi, maka mobilisasi tabungan potensiil melalui lembaga-lembaga keuangan akan dapat dilaksanakan setjara besar-besaran dan kestabilan ekonomi akan tertjapai.

Walaupun tampaknja agak prematur untuk memberi tekanan jang besar kepada rehabilitasi lembaga-lembaga keuangan jang lain seperti asuransi dan pasaran saham primair serta sekundair sampai dengan terhentinja inflasi serta pulihnja kembali fungsi ekonomi setjara lebih normal, namun Pemerintah akan terus mentjari kemungkinan-kemungkinan dan mendorong perkembangan daripada lembaga-lembaga tersebut.

b. **Penjaluran tabungan kedalam investasi**

Peranan sektor keuangan dalam menjalurkan tabungan kedalam investasi tidak terbatas pada tabungan jang telah dimobilisir setjara langsung oleh sektor itu sendiri, melainkan djuga termasuk sebagian daripada tabungan jang dihasilkan dari pendapatan sektor fiskal, hasil-hasil penggunaan bantuan luar negeri, dan djuga beberapa pindjaman luar negeri jang diberikan setjara langsung. Dengan mengingat kepada beberapa bentuk tabungan seperti tersebut diatas dengan pelbagai sjarat-sjaratnja jang berbeda-beda dan jang terdiri dari bermatjam-matjam mata uang, maka persoalan jang menondjol dalam perkembangan keuangan adalah bagaimana mengarahkan pelbagai tabungan tersebut kedalam bentuk kredit jang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas investasi dan produksi didalam semua sektor perekonomian.

Pada saat ini adalah belum mungkin untuk setjara pasti menentukan, baik pola daripada penawaran maupun permintaan akan tabungan tersebut untuk selama periode Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Akan tetapi setiap tahunnja suatu program keuangan setjara menjeluruh dapat dipersiapkan sedjalan dengan anggaran belandja Pemerintah. Dengan demikian dapatlah diperkirakan pola penawaran dan permintaan pembiajaan jang diperlukan sehingga dapat ditundjukkan bagaimana bermatjam-matjam kebutuhan tersebut dapat dipenuhi.

Didalam transformasi ini terdapat sedjumlah hambatan-hambatan institusionil. Masalah jang sangat serius dewasa ini ialah hambatan pembiajaan aktivitas investasi djangka sedang dan pandjang. Makin menurunnja tingkat inflasi menjulitkan diperolehnja suatu persetudjuan pindjaman djangka pandjang jang dapat diterima baik oleh jang memindjamkan. Hal ini dapat diatasi dengan mentjantumkan suatu persjaratan „mempertahankan nilai" dalam kontrak pemindjaman, jaitu dengan menghubungkan pembajaran pindjaman pokok dan bunga kepada suatu indeks harga atau kurs valuta. Hal jang sama dapat dilakukan jaitu dengan mengadakan variasi tingkat bunga selama waktu persetudjuan pindjaman untuk mentjerminkan perobahan tingkat inflasi. Walaupun tjara jang terachir agaknja kurang tepat, tetapi administrasinja lebih sederhana dan kelihatannja lebih sesuai untuk kredit-kredit rupiah selama belum ada indeks harga jang memuaskan, jang dapat dipakai sebagai dasar. Kredit jang semulanja dinjatakan didalam valuta asing dapat diteruskan dalam bentuk tersebut diatas dengan asumsi bahwa kurs valuta akan bergerak mengikuti perobahan-perobahan harga dalam negeri.

Masalah lain jang menghambat dalam pembelandjaan pengeluaran investasi adalah tidak adanja grace period untuk pembajaran kembali pindjaman pokok dan bunga selama waktu jang diperlukan guna mentjapai suatu tingkatan produksi jang lajak dengan investasi jang baru tersebut. Tanpa adanja grace period sematjam ini, kebanjakan para pemindjam akan mendapatkan kesulitan didalam mengadakan persetudjuan pemindjaman guna membiajai investasinja jang baru itu.

Sebaliknja lembaga-lembaga keuangan menghadapi pembajaran bunga bulanan jang tinggi untuk simpanan-simpanan, sehingga tidak dapat melepaskan pendapatan bunga dari pindjaman jang diberikan olehnja untuk djangka waktu jang pandjang.

Ada beberapa tjara pemetjahan atas masalah diatas jang akan digunakan untuk pindjaman-pindjaman jang berasal dari

sumber-sumber dana jang berbeda-beda. Tjara pertama adalah mengundurkan pembajaran pindjaman pokok dan bunga selama periode investasi dan mengkapitalisir pembajaran bunga jang diundurkan tersebut untuk ditambahkan kepada pindjaman pokok pada saat pembajaran kembali pindjaman tersebut dimulai.

Tjara kedua adalah ditudjukan kepada Bank Sentral dan Badan-badan Pemerintah lainnja jang bersedia melepaskan pendapatan atas bunga pindjaman selama periode investasi tersebut dengan mendiskonto kembali dan menahan pindjaman selama waktu tersebut dan kemudian mengembalikannja kepada lembaga pemberi pindjaman semula, pada saat pembajaran kembali dimulai. Tjara ketiga adalah ditudjukan kepada jang menjediakan dana-dana bagi lembaga-lembaga keuangan agar dalam pengaturan pindjamannja membuat beberapa ketentuan mengenai grace period sematjam itu. Berbagai tjara pendekatan terhadap masalah-masalah grace period ini akan diterapkan kepada bermatjam-matjam bentuk pembiajaan investasi djangka menengah untuk projek-projek jang self-liquidating, agar diperoleh djaminan bahwa tidak akan ada sesuatu pengekangan liquiditas setjara ketat bagi para investor selama periode-periode investasinja.

Beberapa ketentuan-ketentuan chusus bagi transformasi pelbagai bentuk-bentuk tabungan tersebut kedalam pembiajaan djangka menengah melalui lembaga-lembaga keuangan adalah:

(i) **Untuk pindjaman dari Bank-bank,** akan diadakan tingkat bunga jang fleksibel jang dikaitkan dengan tingkat bunga rata-rata jang berlaku bagi kredit-kredit djangka pendek. Masalah grace period dipetjahkan melalui rediskonto dari pindjaman-pindjaman oleh Bank Sentral atau dengan kapitalisasi pembajaran-pembajaran bunga selama grace period. Demikian djuga dipertimbangkan program asuransi jang didjalankan oleh Pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap beberapa matjam kelalaian atau kegagalan pindjaman-pindjaman djangka menengah jang berasal dari simpanan-simpanan tersebut.

(ii) **Untuk pindjaman-pindjaman dari Pemerintah pada bank-bank,** ditentukan program-program atau sektor-sektor chusus untuk pemberian kredit-kredit tersebut, seperti rehabilitasi perkebunan, peremadjaan tanaman-tanaman perkebunan, pembiajaan irigasi lokal atau pusat-pusat peralatan pertanian dan sebagainja. Sjarat-sjarat pembajaran kembali dari pemindjam kepada Bank dan dari Bank kepada Pemerintah hendaknja konsisten dengan kebutuhan-kebutuhan aktivitas investasi tanpa memberikan tingkatan bunga jang terlalu rendah atau masa pembajaran jang terlalu pandjang, hal mana hanja akan mengakibatkan adanja korupsi dan tjampur tangan jang birokratis sehingga akan menurunkan tingkat dan mutu investasi.

(iii) **Untuk pembiajaan impor dengan bantuan luar negeri,** Bank-bank Negara telah diberi wewenang untuk memberikan kredit langsung (atau mendjamin pembajaran jang ditunda), kepada pemakai-pemakai terachir daripada barang-barang investasi tersebut sampai dengan masa 3 tahun Kredit ini dinjatakan dalam valuta asing dengan kurs BE, sedang pembajaran kembali pindjaman pokok dan bunganja dilakukan dalam rupiah pada tingkatan kurs valuta jang berlaku pada saat pembajaran tersebut dilaksanakan. Kredit-kredit sematjam ini umumnja dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas investasi jang ketjil (sampai dengan $ 300.000) dan digunakan untuk penggantian peralatan-peralatan jang tua, untuk mendapatkan persediaan spare-parts setjukupnja dan untuk perluasan ketjil-ketjilan daripada fasilitas-fasilitas. Aktivitas-aktivitas ini tidak dapat memenuhi suatu persjaratan projek jang dikehendaki oleh bank-bank, akan tetapi adalah semata-mata didasarkan atas pertimbangan kapabilitas dan kelajakan mendapatkan kredit (credit worthiness). Grace period dan djangka waktu pembajaran kembali disesuaikan dengan jang memerlukannja, tetapi dalam banjak hal grace period mungkin tidak perlu dan djangka waktu pembajaran kembalipun mungkin sangat pendek.

(iv) **Untuk pindjaman-pindjaman dari bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keuangan** untuk dipindjamkan lagi sebagai pindjaman-pindjaman projek kepada pemindjam-pemindjam dalam negeri, baik swasta maupun Pemerintah. Pindjaman seperti ini terutama untuk impor barang-barang modal dalam djumlah antara $ 200.000 sampai $ 3.000.000 per projek. Pindjaman-pindjaman ini adalah lebih besar daripada kredit jang didjamin, tetapi lebih ketjil daripada pindjaman bantuan projek (project aid). Pindjaman-pindjaman ini dinjatakan dalam valuta asing, tetapi dapat dibajar dalam rupiah menurut kurs valuta jang berlaku. Lembaga-lembaga keuangan dapat menggunakan pembajaran kembali daripada pindjaman tersebut untuk seterusnja dipindjamkan lagi sampai mereka diharuskan membajar kembali pindjaman jang semula.

c. **Pengarahan alokasi investasi**

Sebagian besar daripada investasi didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini akan dilaksanakan setjara langsung oleh Pemerintah. Untuk investasi sematjam ini, Pemerintah menentukan pola alokasinja. Masalah jang dihadapi adalah masalah implementasi, jaitu agar rentjana-rentjana investasi tersebut benar-benar dilaksanakan. Disamping itu terdapat pula aktivitas-aktivitas investasi dari perusahaan-perusahaan milik Pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta jang tidak diawasi setjara langsung oleh Pemerintah. Walaupun Pemerintah tidak bermaksud untuk memperluas pengawasannja terhadap bidang-bidang ini, namun akan diberikan arah terhadap aktivitas-aktivitas investasi tersebut. Perusahaan-perusahaan negara djuga wadjib berusaha untuk menghasilkan dana-dana investasi sendiri dari pendapatannja. Dalam hubungan ini dilakukan penjaringan terhadap investasi-investasi dengan modal sendiri tersebut agar benar-benar konsisten dengan tudjuan-tudjuan Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

910086-(5).

Satu sumber pembiajaan jang lebih penting bagi perusahaan-perusahaan negara maupun swasta ialah dana-dana jang disalurkan melalui sistim perbankan. Didalam hal ini ada dua tudjuan jang hendak ditjapai: disatu pihak agar kebutuhan-kebutuhan investasi jang esensiil dan kebutuhan-kebutuhan operasionil daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun dapat dipenuhi, sedang pada lain pihak hendak memelihara dan bahkan meningkatkan pertanggungan-djawab daripada masing-masing bank untuk mengambil kebidjaksanaan investasinja sendiri. Salah satu tjara untuk mentjapai dua tudjuan jang agak bertentangan ini ialah dengan djalan mempersiapkan program-program kredit tahunan dan triwulan untuk seluruh sistim perbankan. Program tersebut akan memperkirakan sumber-sumber potensiil daripada kredit serta alokasi jang diinginkan daripada kredit tersebut kedalam pembiajaan-pembiajaan djangka pendek dan djangka pandjang, alokasi diantara pelbagai sektor-sektor ekonomi dan diantara sektor negara dan sektor swasta. Program kredit ini djuga berfungsi sebagai suatu pedoman bagi alokasi dana-dana Anggaran Negara dan dana-dana Bank Sentral kepada Bank-bank Pemerintah. Bank-bank Pemerintah ini akan mendjalankan fungsi atau spesialisasi-spesialisasi sepandjang jang telah digariskan oleh Undang-undang Pokok Perbankan jaitu :

BANK INDONESIA : (menggantikan BNI Unit I), dikembalikan kepada fungsi Bank Sentral jang normal dan peranannja sebagai bank dari bank-bank dan dari Pemerintah. Tugas pokoknja adalah membantu Pemerintah dalam mengatur, mendjaga atau memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelantjaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerdja dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakjat.

BANK RAKJAT INDONESIA : (menggantikan BNI Unit II), melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor koperasi, tani dan nelajan (bukan perkebunan), kegiatan-kegiatan keradjinan, perindustrian, perusahaan rak-

jat dan perdagangan ketjil (jang belum tergabung didalam koperasi), serta membantu usaha negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria dan pembangunan masjarakat desa.

BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA : (menggantikan BNI Unit II Ekspor), melaksanakan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor produksi, pengolahan dan pemasaran bahan-bahan ekspor.

BANK NEGARA INDONESIA 1946 : (menggantikan BNI Unit III), melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor industri.

BANK BUMI DAYA : (menggantikan BNI Unit IV), terutama mengarahkan kegiatan-kegiatannja kesektor-sektor perkebunan dan kehutanan.

BANK DAGANG NEGARA : melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor pertambangan.

BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO) : terutama industri, chususnja pembiajaan investasi djangka menengah dan pandjang kepada industri-industri Pemerintah dan swasta.

Bank-bank Pemerintah jang bergerak didalam bidang-bidang pertanian dan industri jaitu Bank Rakjat Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Bumi Daya dan Bapindo, sesuai dengan keachliannja masing-masing didalam sektor jang dikuasainja, akan melajani baik pembiajaan-pembiajaan djangka pendek maupun pembiajaan investasi djangka menengah/ pandjang.

Dengan djalan mengalokir kredit-kredit dan beberapa daripada bantuan luar negeri diantara pelbagai bank-bank maka Pemerintah dan Bank Sentral dapat mengarahkan agar alokasi daripada kredit-kredit Bank Pemerintah adalah konsisten dengan seluruh kebutuhan-kebutuhan program kredit dan Rentjana Pembangunan Lima Tahun tanpa mentjampuri keputusan-keputusan mengenai pindjaman dari masing-masing bank.

Djadi tanggung-djawab jang berat dibebankan kepada lembaga-lembaga keuangan guna memobilisir dan menjalurkan tabungan-tabungan kedalam sedjumlah besar alokasi investasi jang efisien. Inilah salah satu tugas jang penting dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang mungkin sekali akan turut menentukan berhasil tidaknja rentjana tersebut.

BAB III

NERATJA PEMBAJARAN INTERNASIONAL

BAB III

NERATJA PEMBAJARAN INTERNASIONAL

Pendahuluan

Sektor perdagangan luar negeri memegang peranan utama dalam strategi pembangunan Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Perkembangan dan perluasan dasar ekspor, perbaikan-perbaikan dalam komposisi impor, dan arus modal dari luar negeri mendjadi unsur-unsur pertumbuhan ekonomi jang sangat penting.

Dibidang ekspor kebidjaksanaan akan diarahkan pada tudjuan mentjapai pertumbuhan dan diversifikasi jang substansiil, baik dalam komposisi barang-barang jang diekspor maupun dalam arah perdagangan. Dalam rangka pembangunan industri prioritas akan diberikan untuk investasi disektor produksi ekspor dengan berpegang pada prinsip produktivitas dan potensi penghasilan devisa.

Djuga dibidang impor kebidjaksanaan akan ditudjukan pada perobahan komposisi sedemikian rupa sehingga dapat mendorong dan melantjarkan program pembangunan. Semakin pesat pembangunan, semakin banjak devisa jang diperlukan untuk mengimpor barang-barang modal, bahan baku, dan barang-barang konsumsi esensiil. Mengingat terbatasnja sumber-sumber devisa jang tersedia, maka mendjadi suatu keharusan bahwa sumber-sumber tersebut digunakan setjara optimal.

Disamping ekspor, devisa jang tersedia berasal djuga dari pindjaman dan sumbangan luar negeri, dan penanaman modal asing. Bersamaan dengan arus modal luar negeri jang masuk, terdapat arus modal dan devisa keluar akibat pembajaran pokok dan bunga atas hutang-hutang dari tahun-tahun sebelumnja. Melihat kenjataan bahwa djumlah hutang luar negeri kita pada waktu sekarang telah mentjapai djumlah jang besar, maka

kewadjiban-kewadjiban pelunasan dan pembajaran bunga atas hutang-hutang ini merupakan beban jang tjukup berat.

Dalam pembiajaan komponen devisa dari pembangunan maka jang penting bagi Indonesia bukanlah djumlah sumber-sumber devisa dari ekspor dan modal luar negeri, tetapi djumlah devisa netto jang tersedia dari kedua sumber ini.

EKSPOR

1. Keadaan dan masalah-masalah pada waktu sekarang

Perkembangan ekspor selama 10 tahun terachir ini memberikan gambaran jang tidak begitu menggembirakan. Seperti terlihat dalam Tabel III-1 dibawah ini nilai ekspor, baik setjara keseluruhan maupun tanpa minjak bumi, mulai tahun 1958 hingga kini belum pernah mentjapai lagi tingkat ekspor tahun 1957. Meskipun begitu, mulai dengan tahun 1966 nilai ekspor menundjukkan trend menaik setelah mentjapai titik terendah dalam tahun 1965.

TABEL III-1

INDEX NILAI EKSPOR 1950 — 1968

1950 = 100

Tahun	Djumlah total	Tanpa minjak bumi
1950	100	100
1951	162	170
1957	119	100
1958	99	73
1962	85	71
1963	87	66
1964	91	70
1965	89	67
1966	90	79
1967 *)	95	81
1968 (taksiran)	106	86

*) Termasuk overprice.

Perkembangan ekspor ini terutama disebabkan karena hasil-hasil ekspor tertentu mengalami kemunduran. Dilain pihak beberapa barang ekspor mengalami kenaikan dalam nilai dan volume.

Keadaan ini tergambar dalam Tabel III-2 dibawah ini.

TABEL III-2

NILAI DAN VOLUME HASIL-HASIL EKSPOR TERTENTU TAHUN 1967 SEBAGAI PERSENTASE TAHUN 1957.

	Nilai tahun 1967 % dari 1957	Volume tahun 1967 % dari 1957
Karet	52	94
Rakjat	55	103
Perkebunan	47	80
Kopra	38	36
Tembakau	46	70
Kopi	214	262
Lada	231	211

1.1. Karet

Nilai ekspor karet selama 10 tahun terachir ini pada umumnja menundjukkan tendens menurun, ketjuali dalam tahun-tahun 1951, 1955, 1959 dan 1966. Kenjataan menundjukkan bahwa fluktuasi dalam nilai ekspor karet djauh lebih besar daripada perobahan dalam volume. Hal ini mentjerminkan trend harga luar negeri jang menurun.

Dilihat dari volume ekspor, karet rakjat pada umumnja berada pada tingkat jang sama dengan karet perkebunan. Penurunan produksi karet perkebunan disebabkan karena peremadjaan tidak diadakan pada waktunja, sehingga dalam tahun 1967 distribusi umur pohon-pohon karet mendjadi lebih buruk. Akibat dari peremadjaan jang dilakukan sesudah tahun 1963 baru akan terasa dalam tahun-tahun sesudah 1970. Produktivitas jang rendah disektor perkebunan djuga disebabkan karena

persoalan organisasi dan administrasi perkebunan-perkebunan jang diambil alih sesudah tahun 1957.

Disektor karet rakjat peremadjaan jang sistimatis hampir tidak terdjadi. Kenaikan produksi dalam tahun-tahun 1954, 1959, 1962 dan 1965 terdjadi karena areal jang disadap adalah lebih luas. Produksi dan ekspor karet rakjat sangat dipengaruhi oleh harga luar negeri. Karena elastisitas penawaran jang tinggi, maka fluktuasi, baik dalam djumlah maupun dalam nilai, djuga relatif lebih besar daripada disektor perkebunan.

1.2. **Minjak Sawit**

Semendjak tahun 1950, maka volume ekspor minjak sawit tahun 1966 merupakan jang tertinggi, jaitu 177.000 ton. Akan tetapi dalam tahun 1967 volume ini turun lagi dengan lebih dari 25 persen.

Produktivitas jang rendah disebabkan karena kurang adanja peremadjaan dan penggunaan pupuk jang tidak mentjukupi. Diharapkan bahwa peremadjaan jang diadakan sedjak tahun 1963 disertai dengan penggunaan pupuk jang lebih intensif dan perluasan areal penanaman akan dapat menaikkan produksi dengan kira-kira 100.000 ton mendjelang tahun 1975.

1.3. **K o p i**

Volume ekspor kopi perkebunan, jang besarnja 11.830 ton dalam tahun 1957 naik mendjadi 22.564 ton dalam tahun 1967, suatu kenaikan sebesar 91 persen. Dalam waktu jang sama ekspor kopi rakjat naik dengan 183 persen, jaitu dari 40.425 ton mendjadi 114.257 ton.

Akibat adanja International Coffee Agreement harga kopi diharapkan akan tetap pada tingkat jang sama, akan tetapi volumenja lebih sempit. Oleh karena itu potensi kenaikan ekspor kopi harus disertai dengan usaha-usaha memperluas pasaran kenegara-negara bukan anggauta.

1.4. **Tembakau**

Selama tahun 1960 sampai dengan tahun 1967 djumlah ekspor tembakau turun dengan lebih dari 50 persen. Kemunduran

ini seluruhnja disebabkan karena turunnja ekspor tembakau rakjat. Dalam tahun 1967, 41 persen dari seluruh volume ekspor tembakau berasal dari perkebunan sedang dalam tahun 1960 persentase ini hanja 12 persen.

Jang sekarang sedang diusahakan ialah intensifikasi perkebunan tembakau sehingga dapat menaikkan nilai ekspor tembakau dimasa depan.

2. **Kebidjaksanaan Ekspor**

Strategi dalam perkembangan ekspor meliputi 8 pokok jang penting :

(a) Rehabilitasi kapasitas produksi ekspor tradisionil dan ekspansi kapasitas tersebut; perluasan kapasitas hanja dilakukan djika keadaan pasaran menguntungkan;

(b) Diversifikasi komposisi ekspor;

(c) Pengolahan barang-barang ekspor sehingga akan menambah nilai dalam negeri barang-barang jang bersangkutan;

(d) Pengembangan pasar-pasar baru untuk hasil-hasil ekspor sehingga arah-arah dan tudjuan ekspor tidak terlalu terpusat;

(e) Memperluas prasarana jang dibutuhkan untuk ekspor; untuk ini diperlukan penjelidikan lebih landjut mengenai peranan berbagai pelabuhan dan usaha-usaha untuk memadjukan fasilitas-fasilitas pelabuhan sehingga dapat memperlantjar perdagangan;

(f) Perbaikan dalam faktor-faktor pemasaran: fasilitas pembiajaan perdagangan, bonded warehouse, entrepot, daerah perdagangan bebas, dan lembaga jang chusus menjelidiki perkembangan produksi, konsumsi, dan harga dari hasil-hasil ekspor terpenting;

(g) Usaha-usaha jang aktip kearah kerdjasama dengan negara-negara produsen jang mengekspor hasil-hasil jang sama guna mentjapai koordinasi dalam kebidjaksanaan produksi dan harga untuk kepentingan bersama; dan

(h) Kebidjaksanaan ekonomi pada umumnja, termasuk kebidjaksanaan moneter, fiskal, dan penentuan kurs valuta asing, jang ditudjukan untuk mengembalikan perimbangan-perimbangan harga didalam dan diluar negeri.

2.1. Rehabilitasi Kapasitas Produksi

Kemunduran dalam kapasitas produksi perkebunan dan makin merosotnja fasilitas-fasilitas produksi pada umumnja sudah mendjadi kenjataan jang umum diketahui. Berbagai usaha kearah perbaikan keadaan ini sedang dipersiapkan. Dalam sektor perkebunan program ini terpusat pada djaminan dari sarana-sarana jang dibutuhkan, chususnja penggunaan pupuk, perbaikan dalam organisasi dan administrasi tehnis dan komersiil, dan perbaikan dalam pengaturan keuangan, chususnja mengenai modal kerdja antara Pemerintah dan perkebunan. Persoalan-persoalan dibidang perpasaran akan diuraikan lebih landjut dibawah ini. Selandjutnja perhatian harus diberikan djuga pada persoalan kwalitas bibit tanaman. Rentjana-rentjana peremadjaan tanaman akan memberikan prioritas kepada hasil-hasil ekspor jang penanaman modalnja dapat dipertanggung-djawabkan dari segi kemungkinan perpasaran dikemudian hari.

Bagi produsen ketjil organisasi dan administrasi rehabilitasi akan merupakan persoalan jang lebih sukar. Meskipun begitu Pemerintah akan tetap berusaha menudju keperbaikan disektor ini. Bantuan dalam penjediaan pupuk dan peremadjaan tanaman mendjadi hal-hal jang pokok dalam rentjana ini.

Program rehabilitasi jang didjalankan dengan tepat akan dapat memberikan hasil jang tjepat, jang berarti bahwa devisa jang dihasilkan oleh ekspor tradisionil dapat diperbesar dalam tahun-tahun jang akan datang.

2.2. Diversifikasi Komposisi Ekspor

Pemerintah akan berusaha setjara aktip untuk merubah struktur ekspor dengan tjara diversifikasi hasil-hasil ekspor. Tudjuan ini dapat ditjapai melalui hasil-hasil ekspor baru atau dengan menaikkan tingkat ekspor hasil-hasil tertentu sehingga

bagian dari hasil-hasil ini dalam keseluruhan djumlah ekspor akan bertambah besar. Diversifikasi tidak berarti bahwa hasil ekspor jang paling penting sekarang ini akan diabaikan atau dikurangi. Hasil-hasil ekspor baru akan menaikkan tingkat penghasilan devisa, menambah kesempatan kerdja, dan memberikan sumber-sumber penerimaan Pemerintah jang baru. Disamping itu adanja produksi hasil-hasil ekspor baru akan memperluas pasaran bagi produksi bahan-bahan baku dan penolong serta djasa-djasa jang dibutuhkan. Dasar ekspor jang lebih luas akan memberikan pula perlindungan jang lebih besar terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari ketidak stabilan dan trend pasaran jang buruk dari hasil-hasil ekspor tertentu.

Untuk berbagai hasil-hasil ekspor jang potensiil masa Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini akan merupakan masa eksplorasi dan investasi jang akan meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekspor dimasa depan. Demikian halnja umpamanja dengan tembaga dan nikkel. Untuk barang-barang lain, penghasilan membutuhkan waktu jang lebih pendek sehingga volume ekspor dapat diharapkan akan bertambah dengan berarti sebelum achir periode Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini.

Konsesi-konsesi baru disektor minjak bumi akan menaikkan penghasilan ekspor djika ditemukan sumber-sumber minjak jang penting selama dua tahun jang akan datang ini. Projeksi ekspor dibawah ini didasarkan atas asumsi-asumsi jang tidak berlebihan mengenai tingkat penemuan sumber minjak dari konsesi jang telah diberikan. Bidang jang lain dimana dapat diharapkan kenaikan ekspor jang besar adalah kehutanan (kaju) dan perikanan.

Peningkatan kapasitas ekspor hasil-hasil baru merupakan pertimbangan Pemerintah jang terpenting dalam penarikan investasi modal luar negeri. Meskipun dalam usaha ini Pemerintah telah memberikan sjarat-sjarat jang menarik kepada para investor asing, akan tetapi kepentingan neratja pembajaran dan penerimaan negara senantiasa mendapat tempat jang paling utama.

2.3. Pengolahan Hasil-hasil Ekspor

Dimasa lampau tingkat pengolahan hasil-hasil ekspor didalam negeri sendiri sangat rendah. Pengolahan karet memang dilakukan, tetapi lokasi fasilitas-fasilitas pengolahan ini sering tidak tjotjok dan tidak mampu untuk melajani seluruh produksi karet rakjat. Akibatnja ialah bahwa sebagian besar produksi karet diekspor dalam bentuk mentah untuk diolah diluar negeri. Djuga kaju diekspor dalam bentuk kasar atau paling banjak dalam bentuk papan. Kurangnja pengolahan ini merupakan tjiri-tjiri chas dari kebanjakan hasil-hasil ekspor Indonesia.

Peninggian tingkat pengolahan didalam negeri akan menambah kesempatan kerdja, menambah pendapatan nasional, dan menaikkan penghasilan devisa. Pengolahan djuga dapat menambah kwalitas barang-barang jang diekspor, menaikkan daja pemasarannja, dan memperbaiki harga jang dapat diperoleh. Chususnja hal ini berlaku untuk karet dimana perbaikan mutu dapat membantu mengatasi pengaruh jang tidak baik pada penghasilan devisa akibat trend harga dikemudian hari. Pemerintah sedang melantjarkan rentjana pendirian satuan-satuan pengolahan jang ditempatkan sedemikian rupa hingga dapat melajani produsen karet rakjat.

Satuan-satuan ini terdiri dari perusahaan "crumb rubber" ketjil jang dapat didirikan dengan tjepat sedang hasil jang diprodusir mempunjai pasaran jang baik.

Bagi sedjumlah hasil-hasil lain Pemerintah akan mendorong atau memulai sendiri usaha-usaha jang menaikkan tingkat pengolahan. Diharapkan bahwa pemberian konsesi-konsesi kaju akan dapat mentjiptakan suatu daerah integrasi pengolahan dan industri kaju. Seperti dibitjarakan dalam Bab VII ekspansi industri kertas dan bahan kertas akan menaikkan permintaan dalam negeri untuk hasil-hasil hutan dan mengakibatkan kemungkinan ekspor kertas koran pada achir periode Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini. Begitu djuga bauksit hingga sekarang diekspor dalam bentuk mentah. Pada waktu sekarang

sedang diadakan penjelidikan mengenai kemungkinan pendirian perusahaan pertambangan dan peleburan jang diintegrasikan dengan konstruksi projek tenaga listrik dengan kapasitas jang besar.

Mengenai timah telah diadakan perdjandjian dengan perusahaan asing untuk merehabilitasi dan memperluas pertambangan dan pengolahan timah.

2.4. Perkembangan Arah Perdagangan Baru

Setjara historis bagian besar dari ekspor Indonesia ditudjukan kepada Eropa Barat dengan bagian jang lebih ketjil diarahkan ke Amerika Serikat. Pada tahun-tahun terachir ini Djepang makin lama makin banjak memegang peranan jang penting sebagai negara tudjuan ekspor dan sumber impor. Ditindjau dari lokasi Indonesia perdagangan dengan negara-negara didaerah Pasifik dan Australia mempunjai peranan jang ketjil sekali. Tudjuan Pemerintah adalah untuk setjara aktip mentjari kesempatan baru jang menguntungkan guna memperluas hubungan perdagangan dengan negara-negara didaerah ini. Djuga harus diusahakan kenaikan dalam volume perdagangan dengan negara-negara Eropa Timur dan Uni Sovjet. Seperti dalam hal diversifikasi ekspor tudjuan Pemerintah bukanlah mengurangi peranan perdagangan jang tradisionil tetapi memperluas perdagangan pada umumnja. Usaha-usaha ini tidak akan didjalankan melalui perdjandjian perdagangan atau barter. Tudjuan diatas akan ditjapai dengan mentjari kesempatan-kesempatan jang timbul akibat keuntungan komparatip. Berhasilnja usaha ini akan bergantung pada peningkatan tjara-tjara pemasaran dalam negeri dan kemampuan penjesuaian dengan prosedure pemasaran luar negeri.

2.5. Persoalan Prasarana

Prasarana dibidang ekspor, seperti fasilitas-fasilitas penjimpanan, pengangkutan, dan pelabuhan, telah mengalami kemun-

duran jang sangat besar. Kemerosotan dalam effisiensi fasilitas perdagangan tidak hanja menaikkan biaja f.o.b. dari ekspor Indonesia tetapi dalam banjak hal djuga membatasi volume fisik jang dapat diangkut dibawah djumlah jang dapat diproduksi dan didjual.

Untuk menghilangkan rintangan-rintangan dan effisiensi dibidang prasarana ekspor suatu rentjana investasi akan didjalankan untuk: (a) memperbaiki fasilitas perdagangan pada tempat-tempat pembelian dan sortasi; (b) memperbaiki hubungan-hubungan djalan dan kereta api kepelabuhan, termasuk peralatannja; (c) memadjukan hubungan laut untuk memperlantjar pembelian hasil-hasil ekspor; dan (d) memperbaiki fasilitas pelabuhan. Dengan bantuan tehnis dari IBRD akan dimulai penjelidikan-penjelidikan jang akan menentukan pola dari fasilitas pengangkutan darat jang paling tjotjok untuk kebutuhan kita. Sementara itu telah dimulai dilaksanakan perbaikan jang urgent. Djuga telah disetudjui bantuan tehnis untuk rehabilitasi dari pengangkutan interinsulair.

Baik dibidang pengangkutan laut maupun fasilitas pelabuhan pada waktu ini sedang mengalami kemadjuan-kemadjuan tehnologis. Tonnage kapal bertambah besar dengan akibat bahwa pengangkutan didjalankan dalam djumlah-djumlah jang besar, hal mana berarti penghematan ekonomis jang penting. Standardisasi dan perbaikan dalam peralatan pelabuhan telah menjebabkan penurunan dalam biaja jang berhubungan dengan fasilitas-fasilitas ini. Hendaknja perubahan-perubahan tehnologi ini mendjadi pertimbangan dalam memperbaiki pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Fasilitas-fasilitas jang baru harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kesempatan untuk menaikkan effisiensi ini.

Dalam masa jang akan datang ketjenderungan kearah kapal-kapal jang lebih besar dapat mengakibatkan pergeseran dalam peranan relatip dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Selat Malaka mungkin tidak sesuai lagi dengan kapal-kapal jang besar pada waktu sekarang. Hal ini menundjukkan kemungkinan bahwa peranan pelabuhan di Sumatera Barat dan pantai Selat-

an Djawa akan mendjadi lebih besar dikemudian hari. Ini adalah sesuai dengan perubahan jang diduga akan terdjadi dalam pola perdagangan. Djika perdagangan dengan Djepang dan Australia akan naik maka pertambahan dalam pengangkutan laut akan menggunakan pelabuhan-pelabuhan dipantai-pantai Barat Sumatera dan pantai Selatan pulau Djawa. Karena pertimbangan-pertimbangan demikian perkembangan-perkembangan dari pelabuhan Padang dan Tjilatjap dengan fasilitas jang dapat melajani kapal-kapal baru jang lebih besar, mendjadi pokok pikiran jang penting. Inipun tidak berarti bahwa pelabuhan-pelabuhan jang besar pada waktu sekarang ini akan mengalami kemunduran dalam arti absolut.

Rehabilitasi dari prasarana ekspor tidak seluruhnja akan didjalankan oleh Pemerintah mengingat terbatasnja sumber-sumber keuangan dan keahlian. Lagi pula beberapa hal jang penting, seperti fasilitas pergudangan dan angkutan darat dapat dilaksanakan dengan lebih effektif oleh sektor swasta.

2.6. Perbaikan Faktor-faktor Pemasaran

Achirnja salah satu sebab penting jang membebani perdagangan dan kapasitas ekspor Indonesia adalah seluruh bidang pemasaran, baik setjara institusionil maupun operasionil, jang makin lama makin mundur. Keadaan ini meliputi pembelandjaan dan pelaksanaan dari pembelian dan sortering, pengawasan atas kwalitas dan mutu, hubungan komersiil dengan dunia internasional dan sebagainja.

Untuk sebagian besar, tanggung-djawab dan inisiatip kearah perbaikan dalam bidang ini harus datang dari pihak swasta. Pemerintah dapat memberikan sumbangannja dalam tiga hal:

(a) Pemerintah senantiasa akan berusaha untuk menindjau tingkat padjak dan prosedure-prosedure perbankan dan valuta asing jang berlaku dan pengaruhnja pada perdagangan internasional. Dimana mungkin akan diadakan penjederhanaan jang dapat mendorong effisiensi dalam perdagangan.

(b) Pemerintah akan mengambil inisiatip untuk pendirian entreport, bonded warehouse dan daerah-daerah perdagangan bebas. Fasilitas-fasilitas demikian diharapkan dapat

mengurangi kredit jang dibutuhkan untuk membiajai perdagangan internasional dan menaikkan kwalitas dan persediaan dari hasil-hasil ekspor. Djuga diharapkan bahwa daerah perdagangan bebas akan mendorong didirikannja industri pengolahan hasil ekspor dan industri ekspor.

(c) Untuk beberapa produk penting, jang dimasa lampau pemasarannja terbukti tidak memuaskan dengan akibat bahwa produsen ketjil tidak terdorong untuk menaikkan produksi dan effisiensi, Pemerintah akan mengambil tindakan untuk memperbaiki organisasi pemasarannja.

2.7. Kerdjasama Dengan Produsen Eksportir Luar Negeri

Indonesia mendukung dan turut serta usaha-usaha internasional untuk mengatasi persoalan-persoalan jang berhubungan dengan ekspor bahan-bahan mentah dari negara jang sedang berkembang, seperti jang telah terdjadi dalam rangka UNCTAD. Penjelesaian setjara global dari persoalan-persoalan ini akan mengalami kesukaran-kesukaran dan akan memakan waktu negosiasi dan pertjobaan jang tjukup pandjang. Sementara itu akan digunakan kesempatan untuk bekerdjasama dengan beberapa negara pengekspor jang terpenting dari hasil-hasil tertentu.

Dalam rangka kerdjasama ini jang mendjadi unsur pokok adalah kebidjaksanaan produksi, persediaan (bufferstock), strategi pemasaran, konperensi-konperensi pengangkutan laut, dan penukaran data dan informasi tehnis. Kebidjaksanaan ini akan didjalankan setjara aktip oleh Pemerintah.

2.8. Kebidjaksanaan Moneter dan Fiskal

Dalam Bab sebelumnja prinsip-prinsip jang akan dianut selama Rentjana Pembangunan Lima Tahun telah dibentangkan dengan terperintji. Pengaruh dari kebidjaksanaan ini akan terasa disemua bidang ekonomi. Stabilisasi ekonomi akan menguntungkan sektor ekspor dengan berbagai tjara dan dari berbagai segi.

Ladju inflasi dimasa jang lampau telah menekan ekspor karena biaja produksi telah naik dengan lebih tjepat dari kenaikan

dalam kurs valuta asing, hal mana merupakan tekanan pada tingkat keuntungan disektor ekspor.

Karena sukar untuk mengadakan ramalan mengenai kenaikan harga dalam waktu jang dekat, eksportir mengalami kesukaran untuk mengadakan perdjandjian, baik mengenai persediaan dan penawaran maupun mengenai harga dengan pihak pembeli luar negeri. Lagi pula inflasi dan kepintjangan dalam alokasi sumber-sumber ekonomi telah menjebabkan kegandjilan dalam harga relatip di Indonesia dibandingkan dengan harga-harga relatip untuk barang jang sama diluar negeri. Hal ini mempunjai pengaruhnja lagi pada ekspor berbagai barang. Stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi tekanan pada pasar valuta asing dan dengan demikian akan mengurangi dorongan untuk larinja modal keluar negeri dan terdjadinja penjelundupan.

Kebidjaksanaan moneter dan fiskal jang tepat setjara langsung djuga akan menaikkan kapasitas ekspor karena kredit dan investasi dapat tersalur dalam aktivitas-aktivitas jang dibutuhkan untuk menaikkan produksi. Kebidjaksanaan fiskal akan mempertimbangkan pengaruh daripada padjak sehingga dapat mendorong produksi dan ekspor.

Pengurangan beban padjak pada ekspor adalah suatu tudjuan kearah mana akan diadakan usaha-usaha setjepat mungkin, djika keadaan penerimaan negara mengizinkan hal ini.

TABEL III - 3

PROJEKSI EKSPOR (F.O.B.) GOLONGAN A.B. dan MINJAK (NETTO) 1969/70 — 1973/74

(dalam djutaan US $, termasuk overprice)

Ekspor	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74
Golongan A	447	460	474	488	503
Golongan B	148	166	192	236	297
Djumlah Golongan A dan B	595	626	666	724	800
Minjak (netto) *)	77	149	118	103	124
D j u m l a h	672	775	784	827	924

*) Ini adalah penghasilan devisa netto dari minjak jang diperoleh setelah ekspor minjak dikurangi dengan biaja produksi pendapatan investasi, biaja-biaja pemasaran dalam negeri dan pembajaran hutang-hutang minjak (lihat Tabel III - 4).

910086-(6).

3. Projeksi Ekspor

Dari projeksi ekspor (Tabel III-3) dapat dilihat bahwa dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun, ekspor dapat ditingkatkan dari $ 672 djuta didalam tahun 1969/70 mendjadi $ 924 djuta didalam tahun 1973/74, atau suatu kenaikan sebesar 37,5 persen dalam lima tahun.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh karena kenaikan ekspor golongan B, jaitu dari $ 148 djuta didalam tahun 1969/70 mendjadi $ 297 djuta didalam tahun 1973/74, sedang penghasilan devisa netto minjak meningkat dari $ 77 djuta mendjadi $ 124 djuta dalam periode jang sama. Penghasilan devisa netto minjak ini diperoleh setelah ekspor minjak dikurangi dengan biaja produksi dalam bentuk devisa pendapatan investasi, biaja pemasaran dalam negeri dan pembajaran hutang-hutang minjak (lihat Tabel III-4).

Ekspor golongan A hanja meningkat dengan rata-rata 3 persen tiap tahunnja, sedangkan ekspor golongan B meningkat rata-rata dengan 16,5 persen tiap tahunnja.

TABEL III - 4

PENGHASILAN DEVISA MINJAK (NETTO) 1969/70 — 1973/74
(dalam djutaan US $)

	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74
1. Ekspor (bruto)	358	485	458	475	587
2. Biaja produksi	-101	-109	-117	-143	-213
3. Pendapatan Investasi	-102	-150	-154	-159	-177
4. Biaja Pemasaran Dalam Negeri	- 55	- 57	- 61	- 64	- 67
5. Pembajaran hutang-hutang	- 23	- 20	- 8	- 6	- 6
D j u m l a h	77	149	118	103	124

Ekspor golongan B menundjukkan persentase pertumbuhan jang menaik. Perkembangan dalam hasil-hasil ekspor golongan inilah jang akan menaikkan ladju perkembangan ekspor keseluruhan. Sektor-sektor dari mana akan diharapkan kenaikan dalam perhasilan devisa adalah kehutanan (kaju), perikanan, barang-barang industri ketjil dan hasil-hasil keradjinan tangan.

Dengan bertambah baiknja iklim perdagangan internasional, chususnja dari segi kebidjaksanaan kurs valuta asing dan harga, dapat diharapkan djuga bahwa djumlah penjelundupan, jang hingga kini masih terdjadi terutama dalam hal karet dan kopra, dapat dikurangi selama lima tahun ini.

IMPOR

1. Peranan Impor

Mengenai tingkat dan komposisi impor, Pemerintah mempunjai tudjuan-tudjuan sebagai berikut:

(a) Mendjamin persediaan dan harga jang stabil untuk barang-barang impor kebutuhan pokok makanan dan tekstil;

(b) Mendjamin penggunaan maksimal dari kapasitas produksi jang ada:

  (i) spareparts dan peralatan modal untuk menaikkan penggunaan kapasitas jang ada;

  (ii) impor bahan-bahan penolong dan bahan mentah jang diperlukan untuk mentjapai produksi jang direntjanakan;

(c) Mendjamin arus barang modal, bahan mentah dan penolong seperti dibutuhkan dalam Rentjana Pembangunan; dan

(d) Dimana mungkin mendorong produksi bahan mentah dalam negeri.

Disamping tudjuan penjesuaian komposisi impor dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun, kebidjaksanaan impor djuga mempunjai hubungan erat dengan perkembangan industri dalam negeri dari segi proteksi. Pertumbuhan industri barang djadi dan setengah djadi mengambil peranan jang penting dalam

Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Sebagian dari pertambahan kapasitas dan produksi dalam negeri akan bersifat substitusi untuk barang-barang jang kini masih diimpor. Meskipun begitu, akan diusahakan agar kapasitas baru ini akan terdjadi dalam bidang produksi dimana Indonesia mempunjai keuntungan komparatip, baik dipasar dalam negeri maupun dipasar luar negeri. Dengan demikian akan dihindari bahwa kebidjaksanaan semata-mata tertudju pada substitusi impor tanpa menghiraukan kemungkinan akan timbulnja sektor-sektor produksi dengan biaja jang terlampau tinggi dibelakang tirai proteksi.

2. Kebidjaksanaan Impor

Kebidjaksanaan pengawasan impor akan didasarkan pada pengawasan tidak langsung (melalui harga), termasuk diferensiasi dalam kurs valuta asing. Untuk menekan distorsi dalam perdagangan akan diusahakan untuk menjederhanakan prosedur impor dan akan menghindari terdjadinja perubahan jang berlebih-lebihan dalam peraturan-peraturan perdagangan. Meskipun demikian jang mendjadi pertimbangan utama ialah bahwa tingkat dan komposisi impor memenuhi sasaran perentjanaan.

Disamping itu harus diakui pula bahwa suatu pola perdagangan dan pasaran valuta asing jang sederhana tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna sebelum distorsi dalam kebidjaksanaan ekonomi dimasa jang lampau dapat dihilangkan. Selama harga-harga relatip dalam negeri sedikit-dikitnja belum searah dengan harga-harga relatip internasional dan selama harga-harga di Indonesia untuk barang-barang tertentu belum sesuai dengan harga diluar negeri, kemungkinan untuk mentjapai tudjuan-tudjuan dibidang perdagangan internasional semata-mata dengan tindakan-tindakan tidak langsung berdasarkan kebidjaksanaan liberal adalah sangat ketjil.

Baik dalam hal pengawasan atas impor maupun dalam hal kebidjaksanaan kurs valuta asing, Pemerintah akan bersikap pragmatis. Dengan demikian arus dan komposisi impor senantiasa disesuaikan dengan program pembangunan.

3. Projeksi Impor

Projeksi impor (tanpa minjak) selama masa lima tahun menundjukkan pola seperti terlihat pada Tabel III - 5.

Impor bahan makanan (beras, tepung terigu, lain bahan makanan) akan menurun dari $ 176 djuta didalam tahun 1969/70 mendjadi $ 67 djuta dalam tahun 1973/74. Chusus mengenai beras, diharapkan bahwa dalam tahun terachir dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun tidak diperlukan impor lagi.

Impor bahan baku dan penolong akan naik lebih dari dua kali, jaitu dari $ 335 djuta didalam tahun 1969/70 mendjadi $ 680 djuta dalam tahun 1973/74. Impor kapas akan naik dari $ 26 djuta mendjadi $ 52 djuta. Bahan untuk produksi kertas akan naik hampir delapan belas kali, jaitu dari $ 1 djuta mendjadi $ 19 djuta. Kedua kenaikan ini disebabkan karena produksi tekstil dan kertas direntjanakan akan ditingkatkan. Impor bahan baku tahun 1970/71 dibandingkan dengan tahun 1969/70 akan naik dengan 30,4 persen. Akan tetapi persentase kenaikan ini akan menurun ditahun-tahun berikutnja.

Impor barang **modal** akan naik dari $ 275 djuta mendjadi $ 614 djuta atau suatu kenaikan sebesar 123 persen. Djuga impor barang modal akan mengalami kenaikan jang besar dalam tahun 1970/71, jaitu sebesar 31,6 persen dibandingkan dengan tahun 1969/70. Persentase kenaikan ini kemudian akan menurun sampai tahun 1972/73, tetapi tidak setjepat bahan baku/ penolong.

Dalam projeksi impor lima tahun mendatang akan djelas terlihat perubahan dalam komposisi impor. Dalam tahun 1969/70 impor bahan makanan merupakan 20 persen dari djumlah impor seluruhnja, bahan baku dan penolong 38 persen, dan barang modal 31 persen. Persentase-persentase tersebut dalam tahun 1973/74 akan mendjadi 5 persen, 47 persen dan 43 persen. Impor golongan barang-barang lain setjara relatip menurun dari 11 persen dalam tahun 1969/70 mendjadi 5,0 persen djika dibandingkan dengan djumlah impor. Hal ini disebabkan karena kenaikan produksi dalam negeri dari barang-barang tertentu jang termasuk golongan ini, terutama tekstil djadi.

KEADAAN HUTANG-PIUTANG, PINDJAMAN LUAR NEGERI, DAN INVESTASI SWASTA ASING

Disamping penghasilan ekspor, faktor-faktor jang menentukan besarnja sumber-sumber luar negeri jang tersedia untuk pembangunan ialah kewadjiban kita untuk melunasi hutang dan bunga atas hutang luar negeri pada satu pihak, dan besarnja sumber-sumber jang tersedia dari pindjaman luar negeri serta investasi swasta asing pada lain pihak.

Sebagaimana terlihat dari Tabel III-6 Indonesia telah mewarisi hutang dan kewadjiban pembajaran kembali hutang jang besar. Sebagian besar dari hutang-hutang dari masa sebelum tahun 1966 itu telah digunakan untuk tudjuan-tudjuan jang berprioritas rendah, bahkan sering bersifat politik semata-mata, sehingga sedikit sekali kemanfaatannja untuk meninggikan tingkat kemakmuran rakjat.

Tabel III-7 menundjukkan djumlah pembajaran kembali hutang jang harus dibajar setiap tahun setelah diperoleh penundaan pembajaran atas pokok dan bunga hutang tahun 1969. Kewadjiban pembajaran kembali hutang sebesar 15 persen dari nilai ekspor umumnja dianggap sebagai beban jang berat. Akan tetapi kini ternjata bahwa kewadjiban pembajaran kembali hutang Indonesia berdjumlah lebih dari 20 persen dari nilai ekspornja. Betapapun beratnja, Pemerintah telah bertekad hati untuk membajar kembali hutang ini demi mendjundjung tinggi penetapan kewadjiban dan kehormatan Bangsa.

Kewadjiban ini hanja dapat ditepati bila kita berhasil mentjiptakan suatu perekonomian jang sehat dan bertumbuh, jang mampu menghasilkan sumber-sumber jang diperlukan untuk membajar kembali hutang-hutang kita. Untuk mentjapai tingkat pertumbuhan ekonomi jang demikian ini diperlukan pemasukan modal asing jang besar dalam tahun-tahun jang akan datang. Walaupun sebagian dari modal asing jang diperlukan ini mungkin akan diberikan dalam bentuk "grant" dan akan terdiri dari penanaman modal swasta asing, sebagian besar dari modal jang masuk ini dapat diharapkan akan mentjiptakan ke-

wadjiban antar-Pemerintah. Akan tetapi kenaikan hutang luar negeri ini tidak akan menimbulkan masalah jang besar atau jang tidak dapat diatasi bila kita berhasil merumuskan, membiajai, dan melaksanakan suatu rentjana pembangunan jang djitu. Dengan rentjana pembangunan jang sedemikian itu maka kewadjiban-kewadjiban masa lampau dan jang baru dimasa dekat dapat dipenuhi dalam djangka pandjang. Tanpa pembangunan jang berhasil bahkan warisan kewadjiban masa lampaupun tidak akan dapat dipenuhi, baik atas dasar pertimbangan ekonomi maupun politik.

TABEL III - 5

PROJEKSI IMPOR [1], 1969/70 - 1973/74
(f.o.b., dalam djutaan US $)

	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74
A. **Bahan Makanan**	**176**	**157**	**131**	**96**	**67**
1. Beras	106	88	63	29	—
2. Terigu	50	48	46	43	42
3. Bahan makanan lain	20	21	22	24	25
B. **Bahan Baku/ Penolong**	**335**	**437**	**539**	**628**	**630**
1. Pupuk	72	79	92	80	50
2. Benang Tenun	41	46	52	59	66
3. Kapas	26	34	37	44	52
4. Bahan/Alat Kimia	54	96	102	111	124
5. Kertas Tjetak/ Koran	19	16	12	12	10
6. Bahan Kertas	1	1	2	2	10
7. Bahan Baku lain	122	195	242	320	368
C. **Barang Modal**	**275**	**362**	**453**	**527**	**614**
D. **Barang lain**	**90**	**102**	**71**	**59**	**77**
D j u m l a h	**876**	**1.058**	**1.194**	**1.310**	**1.438**

[1] **Tidak termasuk minjak.**

TABEL III - 6

HUTANG-HUTANG LUAR NEGERI PADA 30 DJUNI 1966
(dalam djutaan US $)

	Jang harus dibajar sampai tahun 1967	Djumlah hutang
Negara-negara Peserta Perundingan Paris	**294,9**	**802,1**
Perantjis	48,7	114,5
Djerman Barat	49,3	175,7
Italia	48,9	123,2
Djepang	47,1	109,9
Nederland	25,6	53,2
Inggeris	15,4	25,3
Amerika Serikat	59,9	200,3
Pakistan	10,4	10,4
Negara Barat lain	8,6	23,4
Negara Eropa Timur & Jugoslavia	291,1	1.106,7
Hutang lain	—	269,2
Djumlah	605,0	2.211,8

TABEL III - 7

PEMBAJARAN HUTANG LUAR NEGERI, 1969/70 — 1973/74
(dalam djutaan US $)

	Djumlah [1]	Persentase dari nilai Ekspor [2]
1969/70	81	10,8
1970/71	199	23,3
1971/72	211	24,7
1972/73	208	23,2
1973/74	211	21,1

1) Termasuk pembajaran hutang-hutang minjak
2) Termasuk ekspor bruto minjak dikurangi biaja produksi dan pendapatan investasi.

Rehabilitasi kapasitas ekspor dewasa ini maupun pentjiptaan kapasitas ekspor dibidang-bidang baru akan memakan waktu dan biaja.

Hasilnja besar, akan tetapi baru akan diperoleh dimasa depan. Untuk dapat tinggal realistis dan untuk dapat mentjiptakan dasar proses perentjanaan jang rapi, jang tidak bergantung dari hasil perundingan tahunan, maka Pemerintah telah mendesak kepada negara-negara kreditor untuk selekasnja menjetudjui penundaan semua pembajaran kewadjiban jang ditimbulkan oleh hutang-hutang sebelum tahun 1966. Masalah ini kini sedang dipeladjari dan diharapkan akan dapat dirumuskan rekomendasi penjelesaian umum dimasa dekat.

Agar kewadjiban kita dapat dipenuhi sepenuhnja, maka rekomendasi penjelesaian umum itu harus memuat rentjana pembajaran jang disesuaikan dengan projeksi pendapatan devisa, sjarat pembiajaan rentjana pembangunan, dan kewadjiban-kewadjiban jang akan ditimbulkan oleh rentjana pembangunan tersebut, diharapkan bahwa penjelesaian jang akan ditjapai akan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara pembajaran kembali hutang lama dan baru dengan pendapatan devisa akan tjukup serasi. Bila pembajaran kembali hutang mengambil bagian jang terlalu besar dari pendapatan total ekspor maka kesehatan perekonomian kita tegas-tegas akan dibahajakan kembali sehingga kemampuan kita untuk memenuhi kewadjiban kita akan diragukan kembali.

PROJEKSI NERATJA PEMBAJARAN

Berdasarkan uraian mengenai ekspor, impor, dan keadaan hutang-piutang serta pemasukan modal asing, dapatlah dibuat projeksi neratja pembajaran selama lima tahun jang akan datang seperti tertera dalam Tabel III-8.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa impor kita akan lebih besar dari ekspor sehingga neratja perdagangan kita akan mendjadi negatif. Djika nilai ekspor dikurangi djuga dengan djumlah pembajaran (netto) kepada luar negeri untuk djasa-djasa, maka saldo negatif akan mendjadi lebih besar lagi. Sebagaimana ternjata dalam Tabel III-9 maka pos (lihat Tabel III-9), djasa jang

terbesar ialah untuk pengangkutan/assuransi karena barang-barang jang diimpor diangkut dengan kapal-kapal luar negeri. Nilai pendapatan investasi selama lima tahun jang akan datang masih rendah karena transfer laba dari investasi asing diduga baru akan meningkat sesudah tahun 1973. Untuk mengetahui saldo pada transaksi-transaksi jang berdjalan, sebenarnja pos djasa-djasa harus ditambah dengan bunga atas hutang luar negeri. Akan tetapi untuk melihat kewadjiban-kewadjiban terhadap hutang kita setjara keseluruhan, maka djumlah pelunasan pokok hutang dan bunga didjadikan satu pos.

TABEL III - 8

PROJEKSI NERATJA PEMBAJARAN, 1969/70 — 1973/74

(dalam djutaan US $)

	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74
I. Ekspor (f.o.b. termasuk penghasilan devisa netto minjak)	672	775	784	827	924
II. Impor (f.o.b., tanpa minjak)	— 876	— 1058	— 1194	— 1310	— 1438
III. Djasa-djasa (tanpa minjak).	— 197	— 237	— 281	— 320	— 362
Saldo transaksi berdjalan	— 401	— 520	— 691	— 803	— 876
IV. Pembajaran kembali hutang² luar negeri (tanpa minjak)	— 58	— 179	— 203	— 202	— 205
V. Modal jang dibutuhkan	459	699	894	1005	1081
a. Sektor Pemerintah	402	613	780	862	910
b. Sektor Swasta	57	86	114	143	171
Keadaan kalau hutang² ditunda sepenuhnja					
Saldo transaksi berdjalan	— 401	— 520	— 691	— 803	— 876
IVa. Pembajaran kembali hutang² luar negeri (tanpa minjak)	— 58	—	—	—	—
Va. Modal jang dibutuhkan	459	520	691	803	876
a. Sektor Pemerintah.	402	434	577	660	705
b. Sektor Swasta	57	86	114	143	171

TABEL III - 9

PROJEKSI DJASA-DJASA [1], 1969/70 — 1973/74

(dalam djutaan U.S. $)

	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74
a. Pengangkutan/ asuransi	105	127	143	156	170
b. Transpor/djasa lain (netto)	87	93	98	103	108
c. Pendapatan investasi	—	2	10	16	24
d. Bunga	5	15	30	45	60
Djumlah	197	237	281	320	362

[1] Tidak termasuk minjak.

Projeksi djumlah bunga jang harus dibajar untuk hutang-hutang setelah pertengahan tahun 1968, dimasukkan dalam pos djasa-djasa.

Andaikata pembajaran kembali hutang-hutang dan bunga atas hutang luar negeri tidak dapat ditunda lagi, maka defisit kita didalam neratja pembajaran adalah antara $ 459 djuta didalam tahun 1969/70 dan$ 1.081 djuta pada tahun 1973/74. Sebagai persentase dan nilai ekspor maka defisit ini besarnja adalah 60% pada tahun 1969/70 dan 117% pada tahun 1973/74. Djika hutang dan bunga dapat ditunda pelunasannja, defisit mendjadi antara $ 459 djuta (tahun 1969/70) dan $ 876 djuta (tahun 1973/74); atau masing-masing 68% dan 95% dari nilai ekspor pada tahun jang bersangkutan.

Defisit pada neratja pembajaran harus ditutup dengan pindjaman-pindjaman, sumbangan-sumbangan dan penanaman modal asing sebesar djumlah jang sama. Djika dipertimbangkan bahwa defisit termasuk pelunasan dan pembajaran bunga

atas hutang mulai 1971/72 adalah lebih besar dari penerimaan devisa dari ekspor, maka djelaslah peranan jang penting dari arus modal luar negeri baik berupa pindjaman-pindjaman resmi maupun investasi swasta dalam masa pembangunan ekonomi. Djika sasaran arus modal luar negeri jang masuk ini tidak dapat tertjapai, maka ini akan berarti bahwa pada tingkat ekspor jang telah maksimal, impor harus dikurangi. Hal ini akan berarti pengurangan dari impor barang-barang konsumsi, dan atau pengurangan impor barang-barang baku dan modal.

Bagian terbesar dari modal jang masuk berasal dari sektor Pemerintah atau dapat dikatakan bersifat pindjaman resmi. Djumlah pemasukan modal swasta selama lima tahun diperkirakan sebesar $ 571 djuta. Dari djumlah ini kira-kira $ 355 djuta berupa investasi asing disektor kehutanan dan minjak, sedang sisa dari penanaman modal luar negeri terutama akan terdjadi disektor industri, pertambangan lain ketjuali minjak dan perikanan.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DESA

BAB IV

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DESA

A. PEMBANGUNAN DAERAH

Pendahuluan

Sebagaimana halnja dengan pembangunan nasional maka pembangunan daerah djuga dilandaskan pada dua prinsip utama. Prinsip pertama ialah landasan Pantja Sila jang harus dipegang teguh. Dalam hubungan ini maka demokrasi ekonomi, jang tjiri-tjirinja telah ditegaskan dalam Ketetapan MPRS No. XXIII, tetap harus merupakan pembimbing utama daripada pembangunan daerah. Prinsip kedua ialah Negara Kesatuan. Ini berarti bahwa setiap segi dari rentjana pembangunan daerah dan djuga pelaksanaannja harus senantiasa merupakan kegiatan-kegiatan jang dapat memperkokoh kesatuan Indonesia, baik dalam arti kesatuan politik, ekonomi, kesatuan sosial dan kebudajaan, maupun kesatuan pertahanan keamanan.

Pembangunan ekonomi berarti pembangunan daripada potensi-potensi ekonomi. Oleh karena potensi-potensi ekonomi terdapat didaerah-daerah maka pembangunan nasional adalah identik dengan pembangunan daerah.

KEADAAN DAN MASALAH-MASALAH

Disamping adanja persamaan-persamaan diantara semua daerah maka dalam rangka Negara Kesatuan Indonesia terdapat pula sifat-sifat, kemampuan-kemampuan dan masalah-masalah jang chusus bagi masing-masing daerah. Perbedaan-perbedaan untuk sebagian adalah akibat keadaan geografi Indonesia jang merupakan suatu rangkaian kepulauan jang terbentang amat luas dan terdiri atas pulau-pulau besar dan ketjil. Keadaan jang merupakan akibat geografi tersebut ditambah lagi dengan adanja kemunduran dalam prasarana perhubungan jang telah berlangsung beberapa tahun. Kesulitan-kesulitan jang diakibatkan oleh keadaan angkutan dan perhubungan ini menimbulkan gedjala perbedaan didalam pertumbuhan ekonomi diantara daerah dan apabila tidak lekas teratasi dapat mengakibatkan

isolasi bagi daerah-daerah tertentu. Hal ini bukan sadja dapat terdjadi bagi daerah-daerah jang terdiri atas banjak pulau-pulau, melainkan djuga bagi daerah-daerah terpentjil jang terletak dipulau-pulau besar jang mengalami kemunduran dalam perhubungan darat.

Pertumbuhan jang berbeda-beda untuk sebagian djuga disebabkan karena potensi-potensi ekonomi jang berbeda-beda. Ada daerah jang memiliki potensi jang besar dibidang pertambangan atau perkebunan dan ada pula jang potensinja terletak dibidang-bidang lain. Misalnja: Pulau Bali memiliki potensi jang besar dibidang pariwisata dan Nusa Tenggara dibidang kehewanan. Hingga kini potensi-potensi masing-masing daerah belum diketahui dengan sepenuhnja. Adanja penelitian jang sistimatis mengenai potensi-potensi daerah ini akan sangat menundjang usaha-usaha pembangunan dikemudian hari.

Perbedaan geografi, kemunduran dalam pengangkutan dan perhubungan dan perbedaan dalam potensi-potensi menimbulkan adanja perbedaan-perbedaan dalam permasalahan-permasalahan daerah. Ada daerah jang masalah utamanja perhubungan laut, ada jang masalah utamanja perbaikan prasarana perhubungan darat. Ada daerah jang kekurangan tenaga kerdja dan ada jang menghadapi masalah pertumbuhan kota besar akibat urbanisasi. Bahkan ada pula daerah-daerah jang senantiasa mengalami kekurangan beras meskipun letaknja tidak djauh dari daerah-daerah penghasil beras.

Perbedaan-perbedaan antara daerah-daerah pada hakekatnja djuga disebabkan karena selama bertahun-tahun tidak ada kebidjaksanaan mengenai pembangunan daerah jang serasi dan effektif. Hal ini antara lain meliputi masalah pembangunan projek-projek, masalah perimbangan keuangan, masalah perdagangan antar daerah dan sebagainja.

Dalam masa lampau banjak projek dibangun disuatu daerah sekedar untuk memenuhi keinginan jang sifatnja politik tanpa memperhitungkan setjara wadjar faktor ekonomi dan tehnik. Akibatnja ialah bahwa projek-projek tersebut tidak memberikan hasil dan bahkan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Dengan

demikian projek-projek tersebut tidak ada kegunaannja dan hanja menghamburkan biaja jang harus ditanggung oleh rakjat banjak.

Dibidang keuangan terdapat masalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah jang selama bertahun-tahun tidak terselesaikan. Keadaan jang demikian ini bukan sadja menghambat usaha-usaha pembangunan melainkan djustru menimbulkan permasalahan-permasalahan jang berlarut-larut. Berbagai sumber keuangan jang mendjadi wewenang daerah belum dimanfaatkan sepenuhnja, sedang sebagian daripada penerimaan ADO jang seharusnja dipergunakan untuk pembangunan ternjata diperlukan untuk menutup keperluan routine. Berbagai masalah ini berhubungan pula dengan masalah otonomi jang merupakan pelimpahan kewadjiban serta wewenang untuk mengatur sendiri. Masalah ini telah pula berlangsung lama sekali.

Dalam pada itu kesulitan dibidang perhubungan mengakibatkan bahwa belum semua kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat, telah benar-benar sampai didaerah dan dilaksanakan sebagaimana mestinja. Antara lain telah terdjadi hambatan-hambatan terhadap perdagangan antar-pulau. Demikian pula mengenai berbagai matjam pungutan-pungutan. Pemerintah telah menggariskan kebidjaksanaan jang berpangkal tolak daripada azas bahwa Indonesia adalah satu kesatuan ekonomi dan bahwa pungutan-pungutan jang tidak pada tempatnja harus hapus. Dewasa ini setapak demi setapak masalah ini mulai teratasi berkat adanja perbaikan komunikasi.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH

Bertolak dari prinsip-prinsip jang telah dikemukakan dalam pendahuluan, maka hanja ada satu rentjana pembangunan nasional jang didalamnja memuat landasan-landasan, tudjuan, sasaran-sasaran, projek-projek dan prioritas-prioritas kegiatan nasional. Dengan demikian, kegiatan dan inisiatip daerah diletakkan dalam rangka pola umum rentjana pembangunan

nasional tersebut. Ini berarti bahwa rentjana kerdja dan kegiatan-kegiatan daerah ditudjukan kepada bidang-bidang jang menundjang rentjana pembangunan nasional.

Dengan menekankan adanja satu rentjana pembangunan nasional tadi, maka setiap kegiatan dan inisiatip daerah diletakkan dalam rangka pola umum rentjana pembangunan nasional tadi. Setjara konkrit maka untuk rentjana kerdja dan kegiatan-kegiatan daerah dipilih bidang-bidang jang menundjang rentjana pembangunan nasional.

Dalam rangkaian pengertian ini maka Pembangunan Daerah adalah semua kegiatan pembangunan jang ada atau dilakukan didaerah, jang unsur-unsurnja terdiri dari:

(1) kegiatan-kegiatan dan projek-projek Pembangunan Nasional jang ada didaerah itu sendiri;
(2) kegiatan-kegiatan dan projek-projek pembangunan daerah sendiri, diluar jang sudah direntjanakan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hubungan ini maka sebenarnja tidak ada satu projekpun jang setjara fisik „terletak" di Pusat; oleh karena semua projek-projek itu setjara fisik djustru tersebar dan terletak didaerah-daerah. Apa jang biasanja dikenal sebagai „Projek Pusat" atau „Projek Daerah", hanja berbeda dalam hal pertanggungan-djawab penjelenggaraan teknis serta pembiajaannja sadja. Projek jang dikenal sebagai „Projek Pusat", sebenarnja adalah projek-projek pembangunan jang mempunjai nilai strategis dalam ruang lingkup Nasional. Sesuatu projek, dianggap mempunjai nilai Nasional, apabila dengan adanja projek tadi potensi-potensi ekonomi Nasional kita dapat dikembangkan diseluruh daerah dalam rangkaian kesatuan Indonesia. Didalam keadaan dimana kemampuan pembiajaan dan peralatan jang kita miliki masih serba terbatas seperti sekarang ini, maka penentuan prioritas-prioritas dan projek-projek Nasional itu sangat penting. Tanpa penentuan-penentuan prioritas jang bertolak dari kepentingan Nasional tadi, maka kemampuan-kemampuan terbatas jang kita miliki tidak mungkin dapat diarahkan

kepada sektor-sektor jang strategis. Oleh karena itu, projek-projek jang mempunjai nilai Nasional ini semuanja disusun djalin-mendjalin, saling mendorong, saling menundjang, sehingga merupakan suatu keseluruhan projek jang konsisten.

Djustru oleh karena projek-projek tersebut dimaksud untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi nasional, maka penentuan lokasinja djuga diperhitungkan sedemikian, sehingga sesuai dengan kemungkinan kemampuan dan kondisi-kondisi masing-masing daerah. Dengan dasar-dasar pikiran tadi, maka dapat diperhitungkan sesuatu projek nasional jang ditetapkan lokasinja disesuatu daerah dapat dipastikan benar-benar dapat terwudjud, dengan biaja jang serendah mungkin dan mendapatkan manfaat jang seluas mungkin.

Mengenai „Projek-projek Nasional" jang berada didaerah, maka tanggung-djawab pelaksanaannja sepenuhnja berada ditangan Departemen operasionil jang bersangkutan, sedangkan pembiajaannja djuga mendjadi tanggung-djawab Pemerintah Pusat. Dalam hubungan ini, maka Gubernur/Kepala Daerah ikut bertanggung-djawab akan suksesnja setiap projek pembangunan jang berada didaerahnja, dalam arti memberikan bantuan serta turut melaksanakan pengawasan atas kelantjaran pelaksanaan setiap projek jang terletak didaerahnja. Demikian pula wadjib mendjamin keserasian antara projek-projek didaerahnja. Pemimpin-pemimpin projek wadjib memberikan laporan, ketjuali kepada Pemerintah Pusat, djuga kepada Gubernur/Kepala Daerah. Selandjutnja para Gubernur/Kepala Daerah akan melaporkan kepada Pemerintah tentang pelaksanaan projek-projek pembangunan didaerahnja.

Dengan demikian maka walaupun kita hanja memiliki satu rentjana pembangunan nasional, insiatip daerah tetap diperlukan, bahkan mutlak dikembangkan setjara optimal. Inisiatip daerah ini, sekaligus dihubungkan dengan pelaksanaan jang sehat daripada otonomi daerah jang riil dan luas. Ini berarti, bahwa pelaksanaan „Projek-projek Daerah" jang tidak atau belum masuk dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun,

910086-(7).

sepenuhnja mendjadi tanggung-djawab Daerah termasuk pembiajaannja.

Dalam mengembangkan inisiatip daerah tersebut, maka segala kegiatan dan usaha daerah, disamping didasarkan atas sumber-sumber kemampuan daerah jang riil dan sah, djuga diletakkan dalam keseluruhan pola umum pembangunan nasional. Artinja, kegiatan dan usaha-usaha daerah tadi merupakan komponen jang komplementer terhadap rentjana pembangunan nasional.

Dengan adanja pola rentjana dan pola kegiatan dalam ruang lingkup nasional dan ruang lingkup daerah tadi, maka usaha-usaha dan kemampuan-kemampuan daerah akan dapat digerakkan setjara efektip dan saling menundjang dengan projek-projek nasional.

Dalam pada itu segi-segi pelaksanaan merupakan komponen jang penting daripada rentjana. Untuk ini aparatur pelaksanaan didaerah memperoleh perhatian sepenuhnja. Unit-unit perentjana dan pelaksana akan benar-benar dibimbing. Dalam hubungan ini maka Gubernur/Kepala Daerah adalah Penguasa Tunggal didaerahnja. Gubernur adalah benar-benar administrator dalam arti luas, jaitu administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator masjarakat daerah.

Dalam rangka mengurangi pertumbuhan jang berbeda-beda diantara daerah-daerah maka rehabilitasi serta pembangunan prasarana angkutan dan perhubungan memperoleh perhatian utama. Adanja pengangkutan dan perhubungan jang lebih lantjar akan mempererat komunikasi antara pusat dan daerah, antara daerah jang satu dengan daerah jang lain dan didalam masing-masing daerah. Dengan demikian dapat dihindarkan terdjadinja isolasi bagi daerah-daerah terpentjil.

Selandjutnja dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah maka digariskan berbagai kebidjaksanaan mengenai pembangunan daerah jang serasi dan efektif. Kebidjaksanaan

tersebut memperhatikan sepenuhnja perbedaan dalam potensi maupun masalah jang dihadapi oleh masing-masing daerah. Adapun pengarahan dari pada kebidjaksanaan tersebut senantiasa berlandaskan prinsip-prinsip jang telah diuraikan diatas. Dengan demikian maka diusahakan adanja pengintegrasian didalam menghadapi berbagai masalah daerah jang mengarah kepada integrasi ekonomi daerah, sehingga dapat terwudjud satu kesatuan ekonomi jang kokoh.

Adapun langkah-langkah jang diambil antara lain meliputi masalah perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, masalah otonomi, masalah dekonsentrasi management dalam kegiatan ekonomi, masalah perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan dan lain-lain. Segala sesuatu direntjanakan agar supaja pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah pada achirnja menudju pada integrasi ekonomi Nasional.

Chususnja dalam menetapkan lokasi projek-projek maka dipergunakan beberapa azas, jaitu azas effisiensi, azas perimbangan antara daerah dan azas perimbangan didalam daerah. Azas effisiensi dimaksudkan untuk mentjapai effisiensi didalam pemilihan lokasi. Azas perimbangan antar daerah dimaksudkan untuk menghindari perbedaan kemakmuran serta tingkat kemadjuan jang terlalu besar diantara daerah-daerah. Prinsip perimbangan didalam daerah berhubungan dengan masalah memilih matjam investasi jang setepat-tepatnja bagi sesuatu daerah, hingga tertjipta keserasian ekonomi daerah jang bersangkutan.

Ketiga azas tersebut tidak selalu berkelakuan searah. Oleh karena itu didalam pelaksanaannja diusahakan untuk mentjapai nilai optimalnja.

Selandjutnja dalam rangka persiapan bagi pembangunan dimasa depan maka diselenggarakan program penelitian jang setjara sistimatis menelaah potensi-potensi pembangunan masing-masing daerah, untuk kemudian dimanfaatkan dalam rangka pembangunan nasional.

B. PEMBANGUNAN DESA

Pendahuluan

Daerah-daerah besar dan ketjil jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri, seperti dimaksudkan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar, pada umumnja memuat daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah pedesaan.

Daerah pedesaan meliputi desa-desa. Desa disini, dimaksudkan sebagai unit pemerintahan, jaitu sebagai daerah administratif terketjil jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri.

Perbedaan antara struktur daerah perkotaan dengan daerah pedesaan hanja terletak pada persoalan pemusatan atau persebaran pada kegiatan sosial, politik dan ekonominja. Berdasarkan alasan-alasan riil, praktis dan effisien, ditindjau dari segi sosial, politis maupun ekonomis, perkembangan daerah membawa serta timbulnja proses-proses pemusatan kegiatan, jang memberikan tjorak karakteristik kepada wadjah, kemampuan maupun kesibukan daripada daerah-daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah-daerah perkotaan menundjukkan kepadatan prasarana, sarana-sarana phisik, sosial ekonomi maupun politik jang tinggi.

Berdasarkan alasan itu pula, maka industri-industri besar dengan tingkat kemampuan teknologi jang tinggi, pada umumnja terdapat didaerah-daerah perkotaan. Sedangkan kegiatan-kegiatan disektor pertanian, sebagai suatu bidang usaha jang didasarkan pada tersedianja daerah-daerah luas serta tata tjara kerdja jang langsung terikat pada alam, tetap merupakan salah satu tjiri utama daerah pedesaan. Sesuai dengan kenjataannja, daerah perkotaan dikenal sebagai daerah-daerah pusat kegiatan pemerintahan, kebudajaan, perdagangan serta perindustrian; dan daerah-daerah pedesaan merupakan daerah-daerah persebaran kegiatan-kegiatan pertanian dan industri-industri ketjil, jang terdiri dari perindustrian dan keradjinan rakjat.

Perkembangan suatu daerah akan tertjermin pada perkembangan daerah-daerah perkotaan maupun daerah-daerah pede-

saannja. Kedua daerah itu memiliki sifat saling bergantungan. Misalnja, daerah-daerah pedesaan merupakan daerah-daerah sumber produksi bahan pangan, bahan baku dan penolong untuk industri, bahan-bahan bangunan, bahkan sebagai sumber tenaga kerdja bagi daerah-daerah perkotaan. Sebaliknja, daerah-daerah perkotaan memberikan fasilitas-fasilitas penampungan dan distribusi bagi barang-barang dari dan untuk daerah pedesaan, seperti hasil-hasil produksi ekspor pertanian maupun peralatan serta bahan-bahan penolong bagi kegiatan pertanian, fasilitas-fasilitas perkreditan bagi kegiatan produksi didaerah pedesaan dan sebagainja.

Perkembangan daerah akan berdjalan dengan lantjar, apabila struktur pemerintahan jang berlaku sesuai dengan nilai-nilai potensiil jang terdapat didaerahnja. Dalam hubungan ini daerah-daerah terketjil jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri, minimum harus pula memuat daerah perkotaan, disamping daerah pedesaan, dengan demikian desa hanja merupakan daerah administratif sadja daripada daerah terketjil jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri. Dengan perkataan lain, perkembangan daerah tidak akan menudju terbentuknja desa sebagai daerah otonomi, melainkan mengarah ke bertambahnja djumlah daerah-daerah terketjil, seperti jang dimaksudkan itu, dimana desa tetap terdapat didalamnja.

KEADAAN DAN MASALAH

Nilai potensiil desa:

Perbaikan tingkat kehidupan masjarakat ditjapai dengan melalui pembangunan ekonomi nasional, jang pada dasarnja berpidjak pada nilai-nilai potensiil daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Sebagaimana telah digambarkan dalam uraian terdahulu, perbedaan antara struktur daerah perkotaan dengan daerah pedesaan adalah terletak hanja pada persoalan pemusatan atau persebaran kegiatan-kegiatan sosial, politis maupun ekonomis.

Daerah perkotaan dikenal sebagai daerah pemusatan kegiatan-kegiatan perdagangan dan perindustrian pada umumnja, daerah pedesaan merupakan daerah-daerah tempat persebaran kegiatan-kegiatan pertanian dan industri-industri ketjil.

Pada tingkat perkembangan sekarang ini, dimana ekonomi Indonesia masih bertjorak ekonomi pertanian, nilai potensiil terbesar terletak didaerah pedesaan. Dengan berkembangnja kegiatan-kegiatan disektor industri, barulah terdjadi pergeseran titik-berat nilai potensiil kearah daerah perkotaan. Namun demikian, bagi perkembangan daerah, kedudukan desa sebagai suatu kesatuan dengan daerah perkotaan, tidak akan berobah.

Oleh karena itu, keharusan pembangunan desa tidaklah semata-mata karena terdorong oleh rendahnja tingkat kehidupan masjarakat desa, melainkan merupakan suatu keharusan didalam meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan maupun pertumbuhan ekonomi nasional jang sehat, untuk masa jang akan datang.

Kondisi dari daerah-daerah pedesaan di Indonesia jang berbeda-beda itu akan menimbulkan masalah-masalah jang berlainan pula, sehingga dapat membawa kelainan dalam tjara pendekatan pembangunan desa dimasing-masing daerah. Menurut kondisinja, daerah-daerah pedesaan di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam dua kategori utama.

Kategori I:

Desa-desa sebagai unit pemerintahan jang meliputi wilajah luas, akan tetapi penduduknja berdjumlah sedikit dan dibeberapa tempat berada dalam keadaan terpentjil-pentjil. Keadaan prasarananja pada umumnja sangat kurang.

Didaerah tersebut pada umumnja terdapat kemungkinan potensi jang masih sangat luas untuk usaha-usaha disektor pertanian. Sehingga dirasakan tidak terdapat persoalan kekurangan lapangan kerdja, bahkan sebaliknja, jaitu keadaan tenaga kerdja sangat terbatas. Dengan kondisi tersebut mudah terdjadi perpindahan-perpindahan dari bidang usaha jang satu kebidang usaha jang lain.

Peningkatan harga bahan pangan akan dapat menimbulkan perpindahan dari bidang usaha tertentu kesektor produksi bahan pangan, sehingga dapat membahajakan sumber-sumber pendapatan penting jang lain, seperti produksi ekspor pertanian, karet, kelapa dan djenis-djenis lainnja. Sebaliknja, penurunan harga bahan pangan akan menjebabkan beralihnja bidang usaha kesektor usaha lain-lain, seperti misalnja kesektor produksi hasil hutan.

Ada daerah-daerah pedesaan jang terletak disekitar djaringan prasarana perhubungan, sehingga mudah untuk ditjapai. Tetapi ada pula jang terdapat djauh dari djaringan prasarana perhubungan jang ada dan sukar untuk ditjapai. Jang terachir ini, umumnja daerah-daerah dimana penduduknja berladang dan sering berpindah-pindah.

Didaerah-daerah pedesaan jang terletak djauh atau sukar untuk ditjapai melalui djaringan prasarana perhubungan jang ada, penduduknja mengarahkan produksi pertaniannja terutama untuk kebutuhan hidupnja sendiri, sehingga tingkat penghasilannja adalah rendah, walaupun potensiil daerahnja tjukup kaja. Perhubungan jang sulit menjebabkan biaja pengangkutan tinggi, hal ini kurang menimbulkan perangsang.

Untuk meningkatkan produktivitas mereka, dapat diusahakan mengalihkan mereka keusaha-usaha pertanian jang berada disekitar djaringan perhubungan jang telah ada, chususnja untuk kegiatan bertjotjok tanam dengan sekaligus memperkembangkan sistim pengairannja. Diusahakan agar sedjauh mungkin dapat mendekati daerah-daerah sentral konsumsi, seperti daerah-daerah perkotaan atau daerah perkebunan.

Oleh karena terbatasnja tenaga kerdja jang tersedia, usaha-usaha peningkatan produktivitas adalah sukar, baik dengan djalan intensifikasi maupun dengan djalan pembentukan desa-desa jang dekat dengan djaringan prasarana perhubungan. Usaha-usaha extensifikasi dapat pula dilakukan dalam rangka perkembangan daerah, dengan djalan mendatangkan tenaga kerdja chusus.

Setjara keseluruhan, pembangunan desa didaerah akan menghasilkan peningkatan produktivitas disektor pertanian atau berupa pembentukan desa-desa pertanian baru.

Kategori II:

Disini desa-desa memiliki penduduk jang besar dan dirasakan sangat padat terhadap luas wilajahnja. Prasarana perhubungan tjukup banjak dan tersebar, desa-desa ini relatif mudah untuk ditjapai.

Kemungkinan perluasan usaha disektor pertanian terbatas, sedangkan perkembangannja tidak lagi mampu untuk memberikan penambahan lapangan kerdja jang tjukup, sesuai dengan pertambahan penduduknja, sehingga kesulitan akan lapangan kerdja terus meningkat. Keadaan sudah sedemikian mendesak, sehingga menimbulkan tekanan-tekanan pada daerah-daerah perkotaan, dimana kondisinja sendiri belum mampu untuk memberikan tjukup lapangan kerdja, sehingga menimbulkan pengangguran-pengangguran didaerah perkotaan sendiri.

Apabila didaerah pedesaan sendiri tidak tampak adanja pemetjahan persoalan kekurangan lapangan kerdja, usaha-usaha untuk mengatasi akibat daripada urbanisasi didaerah-daerah perkotaan akan tetap dikedjar-kedjar oleh keadaan mendesak jang sama.

Didaerah ini produktivitas djuga belum tinggi. Untuk meningkatkan produksi disektor pertanian didaerah ini hanja dapat dilakukan dengan usaha-usaha intensifikasi. Namun demikian, usaha-usaha ini dirasakan tidak akan memberikan penambahan lapangan kerdja jang berarti disektor pertanian-nja sendiri. Didaerah jang tipis penduduknja, peningkatan produktivitas dapat berarti penghematan penggunaan tenaga kerdja, tetapi daerah-daerah ini djustru kelebihan tenaga kerdja.

Setjara keseluruhan, pembangunan desa disini akan berupa usaha-usaha peningkatan produktivitas disatu pihak, dan usaha-usaha menimbulkan lapangan kerdja jang luas dilain pihak.

Oleh karena kemungkinan perluasan sektor pertanian boleh dikata telah terbatas sifatnja, maka dipandang perlu untuk menggerakkan usaha-usaha peningkatan kegiatan industri-industri ketjil jang tersebar didaerah-daerah pedesaan. Industri-industri besar, pada tingkat perkembangan dewasa ini masih terlalu berat karena masalah pembiajaan investasi.

Sesuai dengan strategi pembangunan, industri-industri ketjil jang diutamakan adalah jang bergerak disektor pertanian, jaitu industri-industri jang menundjang produksi pertanian dan industri-industri pengolah hasil-hasil pertanian.

Masjarakat desa:

Ladjunja perkembangan ekonomi tetap menghendaki adanja keseimbangan antara perkembangan-perkembangan didaerah perkotaan dengan perkembangan-perkembangan didaerah pedesaan. Oleh karena nilai potensiil terbesar terletak didaerah pedesaan, maka pada tingkat perkembangan dewasa ini, perkembangan ekonomi nasional banjak tergantung dari perkembangan kegiatan ekonomi didaerah pedesaan.

Daerah perkotaan, sebagai daerah pemusatan kegiatan sosial, politis dan ekonomis, memiliki masjarakat jang lebih mudah untuk menerima penemuan-penemuan baru, pemikiran-pemikiran baru perkembangan-perkembangan dibidang teknologi, moneter, kebudajaan dan lain-lain. Daerah perkotaan merupakan saluran bagi kegiatan-kegiatan daerah pedesaan dengan dunia luar, misalnja dalam masalah perdagangan dengan luar negeri. Sudah sewadjarnja, bahwa perkembangan atau kemadjuan didunia luar akan terasa pula pengaruh maupun akibatnja didaerah pedesaan. Kedjadian ini tentunja tergantung pada kelantjaran hubungan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, tergantung pula pada tingkat kemampuan masing-masing.

Kalau didaerah perkotaan fungsi kelembagaan lebih menondjol, didaerah pedesaan adalah lain keadaannja. Didaerah itu, kegiatan-kegiatan produksi lebih ditentukan oleh sifat serta kemampuan individu.

Sesuai dengan tjiri utama daerah pedesaan, jaitu pertanian, dimana perkembangannja berdjalan lamban, kehidupan dalam masjarakatnja banjak terikat pada kebiasaan-kebiasaan serta tradisi-tradisi jang ada, lamban pula menerima pemikiran-pemikiran baru kearah kemadjuan berdjalan.

Masjarakat kota, sebaliknja, berhubung tersedianja prasarana maupun sarana-sarana sosial, politis dan ekonomis jang tjukup, lebih mudah menerima dorongan kearah kemadjuan. Daerah perkotaan beserta masjarakatnja merupakan pemantjar dari arus kemadjuan bagi daerah serta masjarakat desa. Dengan perantaraan komunikasi jang baik arus kemadjuan jang ada tersebut dapat dengan effektif mentjapai sasarannja. Komunikasi tersebut dapat bersifat sarana phisik, sosial, politis maupun ekonomis. Dalam hal ini, pimpinan pemerintahan desa dapat pula merupakan perpandjangan ataupun perantara daripada pemantjar arus kemadjuan tersebut. Faktor pimpinan dan kepemimpinan masjarakat sangat mempengaruhi perkembangan daerah pedesaan beserta masjarakatnja.

Kegiatan didaerah perkotaan berlangsung atas dasar modal jang intensif. Sedangkan didaerah pedesaan belum terasa adanja iklim moneter. Ketidak sesuaian ini, akan menghambat pengaruh kemadjuan jang datang dari daerah perkotaan. Dapat pula terdjadi bahwa produksi didaerah pedesaan akan dikuasai setjara langsung dan tidak langsung oleh kekuatan moneter dari daerah perkotaan. Dengan demikian masjarakat desa dengan serba kekurangannja akan tetap mendjadi objek dalam arus perkembangan ekonomi itu. Sudah barang tentu hal ini dapat dipandang sebagai segi jang tidak sehat didalam perkembangan ekonomi nasional.

Modal desa:

Masjarakat desa, didalam mentjukupi kebutuhan hidupnja, berupa pangan, sandang dan papan, sebagian terbesar memiliki mata pentjaharian disektor pertanian, chususnja dalam produksi pangan. Sifat pengusahaannja disini adalah individuil.

Terutama didaerah-daerah jang penduduknja sangat padat, penghasilan masing-masing demikian rendah, sehingga sulit untuk dapat menjisihkan sebagian dari penghasilan produksinja untuk modal pengusahaan selandjutnja. Bahkan dalam banjak hal tidak dapat mentjukupi kebutuhan hidupnja sendiri, sehingga banjak daripada para pengusaha pertanian tersebut djatuh ketangan penguasa modal.

Keadaan jang sudah sedemikian tragisnja itu masih makin diperburuk oleh sistim pemasaran jang djustru memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk menikmati sebagian besar dari hasil kerdja petani tersebut. Ini berarti, pada satu pihak mengurangi kesempatan para petani untuk dapat menghimpun modal dan pada lain pihak merupakan perpindahan modal setjara berlebihan kedaerah-daerah perkotaan, jang dewasa ini sifatnja kurang produktif, sehingga setjara menjeluruh kurang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi jang produktif, bahkan pada hakekatnja djustru menghambat.

Modal dasar pembangunan desa adalah pertama-tama tenaga kerdja dan daerah-daerah luas jang sesuai untuk usaha-usaha pertanian maupun kekajaan alam lainnja. Modal dasar tersebut terdapat tjukup banjak, hanjalah lokasinja dimasing-masing daerah tidak seimbang.

Untuk memanfaatkan modal dasar tersebut diperlukan modal investasi dan modal kerdja jang tjukup. Modal investasi, dapat diwudjudkan dalam bentuk sarana-sarana produksi, misalnja peralatan serta bahan-bahan penolong produksi, dan sarana-sarana angkutan. Dapat pula digunakan untuk penjediaan prasarana-prasarana produksi dan perhubungan.

Kalau modal kerdja dan modal investasi untuk sarana-sarana produksi dan angkutan sepenuhnja mendjadi tanggungan masjarakat sendiri, maka pembangunan prasarana-prasarana produksi dan perhubungan, seperti irigasi, djalan-djalan dan sebagainja, pada dasarnja mendjadi kewadjiban Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan kewadjiban itu, Pemerintah Daerah menggunakan sumber-sumber keuangan daerah. Akan tetapi, dewasa ini penerimaan berasal dari sumber-sumber tersebut adalah sangat terbatas. Namun demikian, pada tingkat perkembangan dewasa ini, dimana nilai produktivitas didaerah pedesaan masih rendah, masih terdapat sumber-sumber kekuatan daerah jang berupa tenaga kerdja jang berkelebihan. Kalau sumber-sumber keuangan daerah dapat diatur melalui norma-norma administrasi Pemerintah, maka sumber kekuatan daerah jang lain itu dapat dihimpun dan digunakan hanja dengan melalui kewibawaan pemerintah desa serta kepemimpinan masjarakat sendiri.

Sesuai dengan adanja sifat kegotong-rojongan jang hidup dalam kalangan masjarakat desa pekerdjaan itu dapat berdjalan atas dasar kesadaran masjarakat sendiri, sehingga pada kenjataannja, pengairan-pengairan desa serta djalan-djalan desa telah merupakan sasaran kegiatan gotong-rojong masjarakat desa, jang dirasakan seakan-akan telah mendjadi kewadjiban mereka. Dalam hubungan ini dapat diramalkan, bahwa nanti setelah sektor pertanian dapat berdjalan dengan modal jang intensief dan produktivitas jang tinggi dan sumber penerimaan Daerah mendjadi tjukup besar, imbangan kewadjiban antara Pemerintah dan masjarakat desa akan mentjapai proporsi jang lebih djelas dan tegas.

Disamping kewibawaan pemerintahan desa serta kepemimpinan masjarakat sendiri, Pemerintah dapat memperhitungkan sampai berapa djauh dapat memberikan bantuan baik moril maupun materiil, dalam rangka intensifikasi pengerahan tenaga, jang berlandaskan kegotong-rojongan itu. Bantuan materiil dapat melalui subsidi kepada Daerah maupun melalui sematjam kredit djangka pandjang. Dalam pada itu jang perlu didjelaskan bahwa bantuan sedemikian itu ditudjukan kepada desanja.

Dalam rangka membantu para pengusaha produsen pertanian untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah permodalan, baik jang berupa modal kerdja maupun modal investasi, Peme-

rintah telah mendorong berdirinja lembaga-lembaga perkreditan, jang diarahkan untuk daerah-daerah pedesaan. Akan tetapi, prosedur-prosedur jang digunakan oleh lembaga-lembaga itu dirasakan masih menjulitkan para nasabahnja, tidak mengarah kepada kemanfaatan dan kebutuhan produksi jang njata, tapi lebih mengutamakan sistim perbankannja semata-mata.

Sebaliknja, kesulitan lain disebabkan pula oleh pihak masjarakat desanja sendiri, karena kekurangan pengetahuan maupun bimbingan dalam penggunaan kredit produksi, sering-sering penggunaannja lebih bersifat konsumtif, bahkan dalam banjak hal tidak terdjamin pengembaliannja.

Dewasa ini, sebagian besar masjarakat mulai menjadari, bahwa dengan melalui usaha-usaha intensifikasi disektor pertanian dapat ditjapai hasil jang sangat memuaskan, kegiatan ini dapat merupakan tempat untuk penanaman modal jang tjukup besar. Bagaimanapun djuga kesadaran ini adalah merupakan bantuan jang besar kepada Pemerintah dalam usahanja untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun demikian, apabila kesadaran tersebut tidak dapat tersalurkan dengan semestinja dapat terdjadi bahwa para petani jang umumnja kurang mampu menguasai keuangannja akan mendjadi objek bagi para penguasa modal.

Oleh karena itu pada tingkat perkembangan dewasa ini, sangat diperlukan adanja lembaga-lembaga perkreditan jang dapat memahami dan melajani kebutuhan-kebutuhan produksi jang njata dan mampu menjesuaikan diri dengan tingkat kemadjuan masjarakat desa pada umumnja. Selain dari pada itu, dari lembaga-lembaga tersebut diharapkan pula membantu dalam menghadapi masalah pemasaran hasil produksi pertanian, sehingga dapat terbendung mengalirnja modal setjara berkelebihan dari daerah pedesaan kedaerah perkotaan.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH

Pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka mengisi maupun meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional jang sehat. Oleh karenanja, setiap

tindakan dan langkah jang diambil harus diletakkan pada kedudukan daerah pedesaan, sebagai suatu kesatuan dengan daerah perkotaan, dalam rangka perkembangan daerah. Dalam pada itu, dikehendaki adanja keseimbangan dalam perkembangan maupun pertumbuhan ekonomi antara kedua daerah tersebut, jang didasarkan pada keserasian dalam tingkat kemadjuan dan kemampuan masing-masing.

Daerah perkotaan, sebagai daerah pemusatan kegiatan-kegiatan sosial, politis dan ekonomis, memberikan kepeloporan dalam perubahan maupun pertumbuhan tingkat kemadjuan dan kemampuan desa. Oleh karena itu, perlu ditjiptakan komunikasi jang effektif, untuk menjalurkan hasil-hasil kemadjuan setjara kontinju dan terarah kedaerah pedesaan, baik itu berupa kemadjuan-kemadjuan sarana phisik, sosial, ekonomis maupun politis. Dalam pada itu, sasaran-sasaran ditekankan pada perubahan sikap mental, peningkatan bekal pengetahuan serta ketrampilan bagi masjarakat desa, sedang untuk pelaksanaannja diperlukan peranan dari pimpinan pemerintahan desa dan apparaturnja, beserta lembaga-lembaga desa jang membantunja.

Pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka imbangan kewadjiban jang sewadjarnja antara Pemerintah dengan Masjarakat Desa. Kewadjiban Pemerintah adalah menjediakan prasarana-prasarana, memberikan bimbingan dan pengawasan, sedangkan selebihnja disandarkan pada kemampuan Masjarakat Desa sendiri. Disatu pihak, Pemerintah berusaha untuk dapat memberikan bantuan materiil kepada desa guna menghimpun dan mengintensifkan pelaksanaan kerdja gotong-rojong, dan dilain pihak, Pemerintah membantu dalam pengusahaan serta pemupukan modal bagi kebutuhan-kebutuhan produksi jang njata didaerah-daerah pedesaan.

Adapun langkah-langkah jang diperlukan dalam rangka itu adalah:

(1) Mengadakan penelitian jang saksama, mengenai kedudukan daerah pedesaan dalam rangka perkembangan daerah (Pola Rentjana Pembangunan Daerah). Untuk daerah-daerah dimana terdapat desa-desa jang terpentjil-pentjil

letaknja, diusahakan pemindahan-pemindahan kedaerah-daerah djaringan perhubungan jang ada, sehingga daerah-daerah pedesaan dapat benar-benar berada dalam orbitnja perkembangan ekonomi daerah, dengan tetap mengindahkan nilai-nilai potensiil daerahnja.

(2) Mengadakan usaha-usaha untuk menjesuaikan sikap mental masjarakat desa, agar dapat memahami serta menjadari usaha-usaha kearah kemadjuan, dengan disertai peningkatan bekal pengetahuan serta ketrampilan bagi masjarakat desa. Dalam usaha tersebut sasaran diarahkan kepada peningkatan produktivitas. Namun demikian, kesemuanja itu perlu memperhatikan mekanisme jang hidup dikalangan masjarakat desa, jang dilandasi oleh suasana kehidupan jang sangat dipengaruhi oleh alam, adat istiadat, kepertjajaan, rasa kegotong-rojongan, tata kerdja traditionil dan lain-lain.

(3) Menstimulir berdirinja lembaga-lembaga perkreditan, kearah daerah-daerah pedesaan, jang dapat memahami dan melajani kebutuhan-kebutuhan untuk produksi jang njata dan mampu menjesuaikan diri dengan tingkat kemampuan masjarakat desa pada umumnja. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat membantunja dalam menghadapi masalah pemasaran hasil-hasil produksi pertanian, sehingga dapat ditjegah pengaliran modal setjara berlebihan dari daerah-daerah pedesaan kedaerah perkotaan.

(4) Mengusahakan bantuan materiil kepada desa, untuk menghimpun serta mengintensifkan tjara kerdja gotong-rojong, jang diarahkan pada usaha-usaha melengkapi serta menjempurnakan sarana-sarana produksi terutama dan djuga sarana-sarana sosial. Bantuan tersebut tidak diperuntukkan bagi kebutuhan-kebutuhan jang bersifat konsumtif, melainkan untuk membantu mendapatkan bahan-bahan jang tidak dapat diperoleh didaerah-daerah pedesaan.

(5) Mengeffektifkan struktur pemerintahan desa dengan disertai peningkatan effektivitas dan sinkronisasi lembaga-lembaga desa.

BAB V

ADMINISTRASI PEMERINTAH, PELAKSANAAN RENTJANA DAN RENTJANA OPERASIONIL TAHUNAN

BAB V

ADMINISTRASI PENERIMAAN, PELAKSANAAN RENTJANA DAN RENTJANA OPERASIONIL TAHUNAN

B A B V

ADMINISTRASI PEMERINTAH, PELAKSANAAN RENTJANA, DAN RENTJANA OPERASIONIL TAHUNAN

A. ADMINISTRASI PEMERINTAH

Pendahuluan

Suatu rentjana pembangunan baru akan berhasil bila terdapat suatu program pelaksanaan jang baik. Untuk dapat melaksanakan program-program pembangunan dengan baik diperlukan suatu aparatur Pemerintah jang effektif dan effisien. Oleh karena itu dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini penjempurnaan administrasi Pemerintah merupakan salah satu usaha penting jang akan dilakukan. Perbaikan-perbaikan jang diperlukan bersifat menjeluruh. Akan tetapi ada hal-hal jang segera perlu diperbaiki, terutama jang merupakan penghambat-penghambat dalam kelantjaran perentjanaan dan pelaksanaan rentjana pembangunan. Dengan demikian penjempurnaan administrasi Pemerintah akan dilakukan setjara bertahap menurut suatu skala prioritas.

Reorganisasi serta penjempurnaan-penjempurnaan dalam administrasi Pemerintah akan ditudjukan kearah „tertjapainja aparatur dan administrasi Pemerintah jang stabil, berkelangsungan (dapat bekerdja setjara kontinu), effektif, dan effisien, jang bekerdja untuk kepentingan rakjat, dan bukan untuk kepentingan golongan ataupun pribadi". Tudjuan djangka pendek perbaikan administrasi Pemerintah ialah „tertjapainja effisiensi dan effektivitas dalam bidang organisasi, prosedur dan personil, sehingga aparatur dan administrasi Pemerintah mampu menjusun rentjana dan program pembangunan jang dapat dilaksanakan, serta benar-benar mampu melaksanakan rentjana dan program jang disusunnja". Administrasi Pemerintah tidak lagi mendjalankan hanja fungsi-fungsi umum Pemerintah

910086-(8).

("regular functions") tetapi meningkatkan diri dengan melakukan fungsi-fungsi pembangunan ("development functions"). Administrasi Pemerintah bukan hanja menjelenggarakan tertib Pemerintahan tetapi djuga mendorong dan mengarahkan kepada pembangunan. Tetapi karena bertambah luasnja tugas administrasi pemerintah maka sering terdapat suatu ketidak serasian antara kebutuhan dan keadaan administrasi pemerintah. Hal ini perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kemampuan administrasi pemerintah di Indonesia.

Usaha penjempurnaan tersebut akan dilakukan sebagai realisasi azas demokrasi ekonomi didalam penjelenggaraan administrasi pemerintah. Azas ini menghendaki suatu tjara penjelenggaraan administrasi pemerintah untuk suatu perekonomian jang bukan mengarah kepada tjara-tjara „persaingan bebas" maupun tjara-tjara dimana penguasaan Pemerintah dilakukan setjara berlebih-lebihan. Azas ini menghendaki suatu keadaan dimana monopoli-monopoli, terutama dalam berbagai kegiatan usaha ekonomi, diminimalisir.

Keadaan Dibidang Administrasi Pemerintah

Dibidang Administrasi Pemerintah telah banjak dilakukan usaha-usaha perbaikan-perbaikan sedjak achir tahun 1966. Namun demikian penjempurnaan-penjempurnaan diberbagai bidang masih perlu dilakukan.

Administrasi pemerintah antara tahun 1958 sampai dengan tahun 1965 mendjurus kepada suatu situasi jang tidak menguntungkan bagi pembangunan. Perkembangannja lebih menudju kepada kwantitas daripada kwalitas. Terdapat doublures serta kesimpang-siuran kewenangan dan tanggung-djawab antara berbagai badan dan lembaga negara.

Administrasi pemerintah lebih berorientasi politik daripada berorientasi pembangunan. Selain itu terdjadi pengaburan tugas-tugas eksekutip, legislatip, dan judikatip. Dengan demikian pengawasan terhadap penjelenggaraan administrasi pemerintah mendjadi terbengkalai. Hak budget Dewan Perwakilan Rakjat, antara lain, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinja.

Dalam keadaan jang sedemikian administrasi pemerintah lebih merupakan beban bagi ekonomi daripada menundjang ekonomi. Hal ini djuga disebabkan karena kurang berlakunja prinsip-prinsip effisiensi dan management jang rasionil. Kegiatan-kegiatan usaha banjak didasarkan atas subsidi-subsidi. Berkembangnja penjelewengan-penjelewengan serta korupsi, antara lain, disebabkan oleh adanja etatisme dalam bentuk pemberian djatah, lisensi atau idjin-idjin dan lain-lain. Kesemuanja ini tidak memberikan dorongan supaja kegiatan ekonomi dikembangkan setjara sehat dan wadjar.

Djumlah pegawai Pemerintah berkembang setjara pesat, namun penjebarannja, matjamnja, serta tingkat keahliannja tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan sektor-sektor jang diperlukan dalam pembangunan Negara. Disamping itu djumlah pegawai jang bekerdja pada tugas-tugas substantip atau operatip diimbangi oleh sedjumlah besar pegawai jang bekerdja pada tugas-tugas pelajanan administratip. Anggaran belandja untuk pegawai negeri dengan demikian mendjadi beban jang besar bagi anggaran belandja negara. Walaupun demikian keadaan gadji pegawai negeri sangat menjedihkan sebagai akibat berlakunja inflasi bertahun-tahun.

Perbaikan jang sungguh-sungguh tidak pula dilakukan dibidang "Organization and Method". Dengan demikian struktur serta tata-tjara dalam satuan-satuan badan pemerintah tidak mendjadi efektif dan effisien.

Demikian pula banjak jang perlu disempurnakan dibidang administrasi keuangan dan administrasi peralatan dan perbekalan. Dibidang administrasi keuangan, misalnja, belum dilakukan standardisasi unsur-unsur biaja (items of cost) bagi pengeluaran-pengeluaran routine maupun pembangunan. Ada pengeluaran-pengeluaran routine jang bersifat non-pembangunan dan ada pula jang bersifat pembangunan. Begitu pula anggaran modal (capital) ada jang bersifat pembangunan dan ada jang bersifat non-pembangunan. Perbaikan-perbaikan djuga perlu dilakukan dibidang penjusunan anggaran, pembukuan,

pertanggungan-djawab, dan pengawasan keuangan. Tjara-tjara dalam rangka pembelian barang untuk Pemerintah, pendjualan-pendjualan, pemborongan-pemborongan, dan transaksi-transaksi lain djuga memerlukan penjempurnaan-penjempurnaan.

Banjak perusahaan-perusahaan negara karena diberikan posisi monopoli serta subsidi-subsidi, berkembang mendjadi tidak effisien, sehingga mendjadi beban bagi negara dan masjarakat. Tudjuan utama untuk memupuk dana tidak tertjapai. Dilihat dari segi bentuk hukumnja terdapat pula keaneka warnaan jang mempersulit pengurusannja.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih mempunjai berbagai kelemahan, terutama dalam rangka desentralisasi dan otonomi Daerah. Desentralisasi dan otonomi Daerah baru dapat berdjalan setjara lebih wadjar djika otonomi tersebut bersifat riil. Dengan demikian maka Daerah akan mampu untuk membiajai penjelenggaraan tugas-tugas Daerah dari sumber-sumber pembiajaan jang dapat diusahakan oleh Daerah sendiri maupun jang diperolehnja melalui perimbangan keuangan antara Daerah dan Pusat. Disamping itu masih terdapat kesimpang-siuran karena banjaknja badan-badan Pemerintah Pusat didaerah. Akibatnja ialah bahwa koordinasi kegiatan usaha dalam bidang-bidang tertentu didaerah mendjadi lebih sulit.

Kelemahan lain ialah bahwa masih kurang banjak perhatian diberikan kedaerah penjempurnaan badan-badan ilmu pengetahuan, penelitian, survey serta penjelenggaraan statistik. Hasil usaha badan-badan ini sangat penting agar perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat lebih dipertanggung-djawabkan.

Sedjak tahun 1966 hingga permulaan pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini telah diusahakan penjempurnaan dibidang administrasi Pemerintah, antara lain, sebagai berikut ini :

(a) Penempatan lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga negara ter-

tinggi, sesuai dengan Undang-undang Dasar, ditempatkan kembali kedudukannja tidak lagi dalam rangka pemerintahan.

(b) Penjempurnaan dan penjederhanaan lembaga-lembaga dan badan-badan Pemerintah tingkat Pusat (Departemen-departemen dan lembaga-lembaga pusat non-departemen), antara lain mengenai perumusan tugas pokok mereka, struktur organisasi, dan lain-lain.

(c) Inventarisasi dan usaha kearah pendaja-gunaan pegawai.

(d) Klasifikasi Perusahaan-perusahaan Negara menurut status hukum, organisasi, pertanggungan-djawab serta kedudukan karyawan Perusahaan-perusahaan Negara, dan sebagainja.

(e) Penertiban dibidang Perbankan dengan dikeluarkannja Undang-undang pokok perbankan dan Bank Sentral.

(f) Perubahan dan penjempurnaan Bappenas sebagai badan perentjanaan Pusat.

(g) Pengumpulan masalah-masalah proseduril dan sistim pengumpulan data serta pemberian laporan (reporting)

(h) Pokok-pokok pemikiran tentang performance budgeting.

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah Dibidang Pembangunan Administrasi Pemerintah

Perbaikan-perbaikan dan penjempurnaan administrasi pemerintah akan ditudjukan kearah pelaksanaan debirokratisasi serta tjara-tjara pengawasan dan pengarahan jang tak langsung (indirect built-in control). Fungsi pembangunan aparatur pemerintahan ialah peranan Pemerintah jang memberikan pengarahan dan dorongan sehingga kegiatan dan daja kreasi masjarakat dapat berkembang setjara optimal tanpa penguasaan serta pengurusan setjara langsung.

Perbaikan djuga ditudjukan kearah meningkatkan kemampuan administrasi pemerintah untuk menghasilkan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan diperbagai bidang sosial dan ekonomi jang menundjang atau mendorong pembangunan. Misalnja kebidjak-

sanaan-kebidjaksanaan dibidang moneter, fiskal, harga, ekspor, impor, dan lain-lain. Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan tersebut harus konsisten dan saling berhubungan satu dengan lainnja.

Perentjanaan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang baik serta pelaksanaannja jang tepat akan mendapat perhatian utama. Pelaksanaan kebidjaksanaan jang tepat dapat memberi pengaruh dan hasil jang besar terhadap pembangunan.

1. **Penjempurnaan Strukturil-Organisasi**

Guna mendjamin hasil maksimal dari pada pelaksanaan rentjana pembangunan akan dilaksanakan pembinaan strukturil dan organisatoris (institusionil), jaitu :

(a) Meneruskan penjempurnaan dan penjederhanaan struktur administrasi pemerintah tingkat pusat, dengan berpedoman untuk lebih mengusahakan fungsionalisasi melalui perumusan tugas pokok badan-badan Pemerintah setjara lebih baik. Demikian pula akan dilakukan penghapusan badan-badan jang berlebihan, dan doublures akan diminimalisir. Pembentukan dan penempatan posisi sesuai dengan pentingnja badan-badan pemerintah dalam rangka perentjanaan dan pelaksanaan rentjana pembangunan. Badan-badan pemerintah pusat non-departemental dibagi dalam tingkat pentingnja dan disederhanakan. Selebihnja ditempatkan dibawah tanggung-djawab atau koordinasi Departemen-departemen jang sesuai. Perbaikan-perbaikan seperti disebutkan diatas ditudjukan pertama-tama pada badan-badan jang menjelenggarakan sektor-sektor jang memperoleh prioritas dalam rentjana pembangunan ini.

(b) Hubungan Pusat dan Daerah akan disempurnakan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah. Demikian pula akan dilakukan penertiban badan-badan perwakilan pomerintah pusat didaerah, serta koordinasi antara kegiatan „dinas" dengan „djawatan" daerah. Dalam rangka ini pula telah disampaikan ran-

tjangan undang-undang perbaikan dibidang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Hal-hal tersebut djuga mengenai hubungan antara Pemerintah Daerah tingkat I dengan Pemerintah Daerah tingkat II. Pembinaan administrasi desa akan disempurnakan untuk dapat memenuhi fungsinja setjara lebih baik. Peningkatan kemampuan administrasi Pemerintah Daerah, koordinasi kegiatan-kegiatan usaha ditingkat Daerah, dan deliniasi kewenangan para Kepala Daerah penting sekali, karena projek-projek pembangunan tersebar didaerah-daerah.

(c) Penjederhanaan dan penertiban perwakilan-perwakilan diluar negeri akan dilandjutkan. Demikian pula akan ditegaskan fungsinja, sehingga perwakilan merupakan perwakilan negara jang sesuai dan mampu untuk memenuhi usaha-usaha dalam rangka politik ekonomi Pemerintah. Kegiatan-kegiatan usaha Pemerintah diluar negeri akan dikoordinir oleh para kepala perwakilan Pemerintah.

(d) Perbaikan struktur organisasi badan-badan Pemerintah akan terus dilakukan. Perbaikan ini mengenai hubungan kerdja dan tata-kerdja, deliniasi, wewenang dan tanggung-djawab, nomenclature, echelonering, span of control, dan lain-lain. Hal ini akan diusahakan djuga melalui penjempurnaan " O and M ".

(e) Penjempurnaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi usaha serta kegiatan antara badan-badan Pemerintah akan diusahakan, terutama pada bidang-bidang jang membutuhkan konsistensi usaha, seperti misalnja, antara badan-badan jang meng-administrir, menjediakan dan menjalurkan pembiajaan-pembiajaan. Demikian pula hal ini penting bagi penjelenggaraan program-program dan projek-projek pembangunan. Tidak sadja karena berbagai matjam sumber pembiajaannja tetapi djuga karena berbagai badan penjelenggaraan

technisnja, seperti misalnja pembangunan waduk, pembangunan desa dan lain-lainnja.

2. **Penjempurnaan proseduril**

Disamping itu djuga akan diselenggarakan pembinaan dan penjempurnaan-penjempurnaan dibidang proseduril, diantaranja ialah :

(a) Masalah proseduril jang bersifat macro, misalnja prosedur-prosedur ekspor, impor, perdagangan antar daerah, perizinan pembangunan industri, penanaman modal dalam negeri, serta modal asing, dan lain-lain, akan disederhanakan untuk mendjamin kelantjarannja, tanpa meninggalkan azas-azas pengarahan jang produktif. Masalah-masalah proseduril administratif jang dimasa lampau merupakan hambatan-hambatan akan diminimalisir.

(b) Masalah proseduril jang bersifat micro, misalnja perbaikan prosedure hubungan kerdja dan tata-kerdja satuan-satuan badan pemerintahan.
Hal ini akan dilakukan dengan pemberian pedoman-pedoman serta Upgrading kepegawaian dibidang Organisasi dan Metode oleh Lembaga Administrasi Negara. Selain itu akan dibentuk serta diperkuat satuan-satuan O and M pada badan-badan Pemerintah.

3. **Penjempurnaan kepegawaian**

Penjempurnaan dan perbaikan dibidang kepegawaian djuga akan membantu pelaksanaan rentjana pembangunan karena dengan demikian apparatur Pemerintah akan lebih mampu mendjalankan fungsinja selaku lembaga pembangunan jang actif dan effektif. Antara lain akan diambil langkah-langkah sebagai berikut ini :

(a) Usaha-usaha ditudjukan supaja satuan-satuan lembaga Pemerintah mempunjai djumlah pegawai jang lebih rasionil sesuai dengan tugas-tugas pekerdjaan jang dipu-

njainja (rationalized units). Hal ini akan dilakukan melalui standar-standar O and M jang pedomannja dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Standar-standar ukuran djumlah rasionil bagi sesuatu badan Pemerintah ini kemudian dibandingkan dengan pengisian D.S.P.P. (Daftar Situasi Pegawai dan Peralatan) jang telah dihimpun dan ditelaah oleh Kantor Urusan Pegawai. Dengan demikian akan diketahui data jang objektip tentang kurang atau lebihnja djumlah pegawai untuk sesuatu badan Pemerintah. Atas dasar itu akan dilakukan penjaluran bertahap kearah sektor-sektor jang berkembang sebagai akibat pembangunan. Demikian pula diusahakan pendaja-gunaan dan realokasi jang lebih serasi, dilihat dari penjebaran djumlah maupun matjam dan tingkat keahlian dengan sektor-sektor pembangunan jang memperoleh prioritas (misalnja jang kelebihan pegawai ke jang kurang dengan melalui retraining).

(b) Akan terus dikembangkan "carreer service" dan sistim atas landasan prestasi (merrit system) dibidang kepegawaian berdasarkan prinsip pengamalan djasa jang sama (equality of service). Kantor Urusan Pegawai akan diperkuat untuk dapat mendjalankan fungsinja dalam rangka usaha ini. Hal ini berhubungan erat dengan perbaikan-perbaikan dibidang strukturil dan organisasi seperti misalnja echelonering, deliniasi kewenangan dan tanggung-djawab setjara lebih baik dan lain-lain. Suatu Undang-undang Pokok Kepegawaian pada waktu ini sedang diolah untuk segera dapat dikeluarkan.

Hal-hal tersebut diatas dimaksudkan pula untuk mendjamin kontinuitas administratip, jaitu suatu keadaan dimana keadaan kepegawaian tidak mendjadi katjau karena perubahan-perubahan dalam pemerintahan atau pimpinan badan-badan Pemerintah. Demikian pula akan dikurangi sistim "spoil", jaitu pemilihan berdasar sele-

ra pribadi dan kepentingan-kepentingan golongan, untuk lebih mendjamin kepastian kepegawaian.

(c) Pada achir tahun rentjana diharapkan bahwa upah dan gadji akan lebih memadai keperluan hidup. Hal ini akan diusahakan setjara bertahap sesuai dengan kemampuan pembiajaan jang dapat dihimpun Negara.
Sistim upah dan gadji akan diubah sehingga dapat memberikan insentip pada produktivitas, serta kepada sektor-sektor jang memperoleh prioritas dalam pembangunan. Dengan demikian kebidjaksanaan dibidang gadji dan upah akan ditudjukan kearah „upah sesuai dengan prestasi".

(d) Penertiban-penertiban terhadap unsur-unsur Gestapu/PKI dan lain-lain afiliasinja, jang merongrong keamanan dan effisiensi pekerdjaan akan terus dilakukan.

(e) Program pendidikan, training, dan upgrading dibidang kepegawaian disesuaikan dengan bidang-bidang pembangunan jang memperoleh prioritas.
Ada dua matjam bentuk training, upgrading dan lain-lain, pertama dibidang peningkatan kemampuan tehnis operasionil, misalnja sebagai penjuluh pertanian, pengawas keuangan, tenaga-tenaga padjak, kebendaharaan, perentjana dan lain-lain. Ada pula latihan-latihan dan upgrading dibidang "O and M", administrasi keuangan, administrasi perbekalan dan lain-lain. Lembaga Administrasi Negara akan disempurnakan untuk dapat melaksanakan fungsinja dibidang ini setjara baik. Ada pula penjelenggaraan latihan dan upgrading jang dilakukan oleh badan-badan Pemerintah jang bersangkutan. Program ini tidak hanja ditudjukan kepada pegawai Pemerintah Pusat, melainkan djuga untuk pegawai-pegawai Pemerintah daerah.
Chusus bagi training dalam bidang keahlian tertentu jang dibutuhkan, tetapi tidak ada fasilitasnja di Indonesia, dapat dilakukan melalui pengiriman keluar negeri. Dalam hal ini bantuan luar negeri akan dimanfaat-

kan. Bahkan akan dilakukan perentjanaan jang dikaitkan dengan pola prioritas Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

(f) Pembinaan mental para pegawai diharapkan akan bertambah madju bersamaan dengan kemadjuan kesedjahteraan mereka.

4. **Penjempurnaan administrasi keuangan**

Perbaikan-perbaikan akan dilakukan pula pada bidang administrasi keuangan, peralatan dan perbekalan. Perbaikan administrasi keuangan akan ditudjukan kearah kemampuan untuk meningkatkan penerimaan negara (termasuk peningkatan padjak jang masih potensiil tanpa meninggalkan asas keadilan, kesewadjaran, dan menimbulkan hasrat usaha), penentuan dan penjelenggaraan pengeluaran-pengeluaran anggaran negara, kredit setjara terarah dan selektif, serta pengawasan keuangan oleh lembaga pengawasan jang sah kedudukan hukumnja. Perbaikan dibidang ini amat penting dan memperoleh prioritas, karena administrasi keuangan negara jang baik dan effisien akan mengurangi keborosan dan mendorong kepada penghematan, selain itu usaha ini dapat meminimalisir korupsi, penjelewengan-penjelewengan, dan lain-lain.

Demikian pula telah mulai dirintis djalan kearah performance budgeting sehingga pembiajaan-pembiajaan negara akan mendjadi lebih program oriented.

Untuk waktu permulaan budget negara akan lebih diarahkan setjara fungsionil dengan klasifikasi kepada program-program jang sesuai dengan program-program alokasi didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Penjempurnaan akan dilakukan pula dalam prosedur pengeluaran anggaran negara, modal penjertaan Pemerintah, maupun kredit jang disesuaikan dengan sasaran-sasaran pelaksanaan kemadjuan fisik sesuatu program atau projek pembangunan, sehingga konsistensi antara rentjana fisik dan keuangan suatu program atau projek dapat diusahakan.

5. **Penjempurnaan administrasi peralatan dan perbekalan**

Dibidang administrasi peralatan dan perbekalan akan diperbaiki, antara lain, sistim inventarisasi, mutasi, prosedure pembelian, kontrak, dan pernjataan usang. Tjara-tjara tender akan lebih diutamakan.

6. **Penjempurnaan administrasi statistik**

Penjempurnaan sistim pengumpulan data, pengolahan data, monitoring, dan pelaporan akan dilakukan. Mengenai hal ini Biro Pusat Statistik akan diperkuat dan ditingkatkan untuk dapat melakukan fungsinja, karena eratnja hubungan masalah data dan ketepatannja dengan penjelenggaraan statistik. Demikian pula akan ditingkatkan kerdjasamanja dengan satuan-satuan statistik badan-badan Pemerintah.

Penjempurnaan dibidang statistik ini akan dilakukan setjara selektip, jaitu dibidang jang perlu untuk menundjang sektor-sektor jang memperoleh prioritas dalam pembangunan.

7. **Penjempurnaan administrasi Perusahaan Negara**

Penertiban akan dilakukan terus terhadap Perusahaan-perusahaan Negara, perseroan-perseroan terbatas dengan modal kekajaan negara, jajasan-jajasan, dan lain-lain, agar mereka dapat memenuhi fungsi mereka dalam pembangunan dan tidak malahan mendjadi beban daripada pembiajaan negara.

Langkah-langkah jang akan diambil antara lain, adalah sebagai berikut :

(a) Perusahaan-perusahaan Negara jang sebenarnja mempunjai hakekat dan fungsi sebagai badan Pemerintah, jaitu mempunjai tugas public service semata-mata akan dipertimbangkan untuk didjadikan badan Pemerintah sadja atau perusahaan djawatan.

(b) Usaha-usaha negara jang mempunjai hakekat dan fungsi menjediakan public utilities dapat tetap mendjadi perusahaan negara dan dilepaskan dari birokrasi pe-

merintahan, sehingga mempunjai otonomi jang operasionil (operational autonomy) dan dapat diusahakan lebih effisien.

(c) Usaha-usaha negara jang mempunjai peranan mentjari laba dan harus kompetitip akan dipertimbangkan agar berangsur-angsur dilepaskan kepada pihak swasta (joint dengan swasta atau dengan penanaman modal asing) dan sebagai bentuk usaha swasta, jaitu P.T., tunduk pada hukum perdata.

Untuk perbaikan management perusahaan-perusahaan akan dimanfaatkan management consultants dan dilakukan pengawasan keuangan jang lebih effektif dari badan-badan jang berwenang. Demikian pula penertiban-penertiban akan dilakukan terhadap badan-badan otonomi lainnja, seperti Jajasan-jajasan, P.T.-P.T. Pemerintah, dan lain-lain.

Setjara chusus akan ditentukan pula penggunaan dana-dana dari laba badan-badan usaha negara jang mempunjai modal sebagian atau seluruhnja dari keuangan negara. Dengan demikian dana-dana tersebut dapat dimanfaatkan setjara effektif dalam rangka pembangunan.

8. **Penjempurnaan penelitian dan pengembangan ilmu administrasi negara**

Penelitian dan pengembangan ilmu administrasi, terutama jang dalam waktu dekat membantu perentjanaan dan pelaksanaan rentjana pembangunan, akan dilakukan. Dalam hubungan ini jang dapat dilakukan antara lain pengembangan standar kriteria bagi penentuan djumlah pegawai jang rasionil untuk suatu badan Pemerintah, tjara perentjanaan formulasi dan evaluasi projek-projek, tjara penjelenggaraan perentjanaan tahunan jang tepat, sistim pengambilan keputusan, dan lain-lain.

Perbaikan-perbaikan dan penjempurnaan administrasi akan dilakukan dengan melihat aspek-aspek chusus daripada

administrasi perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ini antara lain menjangkut hal-hal sebagai berikut :

(a) Dibidang administrasi perentjanaan pembangunan akan diperhatikan penjempurnaan aparatur perentjanaan pembangunan, jaitu badan perentjanaan pusat, satuan-satuan perentjanaan badan-badan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penjempurnaan aparatur perentjanaan ini perlu karena pekerdjaan perentjanaan adalah suatu pekerdjaan terus-menerus. Melalui evaluasi pelaksanaan rentjana akan dilakukan penjesuaian rentjana tahunan berikutnja.

(b) Dalam rangka perbaikan-perbaikan dibidang ini akan ditingkatkan pula kemampuan badan-badan statistik, badan-badan research serta survey. Penjesuaian dan penjempurnaan daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun berdasar pengalaman pelaksanaannja akan lebih diperbaiki karena adanja penjempurnaan-penjempurnaan statistik, hasil-hasil penelitian dan survey. Chusus mengenai statistik akan ditingkatkan kerdjasama antara segenap unsur, sistim statistik nasional kearah satu program kerdja statistik jang terintegrasikan dalam rangka Badan Penasehat Negara Urusan Statistik. Demikian pula akan disempurnakan tjara-tjara perentjanaan projek serta perumusannja. Hal ini penting sekali diusahakan untuk mendjamin lebih dapat dilaksanakannja rentjana. Satuan-satuan perentjanaan dan programming dari badan-badan Pemerintah akan ditingkatkan dan diperkuat.

(c) Jang terachir perlu disebutkan bahwa training dan upgrading bagi para perentjana akan terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para perentjana dan untuk lebih mengusahakan kesamaan bahasa dibidang perentjanaan. Training ditudjukan untuk para perentjana ditingkat Pusat dan djuga bagi para perentjana tingkat Daerah. Chusus untuk hal ini akan dimanfaatkan sumber-sumber dari kerdjasama tehnik luar negeri.

B. PELAKSANAAN RENTJANA DAN RENTJANA OPERASIONIL TAHUNAN

Pendahuluan

Sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu, berhasilnja suatu rentjana pembangunan tidak sadja bergantung dari perentjanaan jang baik, tetapi djuga dari pelaksanaannja. Didalam pengalaman diberbagai negara lain dan djuga di Indonesia sendiri diwaktu jang lalu, persoalan pelaksanaan rentjana ini kurang mendapatkan perhatian. Hal ini terdjadi karena rentjana-rentjana jang sudah-sudah kurang realistis, tidak disesuaikan dengan kemungkinan pelaksanaannja, ataupun karena rentjana jang rasionil dan tehnis baik ternjata tidak dilaksanakan. Oleh karena itu perentjanaan jang sekarang ini memberikan perhatian utama terhadap masalah-masalah dan ketepatan pelaksanaannja.

Didalam pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang sekarang ini diperlukan suatu aparatur administrasi Pemerintah jang mampu untuk melakukan hal itu. Dengan demikian pembangunan administrasi Pemerintah merupakan salah satu sasaran Rentjana Pembangunan Lima Tahun, dan perbaikan-perbaikan dibidang administrasi Pemerintah sendiri akan menentukan baik serta buruknja pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Disamping perlu adanja perentjanaan setjara baik maka kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, serta kekurang mampuan dalam bidang administrasi merupakan kelemahan utama didalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Beladjar dari pengalaman dimasa lampau, maka Rentjana Pembangunan Lima Tahun sekarang dituangkan dalam rentjana-rentjana tahunan, memberikan pedoman program pelaksanaan, serta mengusahakan supaja pelaksanaan rentjana sesuai dengan jang direntjanakan. Rentjana pembangunan jang seka-

rang diarahkan kepada pelaksanaannja (implementation oriented).

Rentjana Pembangunan Lima Tahun dituangkan dalam Rentjana Operasionil Tahunan

Didalam perentjanaan pembangunan jang akan dilakukan sekarang ini dapat dilihat adanja tahap-tahap jang kegiatannja untuk permulaan dilakukan setjara bersama-sama, jaitu tahap perentjanaan pembangunan lima tahun, tahap penjusunan rentjana operasionil tahunan jang tertjermin dalam A.P.B.N., tahap penjusunan program pelaksanaan, dan setelah itu pelaksanaan dari rentjana. Evaluasi terhadap pelaksanaan rentjana akan dilakukan terus-menerus setjara berkala. Evaluasi jang disertai perbaikan-perbaikan statistik, pengumpulan data, dan laporan akan mendjadi landasan bagi penjempurnaan rentjana operasionil tahunan tahun berikutnja. Dengan demikian Rentjana Pembangunan Lima Tahun mendapatkan penjesuaian-penjesuaian setjara fleksibel. Penjusunan rentjana operasionil tahunan ini mengintegrasikan pokok-pokok kebidjaksanaan dan prioritas perentjanaan jang menjeluruh dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun dengan pengisian program-program serta projek-projek jang direntjanakan lebih terperintji untuk satu tahun.

Rentjana operasionil tahunan akan memberikan gambaran keadaan ekonomi pada tahun jang lampau, sumber-sumber ekonomi jang tersedia untuk sesuatu tahun setjara menjeluruh, suatu gambaran mengenai perkembangan keadaan ekonomi, penetapan tudjuan dan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan (policies) untuk tahun jang bersangkutan, penetapan rentjana investasi jang tepat, penjusunan program-program sektoral, dan penetapan projek-projek jang akan dilakukan.

Dengan adanja penjesuaian rentjana-rentjana tahunan, dimaksudkan djuga supaja ada fleksibilitas daripada pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Dengan demikian Rentjana Pembangunan jang sekarang bersifat dinamis.

Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Tahunan, ditambah dengan rentjana (perkiraan) pemberian kredit melalui bank, serta anggaran devisa jang disusun dalam rangka rentjana tahunan merupakan pedoman kegiatan njata bagi Pemerintah dalam pelaksanaan rentjana. Ketiga hal tersebut merupakan suatu program kegiatan (action program) jang disertai dengan ketentuan-ketentuan pembiajaannja bagi badan-badan pelaksana program-program serta projek-projek pembangunan.

Rentjana Operasionil Tahunan sebagai alat effektip bagi pelaksanaan rentjana

Berdasarkan pengalaman dibidang perentjanaan diberbagai negara jang baru berkembang maka waktu jang achir-achir ini penuangan rentjana-rentjana djangka menengah didalam rentjana operasionil tahunan dilakukan sebagai suatu ketjenderungan dalam tjara perentjanaan jang lebih baik dan sehat. Bahkan diberbagai negara suatu rentjana djangka pandjang dan djangka menengah tidak dipakai sebagai landasan program kegiatan jang bersifat pasti, melainkan tetap harus flexible. Rentjana djangka menengah, misalnja Rentjana Pembangunan Lima Tahun, lebih merupakan pedoman pengarahan kegiatan dan perkembangan jang harus ditempuh dalam lima tahun. Hal ini disebabkan karena rentjana-rentjana mempunjai apresiasi jang realistis terhadap potensi-potensi ekonomi dan sosial, demikian pula tentang kapasitas kemampuan administratipnja. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu pula dipertimbangkan. Semua keadaan itu perlu dinilai kembali dalam djangka-djangka waktu jang lebih pendek.

Rentjana operasionil tahunan bertudjuan untuk memberikan program kegiatan dan kebidjaksanaan jang lebih konkrit dan supaja pelaksanaan rentjana mendjadi lebih effektip. Djika suatu rentjana akan dilaksanakan maka perentjanaan harus memuat isi jang operatip dan diterdjemahkan dalam program kegiatan jang spesifik.

Mengenai tjara dan teknik perentjanaan operasionil tahunan memang belum terdapat kesamaan. Beberapa negara jang baru

910086-(9).

berkembang telah dapat melakukan perentjanaan operasionil tahunan jang teliti dan menjeluruh. Indonesia akan melakukan perentjanaan operasionil tahunan, dan dalam perkembangan pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun tjara-tjaranja akan disempurnakan.

Demikian pula akan diperkuat badan-badan jang akan ikut serta dalam perentjanaan tahunan ini. Namun dapat dikatakan bahwa umumnja suatu rentjana operasionil tahunan memuat, seperti telah disebutkan terdahulu, hal-hal sebagai berikut :

Pertama, gambaran mengenai trend, terutama dibidang ekonomi, jang ada dengan menjusun suatu tindjauan terhadap keadaan jang lalu dan satu tindjauan perkiraan perkembangan tahun jang akan datang tertentu.

Kedua, suatu penilaian terhadap sumber-sumber pembiajaan dan sumber-sumber lain jang perlu diperhitungkan.

Ketiga, penjusun tudjuan dan sasaran-sasaran tahunan setjara overall dalam rangka suatu strategi pembangunan djangka pendek.

Keempat, perlu disusun suatu rangka kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang konsisten guna mendukung tudjuan dan sasaran tersebut.

Kelima, rentjana sektoral dan rentjana projek-projek dalam suatu program investasi sektor Pemerintah.

Keenam, koordinasi antara perentjanaan sektor Pemerintah, perentjanaan sektor swasta jang dilakukan oleh Pemerintah, dan perentjanaan sektor swasta sendiri.

Penting sekali diperhatikan dalam rentjana operasionil tahunan ini ialah hubungannja dengan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara. Rentjana operasionil tahunan harus tertjermin didalam A.P.B.N. Demikian pula rentjana perkreditan dan anggaran devisa.

Suatu program bantuan kerdjasama teknik luar negeri serta program dibidang penelitian-penelitian dan survey djuga perlu disusun.

Program Pelaksanaan dan Perentjanaan Projek-projek

Didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini, dan setjara lebih chusus dalam rentjana operasionil tahunan, disusun djuga program pelaksanaannja. Program pelaksanaan diperintji dalam program-program pembangunan serta projek-projek pembangunan jang dikaitkan dengan rentjana pembiajaannja. Program pelaksanaan, selain memuat program-program dan projek-projek pembangunan beserta pembiajaannja setjara lebih terperintji (antara lain dari sumber anggaran pembangunan, anggaran modal penjertaan Pemerintah maupun kredit dalam maupun luar negeri), memuat pula badan-badan apa jang melaksanakannja. Disamping itu program pelaksanaan memuat pula koordinasi antara berbagai badan jang mempunjai hubungan dalam program atau projek tertentu.

Untuk mengusahakan suatu rentjana investasi jang baik maka program serta projek-projek jang akan merupakan bagian dalam rentjana investasi tersebut harus direntjanakan setjara baik, sehingga dapat dipertanggung-djawabkan setjara ekonomis, teknis dan administratip.

Disamping itu penilaian akan kemampuan absorpsi pelaksanaan dari badan pelaksanaan usaha-usaha telah dirintis dan didalam pelaksanaan rentjana akan terus ditingkatkan. Usul-usul projek dilakukan melalui pengisian "project digest" jang kini sudah dikembangkan.

Sehingga penelaahan dapat dilakukan oleh badan-badan jang berwenang setjara lebih mudah. Suatu prosedur perentjanaan dan programming projek-projek dan prosedur dalam pelaksanaan projek-projek sudah pula dikembangkan. Untuk ini penjempurnaan badan-badan research dan survey serta penjelenggaraan survey serta feasibility studies didalam rangka perentjanaan projek akan ditingkatkan.

Partisipasi masjarakat dalam Pelaksanaan Rentjana

Untuk mendjamin pelaksanaan rentjana jang baik, terutama dalam rangka mengusahakan dukungan serta partisipasi jang

luas daripada masjarakat, maka Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini disusun dengan mengikut-sertakan pula pandangan-pandangan masjarakat untuk kemudian disebar-luaskan. Untuk mendjamin fleksibilitas serta kemungkinan penjempurnaannja, dan untuk dapat memberikan pedoman program kegiatan jang lebih konkrit serta spesifik untuk tahun-tahun tertentu, maka Rentjana Pembangunan Lima Tahun dituangkan dalam rentjana operasionil tahunan.

Rentjana operasionil tahunan sebagian besar tertjermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Tahunan. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong, dalam rangka hak budgetnja, mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tersebut. Pengesahan ini dimaksudkan pula supaja Anggaran tersebut mendapatkan kekuatan Undang-undang dan sangsi-sangsi guna lebih mendjamin berhasilnja pelaksanaan rentjana. Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tersebut akan merupakan program kegiatan Pemerintah untuk djangka waktu tertentu jang telah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.

Dalam pelaksanaan rentjana djuga akan dilakukan pembitjaraan-pembitjaraan dengan organisasi-organisasi kemasjarakatan, terutama organisasi kekarjaan jang bergerak dibidang pembangunan. Pandangan-pandangan serta partisipasi mereka penting bagi pelaksanaan rentjana.

Peranan dari pada mass-media dan komunikasi-massa dalam rangka pelaksanaan rentjana akan ditingkatkan, karena partisipasi jang sebenar-benarnja akan datang bila usaha pembangunan ini diketahui dan diterima oleh masjarakat. Hal ini diuraikan lebih landjut dalam Bab mengenai rentjana dibidang penerangan dan komunikasi massa.

Penjerasian Pelaksanaan Rentjana antara satuan-satuan pelaksanaan ditingkat Pusat

Suatu sistim koordinasi didalam pelaksanaan rentjana antara satuan-satuan pelaksana dengan satuan-satuan perentjana

pusat atau badan perentjanaan pusat akan diusahakan guna mendjamin kesesuaian antara pelaksanaan rentjana dengan rentjana jang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan pula untuk mendjaga keserasian antara berbagai bidang kegiatan didalam suatu program atau projek pembangunan tertentu. Tanggung djawab pelaksanaan jang sebenarnja daripada rentjana tetap ada pada satuan-satuan pelaksana. Koordinasi pelaksanaan rentjana ini djuga diperlukan dalam pengambilan kebidjaksanaan jang segera diperlukan dalam pelaksanaan dan untuk mendjamin berbagai kebidjaksanaan mengenai sektor-sektor tertentu agar tetap konsisten satu dengan lainnja. Koordinasi diperlukan pula dalam evaluasi pelaksanaan rentjana jang diperlukan bagi penjesuaian tahunan daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Koordinasi Pelaksanaan Rentjana antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan apa jang tersebut diatas dilakukan pula koordinasi pelaksanaan rentjana antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peranan serta partisipasi daerah-daerah setjara aktip dalam pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun amat penting, karena program-program dan projek-projek Rentjana Pembangunan Lima Tahun diperintji dan tersebar pelaksanaannja didaerah-daerah.

Perintjian tersebut serta ketentuan-ketentuan lainnja akan memberikan pegangan sehingga dengan demikian daerah-daerah akan mengetahui apa jang akan dilakukan didalam daerah mereka masing-masing maupun pelaksanaan jang diharapkan dari daerah-daerah dalam rangka Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Demikian pula koordinasi program-program atau projek-projek jang menjangkut beberapa daerah.

Penjederhanaan dari badan-badan Pemerintah Pusat didaerah perlu dilakukan sehingga dengan demikian lebih mudah koordinasinja, dan lebih mudah diusahakan keserasian kerdjasama ditingkat daerah dengan badan-badan Pemerintah Daerah. Kegiatan-kegiatan usaha jang bukan merupakan program mau-

pun projek-projek Rentjana Pembangunan Lima Tahun diusahakan keserasian, konsistensi, serta komplementaritasnja dengan program-program serta projek-projek rentjana ini.

Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pembangunan untuk mensukseskan Pelaksanaan Rentjana

Suatu segi jang amat penting dalam pelaksanaan rentjana ialah perlunja ditjiptakan dan dilaksanakan setjara tepat suatu rangkaian kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pembangunan (development policies) jang konsisten diberbagai bidang untuk mendjamin suksesnja pelaksanaan rentjana. Didalam perentjanaan sekarang, disamping terdapat perentjanaan projek-projek, djuga akan dilakukan perentjanaan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan. Rangkaian kebidjaksanaan-kebidjaksanaan tersebut djuga ditudjukan untuk mendjamin tetap adanja stabilitas ekonomi. Hal ini amat penting dalam pelaksanaan rentjana, oleh karena kegontjangan-kegontjangan dibidang harga akan mengatjaukan pembiajaan program-program atau projek-projek. Pembangunan akan dilakukan dengan tetap mengusahakan stabilitas ekonomi jang mantap.

Perentjanaan dan pelaksanaan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan ini lebih-lebih penting karena Pemerintah berusaha mengerahkan dan menjalurkan sumber-sumber ekonomi pada tudjuan-tudjuan jang memperoleh prioritas didalam pembangunan melalui kebidjaksanaan-kebidjaksanaan tersebut. Kebidjaksanaan jang tepat akan menstimulir kegairahan kegiatan membangun dan merangsang investasi.

Didalam rangka pelaksanaan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan ini diperlukan ketetapan pengambilan keputusan, interpretasi, serta pelaksanaannja oleh badan-badan pelaksana ditingkat atas sampai ketingkat bawah.

Koordinasi antara sektor Pemerintah dan sektor Swasta

Suatu bidang jang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan rentjana adalah masalah koordinasi antara pelaksanaan usaha disektor Pemerintah dengan sektor Swasta. Banjak bidang kegiatan pembangunan dalam Rentjana Pembangunan Lima Ta-

hun akan dilakukan oleh sektor Swasta. Peranan Pemerintah dalam hal ini ialah mentjiptakan iklim jang menggairahkan dan mengarahkan berkembangnja kegiatan-kegiatan disektor Swasta menurut pola dan prioritas-prioritas Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Berbagai kebidjaksanaan serta tjara-tjara pengerahan setjara tak langsung (indirect control) akan dipergunakan oleh Pemerintah dalam hal ini, misalnja kebidjaksanaan dibidang perkreditan, perpadjakan, impor dan lain-lain.

Pemerintah mengutamakan investasi dibidang prasarana dan dibidang kesedjahteraan rakjat, seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain, sedangkan investasi dibidang-bidang lain terutama diharapkan dari pihak Swasta. Apabila kegiatan pembangunan oleh Swasta disesuatu sektor jang penting ternjata tidak atau belum berkembang, maka Pemerintah mengadakan investasi dalam sektor tersebut. Dalam pelaksanaan rentjana, Pemerintah akan tetap mengadakan hubungan untuk mendapatkan pandangan-pandangan jang produktip dari sektor Swasta sehingga dapat meningkatkan partisipasinja dalam pembangunan.

Kebidjaksanaan dan Usaha-usaha Mobilisasi Sumber-sumber Pembiajaan

Pelaksanaan rentjana jang berhasil bergantung pula pada perentjanaan jang baik mengenai sumber-sumber pembiajaan dan penjediaan pembiajaan untuk program-program dan projek-projek pembangunan setjara riil. Hal ini telah diusahakan dan akan disempurnakan bila perlu.

Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan serta usaha-usaha akan dilakukan dalam pelaksanaan rentjana untuk tetap mendjamin agar pelaksanaan mobilisasi sumber-sumber pembiajaan sesuai dengan jang telah direntjanakan untuk sesuatu tahun. Demikian pula hubungan antara sumber pembiajaan dalam maupun luar negeri harus konsisten. Badan-badan jang berhubungan dengan hal ini akan disempurnakan dan ditingkatkan kemampuannja.

Penjesuaian-penjesuaian segera akan dilakukan antara sumber-sumber pembiajaan dan kebutuhan alokasi investasi serta pembiajaan bilamana terdapat keadaan jang berbeda dengan jang telah direntjanakan. Penjesuaian tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas rentjana pembangunan.

Konsistensi daripada Realisasi Budget sesuatu Program atau Projek dengan Kemadjuan Pelaksanaan Fisik sesuatu Program atau Projek

Didalam pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini, terutama dalam rentjana tahunan, akan diusahakan pula konsistensi dan keserasian jang sedjauh-djauhnja antara realisasi anggaran suatu program atau projek dengan kemadjuan pelaksanaan fisiknja. Perlu diusahakan supaja perkembangan kemadjuan fisik daripada suatu program atau projek tidak terhambat karena realisasi pembiajaannja jang telah ditetapkan dalam rentjana pembiajaan sebelumnja.

Dilain pihak harus pula dihindarkan bahwa target alokasi finansiil tertjapai, tetapi tanpa terlaksana kemadjuan fisik jang direntjanakan. Bagi program-program serta projek-projek jang bergantung daripada musim hal ini tersebut penting sekali.

Suatu prosedur pembiajaan projek jang dikaitkan dengan kemadjuan pelaksanaan fisiknja telah disusun bagi projek-projek dengan sumber-sumber pembiajaan anggaran pembangunan, anggaran penjertaan modal Pemerintah maupun dari kredit dalam serta luar negeri. Didalam pembiajaan ini akan lebih ditegaskan prosedur dan ditingkat-tingkat permintaan anggaran, persetudjuan anggaran, permintaan pembajaran atau pembiajaan dan pemberian pembiajaan.

Setjara bertahap akan diperhitungkan prinsip-prinsip dari performance budgeting, sehingga pembiajaan-pembiajaan lebih diusahakan serta berorientasikan kepada program-program dan projek-projek pembangunan. Tjara ini djuga akan mentjegah adanja pembiajaan berganda untuk hal-hal jang kurang lebih

sama tetapi dilakukan oleh badan-badan jang berlainan. Pada tahap pertama penjusunan anggaran diusahakan memuat klasifikasi sesuai dengan program-program daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Perbaikan Administrasi dan Pengawasan Keuangan Anggaran

Supaja pelaksanaan rentjana sesuai dengan rentjananja sendiri, dan untuk mendjamin penggunaan anggaran pembiajaan jang lebih effisien dan effektif, akan dilakukan perbaikan dalam administrasi serta sistim pengawasan keuangan. Perbaikan dibidang ini memperoleh prioritas karena selain akan meningkatkan effektifitas dan effisiensi daripada penggunaan uang negara, djuga akan mengadakan penghematan, mentjegah keborosan, kebotjoran-kebotjoran, serta dapat mengurangi tindakan-tindakan korupsi. Penjelenggaraan administrasi dan pengawasan keuangan jang baik berarti pula management kegiatan-kegiatan usaha jang menggunakan keuangan negara setjara lebih sehat.

Dibidang administrasi keuangan perbaikan dan penertiban akan dilakukan dibidang penjusunan anggaran, pembukuan, pertanggungan-djawab, neratja perhitungan laba-rugi, dan hal-hal lain mengenai penggunaan. Hal ini tidak sadja mengenai badan-badan pemerintah jang biasa melainkan djuga untuk badan-badan lain, seperti perusahaan-perusahaan.

Dalam rangka effisiensi tersebut diatas diusahakan standar prosedur-prosedur mengenai berbagai transaksi dalam maupun luar negeri, sehingga didapatkan penghematan serta barang-barang jang diperlukan bagi program-program serta projek-projek pembangunan, seperti telah dikemukakan terdahulu.

Satu program upgrading bagi kebendaharawanan akan terus dilakukan. Demikian pula mengenai para pengawas keuangan.

Pengawasan keuangan jang akan disempurnakan ialah didalam tjara-tjara pengawasan intern maupun diadakannja pengawasan keuangan oleh badan-badan jang berwenang. Demikian-

pula akan dilakukan pengawasan terhadap neratja keuangan, program, serta projek-projek, sehingga dapat dihindarkan unsur-unsur ongkos jang berlebihan.

Chusus bagi program serta projek-projek dan badan-badan usaha lain dalam pembangunan jang menghasilkan laba, maka penggunaan daripada laba usaha negara ini akan diatur setjara lebih baik. Untuk sementara dana-dana tersebut dapat digunakan untuk reinvestasi mereka sendiri.

Setjara institusionil pengawasan keuangan dan anggaran ini akan dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Keuangan/Djawatan Akuntan Negara dan B.P.K. jang pertanggungan-djawabnja setjara langsung disampaikan kepada D.P.R.-G.R.

Perbaikan dalam Management dan keperluan akan tenaga-tenaga jang tjakap

Berhasilnja setjara baik pelaksanaan rentjana djuga bergantung pada perbaikan management program-program serta projek-projek badan usaha pembangunan serta tersedianja tenaga-tenaga ahli jang diperlukan untuk itu. Mengenai tenaga-tenaga ahli termasuk pula tenaga-tenaga management. Perbaikan-perbaikan dibidang ini antara lain akan meliputi perbaikan struktur dan tjara kerdja jang dapat dilakukan melalui pembentukan satuan-satuan O and M pada masing-masing departemen atau badan-badan pelaksana program dan projek-projek, upgrading kepegawaian melalui training, serta diterimanja "management advice" dari pihak-pihak jang berkompeten untuk hal-hal jang chusus.

Pendidikan management serta upgrading para manager sendiri akan dilakukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan rentjana. Suatu program pendidikan dan training jang diarahkan untuk keperluan dan sesuai dengan prioritas-prioritas pelaksanaan pembangunan akan dilakukan.

Laporan kemadjuan, penilaian dan penjesuaian-penjesuaian

Akan dilakukan suatu sistim laporan kemadjuan dan penilaian terhadap pelaksanaan rentjana sehingga dapat didjadikan

landasan bagi pengambilan tindakan-tindakan korektip bagi penjesuaian-penjesuaian rentjana tersebut atau penjusunan rentjana tahunan kemudian.

Suatu standar penjusunan laporan kemadjuan untuk program serta projek-projek akan dipergunakan. Dalam hal ini penjempurnaan daripada analisa projek-projek akan dilakukan. Laporan-laporan kemadjuan ini akan dilakukan setjara berkala sehingga kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan rentjana segera dapat diketahui dan diambil kebidjaksanaan penjesuaiannja. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada badan perentjanaan pusat, badan sumber pembiajaan, departemen bersangkutan, dan para kepala daerah. Ketjuali itu dilakukan pengetjekan setempat terhadap program-program atau projek-projek pembangunan tersebut.

Disamping itu akan dilakukan pula penilaian atau evaluasi daripada pelaksanaan program-program serta projek-projek. Hasil evaluasi ini akan dipergunakan untuk perbaikan perumusan rentjana, program, dan projek tahunan kemudian.

Dalam rangka ini perbaikan-perbaikan dibidang statistik akan dilakukan.

Kemampuan dan kegiatan-kegiatan Biro Pusat Statistik dalam melaksanakan funksi dalam rangka kerdjasama segenap unsur sistim statistik nasional akan ditingkatkan.

PETUNDJUK HALAMAN BUKU I

U M U M

BAB I TUDJUAN, SASARAN DAN KEBIDJAKSANAAN 11
Tabel I — 1 31
BAB II SUMBER-SUMBER PEMBIAJAAN 33
Sumber-sumber dan Program Pembiajaan 35
Tabel II — 1 36
Tabel II — 2 36
Tabel II — 3 37
Grafik Tabungan Pemerintah 1969/70 — 1973/74 38
Tabel II — 4 40
Tabel II — 5 43
Grafik Persentase Anggaran Pembangunan ... 45
Tabel II — 6 46
Tabel II — 7 46
Bidang Fiskal 47
1. Perkembangan Fiskal sebelum tahun 1966 48
2. Keadaan Fiskal dewasa ini 48
3. Pokok-pokok Kebidjaksanaan Fiskal Rentjana Pembangunan Lima Tahun ... 49
a. Segi Penerimaan 50
b. Segi Pengeluaran 52
c. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 54
d. Perusahaan-perusahaan Negara ... 55
Sektor Lembaga-lembaga Keuangan 55
1. Perkembangan Keuangan diwaktu jang lalu 57
Tabel II — 8 57

2. Program untuk Rentjana Pembangunan Lima Tahun 59
a. Mobilisasi Tabungan 59
b. Penjaluran Tabungan kedalam Investasi 61
c. Pengarahan Alokasi Investasi 65

BAB III NERATJA PEMBAJARAN INTERNASIONAL 69

Pendahuluan 69
EKSPOR 70
1. Keadaan dan Masalah-masalah pada waktu sekarang 70
Tabel III — 1 70
Tabel III — 2 71
1.1. Karet 71
1.2. Minjak Sawit 72
1.3. Kopi 72
1.4. Tembakau 72
2. Kebidjaksanaan Ekspor 73
2.1. Rehabilitasi Kapasitas Produksi ... 74
2.2. Diversifikasi Komposisi Ekspor ... 74
2.3. Pengolahan Hasil-hasil Ekspor ... 76
2.4. Perkembangan Arah Perdagangan Baru 77
2.5. Persoalan Prasarana 77
2.6. Perbaikan Faktor-faktor Pemasaran 79
2.7. Kerdja sama dengan Produsen Eksportir Luar Negeri 80
2.8. Kebidjaksanaan Moneter dan Fiskal 80
Tabel III — 3 81
3. Projeksi Ekspor 82
Tabel III — 4 82

IMPOR 83
1. Peranan Impor 83
2. Kebidjaksanaan Impor 84
3. Projeksi Impor 85
KEADAAN HUTANG-PIUTANG, PINDJAMAN LUAR NEGERI DAN INVESTASI SWASTA ASING 86
Tabel III — 5 87
Tabel III — 6 88
Tabel III — 7 88
PROJEKSI NERATJA PEMBAJARAN 89
Tabel III — 8 90
Tabel III — 9 91
BAB IV PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DESA 93
A. PEMBANGUNAN DAERAH 93
Pendahuluan 93
Keadaan dan Masalah-masalah 93
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 95
B. PEMBANGUNAN DESA 100
Pendahuluan 100
Keadaan dan Masalah — Nilai Potensiil Desa 101
Kategori I 102
Kategori II 104
Masjarakat Desa 105
Modal Desa 106
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 109
BAB V ADMINISTRASI PEMERINTAH, PELAKSANAAN RENTJANA DAN RENTJANA OPERASIONIL TAHUNAN 113
A. ADMINISTRASI PEMERINTAH 113
Pendahuluan 113
Keadaan Bidang Administrasi Pemerintah 114

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah dibidang Pembangunan Administrasi Pemerintah 117
1. Penjempurnaan Strukturil-organisasi 118
2. Penjempurnaan Proseduril 120
3. Penjempurnaan Kepegawaian 120
4. Penjempurnaan Administrasi Keuangan 123
5. Penjempurnaan Administrasi Peralatan dan Perbekalan 124
6. Penjempurnaan Administrasi Statistik 124
7. Penjempurnaan Administrasi Perusahaan Negara 124
8. Penjempurnaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara 125
B. PELAKSANAAN RENTJANA DAN RENTJANA OPERASIONIL TAHUNAN 127
Pendahuluan 127
— Rentjana Pembangunan Lima Tahun dituangkan dalam Rentjana Operasionil Tahunan 128
— Rentjana Operasionil Tahunan sebagai Alat effektif bagi Pelaksanaan Rentjana 129
— Program Pelaksanaan dan Perentjanaan Projek-projek 131
— Partisipasi Masjarakat dalam Pelaksanaan Rentjana 131
— Penjerasian Pelaksanaan Rentjana antara Satuan-satuan Pelaksanaan ditingkat Pusat 132

— Koordinasi Pelaksanaan Rentjana antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 133
— Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Pembangunan untuk Mensukseskan Pelaksanaan Rentjana 134
— Koordinasi antara Sektor Pemerintah dan Sektor Swasta 134
— Kebidjaksanaan dan Usaha-usaha Mobilisasi Sumber-sumber Pembiajaan 135
— Konsistensi daripada Realisasi Budged sesuatu Program atau Projek dengan Kemadjuan Pelaksanaan Fisik sesuatu Program atau Projek 136
— Perbaikan Administrasi dan Pengawasan Keuangan Anggaran 137
— Perbaikan dalam Management dan Keperluan akan Tenaga-tenaga jang tjakap 138
— Laporan Kemadjuan, Penilaian dan Penjesuaian-penjesuaian 138

IDC

RECEIVED
21 AUG 1969
CLD
Acquisitions
Section

RENTJANA
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1969/70 — 1973/74

II A

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I

29 SEP 1969

14153
V 2

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
CENTRAL LIBRARY AND
DOCUMENTATION BRANCH

RECEIVED
21 AUG 1969
Acquisitions
Section

REPELITA

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

1969/70 — 1973/74

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
CENTRAL LIBRARY AND
DOCUMENTATION BRANCH

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 319 TAHUN 1968
TENTANG
RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. *bahwa tudjuan perdjoangan Orde-Baru adalah meningkatkan tingkat kehidupan Rakjat Indonesia, jang hanja dapat ditjapai dengan pelaksanaan pembangunan bertahap dan berentjana;*
2. *bahwa hasil-hasil jang telah ditjapai dalam program stabilisasi politik dan ekonomi, dewasa ini telah merupakan landasan jang tjukup kuat guna pelaksanaan pembangunan;*
3. *bahwa berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, penjusunan dan pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun mendjadi salah satu tugas Kabinet Pembangunan;*
4. *bahwa dewasa ini Pemerintah telah berhasil menjiapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973, jang akan mendjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Ketetapan MPRS tersebut tahun-demi-tahun;*

5. *bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973;*

Mengingat:

1. *Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;*
2. *Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968;*
3. *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 Tahun 1968;*

Mendengar:

Pertimbangan BAPPENAS dan Sidang-sidang Kabinet;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969 — 1973.

Pasal 1.

Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973 sebagaimana termuat dalam Buku I, II dan III lampiran Keputusan Presiden ini merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti jang ditugaskan oleh MPRS.

Pasal 2.

Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pelaksanaan daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun, akan dituangkan dalam Rentjana Tahunan jang tertjermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara serta kebidjaksanaan-kebidjaksanaan lainnja.

Pasal 3.

Penuangan dalam Rentjana Tahunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perobahan dan perkembangan keadaan jang memerlukan penjesuaian terhadap Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Djakarta.
Pada tanggal 30 Desember 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAL — TNI

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

1969/70 — 1973/74

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 319 TAHUN 1968

tentang

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

II A

REPUBLIK INDONESIA

A

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

1969/70 — 1973/74

DAFTAR ISI KESELURUHAN

BUKU PERTAMA

U M U M

Bab I Tudjuan, Sasaran dan Kebidjaksanaan
Bab II Sumber-sumber Pembiajaan
Bab III Neratja Pembajaran Internasional
Bab IV Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa
Bab V Administrasi Pemerintah, Pelaksanaan Rentjana dan Rentjana Operasionil Tahunan

BUKU KEDUA

RENTJANA BIDANG-BIDANG

Bab VI Pertanian dan Irigasi
Bab VII Industri, Pertambangan dan Tenaga Listrik
Bab VIII Perhubungan dan Pariwisata
Bab IX A g a m a
Bab X Pendidikan dan Tenaga Kerdja
Bab XI Kesehatan dan Keluarga Berentjana
Bab XII Perumahan dan Kesedjahteraan Sosial
Bab XIII Tertib Hukum dan Penerangan
Bab XIV Transmigrasi dan Koperasi
Bab XV Pertahanan dan Keamanan Nasional
Bab XVI Penelitian dan Pengembangan Statistik

BUKU KETIGA

PERINTJIAN MENURUT DAERAH

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

1969/70 — 1973/74

Daftar Isi

BUKU II A

RENTJANA BIDANG-BIDANG

Bab VI Pertanian dan Irigasi

A. Beras 19
B. Palawidja dan Hortikultura 57
C. Perkebunan 68
D. Perikanan 101
E. Kehutanan 108
F. Peternakan 121
G. Irigasi 121

BAB VI

PERTANIAN DAN IRIGASI

B A B VI

PERTANIAN DAN IRIGASI

Sektor pertanian merupakan sektor jang terbesar dalam ekonomi Indonesia. Kurang lebih 55 persen dari produksi nasional berasal dari sektor pertanian, sedangkan 75 persen dari penduduk memperoleh penghidupan disektor pertanian. Kedudukan jang menentukan dari sektor pertanian dapat dilihat djuga dari sumbangannja dalam menghasilkan devisa negara. Lebih dari 60 persen dari ekspor Indonesia berasal dari sektor pertanian. Sebagai sektor terbesar dan terpenting dalam ekonomi Indonesia maka sektor pertanian merupakan landasan bagi tiap usaha pembangunan.

Diwaktu-waktu jang lampau sektor pertanian tidak berkembang sebagaimana seharusnja. Dibandingkan dengan angka rata-rata 1952—1956 maka produksi pertanian rata-rata dalam periode 1960—1964 meningkat dengan hanja 9 persen, sedangkan produksi per capita menurun dengan 9 persen. Produksi bahan makanan selama masa jang sama meningkat dengan 24 persen, tetapi produksi per capita menurun dengan 7 persen. Meskipun produksi beras setjara absolut meningkat, kenaikan ini tidak tjukup pesat untuk mentjukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga harus diimpor beras dalam djumlah-djumlah jang besar. Tambahan pula produksi hasil-hasil ekspor jang berasal dari sektor perkebunan dalam djangka waktu 1958-1965 menurun dengan 2,3 persen, sedangkan jang berasal dari perkebunan rakjat menundjukkan suatu stagnasi. Perkembangan terperintji hasil utama pertanian untuk masa 1953—1967 dapat dilihat pada Tabel VI-1.

Sebagai akibat dari kemunduran-kemunduran dibidang produksi dan djuga karena pesatnja perkembangan penduduk maka kesempatan bekerdja disektor pertanian makin lama makin berkurang sehingga menimbulkan pengangguran dengan segala konsekwensi-konsekwensinja dibidang sosial dan ekonomi.

TABEL VI - 1.

PRODUKSI RATA-RATA TAHUNAN
BAHAN-BAHAN PERTANIAN TERPENTING, 1953 — 1967
(djuta ton)

	1953 - 1957	1958 - 1962	1963 - 1967
Bahan Makanan :			
Beras	7,57	8,43	8,73
Djagung	2,07	2,54	2,92
Ubi kaju	9,42	11,58	12,10
Ubi djalar	2,30	2,96	2,84
Kedele	0,35	0,42	0,38
Katjang tanah	0,22	0,25	0,26
Perikanan : Laut	0,40	0,45	0,65
Perikanan : Darat	0,22	0,30	0,44
Bahan² Ekspor :			
Perkebunan Besar			
Karet	0,278	0,228	0,221
Kelapa Sawit (minjak)	0,164	0,146	0,159
T e h	0,039	0,046	0,041
G u l a	0,621	0,593	0,661
Perkebunan Rakjat			
Karet	0,476	0,457	0,512
T e h	0,024	0,033	0,043
K o p i	0,047	0,077	0,106

Faktor jang mengakibatkan kemunduran ini adalah banjak. Bertambah buruknja keadaan prasarana dan perhubungan adalah salah satu faktor jang mempunjai pengaruh negatif terhadap perkembangan produksi pertanian. Faktor lain adalah kurangnja pembiajaan untuk pertanian rakjat maupun perkebunan. Kekurangan tenaga ahli dibidang management dan komersiil

dan tidak adanja penanaman modal baru mempunjai effek negatif, terutama bagi sektor perkebunan.

Selandjutnja berbagai matjam peraturan diwaktu-waktu jang lampau menghalang-halangi aktivitas para pengusaha, sehingga mereka segan untuk berusaha disektor pertanian. Tambahan pula tidak tersedia dana-dana jang tjukup untuk melaksanakan penelitian dan penjuluhan sehingga Indonesia sekarang dibidang ini sudah terbelakang djika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Berdasarkan permasalahan diatas maka Rentjana Pembangunan Lima Tahun sektor pertanian diarahkan pada peningkatan produksi pangan terutama beras, peningkatan produksi ekspor serta perluasan matjam hasil-hasil ekspor dan perluasan kesempatan bekerdja dibidang pertanian. Dengan meningkatnja produktivitas sektor pertanian maka sektor ini akan merupakan pasaran jang baik bagi sektor-sektor lain terutama sektor industri dan akan memperbesar kemungkinan pemupukan modal untuk membiajai pembangunan sektor-sektor lain.

Peningkatan produksi pangan bertudjuan agar Indonesia dalam waktu lima tahun jang akan datang tidak usah mengimpor beras lagi. Tudjuan lain ialah memperbaiki mutu gizi pola konsumsi manusia Indonesia melalui peningkatan produksi pangan jang mengandung protein chewani dan nabati, terutama ikan dan katjang-katjangan.

Akibat positif dari peningkatan produksi beras ialah bahwa lambat-laún tidak perlu lagi mengimpor pangan, sehingga dengan demikian devisa jang langka itu dapat digunakan untuk mengimpor barang modal dan bahan baku jang diperlukan untuk pembangunan sektor-sektor lain, terutama sektor industri. Selandjutnja peningkatan produksi pangan akan meningkatkan pendapatan petani-petani pangan. Ini akan meningkatkan taraf penghidupan para petani jang telah sekian lamanja hidup dalam serba kesengsaraan dan kemiskinan.

Peningkatan produksi hasil-hasil ekspor bertudjuan untuk memperbesar penghasilan devisa dari sumber-sumber ini. Di-

versifikasi atau perluasan matjam hasil-hasil ekspor bertudjuan untuk memperketjil risiko turunnja penghasilan devisa jang diakibatkan karena turunnja harga-harga dari satu hasil sadja. Artinja dengan bertambah banjaknja djenis ekspor maka suatu kemunduran pada satu djenis akan dapat dikompensasi oleh hasil-hasil lain. Suatu segi lain jang penting dalam usaha untuk memperbesar hasil devisa ialah perbaikan mutu hasil-hasil ekspor melalui pengawasan jang ketat mengenai standardisasi hasil-hasil tersebut.

Perluasan kesempatan bekerdja dibidang pertanian bertudjuan untuk mempertinggi produktivitas para petani dengan tjara memperketjil golongan penganggur tak kentara. Golongan ini memperketjil sumbangan sektor pertanian kepada pembangunan karena memperketjil djumlah bahan makanan jang dapat disediakan untuk sektor-sektor lain. Sudah tentu usaha-usaha disektor pertanian ini harus dibantu dengan usaha-usaha jang sama disektor-sektor lain, terutama sektor industri.

Untuk membantu sektor pertanian mentjapai tudjuan-tudjuan diatas maka sektor-sektor lain diarahkan pada tudjuan jang sama. Sektor industri diarahkan untuk meningkatkan produksi barang-barang jang diperlukan oleh sektor pertanian. Industri pupuk, obat-hama dan peralatan pertanian lainnja diperluas dan dibangun. Selain dari itu industri-industri ringan jang menghasilkan barang-barang jang dibutuhkan sehari-hari oleh petani djuga diperlukan dan diintensifkan. Adanja barang-barang ini akan merupakan perangsang bagi petani untuk mempertinggi produksinja guna mendapatkan penghasilan jang tjukup tinggi sehingga memungkinkan mereka membeli barang-barang tersebut. Dengan memproduksi barang-barang jang dibutuhkan tersebut dari dalam negeri maka akan tertjapai pula penghematan devisa dan perbaikan neratja pembajaran luar negeri.

Sektor prasarana dan perhubungan diarahkan pada tudjuan jang sama jaitu menjumbang sektor pertanian. Dengan bertambah sempurnanja prasarana dan perhubungan maka pasaran bagi hasil-hasil pertanian akan meluas sedangkan perkembangan

harga antar daerah mendjadi lebih merata. Tentunja prasarana jang dibutuhkan oleh sektor pertanian bukanlah djalan-djalan negara sadja melainkan seluruh djaringan djalan jang menghubungkan tempat-tempat produsen jang terpentjil didaerah pedusunan dengan tempat-tempat konsumen atau tempat-tempat pengumpulan hasil-hasil ekspor, seperti pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota besar. Dengan bertambah baiknja komunikasi maka alat-alat mass media dapat digunakan untuk mempertinggi effisiensi penjuluhan dan penerangan mengenai perkembangan-perkembangan harga sehingga petani dapat lebih mengetahui kemungkinan-kemungkinan jang ada.

Langkah-langkah jang diambil untuk mentjapai tudjuan-tudjuan tersebut diatas didasarkan pada usaha-usaha peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi. Dibidang pangan maka perbaikan, pemeliharaan dan perluasan irigasi mendapat prioritas pertama, sesuai dengan kenjataan bahwa air merupakan unsur mutlak untuk sebagian besar hasil-hasil pertanian, terutama padi. Untuk mempertahankan effektivitas irigasi direntjanakan pula usaha-usaha mengintensifkan pengendalian erosi. Selandjutnja penjediaan dan pengembangan benih unggul merupakan usaha lain untuk meningkatkan produksi. Penelitian untuk mentjari benih jang menghasilkan produksi rata-rata jang lebih tinggi tidak akan berhenti sebentarpun. Pengadaan pupuk dan obat-hama pada tempat dan waktu jang tepat dengan harga jang sesuai dengan nilai hasil jang diharapkan oleh petani merupakan sarat mutlak dalam usaha peningkatan produksi disektor pertanian. Selandjutnja usaha penjuluhan disempurnakan dan diperluas untuk memungkinkan bimbingan jang effektif kepada para petani mengenai tehnik bertjotjok tanam jang lebih baik, mengenai penggunaan sarana-sarana baru serta hasil jang dapat diharapkan dari penggunaannja dan mengenai perkembangan harga hasil-hasil pertanian. Prasarana terutama pengangkutan dan perhubungan, akan disempurnakan untuk mendjamin ladjunja penjaluran sarana produksi kedaerah-daerah produksi dan penjaluran hasil produksi kedaerah-daerah konsumsi.

Selain perbaikan-perbaikan dibidang fisik akan dilaksanakan pula perbaikan-perbaikan dibidang kelembagaan atau institusionil dengan tudjuan utama memberikan perangsang jang tjukup bagi petani. Disektor beras ditempuh kebidjaksanaan harga oleh Pemerintah jang mengusahakan agar petani memperoleh harga jang wadjar dari hasilnja dengan tjara pembelian oleh Pemerintah. Pemasaran hasil-hasil pertanian dan sarana-sarana produksi diperbaiki melalui penjempurnaan prasarana dan pembangunan fasilitas penjimpanan serta pengolahan jang tjukup. Diusahakan agar petani mendapat bagian jang lebih besar dari harga etjeran hasil produksinja dan agar perbedaan harga antar daerah tidak begitu menjolok lagi. Selandjutnja segala peraturan-peraturan jang menimbulkan biaja-biaja jang tak perlu dan jang menghalang-halangi kegiatan penjimpanan dan pengolahan dihapus setjepat mungkin. Disamping itu diusahakan pula pemetjahan masalah jang berhubungan dengan tanah dalam rangka peningkatan penjelesaian „land reform" dan perentjanaan „land use", disamping usaha-usaha jang mendjamin bagian jang adil bagi petani penggarap.

Pendidikan pertanian adalah menentukan sekali dalam tiap usaha pembangunan pertanian. Untuk ini direntjanakan sistim pendidikan jang ditudjukan kepada mereka jang tidak mempunjai hubungan langsung dengan pertanian, kepada mereka jang melajani petani, dan kepada petani-petani beserta keluarganja. Tudjuan pendidikan pertanian untuk golongan pertama ialah memberikan kesadaran akan pentingnja peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi. Tudjuan untuk golongan kedua ialah meningkatkan keahliannja dalam melaksanakan tugas mereka kepada petani. Untuk petani sendiri pendidikan ditudjukan untuk memungkinkan mereka mengambil keputusan-keputusan jang tepat sehingga produktivitas mereka mentjapai taraf jang tinggi.

Dibidang keuangan diusahakan perluasan kredit jang diperlukan oleh sektor pertanian. Oleh karena ketjilnja usaha pertanian dan ketjilnja bagian jang dipasarkan maka sebagian besar dari petani memerlukan kredit guna membiajai proses produksi

mereka. Penggunaan pupuk dan obat hama menjebabkan pengeluaran uang tunai oleh petani akan lebih besar dari waktu-waktu sebelumnja. Karenanja direntjanakan pengluasan kredit jang akan memenuhi kebutuhan jang esensiil tersebut. Selain itu sumber-sumber pembiajaan jang berasal dari Pemerintah jang ditudjukan untuk peningkatan produksi pertanian akan diperluas dan penjaluran uang diperlantjar.

Dibidang hasil-hasil ekspor kemunduran terutama disebabkan karena bertahun-tahun tidak ada investasi jang tjukup dalam peremadjaan dan penanaman baru. Dengan demikian komposisi umur pohon-pohon jang ada dewasa ini tidak seimbang lagi, dalam arti proporsi pohon-pohon jang sudah tua dan tidak produktif lagi adalah sangat besar. Akibatnja ialah bahwa hasil rata-rata per ha menurun. Hal ini berarti makin meningkatnja biaja per unit jang sebenarnja sudah tinggi karena rendahnja effisiensi perusahaan. Tingginja biaja ini menghalangi perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mendapatkan suatu penghasilan jang lajak.

Dalam keadaan keuangan jang demikian maka usaha-usaha peremadjaan, pemupukan dan usaha intensifikasi lainnja tidak dapat dilaksanakan. Lagi pula keadaan keuangan perusahaan-perusahaan perkebunan seringkali tidak membenarkan pemberian kredit kepada mereka oleh lembaga-lembaga perkreditan.

Kegiatan research selama bertahun-tahun tidak mendapat perhatian sehingga teknologi jang dipakai sekarang ini terbelakang djika dibandingkan dengan negara-negara lain. Disamping itu praktis tidak ada penjuluhan bagi perkebunan-perkebunan rakjat. Sebagaimana diketahui penjuluhan mengenai teknologi baru dalam bentuk benih unggul dan penggunaan sarana-sarana baru jang lebih produktif, mengenai tjara menanam dan memetik hasil dan mengenai perkembangan harga akan memungkinkan petani-petani perkebunan rakjat untuk meningkatkan produktivitas usahanja.

Dalam menghadapi persoalan diatas direntjanakan untuk melaksanakan peremadjaan dengan benih-benih unggul, pemu-

910087-(2).

pukan jang intensif dan pengolahan dengan tjara-tjara jang lebih effisien. Masalah kredit jang menghalang-halangi usaha-usaha tersebut akan dipetjahkan melalui penjediaan kredit djangka menengah dengan bunga jang lajak. Dana-dana akan disediakan melalui anggaran pembangunan serta bantuan luar negeri dan melalui lembaga-lembaga perkreditan jang sudah ada. Prioritas akan diberikan pada perkebunan-perkebunan jang menghasilkan karet, kelapa sawit dan teh, sedangkan jang paling effisien akan mendapat perhatian pertama. Tudjuan pilihan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh penanaman modal jang memberikan hasil tjepat (quick yielding).

Disamping itu penjuluhan akan ditingkatkan dengan tudjuan mempertinggi produktivitas perkebunan rakjat dan daja tanam para petani. Perbaikan dan pembangunan pabrik pengolahan akan dipertjepat dengan memberikan prioritas pada sektor-sektor jang dapat meningkatkan produktivitasnja dengan tjepat.

Dibidang perikanan angka produksi menundjukkan suatu kemadjuan. Namun demikian masih djauh dari djumlah produksi jang sebenarnja dapat ditjapai berdasarkan potensi jang tersedia. Ini disebabkan karena industri perikanan Indonesia telah djauh ketinggalan dengan perkembangan teknologi perikanan jang modern, sedang alat-alat penangkapan jang dimiliki para nelajan telah tua dan banjak jang rusak. Fakta lain jang menghambat kenaikan produksi ikan ialah sangat terbatasnja fasilitas penjimpanan, distribusi dan pemasaran, sedangkan masalah pengeksporan ikan tuna dan udang jang sangat digemari diluar negeri membutuhkan modal jang besar dan pengalaman dalam pemasaran internasional.

Untuk mengatasi persoalan diatas akan diadakan penelitian untuk mengetahui daerah-daerah ikan, sarang-sarang ikan, musim migrasi ikan dan kepadatan ikan. Selandjutnja direntjanakan penjempurnaan peralatan dan sarana jang diperlukan. Langkah-langkah djuga akan diambil untuk memberikan perangsang bagi pengusaha-pengusaha swasta nasional dan asing untuk berusaha setjara aktif dalam sektor ini.

Dibidang perikanan darat akan diusahakan penjediaan benih ikan jang tjukup, pentjegahan keratjunan pada ikan disawah, kolam, ataupun pada perairan alamiah dan penjuluhan pada petani-petani ikan, chususnja untuk perbaikan sistim pemeliharaan.

Dibidang kehutanan, usaha-usaha pemanfaatan hutan masih djauh dari apa jang dapat ditjapai. Sebagai akibatnja maka baik produksi maupun ekspor berada pada tingkat jang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara jang mempunjai hutan-hutan tropis seperti di Indonesia. Rendahnja tingkat pemanfaatan hutan ini disebabkan karena kekurangan modal dan karena kurangnja keahlian dan pengalaman dalam mengusahakan hutan-hutan setjara ekonomis. Dibidang ini diusahakan penanaman modal dalam negeri dan modal asing, bukan sadja untuk ekspor kaju melainkan djuga untuk pembangunan industri hasil hutan.

Dibidang peternakan akan diusahakan peningkatan produksi daging, telor dan susu. Tudjuannja bukan sadja untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri tetapi djuga untuk meningkatkan hasil devisa negara melalui ekspor ternak dan hasil-hasil peternakan lain.

Untuk meningkatkan produksi pertanian jang mendapatkan prioritas utama dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun maka keperluan biaja dari anggaran pembangunan diperkirakan sebesar 319 miljar rupiah dalam lima tahun dan 35,1 miljar rupiah dalam tahun 1969/70. Selain itu dari sumber-sumber lain diperkirakan 76 miljar rupiah, diantaranja 8 miljar rupiah dalam 1969/70.

A. BERAS.

Beras merupakan bahan makanan terpenting dalam arti sumbangannja kepada djumlah kalori jang dikonsumsi oleh manusia Indonesia dan dalam struktur upah dan gadji. Selain daripada itu sebagian besar dari penduduk pertanian Indonesia turut serta dalam memproduksi beras. Karenanja tiap kegontjangan harga beras akan mempengaruhi tingkat kesedjahteraan sebagian besar rakjat Indonesia.

Produksi.

Dalam waktu-waktu jang lampau produksi beras tidak dapat mengikuti perkembangan penduduk. Selama lima belas tahun jang terachir (1953 — 1967) produksi beras meningkat dengan hanja 1,5 persen rata-rata setahun dibandingkan dengan perkembangan penduduk jang lebih dari 2 persen. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi per capita maka djumlah beras jang diimpor telah ditingkatkan sehingga tiap tahunnja lebih dari 100 djuta dollar dari devisa digunakan untuk mengimpor beras. Dalam suasana pembangunan maka hal jang demikian itu tidak dapat dilandjutkan dan segala usaha akan diarahkan untuk meningkatkan produksi beras, sehingga devisa jang dengan susah pajah dihasilkan itu dapat digunakan untuk hal-hal jang lebih produktif. Tambahan pula peningkatan produktivitas sektor beras akan meningkatkan pendapatan per capita para petani dan hal ini akan merupakan sumber potensiil bagi mobilisasi tabungan, perluasan kesempatan bekerdja dan perluasan pasaran bagi hasil produksi sektor-sektor lain, terutama sektor industri.

Perkembangan produksi beras dan luas panenan di Indonesia adalah sebagai berikut:

TABEL VI-A-1

PERKEMBANGAN PRODUKSI BERAS DAN LUAS PANENAN RATA-RATA SETAHUN, 1953 — 1967

(persen)

	Djawa	Pulau-pulau lain	Indonesia
Produksi	0,2	3,3	1,5
Luas	0,4	3,2	1,1

Dari data tersebut djelas sekali bahwa luas panenan di Djawa menurun dengan 0,4 persen sedangkan diluar Djawa meningkat dengan 3,2 persen setahunnja. Ini merupakan suatu indikasi bahwa di Djawa tanah jang tersedia untuk padi tambah lama tambah berkurang jang disebabkan antara lain karena memburuknja djaringan-djaringan irigasi jang memaksa petani-

petani untuk menanam palawidja daripada padi. Hal ini dapat dilihat dari areal panenan di Djawa untuk djagung, ketela rambat dan ketela pohon meningkat dengan masing-masing 2,3 persen, 2,6 persen dan 2,7 persen setahunnja.

Tambahan pula hasil rata-rata padi dalam 15 tahun jang terachir meningkat dengan hanja 0,4 persen setahun. Meskipun demikian hasil rata-rata per ha produksi padi di Indonesia masih lebih tinggi dari misalnja beberapa negara tetangga, seperti Thailand dan India, tetapi masih djauh lebih rendah dari Djepang, RPA, Italia dan Taiwan. Perkembangan 0,4 persen setiap tahun untuk hasil rata-rata adalah tidak memuaskan sama sekali. Hal-hal jang menjebabkan rendahnja peningkatan produksi beras tentunja banjak dan telah dibahas didepan. Singkatnja keadaan ekonomi jang inflatoir, hantjurnja prasarana didaerah produksi dan merosotnja effisiensi lembaga-lembaga jang ada hubungannja dengan produksi beras adalah faktor-faktor penghambat utama.

Langkah-langkah jang akan ditempuh dalam lima tahun jang akan datang ini bertudjuan meningkatkan produksi beras sehingga pada tahun 1973 akan mentjapai 15,4 djuta ton. Sasaran ini akan ditjapai dengan peningkatan produksi tiap tahunnja sebagai terlihat dalam Tabel VI-A-2.

TABEL VI-A-2

SASARAN PRODUKSI BERAS, 1969/70 — 1973/74.

Tahun	Djumlah Produksi (djuta ton)	Persentase Pertambahan
1969/70	10,52	7,34
1970/71	11,43	8,65
1971/72	12,52	9,50
1972/73	13,81	10,30
1973/74	15,42	11,60

Peningkatan-peningkatan diatas adalah tinggi djika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnja, tetapi djelas tidak terletak diluar batas kemugkinan. Nada optimistis ini didasar-

LUAS PANEN & PRODUKSI PADI 1969/70 — 1973/74

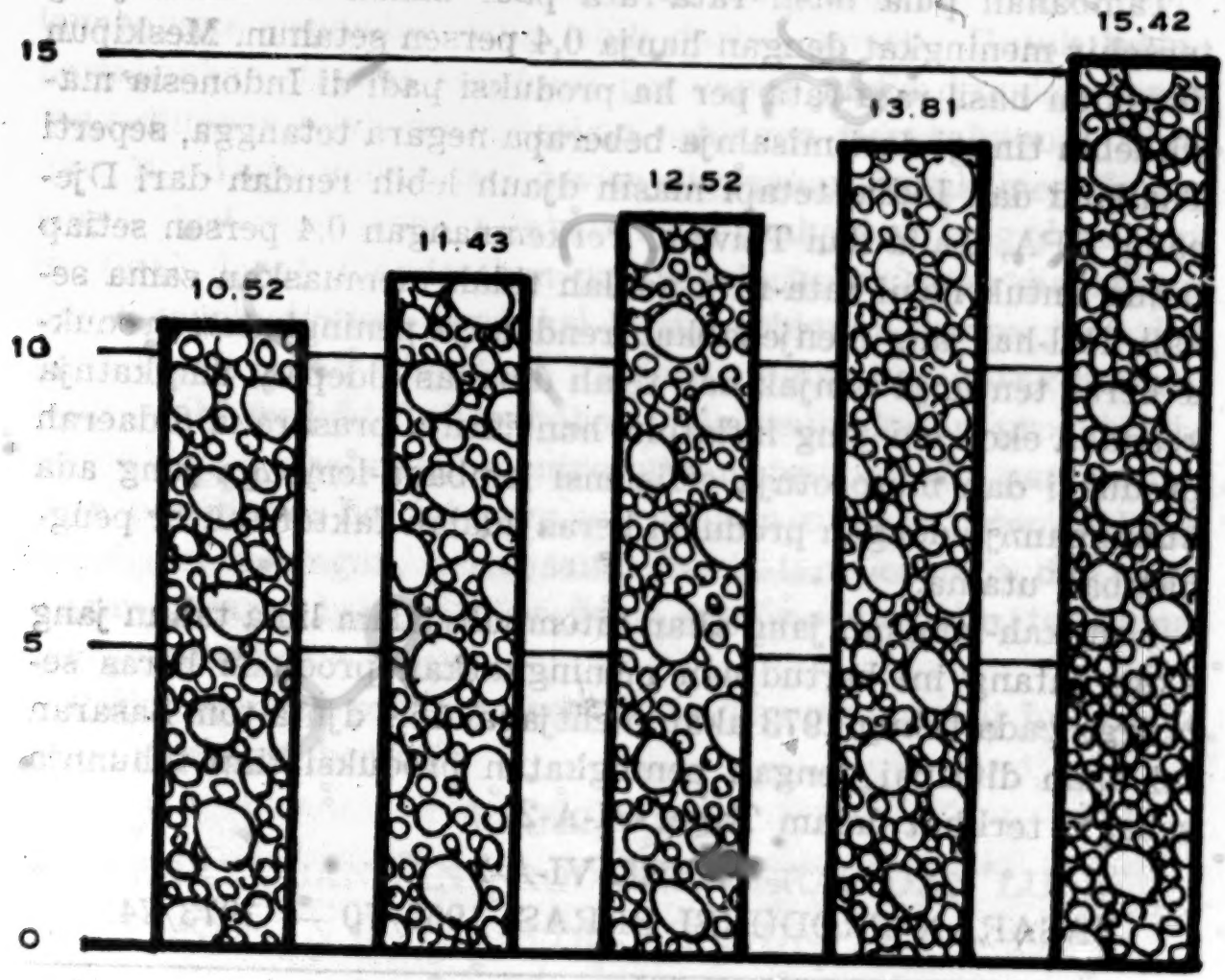

PRODUKSI (DJUTA TON BERAS)

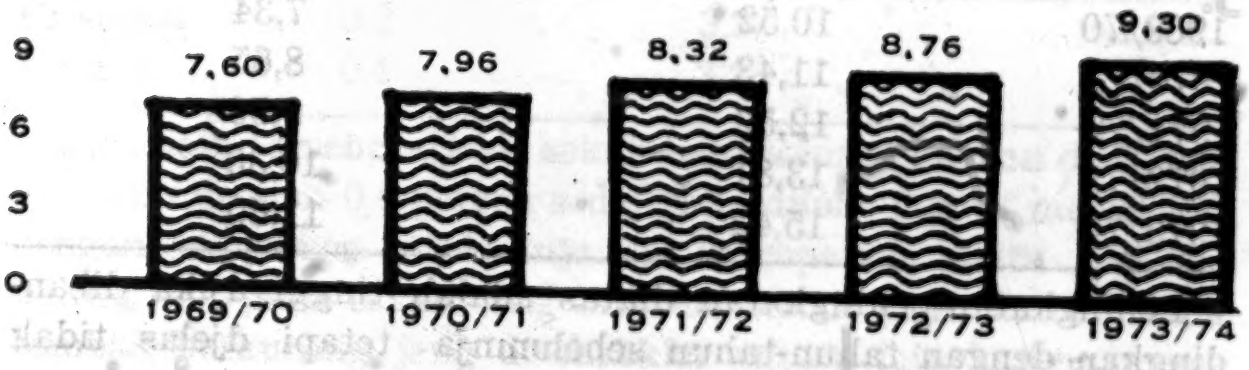

LUAS PANEN (DJUTA HA)

kan pada adanja teknologi baru jang memungkinkan produksi beras dengan tjepat sekali. Tehnologi baru ini timbul dalam bentuk benih-benih unggul jang sangat responsif terhadap pemakaian pupuk, dalam arti bahwa pemakaian pupuk terhadap benih-benih unggul tersebut menghasilkan produksi jang tinggi sekali. Selandjutnja sedjak dimulainja program Bimas pada tahun 1963 setjara berangsur-angsur petani-petani padi mulai sadar akan manfaat dari pupuk dan obat hama, sedangkan keadaan prasarana pada taraf sekarang sudah mulai lebih baik daripada beberapa tahun jang lalu. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas maka sasaran tersebut diatas tidak terletak diluar batas kemungkinan. Sudah tentu untuk mengamankan sasaran produksi tersebut perlu diambil beberapa tindakan penting. Dibawah ini setjara terperintji akan dibahas satu-persatu tindakan apa jang akan diambil untuk mensukseskan sasaran tersebut.

Untuk memungkinkan tertjapainja sasaran-sasaran produksi beras, pertama-tama akan diusahakan peningkatan produksi per hektar melalui usaha-usaha intensifikasi disamping usaha-usaha perluasan areal panenan. Jang terachir ini akan dimungkinkan dengan adanja perbaikan serta perluasan sistim irigasi.

Selama lima tahun jang akan datang, akan diusahakan perbaikan irigasi seluas satu djuta hektar sedangkan usaha perluasan akan meliputi 480.000 ha. Berdasarkan rentjana ini dapat diharapkan luas areal panenan padi akan meningkat dengan 1,7 djuta hektar dalam lima tahun mendatang. Perkiraan luas areal panenan padi tiap tahunnja dapat dilihat pada Tabel VI-A-3.

TABEL VI-A-3

PERKIRAAN LUAS AREAL PANENAN PADI, 1969/70 - 1973/74

Tahun	Luas Areal Panenan (djuta ha)	Persentase Pertambahan
1969/70	7,60	
1970/71	7,96	4,74
1971/72	8,32	4,52
1972/73	8,76	5,29
1973/74	9,30	6,16

Usaha-usaha intensifikasi akan diusahakan melalui perluasan areal jang dibimaskan dan penggunaan benih unggul baru jang pada saat sekarang terkenal dengan nama program Bimas Baru. Rentjana intensifikasi dalam lima tahun jang akan datang dapat dilihat dari Tabel VI-A-4.

TABEL VI - A - 4

LUAS AREAL PANENAN PADI DENGAN INTENSIFIKASI, 1969/70 — 1973/74

(djuta ha)

Tahun	Bimas dan Inmas [1]	Bimas Baru dan Inmas Baru [2]	Djumlah Areal Intensifikasi	Persentase dari Luas Panenan
1969/70	1,80	0,79	2,59	34,1
1970/71	1,50	1,40	2,90	36,4
1971/72	1,00	2,15	3,15	37,9
1972/73	0,40	3,08	3,48	39,7
1973/74	—	4,00	4,00	43,0

[1] Menggunakan benih unggul lain dari PB-5 dan PB-8.
[2] Menggunakan benih unggul PB-5 dan PB-8.

Angka-angka pada tabel diatas menundjukkan bahwa program Bimas dan Inmas biasa pada tahun 1973/74 akan dihentikan sama sekali. Sebaliknja program Bimas dan Inmas Baru jang menggunakan benih unggul PB-5 dan PB-8 akan ditingkatkan hingga meliputi 4 djuta ha. Program Bimas Baru ini ditrapkan pada areal sawah dengan pengairan jang paling baik. Sasaran ini telah disesuaikan dengan rentjana perbaikan dan perluasan sistim irigasi. Dengan tertjapainja usaha-usaha intensifikasi tersebut diatas maka persentase areal dengan intensifikasi bertambah lama bertambah besar. Pengaruh perluasan areal intensifikasi terhadap produksi rata-rata per hektar dapat dilihat pada Tabel VI-A-5. Sebagaimana dapat dilihat dari angka-angka pada tabel tersebut produksi rata-rata per hektar selama lima tahun akan meningkat dengan 20 persen.

LUAS AREAL PANENAN PADI DENGAN INTENSIFIKASI 1969/70 — 1973/74 (DJUTA HA)

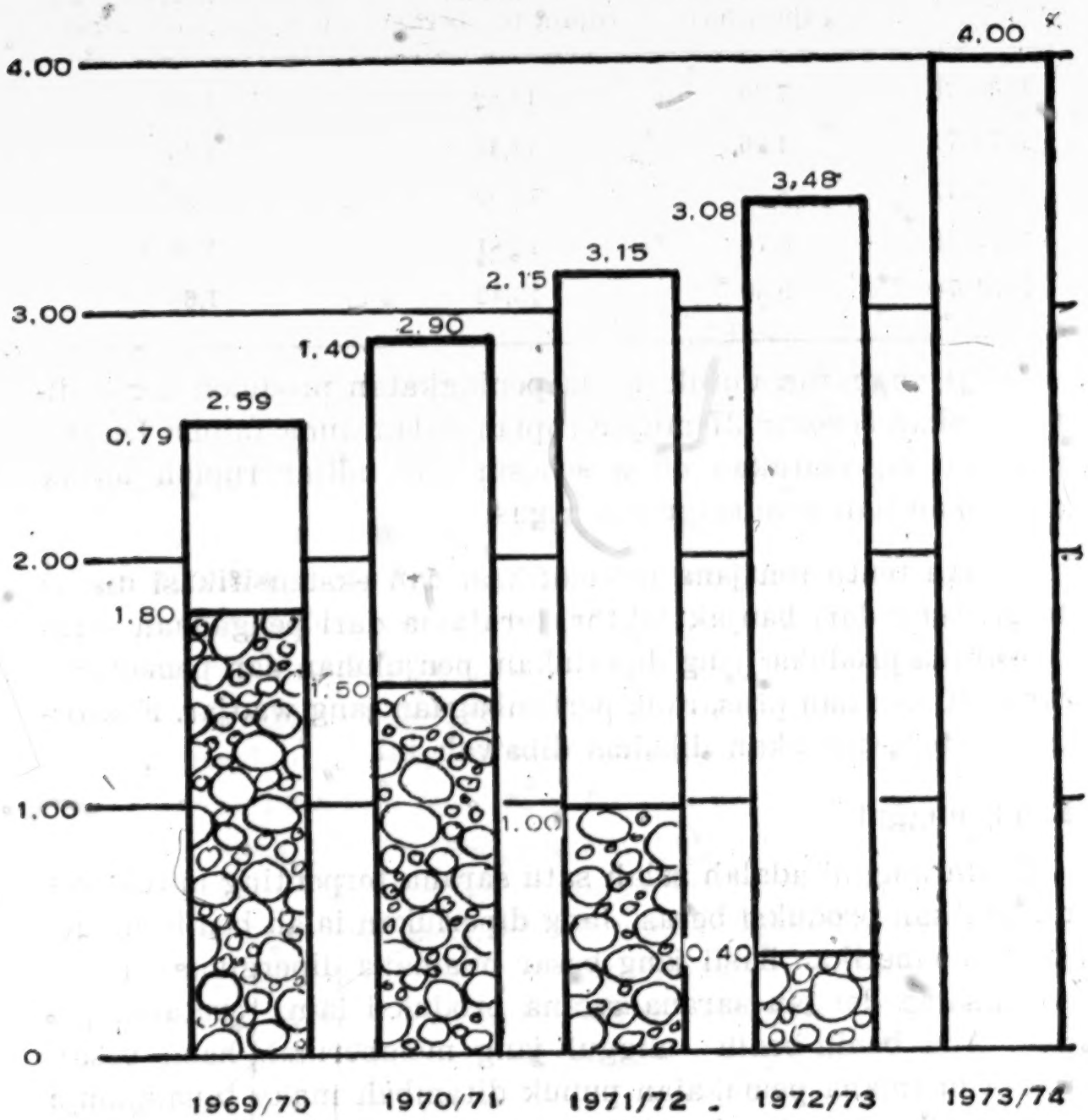

BIMAS DAN INMAS
(MENGGUNAKAN BENIH UNGGUL LAIN DARI PB 5 DAN PB 8)

BIMAS BARU & INMAS BARU
(MENGGUNAKAN BENIH UNGGUL PB 5 DAN PB 8)

TABEL VI - A - 5

PENGARUH PERLUASAN AREAL INTENSIFIKASI PRODUKSI PADI TERHADAP PRODUKSI RATA-RATA PER HA, 1969/70 — 1973/74

Tahun	Luas Panenan (djuta ha)	Produksi (djuta ton beras)	Produksi Rata-rata per Ha (ton beras)
1969/70	7,60	10,52	1,38
1970/71	1,96	11,43	1,43
1971/72	8,32	12,52	1,51
1972/73	8,76	13,81	1,58
1973/74	9,30	15,42	1,66

Biaja anggaran untuk usaha peningkatan produksi beras diperkirakan sebesar 27 miljar rupiah dalam lima tahun. Disamping itu diperkirakan biaja sebesar 236 miljar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan irigasi.

Sudah tentu rentjana intensifikasi dan ekstensifikasi diatas tergantung dari banjak faktor, terutama dari pengadaan sarana-sarana produksi jang diperlukan, penjuluhan dan pemasaran jang effisien dan prasarana perlembagaan jang wadjar. Faktor-faktor tersebut akan dibahas dibawah ini.

Benih unggul.

Benih unggul adalah salah satu sarana terpenting untuk meningkatkan produksi beras. Jang diperlukan ialah benih unggul jang memberikan hasil jang besar bilamana dipergunakan bersama-sama dengan sarana-sarana produksi lain, terutama pupuk. Ada benih-benih unggul jang memberikan hasil besar, tetapi bilamana pemakaian pupuk ditambah maka tanamannja seringkali rebah dengan akibat menurunnja hasil rata-rata.

Dewasa ini terdapat benih-benih unggul baru jang memenuhi persjaratan diatas, jaitu Peta Baru 5 dan Peta Paru 8 (PB-5 dan PB-8 atau IR-5 dan IR-8). Djenis-djenis baru ini adalah

hasil penelitian International Rice Research Institute, jang antara lain menggunakan benih-benih unggul jang berasal dari Indonesia. Dewasa ini penggunaan benih-benih unggul PB-5 dan PB-8 telah mulai dimantapkan di Indonesia. Hasil produksi rata-rata dari benih-benih unggul ini dikebun-kebun pertjobaan berkisar antara 3 — 4 ton beras per ha, jang berarti kenaikan 1,75 — 2,75 ton beras per ha dibanding dengan hasil rata-rata benih-benih lain.

Bilamana benih-benih unggul jang baru ini dapat diproduksi dalam djumlah jang besar dan dapat disebarkan dengan tjepat kedaerah-daerah, maka produksi beras akan meningkat dengan tjepat pula. Sudah barang tentu disamping produksi dan penjebaran benih-benih unggul diperlukan pula sarana-sarana produksi jang lain dalam djumlah jang tjukup.

Berhasil tidaknja usaha memperluas penggunaan benih unggul dalam waktu singkat tergantung dari beberapa faktor, diantaranja:

(1) penjuluhan mengenai penggunaannja,
(2) produksi benih-benih unggul tersebut, dan
(3) penjebarannja kedaerah-daerah.

Persoalan penjuluhan sangatlah penting, terutama karena benih-benih unggul jang baru ini mempunjai beberapa sifat jang agak berbeda dari benih-benih lain jang kini banjak dipakai.

Tanaman-tanaman padi jang berasal dari benih-benih unggul baru ini agak pendek dan tangkai butir terbungkus pelepah-daun. Kedua sifat ini menjulitkan panen dengan ani-ani sebagaimana lazimnja dilakukan. Untuk panen diperlukan penggunaan sabit. Lagi pula butir-butir padi dari benih unggul baru ini mudah rontok. Karena itu pada waktu panenan harus segera digabahkan guna mentjegah kehilangan selama pengangkutan. Perbedaan lain lagi ialah bahwa tanaman padi jang berasal dari benih-benih unggul baru ini ada kemungkinan lebih mudah diserang hama. Oleh karena itu persiapan-persiapan untuk mengatasi serangan hama harus dilaksanakan setjara lebih sempurna. Selandjutnja sudah barang tentu nasi jang berasal dari

benih unggul baru ini rasanja agak berbeda sedikit daripada nasi jang berasal dari benih-benih lain. Tetapi perbedaan ini tidaklah besar.

Perbedaan-perbedaan tersebut perlu diperhatikan karena mungkin dapat mendjadi faktor-faktor penghambat terhadap kesediaan para petani untuk menggunakan benih-benih unggul baru tersebut. Akan tetapi dilain pihak terdapat perbedaan jang sangat besar antara djumlah jang dihasilkan benih-benih unggul baru dengan djumlah jang dihasilkan benih-benih lain. Perbedaan djumlah hasil ini merupakan daja penarik jang tjukup besar bagi para petani untuk menggunakan benih-benih unggul baru. Namun demikian untuk mensukseskan penjebaran penggunaan benih-benih unggul baru tersebut maka effisiensi penjuluhan harus ditingkatkan. Untuk ini direntjanakan peningkatan keahlian didalam penjuluhan melalui intensifikasi pendidikan serta latihan-latihan dan dengan memperbesar corps penjuluh dibidang pertanian.

Masalah produksi benih unggul baru terletak pada persoalan mempertahankan kemurnian benih-benih tersebut dalam proses penglipat-gandaan. Pengalaman diwaktu-waktu jang lampau menundjukkan bahwa setelah beberapa musim sedjak benih unggul disebar-luaskan maka ternjata bahwa kemurniannja tidak dapat dipertahankan lagi, karena benih unggul tersebut telah tertjampur dengan benih-benih lainnja. Kedjadian demikian itu diikuti dengan adanja degenerasi daripada benih-benih unggul tersebut. Keadaan jang demikian ini harus dihindarkan dan untuk itu perlu diambil langkah-langkah persiapan.

Dewasa ini terdapat 280 kebun-kebun benih jang keseluruhannja meliputi 2.195 ha. Kebun-kebun ini bertugas untuk menjebarkan benih-benih kepada petani-petani produsen benih dan petani-petani lainnja. Tetapi karena kurangnja pemeliharaan, dana-dana dan fasilitas-fasilitas lain jang diperlukan maka kemurnian benih-benih jang dihasilkan dan disebarkan oleh kebun-kebun benih ini sukar dipertahankan. Akibatnja ialah bahwa para petani seringkali menerima benih-benih unggul jang

tidak murni lagi, sehingga dengan sendirinja tidak memperoleh hasil produksi jang diharapkan.

Untuk mempertahankan kemurnian benih unggul akan diambil berbagai langkah-langkah. Kebun-kebun benih akan diperbaiki dan diperkembangkan sehingga merupakan unit-unit produksi jang benar-benar effisien dalam arti menghasilkan benih-benih unggul jang sungguh-sungguh murni dan dengan biaja jang serendah-rendahnja. Untuk ini diusahakan dana-dana jang tjukup serta fasilitas-fasilitas termasuk unit-unit pengering jang diperlukan dan diusahakan pula management jang ahli.

Disamping itu akan didorong pula pertumbuhan kebun-kebun benih swasta. Selandjutnja untuk mendjaga agar supaja benih-benih unggul jang disebar-luaskan benar-benar terpelihara kemurniannja, maka akan dikembangkan sistim sertifikat benih. Dengan demikian para petani akan dilindungi terhadap pembelian benih-benih unggul jang tidak murni lagi.

Disamping perbaikan dan pengembangan kebun-kebun benih jang ada serta dorongan bagi pertumbuhan kebun-kebun benih swasta, akan dilaksanakan pula produksi benih setjara besar-besaran. Untuk ini akan dibuka kebun-kebun benih jang besar terutama didaerah-daerah produksi padi jang luas jakni diberbagai daerah di Djawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah-daerah lain.

Dalam tahun 1968 di Djawa Barat telah dibuka kebun benih Sang Hyang Sri di Sukamandi. Kebun-kebun benih sematjam itu direntjanakan pula bagi beberapa daerah lain. Karena kebun-kebun benih ini luas, maka akan ditempuh proses mekanisasi. Direntjanakan bahwa kebun-kebun jang besar ini akan mendjamin tersedianja benih unggul jang tjukup murni untuk lebih dari dua djuta ha. Tjara produksi benih unggul sematjam ini akan lebih mendjamin kemurnian karena pengawasan dapat dilaksanakan setjara lebih effektif. Selandjutnja untuk kelantjaran penjaluran diusahakan pengangkutan jang effektif antara pusat-pusat produksi benih ini dengan daerah-daerah jang memerlukan benih-benih tersebut.

Dalam lima tahun jang akan datang ini keperluan akan benih-benih unggul PB-5 dan PB-8 akan meningkat dengan tjepat. Direntjanakan bahwa luas areal jang akan ditanami dengan benih-benih unggul PB-5 dan PB-8 akan meningkat dari kurang dari 1 djuta ha dalam tahun 1969 mendjadi hampir 4 djuta ha didalam tahun 1973. Diperkirakan bahwa untuk tiap ha diperlukan 30 kg benih unggul PB-5 dan PB-8. Untuk memenuhi keperluan benih unggul direntjanakan produksi benih-benih tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel VI-A-6.

TABEL VI-A-6

PRODUKSI BENIH UNGGUL PB-5 DAN PB-8 UNTUK PELAKSANAAN RENTJANA INTENSIFIKASI PRODUKSI PADI, 1968/69 — 1973/74.

Tahun	Djumlah Produksi (ribu ton)
1968/69	23,70
1969/70	42,00
1970/71	64,50
1971/72	92,40
1972/73	120,00
1973/74	144,00

Tjatatan :

Produksi benih unggul PB-5 dan PB-8 dalam tahun 1969/70 adalah untuk keperluan produksi padi jang dipanen dalam tahun 1970/71. Demikian pula dengan tahun-tahun lainnja.

Sesuai dengan kebidjaksanaan diatas maka pada tahun 1969/70 akan dimulai gerakan perbaikan benih. Tudjuannja antara lain ialah mempergiat dan memperbaiki pengudjian benih serta pemurnian kembali benih unggul jang sudah tersebar luas. Tudjuan lain ialah mempergiat pelaksanaan penjuluhan jang menjangkut pemakaian benih unggul serta pengusahaannja. Selandjutnja akan dipersiapkan Rantjangan Undang-undang Perbenihan. Kegiatan lain ialah persiapan pembangunan induk-induk balai benih propinsi. Dengan berbagai matjam langkah ini diharapkan adanja perangsang produksi serta penjebaran benih unggul sehingga para petani dapat memperolehnja dalam keadaan jang murni dan dengan harga jang wadjar.

Pupuk dan obat hama.

Pupuk dan obat hama memegang peranan jang sangat penting dalam usaha meningkatkan produksi beras. Keistimewaan benih-benih unggul PB-5 dan PB-8 ialah bahwa benih-benih ini dapat menggunakan djumlah pupuk jang banjak sehingga produksi dapat meningkat dengan tjepat. Hal ini berarti bahwa untuk benih-benih PB-5 dan PB-8 diperlukan djumlah pupuk jang lebih banjak daripada benih-benih lain agar supaja hasil produksinja benar-benar meningkat dengan tjepat. Berdasarkan perhitungan sementara maka untuk benih-benih unggul PB-5 dan PB-8 diperlukan pupuk dalam djumlah sebagai berikut: 200 kg Urea + 100 kg TSP untuk tiap ha. Untuk benih-benih lain diperlukan 100 kg Urea + 50 kg TSP untuk tiap ha.

Rumus-rumus ini adalah perhitungan sementara. Lagi pula perhitungan ini adalah perhitungan rata-rata setjara nasional, sedangkan bagi masing-masing daerah diperlukan djumlah pupuk jang harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Untuk ini diadakan penelitian dan pertjobaan-pertjobaan setempat lebih landjut. Berdasarkan rumus-rumus tersebut dan mengingat sasaran-sasaran produksi beras jang hendak ditjapai dalam tahun 1969/70 sampai dengan 1973/1974 maka diperhitungkan bahwa untuk mentjapai produksi jang diharapkan, keperluan pupuk berkembang seperti pada Tabel VI-A-7.

TABEL VI-A-7

KEPERLUAN PUPUK UNTUK PELAKSANAAN RENTJANA INTENSIFIKASI PRODUKSI PADI, 1968/69 — 1973/74.

Tahun	Urea (ribu ton)	T.S.P. (ribu ton)	Nilai (djuta dollar)
1968/69	338	169	38,70
1969/70	430	215	49,45
1970/71	530	265	60,95
1971/72	676	328	77,58
1972/73	800	400	92,00
1973/74	960	480	111,40

Tjatatan : Keperluan pupuk dalam tahun 1969/70 adalah untuk keperluan produksi padi jang dipanen dalam tahun 1970/71. Demikian pula dengan tahun-tahun lainnja.

PERKIRAAN KEPERLUAN PUPUK UNTUK SELURUH SEKTOR PERTANIAN (NILAI. DJUTAAN $)

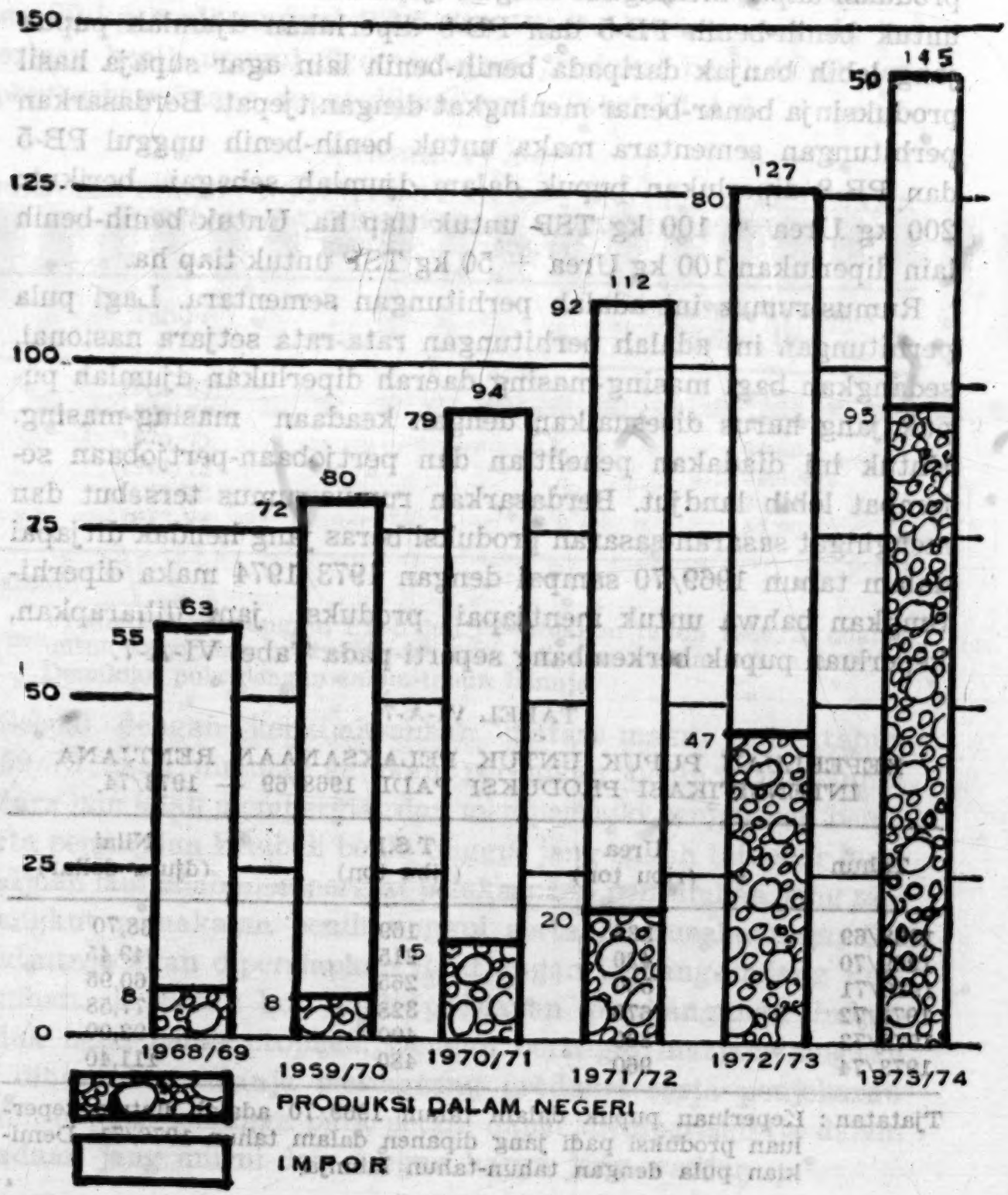

TABEL V

PERKIRAAN KEPERLUAN PUPUK UNTUK SEL

(ribua

Tahun	Padi		Palawidja Sajur-sajuran dll.			Perkebunan			Djumlah		
	N	P	N	P	K	N	P	K	N	P	K
1968/69	156	78	40	4	4	49	40	9	245	122	13
1969/70	198	99	44	5	5	78	46	9	320	150	14
1970/71	244	122	48	6	6	88	47	9	380	175	15
1971/72	311	151	53	7	7	86	51	11	450	209	18
1972/73	368	184	54	8	8	79	53	11	501	245	19
1973/74	442	221	57	9	9	72	54	11	571	284	20

Tjatatan : 1) Harga : Urea = $ 77/ton N = $. 167/ton
T.S. = $ 76/ton P_2O_5 = $. 165/ton
Z.K. = $ 69/ton K_2O = $. 138/ton

2) Keperluan pupuk Sektor Perkebunan Swasta dihitung 75% dari keperluan pupuk Sektor Perkebunan Negara

I - A - 8.

URUH SEKTOR PERTANIAN, 1969/70 — 1973/74.

ton)

Produksi Dalam Negeri				Impor				
Nilai (djuta $)	N	P	K	Nilai (djuta $)	N	P	K	Nilai (djuta $)
63	46	—	—	8	199	122	13	55
80	46	—	—	8	274	150	14	72
94	88	18	—	15	292	157	15	79
112	102	18	—	20	348	191	18	92
127	267	18	—	47	234	227	19	80
145	403	168	—	95	168	116	20	50

Keperluan pupuk tersebut diatas hanjalah keperluan untuk meningkatkan produksi beras. Disamping itu sektor-sektor pertanian jang lain djuga memerlukan pupuk. Diantaranja ialah sektor perkebunan dan djuga kegiatan-kegiatan pertanian lain seperti penanaman sajur-majur dan sebagainja. Agar supaja pupuk jang disediakan untuk peningkatan produksi padi tidak digunakan untuk produksi pertanian jang lain, maka djumlah persediaan pupuk harus lebih besar daripada jang diperlukan untuk produksi padi belaka. Oleh karena itu diadakan perkiraan-perkiraan mengenai djumlah pupuk jang diperlukan untuk kegiatan pertanian diluar produksi padi. Perkiraan-perkiraan ini dapat dilihat pada Tabel VI-A-8.

Keperluan akan pupuk jang semakin meningkat ini akan dipenuhi dari produksi dalam negeri dan dari impor. Dewasa ini kapasitas produksi dalam negeri baru mentjapai 100.000 ton urea atau 26.000 ton N setahun. Dengan perluasan kapasitas pabrik pupuk jang sedang dibangun dan pembangunan pabrik-pabrik pupuk baru diharapkan peningkatan jang tjepat dari produksi dalam negeri. Perkembangan produksi pupuk dalam negeri dapat dilihat pada Tabel VI-A-8.

Masalah jang penting dalam hal pupuk ialah penjalurannja kedaerah-daerah. Adalah penting sekali bahwa para petani memperoleh pupuk jang tepat matjamnja dan datang pada waktunja serta dengan harga jang wadjar. Dalam hal ini pengalaman dalam masa-masa lampau sangatlah tidak memuaskan. Seringkali pupuk datang terlambat dan kadang-kadang matjam pupuknja tidak sesuai, sedang harganjapun sangat tinggi.

Hal jang achir ini antara lain disebabkan karena sistim pemasaran jang berlaku pada waktu itu dan tingginja biaja pemasaran. Tidak lantjarnja pemasaran djuga mengakibatkan bahwa banjak petani harus menempuh djarak jang djauh untuk memperoleh pupuk dan harus membeli dalam djumlah jang terlalu besar. Dalam masa lampau djuga tidak djarang terdjadi bahwa pupuk mendjadi rusak sebagai akibat masalah penjimpanan dan masalah pengangkutan. Keadaan demikian itu bukan sadja menghamburkan devisa melainkan djuga meng-

gagalkan usaha meningkatkan produksi pangan. Oleh karena itu maka hal-hal tersebut harus ditjegah djangan sampai terulang kembali.

Untuk mendjamin persediaan pupuk jang tjukup serta penggunaan jang effektif akan diselenggarakan perentjanaan jang teliti dalam rangka rentjana-rentjana tahunan. Impor pupuk memperoleh prioritas jang tinggi sebagai bagian dari program impor setiap tahun. Penjelenggaraan impor akan dilakukan pada waktunja dengan memperhitungkan djangka waktu penjaluran kedaerah-daerah sehingga pupuk akan sampai pada petani pada waktu diperlukannja. Dalam hubungan ini perbaikan prasarana pengangkutan memegang peranan penting.

Disamping itu adanja gudang-gudang atau depot-depot jang tersebar serta meluasnja pemasaran sampai kedesa-desa akan memungkinkan petani membeli pupuk dengan mudah. Kebanjakan petani tidak memiliki tanah jang luas sehingga keperluan masing-masing akan pupuk djuga tidak besar. Lagi pula kebanjakan tidak memiliki biaja untuk membeli pupuk jang melebihi keperluannja untuk satu musim. Oleh karena itu pemasaran pupuk harus tersebar luas sedemikian rupa sehingga petani dapat membeli dengan mudah dalam djumlah jang sesuai dengan keperluannja. Selandjutnja disediakan kredit bagi para petani untuk membeli pupuk dan sarana-sarana produksi lainnja. Dalam hubungan ini ditelaah kemungkinan untuk menjalurkan pupuk dan sarana-sarana produksi lainnja, termasuk benih dan insektisida, setjara bersama-sama dalam suatu „bingkisan atau paket", sehingga para petani memperoleh segala sesuatu jang diperlukannja sekaligus.

Masalah lain jang sangat penting dalam penjaluran pupuk dan sarana-sarana produksi lainnja ialah imbangan harga antara pupuk dan padi. Untuk ini ditetapkan kebidjaksanaan harga jang menimbulkan dorongan bagi petani untuk membeli dan menggunakan pupuk. Disamping itu kepada pengusaha-pengusaha swasta diberikan perangsang dan dorongan agar supaja giat bergerak didalam penjaluran pupuk.

Disamping pupuk maka obat hama memegang peranan jang penting pula. Lebih-lebih lagi karena benih-benih unggul PB-5 dan PB-8 ada kemungkinan lebih mudah diserang hama. Untuk ini diperlukan persiapan-persiapan jang sebaik-baiknja. Penjediaan insektisida diarahkan kedjenis jang effektif, murah dan ber-toxicity rendah. Rentjana penjediaan insektisida tidak didasarkan kepada areal intensifikasi jang direntjanakan tiap tahun, melainkan didasarkan atas daerah bahaja serangan hama rata-rata per-tahun. Luas daerah bahaja serangan berbagai hama, antara lain sundep, walang sangit, wereng dan sebagainja ditaksir 1,6 djuta ha setahunnja. Rentjana penjediaan insektisida adalah untuk 50 persen dari luas daerah bahaja tersebut. Oleh karena untuk tiap ha diperlukan lebih kurang 4,2 liter insektisida maka dalam setahun diperlukan kira-kira 3.360 ton insektisida.

Disamping itu luas daerah bahaja berbagai matjam binatang seperti tikus, babi hutan dan sebagainja ditaksir 1,3 djuta ha per tahun. Untuk ini direntjanakan penjediaan rodentisida untuk lebih kurang 50 persen dari daerah bahaja tersebut. Untuk tiap ha diperlukan kira-kira 0,1 kg rodentisida, sehingga untuk tiap tahunnja direntjanakan penjediaan rodentisida sebanjak 65 ton. Ada kemungkinan daerah bahaja tersebut akan meningkat. Apabila demikian maka persediaan insektisida dan rodentisida harus meningkat pula.

Dewasa ini obat hama masih harus diimpor. Dalam lima tahun jang akan datang dimulai persiapan-persiapan untuk memungkinkan produksi obat hama didalam negeri. Sementara itu perentjanaan impor dari obat hama dilaksanakan dengan sebaik-baiknja. Impor obat hama memperoleh prioritas jang utama didalam program impor tiap tahun sebagaimana halnja dengan pupuk. Diperkirakan bahwa didalam tahun 1969/70 diperlukan impor obat hama sebanjak 16,60 djuta dollar. Kebutuhan obat hama didalam tahun 1972/73 diperkirakan akan mendjadi 20,10 djuta dollar. Keperluan akan obat hama dari tahun-ketahun dapat dilihat dalam tabel VI-A-9.

TABEL VI-A-9

PERKIRAAN KEPERLUAN OBAT HAMA UNTUK SELURUH SEKTOR PERTANIAN, 1968/69 — 1973/74

(djuta dollar)

Tahun	Padi	Palawidja Sajur-majur dll.	Perkebunan	Djumlah
1968/69	15,70	2,59	0,80	19,09
1969/70	16,60	2,59	0,62	19,81
1970/71	17,50	2,59	0,65	20,74
1971/72	18,50	2,75	0,63	21,88
1972/73	20,10	2,85	0,68	23,63
1973/74	22,00	2,95	0,70	25,65

Tjatatan : Keperluan obat hama untuk tahun 1969/70 adalah untuk produksi padi jang dipanen dalam tahun 1970/71. Demikian pula dengan tahun-tahun lainnja.

TABEL VI-A-10

PERKIRAAN KEPERLUAN TAMBAHAN ALAT PENJEMPROT UNTUK SELURUH SEKTOR PERTANIAN, 1968/69 — 1973/74

(ribuan)

Tahun	Padi	Palawidja Sajur-majur dll.	Perkebunan	Djumlah
1968/69	42,00	—	1,88	43,88
1969/70	74,70	30,00	1,63	106,33
1970/71	12,50	45,00	1,61	59,11
1971/72	12,50	4,50	1,56	18,56
1972/73	20,00	3,00	1,57	24,57
1973/74	20,00	3,00	1,60	24,60

Perentjanaan penggunaan obat hama berhubungan erat dengan perentjanaan penjediaan alat-alat penjemprot. Diperkirakan bahwa dalam tahun 1969/70 diperlukan alat-alat penjemprot untuk keperluan produksi padi sebanjak 74.700 buah. Keperluan tambahan tiap tahun alat-alat penjemprot untuk seluruh sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel VI-A-10.

Tabel-VI-A-10 perkiraan keperluan tambahan alat penjemprot tersebut diatas tidak merata dari tahun-ketahun karena ditaksir bahwa umur alat penjemprot rata-rata adalah 5 tahun.

Oleh karena alat-alat penjemprot ini dapat diproduksi didalam negeri maka direntjanakan untuk tidak mengimpornja lagi melainkan sepenuhnja menggunakan hasil produksi dalam negeri. Salah satu masalah ialah bahwa bagi petani-petani ketjil adalah pengeluaran jang besar untuk memiliki alat-alat penjemprot sendiri. Oleh karena itu diusahakan agar supaja alat-alat penjemprot dimiliki oleh kelompok-kelompok petani dan koperasi-koperasi atau oleh desa sebagai keseluruhan.

Dewasa ini sedang diadakan pertjobaan untuk menggunakan obat hama jang tidak memerlukan alat penjemprot, jakni obat hama jang berbentuk butir-butir. Apabila hal ini berhasil maka tidak perlu lagi dipergunakan alat-alat penjemprot, tetapi masalahnja ialah bahwa obat hama jang berbentuk butir-butir ini harganja lebih mahal. Suatu tjara lain jang kini diusahakan ialah penjemprotan dari udara dengan menggunakan pesawat-pesawat terbang ketjil. Dengan tjara ini tidak perlu pula adanja alat-alat penjemprot bagi masing-masing petani. Dalam masa depan akan dapat dilihat hasil-hasil perbandingan antara penggunaan obat hama dengan alat-alat penjemprot, penggunaan obat hama jang berbentuk butir dan penggunaan obat hama dengan penjemprotan dari udara. Atas dasar hasil-hasil tersebut kemudian dapat ditentukan pemberantasan hama jang lebih efektif.

Berlainan dengan pupuk, maka penggunaan obat hama bersifat menghindarkan turunnja produksi, sedangkan penggunaan pupuk bersifat meningkatkan hasil produksi. Oleh karena itu kegunaan obat-obat hama tidak segera terlihat atau terasa

bagi sementara petani. Hal ini menghambat penggunaan obat-obat hama, lebih-lebih lagi bilamana biajanja tidak ketjil. Oleh karena itu masalah pembiajaan obat hama akan memperoleh perhatian sepenuhnja. Sebagaimana halnja dengan pupuk maka djuga untuk obat hama disediakan kredit setjukupnja bagi para petani. Selandjutnja perentjanaan pengimporan dan penjaluran memperoleh perhatian utama pula. Dalam hubungan ini kepada pengusaha-pengusaha swasta diberikan dorongan-dorongan agar supaja bergerak pula dalam bidang penjediaan dan penjaluran obat hama bagi para petani.

Oleh karena obat hama tidak hanja diperlukan untuk produksi padi melainkan djuga untuk produksi perkebunan dan produksi lain-lain dibidang pertanian, maka perentjanaan impor dan penjaluran harus pula meliputi keperluan bidang-bidang pertanian jang lain ini. Djumlah obat hama jang diperlukan oleh seluruh sektor pertanian, termasuk produksi padi, perkebunan dan lain-lain, dapat dilihat dalam Tabel VI-A-9.

Alat-alat pertanian.

Untuk meningkatkan produksi diperlukan banjak sekali alat-alat pertanian seperti tjangkul, sabit, badjak, mesin-mesin penggabah dan pengering, pompa air dan lain-lain, disamping alat-alat penjemprot obat hama jang telah diuraikan diatas. Hasrat untuk meningkatkan produksi menimbulkan permintaan jang besar akan alat-alat pertanian tersebut. Bilamana alat-alat tersebut tidak tersedia maka hal tersebut dapat merupakan penghambat bagi peningkatan produksi pangan. Oleh karena itu diusahakan dengan sungguh-sungguh agar alat-alat tersebut tersedia pada waktunja dan ditempat jang diperlukan serta dengan harga dan mutu jang wadjar.

Sebenarnja alat-alat pertanian tersebut dapat diproduksi didalam negeri. Akan tetapi seringkali masih lebih disukai alat-alat jang diimpor. Oleh karena itu akan diambil langkah-langkah, bukan sadja untuk meningkatkan produksi alat-alat pertanian didalam negeri melainkan djuga untuk mendjamin mutu

daripada alat-alat pertanian tersebut. Untuk ini diperlukan pendorong dan perangsang bagi para produsen alat-alat pertanian.

Diantara alat-alat pertanian tersebut maka jang permintaannja akan paling melondjak dalam tahun-tahun jang akan datang ialah sabit dan mesin-mesin penggabah. Sebagaimana dimaklumi hasil produksi benih unggul PB-5 dan PB-8 lebih mudah dipanen dengan sabit daripada dengan ani-ani sebagaimana lazimnja. Berhubung dengan itu dapat diperkirakan bahwa permintaan akan sabit akan melondjak dengan tjepat diwaktu-waktu jang akan datang. Demikian pula halnja dengan mesin-mesin penggabah. Hal ini disebabkan karena padi jang dihasilkan oleh benih-benih unggul PB-5 dan PB-8 perlu digabahkan segera setelah panen.

Direntjanakan agar supaja kebun-kebun benih diperlengkapi dengan unit-unit pengeringan padi. Unit-unit jang besar mempunjai kapasitas 1 ton/djam, sedang unit-unit ketjil mempunjai kapasitas 4 ton/sehari. Sesuai dengan perkembangan kebun-kebun benih maka permintaan akan unit-unit pengering akan meningkat. Sebagian besar dari permintaan ini akan ditudjukan pada unit-unit pengering jang ketjil.

Selandjutnja untuk meningkatkan produksi, chususnja didaerah-daerah jang mengalami kekurangan air, diperlukan penjediaan mesin-mesin pompa air bagi unit-unit pengairan pedesaan. Pengurusan unit-unit pompa air ini diserahkan kepada masjarakat tani sendiri. Diperkirakan bahwa dalam lima tahun jang akan datang diperlukan tambahan sekitar 3.000 unit-unit mesin pompa air, jang masing-masing dapat mengairi sawah tadah hudjan ± 40 ha.

Salah satu sifat daripada benih unggul PB-5 dan PB-8 ialah bahwa butir-butir padinja mudah rontok. Oleh karena itu pengangkutan pada PB-5 dan PB-8 haruslah dalam bentuk gabah agar mengurangi kehilangan-kehilangan. Pengangkutan gabah dalam djumlah-djumlah jang besar dapat dilakukan paling effisien dalam karung-karung. Karenanja dapat diduga bahwa permintaan akan karung-karung akan bertambah setjara pesat dalam tahun-tahun jang datang. Berhubung dengan

itu industri pembuatan karung-karung dalam negeri akan diperluas dan ditingkatkan kwalitasnja. Kekurangan persediaan karung harus diimpor dan hal ini harus pula memperoleh prioritas didalam program impor tiap-tiap tahun.

Disamping alat-alat pertanian tersebut diatas maka peningkatan produksi padi dalam tahun jang akan datang djuga memerlukan pertambahan djumlah penggilingan-penggilingan padi dan unit-unit huller. Masalah ini dibahas dalam rangka pemasaran.

Mengenai kebidjaksanaan-kebidjaksanaan serta langkah-langkah jang akan ditempuh guna mengembangkan industri-industri jang menghasilkan alat-alat pertanian terdapat didalam Bab Industri.

Penjuluhan, pendidikan dan penelitian.

Penjuluhan, pendidikan dan penelitian pertanian memegang peranan vital dalam usaha meningkatkan produksi beras. Penjuluhan adalah salah satu bentuk pendidikan, jakni pendidikan bagi para petani agar supaja mereka lebih memaklumi kemungkinan-kemungkinan jang terbuka untuk meningkatkan produksi. Bentuk pendidikan pertanian jang lain ialah pendidikan untuk menghasilkan tenaga-tenaga tehnis pertanian jang kemudian akan bertugas dibidang penjuluhan dan lain-lain kegiatan jang berhubungan dengan pertanian. Selandjutnja ada matjam pendidikan pertanian lain pula jang tidak kalah penting, jakni pendidikan bagi masjarakat pada umumnja guna meningkatkan pengertian masjarakat mengenai masalah-masalah pertanian. Hal ini meliputjakup pula pendidikan disekolah-sekolah. Penjuluhan dan pendidikan pertanian memanfaatkan hasil-hasil penelitian. Dilain pihak penjuluhan dan pendidikan memberikan bahan-bahan jang sangat penting dalam memberikan arah kepada kegiatan penelitian pertanian.

Penjuluhan pertanian bertudjuan mengembangkan kesadaran para petani untuk menggunakan kemungkinan-kemungkinan serta tjara-tjara baru guna meningkatkan produksinja. Kegiatan para penjuluh bukan sekedar memberitahukan mengenai

tersedianja kemungkinan-kemungkinan serta tjara-tjara baru, melainkan mendorong para petani agar mempergunakan kemungkinan-kemungkinan itu serta menempuh tjara-tjara baru tersebut. Untuk ini para petani bukan sadja perlu mengetahui tentang adanja tjara-tjara baru tersebut, melainkan harus pula mengerti mengapa tjara-tjara baru tersebut lebih baik dan bagaimana tjara melaksanakan kemungkinan-kemungkinan baru itu. Selandjutnja para petani harus memperoleh kesempatan untuk mentjoba tjara-tjara baru tersebut. Ini berarti bahwa sarana-sarana produksi jang diperlukan harus pula tersedia dan ada pada waktunja. Apabila sarana-sarana produksi tersebut tidak tersedia sehingga para petani tidak dapat mentjoba tjara-tjara baru tersebut maka penjuluhan hanja akan menimbulkan keketjewaan belaka.

Kemungkinan-kemungkinan serta tjara-tjara baru jang disampaikan pada para petani bukan sadja harus terbukti lebih baik dipandang dari sudut tehnis, melainkan djuga harus terbukti lebih menguntungkan bagi para petani. Dengan lain perkataan penjuluhan harus menundjukkan bahwa biaja jang diperlukan dibanding dengan hasil jang diperoleh adalah lebih rendah. Dengan demikian penjuluhan jang diperlukan bukanlah sekedar penjuluhan jang bersifat tehnis pertanian sadja, melainkan djuga penjuluhan mengenai segi-segi ekonominja.

Efektivitas penjuluhan tergantung daripada berbagai faktor, diantaranja dari mutu dan ketrampilan para penjuluh serta djumlahnja, dan djuga dari program penjuluhan serta sarana-sarana jang tersedia untuk melaksanakannja. Dalam tahun-tahun jang akan datang mutu dan ketrampilan para petugas penjuluhan akan ditingkatkan, sedang djumlahnja akan diperbesar. Program penjuluhan akan disempurnakan dari tahun ke tahun, sedang sarana-sarana jang diperlukan akan disediakan setjukupnja. Salah satu sarana penting ialah kemungkinan bagi tenaga-tenaga penjuluh untuk melaksanakan tugas dalam daerah jang luas dan menemui sebanjak mungkin petani-petani. Untuk meningkatkan mobilitas ini diperlukan alat-alat untuk memperlantjar penjuluhan, diantaranja alat-alat audio visual.

Disamping itu direntjanakan adanja unit-unit perpustakaan pertanian jang minimal pada tingkat ketjamatan. Adalah penting sekali bahwa petugas-petugas penjuluhan senantiasa dapat mengikuti perkembangan tehnologi jang mempunjai pengaruh terhadap tugasnja.

Selandjutnja penjuluhan melalui radio djuga akan memegang peranan jang penting, lebih-lebih lagi karena adanja radio-radio telah mulai tersebar luas didaerah-daerah pedesaan. Dalam hubungan ini dikembangkan pembentukan kelompok-kelompok petani jang bersama-sama mendiskusikan masalah-masalah pertanian melalui radio. Sebagai persiapan penjuluhan melalui radio ini diselenggarakan latihan-latihan untuk petugas-petugas dibidang tersebut.

Untuk memperluas djaringan penjuluhan maka diterbitkan berbagai matjam publikasi-publikasi jang sederhana tetapi efektif mengenai kemungkinan-kemungkinan baru jang terdapat dibidang pertanian. Publikasi-publikasi ini dengan sendirinja harus disesuaikan dengan keadaan setempat. Oleh karena itu dibentuk pusat-pusat informasi pertanian baik dipusat maupun didaerah-daerah.

Akan tetapi jang lebih penting dan jang karena itu akan diselenggarakan lebih intensif lagi ialah hubungan-hubungan jang benar-benar rapat antara para penjuluh disatu pihak dan para petani dilain pihak, baik setjara perseorangan maupun setjara kelompok. Dalam rangka ini peranan para pemimpin-pemimpin masjarakat desa setempat sangatlah besar. Mereka ini dapat mendjadi perantara jang efektif dalam membawakan hal-hal baru antara petugas pertanian ditingkat ketjamatan dan para petani dilingkungannja.

Dengan adanja kegiatan penjuluhan jang intensif, maka para petani akan mengenal tehnologi baru, sarana-sarana produksi jang lebih produktif, serta tjara-tjara pemasaran jang lebih effisien. Akan tetapi bagi berhasilnja kegiatan penjuluhan jang paling penting ialah adanja bukti-bukti jang njata mengenai kemungkinan-kemungkinan baru tersebut. Untuk ini kegiatan penjuluhan harus segera diikuti dengan tersedianja sarana-sa-

rana produksi pada waktunja dan dengan harga jang sesuai dengan harga jang akan diperoleh dari hasil produksi. Mobilitas penjuluh-penjuluh pada taraf pedesaan akan ditingkatkan dengan tjara menjediakan alat-alat pengangkutan jang tjukup.

Pendidikan tenaga-tenaga tehnis pertanian bukan sadja diperlukan untuk menambah tenaga-tenaga penjuluh, melainkan diperlukan pula bagi kegiatan-kegiatan lain jang berhubungan erat dengan pertanian, diantaranja kegiatan perkreditan pertanian dan djuga kegiatan industri-industri jang menghasilkan alat-alat pertanian atau industri-industri jang mengolah hasil-hasil pertanian. Jang penting dalam pendidikan ini bukan sadja menumbuhkan keahlian dan ketrampilan, melainkan bagaimana menggunakan keahlian dan ketrampilan tersebut sehingga memberikan hasil dalam usaha peningkatan produksi pertanian. Disamping meningkatkan dan memperluas mutu pendidikan pertanian disekolah-sekolah akan dikembangkan pula kursus-kursus pendjendjangan bagi petugas-petugas jang sudah bekerdja. Tambahan pengetahuan ini bukan sadja penting karena banjak petugas-petugas jang perlu ditingkatkan pengetahuannja, melainkan djuga karena perkembangan tehnologi jang sangat tjepat. Adalah sangat penting bahwa para petugas senantiasa dapat mengikuti perkembangan tehnologi tersebut. Salah satu tjontoh ialah perkembangan jang tjepat dalam penggunaan benih-benih baru, pupuk dan obat-obat hama baru.

Dewasa ini terdapat kurang lebih 4.000 tenaga-tenaga tehnis pertanian jang tersebar diseluruh Indonesia. Direntjanakan bahwa dalam lima tahun jang akan datang kurang lebih 40 persen dari pada petugas-petugas tehnis ditingkat Ketjamatan setjara berangsur-angsur akan diganti dengan petugas-petugas lulusan S.P.M.A. sedang jang 60 persen lainnja akan ditingkatkan pengetahuannja sehingga mendjadi setaraf dengan lulusan S.P.M.A. Sementara itu sedang ditelaah kemungkinan menghasilkan tenaga-tenaga tehnis pertanian dengan mendidik lulusan S.M.A. dalam djangka waktu jang lebih singkat. Dewasa ini terdapat 10 S.P.M.A. Negeri jang tiap tahunnja menghasil-

kan 400 orang lulusan. Direntjanakan untuk memperbaiki sistim penempatan lulusan-lulusan S.P.M.A. tersebut dan kemudian meningkatkan djumlah lulusan setiap tahunnja. Dalam hubungan ini jang penting antara lain ialah masalah penghargaan bagi tenaga-tenaga tehnis tersebut serta tersedianja biaja untuk penempatan didaerah-daerah.

Direntjanakan bahwa kursus pendjendjangan bagi tenaga-tenaga pertanian tingkat Kabupaten akan dapat diselesaikan paling lambat dalam tahun 1970, sedang latihan-latihan produksi padi dan kursus-kursus pengawas benih akan diselenggarakan dalam tahun 1969 dan 1970. Selandjutnja akan diselenggarakan peningkatan pengetahuan bagi guru-guru pertanian jang telah ada serta pendidikan guru-guru pertanian jang baru. Disamping itu akan diselenggarakan latihan-latihan mekanisasi pertanian untuk petani-petani produsen jang telah mulai mempergunakan alat-alat pertanian mekanis dalam arti luas, diantaranja alat pengolahan tanah, alat penjemprot, alat perontok, huller, pompa air dan sebagainja.

Tidak kalah penting adalah pendidikan mengenai pertanian bagi masjarakat pada umumnja. Seringkali masih belum terdapat pengertian jang djelas mengenai pentingnja pembangunan pertanian bagi usaha pembangunan pada umumnja, serta apa-apa jang diperlukan bagi berhasilnja pembangunan pertanian. Adalah penting sekali adanja pendidikan kepada masjarakat mengenai pengaruh perkembangan harga beras terhadap kegiatan pembangunan pertanian, mengenai pentingnja perbaikan djalan-djalan dan pengairan didaerah pedesaan, mengenai pentingnja bidang pertanian sebagai pasaran bagi hasil-hasil industri, mengenai pentingnja industri-industri jang langsung menundjang pertanian, baik karena menghasilkan sarana-sarana produksi pertanian maupun karena pengolahan hasil-hasil pertanian. Pendidikan sematjam ini terutama akan ditundjukkan kepada masjarakat jang hidup dikota-kota.

Selandjutnja direntjanakan agar supaja disekolah-sekolah umum, dari sekolah dasar sampai perguruan-perguruan tinggi,

dapat ditumbuhkan iklim jang meningkatkan pengertian serta apresiasi mengenai usaha pertanian dan peranan petani dalam pembangunan nasional. Kegiatan pendidikan diusahakan sedemikian rupa sehingga setapak demi setapak berkuranglah penilaian jang salah seolah-olah pekerdjaan pertanian adalah lebih rendah dari pada pekerdjaan dibidang-bidang lain. Pengetahuan tentang pertumbuhan tanaman dan binatang, peranan serta pentingnja memelihara kekajaan alam, peranan pertanian dan petani dalam rangka pembangunan nasional adalah beberapa diantara sekian banjak hal-hal jang akan dikembangkan didalam sistim pendidikan guna membina iklim jang menundjang pembangunan pertanian.

Penelitian dibidang pertanian akan memperoleh perhatian utama. Hal ini disebabkan karena produktivitas pertanian banjak tergantung dari perkembangan tehnologi, sedang kemadjuan tehnologi adalah hasil penelitian. Kegiatan penelitian meliputi berbagai matjam pertjobaan-pertjobaan. Disamping itu pengalaman-pengalaman para petani serta bermatjam-matjam tjara dan sarana produksi jang dipergunakan diberbagai daerah diteliti setjara sistimatis. Demikian pula hasil-hasil jang diperoleh diberbagai negara diteliti kemungkinan penggunaannja setelah diadakan penjesuaian-penjesuaian.

Penelitian akan dilakukan setjara terarah. Diusahakan agar penelitian ditudjukan kepada masalah-masalah jang dihadapi oleh para petani dan agar supaja dapat memberikan djawaban atau alternatif-alternatif pemetjahan bagi masalah-masalah tersebut. Dalam hubungan ini kerdja sama antara penjuluhan, pendidikan dan penelitian sangatlah penting. "Feedback" dari bidang penjuluhan kebidang penelitian akan memberikan bahan jang diperlukan dalam memberikan arah kepada penelitian. Oleh karena masalah peningkatan produksi pertanian meliputi banjak segi-segi, maka sifat penelitian sering-kali merupakan kerdjasama antara ahli-ahli penelitian diberbagai bidang. Dengan demikian kegiatan penelitian meliputi segi-segi tehnis, ekonomi dan sosial. Tjara pendekatan jang memperhatikan

berbagai matjam segi tersebut akan memudahkan penjebaran dan penerimaan hasil-hasil penelitian.

Mengingat luasnja daerah serta bermatjam-ragamnja keadaan masing-masing, maka penempatan lembaga-lembaga penelitian serta penentuan matjam kegiatan masing-masing akan memperhatikan keadaan tersebut. Dalam hubungan ini penting sekali peranan penelitian jang bersifat adoptif, jakni penelitian untuk menjesuaikan hasil-hasil perkembangan tehnologi dengan keadaan setempat sehingga dapat memberikan hasil jang diharapkan.

Meskipun dewasa ini telah terdapat benih unggul baru PB-5 dan PB-8, namun penelitian mengenai benih tetap akan dilandjutkan dengan giat. Chususnja dilandjutkan penelitian jang berhubungan dengan perbaikan benih-benih unggul tersebut, sehingga sifat-sifatnja lebih sempurna. Antara lain agar supaja mutunja lebih sesuai dengan selera konsumen dan agar supaja lebih tahan terhadap berbagai matjam penjakit. Selandjutnja diadakan penelitian untuk membina benih jang tjotjok bagi daerah-daerah pasang-surut. Dewasa ini benih-benih jang dipakai didaerah-daerah pasang-surut hasilnja sangat rendah djika dibanding dengan hasil rata-rata nasional.

Disamping penelitian tentang benih-benih djuga akan diselenggarakan pertjobaan-pertjobaan pemupukan dan djuga pengudjian serta pertjobaan berbagai matjam obat hama, terutama untuk pemberantasan tenggerek batang padi. Penelitian dan pertjobaan-pertjobaan ini dengan sendirinja harus disesuaikan dengan keadaan didaerah-daerah jang berbeda dalam hal topografi, iklim, tanah dan sebagainja. Dengan penelitian-penelitian ini diharapkan akan tersedia „bingkisan atau paket" jang terdiri atas benih, pupuk dan obat hama, jang paling sesuai bagi suatu daerah.

Penelitian lain berhubungan dengan alat-alat pertanian. Antara lain penelitian tentang berbagai matjam alat-alat pertanian jang dipergunakan diberbagai daerah serta kemungkinan penggunaannja didaerah-daerah lain. Demikian pula mengenai

alat-alat pertanian jang dipergunakan dinegara-negara lain serta kemungkinan penjesuaiannja. Masalah lain ialah penelitian tentang peningkatan mutu alat-alat pertanian jang dihasilkan didalam negeri.

Disamping penelitian dibidang tehnis maka penelitian di bidang-bidang ekonomi dan sosial akan dikembangkan. Antara lain akan dikembangkan penelitian mengenai pengaruh harga-harga sarana produksi serta harga-harga hasil produksi terhadap perkembangan produksi. Hasil penelitian tersebut akan memberikan bahan jang sangat penting dalam memilih kebidjaksanaan jang tetap mengenai imbangan harga antara sarana produksi dan hasil produksi pertanian. Demikian pula penelitian mengenai pemasaran akan ditingkatkan. Hal ini menjangkut struktur pemasaran sarana produksi maupun struktur pemasaran hasil produksi. Diantaranja ialah jang berhubungan dengan penjaluran pupuk. Selandjutnja perkreditan desa serta perentjanaan penggunaan tanah akan memperoleh perhatian pula didalam bidang penelitian.

Agar supaja penelitian dapat memberikan hasil jang diharapkan maka diselenggarakan perentjanaan jang tepat dengan disertai pembiajaan jang tjukup, termasuk penjediaan alat-alat jang diperlukan serta penghargaan jang wadjar bagi tenaga-tenaga penelitian.

Pemasaran.

Peningkatan produksi padi hanja akan berlangsung setjara terus-menerus bilamana ada pasaran. Apabila pasaran merosot atau pemasaran berlangsung setjara tidak memuaskan maka berkuranglah hasrat para petani untuk meningkatkan produksi dengan akibat menurunnja kembali produksi. Karena itu diperlukan pemasaran jang lantjar dan jang dapat memberikan kejakinan pada para petani bahwa hasil produksinja senantiasa akan dapat didjual dengan memuaskan.

Dalam masa lampau pemasaran beras berlangsung djauh daripada memuaskan. Keadaan ini disebabkan berbagai hal,

diantaranja ialah memburuknja prasarana, terutama dibidang pengangkutan dan penjimpanan, menurunnja kapasitas pengolahan dan kesulitan-kesulitan dibidang pembiajaan. Tambahan lagi kesimpangsiuran peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan telah menambah kesulitan dibidang pemasaran.

Pemasaran beras jang tidak effisien mempunjai pengaruh jang langsung terhadap tingkat produksi. Apabila harga beras jang tinggi dikota-kota tidak diteruskan kepada para petani dan selama beberapa musim para produsen memperoleh harga jang rendah, maka tidak ada perangsang untuk meningkatkan produksi. Demikian pula akibatnja bilamana pemasaran hanja melalui satu saluran sadja, sehingga petani hanja menghadapi satu pembeli belaka.

Untuk mendjamin kelangsungan peningkatan produksi padi diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan effisiensi pemasaran. Langkah-langkah tersebut meliputi berbagai bidang, diantaranja bidang pengangkutan, penjimpanan, pengolahan, pembiajaan dan sebagainja.

Dibidang pengangkutan diusahakan perkembangan sistim pengangkutan jang mendjamin kelantjaran pengangkutan hasil produksi dari daerah-daerah produksi kepusat-pusat konsumsi dan sebaliknja djuga kelantjaran pengangkutan sarana-sarana produksi kedaerah-daerah produksi. Adalah penting sekali bahwa sarana-sarana produksi sampai pada petani pada waktunja dan dengan harga jang wadjar. Untuk ini perbaikan prasarana, terutama djalan-djalan dan alat-alat angkutan, memperoleh prioritas tinggi. Djalan-djalan jang menghubungkan daerah produksi dan pusat-pusat konsumsi akan memperoleh perhatian utama.

Untuk melajani pengangkutan hasil produksi jang akan meningkat dengan tjepat diperlukan alat-alat pengangkutan dalam djumlah jang tidak ketjil. Demikian pula untuk mengangkut sarana-sarana produksi jang diperlukan dalam djumlah-djumlah jang besar mengharuskan adanja pertambahan alat-alat pengangkutan.

Dengan meningkatnja produksi setjara tjepat sudah tentu diperlukan lebih banjak tempat-tempat penjimpanan atau gudang-gudang. Diusahakan agar supaja kapasitas pergudangan dapat tumbuh sedjadjar dengan perkembangan produksi. Hal ini ditjapai dengan memperbaiki pergudangan jang sudah ada dan dengan membangun gudang-gudang baru. Dalam hubungan ini diusahakan gudang-gudang jang lebih effisien sehingga mengurangi kerugian-kerugian. Peningkatan produksi djuga akan merobah konsentrasi letak pergudangan. Akan lebih banjak diperlukan gudang-gudang didaerah-daerah produksi dan pusat-pusat konsumsi. Kepada fihak swasta, terutama penggilingan padi dan huller, diberikan dorongan untuk meningkatkan kapasitas pergudangan.

Salah satu fungsi pemasaran jang penting ialah pengolahan hasil produksi. Dalam hal ini akan ditingkatkan kapasitas pengolahan padi, terutama penggilingan padi dan huller. Ada berbagai hal jang menghambat perkembangan industri pengolahan padi. Diantaranja ialah keadaan peralatan jang memerlukan rehabilitasi dan adanja berbagai matjam peraturan-peraturan jang menghambat effisiensi. Keadaan ini mengakibatkan menurunnja effisiensi perusahaan-perusahaan pengolahan tersebut.

Oleh karena produksi padi direntjanakan akan meningkat dengan lebih dari 50 persen dalam 5 tahun jang akan datang maka direntjanakan pula rehabilitasi serta perluasan industri pengolahan padi. Tambahan lagi rendemen penggilingan padi dan huller adalah lebih tinggi daripada penumbukan. Dengan demikian perluasan penggilingan padi dan huller akan mengakibatkan pula perbaikan rendemen pengolahan.

Dewasa ini kapasitas penggilingan padi adalah sekitar 0,7 djuta ton beras, sedang kapasitas huller sekitar 1,5 djuta ton beras, sehingga djumlahnja adalah sekitar 2,2 djuta ton beras. Dengan adanja rehabilitasi serta pembangunan baru maka kapasitas penggilingan padi maupun huller akan bertambah dengan tjepat. Diusahakan agar pada achir 5 tahun jang akan

910087-(4).

datang penggilingan padi dan huller dapat mengolah separo daripada seluruh djumlah produksi padi. Oleh karena sasaran produksi beras pada tahun 1973/74 adalah 15,4 djuta ton, maka kapasitas penggilingan padi dan huller harus dinaikkan sehingga dapat menghasilkan 7,7 djuta ton beras. Untuk ini kapasitas penggilingan padi akan ditingkatkan dari 0,7 djuta ton mendjadi 2,9 djuta ton beras pada tahun 1973/74, sedang kapasitas huller akan dinaikkan dari 1,5 djuta ton beras mendjadi 4,8 djuta ton beras dalam tahun 1973/74. Tabel VI-A-11 memperlihatkan perkembangan kapasitas penggilingan padi dan huller selama lima tahun mendatang.

TABEL VI-A-11

PENINGKATAN KAPASITAS PENGGILINGAN PADI DAN HULLER, 1968/69 — 1973/74

(djuta ton beras)

Tahun	Penggilingan padi	Huller	Djumlah	Persentase dari Produksi Beras
1968/69	0,7	1,5	2,2	22
1969/70	0,8	2,2	3,0	28
1973/74	2,9	4,8	7,7	50

Dewasa ini diperkirakan bahwa 80 persen dari produksi padi ditumbuk, sehingga menghasilkan sekitar 7,8 djuta ton beras. Pada achir djangka waktu 5 tahun jang akan datang kurang lebih djumlah jang sama akan tetap melalui proses penumbukan. Dengan demikian mekanisasi pengolahan padi tidak akan mempengaruhi pengangguran setjara berarti. Bahkan sebaliknja, pembangunan penggilingan-penggilingan padi dan huller akan dapat menampung banjak tenaga kerdja.

Perluasan kapasitas penggilingan dan huller diusahakan dengan mentjiptakan iklim jang merangsang sektor swasta untuk berusaha dibidang ini. Untuk ini segala ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan jang menghambat perkembangan sektor pengolahan padi akan dihilangkan dan sebaliknja di-

usahakan langkah-langkah untuk mendorong perkembangan sektor tersebut.

Fungsi lain lagi dari pemasaran ialah pembiajaan. Untuk keperluan pengumpulan, pengangkutan, penjimpanan, pengolahan dan lain-lain diperlukan pembiajaan. Untuk ini dipersiapkan langkah-langkah jang diperlukan. Dengan meningkatnja produksi maka pembiajaan untuk keperluan musim djuga akan meningkat. Agar supaja pembiajaan untuk pemasaran dapat berdjalan lantjar tanpa mengakibatkan subsidi maka sedjauh mungkin diusahakan pengerahan dana-dana jang djustru timbul karena meningkatnja produksi padi.

Selandjutnja berbagai matjam langkah-langkah akan diambil untuk melantjarkan pemasaran. Antara lain diusahakan sistim standarisasi kwalitas. Hal ini akan memperlantjar pemasaran dan djuga mengurangi risiko serta pertikaian. Disamping itu akan dikembangkan sistim penjiaran informasi pasaran. Dengan adanja penjiaran tersebut para petani dapat menilai apakah harga jang diperolehnja mentjerminkan harga dipusat-pusat pasaran. Untuk penjiaran informasi pasaran ini diperlukan perbaikan didalam pengumpulan data statistik serta perbaikan lalu-lintas pos dan telekomunikasi. Dalam rangka meningkatkan effisiensi pemasaran maka dipupuk iklim berusaha jang sehat, antara lain dengan menghalaukan segala matjam hambatan-hambatan fisik dan administratif.

Langkah lain lagi ialah diusahakan kembalinja kepertjajaan para petani terhadap usaha koperasi sebagai suatu organisasi jang memperkuat kedudukan mereka didalam pemasaran.

Perangsang Produksi.

Intensifikasi membutuhkan sarana-sarana baru jang harus dibeli oleh petani. Rendahnja pendapatan per capita petani-petani mempersukar atau menghalangi penggunaan sarana baru tersebut, dalam arti petani tidak mampu membeli sarana tersebut ataupun tidak bersedia mengambil risiko untuk menggunakan sarana tersebut. Disamping itu karena kurang lantjarnja pemasaran padi dan beras dan demikian pula pemasaran sarana maka pada umumnja para petani harus mendjual

padi dengan harga jang rendah pada waktu panen sedangkan harus membeli sarana dengan harga jang tinggi.

Keadaan tersebut tidak akan memberikan perangsang bagi petani untuk menggunakan sarana-sarana baru jang akan meningkatkan produksi padi. Pengalaman menundjukkan bahwa harga beras jang rendah dan harga pupuk jang tinggi mempunjai effek jang negatif terhadap program Bimas. Karenanja dalam lima tahun jang akan datang didjalankan kebidjaksanaan harga jang mendjamin keseimbangan harga jang wadjar, jaitu jang akan mendjamin keuntungan bagi petani untuk menggunakan sarana-sarana baru.

Pelaksanaan kebidjaksanaan harga dilakukan melalui penentuan harga minimum pembelian padi oleh Pemerintah pada taraf tani, jakni pada tingkat jang memungkinkan keuntungan bagi petani. Tjara ini telah dimulai pada tahun 1968 dan akan disempurnakan pada tahun-tahun jang akan datang, dengan tjatatan bahwa rumus tani jang digunakan sekarang akan disesuaikan dengan perobahan-perobahan dalam perkembangan harga-harga sarana dan padi.

Berhasil tidaknja kebidjaksanaan harga tersebut antara lain tergantung dari kesempurnaan prasarana fisik maupun institusionil, termasuk tersedianja fasilitas penggudangan, sistim kredit dan fasilitas komunikasi. Jang terachir ini perlu untuk menjampaikan kepada petani-petani harga minimum padi jang mereka akan terima dari pembelian padi oleh Pemerintah pada musim panen. Harga-harga minimum ini akan diumumkan pada waktu mulai tanam sehingga mempermudah petani untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan sarana baru dan setidak-tidaknja mengurangi keragu-raguan mengenai harga padi pembelian Pemerintah jang dapat diharapkan pada waktu panen. Selandjutnja untuk memperlantjar komunikasi djuga direntjanakan penjempurnaan standardisasi beras jang merupakan prasarat utama untuk mempertinggi effisiensi pemasaran.

Kebidjaksanaan harga lain jang akan ditempuh ditudjukan untuk mengurangi perbedaan harga beras antar daerah. Per-

bedaan harga antar daerah diwaktu-waktu jang lampau ternjata besar sekali. Ini antara lain disebabkan karena ketidak sempurnaan pasaran beras di Indonesia sebagai akibat dari buruknja hubungan antar daerah dan adanja peraturan-peraturan daerah jang melarang pengangkutan beras keluar daerah-daerah tersebut.

Perbedaan-perbedaan harga tidak akan dibiarkan karena merugikan petani serta mengurangi perangsang petani-petani padi jang berada didaerah-daerah dengan harga rendah. Untuk mengatasi hal ini diadakan perbaikan pengangkutan antar daerah, sedang peraturan-peraturan daerah jang menghalangi aliran bebas beras antar daerah akan ditindjau kembali.

Sistim perangsang diatas baru berhasil sepenuhnja djika semua petani padi memiliki tanah jang mereka usahakan. Sebagaimana diketahui di Djawa banjak sekali penggarap. Bagi mereka hasil pendjualan jang djatuh pada pemilik tanah tidak termasuk pendapatan mereka. Djadi bagi penggarap maka perangsang untuk menggunakan sarana-sarana baru adalah besar-ketjilnja bagian jang mereka dapat harapkan dari penggarapan tanah milik orang lain. Kalau penggarap harus membiajai penggunaan sarana-sarana baru setjara keseluruhan sedangkan ia hanja menerima sebagian dari hasilnja maka hal ini akan mengurangi perangsang untuk menggunakan sarana-sarana baru tersebut. Karenanja diusahakan supaja penggarap dan pemilik tanah membagi biaja produksi sesuai dengan pembagian hasil. Sebelum menggariskan kebidjaksanaan ini setjara konkrit akan ditjoba dulu sebagai pilot project dibeberapa daerah untuk mengetahui effektivitasnja.

Dalam hubungan ini untuk lebih memungkinkan berhasilnja sistim perangsang tersebut diatas akan diintensifkan usaha-usaha „landreform", sedangkan gedjala „absentee ownership" (pemilikan tanah oleh orang-orang jang bukan petani dan jang kebanjakan tinggal dikota-kota besar) akan dibatasi. Berbagai masalah jang timbul dalam pelaksanaan „landreform" diusahakan pemetjahannja setjara effektif.

Kebidjaksanaan harga lain jang akan ditempuh ditudjukan untuk mendjaga agar harga-harga beras pada taraf konsumen tidak meningkat tanpa batas. Dalam waktu lampau harga-harga beras pada taraf konsumen memiliki sifat jang tidak tetap sehingga sering terdjadi peningkatan harga-harga tersebut.

Kedjadian-kedjadian sematjam ini narus ditjegah berhubung menghalang-halangi perkembangan sektor industri dan sektor ekspor karena pengaruh harga beras atas struktur upah. Tjara jang akan ditempuh ialah melalui usaha mempertahankan suatu harga maksimum (ceiling price). Harga maksimum ini diusahakan dengan djalan pendjualan beras oleh Pemerintah dalam pasaran bilamana harga beras menundjukkan tendensi menaik.

Dengan berhasilnja usaha pembangunan dan pulihnja kepertjajaan umum pada uang rupiah ada kemungkinan bahwa golongan pegawai negeri dan golongan lain jang hingga kini mendapatkan sebagian dari gadjihnja dalam bentuk beras menghendaki uang tunai. Perkembangan demikian akan disambut dengan baik karena mensederhanakan permasalahan beras. Ini tidak berarti bahwa pemerintah akan berhenti membeli padi. Pembelian-pembelian padi akan terus dilandjutkan dalam rangka mengusahakan harga minimum padi dan untuk persediaan stock guna mempertahankan harga maksimum padi.

Perkreditan

Dalam waktu-waktu jang lampau persoalan perkreditan untuk keperluan produksi merupakan salah satu penghalang utama dalam usaha peningkatan produksi beras. Persoalan kredit adalah persoalan persediaan dana dan fasilitas perkreditan jang tjukup. Kekurangan persediaan dana-dana jang bisa disalurkan kepada petani-petani padi memang merupakan gedjala jang sudah dimulai dari sebelum perang dunia kedua.

Usaha pertanian pada umumnja ketjil dan bagian jang dipasarkan djuga ketjil. Akibatnja kebanjakan petani memerlu-

kan kredit untuk membiajai proses produksi. Penggunaan tehnologi baru mengharuskan petani-petani untuk lebih banjak mengeluarkan uang tunai daripada sebelumnja. Ini berarti bahwa dengan perluasan penggunaan tehnologi baru, kebutuhan akan kredit akan meningkat setjara proporsionil dengan perluasan areal intensifikasi. Tanpa kredit petani-petani beas pada umumnja tak akan mampu untuk menggunakan tehnologi baru tersebut. Artinja, pengadaan kredit pada taraf desa merupakan sjarat mutlak untuk mentjapai sasaran produksi beras. Karenanja akan diusahakan supaja petani mendapat kredit jang diperlukan, baik dari lembaga-lembaga pemerintah maupun dari swasta dan koperasi-koperasi jang mampu.

Pemerintah menjediakan kredit setjara langsung melalui program Bimas dan Bimas Baru. Kredit ini akan diberikan pada petani-petani apabila mereka bersedia menggunakan sarana dan tjara bertjotjok tanam jang diandjurkan. Persediaan kredit ini didasarkan pada kebutuhan per hektar untuk memungkinkan petani menggunakan tehnologi baru. Untuk musim hudjan 1968 telah ditetapkan kredit per hektar sebesar Rp. 9.125,— untuk Bimas dan Rp. 15.550,— untuk Bimas Baru.

Kredit Bimas menurut rentjana disalurkan melalui BNI Unit II. Salah satu kelemahan dari penggunaan lembaga perkreditan tersebut ialah bahwa tempat kedudukan mereka tidak tjukup tersebar didaerah pedesaan, sehingga petani-petani harus menempuh djarak jang djauh untuk mendapatkan kredit.

Selain program Bimas ada djuga program Inmas. Pada jang terachir ini tidak disediakan kredit. Jang disediakan hanja sarana-sarana produksi seperti pupuk dan obat hama. Pangkal tolak dari Inmas adalah bahwa petani setelah dua-tiga kali turut serta dalam program Bimas, sudah kuat untuk membeli sarana produksi tanpa kredit. Tetapi dibeberapa daerah ternjata bahwa meskipun petani sudah pernah turut serta dengan Bimas, namun mereka masih tetap membutuhkan kredit.

Petani diluar Bimas pada umumnja dapat memperoleh kredit dari lembaga-lembaga perkreditan pemerintah, koperasi dan dari lembaga-lembaga perkreditan swasta. Disamping lembaga-lembaga tersebut petani djuga bisa mendapatkan kredit dari pedagang atau tengkulak beras, lembaga-lembaga perkreditan pemerintah dan koperasi pada umumnja dapat menawarkan kredit dengan bunga jang relatif lebih rendah dari lembaga-lembaga perkreditan swasta. Tetapi diwaktu-waktu jang lampau lembaga-lembaga ini terlalu terikat pada ketentuan-ketentuan jang kaku. Mereka menggunakan ukuran-ukuran jang terlalu „bank-technis", jang sangat sukar dipenuhi oleh para petani. Tambahan pula tempat kedudukan mereka hanja terbatas pada ibukota-ibukota kabupaten atau ketjamatan, sehingga petani harus menempuh djarak jang djauh untuk memadjukan permintaan kredit. Setjara organisatoris, lembaga-lembaga perkreditan pemerintah dalam dua tahun jang terachir ini menundjukkan perbaikan-perbaikan. Dalam masa depan akan diambil langkah-langkah penjempurnaan lebih landjut untuk meningkatkan kemampuan mereka menampung kebutuhan kredit jang meningkat. Dewasa ini telah dimulai untuk menggiatkan kembali bank-bank desa dan lumbung-lumbung desa.

Disamping itu akan diusahakan untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga perkreditan swasta didesa, termasuk koperasi-koperasi kredit. Tjara jang akan ditempuh ialah dengan mentjiptakan iklim jang baik untuk perkembangan lembaga-lembaga tersebut. Untuk menentukan setjara spesifik tjara tersebut diselenggarakan suatu survey. Tudjuan dari perluasan sektor kredit swasta ini bukan sadja untuk memungkinkan perluasan penjaluran kredit, tetapi djuga untuk menampung tabungan dan deposito jang akan meningkat karena peningkatan produktivitas disektor pertanian. Djadi tudjuan djangka pandjang ialah menjehatkan pasaran modal jang diharapkan dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang kedua nanti sudah dapat menjalurkan modal dari pertanian kesektor-sektor lain.

Projek-projek.

Usaha-usaha peningkatan produksi beras tersebut diatas dapat dikelompokkan menurut projek-projek tertentu. Projek-projek tersebut antara lain ialah:

1. Projek Bimbingan Massal.
2. Projek Proteksi Tanaman Padi.
3. Projek Pembangunan Lembaga Sang Hyang Sri.
4. Projek Gerakan Perbaikan Benih.
5. Projek Pembangunan Kebun-kebun Benih Sentral.
6. Projek Rehabilitasi Kebun-kebun Benih.
7. Projek Peningkatan Produksi Padi Gogo Rentjah.
8. Projek Peningkatan Padi Tanah Kering.
9. Projek Perluasan Padi Pasang Surut.
10. Projek Perlombaan/Demonstrasi Produksi Padi.
11. Projek Mekanisasi Pertanian.
12. Projek Perluasan Areal Pertanian.
13. Projek Penelitian Tanaman Pertanian.
14. Projek Peningkatan Mobilitas Penjuluhan.
15. Projek Penjuluhan/Latihan Pertanian.

Untuk masing-masing projek harus diadakan persiapan-persiapan jang didasarkan pada penelitian dan perhitungan jang tepat. Bila ternjata bahwa sesuatu projek kurang dapat dipertanggung djawabkan maka sudah barang tentu projek tersebut tidak akan dilaksanakan. Dalam hubungan ini penting sekali peranan survey dan perentjanaan jang kemudian mendjadi dasar daripada penjesuaian dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang dilakukan setiap tahun bagi penjusunan rentjana-rentjana tahunan.

B. PALAWIDJA DAN HORTIKULTURA

Produksi dan luas panenan hasil-hasil djagung, ketela rambat, ketela pohon dan katjang-katjangan menundjukkan perkembangan jang satu sama lain berbeda. Hal ini dapat dilihat dari Tabel VI-B-1.

TABEL VI - B - 1

PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN LUAS PANENAN PALAWIDJA RATA-RATA SETAHUN 1953 - 1967

(persen)

	Djagung	Ketela Pohon	Ketela Rambat	Katjang Kedele	Katjang Tanah
Produksi					
Djawa	3,0	3,2	1,1	0,1	1,1
Pulau-pulau lain	3,9	1,1	2,1	3,9	2,9
Indonesia	3,3	2,4	1,6	0,5	1,5
Luas Panenan					
Djawa	1,3	2,7	2,6	1,3	1,5
Pulau-pulau lain	4,9	5,1	4,2	6,1	3,4
Indonesia	1,9	3,1	3,2	1,8	1,8

Dari angka-angka trend tersebut dapat dilihat bahwa produksi djagung adalah jang terbaik perkembangannja, diikuti oleh ketela pohon, ketela rambat, katjang tanah, katjang kedele.

Djagung merupakan pengganti jang baik bagi beras djika dilihat semata-mata dari nilai gizi, sedangkan ketela pohon dan rambat hanja merupakan sumber kalori jang berarti. Katjang kedele dan katjang tanah merupakan sumber protein jang penting dalam pola konsumsi rakjat Indonesia.

Persoalan jang dihadapi palawidja adalah persoalan kurang nja perhatian. Dalam waktu-waktu jang lampau penelitian untuk memperoleh benih unggul kurang mendapat perhatian terketjuali djagung. Demikian djuga halnja dengan penjuluhan, pemasaran dan masalah perangsang produksi. Bahwasanja produksi palawidja menundjukkan suatu peningkatan jang tidak terlalu rendah adalah disebabkan antara lain karena ada pergeseran penggunaan tanah dari padi ke palawidja, terutama didaerah-daerah jang pengairannja rusak karena terbengkalai. Selain itu palawidja, terutama ketela rambat, tidak memerlukan tanah jang subur, sehingga tanah-tanah jang kurang subur dapat dipakai untuk tanaman palawidja.

Dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini diusahakan peningkatan produktivitas per hektar dari palawidja, terutama katjang tanah, katjang kedele dan djagung. Ketiga hasil ini mempunjai potensi jang besar untuk diekspor. Demikian djuga halnja dengan ketela pohon jang diekspor sebagai gaplek dan tapioka. Dibidang ini diusahakan rehabilitasi dan pembangunan pabrik-pabrik tapioka. Produksi sorghum jang achir-achir ini menundjukkan suatu kemadjuan akan diusahakan peningkatannja dengan lebih tjepat. Biaja anggaran untuk usaha-usaha peningkatan produksi palawidja dan hortikultura diperkirakan sebesar 3 miljar rupiah dalam lima tahun dan 400 djuta rupiah dalam tahun 1969/70.

D j a g u n g

Djagung adalah bahan makanan terpenting sesudah beras. Produksi djagung meningkat dengan 3,3 persen setahunnja. Hasil rata-rata per hektar dalam tahun enam puluhan bergelombang antara 9 dan 11 kwintal. Hasil rata-rata ini masih rendah djika dibandingkan dengan negara-negara lain dan perlu ditingkatkan.

Pada tahun 1963 sebagai salah satu hasil penelitian telah diadakan pertjobaan-pertjobaan benih unggul jang lazimnja disebut djagung djenis Metro dan Perta. Bibit ini dengan menggunakan dosis pupuk jang wadjar dan tjara bertjotjok tanam jang tepat dapat menghasilkan rata-rata 65 sampai 75 kwintal per ha. Ini berarti bahwa produksi djagung dapat ditingkatkan 5 sampai 6 kali produksi sekarang dengan menggunakan tehnologi baru pada luas areal panenan jang sama.

Sajang sekali potensi sebesar ini tidak digunakan sebaik-baiknja. Bersamaan dengan penjebaran benih-benih unggul ini pada waktu itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah jang melarang ekspor bahan makanan termasuk djagung. Pemerintah pada waktu itu mengandjurkan rakjat untuk memakan lebih banjak djagung dan mengurangi konsumsi beras. Tetapi karena selera rakjat tidak sesuai dengan andjuran Pemerintah, maka pasaran djagung terbatas hingga harga djagung dalam waktu jang

singkat menurun. Hal ini mengurangi perangsang petani untuk menanam djagung dengan benih-benih baru. Bersamaan dengan turunnja harga-harga djagung maka mutu penjuluhan menurun, kapasitas kebun-kebun benih menurun, keadaan prasarana memburuk dan iklim ekonomi mendekati suasana inflasi terbuka. Dengan demikian suatu potensi besar untuk meningkatkan produktivitas suatu bagian jang penting dari sektor pertanian tidak diberi kesempatan untuk berkembang.

Pada achir tahun 1965 dan tahun-tahun selandjutnja diizinkan kembali ekspor djagung. Akibatnja djagung sudah mulai diekspor dan djumlahnja tiap tahunnja meningkat serta memberikan sumbangan jang berarti pada penghasilan devisa.

Namun demikian hasil rata-rata per ha masih rendah karena penggunaan benih unggul ini belum tjukup tersebar luas. Tambahan pula sebagai akibat dari kegagalan usaha pertama maka kemurnian benih unggul jang ada pada petani dan kebun-kebun benih telah menurun. Disamping itu fasilitas-fasilitas pengolahan untuk menghasilkan kwalitas jang diinginkan tidak ada atau ketjil sekali. Sebagaimana diketahui panen djagung djatuhnja pada musim hudjan sedangkan djagung untuk ekspor harus mempunjai "moisture content" sebesar 12 persen. Dengan keadaan tjuatja matahari jang terbatas maka kelembaban tersebut sukar untuk ditjapai. Karenanja diperlukan fasilitas-fasilitas pengeringan jang tidak tergantung dari keadaan udara.

Dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahap pertama ini diusahakan peningkatan produksi djagung melalui intensifikasi dengan menjediakan benih unggul jang murni, pemupukan jang wadjar, pemberantasan penjakit jang effisien, tjara bertjotjok tanam jang modern dan penjuluhan jang intensif. Intensifikasi ini akan dilakukan didaerah-daerah penanam djagung utama jaitu di Djawa Timur, Djawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Lampung. Disamping itu akan diusahakan perluasan di Propinsi Djawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan D.I. Jogjakarta. Berdasarkan program intensifikasi dan perluasan maka diusahakan tertjapainja produksi tahunan seperti jang tertjantum pada Tabel VI-B-2.

TABEL VI-B-2
PRODUKSI DAN LUAS PANENAN DJAGUNG,
1969/70 — 1973/74

Tahun	Luas Panenan (djuta ha)	Produksi (djuta ton)	Persentase Pertambahan Produksi
1969/70	3,15	3,37	3,00
1970/71	3,35	3,51	4,25
1971/72	3,55	3,70	5,50
1972/73	3,70	3,94	6,50
1973/74	3,85	4,23	7,25

Sudah tentu tidak semua produksi akan dikonsumsi didalam negeri. Ditaksir bahwa konsumsi dalam negeri hanja akan meningkat dengan 3 persen setahunnja.

Djagung disamping dikonsumsi oleh manusia merupakan bahan makanan jang produktif sekali untuk unggas dan ternak sebagai sumber protein. Kalau potensi pemakaian jang tersebut terachir ini di Indonesia belum dapat diperkembangkan dalam waktu jang dekat, maka potensi jang serupa disalah satu negara tetangga (Djepang) pada saat ini adalah sangat besar. Djumlah kebutuhan diwaktu-waktu jang lampau setiap tahunnja kurang lebih sama dengan produksi Indonesia, jaitu 3 djuta ton, sedangkan potensi produksi Djepang hanja sebesar 3 persen dari djumlah kebutuhannja. Dengan demikian pasaran djagung diluar negeri menundjukkan potensi jang besar. Untuk memungkinkan pendaja-gunaan potensi 5 tersebut sistim pemasaran djagung akan diperbaiki baik dalam arti institusionil maupun fisik. Disamping produksi djagung djuga diusahakan peningkatan produksi sorghum.

Katjang-katjangan

Dari katjang-katjangan jang terpenting ialah katjang kedele dan katjang tanah. Kedua hasil pertanian ini merupakan poten-

si terbesar untuk meningkatkan konsumsi protein nabati per capita.

Produksi katjang kedele meningkat dengan 0,5 persen setahunnja selama masa 1953-1967 sedangkan areal panenan meningkat dengan 1,8 persen setahunnja. Ini berarti bahwa produksi per capita dan hasil rata-rata per ha menurun dengan pesat. Penurunannja ini tak lain karena kurangnja aktivitas penelitian mengenai benih unggul, kurangnja penjuluhan, dan karena anggapan sementara petani jang memandang katjang kedele tidak memerlukan persiapan pengolahan tanah, pembasmian hama dan pemberantasan tanaman liar (suatu "catch crop").

Demikian djuga halnja dengan katjang tanah maka produksi dan hasil rata-rata per ha menurun meskipun tidak setjepat seperti halnja pada katjang kedele.

Kedua hasil ini dikonsumsi didalam negeri dan djuga diekspor. Djadi peningkatan produksi akan memperbaiki nilai gizi pola konsumsi rakjat Indonesia dan djuga akan menghasilkan devisa.

Karena pentingnja katjang-katjangan sebagai sumber penghasil devisa dan sumber protein nabati maka produksi katjang-katjangan akan ditingkatkan dengan lebih tjepat. Peningkatan produksi ini akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Perkiraan perkembangan produksi berdasarkan perkembangan usaha-usaha tersebut dapat dilihat pada Tabel VI-B-3.

TABEL VI-B-3

PRODUKSI DAN LUAS PANENAN
KATJANG-KATJANGAN
1969/70 — 1973/74

Tahun	Luas Panenan (djuta ha)	Produksi (djuta ton)	Persentase Pertambahan
1969/70	1,27	0,95	2,60
1970/71	1,35	0,99	4,21

1971/72	1,49	1,08	10,90
1972/73	1,70	1,21	12,03
1973/74	2,02	1,40	15,70

Disamping usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi akan ditingkatkan djuga usaha-usaha penelitian. bukan sadja untuk mendapatkan benih-benih jang lebih unggul tetapi djuga untuk mendapatkan tjara-tjara tehnik pengolahan tanah, pemupukan, pemberantasan hama dan tanaman liar dan kemungkinan untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri. Jang terachir ini penting karena tanpa usaha tersebut maka konsumsi per capita diperkirakan tidak akan meningkat dengan lebih dari 1,2 persen setahunnja.

Sisa dari produksi jang tidak dikonsumsi dalam negeri akan diekspor. Diwaktu-waktu jang lampau ekspor katjang-katjangan menurun. Ekspor hasil katjang-katjangan jang tertinggi jang pernah ditjapai adalah sebagai berikut :

katjang kedele	:	6.866 ton dalam tahun 1953
katjang tanah	:	16.322 ton dalam tahun 1951
katjang idjo	:	817 ton dalam tahun 1962
minjak katjang	:	5.576 ton dalam tahun 1951

Ekspor katjang-katjangan pada tahun 1965 meliputi kedele 290 ton dan katjang tanah 6.030 ton.

Diharapkan bahwa dalam tahun-tahun jang akan datang ekspor katjang-katjangan dapat ditingkatkan kembali sehingga merupakan penghasil devisa jang berarti lagi.

Hortikultura (sajur-sajuran dan buah-buahan)

Sajur-sajuran dan buah-buahan merupakan unsur pangan jang penting. Mereka adalah sumber utama dari vitamin-vitamin dan mineral-mineral jang dibutuhkan untuk mempertahankan suatu taraf kesehatan jang lajak. Pengusahaan sajur-sajuran dan buah-buahan di Indonesia masih ada pada taraf jang rendah. Hasil rata-rata per ha lebih kurang 7 ton, suatu hasil jang rendah sekali djika dibandingkan dengan hasil rata-rata dinegeri-negeri lain sebesar 30-40 ton/ha.

Rendahnja hasil rata-rata ini disebabkan antara lain karena kurang tersedianja sarana produksi seperti bibit unggul, pupuk, pestisida, penjuluhan dan kredit untuk para petani. Penelitian dibidang ini tidak diperhatikan sebagaimana djuga halnja dengan penjediaan sarana-sarana fisik lainnja.

Produksi sajur-sajuran dan buah-buahan jang rendah itu tidak sukar ditingkatkan melalui usaha-usaha intensifikasi, penjediaan kredit dan bimbingan instansi-instansi jang bersangkutan. Dalam lima tahun jang akan datang produksi akan ditingkatkan melalui usaha-usaha tersebut.

Perkembangan produksi dan luas panen jang diusahakan dapat dilihat pada Tabel VI-B-4. Konsumsi dalam negeri akan meningkat dengan pesat dengan meningkatnja pendapatan per capita. Disamping itu ekspor hasil-hasil hortikultura djuga akan ditingkatkan.

TABEL VI-B-4

PRODUKSI DAN LUAS PANENAN SAJUR-SAJURAN DAN BUAH-BUAHAN
1969/70 — 1973/74

Tahun	Luas Panenan (djuta ha)	Produksi (djuta ton)	Persentase Tambahan
1969/70	1,185	8,30	2,50
1970/71	1,200	8,70	4,82
1971/72	1,220	9,30	6,90
1972/73	1,240	10,20	9,68
1973/74	1,260	11,20	9,80

Ubi-ubian

Dari golongan ini ketela rambat dan ketela pohon adalah jang terpenting. Didalam pola konsumsi rakjat Indonesia ketela pohon merupakan penjumbang kalori terbesar setelah beras. Akan tetapi nilai gizi dari ketela pohon adalah kurang djika dibandingkan dengan djagung dan beras. Dalam bentuk gaplek mutu gizinja lebih menurun lagi.

Produksi ketela tidak memerlukan tanah jang baik, modal jang banjak ataupun tenaga jang berat. Karenanja ketela pohon merupakan bahan makanan jang penting sebagai tjadangan pada saat-saat kekurangan beras. Produksi ketela pohon meningkat dengan 2,4 persen setahun selama masa 1953 — 1967. Luas areal panenan meningkat dengan 3,1 persen. Ini berarti bahwa hasil rata-rata per ha menurun, meskipun sudah didapatkan benih-benih unggul oleh lembaga-lembaga penelitian.

Banjak pohon ketela ditanam ditanah-tanah jang tidak subur dan djuga pada bukit-bukit sehingga mengakibatkan erosi. Hutan-hutan negara jang dibuka setjara illegaal untuk sebagian djuga dipakai untuk penanaman ketela. Hal ini adalah salah satu sebab dari tjepatnja perluasan areal panenan di Djawa jang meluas setiap tahunnja dengan 2,7 persen.

Produksi selama lima tahun jang akan datang diperkirakan ladjunja tetap 2,4 persen, tetapi akan diusahakan agar peningkatan ini disebabkan karena hasil rata-rata per ha jang meningkat.

Hal ini akan ditjapai dengan penjebaran benih-benih unggul jang dapat menghasilkan 25 ton per ha, sedangkan hasil rata-rata nasional pada tahun-tahun achir ini berkisar antara 8,5 dan 9 ton per ha. Selain itu lembaga penelitian telah mendapatkan djenis jang tjotjok untuk produksi tapioka. Akan diusahakan perluasan penggunaan djenis ini.

Ketela rambat adalah ubi lain jang banjak membantu konsumsi kalori. Berbeda dengan ketela pohon, ketela rambat terutama memiliki vitamin A dan C, karenanja disajangkan bahwa tidak lebih banjak dapat dikonsumsi oleh rata-rata orang Indonesia.

Produksi dalam 15 tahun terachir meningkat dengan 1,6 persen sedangkan areal panenan meningkat dengan 3,2 persen. Ini berarti bahwa produksi per ha menurun. Hal ini djuga membajangkan bahwa tanah jang dipakai untuk memproduksi ketela rambat adalah tanah jang kurang baik. Dengan pemupukan jang intensif produksi per ha dapat mentjapai 25 ton per ha.

910087-(5).

Angka ini tinggi djika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional jaitu sebesar 5 ton/ha.

Konsumsi per capita tidak akan banjak naik dalam lima tahun jang akan datang. Malah kemungkinan besar ialah bahwa konsumsi per capita akan menurun kalau pendapatan per capita akan meningkat dengan tjepat.

Sesuai dengan ketela pohon, dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini akan diusahakan peningkatan produksi sesuai dengan trend jaitu 1,6 persen dengan tjara memperbesar produksi per ha melalui pemupukan dan mengurangi luas areal panenan.

Djuga disini Pemerintah setjara langsung tidak akan turut mentjampuri perkembangan produksi tersebut, tetapi akan melaksanakan funksi penelitian, penjuluhan dan mentjiptakan suatu iklim ekonomi jang memungkinkan perkembangan produksi seperti tersebut diatas.

Perkiraan produksi ubi-ubian dan luas panenan selama lima tahun jang mendatang dapat dilihat pada Tabel VI-B-5.

TABEL VI-B-5
PRODUKSI DAN LUAS PANENAN UBI-UBIAN
— 1969/70 — 1973/74

Tahun	Luas Panenan (djuta ha)	Produksi (djuta ton)	Persentase Tambahan
1969/70	1,96	15,66	2,21
1970/71	2,00	16,00	2,17
1971/72	2,03	16,35	2,18
1972/73	2,06	16,71	2,20
1973/74	2,08	18,09	2,27

Sarana produksi untuk palawidja dan hortikultura diperhitungkan berdasarkan perkembangan-perkembangan tersebut diatas. Taksiran kasar dari kebutuhan pupuk adalah sebagai terlihat pada Tabel VI-B-6.

TABEL VI-B-6

PERKIRAAN KEPERLUAN PUPUK UNTUK PALAWIDJA DAN HORTIKULTURA
1969/70 — 1973/74
(dalam ton)

Tahun	N	P	K
1968/69	40.000	4.000	4.000
1969/70	44.000	5.000	5.000
1970/71	48.000	6.000	6.000
1971/72	53.000	7.000	7.000
1972/73	54.000	8.000	8.000
1973/74	57.000	9.000	8.000
	296.000	39.000	38.000

Kebutuhan obat-obat hama dan alat penjemprot dapat dilihat pada Tabel VI-B-7:

TABEL VI-B-7

PERKIRAAN KEPERLUAN OBAT HAMA DAN ALAT PENJEMPROT UNTUK PALAWIDJA DAN HORTIKULTURA
1969/70 — 1973/74

Tahun	Obat Hama (djuta $)	Alat Penjemprot (ribuan)
1968/69	2,59	—
1969/70	2,59	30,00
1970/71	2,59	45,00
1971/72	2,75	4,50
1972/73	2,85	3,00
1973/74	2,95	3,00

Projek-projek.

Usaha-usaha peningkatan produksi palawidja dan hortikultura dapat dikelompokkan dalam projek-projek antara lain seperti dibawah ini :

1. Projek peningkatan produksi djagung,
2. Projek peningkatan produksi sorghum,
3. Projek peningkatan produksi ubi-ubian,
4. Projek peningkatan produksi katjang-katjangan,
5. Projek peningkatan produksi hortikultura,
6. Projek penelitian hortikultura,
7. Projek peningkatan effisiensi pemasaran palawidja dan hortikultura.

Untuk masing-masing projek harus diadakan persiapan-persiapan jang didasarkan pada penelitian dan perhitungan jang tepat. Bilamana ternjata bahwa sesuatu projek kurang dapat dipertanggung-djawabkan maka sudah barang tentu projek tersebut tidak akan dilaksanakan.

Dalam perhitungan ini penting sekali peranan survey dan penelitian jang kemudian mendjadi dasar daripada penjesuaian-penjesuaian dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang dilakukan setiap tahun bagi penjusunan rentjana-rentjana tahunan.

C. PERKEBUNAN

Perkebunan merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Sumbangan utama ialah menghasilkan devisa melalui ekspor hasil-hasilnja. Dalam tahun-tahun terachir lebih kurang 70 persen dari nilai seluruh ekspor Indonesia berasal dari sektor perkebunan.

Sektor perkebunan dapat dibagi dalam dua golongan, jaitu golongan perkebunan besar dan perkebunan rakjat. Hasil-hasil utama serta produksi rata-rata lima tahun dari kedua golongan tersebut dapat dilihat pada Tabel VI-C-1, sedangkan pada Tabel VI-C-2, dapat dilihat perkembangan hasil rata-rata per hektar.

PRODUKSI DJAGUNG, KATJANG²AN, SAJURAN & BUAH-BUAHAN, UBI-UBIAN (DJUTA TON)

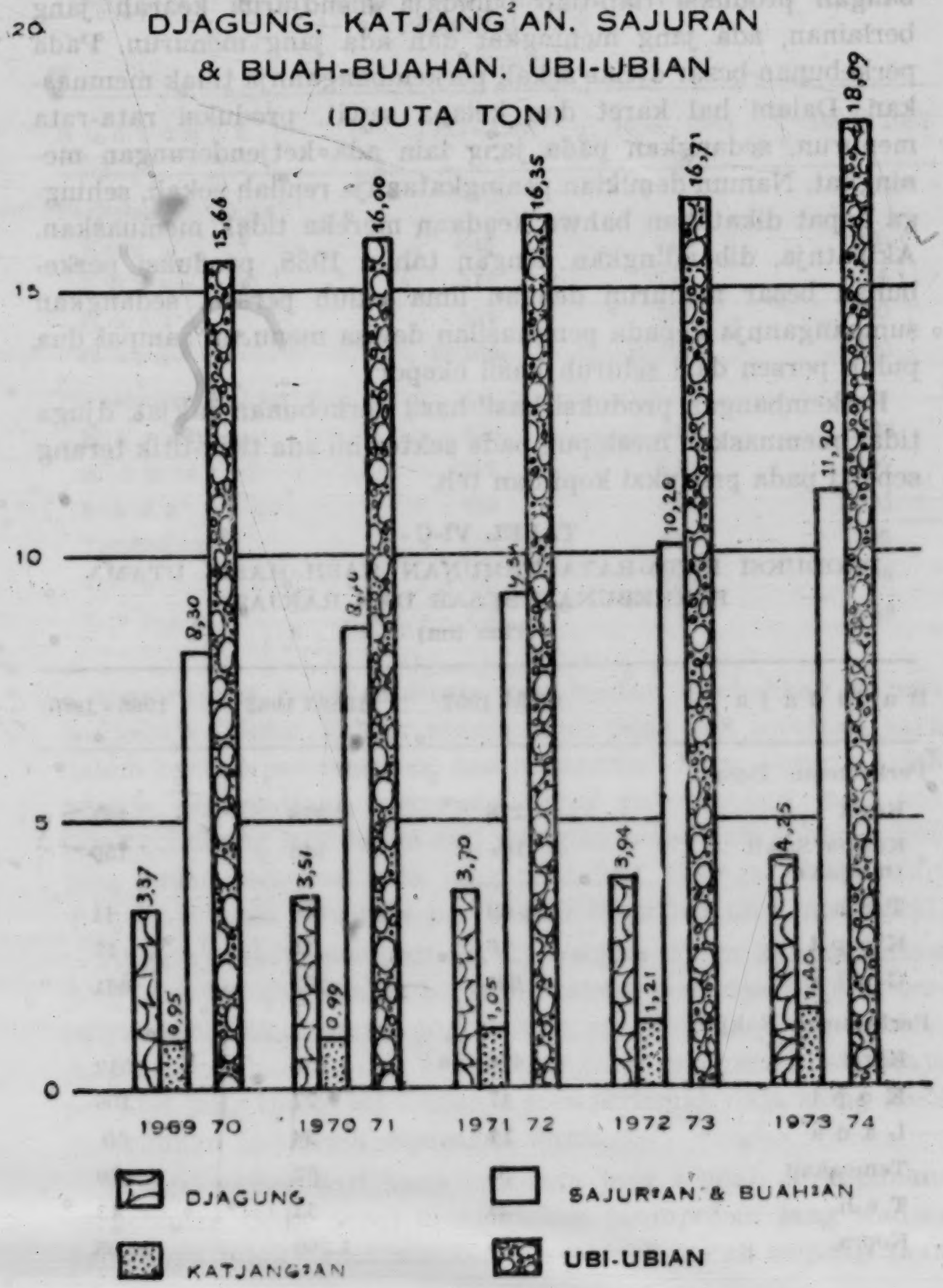

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel-tabel tersebut, perkembangan produksi tiap-tiap budidaja mendjurus kearah jang berlainan, ada jang meningkat dan ada jang menurun. Pada perkebunan besar djelas sekali perkembangannja tidak memuaskan. Dalam hal karet dan kelapa sawit, produksi rata-rata menurun, sedangkan pada jang lain ada ketjenderungan meningkat. Namun demikian peningkatannja rendah sekali, sehingga dapat dikatakan bahwa keadaan mereka tidak memuaskan. Akibatnja, dibandingkan dengan tahun 1938, produksi perkebunan besar menurun dengan lima puluh persen, sedangkan sumbangannja kepada penghasilan devisa menurun sampai dua puluh persen dari seluruh hasil ekspor.

Perkembangan produksi hasil-hasil perkebunan rakjat, djuga tidak memuaskan meskipun pada sektor ini ada titik-titik terang seperti pada produksi kopi dan teh.

TABEL VI-C-1

PRODUKSI RATA-RATA TAHUNAN HASIL-HASIL UTAMA PERKEBUNAN BESAR DAN RAKJAT,

(ribu ton)

Budidaja	1953 - 1957	1958 - 1962	1963 - 1967
Perkebunan Besar			
Karet	278	228	221
Kelapa Sawit (minjak)	164	146	159
Teh	39	46	41
Kopi	16	16	17
Gula	621	593	661
Perkebunan Rakjat			
Karet	476	457	512
Kopi	47	77	106
Lada	14	24	50
Tembakau	55	62	79
Teh	24	33	43
Kopra	1.056	1.266	1.298

TABEL VI-C - 2

PRODUKSI RATA-RATA PER HEKTAR HASIL-HASIL UTAMA PERKEBUNAN,

(kilogram)

Budidaja	1953 - 1957	1958 - 1962	1963 - 1967
Perkebunan Besar			
Karet	645	548	581
Teh	578	744	664
Kopi	331	394	480
Gula	12.100	10.100	8.000
Perkebunan Rakjat			
Karet	378	315	338
Kopi	317	330	409
Lada	689	690	1.291
Tembakau	404	377	109
Teh	383	530	698
Kopra	716	770	718

Menurunnja hasil rata-rata per hektar disebabkan karena banjaknja faktor. Faktor utama ialah tidak ada investasi baru dalam bentuk peremadjaan dan penanaman baru. Dengan tidak adanja peremadjaan komposisi umur pohon-pohon jang ada tidak seimbang lagi dalam arti sebagian besar dari pohon-pohon jang sudah melewati usia jang produktif. Sebagai akibat dari rendahnja hasil rata-rata per hektar biaja per unit meningkat.

Tingginja biaja per unit ini disebabkan djuga karena inflasi jang berketjamuk selama bertahun-tahun, pemadjakan jang terlalu memberatkan sektor perkebunan, struktur biaja perusahaan jang tidak seimbang dan adanja pungutan-pungutan liar. Biaja per unit jang tinggi ini tentunja memperlemah daja saing hasil perkebunan Indonesia dipasaran dunia.

Sebagai akibat dari hasil rata-rata jang rendah perkebunan-perkebunan tidak dapat mengadakan pemupukan jang wadjar dan djuga tidak dapat membiajai research untuk mendapatkan

bibit-bibit unggul dan tehnologi jang lebih produktif. Tehnologi jang digunakan sekarang lebih rendah dari apa jang digunakan negara-negara lain.

Pemasaran jang tidak effisien djuga mempunjai pengaruh jang negatif terhadap produksi. Pindahnja pasaran tembakau dan teh dari pasaran tradisionil merugikan perkebunan-perkebunan.

Pada pasaran hasil-hasil perkebunan rakjat pemasarannja sedemikian rupa sehingga petani hanja menerima sebagian ketjil dari harga-harga ekspor. Dalam keadaan jang demikian perangsang bagi petani untuk meningkatkan produktivitas ketjil sekali.

Pabrik-pabrik pengolahan djuga dalam keadaan jang menjedihkan. Ini mengakibatkan rendemen hasil mendjadi lebih rendah daripada normal jang tentunja meningkatkan biaja per-unit.

Pada perkebunan rakjat terasa kurang sekali kegiatan penjuluhan sehingga dari petani-petani tidak mengetahui mengenai perkembangan-perkembangan tehnologi baru, benih-benih unggul, sarana baru jang lebih produktif dan perkembangan-perkembangan harga. Jang terachir ini penting sekali untuk meningkatkan daja tawar mereka dalam menghadapi perantara dalam proses djual-beli.

Dalam menghadapi permasalahan diatas akan diusahakan peremadjaan setjara intensif, perluasan dengan bibit-bibit unggul dan rehabilitasi atau pembaharuan pabrik-pabrik pengolahan. Usaha ini pada perkebunan besar pertama-tama akan dikonsentrasikan pada perkebunan-perkebunan jang paling effisien untuk memungkinkan mendapat hasil jang tjepat. Kemudian setjara berangsur-angsur terhadap perkebunan jang kurang effisien akan dilaksanakan usaha-usaha tersebut djika mereka dapat menundjukkan suatu daja hidup ditahun-tahun jang akan datang. Pada perkebunan-perkebunan jang keadaannja sedemikian rupa sehingga tidak membenarkan investasi lebih landjut akan diusahakan untuk dikonversi kepada penghasilan budidaja lain atau usaha pertanian lain atau ditutup sama sekali.

Pada perkebunan rakjat selain usaha-usaha tersebut diatas akan ditingkatkan aktivitas penjuluhan. Djuga kebun-kebun bibit akan dibuka untuk menundjang usaha-usaha penjuluhan. Selain itu akan diandjurkan kepada pengusaha Swasta pembukaan pabrik-pabrik pengolahan dengan tjara memberikan fasilitas-fasilitas jang diperlukan dan mentjiptakan iklim jang baik.

Langkah lain ialah penjempurnaan organisasi dan tjara kerdja sektor perkebunan. Ini sudah dimulai pada tahun 1968 dengan pembubaran-pembubaran B.P.U. dan pembentukan P.N.P. jang tidak mentjakup satu budidaja, tetapi bermatjam-matjam. Jang terachir ini memberikan flexibilitas kepada management dalam usaha meningkatkan produktivitas unit-unit tersebut.

Sebagaimana diketahui persoalan-persoalan tersebut bersumber pada kekurangan dana-dana kredit dan lembaga-lembaga perkreditan jang bisa membantu perusahaan-perusahaan perkebunan jang membutuhkannja. Kebutuhan kredit ini bukan sadja untuk dana-dana djangka pendek tetapi djuga untuk djangka menengah dan pandjang. Dalam lima tahun jang akan datang, dana-dana tersebut akan diperbanjak melalui pengumpulan deposito-deposito, anggaran pembangunan dan bantuan luar negeri.

Selandjutnja dalam tahun-tahun jang akan datang, apabila pendapatan negara dari sumber-sumber jang lain berhasil ditingkatkan, maka akan dipertimbangkan kemungkinan pengurangan beban padjak sektor ekspor. Sementara itu penggunaan penerimaan negara jang diperoleh dari ekspor akan diusahakan pengarahannja bagi perbaikan prasarana-prasarana jang menundjang bidang ekspor. Djuga akan diambil tindakan-tindakan jang tegas terhadap berbagai matjam pungutan-pungutan liar.

Biaja anggaran pembangunan untuk program peningkatan produksi hasil-hasil perkebunan diperkirakan sebesar 23 miljar rupiah dalam lima tahun dan 4,9 miljar dalam tahun 1969/70. Dibawah ini akan dibahas persoalan dan arah penjelesaian jang spesifik bagi hasil-hasil perkebunan besar dan rakjat.

K a r e t.

Karet merupakan penghasil devisa utama dari hasil-hasil pertanian jang diekspor. Pada tahun-tahun terachir lebih dari 50 persen dari nilai ekspor hasil pertanian berasal dari karet. Penghasilan devisa jang berasal dari ekspor karet dalam tahun-tahun enam puluhan menundjukkan suatu trend jang menurun, meskipun jang diekspor meningkat. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel VI-C-3.

TABEL VI - C - 3.

EKSPOR KARET, 1960 — 1967

Tahun	Berasal dari Perkebunan Besar (ribu ton)	(ribu $)	Berasal dari Perkebunan Rakjat (ribu ton)	(ribu $)	Djumlah (ribu ton)	(ribu $)
1960	189,9	134,019	387,8	234,196	577,7	368,215
1961	237,0	122,470	443,8	189,014	680,8	311,484
1962	209,7	101,592	482,3	196,903	692,0	298,495
1963	203,3	94,073	379,2	150,866	582,5	244,939
1964	240,8	97,620	418,3	137,196	659,1	235,816
1965	208,2	87,598	486,5	135,432	694,7	223,030
1966	238,0	90,763	441,4	132,386	679,4	223,149
1967	180,0	70,000	440,0	140,200	620,0	210,200

Menurunnja nilai ekspor terutama disebabkan karena menurunnja harga karet jang terus-menerus dipasaran dunia. Diduga bahwa keadaan pasaran ini dalam djangka waktu 10-15 tahun jang akan datang tidak akan berubah malah akan memburuk. Karenanja dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahap pertama akan diusahakan peningkatan produktivitas per hektar untuk menekan biaja per unit. Hal ini akan memberikan daja hidup dan daja tawar kepada perkebunan-perkebunan.

Produksi karet perkebunan besar rata-rata selama masa 1963-1967 menundjukkan kemunduran djika dibandingkan dengan produksi rata-rata tahun-tahun sebelumnja. Hal ini dapat dilihat dari daftar berikut :

	Produksi (ribu ton)	Produksi rata-rata/ha (kg)
1953-1957	277,5	644,8
1963-1967	120,6	580,8

Hasil rata-rata per hektar menundjukkan angka jang rendah djika dibandingkan dengan angka dari Malaysia, dimana keadaan alamnja hampir sama dengan di Indonesia. Faktor-faktor jang mengakibatkan kemunduran produksi dan rendahnja hasil rata-rata adalah banjak. Salah satu faktor utama ialah pembagian umur dari pohon-pohon jang ada diperkebunan-perkebunan tidak memuaskan. Telah dilaporkan bahwa 65 persen dari pohon-pohon jang sudah dewasa sudah melampaui umur jang memberikan hasil jang ekonomis. Ini tak lain disebabkan karena terlambatnja usaha-usaha peremadjaan pada perkebunan-perkebunan besar. Selama tahun-tahun antara 1954-1957 peremadjaan pada perkebunan negara hanja berdjalan dengan 3,4 persen setahunnja, sedangkan antara 1958-1962 menurun sampai 2,5 persen setahunnja. Baru pada tahun 1963 peremadjaan serta setjara intensif dilaksanakan. Sebagai akibat daripada intensifikasi peremadjaan jang terlambat ini 28 persen dari pohon-pohon jang ada belum bisa menghasilkan.

Dalam keadaan jang demikian harga-harga karet menurun dibarengi dengan meningkatnja biaja produksi sebagai akibat dari menaiknja harga-harga sarana. Dalam keadaan demikian perkebunan-perkebunan karet tidak bisa menghasilkan suatu surplus, jang membatasi usaha-usaha peremadjaan pada tahun-tahun terachir ini. Akibat lain ialah tidak tersedianja dana dari hasil usaha untuk melaksanakan program pemupukan jang wadjar. Sumber-sumber pembiajaan lain jang berdjangka sedang tidak ada sedangkan persjaratan kredit djangka pendek terlalu berat. Djadi persoalan jang dihadapi perkebunan-perkebunan karet tjukup berat. Mereka tidak bisa menghasilkan surplus jang tjukup besar untuk membiajai peremadjaan dan pemupukan. Sebaliknja peremadjaan merupakan keharusan

untuk meningkatkan hasil rata-rata per hektar jang akan memungkinkan perkebunan tersebut mentjapai suatu surplus keuangan.

Dalam menghadapi permasalahan diatas akan disediakan dana-dana djangka menengah dengan persjaratan jang lajak. Karena terbatasnja dana-dana tersebut pertama-tama akan diberikan prioritas pada perkebunan-perkebunan jang paling effisien untuk mendjamin kembalinja dana tersebut dalam waktu jang ditentukan semula. Kebidjaksanaan ini akan dilakukan baik pada perkebunan negara maupun swasta nasional ataupun perkebunan-perkebunan karet rakjat. Dengan tersedianja dana-dana tersebut diharapkan bahwa proses peremadjaan dan pemupukan dapat dilakukan dengan lebih intensif.

Rentjana peremadjaan, perluasan dan konversi perkebunan-perkebunan karet negara dapat dilihat pada tabel VI-C-4, dibawah ini. Biaja jang diperlukan dapat dilihat pada kolom 5 termasuk pada djumlah biaja tersebut, biaja pemupukan dan pemberantasan hama. Pengaruh peremadjaan, perluasan dan konversi ini terhadap produksi akan dirasakan 7 tahun kemudian.

TABEL VI - C - 4.

RENTJANA PEREMADJAAN, KONVERSI DAN PERLUASAN KARET PERKEBUNAN NEGARA, 1969/70 — 1973/74

Tahun	Peremadjaan (ha)	Konversi (ha)	Perluasan (ha)	Biaja (djuta rupiah)
1969/70	10.000	1.420	2.460	1.240
1970/71	8.700	1.480	2.220	1.360
1971/72	8.600	1.560	1.800	2.040
1972/73	9.600	1.320	630	2.490
1973/74	9.000	1.960	640	2.720

Selain usaha-usaha tersebut diatas pemupukan dan pemberantasan hama djuga akan diintensifkan. Biaja untuk pemupukan-pemupukan seluruh perkebunan karet negara ditaksir lebih kurang 2 djuta dollar setahunnja.

Perkiraan mengenai perkembangan luas areal produktif, produksi dan produksi rata-rata per hektar karet perkebunan negara dapat dilihat pada tabel VI-C-5 dibawah ini.

TABEL VI - C - 5

LUAS AREAL PRODUKTIF, PRODUKSI DAN PRODUKSI RATA² PER HA. PRODUKSI KARET PERKEBUNAN NEGARA, 1969/70 — 1973/74

Tahun	Luas Areal Produktif	Produksi (t o n)	Produksi (Persentase Pertambahan)	Produksi rata² per ha. (kg.)
1969/70	153.200	104.000	0,97	681
1970/71	154.000	109.000	4,81	709
1971/72	156.600	114.000	4,59	728
1972/73	160.400	121.000	6,14	754
1973/74	166.600	132.000	9,09	791

Dari angka-angka pada tabel tersebut djelaslah bahwa luas areal produktif hanja meningkat dengan 8 persen, sedangkan produksi meningkat dengan 27 persen. Perbedaan ini mempengaruhi produksi rata-rata jang meningkat dengan lebih dari 16 persen. Peningkatan terachir ini disebabkan antara lain karena pemupukan dan penggunaan benih-benih jang lebih produktif. Djelas djuga dari perluasan areal produktif betapa lambat djalannja peremadjaan diwaktu-waktu jang lampau.

Dibidang pengolahan perkebunan-perkebunan negara merentjanakan pembangunan "crumb rubber factories" jang akan disebarkan didaerah produksi utama, jaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Djawa Barat dan Djawa Tengah.

Keadaan perkebunan karet swasta nasional dan asing jang meliputi areal seluas 315.000 hektar djuga tidak memuaskan. Lebih dari 60 persen dari pohon-pohon jang ada sudah berusia lebih dari 25 tahun sedangkan areal jang belum menghasilkan meliputi 20 persen. Dalam keadaan jang demikian produksi akan meningkat hanja dengan "slaughter tapping". Penggunaan pupuk disektor ini tentunja akan meningkatkan produksi, tetapi karena areal jang menghasilkan ketjil sekali, peningkatan produksi akan tidak berarti.

Perkebunan karet rakjat meliputi lebih kurang 1,5 djuta hektar dengan produksi lebih dari 500.000 ton setahunnja. Hasil ekspor dari sektor ini menjumbangkan 30 persen dari pada penghasilan devisa negara. Djelaslah bahwa sektor ini merupa-

kan sektor jang penting sekali dalam struktur ekonomi Indonesia.

Produksi rata-rata per hektar ditaksir 300 kg, suatu tingkat jang rendah sekali. Rendahnja produksi rata-rata disebabkan sebagaimana halnja dengan perkebunan besar, karena komposisi umur pohon-pohon jang ada tidak seimbang. Ditaksir kurang lebih 70 persen dari areal perkebunan rakjat ditanami oleh pohon-pohon jang umurnja lebih dari 35 tahun. Karenanja dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahap pertama ini akan diusahakan peremadjaan jang intensif. Berhasil tidaknja peremadjaan tergantung dari penjuluhan jang effektif, besarnja keuntungan jang dapat diharapkan dari penanaman pohon karet dan tersedianja sarana-sarana baru jang lebih produktif seperti benih-benih unggul dan pupuk.

Sesuai dengan pentingnja sektor ini akan diusahakan penjuluhan setjara intensif jang akan meliputi bidang tata-tanam dan pemasaran. Effisiensi pemasaran akan ditingkatkan untuk mendjamin bagian jang lajak dari harga ekspor karet rakjat untuk petani produsen. Sebelum menggariskan kebidjaksanaan dibidang ini akan diadakan suatu survey jang mendalam untuk mengetahui persoalan-persoalannja.

Dengan berhasilnja usaha-usaha tersebut dapat diharapkan bahwa peremadjaan dengan benih unggul setjara berangsur-angsur dapat dilaksanakan. Untuk memungkinkan penjediaan bibit/bidji unggul untuk peremadjaan tersebut akan dibuka kebun-kebun bibit. Kebun-kebun bibit ini memerlukan pupuk, alat-alat pembibitan, obat hama dan alat-alat transpor.

Selandjutnja akan diusahakan perbaikan mutu karet perkebunan rakjat melalui pembangunan pabrik-pabrik pengolahan sesuai dengan permintaan pasaran dunia. Pada saat sekarang sheet jang dihasilkan perkebunan rakjat adalah sebagai berikut: 30 persen sheet IV, 50 persen sheet V dan 20 persen sheet VI. Target perbaikan mutu adalah sedemikian rupa sehingga pada tahun 1973, komposisi produksi karet sheet rakjat terdiri dari 30 persen sheet II, 50 persen sheet III, dan 20 persen sheet IV.

Akan diusahakan pula perbaikan pemasaran lokal, chususnja dalam hal perkreditan. Dibeberapa daerah di Sumatera telah terdjadi pergeseran-pergeseran dari semula daerah produksi sheet mendjadi daerah remilling, disebabkan lebih banjak tersedianja fasilitas pemasaran untuk hasil-hasil remilling dan slabs daripada untuk sheet.

Didaerah-daerah dimana perkebunan rakjat berada dalam terdjadi pergeseran-pergeseran dari semula daerah produksi akan direntjanakan pembangunan daerah setjara integrasi. Untuk daerah sematjam ini akan didirikan pabrik-pabrik pengolahan (Block Rubber-Grana Process), diadakan peremadjaan seluas 500 hektar, perbaikan kultur tehnis seluas 1.000 hektar, penjuluhan-penjuluhan dan latihan-latihan pemupukan, penjediaan pupuk, alat-alat penjemprot, dan obat-obat hama. Pada tahun 1969 akan diusahakan tiga daerah sebagai pilot project jaitu di Muara Bunga — Djambi, Surulangan Rawas — Sumatera Selatan, Tandjung Baru Lahat — Sumatera Selatan.

Peremadjaan akan mempengaruhi produksi setelah 7 tahun sedangkan penjuluhan dan perbaikan pemasaran djuga akan memakan waktu jang lama sebelum terasa pada taraf produksi, maka diharapkan bahwa produksi karet perkebunan rakjat tidak akan meningkat malahan kemungkinan besar akan menurun, dan djuga bahwa produksi tahunan karet rakjat berkisar sekitar kurang lebih 500.000 ton.

Berdasarkan keadaan perkebunan-perkebunan karet tersebut diatas ditaksir bahwa produksi karet akan berkembang sebagaimana tertjantum pada Tabel VI-C-5 untuk perkebunan negara, sedangkan untuk perkebunan lain kemungkinan untuk meningkatkan produksi djuga ada antara lain melalui "slaughter tapping".

Kelapa sawit.

Setelah karet, kelapa sawit adalah budidaja terpenting dari sektor perkebunan besar djika dilihat dari sudut sumbangannja kepada penghasilan devisa negara. Pada tahun-tahun terachir ekspor minjak dan inti sawit mentjapai nilai antara 30 dan 35 djuta dollar US.

Kelapa sawit dihasilkan baik oleh perkebunan negara maupun swasta jang meliputi areal seluas 109.000 ha. Dibandingkan dengan areal tahun 1938 ini merupakan peningkatan sebesar 30.000 ha. Meskipun areal meningkat produksi menurun dari 227.000 ton pada tahun 1938 mendjadi 160.000 ton minjak sawit pada tahun 1966. Perkembangan produksi rata-rata lima tahunan selama masa 1953 — 1967 dapat dilihat pada tabel VI-C-6.

Tabel VI-C-6

Produksi minjak sawit tahunan rata-rata, 1953 — 1967

(ton)

1953-1957	164.010
1958-1962	142.704
1963-1967	159.225

Kemunduran produksi disebabkan terutama karena menurunnja hasil rata-rata per ha dari 3,1 ton minjak sawit pada tahun 1938 mendjadi 2 ton per ha pada tahun 1966. Hasil rata-rata ini rendah djika dibandingkan dengan hasil rata-rata per ha dinegara-negara lain, dimana bisa tertjapai 5 ton per ha. Rendahnja dan menurunnja hasil rata-rata disebabkan banjak faktor terutama karena komposisi umur tanaman jang tidak seimbang dan kurangnja pemupukan. Komposisi umur kelapa sawit adalah sedemikian rupa sehingga 17 persen dari areal jang ada ditanami oleh pohon-pohon jang berumur 5 tahun sedangkan 25 persen oleh pohon-pohon diatas 20 tahun.

Dibandingkan dengan keadaan tahun 1963 komposisi sekarang sudah djauh lebih baik. Pada tahun 1963, 18 persen dari luas areal ditanami oleh pohon-pohon dibawah umur 5 tahun, sedangkan 34 persen oleh pohon-pohon diatas 20 tahun. Djadi selama 5 tahun jang lalu usaha peremadjaan kelapa sawit lebih berhasil dari usaha-usaha peremadjaan karet.

Karena kekurangan modal kerdja pemupukan tidak bisa dilaksanakan dengan wadjar. Dalam tahun-tahun jang lampau rata-rata hanja 70 persen jang mendapatkan pemupukan se-

tjara teratur. Persoalan pemupukan bukan sadja terletak dibidang kwantita tetapi djuga dibidang djenis jang tepat. Untuk ini diperlukan penelitian jang mendalam guna menentukan djenis-djenis pupuk jang tepat. Ditaksir bahwa dengan pemupukan jang tjukup dengan djenis pupuk jang tepat hasil rata-rata per ha dapat meningkat 40 persen.

Untuk lima tahun jang akan datang akan dilandjutkan peremadjaan dan perluasan pada kebun-kebun keiapa sawit perkebunan negara seluas areal sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

TABEL VI-C-7
LUAS PEREMADJAAN, PERLUASAN DAN KONVERSI KELAPA SAWIT PERKEBUNAN NEGARA, 1969/70 — 1973/74

Tahun	Luas (ha)	Biaja (djuta Rp.)
1969/70	10.390	884
1970/71	6.800	835
1971/72	4.520	823
1972/73	2.720	773
1973/74	1.550	482

Peremadjaan, perluasan dan konversi akan dilaksanakan dengan menggunakan bibit-bibit unggul X5 jang dapat menghasilkan rata-rata 4 ton minjak per ha, sedangkan bibit-bibit lain jang hingga sekarang dipakai maksimal hanja dapat menghasilkan 2,5 ton minjak.

Selain itu usaha-usaha pemupukan pada tanaman-tanaman jang ada akan di-intensifkan. Dengan adanja intensifikasi pemupukan ini diharapkan kenaikan produksi rata-rata setinggi 500 kg minjak sawit. Karena effeknja baru terasa 2 tahun setelah pemupukan maka baru pada tahun 1970 dapat diharapkan peningkatan produksi sebesar lebih kurang 40.000 ton.

Sebagai hasil dari intensifikasi pemupukan dari peremadjaan diwaktu-waktu jang lampau ditaksir produksi minjak sawit akan berkembang sebagaimana tertjantum pada Tabel VI-C-8.

TABEL VI - C - 8.

PRODUKSI MINJAK SAWIT PERKEBUNAN NEGARA, 1969/70 — 1973/74

Tahun	Luas Areal Produktif (ha)	Produksi (ton)	Persentase pertambahan Produksi
1969/70	58.126	122.000	11,93
1970/71	59.474	148.686	21,86
1971/72	59.908	167.743	12,81
1972/73	66.417	185.968	10,86
1973/74	72.913	204.155	9,78

Ditindjau dari segi kapasitas pabrik pengolahan areal jang ada masih belum berimbang. Untuk dapat memanfaatkan kapasitas tersebut maka masih ada kemungkinan penambahan areal sebanjak 13.600 ha. Bila diadakan beberapa penambahan-penambahan ketjil pada instalasi pabrik-pabrik jang ada tanpa merobah atau memperluas bangunan pabrik maka kapasitas akan bisa dipertinggi lagi dengan 67 persen. Untuk ini diperlukan perluasan areal sekitar 60.000 ha.

Perkebunan kelapa sawit swasta tidak luas (36.000 ha). Berdasarkan perkembangan mereka jang sehat produksi minjak dan inti sawit untuk seluruh perkebunan kelapa sawit akan berkembang sebagai berikut:

TABEL VI - C - 9.

PRODUKSI MINJAK SAWIT DAN INTI SAWIT, (1969/70 — 1973/74)

Tahun	Minjak Sawit (ton)	Inti Sawit (ton)	Persentase Pertambahan
1969/70	172.000	41.000	8,18
1970/71	199.000	50.000	15,70
1971/72	220.000	55.000	10,55
1972/73	246.000	61.000	11,82
1973/74	275.000	68.000	11,79

Kelapa sawit belum dihasilkan oleh perkebunan rakjat. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian rakjat akan diusahakan peturut-sertaan petani-petani ketjil dalam bidang ini. Pada taraf sekarang penelitian sedang dilaksanakan untuk mendapatkan tjara terbaik dalam usaha menarik petani-petani rakjat dalam usaha menanam kelapa sawit. Usaha-usaha pertama akan ditudjukan untuk mengkonversikan perkebunan karet rakjat mendjadi perkebunan kelapa sawit rakjat. Lokasi dan usaha-usaha ini harus dekat perkebunan-perkebunan besar jang memiliki pabrik-pabrik pengolahan.

Berbarengan dengan usaha-usaha perluasan tanaman kelapa sawit akan diusahakan peningkatan konsumsi dalam negeri dari minjak sawit untuk produksi minjak goreng dan sabun. Diharapkan bahwa kelapa sawit setjara berangsur-angsur akan menggantikan kopra untuk keperluan-keperluan tersebut diatas. Setjara macro akan menguntungkan industri kopra, karena jang terachir ini lebih menguntungkan djika diekspor daripada dikonsumsi dalam negeri. Untuk menggariskan kebidjaksanaan ini setjara terperintji pertama-tama akan diadakan survey.

T e h.

Indonesia menghasilkan dua djenis teh jaitu teh hitam dan teh hidjau. Jang pertama dihasilkan terutama oleh perkebunan-perkebunan besar dengan tudjuan untuk diekspor, sedangkan jang kedua oleh perkebunan-perkebunan rakjat terutama untuk konsumsi dalam negeri.

Sebelum perang dunia kedua Indonesia menduduki tempat ketiga sebagai penghasil teh terbesar didunia. Pada waktu itu produksi teh merupakan produksi hasil perkebunan terbesar sesudah karet. Sebagai akibat dari kerusakan-kerusakan jang diderita oleh perkebunan-perkebunan teh selama perang dunia kedua, produksi dan ekspor teh merosot dengan hebat. Hampir 55 persen dari luas perkebunan-perkebunan teh telah hantjur selama perang dunia kedua karena digunakan untuk memproduksi bahan makanan.

Rehabilitasi jang dilaksanakan pada tahun lima puluhan telah berhasil meningkatkan produksi dan ekspor teh masing-masing sampai pada taraf 60 persen dan 30 persen dari volume sebelum perang dunia kedua. Tetapi dengan adanja pengambil-alihan perkebunan-perkebunan teh pada achir tahun-tahun lima puluhan produksi menurun lagi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VI - C - 10.

PRODUKSI RATA-RATA TAHUNAN TEH PERKEBUNAN BESAR DAN PERKEBUNAN RAKJAT, 1953 - 1967

(ribu ton)

	Perkebunan Besar	Perkebunan Rajat
1953 — 1957	39	24
1958 — 1962	46	33
1963 — 1967	41	43

Berbarengan dengan menurunnja produksi teh perkebunan besar, mutu teh jang dihasilkan djuga menurun. Hal ini tak lain disebabkan karena digunakan tjara jang kasar (rough plucking) jang menghasilkan mutu teh jang rendah. Mutu jang sudah rendah sering mendjadi lebih rendah lagi karena sebagian besar dari pabrik-pabrik teh jang ada sudah tua dan sering sekali teh tertahan terlalu lama digudang-gudang atau dikapal-kapal sebagai akibat dari tidak teraturnja fasilitas perkapalan dan pengangkutan.

Sebagaimana halnja dengan karet dan kelapa sawit perkebunan-perkebunan teh semendjak tahun 1962 tidak pernah mendapatkan pemupukan jang wadjar. Ditaksir bahwa rata-rata tiap tahunnja hanja 30 persen mendapat pemupukan jang optimum. Dalam keadaan jang demikian produksi rata-rata per ha menurun. Tambahan pula karena serangan hama penjakit timbullah tanah-tanah kosong (hiaten) ditengah-tengah perkebunan.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas pada tahun-tahun jang akan datang pemupukan akan diintensifkan sedangkan hiaten akan diisi. Djuga akan diusahakan agar tjara pemetikan dilakukan berdasarkan pemetikan halus untuk meningkatkan mutu teh. Dalam rangka peningkatan mutu akan direhabilitasi pabrik-pabrik teh.

Meskipun produksi teh rakjat meningkat keadaan sektor ini masih djauh dari memuaskan. Umur tanaman sebagian besar telah melewati usia produktif dan berada dalam keadaan rusak atau kurang terpelihara. Dengan perbaikan kultur tehnis, seperti pemetikan, pemupukan jang optimal dan pemberantasan hama penjakit dapat diharapkan peningkatan produksi teh dengan lebih tjepat.

Disamping usaha-usaha tersebut diatas akan diusahakan perbaikan pengolahan dan pemasarannja. Usaha ini akan dilaksanakan dengan bekerdja-sama dengan perkebunan-perkebunan besar (negara maupun swasta) jang berdekatan.

Berdasarkan perkembangan-perkembangan diatas dapat diharapkan peningkatan produksi dan ekspor teh sebagai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL VI-C-11

PRODUKSI TEH 1969/70 — 1973/74

Tahun	Perkebunan Besar (ton)	Perkebunan Rakjat (ton)	Djumlah (ton)	Persentase Pertambahan
1969/70	39.500	46.000	85.500	1,79
1970/71	40.000	47.000	87.000	1,75
1971/72	40.500	48.000	88.500	1,72
1972/73	42.000	49.000	81.000	2,82
1973/74	43.000	50.000	93.000	2,20

Gula.

Sebelum perang dunia kedua gula merupakan penghasil devisa utama. Pada masa djajanja industri gula jaitu pada

tahun-tahun 1928—1931, 200.000 ha ditanami tebu gula dan produksi tiap tahunnja mentjapai 3 djuta ton. Produksi tahun 1966 hanja setinggi 605.000 ton jang berasal dari areal 76.000 ha. Kemunduran produksi ini bukan sadja disebabkan karena bertambah ketjilnja areal jang ditanami tetapi karena hasil rata-rata menurun. Hal ini dapat dilihat tabel berikut:

TABEL VI-C-12

HASIL RATA-RATA GULA (KRISTAL) PER HA

(dalam ton)

	1935	1962	1963	1964	1965	1966
Tebu gula	139,8	72,0	78,8	91,6	91,6	85,8
Kadar gula dalam %	8,88	9,36	10,36	9,36	10,65	9,77
Kristal Gula	12,41	7,15	8,13	7,91	9,68	8,38

Penurunan hasil rata-rata ini disebabkan karena banjak faktor tetapi terutama karena keadaan pengairan irigasi jang memburuk. Tambahan pula perkebunan-perkebunan gula achir-achir ini mengalami kesukaran untuk menjewa tanah untuk menanam tebu dari rakjat petani. Sebagaimana diketahui tanah jang ditanami tebu bukan milik perkebunan sendiri. Dari perkebunan jang ada hanja satu memiliki tanahnja sendiri. Dengan meningkatnja harga-harga beras serta meningkatnja produksi padi rata-rata per ha maka dapat diperkirakan bahwa daja saing tanaman padi akan meningkat djika dibandingkan dengan tanaman tebu. Dalam keadaan demikian sewa tanah akan meningkat dan akan membatasi perluasan areal tanaman tebu disekitar pabrik-pabrik gula jang ada. Karena pada perkebunan gula negara usaha-usaha peningkatan produksi gula akan ditekankan pada usaha-usaha intensifikasi melalui pemupukan.

Dengan tertjapainja usaha-usaha rehabilitasi dan perluasan sistim irigasi maka pemupukan akan meningkatkan produksi rata-rata per hektar setjara optimum.

Disamping itu usaha-usaha penelitian untuk menghasilkan benih-benih unggul akan diintensifkan. Selandjutnja diusahakan perluasan daerah penanaman tebu diluar Djawa, terutama di Sulawesi dan Lampung.

Persoalan lain jang dihadapi perkebunan-perkebunan gula ialah bertambah mahalnja dan sukarnja perawatan dan penggantian mesin-mesin jang sudah sangat tua. Sebagaimana diketahui rata-rata pabrik-pabrik gula jang ada dengan beberapa perketjualian sudah berusia lebih dari 40 tahun. Biaja pembelian dan penggantian bagian-bagian mesin tidak dapat dibajar dari hasil pendjualan karena harus membelinja dengan harga pasaran bebas sedangkan pendjualan gula ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini tidak memungkinkan pembentukan modal sendiri untuk keperluan-keperluan tersebut. Dengan demikian effisiensi pabrik berada pada taraf jang rendah jang mengakibatkan tingginja biaja per unit.

Untuk mengatasi persoalan tersebut diatas setjara berangsur-angsur akan ditutup 12 paberik gula jang paling tidak effisien. Sedang dipeladjari kemungkinannja untuk melengkapi mereka dengan alat-alat penggiling beras untuk membantu menampung peningkatan produksi padi.

Sedang dipertimbangkan pula pendirian pabrik-pabrik hasil samping gula. Disamping itu 26 pabrik gula jang paling effisien akan direhabilitir. Djuga direntjanakan penjelesaian projek gula Tjot Girek dan Bone. Diharapkan kedua pabrik ini sudah menghasilkan gula pada tahun 1970 dan 1972. Kedua pabrik ini akan digunakan sebagai pilot projek untuk mempeladjari kemungkinan-kemungkinan perluasan perkebunan gula.

Perkebunan-perkebunan rakjat djuga menghasilkan gula jang diolah setjara sederhana mendjadi gula mangkok. Berbeda de-

ngan gula perkebunan luas tebu rakjat meningkat dengan tjepat sekali sehingga pada saat sekarang lebih kurang 80.000 ha jang ditanami tebu rakjat. Luas ini adalah 4 kali seluas areal sebelum perang dunia II.

Dari 80.000 ha ini hanja 15.000 ha berada diluar Djawa. Untuk memenuhi permintaan gula jang meningkat akan diadakan perluasan daerah tebu rakjat diluar Djawa dengan menjediakan benih-benih unggul. Disamping itu akan diusahakan intensifikasi di Djawa dengan pemupukan.

Salah satu faktor jang membuat harga pokok gula pasir di Djawa relatif tinggi, adalah sistim penanaman jang dikenal dengan sistim "Reynose" dimana setiap kali setelah tebunja dipanen, harus mengadakan tanaman baru. Sistim ("Ratooning") dimana dari satu kali menanam bisa dipanen 3 sampai 4 kali, jakni sistim jang lazim dipakai dinegara produsen gula lainnja, tidak dapat dipraktekkan di Djawa karena persoalan tanah sewaan tersebut diatas. Dalam rentjana perluasan tanaman tebu diluar Djawa akan dipraktekkan sistim ("Ratooning") dan sistim tebu-tegalan (tanpa irigasi).

Berdasarkan perkembangan-perkembangan tersebut diatas diperkirakan produksi akan meningkat sebagaimana tertjantum pada Tabel VI-C-13.

TABEL VI-C-13

PRODUKSI GULA 1969/70 — 1973/74

Tahun	Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Produksi rata-rata per ha (ton)
1969/1970	76.000	677.000	8,9
1970/1971	78.000	761.000	9,7
1971/1972	79.000	788.000	10,0
1972/1973	84.000	862.000	10,2
1973/1974	87.000	907.000	10,5

K o p i.

Indonesia menghasilkan dua djenis kopi jaitu kopi arabica dan kopi robusta. Jang pertama mempunjai nilai lebih tinggi dan terutama dihasilkan oleh perkebunan-perkebunan besar sedangkan jang kedua dihasilkan oleh perkebunan-perkebunan rakjat. Lebih dari 90 persen dari kopi jang diproduksi di Indonesia berasal dari perkebunan rakjat.

Berbeda dengan budidaja jang lain produksi kopi selama tahun-tahun sesudah perang dunia kedua menundjukkan suatu kemadjuan sebagaimana dapat diilihat dari tabel dibawah ini.

	1953 — 1957 (ribu ton)	1958 — 1962 (ribu ton)	1963 — 1968 (ribu ton)
Perkebunan Besar	16	16	17
Perkebunan Rakjat	47	77	106

Peningkatan produksi kopi tersebut diatas berasal dari peningkatan produksi disektor perkebunan rakjat. Luas areal perkebunan kopi rakjat meningkat dari 231.000 ha pada tahun 1960 mendjadi 310.000 ha, pada tahun 1966. Perluasan ini disebabkan karena harga kopi selama tudjuh tahun terachir meningkat dengan tjepat sekali. Harga kopi sekarang djika dibandingkan dengan tahun 1961 adalah dua kali lebih tinggi. Selain itu berbarengan dengan meningkatnja harga, produksi rata-rata meningkat disebabkan bibit-bibit unggul jang dapat menghasilkan kopi sebesar 350 kg per ha. Dengan demikian pendapatan jang diperoleh dari pengusahaan perkebunan-perkebunan kopi meningkat. Hal ini telah menarik petani-petani untuk menanam kopi.

Mutu kopi rakjat jang diekspor masih dapat ditingkatkan dengan menggunakan alat pengolah jang lebih sempurna. Untuk

ini direntjanakan pembukaan pabrik pengolahan bidji kopi didaerah-daerah produksi jaitu di Lampung, Sumatera Selatan, Djawa Timur dan Bali. Pabrik-pabrik pengolahan ini akan menggunakan tehnologi jang baru tetapi sederhana.

Selain usaha tersebut direntjanakan djuga pengandjuran kepada petani-petani untuk menghasilkan kopi arabica jang sebagaimana diketahui mempunjai nilai per ha. jang lebih tinggi

Tentunja pengandjuran ini akan ditudjukan pada petani jang tinggal didaerah-daerah dimana iklim dan tanah mengizinkan penanaman kopi arabica. Sebagaimana diketahui perkebunan kopi rakjat terdapat didataran-dataran jang tingginja 600 — 900 m diatas permukaan laut. Untuk kopi arabica dataran ini terlalu rendah karena itu diperlukan bibit jang chusus. Pada saat sekarang telah ada pertjobaan iklimitisasi dari djenis kopi arabica baru. Hasil-hasil pertjobaan tjukup memuaskan meskipun proses iklimitisasi belum tjukup lama dan merata diseluruh Indonesia. Karenanja masih perlu sekali diadakan pembinaan dan penelitian dari kebun-kebun kopi jang mendalam. Usaha-usaha ini akan didahului dengan penjelenggaraan kebun-kebun induk arabica dataran rendah di Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Djawa Timur dan Bali.

Untuk meningkatkan pendapatan petani kopi dan penghasilan devisa negara akan diandjurkan djuga kepada petani untuk menanam tanaman sela panili. Pemilihan pohon panili didasarkan karena sifatnja jang tjepat menghasilkan, mempunjai nilai hasil per ha. jang tinggi, merupakan pohon pelindung jang baik dan mempunjai potensi ekspor jang tinggi. Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan eksportir panili utama ke Amerika Serikat. Untuk tahun pertama akan dibuka pilot projects sedangkan pada tahun 1973 diharapkan penanaman pohon panili diperkebunan kopi rakjat seluas 4.000 ha.

Perkembangan produksi dan produksi rata-rata perkebunan besar menundjukkan suatu kemunduran. Produksi kopi pada tahun 1966 menurun dengan hampir 80 persen djika dibandingkan dengan tahun 1960 sedangkan luas areal menurun dengan

hanja 20 persen. Perkembangan ini merupakan suatu indikasi bahwa hasil rata-rata per ha. menurun dengan pesat selama tudjuh tahun terachir ini. Penurunan ini sudah tentu tidak boleh dilandjutkan. Dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini akan diusahakan peningkatan produksi melalui peremadjaan dengan menggunakan bibit unggul seluas 200 ha. setahunnja pada perkebunan-perkebunan negara. Dengan pemupukan dan peremadjaan diharapkan produksi kopi perkebunan negara berkembang sebagai tertjantum pada Tabel VI-C-14.

TABEL VI-C-14

PRODUKSI KOPI PERKEBUNAN NEGARA

Tahun	Luas Areal Produktif (ha)	Produksi (ton)	Persentase pertambahan Produksi
1969/70	18.445	11.187	13,52
1970/71	18.570	7.988	7,14
1971/72	18.166	10.912	13,66
1972/73	18.170	7.492	6,86
1973/74	18.595	11.699	15,61

Berdasarkan perkembangan-perkembangan diatas ditaksir bahwa produksi akan meningkat dengan rata-rata 4 persen setahunnja sehingga pada tahun 1973 produksi akan mentjapai 163.000 ton. Dengan perkembangan produksi setjepat ini dan berdasarkan kenjataan bahwa Indonesia adalah anggauta International Coffee Agreement maka kemungkinan besar sekali bahwa surplus jang sekarang sudah dialami akan meningkat dengan terus-menerus. Dalam keadaan jang demikian akan diadakan suatu survey jang akan merupakan dasar untuk meng-

gariskan kebidjaksanaan dibidang kopi dengan tudjuan mengatasi persoalan surplus diatas.

Tembakau.

Sebagian besar dari tembakau jang dihasilkan di Indonesia dikonsumsi oleh industri rokok dalam negeri. Namun demikian penghasilan devisa dari sumber ini djuga berarti. Setiap tahunnja nilai ekspor tembakau berkisar antara 30 dan 40 djuta dollar.

Djenis jang terpenting ialah tembakau virginia jang seluruh produksinja digunakan untuk industri rokok dalam negeri, malahan untuk memenuhi permintaan industri rokok dalam negeri Indonesia harus mengimpor tembakau virginia.

Tembakau virginia dihasilkan hanja di Djawa. Karena kepadatan penduduk didaerah-daerah produksi sudah mentjapai titik maximum, tidak mungkin lagi untuk meningkatkan produksi melalui perluasan areal. Karenanja untuk djangka pendek pemetjahan persoalan tersebut terletak pada usaha-usaha intensifikasi. Dengan pemupukan produksi per ha dapat ditingkatkan dengan minimal 12 persen atau 0,5 kwintal per ha. Karenanja dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini penjuluhan-penjuluhan akan dilaksanakan untuk mengandjurkan pemupukan dengan djenis-djenis pupuk jang tepat. Sudah tentu petani-petani akan membutuhkan kredit untuk memungkinkan mereka membeli pupuk tersebut. Kebutuhan kredit ini diharapkan dapat ditampung oleh Bank Negara Indonesia Unit II.

Selain usaha-usaha intensifikasi akan dipeladjari djuga kemungkinan-kemungkinan untuk menanam tembakau virginia diluar Djawa. Untuk ini akan diadakan suatu survey dan berdasarkan hasil-hasil survey tersebut akan digariskan kebidjaksanaan mengenai tembakau virginia.

Achir-achir ini pabrik-pabrik rokok putih jang menggunakan tembakau virginia sebagai bahan mentah banjak mengeluh

mengenai mutu dari tembakau tersebut. Untuk mengatasi persoalan ini akan diusahakan perbaikan-perbaikan melalui penjuluhan dibidang kultur tehnik, pengolahan, sortasi dan pemuliaan dari tanaman dalam arti mentjiptakan varietas-varietas unggul. Biaja untuk usaha ini ditaksir 15 djuta rupiah selama lima tahun.

Hasil tembakau perkebunan besar untuk sebagian besar diekspor dan terdiri atas tembakau Deli, tembakau Vorstenlanden dan tembakau Besuki. Tembakau Deli masih tetap memiliki kwalitas tertinggi selaku "dekblad" tjerutu, walaupun pada achir-achir ini mendapat saingan berat dari tembakau Cameroun.

Permasalahan jang dihadapi sektor ini lain dengan perkebunan rakjat. Meskipun produksi disektor ini menundjukkan kenaikan tetapi tehnis-budidaja dan pengolahan belum mentjapai tingkat jang optimal. Dengan memperbaiki tjara-tjara tersebut produksi masih dapat ditingkatkan lebih landjut.

Dalam hal ini direntjanakan penggunaan sprinkler-irrigation untuk areal seluas 2.000 ha. Diperkirakan bahwa penggunaan sprinkler-irrigation ini dapat meningkatkan produksi dengan 8 persen sedangkan kenaikan mutunja dilihat dari hasil pendjualan dapat ditingkatkan sampai 10 persen.

Rotasi selama 8 tahun dalam penggunaan tanah mengakibatkan tanah tersebut sebelum dikerdjakan telah mendjadi hutan kembali. Untuk pembukaan kembali tanah ini diperlukan alat-alat mekanisasi pertanian untuk memungkinkan pengerdjaan tanah setjara baik dan intensip. Ditaksir bahwa dengan penggunaan alat-alat mekanisasi produksi rata-rata akan meningkat dengan 5 persen sedangkan mutunja dengan 3 persen.

Berdasarkan perkembangan tersebut diatas produksi tembakau perkebunan negara akan berkembang sebagai berikut:

TABEL VI-C-15

PRODUKSI TEMBAKAU PERKEBUNAN NEGARA, 1969/70 — 1973/74

Tahun	Produksi (ton)	Persentase pertambahan
1969/70	9.700	1,56
1970/71	9.820	1,24
1971/72	9.940	1,22
1972/73	10.060	1,20
1973/74	10.180	1,19

Kopra.

Lebih dari 95 persen dari kopra jang dihasilkan di Indonesia berasal dari perkebunan-perkebunan rakjat. Untuk beberapa daerah produksi, seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku perubahan-perubahan pada industri kopra mempengaruhi keadaan ekonomi dan sosial daerah tersebut. Ditindjau dari sudut nasional kopra merupakan penjumbang penting pada penghasilan devisa negara.

Produksi kopra dalam tahun-tahun jang lampau terus-menerus menundjukkan suatu trend jang menurun dan diperkirakan bahwa ketjenderungan ini akan diteruskan dalam tahun-tahun jang akan datang. Salah satu penjebab utama ialah komposisi umur tanaman jang ada sudah tidak seimbang lagi. Menurut data-data jang ada situasi umur tanaman pada saat sekarang adalah sedemikian rupa sehingga lebih dari 50 persen dari pohon-pohon jang ada umurnja sudah lebih dari 50 tahun. Keterlambatan peremadjaan tersebut agaknja dibeberapa daerah disebabkan karena tiadanja atau kurangnja perangsang bagi petani-petani kopra untuk melaksanakan peremadjaan. Berbarengan dengan menurunnja produksi kopra, konsumsi dalam negeri meningkat sehingga jang tersedia untuk ekspor menurun dengan pesat.

Untuk mentjegah kelandjutan menurunnja produksi lebih landjut direntjanakan suatu peremadjaan disertai dengan pemupukan jang intensip. Pada tahap pertama direntjanakan pengandjuran peremadjaan seluas 120.000 ha selama lima tahun jang akan datang melalui intensifikasi penjuluhan. Sudah tentu disamping usaha tersebut diatas akan dilaksanakan djuga perubahan-perubahan jang menudju perbaikan dari perlembagaan usaha kopra, terutama dengan tudjuan meningkatkan kegairahan petani kopra untuk berproduksi.

Salah satu tjara untuk menaikkan pendapatan petani kopra ialah dengan meningkatkan produksi tali sabut jang menggunakan sabut kelapa sebagai bahan mentah. Pada tahap pertama pabrik sabut kelapa di Jogjakarta akan direhabilitasi. Tjara lain jang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan petani kopra ialah penanaman tanaman sela seperti tjoklat.

Produksi kopra perkebunan negara djuga akan diintensifkan melalui pemupukan. Diharapkan produksi akan berkembang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel VI-C-16. Adapun pada tahun-tahun pertama tidak ada peningkatan karena pemupukan baru menghasilkan setelah dua tahun.

TABEL VI-C-16

PRODUKSI KOPRA PERKEBUNAN NEGARA, 1969/70 — 1973/74

Tahun	Luas Areal Produktif (ha)	Produksi (ton)	Persentase pertambahan Produksi
1969/70	3.065	1.100	0
1970/71	3.065	1.100	0
1971/72	3.065	1.200	9,09
1972/73	3.065	1.300	8,33
1973/74	3.065	1.500	15,38

T j o k l a t.

Tjoklat belum diproduksi dalam djumlah jang besar. Produksi tjoklat Indonesia hanja merupakan 0,05 persen dari produksi seluruh dunia dan dihasilkan baik oleh perkebunan-per-

kebunan besar maupun perkebunan rakjat. Perkembangan produksi tjoklat selama 9 tahun jang terachir ini dapat dilihat pada daftar berikut:

	1959-1961 (ton)	1965-1967 (ton)
Perkebunan besar	1.050	639
Perkebunan rakjat	234	366

Dari angka-angka produksi rata-rata tersebut dapat dilihat bahwa produksi perkebunan besar menurun dengan 39 persen sedangkan produksi perkebunan rakjat meningkat dengan 50 persen. Untuk mentjegah kemerosotan lebih landjut perkebunan-perkebunan negara merentjanakan peremadjaan seluas 700 ha selama lima tahun jang akan datang dan pemupukan. Tabel VI-C-17 menundjukkan perkiraan produksi perkebunan tjoklat untuk lima tahun jang akan datang.

TABEL VI-C-17

PRODUKSI TJOKLAT PERKEBUNAN NEGARA, 1969/70 — 1973/74

Tahun	Luas Areal Produktif (ha)	Produksi (ton)	Persentase pertambahan Produksi
1969/70	2.944	815	16,50
1970/71	2.984	1.008	23,68
1971/72	2.919	1.106	9,72
1972/73	3.034	1.257	13,65
1973/74	3.401	1.625	29,28

Permasalahan tjoklat rakjat terletak dibidang peningkatan mutu. Sebagaimana diketahui tjoklat Indonesia termasuk "edel cacao" jang mempunjai harga jang baik diluar negeri asal mutu dapat ditingkatkan untuk mengatasi persaingan. Untuk memperbaiki mutu ini akan dibuka pabrik-pabrik pengolahan tjoklat

disentra pertanian. Disamping itu akan diandjurkan pula kultur tehnis tanaman jang telah ada dan peremadjaan dengan bibit-bibit unggul.

L a d a.

Pada tahun 1938 produksi lada Indonesia adalah sebesar 55.000 ton. Ini merupakan 80 persen daripada kebutuhan dunia. Pada tahun-tahun sesudah perang dunia kedua dan perang kemerdekaan produksi lada menurun dengan hebat. Ini disebabkan tak lain karena perkebunan-perkebunan lada selama pendudukan Djepang mengalami kerusakan jang hebat. Pada tahun enam puluhan produksi mulai meningkat lagi sebagaimana dapat dilihat pada daftar berikut:

Tahun	Luas tanaman (ha)	Produksi (ton)	Ekspor (ton)
1961	34.739	13.674	19.079
1962	36.922	55.431	10.961
1963	38.414	57.921	27.950
1964	36.595	46.413	23.180
1965	37.100	46.500	12.287
1966	41.957	46.546	20.714

Menurunnja luas areal dan produksi pada tahun-tahun sesudah tahun 1963 disebabkan karena serangan penjakit busuk pangkal batang dan penjakit kuning. Untuk menghentikan trend menurun itu akan diambil tindakan pemberantasan penjakit-penjakit tersebut. Pada taraf pertama akan dilakukan di Bangka dan Lampung. Diharapkan dengan berhasilnja usaha pemberantasan ini produksi akan meningkat dengan 10 persen setahun.

Disamping usaha tersebut diatas akan diusahakan penelitian jang mendalam untuk menghasilkan djenis-djenis jang resisten. Untuk ini perlu sekali didirikan kebun-kebun pertjobaan didaerah-daerah tanaman pertjobaan.

910087-(7).

Tjengkeh.

Tjengkeh dihasilkan untuk keperluan industri dalam negeri. Sedjak permulaan abad ke-19 kedudukan Indonesia selaku produsen tjengkeh telah didesak oleh Zanzibar dan Madagaskar. Bahkan semendjak berkembangnja industri rokok kretek, jakni ditahun sembilan belas dua puluhan, Indonesia telah mendjadi importir terbesar daripada tjengkeh. Sebelum perang dunia kedua, industri rokok kretek dalam negeri telah mengkonsumsi sebanjak 18.000 ton tjengkeh setahunnja, jang sebagian besar merupakan tjengkeh impor. Selama tahun-tahun lima puluhan kapasitas pabrik rokok kretek telah menurun mendjadi rata-rata 12.000 ton tjengkeh tiap tahunnja. Untuk masa jang sama tiap tahunnja 9.000 ton tjengkeh diimpor. Sedjak tahun 1958 telah dilakukan usaha-usaha swa-sembada tjengkeh, jang mulai tampak hasilnja pada tahun-tahun sesudah 1964. Perkembangan luas dan produksi selama tahun enam puluhan dapat dilihat pada daftar berikut :

Tahun	Luas areal dalam ha.	Produksi (ribu ton)	Impor (ribu ton)	Djumlah Impor + Produksi
1961	46.808	7,07	9,04	16,11
1962	48.594	6,55	5,15	11,70
1963	50.692	7,94	5,42	13,36
1964	61.250	12,59	8,90	21,49
1965	67.117	13,72	4,64	18,36
1966	70.500	17,18	6,83	24,31

Dari tabel diatas dapat dilihat djuga bahwa produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga kita masih harus mengimpor dalam djumlah-djumlah jang besar. Untuk meningkatkan produksi pada taraf pertama akan dibuka kebun-kebun pertjobaan masing-masing seluas 10 ha untuk menjelenggarakan pembibitan, dan memberikan tjontoh mengenai tjara-tjara penanaman dan pemeliharaan (pemupukan, pemberantas-

an hama dan tjara-tjara pemetikan). Projek-projek ini akan disebarkan di Sumatera Barat, Lampung, Djawa Tengah, Sulawesi Utara dan Maluku.

P a l a.

Indonesia dan India merupakan produsen terbesar dari pala. Sebagian besar dari pala dihasilkan oleh perkebunan rakjat dan terutama terdapat didaerah Indonesia Timur dengan areal seluas 14.000 ha, dan tiap tahunnja rata-rata diekspor 3.000 sampai 4.000 ton bunga dan bidji pala.

Prospek pala dimasa depan masih tjukup baik dan permintaan pasaran dunia maupun dalam negeri masih menundjukkan trend jang meningkat.

Sudah sewadjarnja untuk memadjukan sektor pala ini, dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun akan diusahakan rehabilitasi kebun-kebun pala di Maluku dan permuliaan tanaman.

Cassia Vera.

Diantara rempah-rempah jang dihasilkan Indonesia adalah kaju manis (Cinnamon dan Cassia). Pentingnja terletak pada peranannja sebagai penghasil devisa. Pada tahun 1967, jang dapat diekspor mentjapai hasil 4,6 djuta dollar. Karena permintaan akan rempah ini dihari depan akan meningkat, sedangkan negara supplier utama lain jaitu Vietnam keadaan politiknja masih belum beres maka hari depan industri Cassia Vera Indonesia relatif baik.

Untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil direntjanakan pelaksanaan projek intensifikasi budidaja Cassia Vera dengan biaja 326 djuta rupiah sedangkan untuk perbaikan mutu direntjanakan projek perbaikan pengolahan dan pemasaran Cassia Vera dengan biaja 937 djuta rupiah.

K a p a s.

Meskipun tanaman kapas sudah lama dikenal namun areal tanaman tidak pernah luas sehingga sumbangannja kepada perkembangan industri tekstil tidak berarti. Hasil rata-rata per ha masih rendah sehingga biaja per unit masih tinggi. Sebaliknja

harga pendjualan kapas dalam negeri rendah karena mutunja djauh daripada memuaskan. Akibatnja produksi kapas tidak pernah besar malah selama tahun-tahun terachir ini menundjukkan ketjenderungan menurun.

Keperluan kapas akan meningkat selama lima tahun jang akan datang sesuai dengan perkembangan industri tekstil. Sudah sewadjarnja untuk mentjoba memenuhi sebagian dari keperluan kapas ini melalui peningkatan produksi dalam negeri. Usaha-usaha dibidang kapas ini akan ditudjukan kedjurusan peningkatan produktivitas melalui penjebaran bibit jang bermutu tinggi sambil meningkatkan usaha-usaha penelitian untuk memperoleh bibit-bibit unggul serta djenis-djenis pupuk jang tepat untuk usaha-usaha intensifikasi. Penjuluhan dibidang inipun akan ditingkatkan.

Program peningkatan produksi hasil-hasil perkebunan ini dapat dibagi dalam projek-projek antara lain sebagai berikut :

1. Projek penanaman baru/peremadjaan/konversi kelapa sawit dan karet perkebunan-perkebunan Negara.
2. Projek peremadjaan karet rakjat.
3. Projek pembangunan crumb rubber faelnus.
4. Projek rehabilitasi/modernisasi pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit.
5. Projek rehabilitasi/modernisasi pabrik-pabrik gula.
6. Projek pengembangan industri gula diluar Djawa.
7. Projek rehabilitasi/perluasan hasil samping gula.
8. Projek rehabilitasi kebun-kebun teh.
9. Projek rehabilitasi/modernisasi pabrik-pabrik teh.
10. Projek peningkatan produktivitas perkebunan tembakau.
11. Projek peremadjaan kelapa rakjat.
12. Projek perluasan/rehabilitasi kebun induk kopi dataran rendah.
13. Projek peningkatan produksi tjengkeh.
14. Projek rehabilitasi kebun induk pala.
15. Projek peningkatan produksi dan mutu lada.

Untuk masing-masing projek harus diadakan persiapan-persiapan jang didasarkan pada penelitian dan perhubungan jang

tepat. Bilamana ternjata bahwa sesuatu projek kurang dapat dipertanggung-djawabkan maka sudah barang tentu projek tersebut tidak akan dilaksanakan. Dalam hubungan ini penting sekali peranan survey dan penelitian jang kemudian mendjadi dasar dari pada penjesuaian-penjesuaian dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang dilakukan setiap tahun bagi penjusunan rentjana-rentjana tahunan.

D. PERIKANAN

Para ahli menaksir bahwa perairan laut dan darat Indonesia mempunjai potensi untuk menghasilkan 7,6 djuta ton ikan per tahun. Tetapi pada tahun 1967 hanja 15 persen sadja dari potensi tersebut dapat dimanfaatkan. Hal ini tak lain karena disebabkan terbelakangnja industri perikanan kita. Namun demikian dalam waktu-waktu jang lampau produksi ikan meningkat dengan berarti. Hal ini dapat dilihat dari angka-angka produksi rata-rata pada tabel berikut:

TABEL VI-D-1

PRODUKSI RATA-RATA TAHUNAN IKAN, 1953 — 1967

(ribu ton)

	1953-1957	1958-1962	1963-1967
Perikanan laut	400	450	650
Perikanan darat	220	300	440

Sebagaimana dapat dilihat dari angka-angka pada tabel tersebut, selama lima belas tahun terachir produksi ikan laut meningkat dengan 60 persen, sedangkan ikan darat dengan 100 persen. Meskipun produksi meningkat setjepat itu, konsumsi ikan per kapita masih rendah. Ditaksir bahwa pada tahun 1967 konsumsi per kapita ikan adalah serendah 11 kilogram, jaitu 6,6 kilogram ikan laut dan 4,4 kilogram ikan darat. Tingkat konsumsi ini masih djauh lebih rendah dari tingkat jang diandjurkan oleh ahli gizi untuk mendjamin kesehatan jang wadjar dari rata-rata orang Indonesia.

Rendahnja produksi ikan di Indonesia disebabkan karena banjak faktor. Pertama-tama tehnologi jang digunakan oleh nelajan-nelajan telah djauh ketinggalan djika dibandingkan dengan tehnologi jang lazimnja dipakai didunia perikanan. Misalnja nelajan-nelajan Indonesia belum mengenal alat-alat pemantulan gelombang untuk mentjari ikan, suatu tehnik jang sudah luas dipakai didunia perikanan. Selandjutnja pada tahun 1966 hanja 1,3 persen dari seluruh armada perkapalan ikan di Indonesia menggunakan motor tempel.

Keadaan armada perkapalan selama masa 1960-1966 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL VI-D-2

DJUMLAH PERKAPALAN, PERIKANAN DI INDONESIA, 1960 — 1966

Tahun	Perahu Lajar	Perahu Motor
1960	169.975	1.456
1961	195.421	2.211
1962	206.843	2.867
1963	212.681	2.989
1964	231.659	3.200
1965	225.419	3.342
1966	241.888	3.357

Permasalahan jang dihadapi industri perikanan darat berlainan dengan permasalahan perikanan laut. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel VI-D-1 produksi rata-rata tahunan ikan darat selama masa 1963-1967 adalah 440.000 ton. Dari djumlah ini 75 persen berasal dari perairan-perairan alamiah (sungai-sungai, danau-danau dan lain-lain) dan sisanja berasal dari perairan-perairan kulturil seperti tambak, kolam dan sawah. Pada waktu ini terdapat 36.000 ha kolam-kolam ikan air tawar jang menghasilkan kurang-lebih 47.000 ton ikan setiap tahunnja. Produksi ini dapat ditingkatkan dengan perbaikan-perbaikan dalam

bidang tehnik pemeliharaan, pemupukan dan sistim penjediaan benih-benih. Selain kolam ikan tawar tersebut ada 120.000 ha tambak-tambak jang tiap tahunnja rata-rata menghasilkan lebih dari 41.000 ton ikan. Disinipun produksi dapat dilipatgandakan dengan perbaikan-perbaikan dalam tehnik pemeliharaan, pemupukan dan management.

Hasil ikan jang diperoleh dari sawah-sawah jang tersebar luas terutama di Djawa pada waktu achir-achir ini mengalami kemerosotan jang membahajakan kelandjutan hidup sektor ini. Hal ini disebabkan karena makin meningkatnja pemakaian obat-obat hama pada persawahan. Untuk menanggulangi persoalan ini akan diusahakan penggunaan obat-obat hama jang bertoxity rendah. Hal ini telah dibahas pada bidang beras.

Dalam menghadapi permasalahan diatas dan berdasarkan kenjataan bahwa ikan merupakan sumber protein hewani jang penting dan murah, maka industri perikanan dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahap pertama ini akan diarahkan sedemikian rupa sehingga peningkatan produksi tiap tahunnja akan berdjalan dengan lebih tjepat lagi. Sasaran produksi ikan untuk lima tahun jang akan datang dapat dilihat pada Tabel VI-D-3:

TABEL VI-D-3

PRODUKSI IKAN, 1969/70 — 1973/74
Djumlah Produksi
(ribu ton)

Tahun	Laut	Darat	Total	Persentase Pertambahan
1969/70	898	525	1.423	9,5
1970/71	1.003	551	1.554	9,2
1971/72	1.085	579	1.664	7,2
1972/73	1.200	608	1.808	8,7
1973/74	1.331	638	1.969	8,9

Untuk mentjapai peningkatan produksi tersebut diatas akan diusahakan intensifikasi penangkapan perikanan laut dengan memperbaiki alat-alat dan tjara-tjara penangkapan, menambah alat-alat produksi baru atau mengganti alat-alat lama dengan jang lebih effisien. Dalam hal ini akan diperbesar armada kapal-kapal bermotor dan perluasan penggunaan gillnet. Dalam rangka peningkatan konsumsi ikan dalam negeri dan ekspor ikan usaha-usaha intensifikasi ditudjukan antara lain pada peningkatan produksi ikan tjakalang, tuna dan udang. Ikan tjakalang terdapat dalam djumlah jang sangat besar diperairan antara Sulawesi dan Irian Barat, sedangkan tuna disamudra Indonesia sebelah selatan Sumatera, Djawa, Nusa Tenggara dan dilaut Banda. Kedua djenis ikan dan udang mempunjai pasaran jang baik diluar negeri sehingga pasar mereka tidak terbatas pada permintaan dalam negeri. Pengusahaan ikan dan udang dewasa ini dilakukan setjara ketjil-ketjilan oleh rakjat dan oleh perusahaan-perusahaan negara dengan perahu-perahu motor dalam djumlah jang sedikit. Dalam lima tahun jang akan datang ini diharapkan pengusahaan ikan-ikan tersebut dapat dilaksanakan setjara besar-besaran dengan menggunakan peralatan jang modern, sehingga produksi ikan tjakalang, tuna dan udang, dapat mentjapai 30.000 ton, 4.000 ton dan 1.000 ton. Diperkirakan bahwa 80 persen dari produksi ikan tjakalang dapat diekspor.

Usaha-usaha intensifikasi perikanan laut tersebut diatas harus disertai dengan perbaikan dan perluasan sarana-sarana penjaluran dan pemasaran. Dalam rangka ini pelabuhan-pelabuhan perikanan akan diperbaiki seperti pelabuhan Eretan, Bagan Siapi-api, Muntjar, Labuhan, Tjilatjap, Tegal, Pontianak, Pulau Laut, Bitung, Surabaja, Gresik, Semarang, Ternate, Ambon, Belawan, Batang, Dumai, Samarinda, Makassar, Palembang Mesudji, Pidi dan lain-lain.

Usaha perbaikan ini meliputi pengerukan muara-muara sungai dan perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas pelabuhan seperti dermaga-dermaga, tanggul-tanggul, persediaan air minum, tempat-tempat pelelangan ikan dan fasilitas penjimpanan.

Selain itu lembaga perkreditan jang melajani sektor ini akan disempurnakan dan penjediaan dana-dana kredit akan diperbesar melalui anggaran belandja pembangunan, bantuan kredit luar negeri ataupun dari deposito-deposito pihak ketiga.

Untuk meningkatkan produksi perikanan darat akan diusahakan penjediaan benih-benih jang tjukup. Untuk ini balai-balai benih ikan akan direhabilitasi dan disempurnakan sehingga mereka benar-benar dapat memenuhi fungsinja sebagai penghasil benih dan mendjamin benih dalam kondisi jang baik selama masa pemeliharaan, penampungan dan pengedaran. Selain itu akan diusahakan pendaja-gunaan perairan-perairan rawa jang tidak atau kurang produktif (type bonorowo) dengan tjara memperbaiki pengusahaannja setjara tehnis. Untuk tahap pertama rawa-rawa jang direntjanakan untuk dimanfaatkan terletak di Djawa Timur seperti di Tulungagung, Kediri dan Ngandjuk dan Djawa Tengah seperti di Kudus, Kedu Selatan dan Tjilatjap. Selandjutnja akan diusahakan pemeliharaan dan rehabilitasi danau-danau untuk mempertahankan fungsi perairan sebagai sumber ikan. Untuk tahap pertama danau-danau jang akan direhabilitasi adalah danau-danau di Sumatera Selatan dan Barat; Djawa Timur; Sulawesi Selatan, Tengah dan Utara; dan Kalimantan, Maluku dan Bali. Tambahan pula akan dibuka kolam-kolam pasang-surut jang terutama terletak diluar Djawa.

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan darat akan diusahakan pula pengadaan-pengadaan makanan ikan jang tjukup dan bermutu. Selain itu akan diusahakan pentjegahan keratjunan-keratjunan pada ikan baik jang disawah, kolam, tambak ataupun perairan-perairan alamiah.

Selain usaha-usaha tersebut diatas jang setjara langsung mempengaruhi produksi ikan akan diusahakan djuga perbaikan-perbaikan fasilitas jang menundjang usaha tersebut diatas. Chususnja penelitian terhadap djenis ikan tertentu jang penting untuk makanan rakjat akan diintensifkan. Perhatian terutama akan ditudjukan pada djenis sardine, teri, ekor kuning, lajang,

bawal, tenggiri, udang, tuna, tjumi dan hasil laut lainnja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menentukan daerah-daerah ikan, musim-musim ikan, tjara-tjara pengawetan ikan, tjara-tjara penangkapan terbaik. Chusus untuk perikanan darat akan diusahakan penelitian-penelitian terhadap benih-benih ikan, tjara-tjara intensifikasi pada perairan bebas dan kulturil.

Untuk memungkinkan tertjapainja tudjuan-tudjuan produksi tersebut diatas pendidikan perikanan merupakan faktor jang menentukan. Dalam hubungan ini sekolah-sekolah perikanan jang ada mulai dari Sekolah Menengah Perikanan Pertama sampai dengan tingkat Akademi akan direhabilitasi dan disempurnakan. Usaha-usaha ini akan dilaksanakan setjara bertahap, disesuaikan dengan urgensi jang dihadapi. Sekolah-sekolah jang akan direhabilitasi adalah S.U.P.M. di Menado, Tegal; S.U.P.P. di Medan, Singaradja dan Ambon; A.U.P. di Djakarta dan Training Centre Nelajan di Tegal, Bagan Siapi-api, Tandjung Pinang, Menado, Makassar, Ternate, Ambon, Pontianak dan Bali. Selain itu untuk meningkatkan mutu pengetahuan para karyawan dan petani-petani ikan sesuai dengan bidang usaha masing-masing akan dilaksanakan latihan-latihan kedjuruan perikanan darat.

Karena sifat ikan jang tjepat rusak dan tidak sempurnanja fasilitas-fasilitas penjimpanan dan pengangkutan proses pemasaran hasil-hasil perikanan tidak effisien. Ini mengakibatkan harga ikan didaerah-daerah produksi sangat rendah sedangkan harga-harga didaerah konsumsi tjukup tinggi. Harga-harga rendah didaerah-daerah produksi mengakibatkan tidak adanja perangsang pada produsen untuk meningkatkan produksinja sedangkan harga-harga jang tinggi didaerah konsumsi mengurangi konsumsi ikan. Sudah tentu hal ini tidak dapat dilandjutkan. Dengan rentjana perbaikan fasilitas-fasilitas pemasaran (penjimpanan dan pengangkutan) diharapkan harga pada taraf produsen meningkat sedangkan pada taraf konsumen menurun. Sebelum menggariskan kebidjaksanaan jang lebih konkrit terlebih dahulu akan dilaksanakan suatu survey dibidang ini.

Usaha-usaha tersebut diatas dalam rangka program peningkatan produksi hasil-hasil perikanan diperkirakan memerlukan biaja dari anggaran pembangunan sebesar 10 miljar rupiah dalam lima tahun dan 527,75 djuta rupiah untuk tahun 1969/70. Program ini dapat dibagi-bagi dalam projek antara lain seperti berikut:

1. Projek Intensifikasi Perikanan Laut,
2. Projek Rehabilitasi/Pembangunan Pelabuhan Perikanan,
3. Projek Penelitian Perikanan,
4. Projek Pengembangan Sumber-sumber Perikanan Darat,
5. Projek Pengembangan Benih-benih Perikanan Darat,
6. Projek Pengembangan Prasarana Perikanan.

Untuk masing-masing projek ini harus diadakan persiapan-persiapan jang didasarkan pada penelitian dan perhitungan jang tepat. Bilamana ternjata bahwa sesuatu projek kurang dapat dipertanggung-djawabkan maka sudah barang tentu projek tersebut tidak akan dilaksanakan. Dalam hubungan ini penting sekali peranan survey dan penelitian jang kemudian mendjadi dasar dari pada penjesuaian-penjesuaian dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang dilakukan setiap tahun bagi penjusunan rentjana-rentjana tahunan.

E. KEHUTANAN

Menurut taksiran pada waktu ini Indonesia memiliki hutan atau daerah-daerah hutan seluas kurang lebih 120 djuta ha atau dua pertiga dari luas seluruh wilajah. Akan tetapi, seperti djuga halnja dengan penduduk, pembagiannja sangat tidak merata. Sebagian terbesar (97,5 persen) terletak diluar Djawa. Setjara garis besar penjebarannja menurut daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL VI-E-1

LUAS HUTAN DI INDONESIA

Daerah	Luas Hutan (ribu ha)	Dalam persentase dari luas darat
Sumatera	24.220	57
D j a w a	2.906	22
Bali dan Nusa Tenggara	1.485	24
Kalimantan	43.670	68
Sulawesi	6.300	32
M a l u k u	6.000	71
Irian Barat	33.500	78
Indonesia	119.381	65

Hutan-hutan di Indonesia dapat dibagi kedalam beberapa kelompok. Diantaranja, 48 djuta ha merupakan hutan lindung, jaitu kawasan hutan jang karena keadaan sifat alamnja diperuntukkan guna pengaturan tata air, pentjegahan bandjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kemudian, 24 djuta ha merupakan hutan produksi, jaitu kawasan hutan jang diperuntukkan guna produksi hasil-hasil hutan untuk memenuhi keperluan masjarakat pada umumnja dan untuk pembangunan industri-industri dan ekspor pada chususnja.

Inilah hutan jang potensiil dapat diolah dan diambil hasilnja dengan intensif. Selandjutnja terdapat kurang-lebih 18 djuta ha hutan jang dapat dikonversikan mendjadi tanah-tanah pertanian (hutan konversi). Sisanja sebanjak 30 djuta ha, digolongkan kedalam hutan rusak. Jang terachir ini ialah sebagai akibat dari kebiasaan-kebiasaan penebangan liar, kebakaran, dan sebagainja.

Berdasarkan angka-angka diatas, maka djumlah luas hutan jang dapat diusahakan meliputi kurang-lebih 42 djuta ha, jang terdiri dari 24 djuta ha hutan produksi dan 18 djuta ha hutan konversi. Akan tetapi pada waktu ini djumlah areal hutan jang dimanfaatkan hanja berkisar pada seluas kurang-lebih 3 djuta

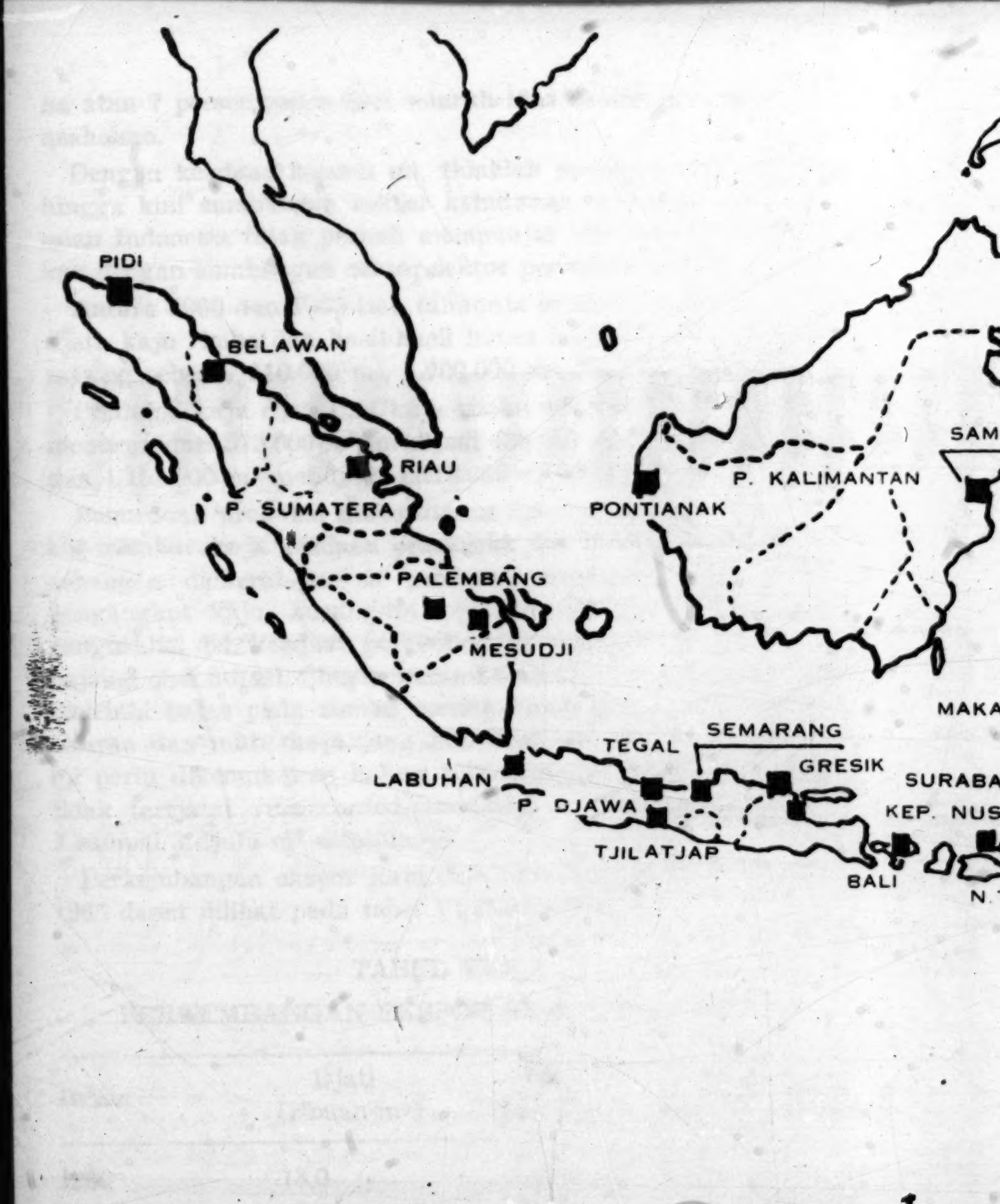

LOKASI PROJEK
PERBAIKAN PELABUHAN PERIKANAN

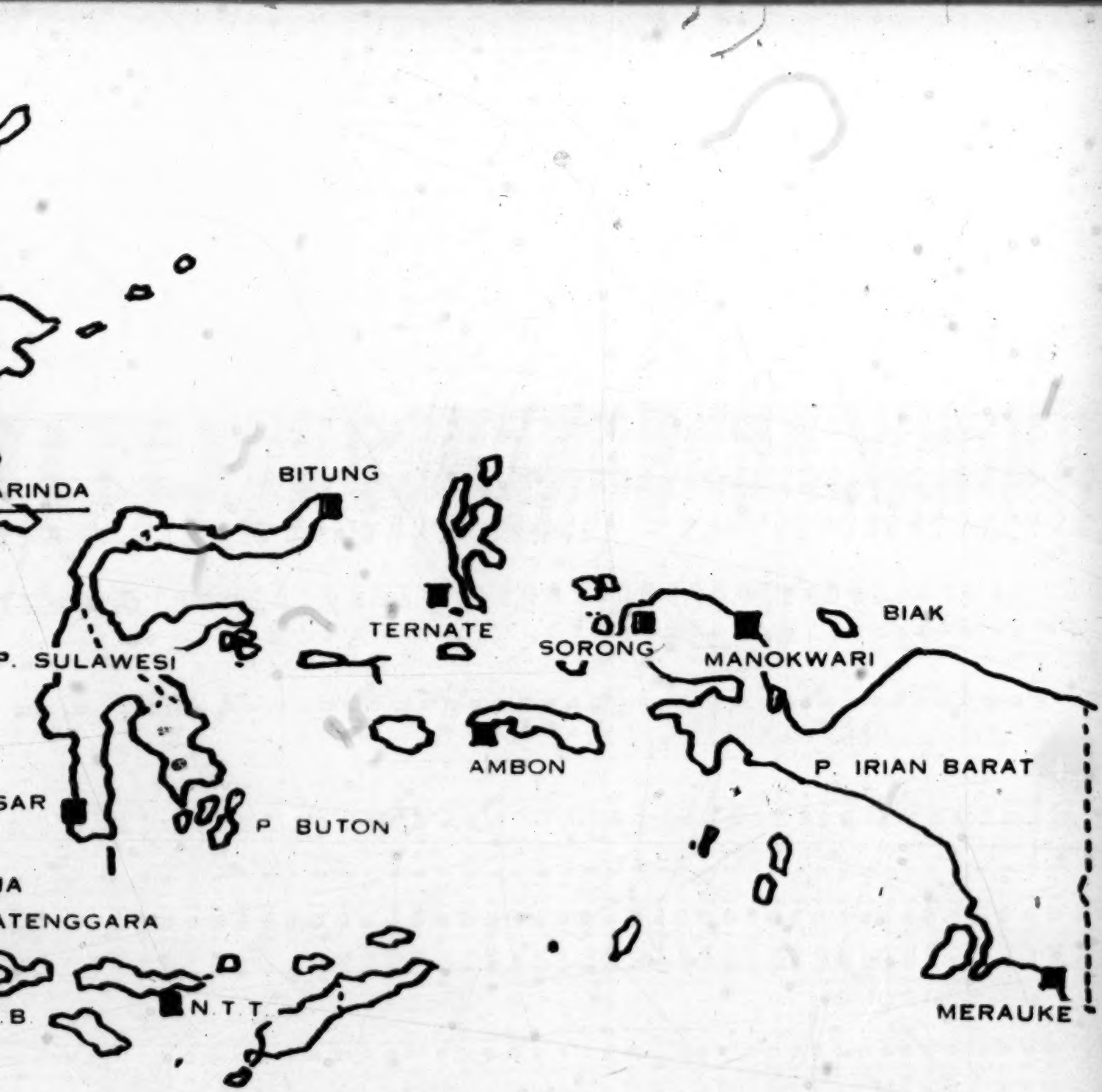

SUB SEKTOR: PERIKANAN

PERBAIKAN PELABUHAN PERIKANAN

LOKASI PROJEK
PERBAIKAN PELABUHAN PERIKANAN

ha atau 7 persen sadja dari seluruh luas hutan jang dapat diusahakan.

Dengan keadaan seperti ini, tidaklah mengherankan bahwa hingga kini sumbangan sektor kehutanan terhadap perekonomian Indonesia tidak pernah mempunjai arti besar dibandingkan dengan sumbangan sektor-sektor pertanian lainnja.

Antara 1960 dan 1965 tiap tahunnja produksi rata-rata kaju djati, kaju rimba dan hasil-hasil hutan lainnja adalah masing-masing sebesar 410.000 m^3, 1.600.000 m^3 dan 380.000 ton.

Produksi kaju djati dan kaju rimba selama masa 1955-1965 menurun dari 572.000 m^3 mendjadi 439.000 m^3 untuk kaju djati dan 1.151.000 m^3 mendjadi 1.113.000 m^3 untuk kaju rimba.

Penurunan produksi ini terutama disebabkan oleh terus makin memburuknja keadaan prasarana dan fasilitas-fasilitas penebangan didaerah-daerah produsen, kurangnja kapal-kapal pengangkut kaju, kurangnja keahlian dan pengalaman para pengusaha, dan keadaan perekonomian pada umumnja jang dibajangi oleh inflasi. Chusus hutan-hutan djati, penebangan jang melebihi batas pada zaman perang dunia kedua, menurunkan ukuran dan mutu kaju jang kini diperoleh. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa ada produksi hasil hutan jang tidak tertjatat (unrecorded-production) jang meliputi antara 2 sampai 3 djuta m^3 setahunnja.

Perkembangan ekspor kaju dari tahun 1960 sampai dengan 1965 dapat dilihat pada tabel VI-E-2 berikut ini :

TABEL VI-E-2

PERKEMBANGAN EKSPOR KAJU (1960 — 1965)

Tahun	Djati (ribuan m^3)	Rimba (ribuan m^3)	Nilai (djutaan dollar)
1960	13,0	113,4	1,8
1961	8,1	93,2	1,3
1962	4,4	113,5	1,0

1963	7,6	99,3	1,5
1964	10,3	63,2	1,8
1965	11,5	127,0	2,0

Dari angka-angka diatas djelas terlihat bahwa pengusahaan hutan di Indonesia baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor masih djauh dari taraf jang sepatutnja dapat ditjapai.

Untuk mendjaga kelestarian diperkirakan hutan produksi jang menurut taksiran berdjumlah 24 djuta ha itu akan dapat ditebang setjara selektif dengan rotasi kira-kira 60 tahun. Dengan demikian setiap tahunnja dapat ditebang kira-kira seluas 400 ribu ha. Bila dari tiap-tiap ha dapat dihasilkan 40 m^3 kaju bulat, maka tiap tahunnja akan dapat dihasilkan 16 djuta m^3. Kalau semua ini dapat diekspor maka nilai ekspor ditaksir setinggi 240 djuta dollar. Tentu sadja ini suatu taksiran jang kasar, karena mengandung asumsi bahwa seluruh hutan produksi dapat dieksploitir dan sebagian besar hasilnja dapat diekspor. Tetapi angka ini setidak-tidaknja memberikan kepada kita suatu gambaran kasar betapa besarnja potensi kekajaan hutan jang kita miliki.

Sebagai bahan perbandingan dapat dikemukakan bahwa Philipina dengan areal hutan tropis hanja seluas 13 djuta ha, pada tahun 1964 sanggup mengekspor hasil hutan seharga US $ 96 djuta, sedang Malaysia, dengan areal hutan seluas 25 djuta ha, pada tahun jang sama berhasil mengekspor kaju seharga US $ 60 djuta.

Mengenai rendahnja tingkat pemanfaatan hutan di Indonesia dapat diterangkan oleh faktor-faktor jang memang selalu mendjadi penghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Setjara garis besar, faktor-faktor penghambat itu adalah kurangnja modal, dan kurangnja keahlian serta pengalaman. Kurangnja modal ditjerminkan antara lain oleh kurangnja atau buruknja fasilitas-fasilitas perhubungan dan perkapalan, jang mengakibatkan tingginja biaja-biaja peng-

angkutan dari daerah-daerah produksi kedaerah-daerah konsumsi. Selandjutnja faktor penghambat lain adalah buruknja fasilitas-fasilitas djalan angkutan hasil hutan jang menghubungkan daerah produksi dan daerah penimbunan hasil-hasil hutan. Selain itu kurangnja didjalankan usaha-usaha survey dan research dalam bidang kehutanan djuga dapat menghambat usaha-usaha peningkatan produksi.

Kurangnja keahlian dan pengalaman ditjerminkan antara lain oleh sangat sedikitnja tenaga ahli dibidang kehutanan, sangat sedikitnja minat pengusaha nasional untuk berusaha dalam bidang pengolahan hutan setjara besar-besaran dengan menggunakan prinsip-prinsip civiculture modern, dan rendahnja produktivitas hutan-hutan jang diusahakan. Pada waktu ini salah satu tjara jang terbaik untuk mendapatkan modal dan keahlian serta pengalaman ialah dengan mengadakan kerdjasama dengan para penanam modal asing jang sudah lama berpengalaman dalam bidang pengolahan hutan-hutan tropis.

Sampai pada waktu ini diantara sekian banjak pengusaha-pengusaha asing jang berminat untuk mengadakan usaha-usaha kehutanan di Indonesia, sudah ada 25 unit perusahaan jang sudah mendapatkan Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan. Dari djumlah tersebut, 6 berbentuk "straight investment", 5 berbentuk "joint enterprise", 8 berbentuk "production sharing" dan 6 pengusaha nasional. Luas areal hutan jang termasuk dalam pengusahaan-pengusahaan hutan tersebut meliputi 2.445.000 ha. Djumlah seluruh modal jang akan ditanamkan adalah sekitar US $ 107,7 djuta dan Rp. 385 djuta.

Dengan ditempuhnja kebidjaksanaan untuk mengadakan kerdjasama internasional ini sudah dapat diharapkan bahwa dalam tahun-tahun kemudian produksi maupun ekspor kaju Indonesia akan naik dengan pesat.

Dengan bertambahnja aktivitas pengusahaan hutan diluar Djawa — jang terutama dikerdjakan oleh pihak asing — maka produksi kaju untuk tahun-tahun 1969-1973 diharapkan bergerak seperti terlihat pada tabel berikut ini :

TABEL VI-E-3

PRODUKSI KAJU 1969/70 — 1973/74

Tahun	Djati (1.000 m³)	Rimba (1.000 m³)
1969/70	400	2.500
1970/71	400	3.200
1971/72	400	4.200
1972/73	400	5.800
1973/74	400	7.500

Dengan tjara-tjara eksploitasi modern, ekspor kaju jang sekarang berdjumlah kurang lebih 500.000 m³ per tahun, dalam tahun 1969 diharapkan dapat mentjapai 1,2 djuta m³, dengan pertambahan 800.000 sampai dengan 1.000.000 m³ per tahun. Diharapkan dapat mentjapai djumlah 5 djuta m³ pada tahun terachir Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Perkembangan-ekspor tiap tahunnja dapat dilihat pada Tabel VI-E-4.

TABEL VI-E-4.

EKSPOR KAJU DAN HASIL HUTAN LAINNJA, 1969/70 — 1973/74

Tahun	Djati		Rimba		Hasil Hutan Lainnja (ton)	Djumlah Nilai ekspor (djuta $)
	Gergadjian (ribu m³)	Bulat (ribu m³)	Gergadjian (ribu m³)	Bulat (ribu m³)		
1969/70	12	12	4	1.200	73	28,5
1970/71	15	13	8	1.680	83	43,0
1971/72	20	14	12	2.460	69	58,0
1972/73	25	15	16	3.570	76	85,0
1973/74	35	16	20	5.000	76	120,0

Dengan kemungkinan didirikannja industri-industri jang berhubungan dengan hasil hutan (integrated industries) seperti veneer, plywood, kertas, rayon dan sebagainja maka peningkatan produksi kaju dengan sendirinja harus djauh melebihi djumlah-djumlah ekspor tersebut diatas.

Setjara garis besar, usaha-usaha jang akan dilakukan dalam bidang kehutanan dapat dibagi kedalam 5 kelompok besar, jaitu :

(1) inventarisasi dan perentjanaan hutan, dengan tudjuan memperoleh data jang lebih lengkap tentang segala sesuatunja mengenai hutan,
(2) peningkatan produksi dan ekspor kaju serta hasil-hasil hutan lainnja,
(3) pembinaan hutan untuk mendjaga kelestarian hutan agar produksi kaju dan hasil hutan lainnja jang meningkat dapat terdjamin sepandjang masa,
(4) pendidikan dan penjuluhan, dengan tudjuan untuk mempertinggi keahlian dan ketrampilan tenaga-tenaga kehutanan dan menanamkan pengertian jang mendalam kepada masjarakat akan pentingnja arti hutan untuk dibina dan dipelihara terus, dan
(5) penelitian, jaitu segala penelitian jang bertudjuan untuk menaikkan produksi dan ekspor.

Untuk dapat memperoleh data atau keterangan jang lebih sempurna mengenai letak, luas, djenis-djenis pohon, distribusi pohon, serta keterangan-keterangan lain jang penting, mengenai sumber-sumber kekajaan hutan setjara keseluruhan. Akan diusahakan inventarisasi, perentjanaan dan pengukuhan hutan-hutan. Selain itu usaha inipun dimaksudkan djuga untuk dapat menetapkan wilajah-wilajah tertentu sebagai kawasan hutan, dengan luas jang tjukup dan letak jang tepat (hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka atau hutan wisata). Untuk keperluan perentjanaan hutan nasional, usaha inventarisasi ini sangat diperlukan. Tanpa pengetahuan tjukup mengenai kekajaan hutan jang kita miliki, tak mungkinlah kita dapat

910087-(8).

membuat rentjana kerdja jang baik. Selandjutnja, pengetahuan ini penting djuga bagi kita dalam menghadapi para investor asing jang hendak membuka usaha-usaha kehutanan di Indonesia.

Selandjutnja untuk meningkatkan effisiensi tata-guna tanah akan diusahakan penentuan setjara macro penggunaan tanah ditiap bidang (kehutanan, pertanian, peternakan, pengairan dan sebagainja) dan setjara micro persjaratan tehnis, physis, ekonomis dan biologis pada tiap-tiap bidang.

Untuk memperbesar sumbangan sektor kehutanan kepada pembangunan ekonomi produksi, pengolahan dan effisiensi penanaman hasil-hasil hutan akan ditingkatkan. Termasuk dalam usaha-usaha ini rehabilitasi djalan-djalan angkutan hasil hutan (terutama diluar Djawa), effisiensi pemuatan kaju kekapal-kapal, penjusunan pedoman mengenai djenis-djenis ekspor, penertiban peladang-peladang liar diareal-areal hutan konsesi, penimbunan, pengolahan-pengolahan dan penggergadjian dan intensifikasi pengawasan projek-projek eksplorasi besar. Djuga akan dikembangkan produksi dan pemasaran hasil-hasil hutan bukan kaju seperti rotan, damar dan lain-lain.

Selandjutnja untuk mengembangkan hasil-hasil hutan tertentu seperti sutera alam, kaju putih, lak, kaju hitam dan lemak tengkawang akan dibina hutan-hutan serbaguna. Demikian pula industri hasil hutan akan dibina dan dikembangkan seperti industri pengolahan papan buatan, cello crete, veneer, plywood dan seterusnja.

Untuk menanamkan atau mempertebal pengertian kepada masjarakat, terutama jang tinggal disekitar hutan akan arti pentingnja hutan untuk dibina dan dipelihara terus akan diintensifkan kegiatan-kegiatan penjuluhan kehutanan. Selandjutnja untuk memberikan landasan, bantuan dan bimbingan serta arah kepada setiap kegiatan kehutanan akan diusahakan penelitian-penelitian kehutanan. Dalam hubungan ini mutu pengetahuan karjawan kehutanan akan ditingkatkan untuk meningkatkan effisiensi usaha mereka.

Bimbingan tehnis, administratif dan pengawasan kepada projek-projek pembangunan diperlukan untuk mentjegah penjelewengan-penjelewengan, kesalahan-kesalahan dan penjalah gunaan. Karenanja bimbingan dan pengawasan tersebut akan diintensifkan dengan djalan pembinaan-pembinaan dasar-dasar hukum kehutanan, peningkatan effisiensi pelaksanaan, pemeriksaan lapangan dan sebagainja. Selandjutnja pengawasan djuga akan diintensifkan untuk melindungi binatang-binatang liar dan pemandangan-pemandangan indah dari usaha-usaha pemusnahan dan pengrusakan oleh manusia.

Biaja dan anggaran pembangunan untuk program peningkatan produksi hasil kehutanan dan pembinaan hutan diperkirakan sebesar 10 miljar rupiah dalam lima tahun dan 601,5 djuta rupiah dalam tahun 1969/70.

Program tersebut dapat dibagi-bagi dalam projek antara lain seperti berikut :

1. Projek inventarisasi dan perentjanaan hutan nasional.
2. Projek peningkatan effisiensi tata-guna tanah.
3. Projek pengukuhan dan penataan hutan negara.
4. Projek pembinaan hutan serba-guna.
5. Projek peningkatan produksi dan pengolahan kaju.
6. Projek peningkatan produksi dan pengolahan kaju djati.
7. Projek peningkatan produksi dan pengolahan hasil hutan bukan kaju.
8. Projek pembinaan dan pengembangan industri hasil hutan.
9. Projek penjuluhan kehutanan.
10. Projek pengamanan suaka alam dan hutan wisata.
11. Projek pendidikan kehutanan.
12. Projek pengawasan pembangunan kehutanan.
13. Projek pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan.

Untuk masing-masing projek tersebut, harus diadakan persiapan-persiapan jang didasarkan pada penelitian dan perhi-

tungan jang tepat. Bilamana ternjata bahwa sesuatu projek kurang dapat dipertanggung-djawabkan, maka sudah barang tentu projek tersebut tidak akan dilaksanakan. Dalam hubungan ini penting sekali peranan survey dan penelitian jang kemudian mendjadi dasar daripada penjesuaian-penjesuaian dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang dilakukan setiap tahun dan bagi penjusunan rentjana-rentjana tahunan.

F. PETERNAKAN

Hasil-hasil bidang peternakan seperti susu, daging dan telur termasuk golongan pangan jang mempunjai nilai gizi jang terbaik. Mereka merupakan sumber-sumber protein hewani jang diperlukan dalam djumlah-djumlah jang wadjar untuk mendjamin djasmani jang sehat. Selain itu ternak besar masih diperlukan dalam proses produksi pangan jang lain jaitu pada waktu penggarapan-penggarapan tanah untuk menarik luku dan garu. Diperkirakan bahwa lebih kurang 15 persen dari biaja rata-rata penggarapan sawah digunakan untuk menjewa ternak besar.

Djumlah dan djenis ternak jang terdapat di Indonesia dapat dilihat pada Tabel VI-F-1.

TABEL VI-F-1

DJUMLAH DAN DJENIS TERNAK DI INDONESIA, 1967
(djuta ekor)

Djenis	Djawa	Luar Djawa	Djumlah
Sapi	4,60	2,24	6,84
Kerbau	1,50	1,26	2,76
Kuda	0,16	0,46	0,52
Babi	0,16	2,40	2,56
Kambing	5,50	1,63	7,13
Domba	3,52	0,17	3,69
Ajam	41,27	23,57	64,84

Berdasar angka-angka jang dapat dikumpulkan selama masa 1961-1967, ketjuali untuk djenis sapi dan domba, populasi segala djenis ternak menurun. Populasi ajam misalnja menurun dengan 1,15 persen, sedangkan untuk babi, kambing dan kerbau masing-masing menurun dengan 3,16 persen, 1,89 persen dan 1,79 persen. Penurunan populasi terdjadi berhubung tingkat kelahiran tidak dapat mengimbangi tingkat kematian dan tingkat konsumsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel VI-F-2.

TABEL VI-F-2

TINGKAT PRODUKSI, KONSUMSI DAN KEMATIAN, 1967

(dalam persen)

Djenis ternak	Tingkat Penambahan	Tingkat kelahiran	Tingkat kematian	Tingkat konsumsi-potongan
Sapi	+ 0,80	16,05	1,97	13,28
Kerbau	— 1,79	16,43	5,23	12,99
Kambing	— 1,89	31,00	4,03	28,86
Domba	+ 0,40	24,02	3,10	20,52
Babi	— 3,16	45,40	14,49	34,17
Ajam	— 1,18	63,00	33,00	31,18

Permasalahan jang dihadapi bidang peternakan tidak sedikit. Pertama-tama pada saat sekarang belum ada benih unggul dibidang produksi telur dan susu. Djenis ajam jang sekarang hanja menghasilkan antara 50-60 butir telur setahun. Dibandingkan dengan negara-negara lain hasil ini sangat rendah. Djenis sapi asli kita, sapi Bali (bentuk liarnja, banteng), pada dasarnja bukanlah djenis sapi perah. Djenis sapi lainnja jang kita miliki sekarang, ialah djenis Ongole (sapi „Benggala"), terdapat di Djawa Timur dan pulau Sumba. Djenis ini hanja

menghasilkan sekitar 1-3 liter air susu seharinja, meskipun setjara relatif dibandingkan dengan sapi Bali, sapi Ongole ini lebih mempunjai dasar sebagai sapi perah.

Permasalahan kedua ialah kenjataan bahwa lembaga-lembaga perkreditan kita masih belum berfungsi sebagai pelantjar usaha dibidang peternakan, seperti halnja telah berlangsung pada bidang pertanian lainnja.

Ketiga, tingkat kematian oleh penjakit, relatif agak tinggi, terutama pada ajam. Setiap tahun praktis sepertiga dari populasi ajam kita mati karena diserang penjakit tetelo.

Keempat, persediaan rumput serta hasil sisa palawidja merupakan faktor pembatas (limiting-factor) untuk perkembangan ternak di Djawa-Madura, serta kepulauan Nusantara Timur. Walaupun usaha intensifikasi pertanian di Djawa memang akan meningkatkan palawidja namun hal ini tidak akan mengimbangi peningkatan populasi ternak. Dewasa ini populasi ternak pulau Djawa telah mentjapai maksimum, ditindjau dari segi daja persediaan makanan ternak. 66 persen dari seluruh populasi ternak berada dipulau Djawa. Dilain fihak terdapat wilajah atau pulau-pulau jang praktis kosong-ternak, misalnja Kalimantan, kepulauan Maluku, dan Irian. Kepadatan ternak dipulau-pulau ini, sekitar 0,16 unit ternak/km^2, sedangkan di Djawa 59/km^2.

Kelima, perangsang produksi kurang besar karena permintaan masih agak rendah, dan masih lemahnja permodalan.

Dapat diperkirakan bahwa dengan berhasilnja pembangunan ekonomi konsumsi hasil-hasil peternakan akan meningkat dengan lebih tjepat daripada waktu-waktu jang lampau.

Untuk memenuhi peningkatan permintaan ini dan sesuai dengan usaha-usaha peningkatan mutu gizi pola konsumsi rakjat Indonesia produksi susu, daging, dan telur akan ditingkatkan. Sasaran produksi untuk lima tahun jang akan datang dapat dilihat pada Tabel VI-F-3.

TABEL VI-F-3

PERKIRAAN PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU, 1969/70 — 1973/74

(djuta kg)

Tahun	Daging	Telur	Susu
1969/70	321,70	37,52	67,32
1970/71	396,25	52,40	83,49
1971/72	425,65	76,40	108,57
1972/73	472,05	96,56	157,41
1973/74	539,50	120,96	167,97

Untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas dan berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, maka langkah-langkah serta kebidjaksanaan jang akan diambil adalah sebagai berikut. Pertama akan diusahakan keserasian operasionil jang meliputi integrasi dan synkronisasi antara pengamanan ternak, pengendalian penjakit, pengadaan bibit-bibit unggul, perbaikan dan perluasan fasilitas kredit serta penjuluhan jang effisien. Usaha-usaha ini akan dilaksanakan melalui program Bimas-Peternakan. Sarana utama jang diperlukan ialah djenis-djenis vaksin S.E., Anthrax Beutvuur dan N.C.D. Untuk memenuhi permintaan jang meningkat, produksi vaksin-vaksin tersebut akan ditingkatkan. Diharapkan dengan program ini kematian pada ternak, terutama ajam, menurun.

Bibit unggul djenis ajam dan sapi perah masih harus diimpor dalam empat tahun pertama. Penjebaran bibit-bibit ini akan dilaksanakan melalui program Bimas-Peternakan.

Usaha-usaha lembaga-lembaga penelitian peternakan akan ditudjukan untuk memperoleh bibit unggul sehingga tidak usah diimpor lagi. Selain itu usaha-usaha penelitian ditudjukan kepada pembuatan vaksin jang lebih baik, lebih ekonomis dan lebih kebal dari vaksin jang lama.

Disamping itu akan dipeladjari kemungkinan pembuatan antibiotika dan tjara-tjara jang lebih baik dalam usaha pentjegahan dan pemberantasan penjakit ternak. Usaha penelitian lain ialah pengumpulan data dasar mengenai peternakan untuk dipakai sebagai landasan perentjanaan selandjutnja. Akan diteliti pula kemungkinan-kemungkinan untuk mempersilangkan ternak di Indonesia dengan ternak luar negeri.

Produksi hasil-hasil peternakan akan ditingkatkan melalui pemberian perangsang jang tjukup pada pengusaha-pengusaha melalui perluasan pasaran dalam negeri dan ekspor. Dengan diadakannja perbaikan-perbaikan dibidang prasarana maka perdagangan peternakan antar pulau diharapkan bertambah luas, sedangkan dengan bertambah baiknja pelabuhan-pelabuhan dan perhubungan dengan pasaran ternak diluar negeri, ekspor akan meningkat. Dalam hal ini swasta menengah akan diandjurkan untuk turut serta dalam usaha peternakan. Andjuran ini akan dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan fasilitas-fasilitas lain.

Selandjutnja direntjanakan untuk mengusahakan pemindahan ternak dari daerah padat-ternak kedaerah-daerah kosong-ternak melalui pengembangan daerah-daerah ternak didaerah-daerah terachir dan pemberian fasilitas-fasilitas seperlunja.

Untuk meningkatkan keahlian dibidang ini pendidikan peternakan akan diintensifkan sedangkan pada karjawan-karjawan dan petugas-petugas akan diadakan perdjendjangan setjara berkala.

Biaja anggaran untuk program peningkatan produksi hasil-hasil peternakan diperkirakan sebesar 10 miljar dalam lima tahun dan 245 djuta rupiah untuk tahun 1969/70. Program ini dapat dibagi dalam projek-projek antara lain seperti berikut:

1. Projek Pemasaran dan Pengolahan,
2. Projek Industri Perobatan dan Instrumentaria,
3. Projek Pengamanan Ternak,
4. Projek Bimas Peternakan,

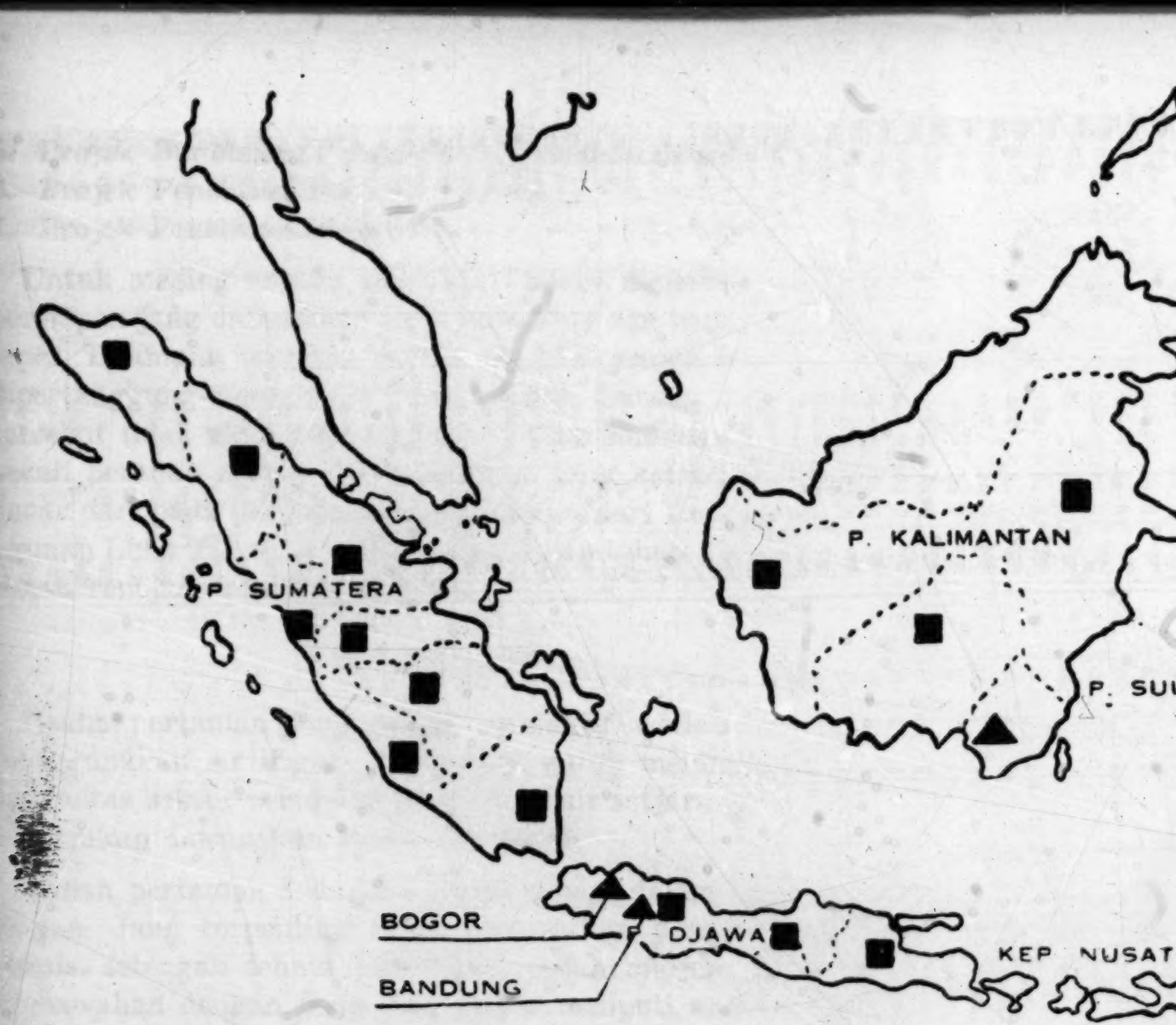

■ PENINGKATAN PROD /PENGOLAHAN HASIL HUTAN & KAJU

▲ PENGEMBANGAN INDUSTRI HASIL HUTAN

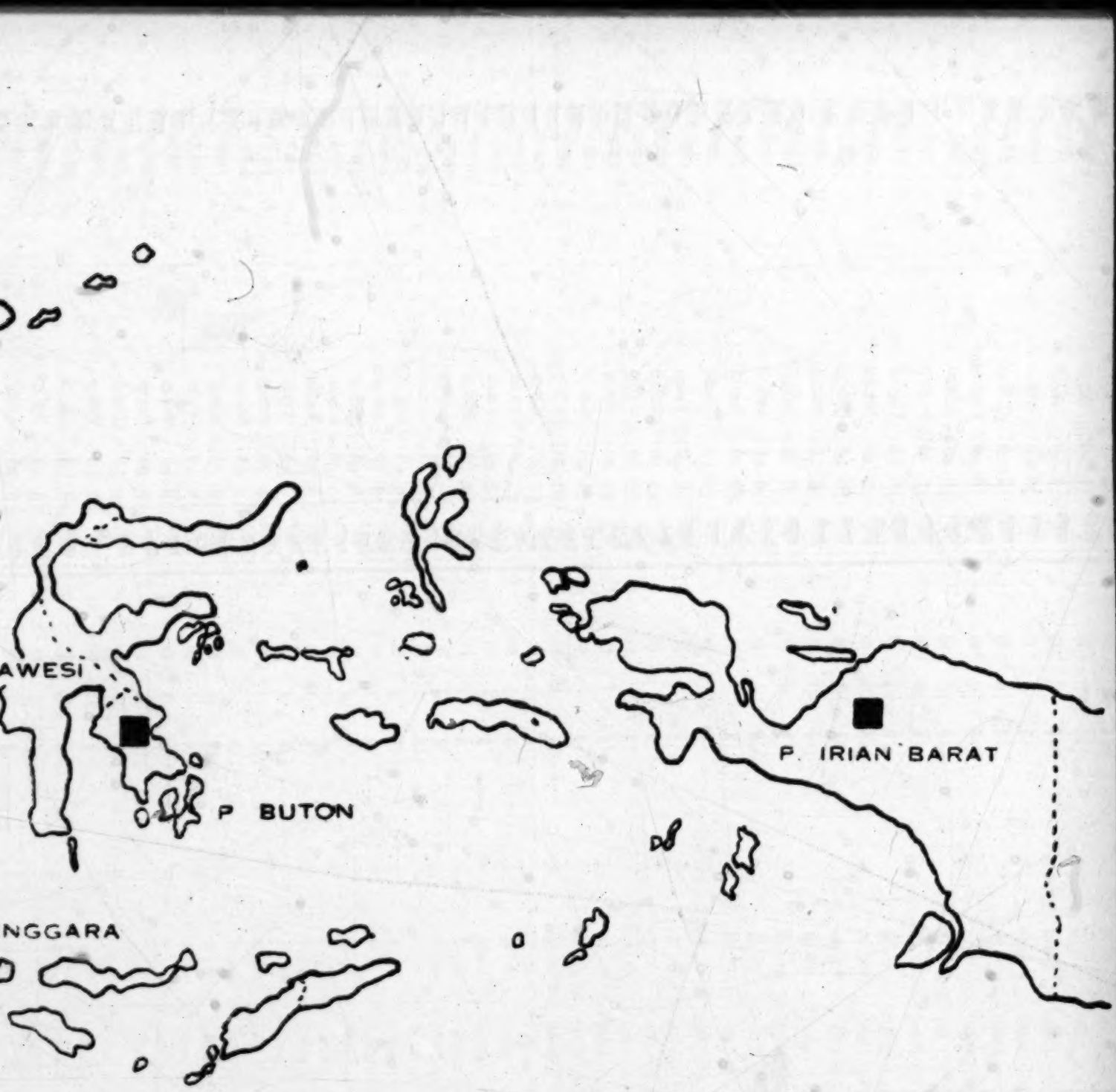

SUB SEKTOR: KEHUTANAN

PENINGKATAN PRODUKSI &
PENGOLAHAN HASIL HUTAN

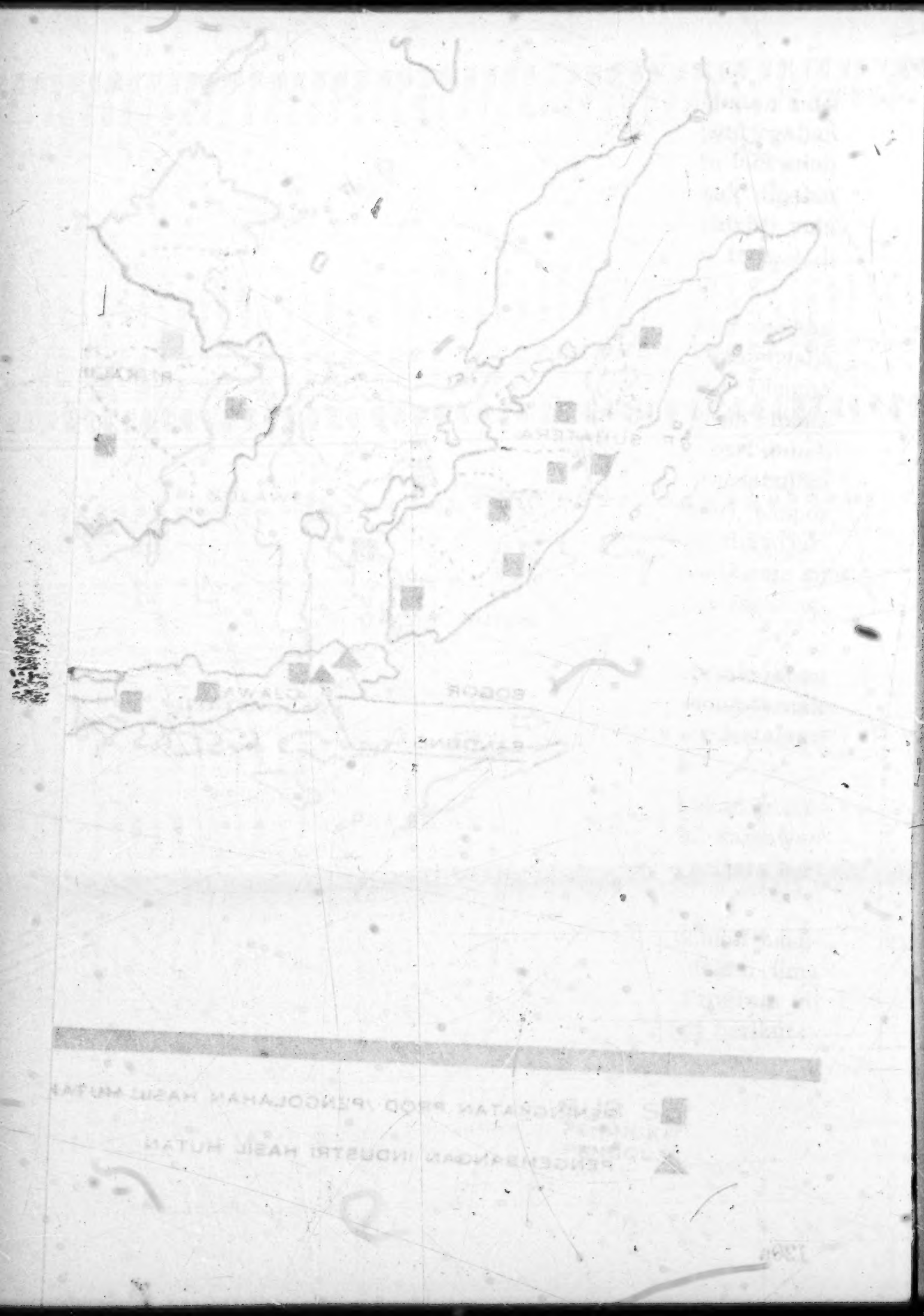

5. Projek Bimbingan Pengusaha Peternakan Swasta Menengah,
6. Projek Penelitian Penjakit Ternak,
7. Projek Penelitian Peternakan.

Untuk masing-masing projek ini harus diadakan persiapan-persiapan jang didasarkan pada penelitian dan perhitungan jang tepat. Bilamana ternjata bahwa sesuatu projek kurang dapat dipertanggung-djawabkan maka sudah barang tentu projek tersebut tidak akan dilaksanakan. Dalam hubungan ini penting sekali peranan survey dan penelitian jang kemudian mendjadi dasar dari pada penjesuaian-penjesuaian dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang dilakukan setiap tahun dan bagi penjusunan rentjana-rentjana tahunan.

G. IRIGASI *)

Usaha pertanian jang paling produktif adalah usaha jang menggunakan air irigasi. Karenanja untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian pengadaan air setjara tepat, teratur dan tjukup merupakan suatu keharusan.

Tanah pertanian Indonesia dapat dibagi dalam beberapa golongan. Jang terpenting ialah persawahan dengan pengairan tehnis, setengah tehnis, sederhana, tadah hudjan, dan ladang. Persawahan dengan pengairan tehnis meliputi areal seluas 1,7 djuta ha, sedangkan persawahan dengan pengairan setengah tehnis dan pengairan sederhana masing-masing meliputi areal seluas 760.000 ha dan 1,3 djuta ha. Areal persawahan tadah hudjan diperkirakan seluas 1,2 djuta ha.

Dari sekian banjaknja djenis pengairan jang paling produktif adalah persawahan dengan pengairan tehnis, setengah tehnis dan sederhana. Diwaktu-waktu jang lampau produktivitas tanah pengairan menundjukkan suatu kemunduran. Hal ini dapat dilihat dari lambatnja peningkatan hasil-hasil padi per ha. Sebagaimana diketahui hasil rata-rata tersebut selama 15 tahun

*) Dalam pengertian irigasi telah tertjakup pula usaha pengendalian bandjir dan pengembangan daerah-daerah rawa.

jang terachir hanja meningkat dengan 0,4 persen setahunnja. Meskipun ada faktor-faktor lain jang mengakibatkan kelambatan tersebut, kemerosotan keadaan sistim pengairan merupakan faktor utama. Jang terachir ini djuga ditjerminkan oleh luas panenan padi di Djawa jang menundjukkan trend menurun sebesar 0,4 persen tiap tahunnja. Ini merupakan indikasi bahwa tanah pengairan jang tadinja digunakan untuk menanam padi setjara berangsur-angsur digunakan untuk tanaman-tanaman lain seperti palawidja jang tidak membutuhkan air sebanjak padi. Luas panenan palawidja meningkat dengan 2 sampai 3 persen setahunnja.

Kemerosotan keadaan sistim irigasi disebabkan karena banjak faktor. Faktor utama ialah tidak adanja pemeliharaan diwaktu-waktu jang lampau. Ini disebabkan karena kekurangan pembiajaan dan tidak adanja perhatian dan kesadaran dari pimpinan negara diwaktu-waktu jang lampau. Salah urus ini mengakibatkan sebagian besar dari saluran-saluran primer dan sekunder dangkal dan rusak serta menimbulkan kerusakan-kerusakan jang berarti pada bangunan-bangunan air. Kerusakan-kerusakan ini merupakan penghalang-penghalang tehnis bagi saluran-saluran untuk melaksanakan fungsinja jaitu mengantarkan air kesawah-sawah dan saluran pembuang.

Ketidak-sempurnaan ini mengakibatkan mundurnja kapasitas saluran sampai 50 persen dari keadaan normal, sedangkan kehilangan airnja meningkat dengan 2-3 kali daripada biasa. Akibatnja areal persawahan jang dapat air setjara teratur berkurang. Sebaliknja pada musim-musim hudjan, karena kedangkalan saluran utama dan kerusakan bangunan air, luas persawahan jang diserang bandjir meningkat. Tambahan pula petani-petani mendjadi segan memelihara saluran-saluran tertiair jang memperbesar effek-effek negatif tersebut diatas.

Produktivitas sistim pengairan menurun djuga karena erosi jaitu hilangnja tanah jang subur didaerah-daerah pengairan sungai (catchment area) jang dibawa hanjut oleh air hudjan jang djatuh dilereng-lereng gunung. Erosi ini mengakibatkan

kedangkalan-kedangkalan sungai dan jang menimbulkan bandjir pada musim hudjan. Erosi ini tak lain disebabkan karena penggundulan hutan-hutan pelindung (protective forests) oleh golongan-golongan jang tidak bertanggung-djawab. Tambahan pula pengerukan selama sepuluh/lima belas tahun jang lalu berhenti sama sekali, sehingga kedangkalan sungai dan saluran sudah mentjapai titik maximum. Ditaksir bahwa untuk mengembalikan keadaan sungai dan saluran mendjadi normal kembali 60 djuta m^3 endapan-endapan harus dipindahkan.

Selama ini tata pengaturan air berada dibawah tanggung-djawab beberapa instansi. Akibatnja pemeliharaan pengairan tidak efektif. Demikian djuga usaha-usaha pengluasan mendapat hambatan-hambatan jang berat karena simpang-siurnja pendapat dan usaha instansi-instansi jang berwenang.

Dalam menghadapi permasalahan diatas dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahap pertama ini diusahakan rehabilitasi sistim pengairan setjara besar-besaran, pengendalian erosi dan bandjir serta perbaikan dan perobahan-perobahan dibidang tata-pengaturan (water management). Selandjutnja untuk menanggulangi masalah pangan dan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian akan diusahakan djuga perluasan djaringan-djaringan irigasi.

Sasaran rehabilitasi sistim pengairan meliputi 830.000 ha sedangkan sasaran perluasan pengairan tehnis adalah 430.000 ha. Dengan tertjapainja sasaran tersebut luas persawahan dengan pengairan tehnis meningkat mendjadi 2,1 djuta ha sedangkan luas persawahan tanah hudjan menurun mendjadi 1 djuta ha. Untuk memungkinkan tertjapainja sasaran produksi padi tahun 1973/74 perbaikan dan perluasan sistim irigasi harus sudah terlaksana sebelum achir tahun 1972, sehingga luas tanah tersebut diatas dapat digunakan pada musim rendengan 1972/73.

Dibidang pentjegahan erosi akan diusahakan penghutanan kembali, pentjegahan penebangan hutan setjara tidak berentjana, usaha-usaha penanaman daerah-daerah kritis dengan grond bedekkers jang dapat menahan erosi, usaha-usaha dalam

rangka contour farming dan pembuatan bangunan-bangunan penahan erosi seperti check-dams, consolidation dams dan beteugelingswerken lainnja. Dalam rangka usaha pengendalian bandjir diusahakan djuga perbaikan dan pengaturan sungai.

Untuk mentjapai suatu tata-pengaturan air jang lebih efisien akan ditentukan satu instansi sadja jang bertanggung-djawab mengenai hal ini, jakni Direktorat Djenderal Pengairan dari Departemen P.U.T. Instansi tunggal ini tentunja harus bermusjawarah dengan para pemakai air, dengan desa jang bersangkutan jang mengatur djaringan tertiair dan dengan instansi-instansi jang memberi bimbingan kultur-tehnis. Dengan demikian dapat terdjamin penggunaan air jang effisien dan sesuai dengan tata-tanam.

Adapun tidak adanja pemeliharaan dan lambatnja perluasan-perluasan disebabkan karena struktur pembiajaan jang tidak wadjar. Akan digariskan suatu kebidjaksaan pembiajaan dimana Pemerintah baik Pusat maupun Daerah akan membiajai usaha-usaha pembangunan-pembangunan baru, perbaikan serta penjempurnaan sistim irigasi. Tetapi biaja pemeliharaan dan eksploitasi untuk sebagian besar harus dibiajai oleh bagian masjarakat jang mendapat manfaat dan hasil dari adanja djaringan-djaringan irigasi jang dibangun atas biaja Pemerintah. Pembuatan saluran-saluran tertiair harus diusahakan sendiri oleh para pemilik sawah jang akan menerima air, ketjuali djika ada bangunan-bangunan tertiair jang amat berat pembangunannja atau rehabilitasinja. Dalam hal ini Pemerintah akan membantu pembiajaannja.

Pembangunan djaringan-djaringan irigasi jang mengairi daerah persawahan jang tidak luas (lebih ketjil dari 500 ha) dan hanja mempunjai pengaruh lokal (jang biasanja disebut Pengairan Desa), harus diusahakan oleh Pemerintah Daerah dan dimana perlu dengan bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk bantuan tehnis dari dinas-dinas jang bersangkutan.

Usaha lain jang akan dilaksanakan dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini ialah menjempurnakan aparatur penelitian dan perentjanaan dibidang pengairan. Tudjuan dari

usaha ini ialah meningkatkan kemampuan aparatur tersebut untuk menjiapkan dan melaksanakan projek-projek jang sehat dengan menjediakan data jang diperlukan.

Dalam melaksanakan projek-projek pengairan, terutama rehabilitasi sistim pengairan, chususnja didaerah-daerah jang padat penduduknja, maka akan dimanfaatkan sepenuhnja pengembangan projek-projek padat karya. Hal ini bukan sadja mengurangi biaja tetapi djuga akan memberikan kesempatan bekerdja jang sangat luas.

Untuk mentjapai tudjuan-tudjuan tersebut diatas, usaha-usaha jang bersangkutan dapat dikelompokkan dalam program penjelamatan tanah dan air, program perbaikan dan pengaman-an sungai, program perbaikan irigasi, program perluasan irigasi dan program pembangunan irigasi lainnja. Tiap program ini dapat dibagi dalam projek-projek sebagaimana tertjantum dalam Tabel VII-G-1. Untuk masing-masing projek ini harus diadakan persiapan-persiapan jang didasarkan pada penelitian dan perhitungan jang tepat. Bilamana ternjata bahwa sesuatu projek kurang dapat dipertanggung-djawabkan maka sudah barang tentu projek tersebut tidak akan dilaksanakan. Dalam hubungan ini penting sekali peranan survey dan penelitian jang kemudian mendjadi dasar daripada penjesuaian-penjesuaian dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang dilakukan setiap tahun dan bagi penjusunan rentjana-rentjana tahunan.

Biaja anggaran jang diperlukan untuk program-program tersebut diatas diperlukan sebesar 236 miljar rupiah dalam lima tahun dan 25,9 miljar rupiah dalam tahun 1969/70.

TABEL VI-G-1

PROJEK-PROJEK PENGAIRAN

1. **Program Penjelamatan Tanah dan Air :**

— Projek Reboisasi, Projek Rehabilitasi Kehutanan Daerah Gunung Agung dan Gunung Kidul, Projek Rehabilitasi Kehutanan Daerah Aliran Kali Brantas, Bengawan Solo dan Kali Madiun, Projek Rehabilitasi Daerah-daerah Aliran Su-

ngai dan Tanah Kritis, Projek Pengaruh Perladangan terhadap Tanah dan Air.

2. **Program Perbaikan dan Pengamanan Sungai.**

3. **Program Perbaikan Irigasi :**

— Projek Rentang, Projek Tjisadane, Projek Semarang Timur, Projek Way Seputih, Projek Gambirsari dan Pesanggrahan, Projek Delta Brantas, Projek Karanganjar dan Projek-projek Rehabilitasi lainnja tersebar diseluruh Indonesia.

4. **Program Perluasan Irigasi :**

— Projek Krueng Djrue, Projek Krueng Baro, Projek Punggur Utara, Projek Djatiluhur, Projek Tadjum, Projek Sempor, Projek Kelara, Projek Sadang, Projek Gumbasan, Projek Dumaga, Projek Palasari, Projek Kali Bawang, Projek Way Djepara, Projek Way Umpu, Projek Way Panggubuan, Projek Air Beliti, Projek Sampean Baru, Projek Teluk Lada, Projek Tjiletuh, Projek Tjipamingkis, Projek Tjikunten II, Projek Pemali Tjomal, Projek Tjiudjung, Projek Tjidurian.

5. **Program Pembangunan Irigasi Lain :**

— Projek Pengairan Pasang Surut, Projek Serba-Guna Kali Brantas, Projek Pengembangan Daerah Rawa-rawa (jang bukan pasang-surut), Projek Survey dan Perentjanaan Pengembangan Wilajah Sungai, Projek Pengembangan Wilajah Sungai, Projek Pengembangan Wilajah Bengawan Solo, Tjitanduj dan Luwu, Projek Perbaikan Keadaan Danau, Projek Perbaikan dan Penanggulangan akibat Bentjana Alam, Projek Perakitan dan Perbaikan Kapal Keruk, Projek Pengukuran Topografi dan Perentjanaan Irigasi, Projek Pengendalian Bandjir Djakarta Raya.

Program Penjelamatan Tanah dan Air:

Tudjuan utama dari program ini ialah mentjegah kerusakan tanah dan air karena bandjir dan erosi serta memperbaiki keadaan tanah tandus dengan djalan reboisasi dan penghidjauan.

Berdasarkan laporan-laporan jang diperoleh luas tanah kosong dalam kawasan hutan pada tahun 1964 adalah 441.000 ha di Djawa dan 14 djuta ha diluar Djawa. Dapat diduga bahwa luas areal tersebut lebih besar pada tahun 1968. Luasnja tanah kosong ini disebabkan karena penggundulan hutan, penggembalaan liar dan pembakaran hutan. Tanah-tanah kosong terutama jang ada didaerah pegunungan setjara langsung dapat mengakibatkan timbulnja bentjana alam seperti bandjir, erosi dan keringnja mata air.

Hal ini tidak boleh dilandjutkan karena membahajakan usaha-usaha peningkatan produktivitas sektor pertanian. Karenanja dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahap pertama akan diusahakan penghidjauan kembali dengan memberikan prioritas pada daerah kritis, seperti Daerah Aliran Kali Brantas, Bengawan Solo, Kali Madiun dan lain-lain.

Untuk memungkinkan tertjapainja taraf effisiensi jang optimum diperlukan perbaikan-perbaikan dalam prasarana usaha-usaha tersebut, jang meliputi pengukuhan hutan-hutan negara dan suatu survey untuk mengetahui pengaruh perladangan terhadap tanah dan mata air.

Biaja untuk pelaksanaan program ini diperkirakan sebesar 7 miljar rupiah dalam lima tahun dan 435 djuta rupiah dalam tahun 1969/70. Program ini dapat dibagi dalam projek-projek antara lain seperti dibawah ini :

1. Projek Reboisasi.
2. Projek Rehabilitasi Kehutanan Daerah Gunung Agung dan Gunung Kidul.
3. Projek Rehabilitasi Kehutanan Daerah Aliran Kali Brantas, Bengawan Solo dan Kali Madiun.
4. Projek Rehabilitasi Daerah-daerah Aliran Sungai lainnja dan Tanah Kritis.
5. Projek Pengaruh Perladangan terhadap Tanah dan Tata Air.

Program Perbaikan dan Pengamanan Sungai.

Tudjuan program ini ialah pengendalian dan pentjegahan bandjir. Untuk mentjapai tudjuan ini akan diusahakan perbaikan-perbaikan tanggul, tidak sadja bentuk dan konstruksinja, tetapi djuga letaknja. Selandjutnja akan diusahakan djuga penjodetan-penjodetan (shortcuts) untuk menghilangkan belokan-belokan sungai (meanderen), sehingga dengan demikian air akan mengalir dengan lebih lantjar. Untuk memperlantjar pembuangan serta aliran air jang menghindarkan „opstuwing" direntjanakan perbaikan keadaan muara-muara sungai melalui pengerukan-pengerukan.

Usaha-usaha tersebut diatas diperlukan karena keadaan sungai, terutama dipulau Djawa, pada waktu ini sudah amat membahajakan. Tambahan pula bangunan-bangunan pengatur bandjir sudah tidak tjotjok lagi dengan keadaan sungai sekarang. Berbarengan dengan usaha-usaha tersebut akan dimulai usaha-usaha pentjegahan dan pengendalian erosi setjara besar-besaran melalui penghidjauan tanah-tanah kosong. Selama kita belum bisa menguasai penjebab-penjebab utama dari bandjir ini, maka usaha-usaha tersebut diatas masih bersifat meredakan akibat bandjir atau memperketjil areal jang dapat diserang bandjir.

Selama lima tahun jang akan datang usaha-usaha dibidang ini akan dititik-beratkan pada daerah-daerah kritis. Biaja jang diperkirakan untuk lima tahun adalah sebesar 20 miljar rupiah. Sebagian daripadanja akan disediakan dalam bentuk valuta asing. Untuk tahun 1969 akan disediakan dana sebesar 1,6 miljar rupiah dari anggaran pembangunan.

Program Perbaikan Irigasi.

Guna mendjamin berhasilnja usaha peningkatan produksi beras keadaan djaringan-djaringan irigasi harus berada dalam keadaan jang sempurna dan effisien. Sebagaimana diketahui keadaan djaringan-djaringan irigasi sekarang berada dalam keadaan jang parah. Keadaan jang demikian pada waktu-waktu

jang lampau merupakan penghambat utama dari usaha-usaha peningkatan produksi pangan.

Saluran primer, sekunder, tertier serta saluran-saluran pembuang, dan bangunan-bangunan air akan diperbaiki sehingga mereka dapat berfungsi setjara normal kembali. Pada tahap pertama perbaikan-perbaikan ini akan meliputi 250.000 ha persawahan dengan pengairan setengah tehnis dan 580.000 ha dengan pengairan tehnis. Perbaikan ini harus sudah selesai sebelum achir tahun 1972 sehingga areal ini dapat digunakan untuk memproduksi beras pada musim rendengan 1972/73.

Berbarengan dengan perbaikan-perbaikan ini akan diusahakan djuga perobahan pada tata pengaturan air, sebagaimana dibahas diatas, untuk memungkinkan pemeliharaan setjara kontinue serta eksploitasi dan penggunaan air setjara efektif.

Biaja jang diperlukan untuk mentjapai target pada achir Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini ialah sebesar 70 miljar rupiah. Untuk tahun fiskal 1969/70 akan disediakan anggaran sebesar 7,6 miljar rupiah. Sebagian dari dana-dana ini akan diperlukan dalam bentuk valuta asing.

Program ini dapat dibagi dalam projek antara lain sebagai berikut :

1. Projek Rentang.
2. Projek Tjisadane.
3. Projek Semarang Timur.
4. Projek Way Seputih.
5. Projek Gambarsari dan Pasanggrahan.
6. Projek Delta Brantas.
7. Projek Karanganjar.
8. Projek Rehabilitasi lainnja tersebar diseluruh Indonesia.

Program Perluasan Irigasi

Sebagaimana diketahui ada 1,2 djuta ha areal persawahan tadah hudjan jang tersebar diseluruh Indonesia. Produktivitas dari persawahan ini adalah rendah djika dibandingkan dengan persawahan dengan pengairan tehnis.

910087-(9).

Hasil rata-rata padi pada sawah tadah hudjan adalah 32 persen dari hasil rata-rata persawahan dengan pengairan tehnis. Karenanja konversi sawah tadah hudjan mendjadi sawah dengan pengairan tehnis setjara langsung akan meningkatkan produktivitas areal tersebut. Direntjanakan 150.000 ha sawah tadah hudjan akan dirobah mendjadi sawah dengan pengairan tehnis.

Disamping persawahan tadah hudjan ada tanah pertanian lain jang terdiri dari tanah-tanah kering. Tanah-tanah ini terutama terletak diluar pulau Djawa. Telah diketahui daerah-daerah tertentu jang dapat dibangun saluran irigasi dengan mudah dan tjepat, misalnja di Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Perluasan sistim irigasi di Lampung akan membantu kaum transmigran dalam usahanja untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dalam tahap pertama akan diusahakan pembangunan djaringan irigasi seluas 280.000 ha.

Djadi projek ini akan menghasilkan 430.000 ha sawah dengan pengairan tehnis. Untuk membantu tertjapinja target produksi beras pada tahun 1973/74 usaha tersebut diatas harus sudah selesai pada tahun 1972, sehingga dapat ditanami padi pada musim rendengan 1972/73.

Biaja jang diperlukan selama lima tahun jang akan datang ialah sebesar 60 miljar rupiah. Untuk tahun 1969 akan disediakan dana sebesar 7,2 miljar rupiah. Sebagian dari dana-dana jang diperlukan tersebut akan berbentuk valuta asing.

Program perluasan irigasi ini dapat dibagi-bagi menurut projek antara lain sebagai berikut :

1. Projek Krueng Djrue (Atjeh)
2. Projek Krueng Baro (Atjeh)
3. Projek Punggur Utara (Lampung)
4. Projek Djatiluhur (Djawa Barat)
5. Projek Tadjum (Djawa Tengah)
6. Projek Sempor (Djawa Tengah)
7. Projek Kelara (Sulawesi Selatan)

8.	Projek Sadang	(Sulawesi Selatan)
9.	Projek Gumbasa	(Sulawesi Tengah)
10.	Projek Dumoga	(Sulawesi Utara)
11.	Projek Palasari	(Bali)
12.	Projek Kali Bawang	(Jogjakarta)
13.	Projek Way Djepara	(Lampung)
14.	Projek Way Umpu	(Lampung)
15.	Projek Way Panggubuan	(Lampung)
16.	Projek Air Beliti	(Sumatera Selatan)
17.	Projek Sampean Baru	(Djawa Timur)
18.	Projek Teluk Lada	(Djawa Barat)
19.	Projek Tjiletuh	(Djawa Barat)
20.	Projek Tjipamingkis	(Djawa Barat)
21.	Projek Tjikunten II	(Djawa Barat)
22.	Projek Pemali Tjomal	(Djawa Tengah)
23.	Projek Tjiudjung	(Djawa Barat)
24.	Projek Tjidurian	(Djawa Barat)

Program Pembanguman Irigasi lain

Disamping program-program tersebut diatas ada program pembangunan irigasi lain jang meliputi usaha perluasan pengairan pasang-surut, pembangunan pengairan daerah rawa bukan pasang-surut, perbaikan dan penanggulangan akibat bentjana alam, perbaikan keadaan danau-danau, pengembangan wilajah sungai, perbaikan dan perluasan perakitan dan kapal-kapal keruk dan transmigrasi jang menundjang pembangunan pengairan.

Biaja untuk program ini diperkirakan sebesar 77 miljar dalam lima tahun dan 9,1 miljar dalam tahun 1969/70. Sebagian dari dana-dana tersebut akan diperlukan dalam valuta asing. Program ini dapat dibagi-bagi dalam projek antara lain sebagai berikut :

Projek Pengairan Pasang-Surut

Sudah lebih dari 40 tahun rakjat di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Djambi membuka persawahan pasang-su-

rut, dengan hasil jang tjukup memuaskan. Dengan bantuan Pemerintah dan dengan peralatan jang agak modern, daerah Kalimantan Selatan sekarang telah menghasilkan surplus padi. Karena hasil-hasil jang memuaskan rakjat Sumatera Selatan mulai tertarik dan achir-achir ini sudah mulai mengusahakan persawahan pasang-surut.

Menurut taksiran luas rawa-rawa di Indonesia meliputi 34 djuta ha terutama terletak dipulau-pulau Sumatera, Kalimantan dan Irian Barat. Dari djumlah ini kira-kira 12 djuta ha dapat didjadikan persawahan pasang-surut. Sampai saat ini luas persawahan pasang-surut di Kalimantan Selatan, Tengah, Djambi dan Sumatera Selatan telah mentjapai 70.000 ha. Usaha ini pada umumnja dapat dilakukan dengan tjara menghubungkan dua atau lebih sungai-sungai jang hampir sedjadjar dengan saluran-saluran induk sebesar 12,5 m dan dalam 4 m. Tiap km saluran induk dengan kira-kira 2 km saluran sekunder memungkinkan pembukaan sawah seluas 1.000 ha. Jang mendjadi penghambat utama dalam pelaksanaan projek ini ialah dibidang tenaga petani untuk pembukaan tanah. Untuk mengatasi persoalan tersebut akan diusahakan mekanisasi dalam proses pembukaan tanah, sehingga untuk tiap ha sawah diperlukan djumlah tenaga jang lebih ketjil.

Selain membantu menanggulangi persoalan bahan makanan pembukaan-pembukaan persawahan pasang-surut akan membantu memetjahkan persoalan penduduk di Djawa. Dengan berhasilnja projek ini lebih banjak lagi penduduk Djawa dapat dipindahkan kedaerah-daerah tersebut.

Pada taraf sekarang survey sedang dilaksanakan untuk menentukan lokasi dan tjara jang terbaik.

Projek Serba-guna Kali Brantas

Kali Brantas adalah salah-satu sungai jang besar dipulau Djawa jang mengalir didaerah Djawa Timur sepandjang 330 km. serta mempunjai daerah pengaliran air (water basin) seluas kurang lebih 12.000 km^2. Tiap tahunnja kali ini membandjiri daerah jang luas termasuk kota-kota.

Ini disebabkan antara lain karena dangkalnja Kali Brantas sehingga tidak mungkin lagi untuk menampung air pada musim hudjan. Dangkalnja Kali Brantas disebabkan karena endapan pasir jang berasal dari muntahan letusan Gunung Kelud dan erosi tanah.

Selain pengendalian bandjir projek ini bertudjuan djuga untuk memberikan irigasi pada daerah sekitarnja, pengembangan perikanan darat, pembangkitan tenaga listrik dan rekreasi bagi rakjat.

Dibidang pengairan usaha projek ini meliputi pembangunan bendungan-bendungan, terowongan-terowongan, check-dams, irigasi dan sebagainja disepandjang Kali Brantas dan pembuatan bangunan-bangunan dalam rangka penanggulangan pasir jang diakibatkan karena aktivitas-aktivitas Gunung Kelud. Sub-sub projek jang kini dalam taraf pelaksanaan adalah sub-projek bendungan Karang Kates, Seloredjo dan sub-projek pengendalian bandjir daerah Tulung Agung kearah Samudra Indonesia. Jang terachir ini sudah hampir selesai.

Projek-projek jang kini dalam perentjanaan adalah Kali Porong (Dam Lengkong dan pengerukan sungai), projek pengendalian/penangkapan pasir Kali Badak dan Kali Putih, projek bendungan Welingi dan projek penjaluran pasir Lodojo.

Dalam rentjana lima tahun pertama diusahakan untuk menjelesaikan bendungan Karang Kates pada tahun 1971, bendungan Seloredjo pada tahun 1970 dan penjelesaian seluruh projek Tulung Agung Selatan. Disamping itu akan dimulai sub-projek Kali Porong, dan sub-projek Welingi.

Projek Pengembangan Daerah Rawa-rawa (jang bukan pasang-surut).

Tudjuan projek ini ialah memanfaatkan daerah rawa-rawa jang meliputi kira-kira 1/5 wilajah Indonesia. Dengan usaha-usaha dan tehnik "land reclamation" akan diperoleh daerah-daerah pertanian jang tjukup luas jang hasil produksinja dapat membantu memetjahkan persoalan pangan dan penduduk. Se-

lain itu djaringan kanal dapat dipergunakan untuk lalu lintas dan pengangkutan air.

Dalam rentjana lima tahun tahap pertama hanja projek Alabio (Kalimantan Selatan) dan projek Kutaaren (Kalimantan Tengah) jang pelaksanaannja sudah dimulai sedjak beberapa tahun jang lalu akan diselesaikan. Projek-projek ini merupakan full-technical polders.

Disamping projek-projek tersebut akan dilandjutkan projek-projek jang bukan merupakan "full technical-polders" seperti Sisir Gunting di Sumatera Utara dan Ogan Karamasan di Sumatera Selatan dan projek Polder Mentaren di Kalimantan Tengah.

Projek Survey dan Perentjanaan Pengembangan Wilajah Sungai

Tudjuan dari projek ini ialah penjusunan suatu pola induk (Master Plan) daripada usaha-usaha pengembangan wilajah sungai jang tersynchron dan terkoordinasi dengan baik. Untuk mentjapai tudjuan ini diperlukan suatu masa persiapan selama 1969-1973 untuk survey dan perentjanaan dimana dilakukan pekerdjaan-pekerdjaan pengumpulan-pengumpulan data, analisa data dan penjusunan perentjanaan. Dalam lima tahun jang akan disurvey ialah wilajah Lampung, Tjimanuk, Djratuseluna, Kedu Selatan, Kali Progo, Bali, Lombok dan Barito.

Projek Pengembangan Wilajah Bengawan Solo, Tjitanduj dan Luwu

Tudjuan dari projek ini ialah mengamankan daerah-daerah tersebut dari bahaja bandjir, menambah air irigasi dimusim kemarau, memperbaiki irigasi dan memperbaiki drainasi dari daerah-daerah jang rendah.

Projek Perbaikan Keadaan Danau

Dalam projek ini termasuk perbaikan-perbaikan danau jaitu danau Tempe dan Rawapening. Tudjuan dari perbaikan ini ia-

lah pentjegahan bandjir dan memperbesar daja tampung Rawapening sebagai reservoir guna mendjamin persediaan air jang lebih banjak untuk irigasi. Dalam lima tahun jang akan datang usaha akan ditudjukan untuk pengemban sungai-sungai pembuang dan dasar danau.

Projek Perbaikan dan Penanggulangan Akibat Bentjana Alam

Projek ini bertudjuan menanggulangi akibat letusan-letusan gunung-gunung Kelud, Merapi dan Agung.

Pada tahun-tahun 1966 dan 1968 telah terdjadi letusan-letusan jang setjara langsung menimbulkan kerugian dibidang sosial dan ekonomi. Untuk memperketjil dan mentjegah akibat-akibat letusan telah dibuat check-dams dan kantong-kantong pasir. Jang masih perlu dilakukan ialah pembentukan dam Salam di Djatitengger dan kantong lahar di K. Putih.

Untuk melindungi kota Muntilan dari lahar jang berasal dari gunung Merapi diusahakan pentjegahannja dengan pembuatan tanggul. Disamping itu akan diusahakan pula penjelesaian mengenai endapan-endapan pasir jang membahajakan persawahan disekitarnja. Akibat dari letusan gunung Agung tahun 1968 masih terasa pengaruhnja terhadap sektor pengairan. Untuk ini akan diadakan perbaikan dan penjempurnaan pengairan.

Projek Perakitan dan Perbaikan Kapal Keruk

Untuk memungkinkan pelaksanaan pengerukan sungai, saluran-saluran dan danau-danau setjara terus menerus dan effisien dengan biaja jang rendah diperlukan suatu armada kapal keruk. Tudjuan ini dalam taraf pertama dapat ditjapai dengan rehabilitasi kapal-kapal keruk jang ada.

Projek Pengukuran Topografi dan Perentjanaan Irigasi

Didalam perentjanaan irigasi data topografi merupakan data jang penting sekali. Hingga sekarang data tersebut belum tersedia atau kalau ada tidak lengkap. Tudjuan projek ini ialah mengatasi kelemahan tersebut diatas.

Projek Pengendalian Bandjir Djakarta Raya

Sudah bertahun-tahun lamanja, Djakarta tiap tahun mengalami bandjir dan genangan-genangan. Projek ini bertudjuan memelihara dan memperbaiki prasarana kota, memelihara kesehatan penduduk, mentjegah kerugian-kerugian materiil dan menambah tempat-tempat rekreasi jang murah disekitar waduk.

TABEL VI - 2

PEMBIAJAAN RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN, 1969/70 — 1973/74

PERTANIAN DAN IRIGASI

(dalam miljar rupiah)

Bidang/Sektor/Sub-Sektor/Program	1969/70	1969/70 — 1973/74		
	Anggaran Pembangunan	Anggaran Pembangunan	Sumber² lain	Djumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bidang Ekonomi				
A. Sektor Pertanian dan Irigasi.	35,132	319,00	76,00	395,00
1. Sub-sektor Pertanian	9,228	83,00	76,00	159,00
a. Program Peningkatan Produksi Bahan Makanan	2,929	30,00	10,00	40,00
b. Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	4,924	23,00	18,00	41,00
c. Program Peningkatan Produksi Perikanan	0,528	10,00	12,00	22,00
d. Program Peningkatan Produksi Hasil Kehutanan dan Pembinaan Hutan	0,602	10,00	28,00	38,00
e. Program Peningkatan Produksi Peternakan	0,245	10,00	8,00	18,00

2. Sub-sektor Irigasi	25,904	236,00	—	236,00
a. Program Penjelamatan Tanah dan air	0,435	7,00	—	7,00
b. Program Perbaikan Irigasi	7,592	70,00	—	70,00
c. Program Perluasan Irigasi	7,192	60,00	—	60,00
d. Program Perbaikan dan Pengamanan Sungai	1,575	20,00	—	20,00
e. Program Pembangunan Irigasi lainnja	9,107	79,00	—	79,00
B. Kegiatan-kegiatan Pertanian dan Irigasi jang pembiajaannja diperhitungkan dalam sektor-sektor lain				
B i d a n g S o s i a l				
Sektor Pendidikan dan Kebudajaan.				
Sub-sektor Pendidikan dan Penelitian Institusionil				
Program Pendidikan/Latihan Institusionil Sub-sektor Pertanian	0,419	3,40	—	3,40
Program Peningkatan Penelitian/Survey Sub-sektor Pertanian	0,106	0,89	—	0,89
Program Peningkatan Penelitian/Survey Sub-sektor Irigasi	0,070	P.M.	—	P.M.
B i d a n g U m u m				
Sektor Pemerintahan Umum				
Sub-sektor Pemerintahan Umum				
Program Penjempurnaan Prasarana Fisik Sub-sektor Pertanian	0,418	P.M.	—	P.M.

PETUNDJUK HALAMAN BUKU II A

RENTJANA BIDANG-BIDANG

Bab VI PERTANIAN DAN IRIGASI 11
Tabel VI — 1 19
A. B E R A S 19
Produksi 20
Tabel VI — A — 1 20
Tabel VI — A — 2 21
Grafik Luas Panen & Produksi 22
Tabel VI — A — 3 23
Tabel VI — A — 4 24
Grafika Luas Areal Panenan 1969/70-1973/74 25
Tabel VI — A — 5 26
Benih Unggul 26
Tabel VI — A — 6 30
Pupuk dan Obat Hama 31
Tabel VI — A — 7 31
Grafik Perkiraan Keperluan Pupuk Untuk Seluruh Sektor Pertanian 32
Tabel VI — A — 8 ..... 32a
Tabel VI — A — 9 36
Tabel VI — A — 10 36
Alat-alat Pertanian 38
Penjuluhan, Pendidikan dan Penelitian 40
Pemasaran 47
Tabel VI — A — 11 50
Perangsang Produksi 51
Perkreditan 54
Projek-projek 57

B. PALAWIDJA DAN HORTIKULTURA ... 57

Tabel VI — B — 1 58

Djagung 59

Tabel VI — B — 2 61

Katjang-katjangan 61

Tabel VI — B — 3 62

Hortikultultura (Sajur-sajuran dan Buah-buahan) 63

Tabel VI — B — 4 64

Ubi-ubian 64

Tabel VI — B — 5 66

Tabel VI — B — 6 67

Tabel VI — B — 7 67

Projek-projek 68

C. PERKEBUNAN 68

Grafik — Produksi Djagung, Katjang-katjangan, Sajur-sajuran & Buah-buahan, Ubi-ubian 69

Tabel VI — C — 1 70

Tabel VI — C — 2 71

Karet 74

Tabel VI — C — 3 74

Tabel VI — C — 4 76

Tabel VI — C — 5 77

Kelapa Sawit 79

Tabel VI — C — 6 80

Tabel VI — C — 7 81

Tabel VI — C — 8 82

Tabel VI — C — 9 82

Teh 83

Tabel VI — C — 10 84

Tabel VI — C — 11 85

Tabel VI — C — 12 (Kristal) 86

Tabel VI — C — 13 88

Kopi 89
Tabel VI — C — 14 91
Tembakau 92
Tabel VI — C — 15 94
Kopra 94
Tabel VI — C — 16 95
Tjoklat 95
Tabel VI — C — 17 96
Lada 97
Tjengkeh 98
Pala 99
Cassia Vera 99
Kapas 99
D. PERIKANAN 101
Tabel VI — D — 1 101
Tabel VI — D — 2 102
Tabel VI — D — 3 103
E. KEHUTANAN 107
Tabel VI — E — 1 108
Tabel VI — E — 2 109
Tabel VI — E — 3 112
Tabel VI — E — 4 112
F. PERTERNAKAN 116
Tabel VI — F — 1 116
Tabel VI — F — 2 117
Tabel VI — F — 3 119
G. IRIGASI 121
Tabel VI — G — 1 125
PROJEK-PROJEK PENGAIRAN
1. Program Penjelamatan Tanah dan Air 125
2. Program Perbaikan dan Pengamanan Sungai 126

3. Program Perbaikan Irigasi 126
4. Program Perluasan Irigasi 126
5. Program Pembangunan Irigasi Lain 126
— Program Penjelamatan Tanah dan Air 126
— Program Perbaikan dan Pengamanan Sungai 128
— Program Perbaikan Irigasi 128
— Program Perluasan Irigasi 129
— Program Pembangunan Irigasi lain ... 131
— Projek Pengairan Pasang Surut 131
— Projek Serba Guna Kali Brantas 132
— Projek Pengembangan Daerah Rawa-rawa (jang bukan pasang-surut) 133
— Projek Survey dan Perentjanaan Pengembangan Wilajah Sungai 134
— Projek Pengembangan Wilajah Bengawan Solo, (Tjitanduy dan Luwu) 134
— Projek Perbaikan Keadaan Danau 134
— Projek Perbaikan dan Penanggulangan Akibat Bentjana Alam 135
— Projek Perakitan dan Perbaikan Kapal Keruk 135
— Projek Pengukuran Topografi dan Perentjanaan Irigasi 135
— Projek Pengendalian Bandjir Djakarta Raya 136
Tabel VI — 2 136

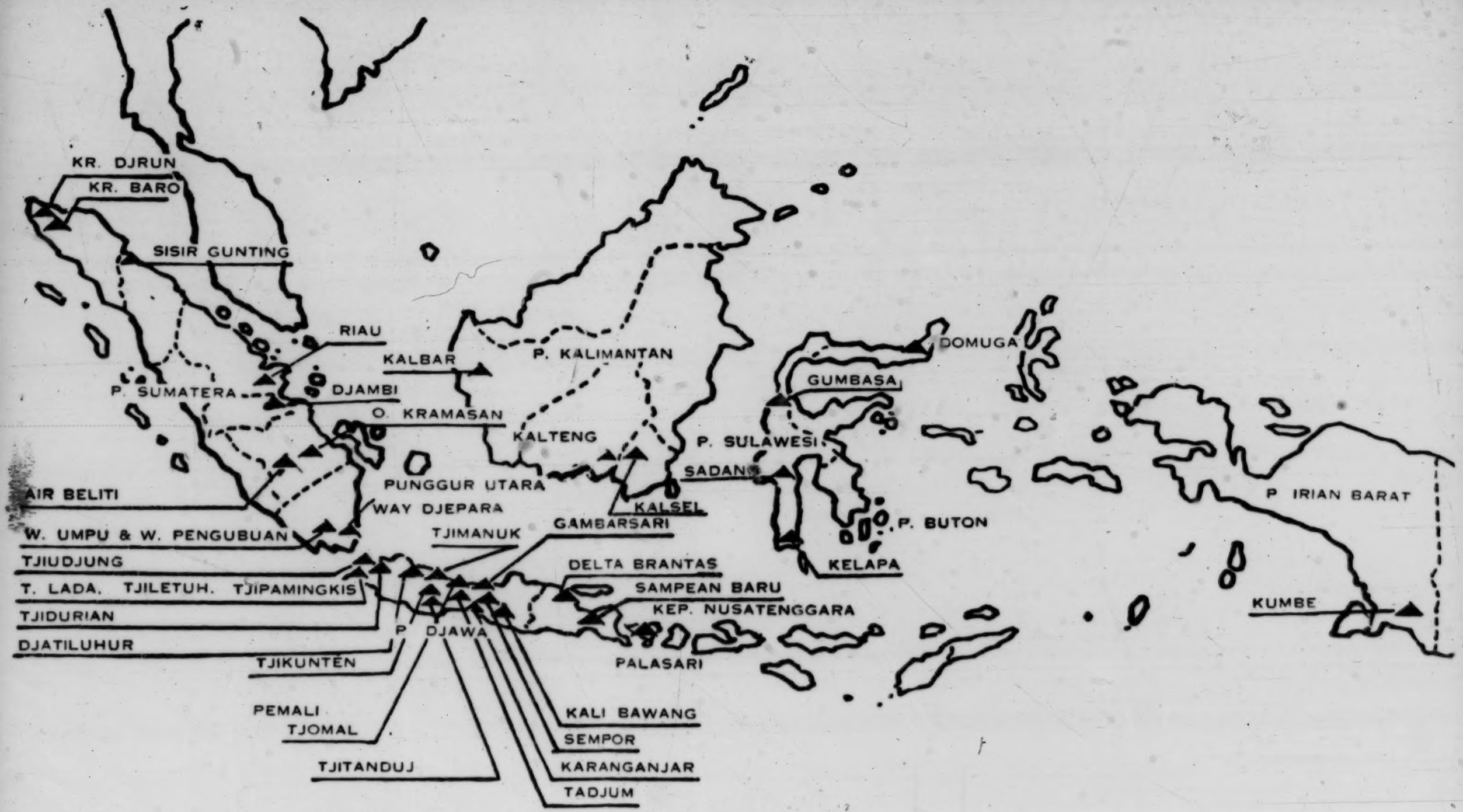
KR. DJRUN
KR. BARO
SISIR GUNTING
RIAU
P. SUMATERA
DJAMBI
O. KRAMASAN
KALBAR
P. KALIMANTAN
KALTENG
PUNGGUR UTARA
AIR BELITI
WAY DJEPARA
W. UMPU & W. PENGUBUAN
TJIUDJUNG
T. LADA. TJILETUH. TJIPAMINGKIS
TJIDURIAN
DJATILUHUR
TJIKUNTEN
PEMALI
TJOMAL
TJITANDUJ
P. DJAWA
TJIMANUK
GAMBARSARI
DELTA BRANTAS
SAMPEAN BARU
KEP. NUSATENGGARA
PALASARI
KALI BAWANG
SEMPOR
KARANGANJAR
TADJUM
KALSEL
DOMUGA
GUMBASA
P. SULAWESI
SADANG
P. BUTON
KELAPA
P IRIAN BARAT
KUMBE

IDC

RECEIVED
21 AUG 1969
CLD
Acquisitions
Section

RENTJANA
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1969/70 — 1973/74

II B

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

29 SEP 1969

14153
V. 2

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
CENTRAL LIBRARY AND
DOCUMENTATION BRANCH

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 319 TAHUN 1968
TENTANG
RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. *bahwa tudjuan perdjoangan Orde-Baru adalah meningkatkan tingkat kehidupan Rakjat Indonesia, jang hanja dapat ditjapai dengan pelaksanaan pembangunan bertahap dan berentjana;*
2. *bahwa hasil-hasil jang telah ditjapai dalam program stabilisasi politik dan ekonomi, dewasa ini telah merupakan landasan jang tjukup kuat guna pelaksanaan pembangunan;*
3. *bahwa berdasarkan ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, penjusunan dan pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun mendjadi salah satu tugas Kabinet Pembangunan;*
4. *bahwa dewasa ini Pemerintah telah berhasil menjiapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973, jang akan mendjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan ketetapan MPRS tersebut tahun-demi-tahun;*

5. *bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973;*

Mengingat:

1. *Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;*
2. *Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968;*
3. *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 Tahun 1968;*

Mendengar:

Pertimbangan BAPPENAS dan Sidang-sidang Kabinet;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969 — 1973.

Pasal 1.

Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973 sebagaimana termuat dalam Buku I, II dan III lampiran Keputusan Presiden ini merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti jang ditugaskan oleh MPRS.

Pasal 2.

Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pelaksanaan daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun, akan dituangkan dalam Rentjana Tahunan jang tertjermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara serta kebidjaksanaan-kebidjaksanaan lainnja.

Pasal 3.

Penuangan dalam Rentjana Tahunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perobahan dan perkembangan keadaan jang memerlukan penjesuaian terhadap Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Djakarta.

Pada tanggal 30 Desember 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O

DJENDERAL — TNI

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

1969/70 — 1973/74

L A M P I R A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 319 TAHUN 1968

tentang

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

II B

REPUB LIK INDONESIA

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1969/70 — 1973/74

DAFTAR ISI KESELURUHAN

BUKU PERTAMA
U M U M

Bab I Tudjuan, Sasaran dan Kebidjaksanaan
Bab II Sumber-sumber Pembiajaan
Bab III Neratja Pembajaran Internasional
Bab IV Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa
Bab V Administrasi Pemerintah, Pelaksanaan Rentjana dan Rentjana Operasionil Tahunan

BUKU KEDUA
RENTJANA BIDANG-BIDANG

Bab VI Pertanian dan Irigasi
Bab VII Industri, Pertambangan dan Tenaga Listrik
Bab VIII Perhubungan dan Pariwisata
Bab IX A g a m a
Bab X Pendidikan dan Tenaga Kerdja
Bab XI Kesehatan dan Keluarga Berentjana
Bab XII Perumahan dan Kesedjahteraan Sosial
Bab XIII Tertib Hukum dan Penerangan
Bab XIV Transmigrasi dan Koperasi
Bab XV Pertahanan dan Keamanan Nasional
Bab. XVI Penelitian dan Pengembangan Statistik

BUKU KETIGA
PERINTJIAN MENURUT DAERAH

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1969/70 — 1973/74

Daftar Isi

B U K U II B

RENTJANA BIDANG-BIDANG

		Halaman
Bab VII	Industri, Pertambangan dan Tenaga Listrik ...	11
	A. Industri	11
	B. Petambangan	50
	C. Tenaga Listrik	70
Bab VIII	Perhubungan dan Pariwisata	91
	A. Perhubungan	91
	B. Pariwisata	167

BAB VII

INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK

BAB VII

INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK

A. INDUSTRI

Sungguhpun sektor pertanian merupakan bidang sentral dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini, namun ini tidak berarti bahwa sektor industri tidak dikembangkan pula. Tudjuan djangka-pandjang adalah membina struktur ekonomi jang memiliki keseimbangan antara sektor-sektor pertanian, industri dan djasa-djasa.

Untuk mentjapai tudjuan djangka-pandjang ini maka proses pembangunan berlangsung setjara bertahap. Dewasa ini diberi tekanan kepada sektor pertanian terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa sektor industri merupakan sektor penundjang dan pendorong bagi pembangunan pertanian, sambil mempersiapkan diri untuk berkembang setjara lebih luas dimasa depan.

KEADAAN INDUSTRI DAN PERMASALAHANNJA

Struktur ekonomi Indonesia sedjak dulu kala adalah berat sebelah kedjurusan pertanian. Sektor industri hanja memberi sumbangan jang ketjil kepada produksi nasional. Selama beberapa tahun kegiatan industri semakin menurun. Banjak faktor-faktor jang menjebabkan hal ini. Sedjak tahun 1960 banjak perusahaan-perusahaan industri diambil-alih dari pemiliknja semula, sehingga banjak tenaga manager dan tenaga ahli meninggalkan perusahaan-perusahaan tersebut. Bersamaan dengan itu semakin banjak tjampur-tangan Pemerintah dalam pelbagai kegiatan ekonomi. Perusahaan-perusahaan industri bergantung pada sistim pendjatahan dan alokasi devisa bagi pemenuhan bahan baku, spare-parts serta peralatan produksi. Kebebasan untuk mengambil keputusan dibidang management perusahaan semakin berkurang.

Usaha penjaluran dan perdagangan dipisahkan dari usaha produksi, sehingga pemasaran terlepas dari management pro-

duksi. Tenaga kerdja tidak dapat diperlakukan menurut ukuran-ukuran ekonomi, sedang politik menjusup kepelbagai segi kehidupan perusahaan industri.

Sementara itu dibidang ekonomi terdjadi kemerosotan jang serius. Inflasi meningkat setjara tjepat dalam tahun-tahun 1961-1966. Usaha-usaha jang menghasilkan dalam djangka-pandjang terdesak oleh usaha-usaha jang menghasilkan dalam djangka-pendek. Oleh karena itu investasi semakin berkurang dan beralih dari industri kepada spekulasi. Dalam pada itu industri-industri jang menikmati pendjatahan tampak madju lebih pesat, tetapi sebenarnja kemadjuannja tidak wadjar karena biaja produksinja tidak riil.

Biaja produksipun menundjukkan perkembangan jang tidak wadjar. Akibat adanja inflasi, maka upah dalam natura, berupa beras dan lain-lain, mendjadi semakin penting. Oleh karena upah dalam natura didasarkan pada besar-ketjilnja keluarga dan tidak pada tinggi-rendahnja produktivitas, maka sistim upah tersebut tidak merangsang kegiatan produksi. Produktivitas semakin turun, sedang biaja produksi sangat tergantung dari tingkat harga beras.

Didalam ekonomi-inflasi penjusutan tidak lagi mengikuti norma jang wadjar. Peraturan-peraturan jang berlaku mendasarkan penjusutan tidak pada „nilai-pengganti", akan tetapi pada „nilai-historis", sehingga dana-penjusutan mendjadi ketjil dan tidak mampu untuk memperbaharui peralatan jang usang. Dilain pihak, ketjilnja dana-penjusutan ini menimbulkan „laba" dalam pembukuan jang besar, tapi jang tidak riil. Sementara itu pungutan dana-dana dan lain-lain iuran tidak resmi menjedot keuangan perusahaan, sehingga perusahaan industri tidak memiliki tjukup dana untuk rehabilitasi ataupun modal-kerdja. Dalam banjak hal berlangsung proses pemusnahan modal.

Inflasi menjebabkan terbengkalainja prasarana sehingga biaja angkutan mendjadi tinggi sekali dengan akibat pasaran mendjadi sempit. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan industri jang dibangun kebanjakan terlalu ketjil sehingga tidak effisien.

Faktor lain adalah penjediaan tenaga-listrik jang biajanja tinggi dan tidak dapat didjamin kelangsungan penjediaannja jang tjukup. Oleh karena itu banjak industri menjediakan sumber tenaga-listriknja sendiri, dengan akibat biaja overhead mendjadi besar.

Disamping itu kebanjakan industri tidak mengalami penggantian peralatan setjara teratur, sehingga alat-alat baru berdampingan dengan alat-alat usang. Hal ini djuga mengakibatkan biaja jang tinggi.

Banjak pula industri jang dibangun ditempat jang keliru. Sering bahan-bakunja terlalu djauh atau pemasarannja tidak dekat. Dalam banjak hal pertimbangan-pertimbangan politik lebih mempengaruhi lokasi industri daripada pertimbangan-pertimbangan ekonomi.

Disamping itu sering pula bekerdja faktor-faktor non-ekonomi lainnja. Perusahaan industri sering dipandang sebagai lembaga sosial tempat penampungan tenaga-tenaga jang sudah dipensiun.

Dalam periode 1961-1966 ekonomi Indonesia terpisahkan dari hubungan jang wadjar dengan ekonomi luar negeri sehingga perkembangan tehnologi jang sangat pesat didunia tidak dapat diikuti sepenuhnja. Hal ini mengakibatkan terhambatnja kemadjuan industri.

Dalam periode 1966-1968 berlangsunglah perobahan ekonomi jang azasi. Inflasi jang tadinja mengganas kini mulai ditundukkan melalui usaha stabilisasi ekonomi. Keadaan ekonomi jang tadinja berorientasi pada inflasi kini mulai menjesuaikan diri. Proses peralihan ini tidak djarang menimbulkan gangguan-gangguan, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah ekonomi menderita stagnasi.

Setjara berangsur-angsur berlangsunglah proses rehabilitasi industri. Perusahaan-perusahaan jang tadinja diambil-alih kini dikembalikan kepada pemiliknja jang sah. Modal swasta dari dalam dan luar negeri dirangsang untuk bekerdja melalui ketentuan-ketentuan jang menguntungkan setiap kegiatan in-

vestasi baru. Wewenang management untuk memimpin perusahaan setjara penuh kini dipulihkan kembali.

Pertimbangan-pertimbangan ekonomi, perhitungan setjara "cost-accounting", mechanisme harga dan perhitungan ekonomi jang rasionil kembali mulai berlaku. Kontrol langsung dari Pemerintah dan sistim etatisme berangsur-angsur mendjadi kurang.

Kebidjaksanaan perpadjakan dan bea-masuk mulai diserasikan dengan keperluan proteksi industri dalam negeri. Begitu pula kebidjaksanaan perkreditan bank menundjukkan pengalihan kearah selektivitas jang merangsang produksi.

Sungguhpun pelbagai langkah-langkah penting telah diambil, namun pertumbuhan industri belumlah pulih sepenuhnja. Oleh karena pengendalian inflasi kini menundjukkan hasilnja, maka timbullah kesempatan untuk mengalihkan usaha lebih banjak pada pemulihan dan pembangkitan pertumbuhan ekonomi pada umumnja dan pertumbuhan industri pada chususnja.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN INDUSTRI

Dalam menggariskan kebidjaksanaan dan menetapkan langkah pembangunan industri, maka titik tolak adalah sasaran pokok jang hendak ditjapai dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Sasaran bagi pembangunan industri adalah menundjang tertjapainja sasaran pokok tersebut.

Dalam memenuhi tugas tersebut maka pembangunan industri direntjanakan untuk mentjapai pertambahan nilai produksi pada achir 1973/74 sebesar sedikit-dikitnja 90 persen dari nilai produksi pada permulaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Sasaran kenaikan produksi ini direntjanakan untuk ditjapai melalui rehabilitasi serta investasi baru serta perluasan kapasitas produksi. Oleh karena itu pertumbuhan industri dibagi dalam dua tahap: periode 1969/70 — 1970/71 sebagai tahap rehabilitasi dan peningkatan penggunaan kapasitas produksi, jang disusul dengan periode 1971/72 — 1973/74 jang merupakan usaha perluasan dan pembangunan industri.

Dalam dua-tahun jang pertama dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun diselenggarakan pula persiapan pra-investasi, berupa survey, penelaahan-feasibility dan jang serupa untuk menjiapkan perluasan dan pembangunan industri jang akan dilangsungkan dalam tiga-tahun berikutnja. Pentahapan ini tidak menghalang-halangi dibangunnja industri-industri baru dalam dua-tahun jang pertama, bilamana sudah diadakan persiapan-persiapan jang diperlukan dan sudah tiba waktunja pula.

Dengan memperhatikan faktor-faktor pembatas, jakni modal dan tenaga ahli, serta dengan memperhitungkan fungsi pembangunan industri sebagai penundjang tertjapainja sasaran pokok Rentjana Pembangunan Lima Tahun, maka pembangunan industri mengutamakan industri-industri sebagai berikut:

(1) industri-industri jang menundjang sektor pertanian dengan memproduksi sarana-sarana pertanian atau mengolah hasil-hasil pertanian;
(2) industri-industri jang menghasilkan devisa atau menghemat devisa dengan djalan menghasilkan barang-barang pengganti impor;
(3) industri-industri jang mengolah lebih banjak bahan-bahan dalam negeri daripada bahan-bahan luar negeri;
(4) industri-industri jang menggunakan relatif lebih banjak tenaga-kerdja daripada modal;
(5) industri-industri jang membangkitkan kegiatan pembangunan daerah berkat sifatnja jang berefek kumulatif.

Patokan-patokan ini tentulah tidak lengkap. Lagi pula hal ini bukan berarti bahwa industri-industri jang tidak memenuhi patokan-patokan tersebut tidak penting. Akan tetapi pada tahap kini industri-industri jang diutamakan adalah jang memenuhi patokan-patokan diatas.

Patokan pertama, jakni industri jang menundjang pertanian, bertolak dari fikiran bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pertama-tama digerakkan dengan membangun sektor pertanian. Pembangunan pertanian menimbulkan kebutuhan akan bahan-bahan baku penundjang pertanian serta usaha-usaha

pengolahan hasil pertanian. Kebutuhan ini dipenuhi oleh sektor industri. Dengan demikian pembangunan pertanian menarik dan merangsang pertumbuhan industri.

Patokan kedua, jakni menghasilkan devisa dan menghemat devisa, bertolak dari kenjataan bahwa ekonomi Indonesia sangat menderita kekurangan devisa karena bagian jang tidak ketjil dari devisa diperlukan untuk penglunasan hutang-hutang luar negeri. Oleh karena itu usaha-usaha menambah devisa atau menghemat devisa menduduki prioritas tinggi. Usaha menghemat devisa dilakukan dengan memproduksi barang-barang pengganti impor. Untuk barang-barang ini sudah djelas adanja pasaran didalam negeri.

Patokan ketiga, jakni penggunaan lebih banjak tenaga-kerdja dari pada modal, bertolak dari kenjataan bahwa ekonomi Indonesia memiliki lebih banjak tenaga-kerdja daripada modal. Industri jang memakai banjak tenaga-kerdja akan lebih mudah memperluas usahanja dan dengan demikian mentjiptakan lapangan bekerdja jang luas. Mungkin ada industri jang tidak menggunakan banjak tenaga-kerdja, akan tetapi menggunakan bahan baku jang untuk memproduksinja diperlukan tenaga-kerdja jang banjak. Dalam hal ini industri tersebut dapat digolongkan dalam kategori industri jang menggunakan banjak tenaga-kerdja.

Patokan keempat, adalah industri jang mengolah lebih banjak bahan-bahan dalam negeri daripada bahan-bahan luar negeri. Dengan lain perkataan jang diutamakan adalah industri-industri jang menghasilkan „nilai tambah" ("value added") dalam negeri jang besar. Industri-industri jang memerlukan bahan-bahan jang pengolahannja banjak dilangsungkan diluar negeri dapat lebih menjulitkan lagi neratja pembajaran internasional. Oleh karena itu industri tersebut tidak mendapat prioritas. Lagi pula lazimnja industri-industri sematjam ini memerlukan tehnologi dan skills jang pelik.

Patokan kelima, erat hubungannja dengan patokan keempat. Industri-industri jang mengutamakan pengolahan bahan-bahan baku didalam negeri setjara otomatis djuga memberi pengaruhnja kepada pembangunan daerah. Dengan demikian pembangun-

an industri-industri tersebut dapat merangsang serta mendorong pembangunan daerah.

Berdasarkan kelima patokan tersebut maka industri-industri jang diutamakan pembangunannja dalam djangka waktu lima tahun ini adalah:

(1) industri pupuk, semen dan kimia;
(2) industri tekstil;
(3) industri pulp, kertas dan pertjetakan;
(4) industri farmasi;
(5) industri ringan dan keradjinan rakjat;
(6) industri logam, mesin, peralatan dan prasarana.

Pemberian prioritas pada industri-industri ini tidaklah berarti bahwa lain-lain industri tidak penting. Terbatasnja persediaan modal dan tenaga ahli mengharuskan adanja pilihan serta penjusunan skala prioritas. Pada tahap sekarang ini maka tjabang-tjabang industri inilah jang mendapat perhatian utama. Lain-lain industri tetap dimungkinkan tumbuhnja atas prakarsa dan kekuatan sektor swasta, selama usaha-usaha tersebut berdjalan sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku.

Sasaran-sasaran jang direntjanakan bagi masing-masing tjabang industri tampak pada Tabel VII-A-1.

TABEL VII-A-1.
SASARAN PRODUKSI INDUSTRI DALAM NEGERI,
1968/69 — 1973/74
(dalam miljar rupiah)

	1968/69	1973/74	Persentase Kenaikan
1. Industri Pupuk, Semen dan Kimia	10.300	48.650	372,3
2. Industri Tekstil	30.000	90.000	200,0
3. Industri Pulp, Kertas dan Pertjetakan	11.200	20.860	86,3
4. Industri Farmasi	5.250	7.350	40,0
5. Industri Ringan dan Keradjinan Rakjat	99.000	130.000	31,2
6. Industri Logam, Mesin, Peralatan dan Prasarana perhubungan	25.000	48.000	92,0
D j u m l a h	180.750	344.860	91,25

910088-(2).

Sesuai dengan prioritas dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun, maka industri pupuk, semen dan industri kimia lainnja menundjukkan sasaran persentase kenaikan produksi jang terbesar. Hal ini mentjerminkan pola pembangunan industri jang menundjang dan mendorong pembangunan pertanian.

Untuk memungkinkan tertjapainja kenaikan produksi dalam masing-masing tjabang industri disusunlah program investasi. Untuk ini diperhitungkan tjiri-tjiri chas serta kondisi masing-masing tjabang industri. Untuk masing-masing industri terdapat perbedaan dalam tehnologi jang dipakai, djangka waktu pembangunan (gestation period) jang diperlukan, tingkat penggunaan kapasitas produksi, struktur usia dari alat-alat produksi dan lain-lain. Oleh karena itu akibat dari setiap satuan investasi terhadap kenaikan produksi tidaklah sama bagi masing-masing industri.

Disamping itu dipertimbangkan pula kemampuan masing-masing tjabang industri untuk menarik modal swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sektor industri, karena sifatnja jang memungkinkan rentabilitas jang tinggi serta daja ekspansi jang luas, memiliki daja-tarik jang tjukup besar bagi modal swasta. Oleh karena itu maka pembangunan industri sedjauh mungkin diusahakan dengan merangsang serta mendorong sektor swasta.

Dengan berbagai langkah diusahakan agar modal swasta dalam dan luar negeri memegang peranan penting dalam pembangunan industri. Namun bilamana didalam suatu tjabang industri jang penting ternjata modal swasta tidak kundjung datang maka Pemerintah sesudah djangka waktu tertentu akan memutuskan untuk mengadakan investasi sendiri.

Program investasi terlihat dalam Tabel VII-A-2. Sumber pembiajaan investasi berasal dari Pemerintah, dana perbankan dan modal swasta. Dana perbankan dan modal swasta memegang peranan jang relatif lebih besar dari pada sumber Pemerintah. Tampak pula bahwa tjabang industri pupuk, semen dan industri kimia meliputi hampir separo dari keseluruhan djumlah

investasi, disusul oleh investasi dalam tjabang industri kertas dan pertjetakan dan dalam industri tekstil.

Dalam penentuan program investasi ini sangat dipentingkan tingkat persiapan sesuatu projek dalam masing-masing tjabang industri. Agar supaja setiap investasi memberikan hasil jang dapat dipertanggung-djawabkan maka pembangunan setiap projek didahului oleh persiapan pra-investasi berupa survey, penelaahan feasibility, dan lain-lain. Apakah sesuatu projek investasi akan dilaksanakan atau tidak akan tergantung dari hasil penelitian-penelitian tersebut. Oleh karena diperlukan persiapan-persiapan ini maka investasi untuk rehabilitasi memberikan hasil jang lebih tjepat dari pada investasi untuk perluasan ataupun investasi baru.

TABEL VII-A-2.

PROGRAM INVESTASI UNTUK INDUSTRI,
1969/70 — 1973/74
(dalam miljar rupiah)

Sektor Industri	Anggaran Pembangunan	Sumber² lain	Djumlah	Persentase
1. Pupuk, Semen, dan Kimia	39.28	75,14	114,42	45,65
2. T e k s t i l	29,73	11,86	41,59	16,59
3. Pulp, Kertas dan Pertjetakan	23,35	18,70	42,05	16,78
4. F a r m a s i	—	3,70	3,70	1,49
5. Industri Ringan & Keradjinan Rakjat	7,50	17,50	25,00	9,97
6. Industri Logam, mesin, Peralatan & Prasarana Perhubungan	10,30	13,60	23,90	9,53
D j u m l a h	110,16	140,50	250,66	100,00

Kenjataan inilah menjebabkan dibaginja pembangunan industri dalam tahap rehabilitasi selama dua tahun pertama dan tahap perluasan dan pembangunan dalam tiga tahun terachir dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Dengan demikian diperoleh kematangan dalam mempersiapkan pembangunan projek-projek industri.

Program investasi ini memberikan petundjuk-petundjuk dalam menggariskan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang merangsang pembangunan industri. Antara lain akan diambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengaturan perusahaan-perusahaan industri. Misalnja bagi perusahaan-perusahaan negara adanja U.U. No. 19/1960 merupakan penghambatan bagi kelantjaran usaha dan karenanja akan diganti.

Dalam hubungan ini diusahakan agar perusahaan-perusahaan negara industri bekerdja atas dasar prinsip-prinsip ekonomi jang sehat. Perusahaan negara tidak lagi dipandang sebagai lembaga sosial jang bertugas sebagai tempat penampungan. Demikian pula penempatan tenaga-tenaga management akan didasarkan kepada "career system" dan "merit system", sedang kebidjaksanaan upah akan disehatkan sehingga merangsang pertumbuhan industri.

Selandjutnja direntjanakan pula ketentuan-ketentuan mengenai penilaian kembali daripada modal perusahaan, penindjauan kembali setjara prinsipiil undang-undang perusahaan dari masa kolonial, penindjauan kembali kedudukan hukum perusahaan-perusahaan negara, pembangunan "industrial estates" serta lain-lain langkah jang lebih menggairahkan pertumbuhan industri. Dalam membina industri baru akan ditetapkan pula pedoman-pedoman agar industri tumbuh dengan ukuran-ukuran optimal dan agar kwalitas produksi benar-benar terdjamin.

Kebidjaksanaan ekonomi jang aktif merangsang pembangunan industri meliputi pula kebidjaksanaan dibidang bea tjukai, fiskal dan kredit. Dalam menetapkan bea-masuk serta pungutan tjukai senantiasa diperhitungkan pula pengaruhnja terhadap pertumbuhan industri-industri jang memperoleh prioritas dalam rangka Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini.

Dibidang fiskal maka prinsip jang sama berlaku pula. Penetapan padjak perusahaan, padjak laba dan lain-lain senantiasa memperhitungkan pengaruhnja pada pertumbuhan industri. Masalah penjusutan maupun perhitungan kembali nilai aktiva berdasarkan „nilai pengganti" akan ditelaah dan ditetapkan lebih landjut guna merangsang kegiatan penanaman kembali dari dana-dana permodalan dalam perusahaan masing-masing.

Dibidang perkreditan diusahakan kredit-kredit bagi modal kerdja untuk pembiajaan bagi investasi bahan baku, investasi barang djadi, pembelian spare-parts dan sebagainja. Disamping itu diusahakan pula kredit djangka menengah dan djangka pandjang untuk perluasan, modernisasi dan pembangunan baru. Dengan demikian perkreditan mendjadi alat jang merangsang pertumbuhan industri melalui sifatnja jang selektif.

Langkah-langkah kebidjaksanaan ini tentulah belum lengkap seluruhnja. Jang penting adalah pentjiptaan iklim investasi jang menarik bagi pertumbuhan industri. Adapun langkah-langkah jang direntjanakan untuk pembangunan tjabang-tjabang industri jang diutamakan selama lima tahun jang akan datang ini akan diuraikan dibawah ini.

Industri Pupuk, Semen dan Kimia

Sebagai industri-industri jang menundjang sektor pertanian maka industri-industri pupuk, semen dan kimia memegang peranan jang amat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini industri-industri tersebut mendapat perhatian utama untuk dibangun dan dikembangkan. Dilihat dari banjaknja persediaan bahan baku jang berupa gas alam dan minjak bumi maka perkembangan industri pupuk di Indonesia didasarkan pada pemanfaatan sebesar-besarnja dari bahan baku tersebut untuk pembuatan pupuk nitrogen. Dalam hubungan ini diperhatikan segi-segi teknis-ekonomis guna memperoleh hasil produksi jang semurah-murahnja dengan investasi dalam unit-unit produksi jang besar dan ekonomis serta proses jang modern

serta jang disesuaikan dengan kondisi jang terdapat di Indonesia. Mengingat sifat industri pupuk jang banjak memerlukan modal (capital-intensive), maka modal swasta asing akan turut memperkembangkan industri pupuk ini.

Meskipun diharapkan agar pihak swasta mengambil bagian dalam perkembangan industri pupuk, namun apabila investasi modal swasta dirasakan amat lambat datangnja maka Pemerintah pada suatu saat akan melakukan investasi sendiri. Hal ini dilakukan mengingat bahwa faktor waktu amat menentukan dalam usaha peningkatan penjediaan pangan rakjat dalam tahun-tahun jang akan datang.

Disamping pengutamaan produksi pupuk nitrogen maka djuga akan diselenggarakan pembangunan industri pupuk jang mengandung zat bara fosfat dan kalium, baik melalui pengolahan bahan-bahan baku jang harus diimpor, maupun melalui peningkatan usaha-usaha pentjarian sumber-sumber mineral fosfat dan kalium didalam negeri. Dengan demikian pemanfaatan zat-zat baru N-P-K (nitrogen-fosfat-kalium) dapat dilakukan dengan optimal untuk keperluan pertanian.

Direntjanakan untuk memperluas pabrik pupuk P.N. Pusri di Palembang dengan unit ekonomis jang ketjil, jaitu jang berkapasitas 300.000 ton urea per tahun atau kira-kira 300 persen dari kapasitas jang sekarang, sehingga kapasitas seluruhnja akan mendjadi sebesar 400.000 ton setahun. Diharapkan PUSRI II ini sudah berproduksi dalam tahun 1972. Sementara itu projek Petrokimia di Gresik akan diselesaikan dalam tahun 1970, sehingga dapat menghasilkan pupuk urea dan ammonium sulfat sebanjak masing-masing 65.000 ton dan 110.000 ton setahunnja.

Kedua pabrik pupuk ini merupakan penanaman modal Pemerintah, terutama disebabkan karena pertimbangan praktis. Mengingat kebutuhan pupuk nitrogen akan masih lebih besar dari apa jang dihasilkan oleh PUSRI I, PUSRI II dan PETROKIMIA GRESIK, maka dipersiapkan pula rentjana pembangunan projek pupuk baru jang menggunakan bahan baku gas alam di Djatibarang, Djawa Barat.

Dalam tahun pertama dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun akan diselenggarakan survey setjara nasional guna memberikan arah jang tepat bagi pembangunan industri pupuk, baik jang mengenai kapasitas maupun djenis produksinja.

Berdasarkan penilaian data mengenai kebutuhan, potensi produksi dan pemasaran, direntjanakan untuk mengarahkan projek pupuk di Djawa Barat kepada djenis pupuk tjampuran N-P-K, dengan dasar kapasitas N sebesar 272.000 ton setahun, sedangkan besarnja zat bara P dan K disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan tanah. Diusahakan agar dalam tahun 1973/74 pabrik pupuk di Djawa Barat telah dapat menghasilkan 50 persen dari kapasitas produksi atau 136.000 ton N. Dengan selesainja ketiga pabrik pupuk nitrogen tersebut maka pada achir Rentjana Pembangunan Lima Tahun diharapkan dapat dihasilkan 403.500 ton N jang berarti kira-kira 80 persen dari kebutuhan pupuk nitrogen.

Dalam bidang pupuk fosfat, projek superfosfat di Tjilatjap dengan kapasitas produksi 100.000 ton single superfosfat atau 18.000 ton P_2O_5 jang pada waktu ini tertunda pembangunannja diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 1970/71. Sementara itu dipeladjari kemungkinan peningkatan produksi pupuk fosfat, projek superfosfat di Tjilatjap dengan mengarahkan pada produksi double superfosfat dan triple superfosfat. Demikian pula terhadap projek pupuk Petrokimia di Gresik dipeladjari kemungkinan pembuatan pupuk compound ammonium fosfat dalam rangka mengekonomiskan projek tersebut, sehingga harga pupuk jang dihasilkan dapat ditekan serendah mungkin.

Gambaran umum dari rentjana pembangunan industri pupuk beserta sasaran produksi jang diharapkan dapat dilihat pada Tabel VII-A-3. Dalam hal pupuk nitrogen direntjanakan kenaikan produksi dari 46.500 ton N dalam tahun 1969/70 mendjadi 403.500 ton N dalam tahun 1973/74, jang berarti kenaikan dengan 768 persen. Dalam hal pupuk fosfat direntjanakan djumlah produksi dalam tahun 1973/74 sebesar 168.000 ton P_2O_5.

Untuk memungkinkan tertjapainja sasaran produksi ini dibutuhkan lebih kurang Rp. 67.85 miljard. Dari djumlah ini sebanjak Rp. 37.80 miljard diperlukan untuk pabrik pupuk di Djawa Barat. Gambaran tentang investasi ini dapat dilihat dalam Tabel VII-A-4. Apakah suatu projek investasi akan dilaksanakan tergantung dari hasil penelitian.

Apabila penelitian menundjukkan bahwa projek tidak dapat dipertanggung djawabkan dari sudut tehnis atau sudut ekonomis maka sudah barang tentu projek tersebut tidak akan dilaksanakan.

Synchron dengan usaha pemenuhan kebutuhan pupuk ini, setjara terus-menerus diusahakan pula pentjaharian sumber-sumber bahan baku untuk industri pupuk, chususnja gas alam, minjak bumi, mineral-mineral fosfat, kalium dan belerang.

Dalam hal belerang, sebagai kelandjutan hasil penelitian jang telah dilakukan sebelumnja, direntjanakan untuk mengolah endapan belerang di Telagabodas Djawa Barat sehingga dapat diperoleh hasil belerang jang tjukup ekonomis untuk mengisi kebutuhan pabrik-pabrik pupuk Tjilatjap dan Gresik sebanjak lebih kurang 53.000 ton belerang per tahun. Tjadangan belerang jang telah diketahui terdapat di Djawa Barat adalah sebesar lebih kurang 1.000.000 ton. Dalam hubungan ini direntjanakan membangun suatu "pilot plant" untuk menentukan pengolahan dan bentuk pabrik jang dapat dipertanggung djawabkan setjara komersiil selandjutnja.

Dalam rangka usaha menundjang pertanian maka disamping industri pupuk direntjanakan pula pembangunan pabrik-pabrik insektisida dan pestisida jang amat diperlukan untuk memberantas hama-hama tanaman. Agar dapat diperoleh pengarahan jang tepat dalam memilih insektisida jang paling sesuai untuk kondisi Indonesia, disamping menindjau pula kemungkinan pembuatannja dari bahan-bahan baku didalam negeri maka pada tahap permulaan direntjanakan lebih dahulu survey dan penelitian feasibility-nja. Diperkirakan bahwa insektisida djenis BHC dan DDT adalah sesuai untuk kondisi Indonesia, se-

dangkan bahan bakunja jang berasal dari minjak bumi dapat diusahakan di Indonesia.

Apabila pembangunan djaringan irigasi, bendungan-bendungan, djalan-djalan, perumahan dan industri semakin meningkat, maka djelaslah bahwa keperluan akan semen sebagai salah satu bahan bakunja akan meningkat pula. Dewasa ini hanja terdapat tiga buah pabrik semen, jakni Semen Gresik, Semen Indarung dan Semen Tonasa, masing-masing dengan kapasitas ("rated capacity") 375.000 ton. 120.000 ton dan 120.000 ton setahun.

Kapasitas produksi ini djauh dibawah kebutuhan sehingga masih perlu diimpor semen. Mengingat bahwa industri semen mengolah bahan baku jang tjukup tersedia didalam negeri dan menundjang pertanian dan prasarana, maka djelaslah bahwa pembangunan industri semen memegang prioritas jang tinggi. Sifat industri semen jang menghasilkan "bulk mass production" serta ketjenderungan untuk berlokasi didaerah bahan baku, jang tidak selalu dekat dengan daerah prasarana, menjebabkan kondisi prasarana ekonomi dan fasilitas angkutan memegang peranan jang sangat penting. Oleh karena itu perentjanaan pembangunan industri semen harus berdjalan seiring dengan rehabilitasi prasarana ekonomi.

Dengan peningkatan efficiency diketiga pabrik tersebut serta perluasan semen Gresik dengan satu kiln jang berkapasitas 125.000 ton dan peningkatan kapasitas pabrik semen Indarung, maka produksi dalam negeri akan meningkat sampai 850.000 ton pada tahun 1971/1972. Disamping itu dewasa ini tengah dilakukan penelaahan tentang persediaan bahan baku didaerah Tjibinong, Djawa Barat sebagai persiapan pembangunan pabrik semen dengan kapasitas 400.000 ton jang direntjanakan dibangun pada tahun 1970/71 dan dapat menghasilkan pada tahun 1972/73. Selandjutnja direntjanakan pula pembangunan sebuah projek semen lagi dengan kapasitas 400.000 ton setahun jang lokasinja belum ditentukan. Beberapa kemungkinan lokasinja adalah Sumatera Utara (Bohorok), Atjeh, Djawa-

Tengah (Klaten, Pamotan), Djawa-Barat (Tjibadak). Dengan demikian direntjanakan peningkatan produksi dari 515.000 ton pada tahun 1968/69 mendjadi 1.650.000 ton setahun pada tahun 1973/74. Perintjian ini tertera dalam Tabel VII-A-6.

Untuk mentjapai sasaran ini diperlukan investasi sebagaimana tersebut dalam Tabel VII-A-7. Diperkirakan perlu investasi sebanjak $ 7,1 djuta dan Rp. 1,4 miljard untuk peningkatan produksi dipabrik-pabrik semen Gresik dan Padang serta penambahan perlengkapan alat-alat pabrik semen Tonasa. Projek semen Tjibinong dan projek semen lainnja direntjanakan sebagai usaha modal swasta dalam dan luar negeri.

Dengan sendirinja dilaksanakan atau tidaknja sesuatu projek tergantung dari hasil penelitian. Jang akan dilaksanakan hanjalah projek-projek jang benar-benar dapat dipertanggung djawabkan dari sudut tehnis dan sudut ekonomis.

Selandjutnja dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun direntjanakan pula untuk pengembangan industri kimia jang memegang peranan penting dalam perkembangan sektor industri. Walaupun setjara langsung hasil-hasil industri kimia tidak dirasakan manfaatnja, namun sebagai prasarana industri dapat membantu kegiatan pembangunan industri-industri ringan didaerah-daerah disamping menghemat devisa sebagai pengganti impor.

Dalam djangka pandjang mungkin pula menghasilkan devisa melalui ekspor. Industri-industri ini antara lain adalah industri garam, soda abu, soda caustic, alumunium sulfat dan industri-industri petrokimia, seperti polyethylene, polyvinylchlorida, polyester dan sebagainja.

Industri garam direntjanakan untuk ditingkatkan hasil dan mutunja guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk diekspor. Dalam djangka pandjang direntjanakan pembangunan industri-industri jang berasal dari garam, antara lain soda abu dan soda caustic jang sampai sekarang masih harus diimpor. Soda abu adalah sangat penting untuk industri gelas sedangkan soda caustic untuk industri sabun.

Alumunium sulfat diperlukan untuk pendjernihan air minum, baik untuk air minum rakjat maupun untuk keperluan industri. Dengan terdapatnja kelebihan asam sulfat apabila pabrik pupuk Tjilatjap dan Gresik sudah berdjalan, maka dengan mempergunakan bauksit jang berada didalam negeri dapat dibangun industri alumunium sulfat tersebut.

Selandjutnja direntjanakan pula peningkatan pemanfaatan karet untuk keperluan industri maupun untuk ekspor. Dalam rangka ini akan dilakukan survey dan penelitian untuk mengetahui tjara-tjara pengolahan jang tepat serta ditindjau kemungkinan pembangunan industri-industri komplementer. Demikian pula guna meletakkan landasan jang lebih kuat untuk pembangunan industri selandjutnja dalam bidang petrokimia dan aneka kimia direntjanakan survey setjara menjeluruh untuk mendapatkan pengarahan jang tepat.

TABEL VII-A-3.

PRODUKSI PUPUK, 1969/70 — 1973/74
(ribuan ton, miljar Rp.)

Tahun	N	P	Nilai Produksi
1968/69	46,5	—	2,695
1969/70	46,5	—	2,695
1970/71	88,5	—	5,145
1971/72	102,5	18	7,000
1972/73	267,5	18	16,555
1973/74	403,5	168	33,180

1968/69 Pusri = 46.5 N = 100.000 urea

1970/71 Petrokimia Gresik = 56 N = < 65 urea + 110 ZA atau < 45 urea 150 ZA

1971/72 Tjilatjap = 18 P = 100.000 Superphosphate
Pusri II = 165 N = 330.000 urea

1972/73 1. Djatibarang = < 136 P / 136 N pupuk Compound

2. Tjilatjap = 32 P = 100 D.S.

TABEL VII-A-4.

PROGRAM INVESTASI DALAM INDUSTRI PUPUK, 1969/70 — 1973/74

(dalam miljar Rupiah)

Tahun	Pindjaman dengan Sjarat Lunak	Swasta Nasional/Asing atau Joint Venture
1969/70	2,63	—
1970/71	16,10	10,34
1971/72	11,14	22,68
1972/73	0,18	4,78
1973/74	—	—

P u s r i	:	26,65
Penambahan Gresik	:	2,00
Penjelesaian Tjilatjap	:	1,40
Djatibarang	:	37,80

TABEL VII - A - 5.

PRODUKSI SEMEN : 1968/69 — 1973/74

(dalam ribuan ton; miljar rupiah)

Tahun	Produksi	Persentase Pertambahan	Nilai
1968/69	515	—	3,24
1969/70	600	16,5	3,78
1970/71	675	12,5	4,25
1971/72	850	25,9	5,35
1972/73	1250	47,1	7,37
1973/74	1650	32,0	10,33

TABEL VII - A - 6.

PERKEMBANGAN INDUSTRI SEMEN, 1968/69 — 1973/74

(dalam ribuan ton)

Tahun	Gresik	Padang	Tonasa	Tjibinong	Projek Baru *)
1968/69	375	120	20	—	—
1969/70	400	120	80	—	—
1970/71	400	175	100	—	—
1971/72	510	220	120	—	—
1972/73	510	220	120	400	—
1973/74	510	220	120	400	400

*) Kemungkinan lokasi projek baru : Sumatera Utara (Bohorok), Atjeh, Djawa Tengah (Klaten, Pamotan), Djawa Barat (Tjibadak).

INDUSTRI SEMEN

PRODUKSI

(RIBUAN TON)

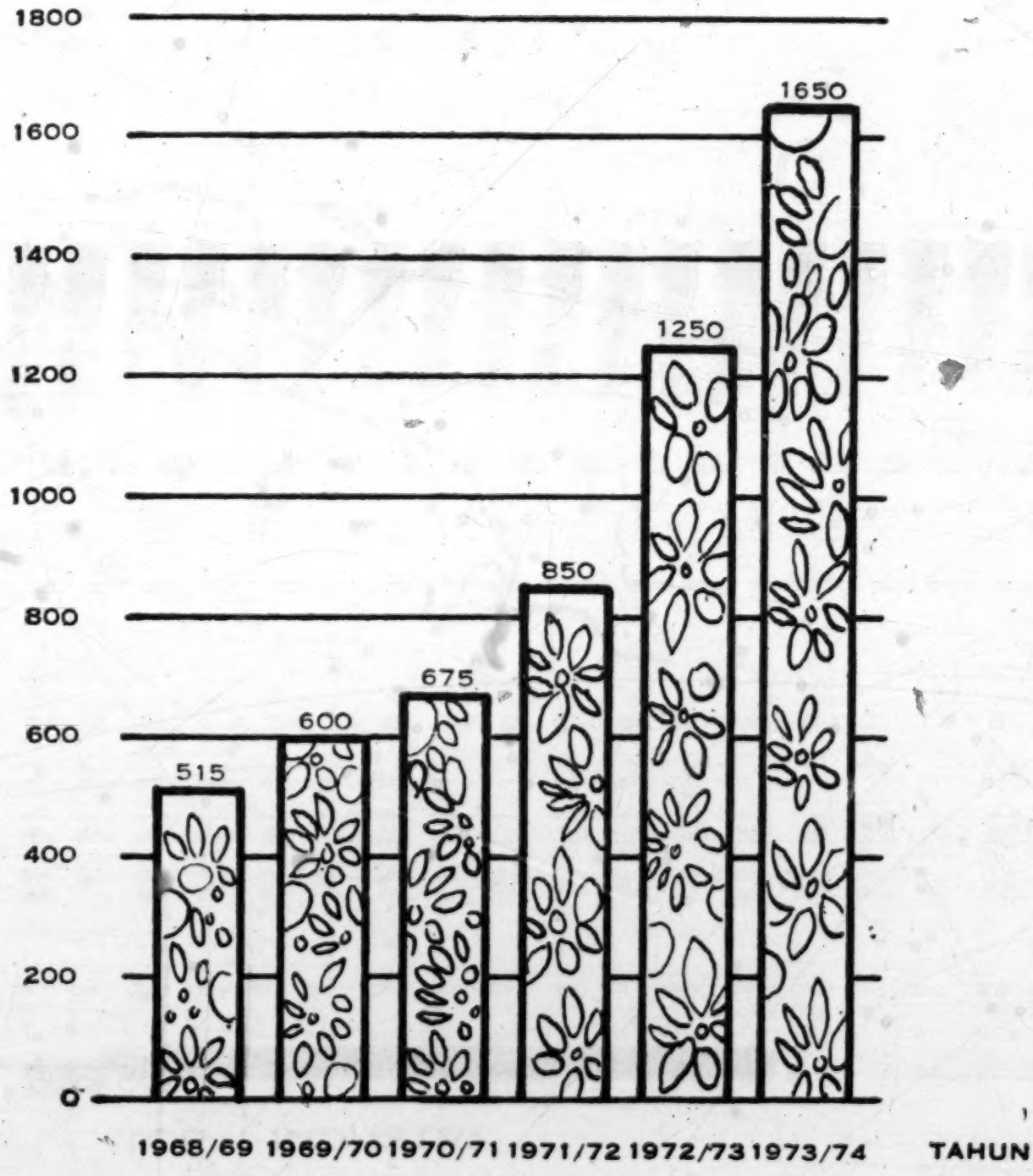

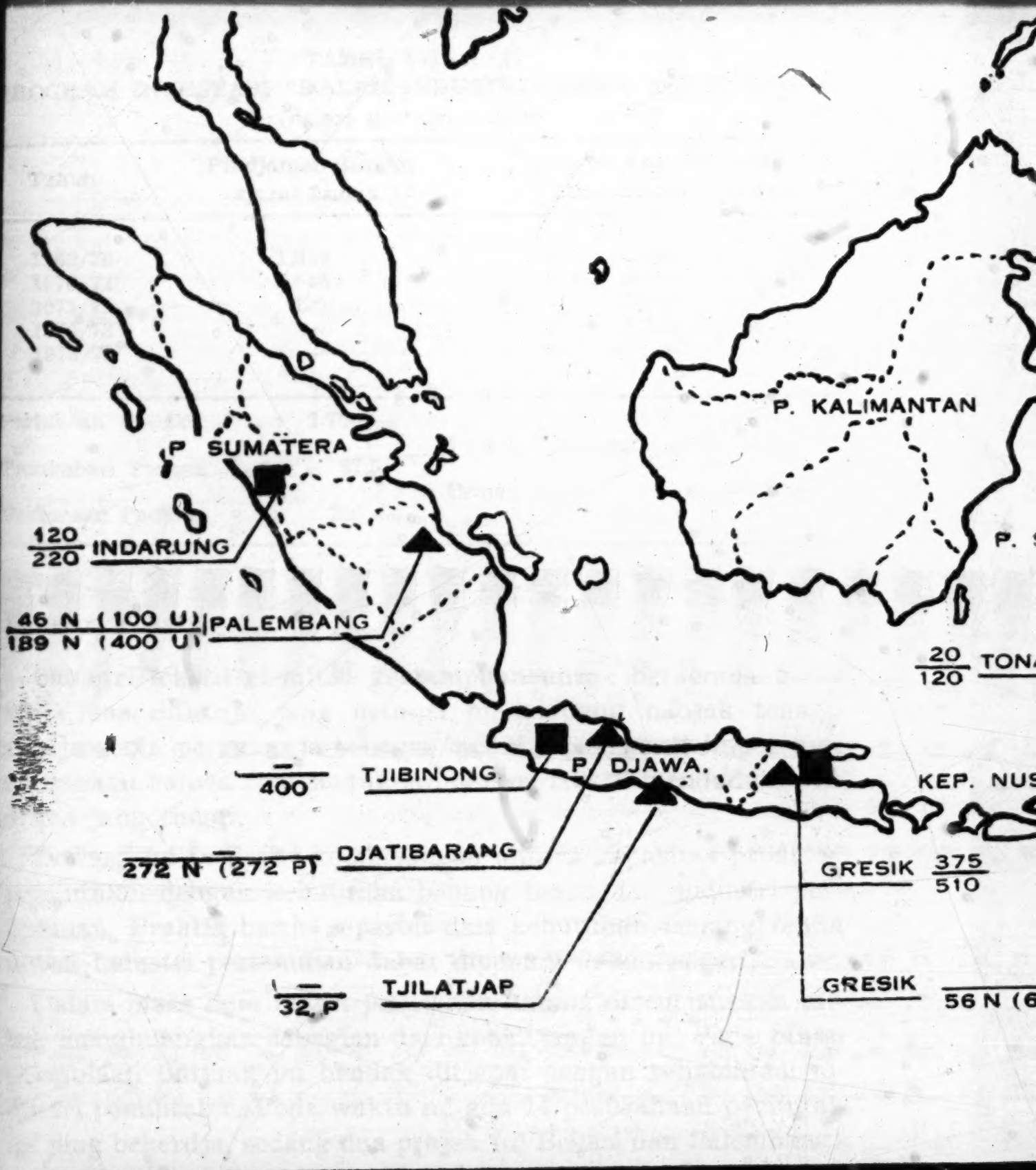
P. KALIMANTAN
P. SUMATERA
120
220
INDARUNG
46 N (100 U)
189 N (400 U)
PALEMBANG
20
120
TONA
400
TJIBINONG
P. DJAWA.
KEP. NUS
272 N (272 P)
DJATIBARANG
GRESIK 375
510
32 P
TJILATJAP
GRESIK
56 N (6
PUPUK (PROD. DLM. RIBUAN TON). TAHUN 1968
TARGET 73/74
SEMEN (PROD. DLM. RIBUAN TON). TAHUN 1968
TARGET 73/74

5U + 115ZA)

SUB SEKTOR : INDUSTRI

INDUSTRI : ★ SEMEN
★ PUPUK

TABEL VII - A - 7.

PROGRAM INVESTASI DALAM INDUSTRI SEMEN, 1969/70 - 1973/74

(dalam djutaan rupiah)

Tahun	Pindjaman dengan sjarat Lunak	Swasta nasional/asing atau Joint Kenture
1969/70	1.926	2.760
1970/71	1.648	6.550
1971/72	320	7.950
1972/73	—	4.320
1973/74	—	—

Perluasan Gresik	=	1.750,—	Projek Tjibinong	=	8.050,—
Tambahan Tonasa	=	87,5	Projek baru	=	8.050,—
Perluasan Padang	=	700,—			

Industri Tekstil

Industri tekstil memiliki kemampuan untuk berkembang setjara luas. Sifatnja jang mampu menampung banjak tenaga kerdja serta peranannja sebagai industri pengganti impor menjebabkan bahwa pembangunan industri tekstil menduduki prioritas jang tinggi.

Dewasa ini terdapat kepintjangan antara kapasitas produksi pemintalan dengan kebutuhan benang tenun dari industri pertenunan. Praktis hanja separoh dari kebutuhan benang tenun untuk industri pertenunan dapat dipenuhi dalam negeri.

Dalam masa lima tahun jang akan datang direntjanakan untuk menghilangkan sebagian dari kepintjangan ini. Pada tahap permulaan tudjuan ini hendak ditjapai dengan rehabilitasi industri pemintalan. Pada waktu ini ada 14 perusahaan pemintalan jang bekerdja, sedang dua projek (di Bekasi dan Palembang) menunggu penjelesaiannja. Kapasitas jang terpasang adalah 406.000 mata pemintalan dan dewasa ini jang dipergunakan adalah sekitar 334.000 mata pemintalan atau 82 persen. Disebabkan kekurangan biaja dan lain-lain sebab, maka dalam

masa pembangunan beberapa tahun jang lalu terdapat waktu jang agak lama antara kedatangan barang-barang dan pemasangannja, sehingga beberapa bagian rusak, berkarat ataupun hilang karenanja. Dengan demikian maka diantara unit-unit jang terpasang terdapat beberapa jang tidak sempurna.

Sebab lain daripada tidak terpakainja kapasitas penuh ialah kekurangan spareparts. Dibeberapa perusahaan terdapat perimbangan jang tidak sempurna dalam peralatan untuk menghasilkan susunan produksi (productmix) jang diharapkan. Dalam beberapa hal perbaikan institusionil akan dapat meningkatkan kapasitas produksi.

Disamping tidak penuhnja penggunaan kapasitas maka produksi rata-rata per mata pintal adalah agak rendah. Untuk meningkatkan produktivitas diusahakan agar djam bekerdja setiap minggu ditingkatkan. Dewasa ini kebanjakan industri pemintalan bekerdja dibawah 120 djam seminggu. Dipelbagai industri pemintalan jang baik djam kerdja melebihi 6000 djam setahun. Karena itu diusahakan peningkatan djam kerdja untuk perusahaan-perusahaan jang lain.

Dengan usaha-usaha rehabilitasi, peningkatan efficiency dan peningkatan djam kerdja akan didapat kenaikan produksi jang berarti. Karenanja titik berat usaha dalam tahun-tahun pertama diletakkan kepada ketiga matjam kegiatan ini.

Tahap kedua dalam mengusahakan keseimbangan dilakukan melalui perluasan pada perusahaan-perusahaan jang ada dan/atau pembangunan Projek-projek baru. Untuk ini perlu adanja suatu penelaahan feasibility dari masing-masing perluasan dan pembangunan projek-projek baru. Chususnja karena terbatasnja modal, baik jang berupa devisa maupun rupiah, maka terlebih dulu akan diadakan penelahaan jang teliti untuk mendjamin hasil jang sebaik-baiknja.

Dewasa ini industri mesin dan peralatan dalam negeri memiliki kemampuan untuk memproduksi dan mengassembling komponen-komponen mesin pemintalan. Oleh karena itu direntjanakan agar industri mesin dan peralatan memproduksi dan meng-

assembling komponen-komponen mesin pemintalan jang diperlukan untuk pengembangan industri pemintalan. Selain memberikan peluang untuk industri mesin dan peralatan dengan suatu program kerdja jang tjukup besar dan kontinu maka langkah-langkah tersebut djuga akan mengurangi djumlah investasi jang diperlukan.

Didalam industri pertenunan masalahnja berbeda. Diatas kertas djumlah kapasitas adalah tjukup besar, tetapi dalam tahun-tahun jang lalu tidak pernah ada penggunaan jang penuh. Untuk perusahaan-perusahaan jang mempergunakan Alat Tenun Mesin (ATM), djumlah penjediaan serta tingginja biaja tenaga listrik, kurang tingginja mutu benang produksi dalam negeri, maupun belum mantapnja iklim merupakan suatu hambatan.

Untuk ATM-1 diperkirakan produksi 20 m sehari dan untuk ATM-2 sebesar 35 m untuk satu shift dari 7 djam kerdja. Dengan bekerdja dengan 2 shift maka djumlah produksi untuk satu tahun (300 hari) adalah 120 djuta meter untuk 10.000 ATM-1 dan 260,5 djuta meter untuk 12.400 ATM-2, atau setahunnja berdjumlah 380 djuta meter. Djika pengadaan tenaga listrik dapat ditingkatkan serta biaja diturunkan, maka dengan mudah djumlah produksi dapat mendekati 570 djuta meter dengan ongkos produksi jang lebih rendah.

Disamping itu perusahaan-perusahaan dengan mesin jang relatif baru pada umumnja besarnja berada dibawah ukuran optimal, sedangkan sebagian dari pada perusahaan besar komposisi peralatan tidak menguntungkan. Usaha modernisasi dibeberapa pabrik pertenunan akan menghasilkan kenaikan produksi jang berarti.

Berdampingan dengan perusahaan-perusahaan jang mempergunakan Alat Tenun Mesin terdapat pula pabrik-pabrik dengan Alat Tenun Bukan Mesin. Djumlah ATBM jang terdaftar adalah amat besar, tetapi sebagian tidak bekerdja, malahan ada jang tidak pernah bekerdja, satu dan lain karena perusahaan-perusahaan ketjil ini dahulu didirikan untuk mendapatkan djatah

910088-(3).

benang belaka. Diperkirakan bahwa dimasa depan ATBM hanja dapat mempertahankan diri terhadap saingan apabila dipusatkan pada produksi bahan-bahan sarung dengan pola tradisionil dan bermutu kesenian. Ketjuali itu terdapat pula kemungkinan untuk menghasilkan djenis tekstil kasar. ATBM kurang dapat menghadapi saingan dibidang produksi djenis tekstil kwalitas jang dapat ditjetak dengan mesin.

Dalam industri peradjutan hambatan terdapat pada kurangnja modal kerdja. Gedjala ini berlaku pula bagi industri pemintalan dan pertenunan. Ketjuali itu peradjutan djuga menghadapi kesulitan akibat tidak baiknja benang tenun jang dihasilkan didalam negeri dan kurangnja fasilitas finishing didalam negeri. Sungguhpun begitu setjara umum industri peradjutan berada dalam keadaan jang lebih menguntungkan dari pada industri tekstil lainnja.

Dibidang finishing kapasitas pada umumnja terbatas pada bleaching, starching dan calendering, sedangkan pentjetakan-pentjetakan masih sangat kurang. Lebih kurang 80 persen dari kapasitas finishing ini terintegrasikan dengan industri pertenunan. Fasilitas jang tersedia hanja bekerdja pada tingkat 80 persen dari kapasitas. Dibandingkan dengan kemampuan industri pertenunan, maka kapasitas jang tersedia masih sangat kurang. Diperkirakan bahwa setelah rehabilitasi maka hasil pertenunan tidak dapat diselesaikan dengan kapasitas finishing jang tersedia. Karena itu industri finishing perlu diperluas.

Dewasa ini djumlah produksi tekstil lebih kurang 300 djuta meter. Direntjanakan agar dalam djangka waktu lima tahun jang akan datang tertjapai djumlah produksi sebesar 900 djuta meter. Untuk mentjapai sasaran itu maka digariskan kegiatan-kegiatan seperti tersebut diatas.

Bertolak dari garis fikiran ini maka rentjana investasi akan meliputi rehabilitasi industri pemintalan dan pertenunan, perluasan industri pemintalan dan finishing serta modernisasi industri pertenunan.

Biaja untuk rehabilitasi pertenunan, peradjutan dan finishing, jang sebagian besar merupakan usaha swasta, akan diusahakan melalui pindjaman kelompok (group loan) untuk devisa dan akan diusahakan pindjaman modal pemerintah melalui bank. Beberapa perusahaan asing menjatakan minatnja untuk menanam modal baik langsung maupun dalam bentuk joint venture untuk pendirian "integrated mills" atau modernisasi industri pertenunan jang sudah ada.

Djika disamping usaha-usaha ini terdapat iklim jang menggairahkan produksi dalam negeri, disertai terdjaminnja bahan baku serta perbaikan sarana-sarana, chususnja tjukup tersedianja tenaga listrik dengan harga jang wadjar, maka djumlah produksi akan mentjapai sasaran jang telah ditentukan.

Chusus untuk pemintalan, maka djumlah investasi tergantung kepada sedjauh mana usaha substitusi benang ingin ditjapai serta tjara jang ditempuh. Tanpa usaha-usaha tersebut diatas serta tanpa memperhitungkan unit-unit pemintalan Bekasi dan Palembang, maka djumlah investasi untuk mentjapai substitusi penuh akan meliputi djumlah jang besar.

Dengan usaha rehabilitasi, peningkatan efficiency dan djam kerdja, perluasan pada unit-unit jang ada serta pembuatan komponen-komponen mesin pemintalan didalam negeri maka biaja investasi dapat ditekan dengan djumlah jang tjukup besar.

Rehabilitasi pemintalan akan dilakukan dalam tahun-tahun pertama. Untuk ini diperkirakan pembiajaan Rp. 1,85 miljard.

Sesudah ada penelaahan feasibility dapat dilakukan perluasan unit-unit pemintalan dan pendirian projek-projek baru, dengan sasaran masing-masing memberikan penambahan 292.000 dan 120.000 mata pemintalan jang akan selesai pada tahun 1972/73. Untuk ini diperkirakan investasi Rp. 21,976 miljard.

Dengan penambahan mata pemintalan sebanjak itu akan ditjapai substitusi benang sebesar kurang lebih 50 persen.

Biaja devisa investasi tersebut dapat ditekan, djika pembuatan komponen-komponen unit pemintalan serta assemblingnja

TABEL VII - A - 8.

PRODUKSI TEKSTIL, 1968/69 — 1973/74

(dalam djutaan meter)

Tahun	Produksi	Persentase Pertambahan
1968/69	300	—
1969/70	450	50,0
1970/71	575	27,7
1971/72	675	17,4
1972/73	775	14,8
1973/74	900	16,1

TABEL VII - A - 9.

NILAI PRODUKSI TEKSTIL, 1969/70 — 1973/74

(dalam miljar rupiah, atas dasar 1 meter á Rp. 100,—)

1969/70	45,0	—
1970/71	57,5	27,7
1971/72	67,5	17,4
1972/73	77,5	14,8
1973/74	90,0	16,1

TABEL VII - A - 10.

KEBUTUHAN KAPAS DAN BENANG UNTUK INDUSTRI TEKSTIL, 1969/70 — 1973/74

(1000 bales, 500 lbs/bale untuk kapas dan 400 lbs/bale untuk benang, harga dalam miljar rupiah)

Tahun	Kapas		Benang Impor (cotton + non-cotton)	
	Kwantitas	Nilai	Kwantitas	Nilai
1969/70	200	9,10	184	14,49
1970/71	260	11,83	206	16,21
1971/72	290	13,19	232	18,27
1972/73	340	15,47	262	20,65
1973/74	400	18,20	295	23,24

Tjatatan : Djumlah-djumlah adalah dengan menghitung stocks.

INDUSTRI TEKSTIL
PRODUKSI
(DJUTAAN M)

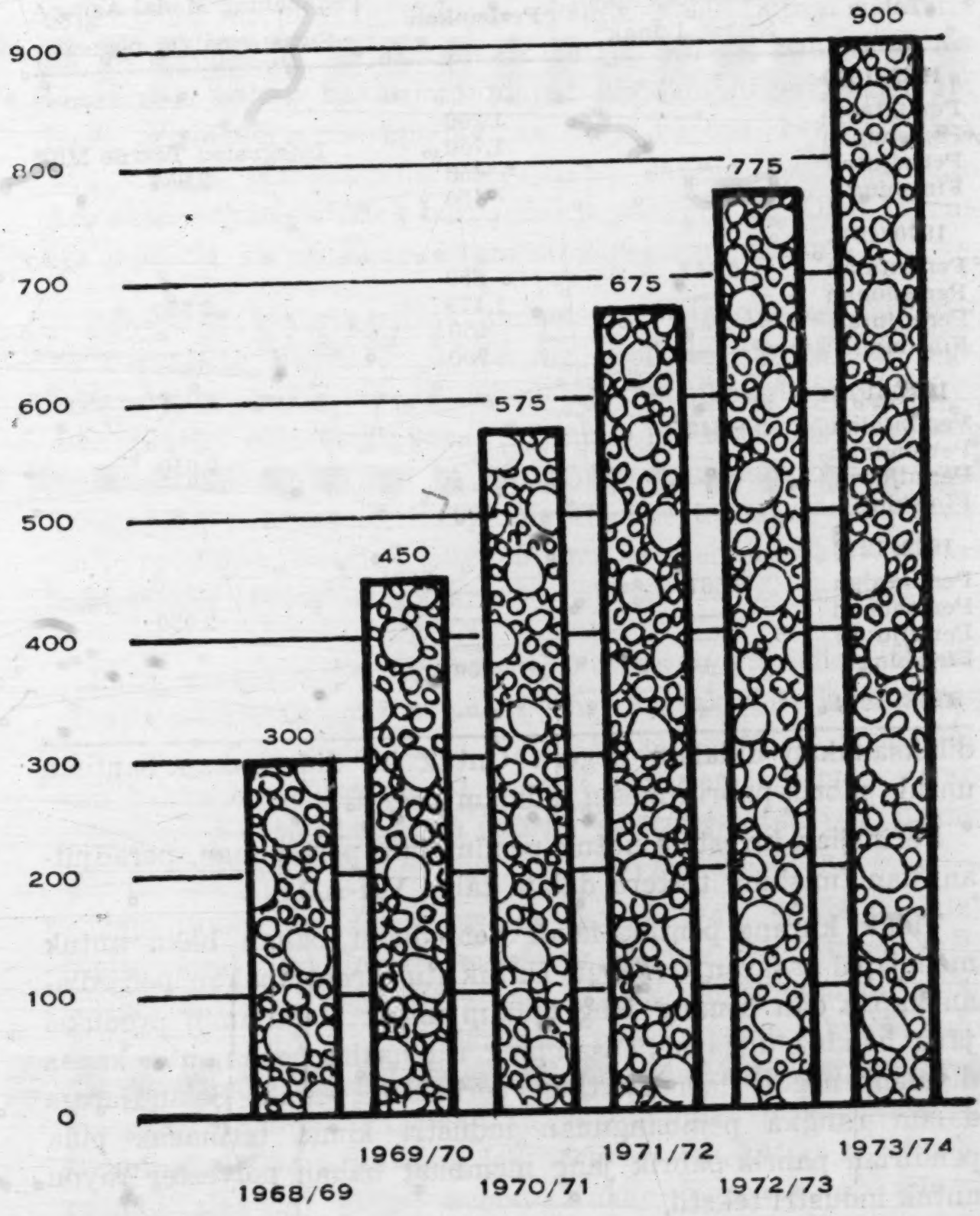

TABEL VII - A - 11.

PROGRAM INVESTASI DALAM INDUSTRI TEKSTIL
1969/70 — 1973/74
(dalam djutaan rupiah)

Tahun	Pindjaman dengan Sjarat Lunak	Perbankan	Penanaman Modal Asing/ Swasta dalam negeri
1969/1970			
Pemintalan	—	1.200	
Pertenunan	—	1.750	Integrated Textile Mill
Peradjutan	—	450	2.950
Finishing	—	450	
1970/1971			
Pemintalan	6.567	650	
Pertenunan	—	1.175	2.950
Peradjutan	—	450	
Finishing	—	900	
1971/1972			
Pemintalan	8.842	—	
Pertenunan	—	—	2.950
Peradjutan	—	—	
Finishing	—	900	
1972/1973			
Pemintalan	6.567	—	
Pertenunan	—	—	2.950
Peradjutan	—	—	
Finishing	—	900	
1973/1974	—	—	—

dilaksanakan didalam negeri. Untuk ini diusahakan bantuan untuk pabrik-pabrik mesin didalam negeri.

Perintjian investasi untuk pemintalan, pertenunan, peradjutan, dan finishing tertera dalam tabel VII-A-11.

Tidak kurang penting ialah penjediaan bahan baku untuk mentjapai sasaran tersebut. Untuk itu direntjanakan penjediaan kapas dan benang jang tjukup untuk mendjamin produksi jang hendak ditjapai. Disamping itu usaha penanaman kapas didalam negeri mendapatkan perhatian penuh. Selandjutnja dalam rangka pembangunan industri kimia termasuk pula pendirian pabrik-pabrik jang membuat bahan polyester rayon untuk industri tekstil.

Industri Pulp, Kertas dan Pertjetakan.

Industri kertas memiliki tjiri-tjiri jang sangat menguntungkan pembangunan ekonomi. Industri tersebut menggantikan impor sehingga menghemat devisa dan dalam djangka pandjang dapat pula merupakan industri ekspor. Selandjutnja industri ini menggunakan banjak tenaga kerdja, sedang bahagian terbesar dari bahan bakunja terdapat didalam negeri. Lagipula hasil produksinja, berupa kertas tulis, karton, kertas tjetak dan kertas pembungkus merupakan sarana bagi lain-lain kegiatan, sehingga effek bergandanja sangat luas. Oleh karena itu industri kertas akan dirangsang pembangunannja.

Dewasa ini pabrik-pabrik kertas jang berproduksi terdapat di Pematang Siantar, Padalarang, Blabak, Letjes dan Goa, sedang dua projek berada dalam taraf pembangunan, jaitu di Banjuwangi dan Martapura. Djumlah produksi lebih kurang 10.000 ton setahun dan bagian terbesar adalah kertas tulis. Disamping pabrik-pabrik kertas tersebut terdapat pula unit-unit produksi swasta jang umumnja menghasilkan kertas karton dan kertas bungkus.

Pada umumnja produksi berada dibawah kapasitas. Sebab-sebabnja terletak pada masalah jang dirasakan setjara umum, jaitu kurangnja spare-parts serta kesukaran dalam mendapatkan bahan baku dan modal kerdja; sebagian lagi pada persoalan chusus untuk beberapa pabrik, jaitu peralatan jang usang, lokasi jang tidak menguntungkan dan sebagainja.

Tahap pertama dalam usaha peningkatan produksi ialah peningkatan penggunaan kapasitas melalui rehabilitasi serta perbaikan dalam tjara-tjara usaha, baik tehnis maupun administratif. Untuk memudahkan pengumpulan bahan-baku pabrik-pabrik kertas jang mempergunakan batang padi direntjanakan penambahan alat-alat pengumpulan berupa "baling-machine". Dewasa ini diprojek perluasan di Letjes sedang dipasang alat-alat jang memungkinkan penggunaan seluruh

batang padi. Djika usaha ini memberikan hasil jang memuaskan, maka alat-alat sematjam ini akan dipergunakan pula dipabrik-pabrik Padalarang dan Blabak sehingga achirnja produksi dikedua perusahaan tersebut akan meningkat.

Hambatan-hambatan jang chas untuk Goa jang berkisar pada penjediaan air akan ditanggulangi; demikian pula beberapa penambahan peralatan untuk pengumpulan bahan baku. Di Pematang Siantar sedang diselesaikan pemetjahan persoalan persediaan air; demikian pula kekurangan tenaga listrik akan diusahakan penambahannja. Dalam pada itu diadakan perbaikan tjara-tjara kerdja.

Dalam waktu singkat akan diselesaikan pembangunan projek Banjuwangi dan projek perluasan Letjes. Chusus terhadap pabrik terachir akan diadakan penambahan alat-alat dalam tahun 1970/71 jang memungkinkan penambahan produksi dengan 3.000 ton setahun. Sementara itu diusahakan pemetjahan masalah projek kertas di Martapura jang telah lama tertunda.

Dengan rehabilitasi dan perluasan maka produksi akan meningkat dengan 122 persen dalam dua tahun pertama dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Diantara pabrik-pabrik kertas jang telah berproduksi hanja pabrik kertas Pematang Siantar jang menggunakan bahan baku dari hutan berupa kaju pinus. Selebihnja menggunakan batang padi atau bambu. Mengingat segi positip dari pemanfaatan hasil hutan maka pembangunan industri kertas diarahkan pada penggunaan jang lebih besar dari kaju sebagai bahan baku. Dengan demikian dimanfaatkan keuntungan-keuntungan ekonomi dengan mendirikan industri kertas dalam ukuran besar mengingat bahan baku kaju terdapat dalam djumlah jang besar pula. Minat modal luar negeri sangat besar terhadap hutan perkajuan ini. Masalah sekarang ialah berusaha agar tidak sadja bahan kaju diangkut keluar negeri akan tetapi pengolahannja dilangsungkan didalam negeri.

Dilihat dari segi produksi, pada waktu ini sebagian besar dari kertas jang dihasilkan adalah kertas tulis dan tjetak. Berdasarkan pada kebutuhan jang meningkat dari kertas-kertas djenis lain, terutama kertas koran, maka pola produksipun akan mengalami perubahan sehingga produksi djenis-djenis kertas akan dapat mengimbangi kebutuhan. Disamping itu penting pula industri kertas bungkus (kraft) berhubung dengan ditingkatkannja pembangunan industri-industri pupuk dan semen.

Pada waktu ini seluruh kebutuhan kertas bungkus harus diimpor, sedangkan pada tahun 1973 kebutuhan untuk industri-industri semen dan pupuk akan meningkat sampai 20.000 ton per tahun. Dalam rangka ini semua maka prospek bagi industri kertas sangat terang. Karena itu diadakan penelaahan menjusun pola pembangunan industri kertas serta industri-industri perkajuan jang lain setjara nasional. Hal ini meliputi pembangunan unit-unit pulp dan kertas jang besar-besar. Dalam hubungan ini usaha pembukaan hutan akan dikaitkan dengan investasi dalam industri kertas atau industri-industri perkajuan lain setjara sedemikian rupa sehingga posisi bahan baku akan terus diamankan sedang industri-industri jang mengolah hasil hutan dapat didjaga perkembangannja setjara harmonis dan teratur. Disamping pembangunan industri pulp dan kertas jang besar-besar akan didorong pula pembangunan industri kertas jang ketjil-ketjil dan tersebar diberbagai daerah jang menggunakan pulp dari hasil produksi unit-unit besar tersebut.

Sementara pola pembangunan industri kertas masih perlu disempurnakan, sasaran produksi dan perkembangan industri kertas dalam lima tahun direntjanakan sebagai tersebut dalam Tabel VII-A-12 dan Tabel VII-A-13.

Apabila produksi kertas meningkat maka kegiatan-kegiatan jang berkaitan dengan kertas akan turut terangsang pertumbuhannja. Dalam hubungan ini industri pertjetakan memperoleh perhatian jang chusus. Pertumbuhan penduduk, mening-

katnja peladjar dan mahasiswa, meluasnja kemampuan membatja dan menulis, serta bertambahnja tingkat pendapatan menimbulkan kebutuhan akan batjaan serta lektur umum. Dalam hubungan ini industri kertas dan industri pertjetakan sebagai sarana batjaan menduduki tempat jang strategis.

Pada tahap permulaan akan didahulukan perlengkapan spare-parts serta usaha rehabilitasi; untuk ini diusahakan pembiajaan melalui dana perbankan guna menampung kebutuhan akan alat-alat perlengkapan pertjetakan melalui perkreditan djangka menengah atau pandjang. Selandjutnja diberikan dorongan kepada usaha swasta dalam membangun industri pertjetakan baru. Tersedianja pasaran jang luas bagi pertjetakan dan ditjiptakannja iklim jang menggairahkan pertumbuhannja akan merupakan daja penarik bagi mobilisasi modal swasta disektor ini.

TABEL VII - A - 12.

PRODUKSI KERTAS, 1968/69 — 1973/74

(dalam ribuan ton, miljar rupiah)

Tahun	Produksi	Persentase Pertambahan	Nilai
1968/69	10	—	0,63
1969/70	16	60,0	1,09
1970/71	35,5	121,9	2,24
1971/72	46,2	30,9	3,14
1972/73	46,2	0,0	3,14
1973/74	166,2	258,1	10,49

KERTAS KORAN -/60

KERTAS KRAFT & K. TULIS -/60 (LOKASI BELUM DI

■ LOKASI PROJEK

PRODUKSI DLM. RIBUAN TON TH 1968 / TARGET 73/74

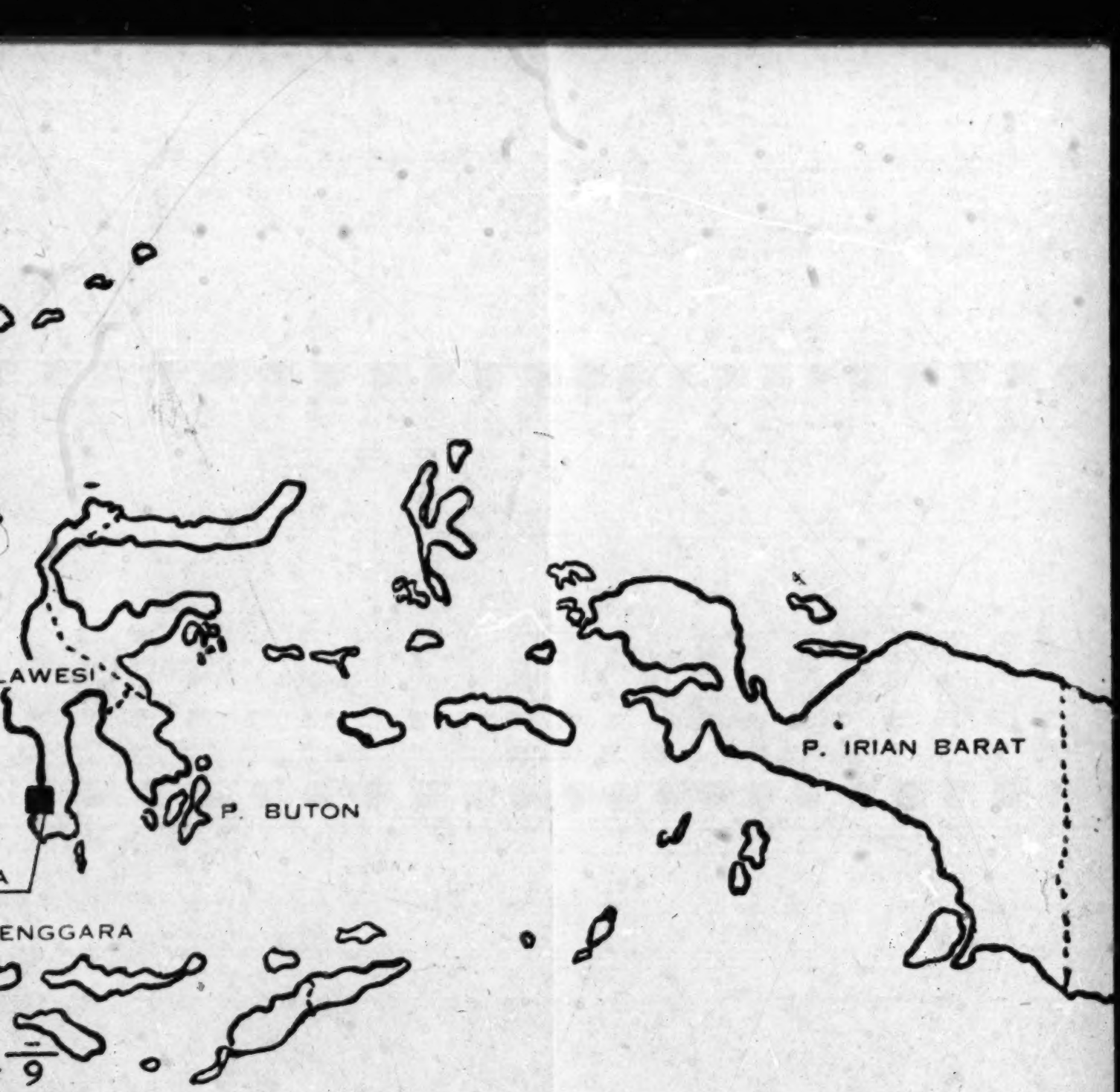

TETAPKAN I

SUB SEKTOR: INDUSTRI

INDUSTRI KERTAS

TABEL VII - A - 13.

PERKEMBANGAN INDUSTRI KERTAS, 1968/69 — 1973/74
(dalam ribuan ton)

	1968/69	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74
Letjes	3	4	9	12	12	12
Padalarang	3	3	4	4	4	4
Blabak	2	2.5	4	7.2	7.2	7.2
P. Siantar	1	1.5	3	4.5	4.5	4.5
G o a	0.5	1.5	6	9	9	9
Banjuwangi	—	3	9	9	9	9
Swasta	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Unit I (Kertas koran)	—	—	—	—	—	60
Unit II (Kertas kraft + tulis)	—	—	—	—	—	60
	10	16	35.5	46.2	46.2	166.2

TABEL VII - A - 14.

PROGRAM INVESTASI DALAM KERTAS, 1969/70 — 1973/74
(dalam djutaan rupiah)

Tahun	Bantuan Projek	Perbankan	Penanaman modal asing
1969/70	312	953	—
1970/71	—	1.083	—
1971/72	5.250	—	5.250
1972/73	8.750	—	8.750
1973/74	2.750	—	2.750

Industri Farmasi.

Dewasa ini terdapat lebih kurang 140 buah pabrik assembling farmasi, jang menghasilkan kira-kira 50 persen dari kebutuhan akan obat-obatan, sedangkan sisanja diimpor. Tjirichas dari industri farmasi adalah bahwa 90 persen dari bahan bakunja harus diimpor dari luar negeri. Penggunaan bahan

baku dari dalam negeri umumnja terbatas pada beberapa djenis, seperti kina, jodium dan lain-lain.

Permasalahan jang terdapat dibidang ini tidak berbeda dengan lain industri jaitu: kekurangan spare-parts dan modal kerdja, peralatan dibeberapa assembling plants sudah tua dan sebagainja.

Sementara distribusi perbekalan pada waktu ini kurang lantjar dan merata jang disebabkan karena kurangnja djumlah aparat distribusi dan masih pandjangnja mata rantai distribusi sehingga harga mendjadi mahal.

Dewasa ini pengawasan obat ("drug-control") belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinja dan research belum dapat didjalankan setjara intensif sehingga banjak bahan-bahan dalam negeri belum dapat dimanfaatkan. Untuk pembangunan industri farmasi diusahakan dorongan bagi modal swasta, baik nasional maupun asing, sehingga dapat menambah djumlah dan djenis produksi obat-obatan.

Diusahakan agar modal swasta asing memperkembangkan atau memperluas pabrik farmasi assembling mendjadi farmasi dasar jang dapat menghasilkan bahan-bahan dalam kategori "life-savings drugs", antara lain anti-biotika, sulfa, acetosal dan sebagainja. Untuk mempertjepat service kepada masjarakat dan menekan biaja maka dilakukan usaha pembangunan prasarana distribusi, baik dalam memperbanjak djumlah apparat maupun memperpendek rantai distribusi.

Industri Ringan dan Keradjinan Rakjat.

Industri ringan sebagai keseluruhan merupakan industri jang terbesar di Indonesia, terdiri dari kurang lebih 20.000 perusahaan dan mentjakup berbagai matjam industri, seperti industri pangan, minuman, rokok, perkajuan, bahan-bahan bangunan, barang-barang keperluan sehari-hari dan sebagainja.

Diperkirakan bahwa lebih dari 50 persen dari seluruh nilai dibidang industri dihasilkan oleh industri ringan, sedangkan karena sifatnja memberikan lapangan kerdja jang tjukup

besar. Disamping perusahaan ketjil dengan djumlah tenaga kerdja kurang dari 25, terdapat pula perusahaan-perusahaan jang besar-besar dengan ribuan pekerdja, seperti halnja beberapa perusahaan rokok, minjak, minuman dan sebagainja. Tjiri lain ialah bahwa hampir semua perusahaan jang termasuk disektor industri ringan ini adalah milik swasta.

Dewasa ini kebanjakan perusahaan bekerdja dibawah kapasitas semestinja, jang disebabkan beberapa hambatan, seperti kekurangan spare-parts, permodalan technical know-how, mutu hasil jang kurang baik. Semuanja ini menempatkan perusahaan-perusahaan dalam keadaan jang tidak menguntungkan terhadap saingan impor. Perbaikan iklim jang dapat merangsang kegairahan dibidang industri, berwudjud dalam kebidjaksanaan perpadjakan, kebidjaksanaan impor jang membantu pertumbuhan industri dalam negeri, serta kebidjaksanaan perkreditan akan memberikan pengaruh baik terhadap peningkatan produksi dibidang ini. Demikian pula penghapusan berbagai peraturan dari pemerintah pusat dan daerah jang menghambat pertumbuhan industri ringan. Dengan mengarahkan rehabilitasi, perluasan dan investasi baru setjara selektif maka produksi disektor industri ringan akan meningkat dengan tjepat. Beberapa hasil produksi industri ringan, seperti rokok, pangan, minuman dan sebagainja sudah merupakan barang ekspor. Dengan peningkatan mutu maka beberapa barang-barang lainnja dapat merupakan industri ekspor pula.

Selain rehabilitasi setjara selektif, maka direntjanakan projek-projek jang bersifat petundjuk dan diusahakan pelaksanaannja oleh para industriawan. Petundjuk-petundjuk mengenai projek-projek tersebut bukan berarti menutup lapangan-lapangan lain, tetapi sekedar memberikan arah kepada pembangunan tjabang-tjabang industri jang merupakan penundjang dan pendorong pentjapaian sasaran pokok Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Hal ini adalah sesuai dengan tugas Pemerintah untuk membina dan mengawasi kelangsungan pembangunan industri.

Bidang lain jang mendapat perhatian adalah keradjinan rakjat, jang sebagian besar merupakan usaha-usaha ketjil-ketjilan, beraneka ragam bentuk dan tjoraknja, tersebar luas diseluruh pelosok tanah air dan sebagian besar dilakukan setjara sambilan dengan modal ketjil serta peralatan jang sederhana.

Pertumbuhan keradjinan rakjat ini menambah kesempatan kerdja, meningkatkan daja kreasi dan produktivitas penduduk, menambah sumber pendapatan, dan merupakan penjaluran naluri kesenian jang terpendam dalam sanubari rakjat.

Untuk mentjapai pertumbuhan jang diharapkan maka diambil langkah-langkah untuk mengatasi masaalah-masaalah jang merupakan hambatan, baik jang berada dibidang permodalan, pengadaan bahan baku, pemasaran maupun pengorganisasian.

Hakekat pendekatan dibidang keradjinan rakjat adalah memberi bimbingan melalui induk-induk dengan fungsi jang sebenarnja, diantaranja diutamakan induk-induk keradjinan pandai besi, penggergadjian kaju, pengerdjaan bambu, pengolahan rotan dan sebagainja.

TABEL VII - A - 15.

PROGRAM PENINGKATAN KERADJINAN RAKJAT, 1969/70 - 1973/74
(dalam djutaan rupiah)

Kegiatan	1969/70 - 1973/74
1. Induk-induk Keradjinan (pandai besi, penggergadjian kaju, pengerdjaan bambu, pengolahan rotan dan lain-lain	794,1
2. Pilot projek daerah minus Gunung, Nusa Tenggara Timur dan lain-lain (ATBM, ulat sutera)	251,9
3. Peningkatan lapangan kerdja	700,—
4. Peningkatan ekspor barang keradjinan	460,2
5. Pengembangan keradjinan rakjat	290,—
	2.496,2

Chusus untuk barang-barang hasil keradjinan jang berselera kesenian maka akan ditingkatkan langkah-langkah untuk melantjarkan pendjualan kepada pariwisatawan maupun untuk ekspor. Dalam Tabel VII-A-15 tersimpul program untuk meningkatkan keradjinan rakjat.

Industri Logam, Mesin, Peralatan dan Prasana

Industri ini mentjakup produksi komponen dan barang-barang modal dari bermatjam-matjam logam, baik besi/badja non besi/badja (non-ferrous) seperti sections, bars, kawat, plates, sheets, pipa-pipa, alat-alat atau bagian alat-alat untuk penggunaan dipertanian, industri dan prasarana, mesin-mesin listrik maupun non-listrik untuk berbagai keperluan produksi maupun assembling alat-alat pembuat djalan, alat-alat pengangkutan serta alat-alat telekomunikasi. Kumpulan industri ini meliputi perusahaan-perusahaan milik Pemerintah (Perusahaan-perusahaan Negara Barata, Boma, Metrika dan seterusnja), unit-unit produksi Pemerintah non-P.N. (Pindad dan lain-lain) maupun perusahaan-perusahaan Swasta.

Meskipun pada achir-achir ini telah terdapat sedikit perbaikan, namun didalam kebanjakan perusahaan penggunaan kapasitas masih rendah. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah jang djuga dihadapi oleh lain-lain djenis industri, jaitu antara lain kurangnja tenaga listrik, mesin-mesin dan perlengkapan jang sudah tua, kekurangan modal kerdja, keadaan jang tidak menguntungkan terhadap saingan barang-barang import, kurangnja technical know-how, kurangnja tenaga skill dan sebaliknja kelebihan tenaga non-skill, kurang tingginja mutu hasil produksi dan sebagainja. Terbatasnja penjediaan tenaga listrik merupakan penghambat untuk bekerdja penuh dan ditambah dengan biaja jang tinggi menjebabkan ongkos produksi mendjadi tinggi. Dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini diusahakan penambahan penjediaan tenaga listrik, jang diharapkan akan dapat mengurangi hambatan tersebut.

Didalam beberapa perusahaan-perusahaan negara sementara alat dan mesin mempunjai usia mendekati setengah abad. Be-

kerdja dengan alat-alat jang kurang up-to-date dan dengan design jang tua terang tidak akan menguntungkan. Beberapa perusahaan telah mulai dengan penggantian mesin-mesin dan alat-alat jang baru, tetapi perbaikan keseluruhan bagi djenis industri belum terlaksana. Untuk memenuhi kebutuhan modal untuk modernisasi dan modal kerdja, akan disediakan modal penjertaan Pemerintah melalui Bank, sedang usaha peningkatan mutu dan efficiency produksi dihubungkan dengan bantuan teknik dan management.

Chususnja industri mesin dan konstruksi, jang masih untuk sebagian besar bekerdja atas dasar pesanan (job-order) dan hasil produksinja meliputi berbagai djenis "industrial goods" maka rentjana produksi serta pemasarannja dikaitkan untuk kebutuhan-kebutuhan sektor-sektor dan tjabang-tjabang industri jang lain. Sehubungan dengan itu perusahaan-perusahaan industri mesin dan konstruksi milik Pemerintah sedang diserasikan dalam pembagian fungsi dan tugasnja menurut specialisasi jang diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor lain dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun tersebut diatas. Untuk mentjapai hal ini akan dibentuk suatu organisasi pasaran bersama jang selain mengusahakan pasaran djuga memberikan petundjuk-petundjuk mengenai barang-barang jang dibutuhkan, kekurangan-kekurangan hasil produksi jang lalu dan sebagainja. Dalam hubungan ini diusahakan untuk mengurangi ketjenderungan jang terdapat dalam masjarakat dan diantara sementara instansi-instansi Pemerintah untuk lebih menjukai barang-barang impor.

Program sektor industri logam, mesin-mesin dan peralatan meliputi produksi alat-alat pertanian (sprayer, pompa air, mesin-mesin pengolahan beras dan sebagainja), alat-alat listrik (switches, kawat listrik insulated, electromotor dan sebagainja), alat-alat industri tekstil, pertambangan, kebutuhan infrastruktur (kawat, besi, siku, bars, welding rod, pipa-pipa hitam galvansed, dan seterusnja). Diusahakan agar potensi sektor industri ini meningkat dengan 100 persen dengan djangka waktu lima tahun.

Permintaan "industrial goods" jang dihasilkan industri ini akan berkembang sedjalan dengan perkembangan industri „barang-barang konsumsi", untuk kemudian berangsur-angsur semakin madju ketarap menghasilkan "industrial goods", seperti bahan baku, mesin-mesin, alat-alat perlengkapan lainnja, jang diperlukan untuk produksi barang-barang tersebut.

Dalam hal industri alat-alat angkutan darat, maka akan dilakukan tindakan konsolidasi jang diarahkan kepada pembatasan matjam kendaraan jang diimpor, lebih diutamakan kendaraan kommersiil (truck dan bis) serta pemasukan dalam bentuk C.K.D. Semua ini dimaksudkan untuk menumbuhkan perusahaan assembling jang wadjar serta mendorong perkembangan dengan pembuatan body-part maupun spare-part lainnja. Dengan koordinasi pabrik-pabrik mesin lainnja dapat diletakkan dasar jang kuat untuk pendirian industri kendaraan bermotor dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun selandjutnja.

Adapun mengenai industri prasarana perhubungan laut diusahakan projek-projek dengan djalan mengutamakan satu projek jang dianggap terpenting dan sudah djauh perkembangannja daripada melaksanakan keseluruh lima projek sekaligus. Mengenai industri prasarana perhubungan udara, maka sementara ditudjukan kepada survey, baik jang menjangkut sarana-sarana maupun industrinja sendiri..

Perkembangan industri serupa ini tidak terlepas dari pertumbuhan tenaga tehnik jang semakin banjak. Sesungguhnja industri dapat berkembang pesat apabila masjarakat memiliki tingkat kesadaran tehnologi jang dapat menampung pertumbuhan industri itu.

Dewasa ini masjarakat Indonesia belum seberapa technologi minded. Pola kehidupan masjarakat agraris masih melekat dalam bagian terbesar penduduk kita. Akan tetapi melalui kebidjaksanaan pendidikan jang setjara sadar menumbuhkan tenaga-tenaga serta ahli-ahli tehnik, perkembangan industri jang semakin lama semakin menggunakan tehnologi jang madju menambah kesempatan bagi perobahan serta perluasan pandang-

910088-(4).

an hidup manusia Indonesia. Pandangan hidup jang statis agraris-centris dapat dirangsang perobahannja kedjurusan pandangan hidup jang lebih dinamis ber-orientasi pada kemadjuan tehnologi jang modern.

Dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini, djuga tidak terbatas pada usaha investasi melulu. Pembinaan tjabang-tjabang industri dan usaha investasi ini pada dirinja djuga bergantung pada iklim perobahan jang berlangsung didalam masjarakat.

Maka ichtiar menggerakkan perobahan ini pulalah merupakan hakekat pembinaan industri ketjil dan sedang tidaklah semata-mata ditindjau manfaatnja dari sudut penambahan produksi melainkan djuga sebagai usaha penanaman benih bagi perobahan pandangan hidup serta penjemaian bibit tehnologi, sehingga lambat-laun kemadjuan tehnologi dapat dihajati pula. Dalam iklim kehidupan masjarakat jang menghajati hasrat kemadjuan tehnologi dimungkinkan perobahan dan kemadjuan jang lebih pesat.

B. PERTAMBANGAN

KEADAAN DAN MASALAH-MASALAH

1. Pendahuluan.

Sumbangan pertambangan didalam perekonomian Indonesia belum begitu besar. Demikian pula tenaga kerdja jang bekerdja dan hidup setjara langsung dari pertambangan hanja berdjumlah lebih kurang 70.000 tenaga.

Salah satu sebab daripada keadaan tersebut ialah bahwa sedjak petjahnja perang dunia II penjelidikan umum dibidang geologi setjara sistimatis telah terhenti. Kegiatan-kegiatan penjelidikan dilakukan setjara terbatas dan selektif terhadap daerah-daerah jang hanja berhubungan langsung dengan projek-projek tertentu. Hal ini menjebabkan usaha-usaha pertambangan jang baru praktis tidak ada.

2. Minjak dan Gas Bumi.

Produksi minjak bumi Indonesia menundjukkan kenaikan jang melondjak. Angka produksi tahun 1967 ialah sebesar 186 djuta barrel, jang berarti suatu kenaikan sebesar 160 persen daripada produksi 1957. Akan tetapi dibandingkan dengan tingkat produksi didunia pada umumnja, maka produksi Indonesia malahan menundjukkan kemunduran. Djika dalam tahun 1957 produksi Indonesia merupakan 2 persen dari produksi dunia, maka kini produksi Indonesia bahkan sudah mendjadi kurang dari 1,5 persen dari produksi dunia.

Gas bumi belum dimanfaatkan dengan baik dan penggunaannja terbatas pada usaha-usaha produksi minjak (menaikkan tekanan sumur dan sebagainja) dan dimana mungkin dipergunakan didalam kilang-kilang, terutama sebagai bahan-bakar. Sedjak tahun 1963 sebagian ketjil dari gas bumi dipergunakan untuk produksi pupuk. Dalam tahun 1967 hanja 5 persen dari gas bumi dipergunakan oleh fihak ketiga dan selebihnja (47 persen) karena dipandang tidak ekonomis, hilang atau dibakar.

Dalam 10 tahun terachir ini, keadaan kilang praktis tidak mengalami perubahan. Dalam tahun 1967 dari kapasitas sebesar 276.000 BBLD (70 persen dimiliki oleh Negara) jang berada di Pangkalan Susu, Pladju, Sungai Gerong, Wonokromo, Tjepu, dan Balikpapan 70 djuta barrel (atau 38 persen dari seluruh minjak bumi Indonesia) dikilang. Kilang-kilang sendiri bekerdja 77 persen dari kapasitasnja dan lebih separoh dari hasil-hasilnja dipergunakan didalam negeri.

Pemakaian bahan bakar minjak didalam 5 tahun terachir menundjukkan ketidak-mantapan, jaitu didalam 3 tahun pertama terdapat kenaikan total sebesar 40 persen sedangkan didalam 2 tahun terachir terdjadi penurunan. Kenaikan pemakaian bahan bakar minjak bukan disebabkan oleh peningkatan kebutuhan setjara keseluruhan, tetapi terutama karena pengalihan penggunaan dari bahan bakar lain kebahan bakar minjak dan karena konsumsi jang berlebih-lebihan.

Dalam tahun 1967 60 persen dari djumlah minjak mentah (atau 42 djuta barrel) jang dikilang diangkut dengan kapal-kapal tanki. Kapal-kapal tanki ini untuk 98 persen merupakan milik asing jang ditjarter. Untuk keperluan pembekalan bahan bakar minjak dalam negeri sendiri diperlukan 27 djuta barrel. Untuk pengangkutannja Negara telah langsung menguasai 78 persen dari kapal tanki jang diperlukan.

Besar armada tanki jang sudah dimiliki Negara ialah 180.000 DWT. Disamping itu 70.000 DWT berada dalam status sewa beli. Armada ini dipakai baik untuk pengangkutan dalam negeri maupun untuk kepentingan ekspor.

Didalam kerangka usaha untuk mempunjai suatu pusat penelitian sendiri di Indonesia, maka disamping fasilitas-fasilitas penelitian jang setjara tradisionil sudah terdapat dalam perusahaan-perusahaan minjak, kini sedang dibangun pula didalam Lembaga Minjak dan Gas Bumi fasilitas-fasilitas penelitian dan pendidikan jang baru.

3. **T i m a h.**

Produksi timah dalam beberapa tahun achir-achir ini, ketjuali dalam tahun 1964, menundjukkan garis menurun. Baru sesudah tahun 1966 terdjadi kenaikan produksi kembali dengan hampir 10 persen tiap tahunnja. Selain disebabkan oleh persoalan-persoalan institusionil penurunan produksi timah ini disebabkan pula oleh penurunan kekajaan timah sebagaimana ditundjukkan oleh data tjadangan timah jang diketahui di Bangka, Belitung. dan Singkep.

Ketetapan-ketetapan peraturan ekspor timah ditahun-tahun jang lalu, dimana sebagian ketjil dari hasil devisa diberikan kepada perusahaan timah, tidak memungkinkan diadakannja pemeliharaan dan rehabilitasi setjara wadjar. Dalam tahun 1961 hanja 15 persen devisa dari hasil ekspor timah diperuntukkan perusahaan timah. Dalam tahun 1963 djumlah ini dinaikkan mendjadi 25 persen, sedang dalam tahun 1966, 1967 dan 1968 djumlah ini berturut-turut dinaikkan mendjadi 50 persen, 75 persen dan 85 persen.

Enam puluh persen dari produksi timah merupakan hasil operasi kapal keruk, baik dekat pantai maupun didaratan, dan selebihnja merupakan produksi dari tambang-tambang terbuka.

4. **Bauksit.**

Keadaan tambang bauksit dipulau Bintan lebih menggembirakan, baik dalam peralatan maupun dalam ketentuan-ketentuan peraturan ekspor. Sampai dengan tahun 1964 Bintan ditetapkan sebagai daerah dollar dan berlakulah peraturan-peraturan ekspor jang berlain-lainan. Akan tetapi achir-achir ini ditetapkan bahwa 90 persen devisa dari hasil ekspor bauksit diperuntukkan perusahaan tambang bauksit. Dengan adanja persetudjuan pemasaran dengan Djepang maka produksi kini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan persetudjuan tersebut.

5. **Nikkel.**

Sampai saat ini bidji nikkel diekspor ke Djepang atas dasar production sharing. Dalam hubungan ini rejection point dari kadar nikkel, jang semula adalah sebesar 2,9 persen, kini telah diturunkan mendjadi 2,6 persen.

6. **Emas dan Perak.**

Pada umumnja dimana-mana tambang emas memperoleh subsidi negara. Pemberian subsidi ini disebabkan karena harga emas praktis tidak mengalami perobahan, sedangkan sebaliknja biaja produksi emas menundjukkan suatu gedjala jang menaik. Keadaan di Indonesia berlainan. Biaja produksi emas relatif lebih rendah sedangkan harga emas relatif lebih tinggi dari pada dilain-lain negara. Djika tambang-tambang memiliki prasarana jang baik, maka akan dapat memberikan hasil jang ekonomis dapat dipertanggung-djawabkan.

Tambang emas jang sekarang dieksploitir Negara adalah di Tjikotok, Djawa Barat. Di Djakarta terdapat pula suatu industri pengolahan logam mulia jang mengolah hasil pertambangan emas, perak, platina, dan sebagainja. Industri ini bekerdja dibawah kapasitas jang ada. Hal ini disebabkan karena pengadaan bahan jang perlu diolah masih djauh dibawah kapasitas.

7. **Mangan.**

Sampai saat ini pertambangan mangan diusahakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa Barat didaerah Karangnunggal (Tasikmalaja), dan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta didaerah Kauripan (Kulon Progo). Produksi mangan sedjak tahun 1961 menurun dengan menjolok sehingga tidak didapatkan suatu ekspor berdasarkan sales contract jang berdjangka pandjang.

8. **Belerang.**

Pertambangan belerang saat ini diusahakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa Barat didaerah Wanaradja. Produksi jang dihasilkan relatif sangat rendah.

9. **Intan.**

Pertambangan intan merupakan pertambangan rakjat jang dilakukan didaerah Martapura dan didaerah Sungai Gula (Kalimantan Tengah). Produksi diperkirakan 3.000 sampai 5.000 karat tiap bulan. Sebagian dari intan didaerah Martapura diekspor. Sedjak tahun 1967 dimulai penjelidikan untuk menambang setjara mekanis, tetapi usaha ini menghadapi kesulitan pembiajaan dan faktor-faktor lain.

10. **Batubara.**

Setelah perang dunia kedua produksi batubara menurun dengan menjolok. Pertama-tama, ini disebabkan karena biaja-biaja untuk keperluan pertambangan batubara tidak tersedia dengan tjukup sehingga produksi harus dibatasi dengan akibat meningkatnja biaja produksi persatuan dan dengan demikian pula harga batubara. Ketiga, kedua perkembangan tersebut mendorong tidak direhabilitasikannja tungku-tungku modal lama, jang chusus menggunakan batubara sebagai bahan bakar, dan penggunaan satuan-satuan diesel sebagai gantinja. Dengan perobahan pola konsumsi batubara keminjak bumi ini maka pendapatan pertambangan batubara semakin berkurang sehingga tidak memungkinkan dilakukannja perawatan pertambangan batubara jang semestinja.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH

1. Pengembangan dan Pembinaan.

Pengusahaan pertambangan mempunjai tjiri-tjiri chusus, jaitu:

(a) membutuhkan modal jang besar dan pengetahuan jang luas,

(b) bersifat pertarohan jang mengandung risiko jang besar,

(c) tidak dapat memberikan hasil kepada pemilik modal dalam waktu jang singkat, dan

(d) bersifat "depleting assets", jaitu kekajaan pertambangan terus berkurang bila digali dan tidak dapat diganti, sedang pertambahan kekajaan hanja terdjadi dengan penemuan deposito baru berdasarkan penjelidikan/eksplorasi jang intensip.

Berhubung dengan itu kebidjaksanaan jang ditempuh Pemerintah ialah untuk mengundang modal luar negeri untuk menjelidiki, menggali, mengolah, dan memperkembangkan endapan mineral didalam batas-batas jang dimungkinkan Undang-undang No. 1/1967. Kerdja sama dengan fihak luar negeri diusahakan agar selalu dikaitkan dengan rentjana pengolahan bahan-bahan galian didalam negeri sendiri, baik sampai setengah djadi maupun sampai mendjadi barang djadi, baik untuk meningkatkan harga ekspor maupun untuk didjadikan sebagai bahan baku untuk industri.

Oleh Pemerintah telah diselesaikan peraturan-peraturan untuk pertambangan diluar bidang minjak dan gas bumi jang mentjakup materi-materi pelaksanaan Undang-undang dibidang pertambangan, pungutan Negara, keringanan dan kelonggaran berbagai padjak dibidang pertambangan, penggolongan bahan galian, dan lain-lain peraturan legislatif.

Terbatasnja pengetahuan dan kurangnja penjediaan maupun penjadjian data/bahan-bahan galian jang terdapat di Indonesia merupakan suatu hambatan untuk usaha-usaha penggalian selandjutnja, baik oleh negara maupun oleh swasta nasional/

asing. Usaha-usaha survey geologie beserta pemetaan-pemetaannja merupakan kegiatan-kegiatan jang penting sebagai pre-invesment. Oleh karena itu disediakan biaja-biaja sendiri disamping bantuan-bantuan jang didapat dari luar negeri. Demikian pula akan ditingkatkan kegiatan-kegiatan dalam penjuluhan, pengaturan-pengaturan, pengawasan-pengawasan, dan perantjangan peraturan-peraturan jang diperlukan bagi pentjiptaan iklim jang sehat untuk pengembangan usaha-usaha pertambangan.

2. Eksplorasi dan Penelitian.

Usaha-usaha dalam bidang pertambangan, baik jang dilakukan oleh perusahaan negara, swasta nasional atau asing maupun oleh rakjat sendiri, berlandaskan pada penjediaan data dasar, perundang-undangan, penjuluhan, bimbingan, dan sebagainja. Kegiatan-kegiatan ini meliputi bidang geologi dan pertambangan.

Bidang geologi tidak terbatas pada penjelidikan, penentuan dan pemetaan potensi didaerah-daerah, tetapi bergerak pula dalam usaha-usaha jang langsung bermanfaat untuk sektor-sektor lain seperti:

(a) bidang pertanian, pengairan, industri, infrastruktur, geologi tehnik, konservasi air, dan urban geologi, jang merupakan dasar untuk perentjanaan pembangunan bangunan-bangunan, pembuatan-pembuatan djalan, djembatan, pembangunan kompleks industri, pembangunan kota dan sebagainja;

(b) bentjana alam dengan vulkanologi, dan pentjegahan bandjir; dan

(c) bidang ilmiah berupa penjelidikan dilaboratorium, dokumentasi, publikasi, dan sebagainja.

Tersedianja data jang lengkap sangat penting. Data jang lengkap dapat mengakibatkan pembukaan tambang-tambang baru baik oleh pengusaha dalam maupun luar negeri.

Bidang pertambangan meliputi tugas-tugas pengaturan kuasa pertambangan, pengawasan serta bimbingan usaha-usaha pertambangan, dan penjiapan peraturan-peraturan dibidang pertambangan, baik jang dilaksanakan oleh fihak swasta asing atau nasional maupun rakjat:

(a) dalam bidang pentjadangan dan konservasi: menentukan deposit-deposit jang dapat ditambang rakjat;

(b) dalam bidang bimbingan: mengarahkan kegiatan produksi untuk menggunakan peralatan jang ada se-efektif-efektifnja;

(c) dalam bidang penelitian tambang dan pengolahan bahan galian: melakukan research produksi dalam skala ketjil (pilot plan); dan

(d) dalam bidang penjiapan peraturan: menjelenggarakan sensus pertambangan untuk memudahkan penentuan-penentuan kebidjaksanaan pembangunan pertambangan dimasa depan.

3. Pendidikan.

Mengingat kurangnja kader-kader dan tenaga ahli jang berpendidikan menengah, semi akademi, dan akademi dibidang geologi dan pertambangan, chususnja dibidang keahlian pengolahan bahan galian (penambangan, pemboran, dan sebagainja), serta dibidang management, maka diusahakan upgrading tenaga-tenaga ahli. Disamping itu akan diteruskan pula usaha-usaha pendidikan-pendidikan kedjuruan, dan pendidikan kader-kader untuk bidang-bidang geologi, eksplorasi, ekploitasi, dan pengolahan dari bahan-bahan galian/pemboran, baik mineral maupun batubara, minjak dan gas bumi. Bidang-bidang metalurgi, petrokimia, ekonomi, dan administrasi pertambangan merupakan pula sasaran-sasaran jang penting. Dibidang pendidikan geologi dan pertambangan akan sangat bermanfaat pula bagi sektor lain seperti pertanian, industri, dan sarana.

4. Kontrak Karya/Penanaman Modal Asing.

Kontrak-kontrak Karya telah ditanda-tangani dengan:

(a) Free Port Sulphur untuk penambangan tembaga di Irian Barat dengan investasi $ 1,7 djuta untuk eksplorasi;

(b) N.V. Biliton Mij. untuk penambangan timah diperairan antara Singkep dan Bangka, dan Pulau Karimata dan sekitarnja, dengan investasi $ 1 djuta untuk eksplorasi; dan

(c) Inco untuk penambangan nikkel di Sulawesi Tengah, Tenggara dan Selatan dengan investasi $ 1,5 djuta untuk eksplorasi. Eksploitasi baru akan dimulai djika hasil eksplorasi memberikan tjukup ketegasan adanja tjadangan jang tjukup jang dapat mendjamin pengusahaan produksi jang ekonomis. Dalam pada itu telah dibuka pula penawaran internasional untuk survey dan pengembangan projek-projek pertambangan baru dibidang:

(a) **Timah:**

1. Daerah kepulauan serta perairan Riau Utara dan Selatan.
2. Daerah endapan primer di Bangka dan Belitung serta endapan-endapan off-shore.
3. Daerah Bangkinang.
4. Daerah Kepulauan Anambas dan Natuna.

(b) **Nikkel:**

1. Daerah Maluku (Halmahera dan sekitarnja).
2. Daerah Kalimantan Tenggara.
3. Pulau Waigeo dan daerah Irian Barat.

(c) **Bauksit:**

Kemungkinan survey projek pertambangan bauksit, projek-projek alumina dan aluminium.

(d) Kemungkinan survey dan pertambangan bahan galian diberbagai daerah off-shore di Indonesia.

5. Minjak dan Gas Bumi.

Masalah pokok jang dihadapi dalam produksi minjak dan gas bumi ialah untuk mendapatkan tjadangan-tjadangan dan lapangan-lapangan baru sebagai pengganti dari jang kini telah

dan tengah diambil. Dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi ini, maka Pemerintah membuka kesempatan kerdjasama dengan perusahaan asing. Pada umumnja daerah operasi jang diberikan kepada mereka ialah daerah lepas pantai (off-shore). Daerah daratan ditjadangkan bagi perluasan usaha P.N. minjak sendiri, ketjuali daerah-daerah jang sukar untuk dilaksanakan.

Masalah jang penting untuk waktu-waktu jang akan datang ialah pemasaran diluar negeri. Didalam pasaran Asia Timur, jang kebutuhannja berlipat ganda maka minjak Indonesia mempunjai keuntungan dari letak geografis berupa rendahnja biaja transpor. Walaupun perkembangan pembangunan kapal-kapal tanki besar akan mengurangi keuntungan ini, pengaruh ini dapat ditiadakan dengan adanja usaha-usaha penjebaran sumber-sumber supply dari negara-negara konsumen. Keuntungan lain dari minjak Indonesia jang baru nampak sekarang ialah bahwa minjak Indonesia mengandung kadar belerang jang rendah. Dengan adanja pentjegahan "sulphur air-pollution" dinegeri-negeri industri pengolah minjak achir-achir ini, maka permintaan akan minjak Indonesia akan dapat bertambah. Usaha-usaha merintis pemasaran diluar negeri kini telah dimulai dan akan terus dikembangkan.

Masalah lain ialah pengembangan pengilangan jang wadjar. Dewasa ini pengilangan ditekankan kepada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan baru kelebihannja disediakan untuk ekspor. Walaupun sebenarnja terdapat tjukup peluang untuk mengembangkan pasaran hasil-hasil kilang setjara chusus, Pemerintah dalam lima tahun jang akan datang tetap akan berpegangan pada apa jang telah digariskan.

Mengingat bahwa kilang-kilang di Sumatera Selatan (sepandjang sungai Musi) sudah tua dan tidak dapat bekerdja lagi dengan kapasitas penuh, dan minjak mentah/hasil pengilangan jang harus ditranspor ke/dari kilang-kilang berdjumlah besar, maka akan dibangun kilang-kilang baru di Dumai. Sebagian besar minjak mentah jang dibutuhkan dapat disalurkan

melalui pipa-pipa sedang hasil pengilangan dapat ditranspor dengan kapal tanki besar jang frekwensinja dapat dipertjepat.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri maka fasilitas penimbunan (storage) diterminal-terminal dan fasilitas-fasilitas angkutan darat akan diperbesar.

Pemanfaatan gas bumi, baik jang sudah diproduksi maupun didaerah-daerah jang sedang diadakan penjelidikan, tidak kurang pentingnja.

Dalam usaha memperbesar produksi pangan, maka kebutuhan pupuk akan menondjol. Pemanfaatan gas bumi untuk pupuk dengan dasar Nitrogen merupakan prioritas utama. Kemungkinan pemanfaatan gas untuk usaha-usaha industri petrokimia, pembangkit tenaga listrik, bahan bakar, dan sebagainja, akan dipeladjari dengan seksama. Karena usaha-usaha ini memerlukan biaja jang besar, maka usaha pemanfaatan gas dapat dibenarkan djika sudah dapat dipastikan adanja tjadangan gas jang tjukup besar.

Disamping pertambangan minjak jang langsung dilaksanakan oleh P.N. Pertamina dengan investasi sendiri sebesar U.S. $ 60 djuta untuk daerah-daerah pertambangan minjak di Atjeh, Sumatera Utara, Djambi, Sumatera Selatan, Kalimantan, Djawa (Timur), dan Irian Barat, maka dalam rangka penanaman modal asing telah diadakan pula Kontrak Karya, jang kini berdjumlah tiga buah. Jang berbentuk production sharing sampai waktu ini berdjumlah 24 buah.

Dari pertambangan jang sudah ada (P.N. Pertamina, Caltex, Stanvac) diharapkan kenaikan produksi sampai tahun 1970/71 dan penurunan produksi dalam tahun-tahun berikutnja karena berkurangnja tjadangan jang kini diketahui. Bila eksplorasi berhasil, maka dapat diharapkan bahwa pada achir tahun Rentjana Pembangunan Lima Tahun produksi akan naik kembali. Biaja eksplorasi jang akan dikeluarkan oleh 22 perusahaan asing jang telah mengadakan Kontrak Karya maupun production sharing berdjumlah $ 184 djuta dengan perintjian

sebagai berikut: 1969: $ 23 djuta; 1970: $ 35 djuta; 1971: $ 44 djuta; 1972: $ 45 djuta dan 1973: $ 37 djuta.

Kontrak Karya meliputi perusahaan-perusahaan:

1. P.T. Caltex Pacific Indonesia (Sumatera Tengah);
2. P.T. Stanvac Indonesia (Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan);
3. P.T. Calasiated dan Topco (Sumatera Tengah).

Production sharing meliputi perusahaan-perusahaan:

1. Asamera (Sumatera Utara), 2. Refican (Sumut), 3. Iapco (Djabar), 4. Refican (Kalimantan Tenggara), 5. Kyushu (Kal. Selatan), 6. Japex (Bunju dan Mahakam), 7. Continental (Kal. Selatan), 8. Cities Service Co. USA (Djatim), 9. Union Oil Co Exploration (Atjeh Barat), 10. International Timor Oil Exploration (Timor), 11. Philips & Superior (Irbar Selatan), 12. C.F.P. (Djambi), 13. Indotex (Halmahera), 14. Vico & Huffington (Sumsel dan Kaltim), 15. Iapco (Sumatera Tenggara), 16. Agip S.A. (Irbar), 17. Redco (Sumatera, Djawa, Kalimantan), 18. Mobil (Sumatera Timur Laut), 19. Continental (Laut Tjina Selatan), 20. Union Oil Co of Indonesia (Kal. Tim.), 21. Frontier (Laut Tjina Selatan), 22. Gulf (Laut Tjina Selatan), 23. Agip S.A. (Laut Tjina Selatan), 24. South East Asia (Sul. Sel. dan Sul. Tenggara).

Dengan mendasarkan atas perkiraan bahwa eksplorasi memberikan hasil pada tahun 1972 maka produksi minjak bumi diduga sebagai berikut (dalam 10^6 BBL):

TABEL VII-B-1

PRODUKSI MINJAK BUMI, 1969/1970-1973/74

(dalam 106 BBL)

1969/70	293
1970/71	353
1971/72	364
1972/73	401
1973/74	440

Kebutuhan dalam negeri akan bahan bakar belum ditentukan dengan tepat untuk 5 tahun jang mendatang. Namun dapat diperkirakan bahwa kebutuhan bahan bakar akan naik dari 40 djuta barrel dalam tahun 1969 mendjadi 52 djuta barrel dalam tahun 1973, atau 1,3 kali pemakaian tahun 1969. Atas dasar perhitungan tersebut maka dalam tahun 1971 kilang-kilang jang ada tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Berhubungan dengan itu akan dibangun tambahan kilang di Dumai dengan kapasitas pengilangan sebesar 100.000 barrel/hari, jang dapat diperluas sampai 150.000 barrel/hari. Kesemuanja ini memerlukan investasi sebesar kurang lebih $ 40 djuta. Disamping itu pembangunan kilang-kilang di Dumai akan mengakibatkan penghematan-penghematan dan pengurangan biaja, antara lain biaja transpor. Untuk memenuhi kebutuhan setelah tahun 1973, dipertimbangkan pembangunan kilang-kilang baru di Pulau Djawa dengan kapasitas 100.000 — 120.000 barrel/hari sedjalan dengan penemuan lapangan-lapangan baru disekitarnja. Apabila seluruh operasi dilakukan oleh Perusahaan Negara sendiri, maka diperlukan perluasan daja angkut sebesar 130.000 DWT atau kurang lebih 15 — 20 kapal tanki dari berbagai ukuran. Investasi ini akan berdjumlah sebesar $ 60 djuta. Disamping itu perlu diadakan perluasan armada tanki untuk ekspor sebanjak 5 buah kapal tanki.

Dalam rangka pemenuhan perbekalan dalam negeri dalam tahun 1973 diperlukan setjara menjeluruh pembangunan/perluasan fasilitas angkutan darat dan penimbunan. Dewasa ini fasilitas penimbunan ialah sebesar 500.000 barrel. Sekurang-kurangnja diperlukan perluasan sampai 1.200.000 barrel. Pembangunan/perluasan ini akan meliputi 12 seafed terminal dan 4 up-country depot dengan biaja investasi sebesar $ 5 djuta dan Rp. 3 miljard. Achirnja perlu dilakukan pengerukan pelabuhan-pelabuhan jang penting, antara lain Belawan, Palembang (Sungai Musi), Pontianak, Bandjarmasin, Surabaja, Djambi dan sebagainja.

Produksi asphalt di Pangkalan Susu dan Wonokromo akan ditingkatkan mendjadi 60.000 ton dan 30.000 ton setahun masing-masing. Dalam pada itu direntjanakan pembangunan satuan baru di Pladju dengan pemanfaatan sebagian besar dari fasilitas jang sudah ada dengan kapasitas 50.000 ton/tahun jang akan membutuhkan biaja investasi sebesar $ 0,5 djuta.

Produksi gas bumi dibeberapa tempat akan dimanfaatkan sesuai dengan skala prioritas pembangunan dan sifat-sifat chusus dari gas bumi setempat. Di Sumatera Utara telah dibangun satuan-satuan LPG dan Carbon Black dengan biaja investasi $ 5 djuta. Akan tetapi untuk mentjapai kapasitas penuh sebesar 2.500 BBL/hari LPG dan 20 ton/hari Carbon Black masih dibutuhkan tambahan investasi $ 3 djuta.

Di Sumatera Selatan gas jang terdapat berupa associated dan non-associated gas. Selain kemanfaatannja untuk memperbesar produksi urea dengan 300 persen, maka gas ini akan dipergunakan untuk pembuatan plastik (misalnja polyethylene).

Didaerah Tjirebon, Djawa Barat, didapatkan gas bumi jang diperkirakan berupa tjadangan non-associated gas dalam djumlah jang besar. Gas ini akan dipergunakan untuk mendirikan pabrik pupuk jang berkapasitas sedikitnja 500.000 ton/tahun.

6. Timah.

Masalah pertama jang dihadapkan ialah situasi tjadangan, chususnja penurunan kadar timah menurut data dan tjadangan jang telah diketahui. Dalam hubungan ini, akan diadakan kegiatan-kegiatan lepas pantai untuk menemukan tjadangan-tjadangan baru jang lebih kaja. Selain itu telah disetudjui penanaman modal asing untuk eksplorasi dan eksploitasi didaerah-daerah jang meliputi perairan antara Singkep dan Bangka serta Pulau Karimata dan sekitarnja.

Peralatan jang selama ini telah mendjadi tua dan tidak terpelihara, akan direhabilitir untuk mentjegah kemerosotan produksi lebih landjut, bahkan untuk dapat menaikkan produksi

dimasa depan. Kenaikan produksi timah amat penting artinja untuk dapat mempertahankan dan mendjamin kedudukan Indonesia dipasar internasional. Untuk ini Pemerintah mengusahakan bantuan kredit dengan sjarat lunak dari beberapa negara. Akan tetapi dengan usaha ini kenaikan produksi tjadangan-tjadangan jang diketahui baru dapat dirasakan dalam tahun 1972.

Disamping itu akan diadakan penelitian tentang kemungkinan pasaran bahan-bahan mineral jang didapat bersamaan dengan timah, umpamanja monasit. Diharapkan bahwa usaha ini akan dapat menambah hasil ekspor pertambangan.

Prognose produksi untuk 5 tahun jang akan datang ini adalah seperti tertera dibawah ini :

TABEL VII-B-2

PRODUKSI TIMAH (CONCENTRATE), 1969/70 — 1973/74

(dalam metric ton)

1969/70	16.160
1970/71	16.790
1971/72	17.575
1972/73	18.695
1973/74	19.375

7. Bauksit.

Masalah jang dihadapi bauksit berkisar kepada persoalan pemasaran. Dengan adanja tjadangan jang tidak begitu besar, djika dibanding dengan lain-lain negara penghasil, misalnja Australia, maka usaha pertama jang harus dilakukan ialah penemuan pendjualan jang tetap. Oleh karena itu kini telah diadakan kontrak djangka pandjang dengan pihak pembeli.

Persoalan lain ialah bahwa dari tahun ketahun djarak antara pengambilan dengan pelabuhan mendjadi djauh, sehingga diperlukan perbaikan alat-alat transport. Investasi dalam hal ini didapatkan dari pendapatan perusahaan sendiri.

Dalam hal rejection-point diusahakan agar pihak pembeli bersedia menerima angka jang lebih rendah agar dengan demikian djumlah tjadangan dapat bertambah. Usaha penemuan deposit-deposit baru dilakukan dengan membuka kesempatan kerdja-sama internasional dengan tudjuan selain untuk meninggikan ekspor agar dapat pula dibangun pabrik aluminium.

Rentjana produksi bauksit dipulau Bintan disesuaikan dengan kontrak pandjang jang telah disetudjui dengan sedikit kelebihan produksi untuk pendjualan setjara insidentil. Untuk peningkatan produksi ini akan diadakan investasi perbaikan alat-alat sebesar $ 380.000 dan investasi pengerukan daerah pelabuhan sebesar $ 500.000 jang akan dibiajai oleh pendapatan sendiri.

Produksi bauksit dalam masa 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut ini :

TABEL VII-B-3

PRODUKSI BAUKSIT, 1969/70 — 1971/72
(dalam metric ton)

1969/70	1.000.000
1970/71	1.050.000
1971/72	1.200.000
1972/73	1.200.000
1973/74	1.200.000

8. Nikkel.

Masalah jang dihadapi oleh tambang nikkel di Pomala (Sulawesi Tenggara) sekarang ini ialah masalah tjadangan. Dengan diterimanja rejection-point nikkel mendjadi 2,6 persen maka tjadangan nikkel mendjadi bertambah. Namun demikian, penurunan rejection-point ini masih belum mendjamin kehidupan masa depan tambang nikkel.

Dengan tertjapainja persetudjuan penurunan rejection-point serta djumlah pembelian sebesar 230.000 ton/tahun dengan

910088-(5).

pihak pembeli, maka produksi di Pomala akan ditingkatkan sesuai dengan commitment tersebut. Untuk peningkatan produksi ini diperlukan investasi sebesar $ 350.000 dari pendapatan sendiri.

Disamping itu diperlukan eksplorasi lebih landjut untuk dapat menentukan apakah pembangunan industri pengolahan nikkel di Indonesia dikemudian hari memang dapat dipertanggung-djawabkan.

9. Emas dan Perak.

Kebidjaksanaan jang akan ditempuh ialah meneruskan usaha peningkatan produksi jang disesuaikan dengan kemampuan peralatan. Selain itu kebidjaksanaan diarahkan terhadap terdjaminnja bahan penolong dan spare-parts dari impor. Kebidjaksanaan jang sama akan ditempuh dalam hal industri pengolahan logam mulia.

Dengan mengadakan perbaikan peralatan, peningkatan efficiency kerdja, dan peningkatan recovery diharapkan produksi (tanpa adanja investasi jang berarti) akan menaik sedikit dalam tahun-tahun jang akan mendatang. Diharapkan bahwa terutama produksi bidji akan naik. Akan tetapi karena kadar Au dan Ag akan menurun, maka produksi logam mulia mendjelang achir Rentjana Pembangunan Lima Tahun tidak akan naik lagi.

Gambaran produksi setjara konkrit adalah sebagai berikut:

TABEL VII-B-4

PRODUKSI EMAS DAN PERAK, 1969/70 — 1973/74

(dalam Kg)

	Emas	Perak
1969/70	222,5	9.715
1970/71	232,5	10.000
1971/72	240	10.500
1972/73	240	10.200
1973/74	240	10.200

P. NATUNA

KEP. RIAU UTARA

P. ANAMBAS

P. KALIMANTAN

P. BINTAN

P SUMATERA

BANGKINANG

KEP. RIAU SELATAN

HALMAHERA

P. KARIMATA

P. SULAWESI

MALILI

P. BANGKA

POMALA

P. IRIAN BARAT

P. BUTON

P DJAWA

KEP. NUSATENGGARA

WANARADJA

TIMAH

NIKKEL

OFF-SHORE
MINJAK & GAS BUMI

BAUXITE

BELERANG

TEMBAGA

SUB SEKTOR: PERTAMBANGAN

- TIMAH
- NIKKEL
- BAUXITE
- BELERANG
- MINJAK & GAS BUMI

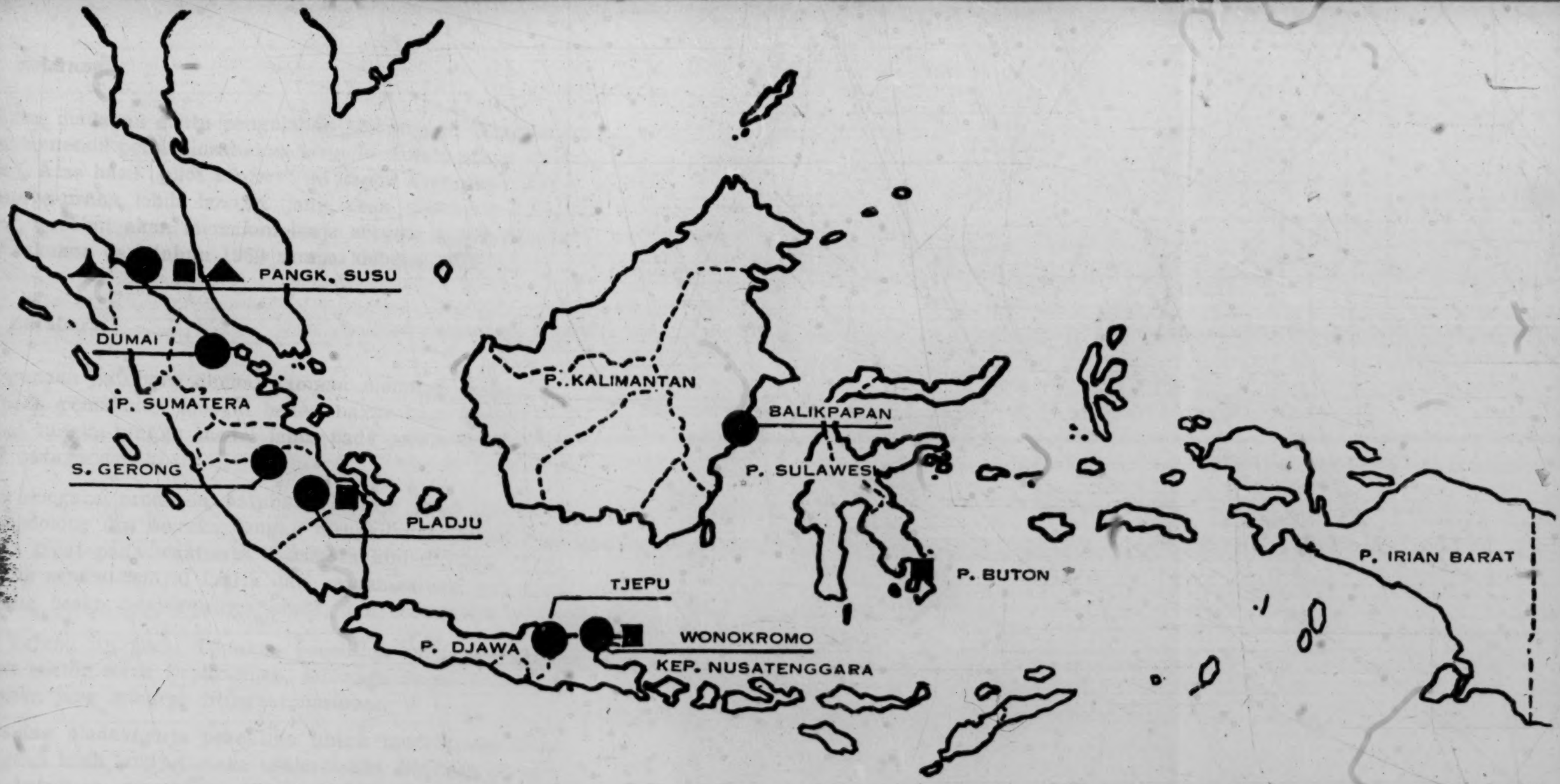

REFINERY

ASPHALT

L.P.G

CARBON BLACK

SUB SEKTOR: PERTAMBANGAN
MINJAK DAN GAS BUMI

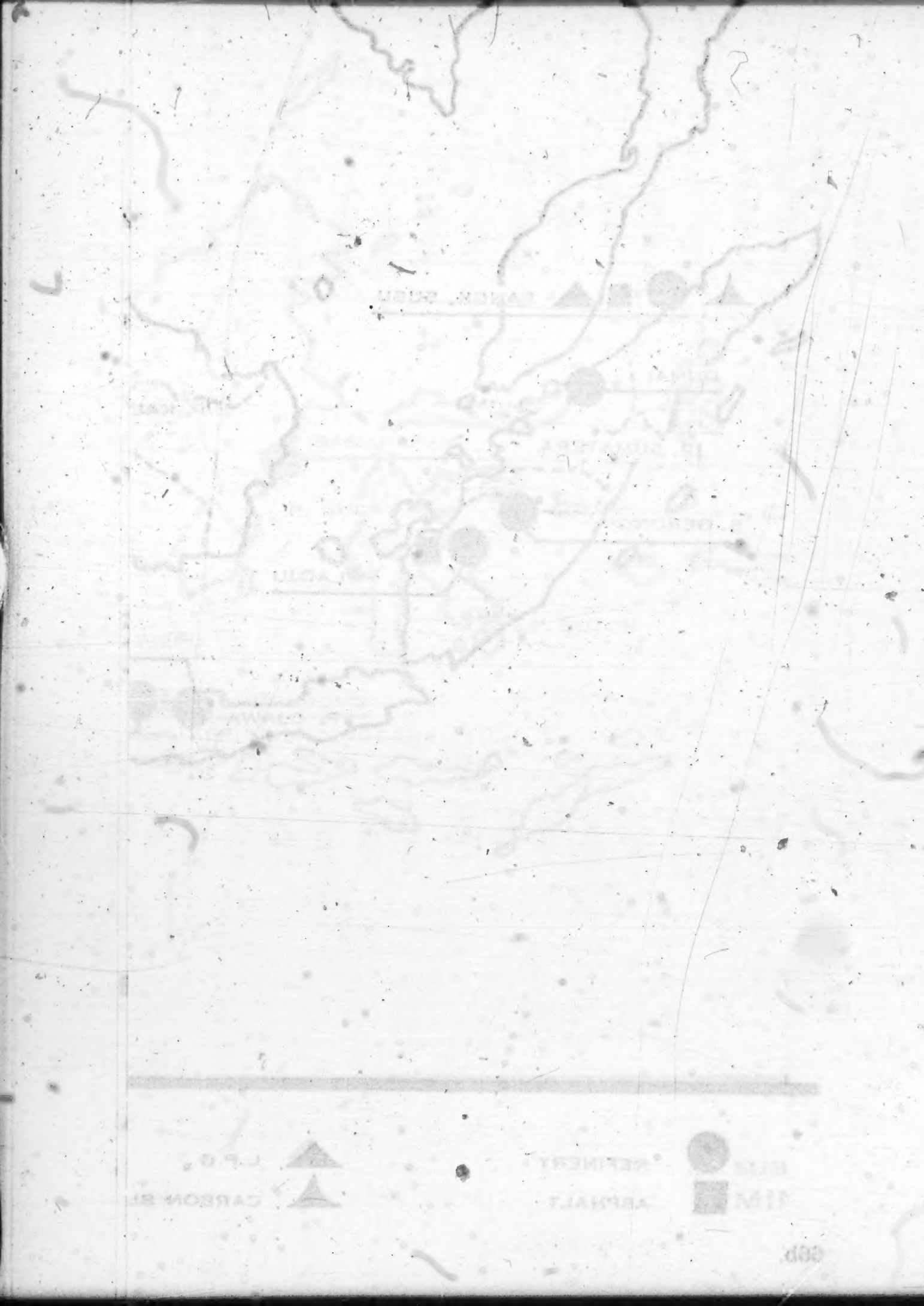

10. Belerang.

Sebelum diadakan suatu pengolahan belerang di Wanaradja setjara komersiil perlu diusahakan terlebih dahulu suatu „pilot project". Atas hasil „pilot project" ini dapat ditetapkan kemudian usaha-usaha lebih landjut jang akan ditempuh. „Pilot project" tersebut akan memakan biaja sebesar $ 300.000 dan akan dilakukan dari tahun 1969 sampai dengan 1971.

11. Batubara.

Penggunaan batubara dimasa lampau memang sangat terbatas pada pemakaian sebagai bahan bakar bagi kapal-kapal laut dan tungku-tungku model lama pada mesin-mesin pembangkit tenaga listrik.

Negara-negara produsen batubara lainnja pada umumnja dapat menolong diri mereka dengan mengalihkan penggunaan batubara tepat pada waktunja. Batubara kini dipakai antara lain untuk sentral-sentral listrik dari satuan-satuan pembangkitan jang besar, projek-projek kimia, dan sebagainja.

Oleh karena itu perlu diadakan penelitian jang mentjakup beberapa sektor serta Departemen, sehingga dapat ditjarikan pemetjahan jang integral ditingkat nasional.

Disamping diadakannja penelitian untuk menetapkan langkah-langkah lebih landjut maka usaha-usaha dibidang pertambangan batubara diarahkan untuk mentjegah kemerosotan produksi lebih landjut, mempertahankan pasaran jang ada, mentjari pemanfaatan baru, dan mendjaga pemeliharaan alat-alat sebaik-baiknja. Diusahakan rehabilitasi dari tambang batubara Umbilin dan Bukit Asam agar mendekati tingkatan produksi dan tingkatan harga satuan jang wadjar. Apabila pemakaian dalam negeri belum memadai produksi maka akan dilakukan pemasaran diluar negeri. Untuk itu akan diadakan penelaahan setjara teliti.

TABEL VII

PEMBIAJAAN RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969/70 — 1973/74

INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

(dalam miljar rupiah)

Bidang/Sektor/ Sub-Sektor/Program	1969/70	1969/70 — 1973/74		
	Anggaran Pembangunan	Anggaran Pembangunan	Sumber² lain	Djumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bidang Ekonomi.				
A. Sektor Industri dan Pertambangan.	**18,29**	**130,00**	**250,00**	**380,00**
1. Sub-Sektor Industri	15,85	110,00	140,00	250,00
a. Program Perbaikan dan Perluasan Industri Pupuk, Semen dan Kimia	4,24	39,03	75,14	114,17
b. Program Perbaikan dan Perluasan Industri Tekstil.	3,90	29,71	11,86	41,57
c. Program Perbaikan dan Perluasan Industri kertas.	1,29	23,306	18,70	42,00
d. Program Perluasan Industri Farmasi.	—	—	3,70	3,7
e. Program Pembinaan Industri Ringan dan Keradjinan Rakjat.	2,71	7,48	17,50	24,98
f. Program Pembinaan Industri Logam, Mesin, Peralatan dan Prasarana Perhubungan.	3,01	9,94	13,60	23,54
g. Program Pemanfaatan projek-projek tertunda.	0,70	0,70	—	0,70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub-Sektor Pertambangan.	2,45	20,00	110,00	130,00
a. Program Penelitian Minjak dan Gas Bumi.	0,10	0,50	—	0,50
b. Program Perbaikan dan Perluasan Pertambangan Timah.	1,00	10,40	1,75	12,15
c. Program Perbaikan Tambang Batu Bara.	0,70	3,00	—	3,00
d. Program Peningkatan Kegiatan Geologie.	0,38	2,35	—	2,35
e. Program Perbaikan fasilitas Pembinaan Pertambangan.	0,26	1,75	—	1,75
f. Program Peningkatan Penambangan dan Pengolahan Gas dan Minjak Bumi.	—	1,20	105,5	106,70
g. Program Peningkatan Penambangan dan Pengolahan Aneka Tambang.	—	0,80	2,75	3,55
B. Kegiatan-kegiatan Industri dan Pertambangan jang pembiajaannja diperhitungkan dalam Sektor-sektor lain :				
Bidang Sosial.				
Sektor Pendidikan dan Kebudajaan.				
Sub-Sektor Pendidikan dan Pendidikan institusionil.	0,329	2,762	—	2,762
a. Program Pendidikan/ Latihan institusionil Sub-Sektor Industri,	0,10	0,815	—	0,815

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
b. Program Pendidikan/ Latihan institusionil Sub-Sektor Pertambangan.	0,004	0,032	—	0,032
c. Program Peningkatan Penelitian/Survey Sub-Sektor Industri.	0,225	1,915	—	1,915
Bidang Umum.				
Sektor Pemerintahan Umum Sub-Sektor Pemerintahan Umum.				
a. Program penjempurnaan prasarana Fisik Pemerintahan Sub-sub-Sektor Industri.	0,300	P.M.	—	P.M.
b. Program penjempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan Sub-Sektor Pertambangan	0,150	P.M.	—	P.M.

C. TENAGA LISTRIK

Listrik merupakan salah satu sumber tenaga jang penting bagi pembangkitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kesedjahteraan rakjat. Sebaliknja pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran semakin meningkatkan permintaan akan sumber-sumber tenaga, chususnja listrik. Antara penjediaan sumber tenaga listrik dan pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan timbal-balik, sehingga sangatlah penting untuk merentjanakan setjara sadar perkembangan penjediaan listrik dan memperhitungkan pengaruh pertumbuhan ekonomi kepada penjediaan listrik.

KEADAAN LISTRIK DAN MASALAHNJA.

Sebelum tahun 1954 tenaga listrik disediakan setjara komersiil oleh perusahaan-perusahaan swasta, sedangkan Pemerintah menjediakan tenaga listrik serta transmissi listrik hanja di Djawa Barat, beberapa wilajah di Djawa Timur, Sulawesi Utara,

Sumatera Selatan dan beberapa kota lainnja. Sedjak tahun 1954 berlangsunglah proses nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta ini, jang kemudian (ditahun 1958) dipadukan didalam Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.). Perusahaan Listrik Negara bertanggung djawab atas pembangkitan dan distribusi listrik diseluruh tanah air dibawah pengawasan Direktorat Djenderal Tenaga dan Listrik dari Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Apabila ditahun 1958 daja listrik jang terpasang ialah 262.500 KW, maka pada pertengahan 1968 djumlah ini meningkat lebih dari dua kali, mendjadi 633.326 KW. Dari djumlah ini 47 persen dibangkitkan oleh 64 satuan tenaga air, 19 persen oleh 18 satuan tenaga uap, 28 persen oleh 531 satuan tenaga diesel, dan 6 persen oleh 3 satuan tenaga gas turbin.

Disamping djumlah daja listrik jang terpasang oleh P.L.N. terdapat pula sumber-sumber tenaga listrik jang diusahakan oleh swasta untuk keperluan sendiri, seperti untuk keperluan pabrik ataupun penerangan rumah. Djumlahnja tidak diketahui dengan pasti, tetapi diperkirakan berada dibawah 200.000 KW.

Pada achir tahun 1966 djumlah daja terpasang ialah 585.811 KW, dengan djumlah daja jang efektif hanja sebesar 51 persen. Ini disebabkan karena sebagian dari mesin-mesin pembangkit tenaga listrik tidak djalan, baik karena kerusakan-kerusakan jang besar, umur jang telah landjut, maupun karena tidak adanja persediaan spare-parts. Pada achir tahun 1968 diharapkan daja jang efektif akan mentjapai 80 persen.

Djumlah tenaga listrik jang dibangkitkan tidak sepenuhnja dapat didjual, karena didjaringan transmissi dan distribusi senantiasa terdapat apa jang disebut kerugian djaringan, jang besarnja berkisar antara 10 - 15 persen. Ditahun 1967, misalnja dari djumlah tenaga listrik jang dibangkitkan sebesar 1.607 djuta KWH, diperkirakan hanja 1.194 djuta KWH jang terdjual. Lebih kurang 25,7 persen dari djumlah tenaga listrik jang dibangkitkan merupakan kehilangan bagi P.L.N. Persentase ini merupakan angka rata-rata bagi seluruh tanah air, dengan

persentase kehilangan jang terendah sebesar 10 persen tertjatat untuk wilajah Eksploitasi Sumatera Barat dan jang tertinggi sebesar 35 persen untuk wilajah Eksploitasi Djawa Barat bagian Barat.

Untuk tahun 1966 diduga angka rata-rata kehilangan untuk seluruh tanah air ialah 23 persen. Angka kehilangan jang tinggi ini disebabkan sebagian besar oleh kerugian-kerugian dalam saluran, karena kapasitas penjaluran telah terlampaui, adanja pentjurian-pentjurian listrik, dan belum memuaskannja tjara-tjara pengukuran aliran listrik.

Sistim listrik Indonesia belum sambung-menjambung setjara menjeluruh meliputi seluruh Indonesia. Diluar Djawa djaringan listrik bersifat lokal dan dihubungi dengan mesin-mesin pembangkit listrik setempat, sehingga penjediaan listrik bersifat terbatas dalam djarak.

Dipulau Djawa terdapat lima sistim djaringan transmissi listrik jang terpisah-pisah. Satu sistim transmissi untuk Djawa Barat, satu sistim transmissi Ketenger dibagian Barat Djawa Tengah, satu sistim Tuntang dibagian Timur Djawa Tengah, satu sistim Kalikonto dibagian Timur dan satu sistim pembangkitan Madiun dibagian Barat dari Djawa Timur.

Untuk keperluan administrasi, Djawa Barat terbagi atas wilajah Exploitasi Djawa Barat bagian Barat berkedudukan di Djakarta, dan Djawa Barat bagian Timur berkedudukan di Bandung. Tegangan transmissi jang tertinggi, jakni 150 KV, menghubungi P.L.T.A. Djatiluhur dengan Djakarta dan Bandung. Selain dari itu terdapat djaringan transmissi dengan tegangan sebesar 70 KV dan 30 KV. Sumber tenaga listrik di Djawa Barat adalah tenaga air, tenaga uap, dan tenaga diesel jang dihubungi melalui gardu-gardu induk oleh djaringan transmissi dan distribusi.

Djawa Tengah mengenal 2 sistim jang terpisah, dibagian Barat sistim Ketenger dan dibagian Timur sistim Tuntang. Masing-masing sistim menggunakan tenaga air, tenaga diesel, serta tenaga gas sebagai pembangkit listrik jang dihubungi

melalui gardu-gardu induk oleh transmissi bertegangan 30 KV dan 15 KV.

Volume penjimpanan air di Rawapening semakin mengetjil karena adanja proses degenerasi danau, dengan akibat bahwa dimusim kering kemampuan pembangkitan listrik untuk sistim Tuntang hanja 18.000 KW dibandingkan dengan daja terpasang sebesar 45.000 KW. Untuk sistim Ketenger kemampuan dalam musim kering hanja 6.000 KW dibandingkan dengan daja terpasang 13.000 KW, karena P.L.T.A. Ketenger merupakan P.L.T.A. type run of the river (tanpa waduk tahunan atau kolam harian). Akibatnja ialah bahwa dimusim kering harus diadakan pembatasan dalam penggunaan listrik.

Di Djawa Timur terdapat sistim Kalikonto jang terdiri atas P.L.T.U. di Surabaja sebesar 50.000 KW., P.L.T.A. di Mendalan sebesar 23.000 KW, dan di Siman sebesar 11.000 KW, disamping tenaga diesel di Ngagel dan Malang. Dibagian Timur terdapat sistim jang terpisah di Djember dan Banjuwangi. Sistim Kalikonto dihubungi melalui gardu induk oleh djaringan transmissi jang bertegangan 70 KV, 30 KV dan 15 KV. Sungguhpun pusat pembangkitan listrik terdapat relatip tjukup, namun distribusi listrik ketinggalan akibat kekurangan penjediaan perlengkapan.

Sumatera terbagi atas 4 wilajah exploitasi P.L.N. dengan pusat-pusat di Palembang, Medan, Banda Atjeh dan Padang.

Dari djumlah daja listrik jang terpasang, maka 79 persen terdapat dipulau Djawa, 16 persen dipulau Sumatera, sedangkan 5 persen lainnja didaerah-daerah lainnja. Sumber listrik di Sumatera terutama merupakan tenaga diesel, sedang barubaru ini (ditahun 1968) telah terpasang tenaga gas dengan kapasitas 14.000 KW, jaitu untuk Palembang dan Medan. Djaringan distribusi listrik hanja terbatas dalam djarak tertentu sekitar pusat-pusat pembangkit listrik ini. Hal-hal jang serupa didapat diwilajah Indonesia lainnja diluar Djawa.

Selama 5 tahun terachir ini kentaralah bahwa dari djumlah pendjualan listrik, setiap tahunnja rata-rata 20 persen ialah

untuk industri. Persentase ini tidak sama untuk tiap wilajah exploitasi. Persentase jang tertinggi, sebesar 41 persen ditahun 1966, tertjatat untuk wilajah exploitasi Sumatera Barat, dan jang terendah, sebesar 2 persen, untuk wilajah exploitasi Atjeh. Oleh karena pendjualan dikedua wilajah ini ketjil, maka dalam nilai absolutnja hasil persentase pendjualanpun ketjil. Pendjualan jang tinggi nilai absolutnja terdapat dipulau Djawa. Dalam tahun 1966 sektor industri meliputi lebih kurang 20 persen dari djumlah pendjualan di Djawa Barat bagian Timur, 24 persen untuk wilajah Djawa Barat bagian Barat, 13 persen untuk Djawa Tengah, dan 24 persen untuk Djawa Timur. Djumlah penggunaan listrik untuk industri sesungguhnja lebih tinggi lagi, bila diingat bahwa banjak industri dan perusahaan-perusahaan memiliki sumber tenaga listriknja sendiri-sendiri.

Tingkat pertumbuhan pendjualan listrik selama tahun-tahun 1962-1966 untuk Djawa Barat mentjatat 40 persen kenaikan, jaitu dari 405,90 djuta KWH ditahun 1962 mendjadi 567,94 djuta KWH ditahun 1966. Djawa Tengah mentjatat kenaikan sebesar 8 persen, dari 151,03 djuta KWH (1962) mendjadi 164,32 djuta KWH (1966), dan Djawa Timur mentjatat kenaikan sebesar 14 persen, dari 216,87 djuta KWH (1962) mendjadi 247,02 djuta KWH (1966). Di Sumatera kenaikan pendjualan tenaga listrik ialah ± 12 persen, dari 129,8 djuta KWH mendjadi 145,1 djuta KWH. Dari angka-angka ini njatalah bahwa wilajah exploitasi Djawa Tengah menundjukkan tingkat kenaikan jang terendah di Pulau Djawa, sedangkan Djawa Barat jang tertinggi.

Perbedaan persentase perkembangan ini disebabkan karena tidak serasinja kapasitas djaringan dibandingkan dengan daja terpasang atau sebaliknja, dan djuga karena memang baik djaringan maupun sentral-sentral listrik telah kelebihan beban. Pusat-pusat tenaga listrik jang ada memerlukan rehabilitasi agar dapat ditingkatkan kapasitas penggunaannja. Djaringan distribusi dan transmissi dibanjak tempat memerlukan penambahan dan perbaikan, sehingga dapat menjalurkan lebih baik dan lebih banjak aliran listrik. Tidak kurang pentingnja pula ialah

perbaikan dan peningkatan effisiensi institusionil dalam organisasi jang mengatur listrik.

LANGKAH-LANGKAH DAN KEBIDJAKSANAAN PEMBANGUNAN.

Mengingat keadaan serta masalah listrik, maka setjara kwalitatif sasaran pembangunan listrik ialah (a) peningkatan effisiensi penggunaan pusat-pusat tenaga listrik melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas tenaga listrik, djaringan distribusi, dan transmissi, dan (b) peningkatan pengadaan tenaga listrik, baik melalui investasi penambahan pusat-pusat tenaga listrik baru, maupun djaringan distribusi dan transmissi jang baru. Dengan tertjapainja kedua matjam sasaran ini, diharapkan bahwa penjediaan listrik perdjiwa penduduk dapat lebih ditingkatkan, jang tidak sadja mengikuti pertumbuhan ekonomi, tetapi djuga mampu memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut angka statistik ditahun 1961, jakni tahun diadakannja satu-satunja sensus penduduk jang lengkap selama ini, maka rumah tangga dipulau Djawa berdjumlah 14.517.000 buah terbagi atas 1.963.000 somah didaerah perkotaan dan 12.554.000 somah didaerah pedesaan. Masing-masing somah dapat dibagi lebih landjut menurut sifat tinggalnja dalam kategori permanen, semi permanen I, semi permanen II, dan sementara. Untuk sementara diperkirakan bahwa hanja somah jang tergolong dalam kategori permanen dan semi permanen I sadja mampu mendjadi tjalon pembeli listrik. Atas dasar pikiran ini, maka djumlah tjalon langganan akan berdjumlah 1 diantara 10 penduduk perkotaan dan 1 diantara 35 penduduk dipedesaan, atau untuk seluruh pulau Djawa sebesar 1 diantara 28 penduduk.

Sesuai dengan penelitian jang pernah diadakan didaerah Djawa Barat dalam tahun 1963, maka kebutuhan akan tenaga listrik berdjumlah rata-rata 510 W per langganan diperkotaan dan 300 W per langganan dipedesaan. Angka ini tidak menggambarkan kebutuhan akan listrik per langganan, akan tetapi me-

rupakan angka kontribusi terhadap beban puntjak per langganan, termasuk bagi industri dan komersiil. Berdasarkan data ini dapatlah diperhitungkan bahwa dalam tahun 1961 probable load, jakni beban listrik jang seharusnja ada djika perkembangan wadjar, ialah 742 MW dengan puntjak produksi sebesar 894 MW. Djika beban sebenarnja ialah 154 MW, maka kentaralah bahwa faktor kedjenuhan ialah sebesar 0,184.

Antara tahun 1938-1940 tampaklah bahwa angka beban meningkat dengan rata-rata 10 persen, sedangkan puntjak produksi ditahun 1940 ialah 120 MW dengan beban puntjak sebesar 98 MW. Bila angka ini dihubungkan dengan probable load 1961, maka antara 1940 - 1961 tampaklah garis kenaikan beban sebesar rata-rata 10 persen setahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kenaikan probable load dalam periode tersebut ialah 10 persen setahun. Bertolak dari data ini maka besar probable load ditahun 1967 seharusnja 1.580 MW, sedangkan beban sebenarnja ialah 226 MW, sehingga faktor kedjenuhan ialah 0.140, jang merupakan 31 persen lebih rendah dari angka tahun 1961.

Berdasarkan perhitungan diatas dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa untuk mentjapai keadaan jang wadjar dari keadaan sebenarnja ditahun 1967, kenaikan penjediaan listrik harus melebihi rata-rata 10 persen setahun. Apabila kenaikan penjediaan listrik rata-rata 15 persen setahun, maka keadaan wadjar itu akan tertjapai dalam tahun 2015. Makin tinggi kenaikan penjediaan listrik, makin tjepat tertjapainja keadaan dimana kebutuhan akan tenaga listrik setjara minimal terpenuhi.

Kenaikan penjediaan tenaga listrik akan ditjapai dengan meningkatkan kapasitas penggunaan pusat-pusat tenaga listrik, djaringan distribusi, dan transmissi jang ada, dan dengan penambahan kapasitas melalui investasi ditenaga pembangkitan listrik dan distribusi.

Dibidang penambahan kapasitas tenaga listrik maka tenaga air dapat merupakan pembangkit listrik jang paling irit biajanja per kWh, akan tetapi paling lama pembangunannja, sedang-

kan tenaga diesel paling mahal biajanja per kWh, tetapi paling tjepat selesai pembangunannja. Akan tetapi untuk satuan-satuan Pusat Listrik Tenaga Uap jang besar, harga pembangkitan sudah dapat bersaing dengan tenaga air, sedangkan waktu pembangunannja tjukup pendek. Mengingat semua ini maka selama 1969-1973 akan diusahakan penjediaan listrik jang ekonomis dapat memenuhi cost-accounting.

Prioritas utama dalam rentjana pembangunan listrik ialah rehabilitasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan djaringan distribusi dan transmissi listrik. Guna meniadakan pengalaman-pengalaman buruk dimasa lampau maka dimensi djaringan transmissi dan distribusi harus diambil lebih besar dari penambahan daja terpasang baru, atau dengan perkataan lain, pembangunan djaringan harus lebih madju tarafnja dari penambahan daja terpasang.

Sedapat mungkin akan diusahakan perluasan daerah asuhan baru melalui perluasan djaringan transmissi untuk selandjutnja menudju kepada interkoneksi konstelasi-konstelasi mendjadi suatu sistim tunggal. Dengan demikian akan tertjiptalah prakondisi untuk mengusahakan tehnik setjara optimal. Disamping perluasan djaringan transmissi dan distribusi, maka prioritas kedua ialah pembangunan pusat-pusat pembangkitan listrik.

Kebutuhan dan kemungkinan akan pertumbuhan kapasitas listrik terpasang tjukup besar. Masalah jang dihadapi ialah bahwa djumlah pembiajaan jang dibutuhkan sangat besar jang pada umumnja bergantung pada sumber pembiajaan Pemerintah sendiri. Dalam menghadapi rentjana pembiajaan pembangunan listrik ini perlu diperhitungkan "opportunity-cost", jakni kesempatan jang dikorbankan untuk menggumakan biaja jang sama bagi usaha rehabilitasi prasarana ekonomi lainnja.

Untuk djangka waktu lima tahun ini pembiajaan jang disediakan berdjumlah Rp. 100 miljar, atau lebih kurang 9,4 persen dari djumlah anggaran pembangunan keseluruhannja. Masalahnja ialah bagaimana memanfaatkan dana jang terbatas ini setjara optimal sehingga tertjapai hasil jang maksimal.

Terbatasnja dana pembiajaan ini mengungkapkan pula kenjataan bahwa dalam djangka waktu lima tahun ini tidaklah mungkin untuk melajani kebutuhan seluruh masjarakat disemua daerah. Prioritas harus diberikan kepada usaha-usaha jang membangkitkan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu kepada langganan industri perlu diperhitungkan tarif listrik jang lebih menguntungkan untuk perkembangan produksi.

Ini berarti bahwa berangsur-angsur setjara relatif beban akan bergeser kepundak langganan jang konsumtif, terutama konsumen jang menggunakan listrik melebihi kebutuhan minimal.

Hasil pendjualan listrik lambat-laun harus merupakan bagian jang berarti bagi investasi dibidang listrik. Untuk masa jang tidak pendek, listrik sebagai salah satu kebutuhan pokok untuk bagian terbesar masjarakat Indonesia masih akan merupakan hal jang belum dapat dinikmati setjara murah.

Tugas utama dewasa ini, disamping rehabilitasi, pembangunan pembangkitan listrik, dan peningkatan pendjualan tenaga listrik, ialah meningkatkan effisiensi kerdja dan menekan sedjauh mungkin biaja pengadaan listrik. Dalam hubungan ini perbaikan organisasi dan institusionil akan diselenggarakan berdasarkan pemikiran jang matang.

Djika ditelaah keadaan tenaga listrik dewasa ini, maka menondjollah kebutuhan mengusahakan investasi untuk mentjapai keseimbangan jang lebih serasi antara kapasitas pembangkitan tenaga listrik dengan kapasitas distribusi tenaga listrik.

Bertolak dari kebutuhan ini maka Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969/70 — 1973/74 dibidang listrik meliputi:

(a) usaha rehabilitasi dan perluasan djaringan transmissi dan distribusi tenaga listrik;

(b) usaha rehabilitasi dan pembangunan pusat-pusat tenaga listrik, dengan memperhitungkan perbandingan biaja-faedah (cost benefit ratio) jang menguntungkan;

(c) usaha persiapan dan pembangunan sumber-sumber tenaga listrik tersebar, baik jang bersifat "micro-hydro" maupun tenaga diesel;

(d) usaha perbaikan institusionil dan effisiensi; dan

(e) usaha penelitian, survey dan penelaahan-feasibility dalam perentjanaan pengadaan tenaga listrik serta keadaan tarifnja.

Apabila usaha dilakukan menurut skala-prioritas ini maka diduga bahwa kapasitas-terpasang listrik akan bertambah dalam waktu lima tahun ini dengan 425.000 kw. atau suatu kenaikan sebesar hampir 65 persen.

Berikut ini disampaikan perintjian Rentjana Pembangunan Tenaga Listrik. Pembangunan pusat-pusat listrik jang baru hanjalah dilakukan bilamana telah diadakan penelaahan jang mendalam tentang kemungkinan-kemungkinan jang tersedia. Apabila hasil penelaahan menundjukkan bahwa pembangunan suatu pusat listrik tidak atau kurang dapat dipertanggung-djawabkan setjara tehnis atau ekonomis (misalnja karena ada alternatif-alternatif lain jang lebih tepat), maka dengan sendirinja projek tersebut tidak akan dibangun. Hal ini adalah penting sekali mengingat sangat tingginja biaja pembangunan pusat-pusat listrik. Selandjutnja dalam membangun pusat-pusat listrik maka senantiasa diusahakan untuk menggunakan sebanjak mungkin tenaga-kerdja. Dengan demikian tertjiptalah kesempatan bekerdja jang lebih luas.

1. Rehabilitasi dan Perluasan Djaringan Transmissi dan Distribusi Tenaga Listrik.

Usaha rehabilitasi dan perluasan transmissi dipusatkan terutama pada daerah-daerah Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, Sumatera Timur, dan Sumatera Barat. Setiap usaha ini selalu didahului dengan survey ataupun penelaahan-feasibility untuk memastikan manfaatnja jang optimal dari investasi ini.

Usaha rehabilitasi dan perluasan djaringan distribusi tenaga listrik berlangsung didaerah-daerah Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, Sumatera Timur, dan tersebar dibeberapa tempat lainnja. Dalam rehabilitasi dan perluasan djaringan distribusi inipun berlaku ketentuan bahwa ia didahului oleh survey dan penelaahan feasibility.

Dalam wilajah Djawa Barat rehabilitasi dan perluasan djaringan distribusi dan transmissi tenaga listrik dipandang perlu untuk lebih memanfaatkan pusat-pusat tenaga listrik jang terdapat, baik di Djatiluhur maupun di Tandjung Priok. Diharapkan agar lambat-laun tertjapailah keseimbangan jang lebih serasi antara pembangkitan tenaga listrik dengan djaringan distribusi dan transmissi tenaga listrik.

Dalam wilajah Djawa Tengah akan diusahakan agar kedua sistim Tuntang dan Ketenger dapat disambung-satu, sehingga pusat-pusat tenaga listrik Garung dan Semarang dapat lebih dimanfaatkan.

Diwilajah Djawa Timur akan diusahakan agar djaringan distribusi jang terdapat setjara lokal di Djember dan Banjuwangi lambat-laun dapat dipadukan, sehingga dimungkinkan pemanfaatan jang lebih sempurna dari pusat-pusat tenaga listrik dikedua tempat ini.

Diwilajah Sumatera Timur setjara berangsur akan dibina djaringan distribusi dan transmissi sekitar Medan, sambil membina pusat tenaga listrik baru di Medan. Ichtiar ini merupakan bagian daripada rentjana djangka pandjang untuk menampung tenaga listrik dari pusat listrik tenaga air Asahan, setelah terbukti bahwa survey dan penelaahan feasibility mengungkapkan manfaat ekonominja.

Diwilajah Sumatera Barat maka perentjanaan transmissi dan distribusi bergandengan erat dengan pemanfaatan pusat pembangkitan listrik di Sawahlunto. Disektor pertambangan direntjanakan untuk melangsungkan survey dan penelaahan feasibility mengenai rehabilitasi tambang batu-bara Umbilin. Andaikata penelaahan ini membenarkan rehabilitasi tambang

Umbilin, maka pusat pembangkitan listrik jang tersedia perlu diselesaikan. Diduga bahwa kapasitas-terpasang dapat pula dimanfaatkan untuk wilajah sekitar tambang Umbilin ini. Untuk keperluan inilah direntjanakan pula djaringan transmissi dan distribusi listrik.

Setjara tersebar maka djaringan distribusi perlu direhabilitasi dan diperluas disekitar pusat-pusat pembangkitan listrik jang ada. Dalam hubungan ini maka usaha rehabilitasi dan perluasan ini akan didahului oleh survey dan penelaahan-feasibility untuk mendjamin manfaat jang optimal dari biaja-investasi.

Maksud utama dari investasi dalam djaringan distribusi dan transmissi ialah untuk mentjapai keseimbangan antara kapasitas pembangkitan listrik dengan kapasitas distribusi, sehingga dimungkinkanlah penggunaan sepenuhnja hasil listrik jang dibangkitkan. Djika ini tertjapai maka akan terbukalah kemungkinan untuk mengusahakan biaja per kilowat jang lebih effisien, sehingga berpengaruh baik bagi penetapan tarif jang riil.

2. **Rehabilitasi dan Pembangunan Pusat-pusat Listrik.**

Pusat-pusat listrik dapat memakai sebagai sumber-enersi tenaga air, tenaga uap, tenaga gas, dan tenaga diesel.

Pemakaian tenaga air sebagai sumber enersi berfaedah tidak sadja bagi pembangkitan listrik, akan tetapi djuga bagi irigasi, pengendalian bandjir, dan tempat rekreasi. Sifat konstruksi pemakaian tenaga air jang serba-guna ini, akan menimbulkan daja-tarik jang tjukup besar kepada tjara-tjara pembangkitan listrik dengan tenaga air. Tinggi biaja investasi membatasi kemungkinan pembinaan projek-projek ini setjara lebih luas. Pusat listrik tenaga air jang tengah berdjalan akan diselesaikan, sedangkan jang baru harus didahului dengan survey dan penelaahan-feasibility mengenai manfaat ekonominja.

Pusat Listrik Tenaga Air Asahan (Sumatera Timur).

Dua hasil survey telah tersedia sekarang dari team-survey Uni Sovjet dan team-survey Djepang. Jang pertama mengusul-

910088-(6).

kan pembangkitan listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 160 MW, sedang jang kedua sebesar 460 MW.

Kedua-dua survey menegaskan keperluan adanja pabrik aluminium jang mampu menampung pengadaan listrik ini. Tanpa pabrik ini maka kapasitas listrik terlalu besar djika dibandingkan dengan kebutuhan daerah.

Dewasa ini tengah berlangsung usaha untuk mendjadjagi pembangunan pabrik tersebut melalui penanaman modal swasta. Sebelum pabrik ini dibangun, terlebih dahulu akan berlangsung survey mengenai ketjukupan persediaan bauxit jang dapat membenarkan eksploitasi kekajaan bumi ini setjara kommersiil.

Sementara hal ini dilakukan maka penelaahan feasibility dan design dilangsungkan untuk menjelidiki tjara-tjara dan kemungkin pembangunan waduk Asahan dan pembangkitan listrik. Bergantung pada kesimpulan penelitian ini maka langkah-langkah pembangunan berikutnja ditetapkan. Andaikata hasil penelitian ini memuaskan serta perkembangan dalam usaha pengolahan bauxit djuga memuaskan, maka pembangunan waduk Asahan ini diharapkan akan selesai dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang kedua.

Pusat Listrik Tenaga Air Batang-Agam (Sumatera Barat).

Pembangunan pusat listrik tenaga air di Batang-Agam, Sumatera Barat, akan dilihat dalam rangka keseluruhan pembangunan pembangkitan listrik dalam wilajah ini. Disini akan diperhitungkan pula pengadaan listrik jang direntjanakan dengan menggunakan batu-bara sebagai bahan-bakar bertempat di Sawah-Lunto ditambang Umbilin.

Suatu survey dan penelaahan-feasibility akan dilakukan untuk menetapkan manfaat serta pemetjahan daripada tambang batu-bara Umbilin jang dewasa ini menghadapi kesulitan. Kemungkinan rehabilitasi daripada tambang batu-bara ini didjadjagi dengan mentjari pula djalan-djalan pemetjahan bagi pemasaran daripada hasil pertambangan batu-bara ini.

Andaikata rehabilitasi tambang ini adalah hal jang wadjar, maka pembangunan pusat listrik disini penting, apalagi bila diingat bahwa bagian terbesar peralatannja sudah tersedia. Diduga bahwa kebutuhan listrik untuk pertambangan ini lebih rendah daripada kapasitas terpasang dari pusat listrik disini, sehingga tersedialah sisa bagi masjarakat umum. Untuk memanfaatkan surplus listrik ini maka diperlukan djaringan transmissi dan distribusi.

Sementara itu pembangunan pusat listrik tenaga air Batang-Agam sebesar 10 MW akan ditelaah. Baru setelah feasibilitynja terbukti maka akan dilandjutkan perentjanaan pembangunannja serta pemakaiannja.

Pusat Listrik Tenaga Air Garung (Djawa Tengah).

Sebuah pusat listrik tenaga air dengan kapasitas 2 × 10 MW tengah direntjanakan di Djawa Tengah. Persiapan pendahuluan telah selesai dilakukan sehingga pekerdjaan dapat dimulai.

Pusat Listrik Tenaga Air Ngebel (Djawa Tengah).

Pusat listrik ini dengan kapasitas 2,25 MW akan disempurnakan dalam masa dekat ini dan dimaksudkan untuk lebih memantapkan djaringan Madiun.

Pusat Listrik Tenaga Air Karangkates (Djawa Timur).

Dewasa ini tengah dibangun waduk serbaguna Karangkates dengan tudjuan menambah air irigasi dimusim kering, sehingga dapat menambah produksi beras setiap tahunnja. Selain itu waduk ini dapat pula mentjegah bandjir jang setiap tahunnja mengganas didaerah ini.

Waduk ini dimaksudkan pula untuk menambah persediaan tenaga listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 2 × 35 MW. Diharapkan bahwa waduk ini akan selesai ditahun rentjana 1971/1972. Mendjelang ini maka penelaahan-feasibility dan persiapan pembangunan pusat listrik dapat dilakukan.

Pusat Listrik Tenaga Air Seloredjo (Djawa Timur).

Sedjalan dengan pembangunan waduk Karangkates tengah dibangun pula waduk Kalikonto di Seloredjo. Sifat serbaguna waduk ini serupa dengan Karangkates. Waduk ini djuga dapat menambah air irigasi sehingga memungkinkan penambahan produksi beras setiap tahunnja, dan mentjegah bandjir.

Disamping itu terbuka pula kemungkinan membangun pusat listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 4,8 MW.

Pusat Listrik Tenaga Air Riam-Kanan (Kalimantan Selatan).

Sebagai bagian daripada rentjana pembangunan wilajah Kalimantan Selatan maka akan dibangun waduk Riam-Kanan. Projek ini akan menambah air irigasi dan mengendalikan bandjir.

Tenaga airnja kemudian dapat dipakai untuk membangkitkan listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 2× 10 MW, dan diusahakan agar dapat selesai dalam masa Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini djuga.

Pusat Listrik Tenaga Air Tonsea-Lama (Sulawesi Utara).

Projek ini merupakan kelandjutan dari usaha jang sudah dilakukan. Kapasitas listrik terpasang adalah sebesar 1 × 4,4 MW dan diharapkan selesai dalam masa Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini.

Pada umumnja pusat-pusat tenaga air jang dibangun sekarang merupakan kelandjutan daripada usaha lama sehingga perlu diselesaikan. Projek Karangkates, Kalikonto dan Riam-Kanan merupakan projek jang lazim dikenal dengan Projek 3K jang semula dibiajai dengan pampasan Djepang, dan kemudian dilandjutkan dengan bantuan projek Djepang. Untuk merentjanakan pusat-pusat listrik tcnaga air jang baru dilangsungkan terlebih dahulu survey dan penelaahan feasibility.

Disamping pembangkitan listrik dengan tenaga air terdapat pula pembangkitan listrik dengan tenaga uap. Djangka waktu

pembangunan pusat listrik tenaga uap djauh lebih pendek dari pada pusat listrik tenaga air. Bahan bakarnja dapat bermatjam-matjam, seperti minjak, batu-bara, dan lain-lain. Oleh karena bahan bakar bagi pusat listrik tenaga uap adalah matjam-matjam, sedang dilain fihak tambang batu-bara jang terdapat ditanah air kita dewasa ini menghadapi kesulitan pemasaran, maka perlulah ditelaah pemanfaatan batu-bara sebagai bahan bakar pusat listrik tenaga uap.

Masalah jang dihadapi dalam batu-bara ialah bahwa bahan bakar saingannja, minjak bumi, dewasa ini mempunjai harga jang tidak mentjerminkan harga kelangkaannja. Sebaliknja pemanfaatan batu-bara sebagai bahan bakar bagi pusat listrik tenaga uap sangat dibatasi oleh kesukaran-kesukaran logistik. Pusat-pusat listrik adalah aktivitas jang masih dapat menggunakan batu-bara bagi pembangkitan tenaga uapnja. Dengan demikian pusat-pusat listrik dapat ikut membantu pemetjahan kesulitan jang dihadapi pertambangan batu-bara dewasa ini.

Pusat-pusat listrik tenaga uap jang akan diselesaikan dalam lima tahun ini ialah:

(a) PLTU Tandjung Priok unit III dan IV dengan kapasitas terpasang sebesar 2× 50 MW;

(b) PLTU Palembang (Sumatera Selatan) dengan kapasitas terpasang sebesar 2 × 12,5 MW;

(c) PLTU Makassar (Sulawesi Selatan) dengan kapasitas terpasang 2× 12,5 MW;

(d) PLTU Semarang (Djawa Tengah) dengan kapasitas terpasang 2 × 30 MW;

(e) PLTU Medan (Sumatera Utara) dengan kapasitas terpasang sebesar 2 × 12,5 MW.

PLTU Makassar dan Palembang merupakan kelandjutan daripada projek-projek jang dibiajai dengan kredit dari Jugoslavia. Pembiajaan jang lainnja akan diichtiarkan dalam rangka bantuan projek.

3. Pembangunan Pusat Listrik Tersebar.

Sementara proses pembangunan listrik dengan unit besar dan perluasan djaringan transmissi dan distribusi listrik dilangsungkan, dirasa perlu untuk melengkapi pembangunan ini dengan mendirikan pusat-pusat listrik tersebar jang terdiri dari satuan-satuan ketjil dipelbagai tempat jang dapat merangsang perkembangan industri ringan dan keradjinan rakjat.

Pada tahap permulaan dilangsungkan survey dan penelaahan feasibility serta pembangunan pertjobaan sebagai "pilot project" dipelbagai tempat untuk menelaah manfaat daripada pusat-pusat listrik tersebar ini. Pusat-pusat listrik ini direntjanakan akan menggunakan tenaga diesel dan tenaga micro-hydro. Melalui pendekatan ini diharapkan bahwa beberapa daerah sudah dapat dialiri listrik, sungguhpun belum tertampung dalam sistim listrik jang luas. Lambat laun akan diusahakan agar terbina sistim listrik jang dapat mendjangkau bagian terbesar wilajah tanah air kita.

4. Perbaikan Institusionil dan Effisiensi.

Sedjalan dengan semakin besar tugas dan tanggung-djawab, maka akan diserasikan organisasi dibidang listrik agar terdjamin effisiensi jang maksimal. Wudjud jang ideal dari effisiensi perusahaan adalah kemampuan menghasilkan listrik dengan tarif jang memadai disatu-fihak, dan kemampuan memupuk dana-keuangan jang dapat digunakan pula bagi Pembiajaan rehabilitasi dan investasi dilain fihak.

Hal ini setjara berangsur akan ditjapai melalui rentjana investasi jang memungkinkan tertjapainja keseimbangan jang tepat antara pembangkitan dengan distribusi listrik, sehingga memungkinkan biaja per-satuan kw jang lebih effisien.

Djuga penting adalah ichtiar untuk memproduksi bahan keperluan didalam negeri, sehingga dapat menghemat devisa. Dalam hubungan ini maka kerdja-sama ataupun joint-venture dengan modal swasta dalam produksi alat-alat listrik akan didjadjagi.

5. **Survey, Penelaahan Feasibility, Penelitian dan lain-lain.**

Dalam menjiapkan rehabilitasi dan pembangunan pusat-pusat listrik, djaringan distribusi, dan transmissi maka menondjollah keperluan akan survey, penelaahan feasibility dan design study. Mengingat kebutuhan ini maka perhatian besar akan diberikan kepada studi-studi ini, baik dengan tenaga-tenaga ahli kita sendiri maupun dengan memanfaatkan bantuan tehnik luar negeri. Dalam hubungan ini maka bantuan telah diperoleh dari Pemerintah Djepang dan Bank Dunia berupa team-survey dan tenaga ahli.

Salah satu survey nasional jang dewasa ini tengah diadakan dibidang listrik dimaksudkan untuk lebih mendjamin effisiensi dan ketjepatan dalam aktivitas kelistrikan seperti penelitian perentjanaan, pembangunan, exploitasi, tarif dan management. Dalam merentjanakan pusat-pusat pembangkitan listrik akan ditelaah pula mana jang paling menguntungkan dari pelbagai matjam kemungkinan, seperti pusat listrik tenaga air, tenaga uap, baik jang menggunakan minjak, batu-bara, gas alam ataupun geo-thermal.

Disamping usaha survey ini tidak kurang penting ialah usaha penelitian dibidang listrik. Dalam rangka kegiatan penelitian ini akan diusahakan pula kerdjasama jang erat dengan lembaga-lembaga pengetahuan, seperti universitas, sehingga dimungkinkanlah perkembangan listrik tidak sadja untuk keperluan praktis akan tetapi djuga keperluan ilmiah. Fasilitas laboratorium jang tersedia dibidang listrik akan dimanfaatkan untuk keperluan ini.

Ketjuali penelaahan dibidang listrik, djuga akan dilangsungkan penelaahan dan usaha rehabilitasi dibidang gas. Perkembangan penggunaan tenaga gas, chususnja untuk rumah-rumah tangga dikota-kota besar, akan diarahkan untuk mengganti kerosin dan kaju bakar sebagai bahan bakar domestik. Pengurangan pemakaian kaju bakar akan memberikan pengaruh baik bagi usaha pengendalian bandjir dan pengurangan erosi tanah.

Suatu survey untuk lebih memanfaatkan gas bagi umum dan rehabilitasi djaringan distribusi gas, diharapkan dapat menambah enersi bahan bakar bagi umum.

Disamping penjediaan listrik oleh Perusahaan Listrik Negara, terdapat pula pengadaan listrik oleh industri, pertambangan, perkebunan, pelabuhan-pelabuhan laut dan udara, serta oleh kalangan swasta lainnja. Besarnja penjediaan listrik dalam masa lima tahun jang akan datang ini, agak sukar untuk diduga. Selama kebutuhan akan listrik belum sepenuhnja dapat terpenuhi, maka pengadaan sendiri akan tetap berlangsung. Untuk mendjamin pertumbuhan listrik setjara effisien maka dalam pengadaan oleh badan-badan Pemerintah perlu dilakukan koordinasi oleh Perusahaan Listrik Negara.

Diperkirakan bahwa pada permulaan tahun dimulainja Rentjana Pembangunan Lima Tahun maka persediaan daja-terpasang listrik adalah lebih kurang 659.000 kw untuk kemudian ditingkatkan dengan 425.000 kw dalam masa lima tahun. Sasaran ini diharapkan dapat ditjapai dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun sebagaimana tersebut dalam tabel VII-C-1.

Dengan langkah-langkah kebidjaksanaan dan rentjana pembangunan ini diharapkan agar tertjapailah kemadjuan dalam daja-terpasang listrik. Disadari sepenuhnja bahwa peningkatan ini belum berarti peningkatan jang sebanding dalam penjediaan listrik bagi masjarakat. Kebutuhan masjarakat masih belum akan terpenuhi.

Jang diharapkan dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun disektor listrik ialah agar dengan dana pembiajaan jang tersedia dapatlah sedjauh mungkin terbina keseimbangan jang lebih menguntungkan antara kapasitas pembangkitan dengan kapasitas distribusi, dan sedjauh mungkin diusahakan manfaat jang maksimal dari fasilitas-fasilitas jang tersedia.

TABEL VII - C-1.

PEMBIAJAAN RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN SEKTOR LISTRIK, 1969/70 — 1973/74.

(dalam djutaan rupiah)

	1969/70 Sumber Pembiajaan			1969/70 — 1973/74 Sumber Pembiajaan		
	Anggaran Pemb.	Bantuan Projek	Djumlah	Anggaran Pemb. *)	Sumber2 lain	Djumlah
1. Rehabilitasi, perluasan transmissi dan distribusi listrik.	1.177	2.415	3.592	40.494	—	40.494
2. Rehabilitasi dan pembangunan pusat-pusat listrik.	2. 433	1.876	4.309	46.108	—	46.108
3. Persiapan pembangunan pusat listrik tersebar.	450	1.172,50	1.622,50	5.780	—	5.780
4. Usaha peningkatan efficiency.	145	—	145	295	—	295
5. Survey penelaahan, feasibility, penelitian dll.	485	731,5	1.216,50	7.323	—	7.323
	4.690	6.195	10.885	100.000	—	100.000

*) Termasuk bantuan projek.

SEKTOR TENAGA LISTRIK

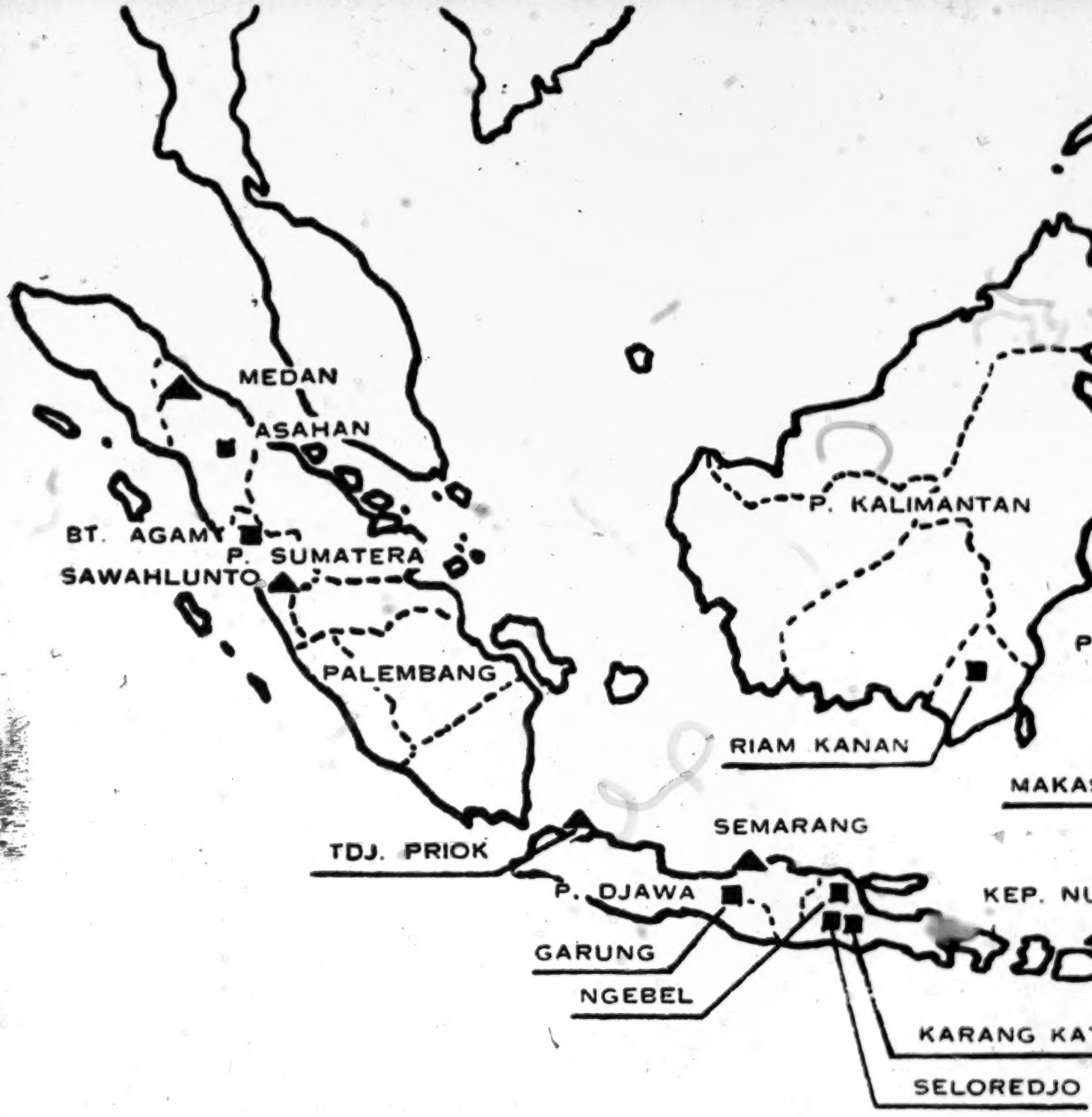

REHAB P.L.T. DIESEL : TERSEBAR
DJARING TRANSMISI :: DJABAR. DJATENG. DJATIM. SUMUT. SUM
DJARING DISTRIBUSI :: DJABAR. DJATENG. DJATIM. SUMUT. TE

■ P.L.T.A.

▲ P.L.T.U.

SUB SEKTOR: TENAGA LISTRIK

TENAGA LISTRIK

BAB VIII

PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

BAB VIII
PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

A. PERHUBUNGAN.

a. Pendahuluan

Fungsi dan kedudukan perhubungan dalam rangka pembangunan lima tahun adalah sebagai sarana bagi kelantjaran arus-barang dan arus-orang jang diperlukan untuk perkembangan ekonomi dan kehidupan masjarakat Indonesia.

Oleh karena maksud Rentjana Pembangunan Lima Tahun adalah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, chususnja sektor pertanian, dan pembinaan kehidupan bangsa kita, maka sudah sewadjarnja apabila perhubungan direhabilitasi, disempurnakan dan dikembangkan untuk memenuhi fungsinja sebagai sarana pembangunan.

Dalam memenuhi fungsi dan harapan ini tidak dapat dimungkiri bahwa kondisi perhubungan dewasa ini sangat ketinggalan dengan kebutuhan normal masjarakat akan djasa-djasa perhubungan. Peningkatan pemakaian djasa-djasa perhubungan tidak diikuti dimasa lampau dengan peningkatan dan perluasan perhubungan. Sehingga sekaligus dihadapi tantangan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan akan djasa-djasa perhubungan untuk pembangunan, disamping tantangan untuk mengedjar ketertinggalan fasilitas dibandingkan dengan konsumsi normal dari djasa-djasa perhubungan.

Tantangan-tantangan ini harus dihadapi dalam batas penjediaan biaja sebesar Rp. 230 miljar. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk dapat menelaah setjara tepat dan djitu setiap usaha rehabilitasi, perluasan dan pembangunan dibidang perhubungan, sehingga terdjamin pemanfaatan jang optimal dari dana-pembiajaan dan tenaga jang terbatas.

Dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun disektor perhubungan ini ingin didjawab tantangan jang dihadapi. Apabila

rentjana pembangunan sebagaimana diuraikan disini berhasil dilaksanakan, maka tergambarlah kemungkinan harapan-harapan sebagai berikut:

Sesudah lima tahun diharapkan agar sebagian daripada djaringan djalan-djalan dapat ditingkatkan mutunja dan direhabilitasi sehingga memungkinkan peningkatan kelantjaran lalulintas djalan. Setjara realistis disadari bahwa peningkatan volume lalu-lintas baru dapat ditampung dengan djaringan djalan-djalan jang baik dalam masa sepuluh tahun. Dalam masa lima tahun ini diichtiarkan agar ketertinggalan peningkatan mutu djalan dapat diperketjil.

Dengan semakin baiknja djaringan djalan-djalan serta tertjiptanja iklim kerdja jang lebih baik, maka usaha kegiatan angkutan djalan raja akan berkembang lebih pesat dan makin teratur.

Dalam bidang kereta api maka pada achir Rentjana Pembangunan Lima Tahun terselesaikan baru sebagian daripada usaha-usaha rehabilitasi, akan tetapi disamping itu diharapkan agar mutu pelajanan (service) kereta api sudah dapat djauh meningkat.

Dibidang perhubungan laut, diharapkan agar unsur-unsur dan fasilitas-fasilitas jang penting dari sarana perhubungan laut telah direhabilitir dan pelajanannjapun (service) telah dapat ditingkatkan pula.

Kemudian dibidang penerbangan diharapkan agar usaha upgrading dan rehabilitasi landasan terbang jang penting berikut fasilitas-fasilitasnja untuk sebagian besar dapat terselesaikan, sedangkan usaha modernisasi diharapkan sudah pula dirintis. Disamping itu pelajanan (service) telah pula djauh meningkat dan meluas, chususnja dalam melajani wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Dalam bidang pos, giro dan telekomunikasi diharapkan agar pelajanan (service) pos dan giro sudah lebih meluas dan meningkat, sedangkan chusus dalam telekomunikasi telah terse-

lesaikan sebagian besar usaha rehabilitasi, dan telah dapat ditingkatkan pada modernisasi jang lebih berarti.

Untuk mentjapai keadaan-keadaan ini maka dasar kebidjaksanaan dibidang perhubungan adalah bahwa Pemerintah membatasi diri sedjauh mungkin pada kegiatan-kegiatan jang benar-benar merupakan tugas dan kewadjiban Pemerintah, terutama dalam pengadaan dan penjediaan prasarananja. Usaha penjelenggaraan angkutan diserahkan pada inisiatif swasta, dan Pemerintah berkewadjiban dalam hal ini mentjiptakan iklim jang merangsang perkembangan usaha swasta berdasarkan peraturan-peraturan jang ada.

Garis kebidjaksanaan djuga diarahkan pada usaha penjempurnaan lembaga-lembaga dan badan-badan jang berhubungan dengan perhubungan sebagai ichtiar untuk meningkatkan effisiensi usaha.

Berkat usaha investasi dan pelaksanaan kebidjaksanaan ini diharapkan agar terbina pula penghargaan dan pengertian dari fihak pemakai djasa-djasa dibidang perhubungan sehingga tertjiptalah landasan kerdjasama jang sehat antara pemakai-djasa, pembuat-djasa dan Pemerintah, sehingga bersama-sama dapat diwudjudkan fungsi dan kewadjiban perhubungan sebagai sarana bagi peningkatan kelantjaran perkembangan ekonomi dan kehidupan masjarakat Indonesia.

b. **Perhubungan Darat**

DJALAN

Bagaikan pembuluh-darah dalam tubuh manusia, maka djaringan djalan memenuhi fungsinja jang serupa. Djaringan djalan tidak sadja penting bagi kelantjaran arus barang untuk perkembangan ekonomi, akan tetapi djuga penting bagi kelantjaran arus manusia untuk pembinaan kesatuan bangsa.

Mengingat pentingnja fungsi djalan ini maka dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini alokasi investasi adalah jang terbesar dari keseluruhan investasi disektor perhubungan darat ini.

Keadaan dan Masalah.

Pandjang djaringan djalan di Indonesia menurut statistik terachir ditahun 1967 meliputi lebih kurang 83.854 km, terbagi atas djalan negara, djalan propinsi dan djalan kabupaten.

Lebih kurang 17 persen dari sepandjang 10.139 kilometer djalan negara berada dalam kondisi jang baik, sebesar 10 persen dari 22.682 kilometer djalan propinsi berada dalam kondisi jang baik dan dari 51.031 kilometer djalan kabupaten praktis tidak ada jang dapat disebut dalam kondisi baik. Hal ini berarti bahwa kira-kira 5 persen dari seluruh djaringan djalan berada dalam keadaan baik. Djika ikut diperhitungkan kondisi djalan jang sedang, maka djumlah persentase ini mendjadi 30 persen. Praktis 70 persen dari seluruh djaringan djalan ini berada dalam keadaan jang buruk.

Djalan-djalan ini hampir seluruhnja dibangun dizaman Hindia Belanda dan konstruksi djalan disesuaikan dengan keadaan lalu-lintas dan kebutuhan waktu itu. Sementara itu kemadjuan lalu-lintas semakin meningkat, jang tertjermin dalam intensitas lalu-lintas, semakin beratnja tekanan gandar dan ketjepatan djalannja kendaraan. Semua ini berarti tambahan beban pada djaringan djalan jang ada.

Berhadapan dengan peningkatan lalu-lintas ini terdapat usaha pemeliharaan dan rehabilitasi djalan jang tidak sebanding, sehingga dapatlah difahami apabila djalan-djalan lambat-laun habis „dimakan" dan menderita kemunduran. Setiap tahun diperkirakan bahwa djalan-djalan mundur dalam kondisinja, dari keadaan baik turun mendjadi sedang, buruk atau buruk sekali.

Rusaknja bagian-bagian tertentu menjebabkan bahwa lalulintas beralih kedjaringan djalan jang baik, sehingga djalan-djalan baik ini memikul beban jang berkelebihan, sehingga segera pula menderita kemunduran. Dengan demikian berlangsunglah proses spiral dari kemunduran djalan-djalan.

Pokok masalah dalam djalan-djalan ini adalah bagaimana dapat memperbaiki djalan begitu rupa sehingga dapat menam-

pung kenaikan lalu-lintas. Hal ini harus dipetjahkan dalam batas pengadaan pembiajaan sebesar Rp. 100 miljar selama lima tahun.

Meningkatnja intensitas lalu-lintas dengan tekanan gandar jang lebih besar dan ketjepatan kendaraan jang lebih tinggi, djika dibandingkan dengan dimasa Hindia Belanda, mendorong keperluan untuk meningkatkan mutu (upgrading) djalan-djalan ketingkat klasifikasi djalan jang lebih tinggi.

Dalam peningkatan klasifikasi djalan-djalan ini dipakai empat kriteria, jakni kedudukan fungsi djalan, ketjepatan kendaraan, intensitas lalu-lintas dan tekanan gandar.

Menurut kriteria tekanan gandar maka djalan-djalan sekarang dibagi dalam kelas A (8 ton), kelas B (5 ton) dan kelas C (2 ton). Menurut kriteria intensitas lalu-lintas maka djalan-djalan dibagi atas kelas I dengan 10 transport unit/djam dan lebar konstruksi 3,5 m, kelas II dengan 600 transport unit/djam dan lebar konstruksi 7 m, kelas III dengan 1.000 transport unit/djam dan lebar konstruksi 10 m, dan kelas IV dengan 2.400 transport unit/djam dan lebar konstruksi 2 × 7,5 m.

Menurut kriteria fungsi djalan maka djalan ekonomi adalah jang menghubungi daerah produksi dengan daerah konsumsi, daerah surplus dengan daerah minus, daerah pedalaman dengan pelabuhan ekspor dan djalan pariwisata. Sedangkan fungsi djalan lainnja adalah untuk keperluan pemerintahan, pertahanan-keamanan dan sosial.

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah.

Bertolak dari kondisi djaringan djalan jang terdapat sekarang ini, dan dengan memperkirakan perkembangan lalu-lintas dimasa depan, maka garis kebidjaksanaan dibidang djalan selama Rentjana Pembangunan Lima Tahun meliputi:

1. peningkatan mutu (upgrading) kelas djalan ketingkat jang lebih tinggi; usaha ini dilakukan seiring dengan peningkatan mutu djembatan.

2. rehabilitasi djaringan djalan dalam makna perbaikan djalan menurut kelas semula; hal ini djuga berlaku bagi djembatan.
3. penelitian, perentjanaan dan persiapan pembangunan djalan-djalan baru.
4. pengawasan atas penggunaan djalan oleh kendaraan-kendaraan, agar sesuai dengan klassifikasi tekanan gandar dan intensitas lalu-lintas.

Diperkirakan bahwa biaja peningkatan mutu djalan menelan biaja sebesar tiga kali biaja rehabilitasi djalan per kilometer. Akan tetapi sebaliknja, biaja pemeliharaan djalan jang direhabilitasi lebih tinggi djika dibandingkan dengan biaja pemeliharaan djalan-djalan jang ditingkatkan mutunja. Berangsur-angsur ingin diusahakan agar biaja per satu kilometer mendekati nilai jang lajak.

Sementara dalam tahun pertama Rentjana Pembangunan ini dilangsungkan perbaikan djalan, maka berbareng dengan ini dilakukan pula suatu survey nasional dibidang djalan-djalan jang diselenggarakan dengan kerdja-sama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa dan Bank Dunia. Survey ini turut membantu dalam memperintji lebih landjut rentjana perbaikan djalan.

Dalam rangka perbaikan djaringan djalan, tak kurang pentingnja adalah ichtiar pemeliharaan alat-alat perlengkapan perbaikan djalan. Oleh karena itu maka sebanjak 19 buah bengkel direntjanakan untuk didirikan setjara tersebar dibeberapa wilajah tanah air kita.

Disamping itu diusahakan pula agar kebutuhan peralatan bagi perbaikan djalan-djalan lambat-laun dapat dibuat didalam negeri. Suatu synchronisasi antara kebutuhan peralatan bagi perbaikan djalan dengan pembangunan industri prasarana akan diusahakan dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini.

Salah satu bahan keperluan bagi perbaikan djalan adalah aspal. Sebagian dari kebutuhan aspal ini telah dapat diprodusir

didalam negeri. Oleh karena rentjana perbaikan djalan memerlukan pengadaan aspal setjara teratur, maka timbullah kebutuhan untuk merentjanakan pula pengadaan aspal, baik dari hasil produksi dalam negeri, maupun impor dari luar negeri. Rentjana pengadaan aspal akan merupakan hasil kerdja-sama antara pabrik-pabrik aspal, rentjana impor melalui Departemen Perdagangan dan rentjana penggunaan oleh Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Mengingat bahwa kebutuhan aspal akan meningkat akibat dari pada besarnja usaha perbaikan djalan-djalan, maka pabrik-pabrik aspal di Wonokromo dan Pangkalansusu perlu direhabilitasi. Sedangkan aspal Buton perlu pula ditingkatkan. Disamping usaha rehabilitasi dan peningkatan produksi ini, direntjanakan pula penjaluran aspal setjara lebih lantjar dan effisien.

Disamping usaha perbaikan djalan, tidak kurang pentingnja adalah usaha mengawasi penggunaan djalan. Apabila djalan-djalan digunakan setjara sembrono tanpa memperdulikan klassifikasi djalan, maka djalan-djalan akan mudah dan tjepat rusak. Oleh karena itu maka disiplin dalam tata-tjara penggunaan djalan perlu diperketat agar kendaraan-kendaraan menggunakan djalan-djalan jang serasi dengan tonnage berat kendaraan dan klassifikasi djalan.

Dalam hubungan ini maka Pemerintahan Daerah memegang peranan jang strategis. Pengawasan atas lalu-lintas djalan jang diserasikan dengan klassifikasi djalan perlu ditingkatkan. Terbatasnja dana pembiajaan menjebabkan terbatas pula djalan-djalan jang dapat diperbaiki. Sedangkan masih banjak lagi djalan jang harus diperbaiki. Oleh karena itu adalah tanggung-djawab kita bersama untuk mendjaga agar djalan-djalan dipakai setjara hemat dan tidak setjara serampangan, sehingga manfaatnja bagi kepentingan umum dapat dinikmati lebih lama.

910088-(7).

Target dan lokasi Pembangunan

Berdasarkan kebidjaksanaan ini maka sasaran fisik selama lima tahun ini adalah:

	1969/70	1969/70 — 1973/74
1. Peningkatan mutu djalan	700 Km.	6.000 Km.
Peningkatan mutu djembatan	1.000 meter	16.000 meter
2. Rehabilitasi djalan	1.300 Km.	11.225 Km.
Rehabilitasi djembatan	6.000 meter	64.000 meter
3. Djalan baru	20 Km.	305 Km.
4. Bengkel-bengkel (workshop)	4 buah	19 buah

Sasaran ini ingin ditjapai dengan djumlah pembiajaan sebesar Rp. 8,701 miljar untuk tahun 1969/70 dan Rp. 100 miljar untuk Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Dibandingkan dengan kebutuhan akan peningkatan mutu dan rehabilitasi djalan dan djembatan, djelaslah bahwa sasaran ini tidak tjukup untuk menampung kebutuhan perbaikan dalam masa lima tahun ini. Diperkirakan bahwa perbaikan djalan jang mendekati kebutuhan lalu-lintas dapat dilakukan dalam masa sepuluh tahun.

Mengingat hal ini maka timbullah keperluan untuk mengadakan seleksi serta pilihan jang djitu atas djalan-djalan jang akan diperbaiki. Dalam masa lima tahun ini diutamakan djalan ekonomi. Perintjian daripada djalan-djalan ini diungkapkan dalam Tabel VIII-B-1.

Baik peningkatan mutu, rehabilitasi maupun pembangunan djalan baru, senantiasa didahului dengan penelaahan-feasibility dan survey sehingga dapat didjamin penggunaan modal pembiajaan setjara effisien, dan kwalitas djalan jang dapat dipertanggung-djawabkan.

TABEL VIII-B-1.

RENTJANA REHABILITASI/UPGRADING DJALAN DAN DJEMBATAN NEGARA DAN PROPINSI

1969/70 — 1973/74.

No.	Propinsi	Djalan (km)			Djembatan (m)		
		Rehabilitasi	Upgrading	Djumlah	Rehabilitasi	Upgrading	Djumlah
1.	D.I. Atjeh	1.060	220	1.280	4.340	1.100	5.440
2.	Sumatra Utara	1.760	440	2.200	6.860	1.200	8.060
3.	Sumatra Barat	800	360	1.160	4.728	900	5.628
4.	R i a u	530	70	600	3.130	500	3.630
5.	Djambi	700	80	780	2.800	500	3.300
6.	Sumatra Selatan	2.150	280	2.430	7.876	1.500	9.376
7.	Lampung	500	120	620	2.216	500	2.716
8.	Kalimantan Selatan	200	125	325	1.240	300	1.540
9.	Kalimantan Timur	80	50	130	800	200	1.000
10.	Kalimantan Barat	135	145	280	1.600	400	2.000
11.	Kalimantan Tengah	5	40	45	300	100	400
12.	Sulawesi Selatan	355	340	695	2.820	700	3.520
13.	Sulawesi Tenggara	65	100	165	1.000	200	1.200
14.	Sulawesi Utara	35	410	445	2.440	500	2.940
15.	Sulawesi Tengah	45	210	255	1.600	400	2.000
16.	B a l i	100	350	450	1.500	600	2.100
17.	Nusa Tenggara Barat	150	80	230	1.400	200	1.600
18.	Nusa Tenggara Timur	100	400	500	800	2.000	2.800
19.	M a l u k u	30	70	100	300	100	400
20.	Irian Barat	225	—	225	250	—	250
21.	Djawa Barat	600	765	1.365	5.000	1.200	6.200
22.	Djawa Tengah	600	635	1.235	4.800	1.200	6.000
23.	D.I. Jogjakarta	120	30	150	600	200	800
24.	Djawa Timur	880	630	1.510	5.600	1.200	6.800
25.	DCI Djakarta Raya	—	50	50	—	300	300
D j u m l a h :		11.225	6.000	17.225	64.000	16.000	80.000

ANGKUTAN DJALAN RAYA

Sesudah ditelaah keadaan dan rentjana perbaikan djalan, sudah sewadjarnja pula bila ditindjau kini pemakai djalan, jakni angkutan kendaraan bermotor.

Keadaan dan Masalah.

Dalam tahun 1968 ditaksir bahwa djumlah kendaraan bermotor, diluar sepeda-motor, berdjumlah 291.969 buah kendaraan. Hampir 58% daripadanja adalah mobil-penumpang, sedangkan selebihnja adalah mobil-barang dan bis. Diperkirakan bahwa 46% dari djumlah kendaraan ini dipakai untuk angkutan umum. Akan tetapi mengingat bahwa kira-kira separohnja ditaksir berada dalam keadaan tidak-djalan, maka praktis hanja 23% dari djumlah kendaraan-bermotor ini berada dalam keadaan djalan dan dipakai untuk angkutan umum.

Sebagai warisan daripada kebidjaksanaan dimasa lampau, maka dewasa ini diseluruh Indonesia terdapat lebih dari 75 matjam merk kendaraan bermotor. Hal ini tentulah tidak praktis dan effisien ditindjau dari sudut pemeliharaan dan penjediaan spareparts.

Pada umumnja kendaraan-kendaraan bermotor ini diusahakan oleh swasta. Akan tetapi tidak djarang terdapat bahwa kendaraan-kendaraan milik negara turut pula dikarjakan untuk menampung kebutuhan akan alat angkutan.

Djika diperkirakan bahwa masa penghapusan kendaraan bermotor adalah sepuluh tahun, atau penjusutannja adalah 10% setahun, dan diperkirakan pula bahwa penambahan penduduk adalah lebih kurang 2,5% setahun, maka setiap tahun djumlah kendaraan harus bertambah sebanjak 12,5% setahun.

Hal ini pada tahap pertama dapat ditanggulangi melalui usaha rehabilitasi kendaraan.

Pertambahan kendaraan-kendaraan ini harus pula memperhitungkan perkembangan perbaikan djaringan djalan, agar dapatlah dimanfaatkan sepenuhnja kendaraan jang tersedia.

Bertolak dari keadaan angkutan-kendaraan bermotor dewasa ini maka masalahnja adalah bagaimana dapat mengusahakan perkembangan kendaraan jang dapat membantu kelantjaran arus barang dan arus orang, sehingga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan pembinaan bangsa.

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah.

Kebidjaksanaan dibidang angkutan djalan ini ingin ditudjukan pada tertjapainja:

(a) tertib-hukum, jakni penjelesaian dan penjempurnaan dari undang-undang lalu-lintas dan angkutan djalan raya, beserta peraturan-peraturan pemerintah, dan pengamanan pelaksanaannja;

(b) tertib wewenang, jakni pembagian tugas dan wewenang setjara tegas antara para instansi jang berhubungan dengan pengaturan lalu-lintas dan angkutan djalan raya, sehingga dapat tertjapai koordinasi antara instansi-instansi tersebut;

(c) tertib usaha, jakni pengamanan dalam penjelenggaraan usaha dibidang angkutan djalan, untuk mendjamin adanja kesempatan jang sama dan konkurensi jang sehat antara pemilik-pemilik kendaraan umum.

Maksud kebidjaksanaan adalah agar dimungkinkannja terbina iklim jang menggairahkan bagi perkembangan perusahaan angkutan djalan, tertjapainja keamanan lalu-lintas sehingga mendjamin kelantjaran arus barang dan arus manusia.

Target dan Lokasi Pembangunan.

Untuk mentjapai maksud kebidjaksanaan ini, maka rentjana pembangunan bagi angkutan djalan raya mentjakupi:

1. pentjiptaan iklim dan kegairahan usaha untuk merangsang pengadaan kendaraan;
2. mengusahakan fasilitas prasarana jang melantjarkan angkutan djalan.

Bagian terbesar dari pengusahaan angkutan djalan raja dilakukan oleh fihak swasta. Oleh karena itulah maka melalui kebidjaksanaan (policies) tanggung djawab Pemerintah adalah mentjiptakan iklim dan kegairahan usaha jang dapat merangsang fihak swasta untuk meningkatkan pengadaan kendaraan-kendaraan serta bengkel-bengkel perawatannja. Usaha serupa ini diselenggarakan oleh fihak swasta itu sendiri, baik melalui ichtiar rehabilitasi daripada kendaraan-kendaraan jang rusak, mengassembling kendaraan-kendaraan didalam negeri, maupun melalui impor.

Melihat pengalaman dimasa lampau, maka ditaksir bahwa penambahan kendaraan akan berkisar antara 1.500 — 2.000 kendaraan setiap tahun. Apabila ditaksir bahwa penggunaan daja muat rata-rata adalah sebesar 2,5 ton, djarak jang ditempuh adalah lebih kurang 150 km. sehari dan peredaran kendaraan lebih kurang 300 hari setahun, maka diperkirakan bahwa setiap tahunnja tambahan kendaraan ini dapat menampung 9 sampai 15 djuta ton muatan atau 1,5 sampai 2,25 miljar ton/km.

Berdasarkan taksiran ini maka dalam masa lima tahun direntjanakan tambahan truk dan bus sebesar 9.258. Sehingga djumlah kendaraan bus dan truck meningkat dari 46.634 mendjadi 55.892 pada achir rentjana pembangunan lima tahun.

Salah satu matjam angkutan jang penting dan memerlukan perhatian adalah angkutan-umum dalam kota. Fasilitas angkutan-umum dalam kota perlu ditingkatkan, dan djika mungkin usaha ini dipasrahkan pada usaha swasta.

Perentjanaan dari route perdjalanan, fasilitas perawatan kendaraan serta peningkatan effisiensi dalam pungutan kartjis merupakan pokok-pokok bagi pertumbuhan bus dalam kota.

Disamping pengadaan kendaraan-kendaraan maka hal penting lainnja adalah penjediaan fasilitas prasarana jang dapat melantjarkan lalu-lintas kendaraan bermotor jang antara lain berupa: lampu-lampu lalu-lintas (traffic lights), tanda-tanda keamanan, penerangan djalanan, dan sebagainja. Penje-

diaan fasilitas-fasilitas ini sedjauh mungkin akan diserahkan kepada Daerah.

Dalam mendjaga dan mentjegah kerusakan djalan jang berlebih-lebihan sebagai akibat penggunaannja oleh alat-alat angkutan dan kendaraan bermotor jang beratnja melebihi batas klasifikasi djalan, maka sudah sewadjarnja bila tonnage kendaraan diteliti supaja sesuai dengan klasifikasi djalan-djalan. Dalam hubungan inilah maka djembatan-timbang dapat memegang peranan jang penting. Disamping itu maka djembatan-timbang ini diperlukan djuga bagi pengumpulan data statistik.

Ketjuali pengadaan djembatan-timbang, tidak kurang pentingnja adalah pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan disatu-fihak dan adanja pengertian dan disiplin dari pemakai-kendaraan untuk mematuhi aturan-djalan dilain-fihak.

Djika tersedia tjukup dana-pembiajaan maka diusahakan fasilitas prasarana angkutan lainnja, seperti terminals, dan lain-lain. Lazimnja hal ini diusahakan oleh Pemerintahan Daerah atau Kotapradja.

ANGKUTAN SUNGAI

Keadaan dan Masalah

Bagi daerah-daerah jang tidak memiliki djalan-raya jang tjukup akan tetapi memiliki sungai-sungai jang besar, maka sungai-sungai ini dapat pula memenuhi fungsi jang serupa dengan djalan untuk melantjarkan arus barang dan arus orang.

Daerah seperti Kalimantan, Sumatera dan Irian Barat terutama memiliki sungai-sungai jang dapat mendjalankan fungsi-djalan itu. Di Kalimantan terdapat sungai-sungai besar seperti Kapuas, Barito, Kahajan, Sampit dan Mahakam. Disamping itu, sebagai hasil-sampingan dari projek pasang-surut, maka daerah ini memiliki djuga kanal-kanal jang dapat pula dipakai sebagai sarana angkutan. Kanal-kanal itu adalah umpamanja kanal Tamban, Marabahan VI, Serapat, Besarang dan Kelampan.

Di Sumatera terdapat pula antara lain sungai-sungai besar jang dapat memenuhi fungsi djalan seperti Batanghari, Asahan, Siak, Indragiri dan Musi.

Dan di Irian Barat terdapat sungai-sungai Digul dan Membramo. Tjiri-tjiri pokok dari sungai-sungai ini adalah bahwa ia dapat dilajari sampai djauh, dan sudah dipakai sebagai sarana angkutan, baik untuk ekspor, angkutan barang maupun manusia.

Masalah jang dihadapi adalah bagaimana lebih meningkatkan penggunaan sungai-sungai sebagai sarana angkutan, baik untuk arus-barang bagi kelantjaran ekonomi maupun arus-manusia bagi pembinaan kesatuan bangsa. Hal ini terutama berlaku bagi daerah-daerah jang tidak memiliki alternatief sarana djalan darat jang baik.

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah.

Untuk lebih merangsang perkembangan ekonomi dan kemasjarakatan maka perlulah diichtiarkan angkutan sungai jang lebih meningkat.

Untuk memungkinkan ini maka kebidjaksanaan jang perlu diambil adalah:

1. mentjiptakan iklim dan merangsang kegairahan swasta agar meningkatkan pengadaan alat-alat angkutan sungai;
2. membina dan memelihara prasarana angkutan sungai.

Lazimnja angkutan sungai diusahakan oleh swasta. Sehingga Pemerintah sejogianja mentjiptakan iklim dan merangsang kegairahan swasta agar dapat lebih banjak mengadakan alat-alat angkutan sungai, dan meningkatkan daja-guna angkutan tersebut. Dalam hubungan ini terdjaminnja keamanan dan kelantjaran bagi pemakai angkutan sungai sangatlah penting.

Sedjalan dengan usaha meningkatkan penggunaan sungai sebagai sarana angkutan maka dalam sektor industri dirangsang pula kegiatan-kegiatan jang menundjang angkutan sungai. Usaha pembuatan kapal, dan jang serupa merupakan bagian daripada industri prasarana dan industri keradjinan rakjat.

Target dan Lokasi Pembangunan.

Sedjalan dengan kebidjaksanaan tersebut diatas maka akan diusahakan pembangunan prasarana bagi angkutan sungai jang berupa terminal dan fasilitas-fasilitasnja disembilan sungai jakni: Asahan, Siak, Indragiri, Batanghari dan Musi di Sumatera serta Kapuas, Kahajan, Barito dan Mahakam di Kalimantan. Fasilitas terminal ini direntjanakan akan meliputi dermaga dan beberapa gudang. Usaha pembangunan ini didahului dengan penelaahan feasibility dan penelitian mengenai ketepatan daripada rentjana pembangunan prasarana fasilitas ini.

Tak kurang pentingnja pula disini, adalah perawatan daripada sungai-sungai, baik jang mentjakupi pengerukannja maupun ichtiar penghidjauan kembali dari hutan-hutan.

ANGKUTAN KERETA-API

Keadaan dan Masalah.

Dewasa ini terdapat lintas kereta-api didaerah-daerah Djawa — Madura, Atjeh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Pada umumnja lintas kereta-api ini berusia lebih dari 40 tahun. Lebih kurang 70 persen dari djembatan-djembatan kereta-api berusia lebih dari 40 tahun. Kondisi lintas kereta-api menderita kekurangan jang serius. Ditaksir bahwa "backlog" dalam penggantian bantalan lintas kereta-api ditahun 1968 adalah lebih kurang 7,4 djuta batang.

Bakal pelanting pun banjak jang sudah tua. Kira-kira 40 persen dari djumlah lokomotif jang ada berusia lebih dari 40 tahun. Demikian pula 60 — 70 persen dari kereta-penumpang dan gerbong berusia lebih dari 40 tahun sedangkan 40 persen dari padanja berada dalam keadaan tidak djalan.

Dari djumlah peralatan jang dipakai dalam sektor telegrapi, maka berhubung dengan usianja, hanja 20 persen masih dapat bekerdja. Dalam sektor teleponi, keadaannja adalah 15 persen jang masih dapat bekerdja. Sedangkan hubungan-radio masih dalam taraf permulaan pembangunan.

Kapal-ferry jang digunakan oleh kereta-apipun sudah tua usianja.

Gambaran jang tampak didalam perkereta-apian adalah bahwa alat-alatnja sudah tua dan kondisinja tidak memungkinkan untuk mentjapai kapasitas jang tinggi. Akibatnja dari hal ini adalah bahwa lintas-utama di Djawa mentjapai keadaan kira-kira 70 persen dari standar nominal, sedangkan lintas-tjabang kira-kira 60 persen dari standar nominal.

Keadaan serupa ini sangat mempengaruhi effisiensi kereta-api dan mendjadi salah satu sebab pokok terdjadinja ketjelakaan-ketjelakaan. Untuk menghindarkan ketjelakaan ini maka antara lain dikurangi ketjepatan perdjalanan kereta-api, sehingga frekwensi kereta-api semakin turun.

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah

Sehabis perang dunia II dan perang kemerdekaan tampaklah bahwa kebutuhan akan lalu-lintas semakin meningkat, sesuai dengan pertambahan penduduk, kebutuhan ekonomi dan lain-lain. Sementara volume lalu-lintas meningkat maka fasilitas-fasilitas jang menampungnja tidak meningkat setjara sebanding.

Djaringan djalan raja tidak terrehabilitasi atau ditingkatkan mutunja setjara sebanding, sehingga angkutan djalan menghadapi kesulitan. Didaerah-daerah dimana hal ini mungkin, maka lalu-lintas menggunakan sarana angkutan lainnja, seperti kereta-api. Sehingga pemakaian kereta-api semakin meningkat.

Sebaliknja usaha pemeliharaan dan pengembangan daripada fasilitas angkutan kereta-api tidak meningkat setjara sebanding dengan peningkatan pemakaian kereta-api, kemudian karena kedudukannja sebagai "public utility" maka kartjisnja ditetapkan pada tingkat tertentu. Dalam keadaan mengamuknja inflasi, maka nilai riil tarif kereta-api semakin merosot, sehingga tidak tersedia tjukup dana bagi pemeliharaan dan perbaikan.

Sementara itu djumlah pegawai meningkat dari 60.500 orang (1942) mendjadi 80.000 orang (1968). Besarnja djumlah pegawai menjebabkan bahwa 60 persen dari seluruh biaja

exploitasi bidang kereta-api disediakan untuk gadji pegawai termasuk tundjangan-tundjangannja. Sungguhpun djumlah ini adalah besar, namun setjara perorangan setiap pegawai tidak menerima penghasilan jang tjukup.

Dalam keadaan serupa ini mudahlah difahami bahwa karena peremadjaan alat-alat tidak berlangsung, maka selama ini telah berlangsunglah proses „pemakaian modal" (kapitaal intering). Untuk memelihara keamanan dan mendjaga kontinuitas atau kelangsungan operasi kereta-api maka usaha jang ditempuh adalah penurunan ketjepatan, sehingga dewasa ini aktivitas dan ketjepatan kereta-api berada dibawah standar-nominal seperti terdapat sebelum perang. Dan tidak terelakkan keadaan bahwa service-pun turut merosot.

Djika ditelaah kondisi prasarana djalan dan angkutan darat pada umumnja, maka djelaslah bahwa keadaannja tjukup parah sehingga memerlukan waktu jang tjukup lama untuk memperbaiki dan mengedjar ketertinggalan dengan kebutuhan lalu-lintas.

Terbatasnja dana-pembiajaan mendorong kebutuhan untuk menggunakan setiap rupiah dan devisa setjara optimal. Itu berarti bahwa selalu harus diperhitungkan ratio biaja-manfaat (cost-benefit ratio) dari setiap pembiajaan-usaha, dengan memberi pilihan kepada jang paling menguntungkan.

Kondisi prasarana angkutan-darat, baik angkutan djalan maupun angkutan kereta-api, memungkinkan bahwa antara djalan dan kereta-api terbina pembagian kerdja dan beban dalam menampung kenaikan kebutuhan lalu-lintas.

Kereta-api dewasa ini masih merupakan media angkutan jang ekonomis untuk angkutan djarak djauh dan massal.

Bertolak dari penilaian ini maka kebidjaksanaan dibidang kereta-api adalah untuk mengembalikan kereta-api kepada peranannja jang pokok, jaitu terutama sebagai sarana angkutan barang (freight carrier) untuk djarak-djauh, disamping tugasnja untuk mengangkut penumpang.

Lambat-laun haruslah dihilangkan kesan seolah-olah angkutan kereta-api adalah alat sosial. Sedjauh mungkin kereta-api harus memenuhi fungsinja selaku „public utility". Akan tetapi hal ini tidaklah identik dengan memperlakukannja sebagai lembaga sosial jang dibiarkan menderita kerugian terus-menerus.

Dalam melaksanakan kebidjaksanaan ini maka titik-berat usaha diletakkan pada rehabilitasi. Prioritas diberikan pada rehabilitasi daripada djaringan lintas-kereta-api (tracks) dan djembatan-djembatan, perbaikan dan pembaharuan bakal-pelanting (rolling stocks) jang sudah benar-benar usang dan tidak dapat dipertanggung-djawabkan lagi penggunaannja dari segi keamanan dan ekonomi.

Dalam djangka waktu perentjanaan lima tahun mendatang, belum dirasakan perlu untuk mengadakan perluasan dari pada djaring-djaring kereta-api. Bahkan djika dianggap perlu beberapa trajek-trajek jang tidak penting dan tidak menguntungkan akan dapat ditutup, apabila terdapat media angkutan lainnja jang sudah melajaninja.

Bidang perkereta-apian terbuka bagi penanaman modal swasta dalam negeri atau asing dengan modal nasional atas dasar joint cooperation. Prioritas diberikan kepada partisipasi modal swasta dalam negeri atau asing dalam pembangunan trajek-trajek baru atau missing lingks jang ada.

Dengan kebidjaksanaan dan langkah-langkah seperti tersebut diatas harapan pada achir pelaksanaan rentjana pembangunan adalah terselenggaranja lalu-lintas kereta-api jang aman, lantjar/tepat pada waktunja, dan penurunan waktu perdjalanan kereta-api pada umumnja sehingga mentjapai tingkat keadaan tahun 1939 (misalnja, penurunan waktu perdjalanan kereta-api Djakarta — Surabaja dari 14 djam mendjadi 12 djam).

Target dan Lokasi Pembangunan.

1. Target jang hendak ditjapai pada achir 1969 adalah ka km sebesar 75.000 sehari dan jang pada achir tahun 1973

direntjanakan mentjapai sebesar 93.000 sehari. Target tersebut berdasarkan atas estimate kebutuhan akan angkutan pada tahun 1973 sebesar: djumlah penumpang 203 djuta orang, penumpang — km 11 miljar, barang 6,9 djuta ton, dan ton-km 1,6 miljar.

2. Rehabilitasi dan upgrading djalan dan bangunan berkisar pada:

a) Rehabilitasi lintas dan penggantian rel adalah seperti dalam Tabel VIII-B-2.

b) Penggantian bantalan: Penggantian-penggantian rel sebagaimana diuraikan diatas disertai pula penggantian bantalan baru untuk bagian-bagian jang sudah rusak. Setiap tahunnja direntjanakan penggantian 660.000 buah bantalan, sedangkan djumlah bantalan jang harus diganti pada achir tahun 1968 tertjatat ± 7,4 djuta batang.

c) Penggantian/pembaharuan djembatan.
Diutamakan kepada djembatan-djembatan jang sudah tidak dapat dipertanggung-djawabkan lagi dan pelaksanaannja disesuaikan dengan pembangunan lintas kereta-api.

d) Untuk melantjarkan silangan dan susulan, maka beberapa emplacement diperpandjang. Tempat dan fasilitas bongkar muat diberi perhatian chusus untuk mentjegah stagnasi arus barang pada terminal-terminal tertentu.

Rehabilitasi seperti tersebut diatas bertudjuan meningkatkan kemampuan djalan kereta-api (baan) sehingga dapat dilalui dengan ketjepatan 100 km/djam terutama pada lintas Tjikampek — Surabaja, lintas Tjirebon — Madiun, dan lintas Djakarta — Palembang.

3. Sinjal, telekomunikasi dan elektronika.

Pembangunan dibidang persinjalan ditekankan pada penjederhanaan sistim peralatan, penjeragaman tanda-tanda dan penjempurnaan sistim pengamanan. Sedangkan dibidang telekomunikasi ditekankan pada penjempurnaan transmisi dan

penjempurnaan sistim komunikasi baik untuk perdjalanan kereta-api maupun ferry service.

4. Ferry service.

Disamping penjempurnaan ferry service antara Udjung — Kamal, Ketapang — Gilimanuk, maka perhatian chusus diberikan kepada peningkatan ferry service antara Merak — Pandjang dalam rangka meningkatnja lalu-lintas antara Djawa — Sumatera.

5. Penggantian dan pembaharuan bakal pelanting.

Penambahan/pembaharuan bakal pelanting direntjanakan seperti tertera dalam Tabel VIII-B-3.

6. Penjempurnaan Penjediaan dan Logistik.

Untuk mengedjar ketinggalan pengisian penjediaan bahan-bahan baku dan spare-parts lainnja jang sudah lama tidak memperoleh penambahan maka untuk melantjarkan operasionil mutlak perlu adanja penambahan/pengisian baru bahan baku/spare-parts jang diperlukan.

7. Kepegawaian.

Berhubung rentjana mekanisasi/modernisasi jang mempunjai konsekwensi penjediaan tenaga kerdja jang lebih effisien maka diperlukan up-grading jang dilakukan oleh satdika di Bandung, sekolah diesel di Jogja, Training Centre jang didirikan ditiap exploitasi dan prioritas utama diberikan kepada pendidikan pegawai.

Target-target pembangunan dibidang angkutan kereta-api didasarkan atas asumsi bahwa angkutan kereta-api masih merupakan angkutan jang ekonomis dan massal. Sementara pembangunan dalam pelaksanaan, akan dilakukan survey untuk menentukan kemungkinan pengembangan per-kereta-apian lebih landjut. Sekiranja hasil survey tersebut menundjukkan bahwa angkutan kereta-api tidak lagi merupakan angkutan ekonomis dan massal maka akan diadakan perubahan-perubahan didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahap kedua.

TABEL VIII - B - 2.

RENTJANA REHABILITASI DJALAN KERETA API
(1969/70 — 1973/74)
(termasuk penggantian rel dengan R14 baru)

Tahun	Lintas jang akan direhabilitasi		Djarak lintas	Djumlah rel jang akan diganti selama 5 tahun	Pandjang lintas jang akan direhabilitasi dalam tahun jbs.
			(km)	(km)	(km)
1969/70	Tjikampek	— Surabaja/ Pasarturi	642	589	100
			Djumlah		100
1970/71	Tjikampek	— Surabaja/ Pasarturi	642	589	80
	Prupuk	— Jogjakarta	223	183	30
	Kisaran	— Medan	165	165	40
			Djumlah		150
1971/72	Tjikampek	— Surabaja/ Pasarturi	642	589	80
	Prupuk	— Jogjakarta	223	183	30
	Baturadja	— Pandjang	228	228	40
			Djumlah		150
1972/73	Tjikampek	— Surabaja/ Pasarturi	642	589	80
	Prupuk	— Jogjakarta	223	183	30
	Baturadja	— Pandjang	228	228	45
			Djumlah		155
1973/74	Tjikampek	— Surabaja/ Pasarturi	642	589	75
	Prupuk	— Jogjakarta	223	183	35
	Baturadja	— Pandjang	228	228	50
			Djumlah		160
	Djumlah seluruhnja:				715

TABEL VIII - B - 3.

RENTJANA PEMBANGUNAN/PENAMBAHAN BAKAL PELANTING KERETA API, 1969/70 — 1973/74

Tahun	Djumlah jang djalan				Pembaharuan/Penambahan				Keterangan
	Lokomotif		Kereta penumpang	Gerbong	Lokomotif		Kereta penumpang	Gerbong	
	Uap	Diesel			Uap	Diesel			
1968/69	489	268	1.229	9.686	—	—	—	—	1. Termasuk 297 buah lok-uap jang lebih tua dari 40 tahun.
1969/70	489	285	1.229	9.689	—	17	—	—	
1970/71	489	297	1.249	9.786	—	12	20	100	2. 2092 buah kereta penumpang jang lebih tua dari 40 tahun tidak dimasukkan.
1971/72	489	309	1.249	9.886	—	12	—	100	
1972/73	489	321	1.249	9.986	—	12	—	100	3. 15.232 buah gerbong barang jang lebih tua dari 40 tahun tidak dimasukkan.
1973/74	489	333	1.249	10.086	—	12	—	100	
D j u m l a h :					—	65	20	400	

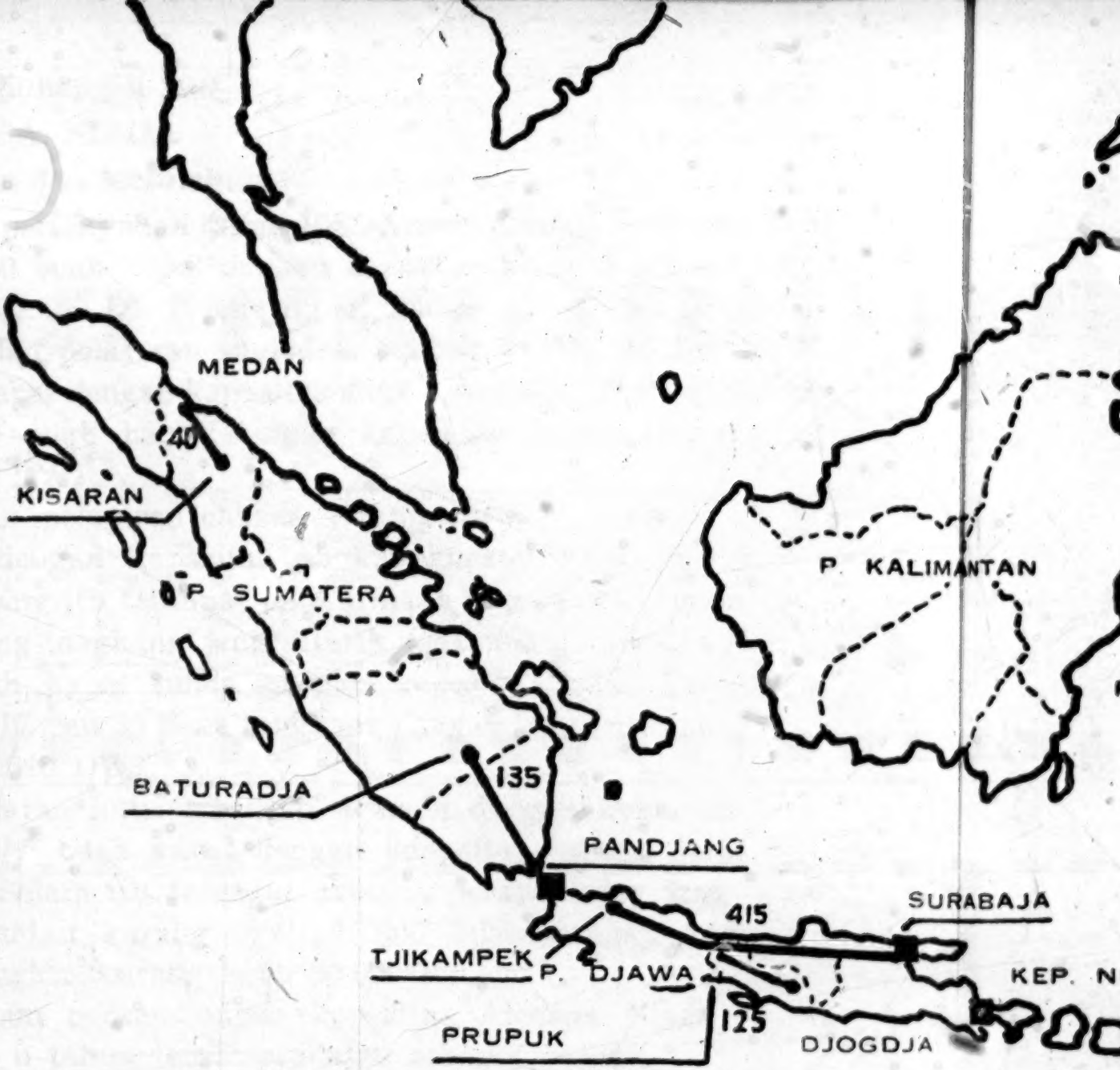

■ PENINGKATAN FERRY-SERVICE

TARGET (DLM KM) REHAB. TERMASUK PENGGANTIAN DGN. REL K.A. P. 14

SUB SEKTOR: PERHUBUNGAN

ANGKUTAN KERETA-API

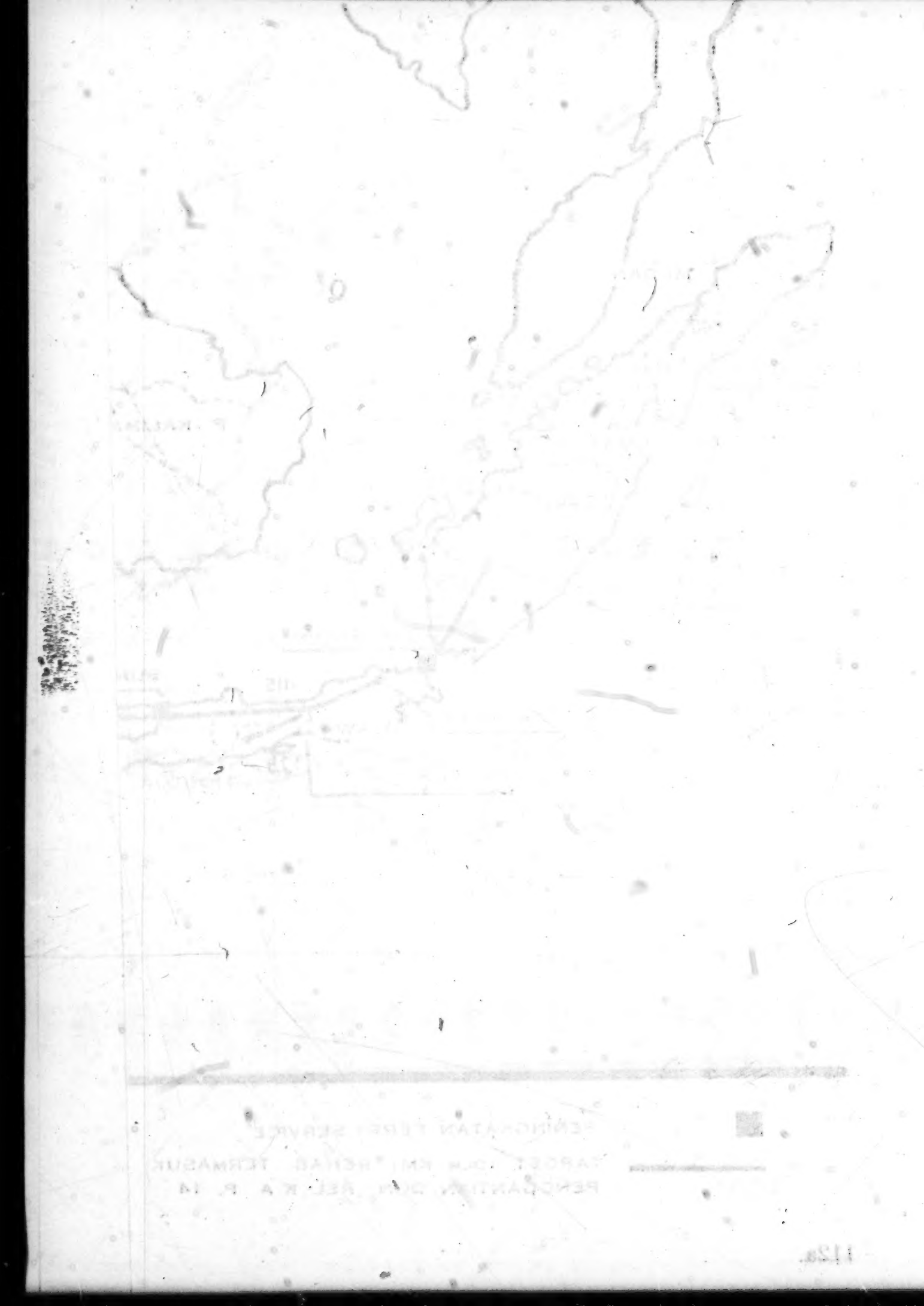

c. Perhubungan laut

ARMADA NIAGA

Keadaan dan Masalah.

Pada pertengahan tahun 1968 Armada Niaga Indonesia terdiri dari 260 buah kapal dengan kapasitas angkut sebesar kurang lebih 660.650 DWT jang dipergunakan untuk pelajaran antar-pulau dan pelajaran samudra, masing-masing terdiri dari 221 buah kapal dengan kapasitas angkut kurang lebih 306.250 DWT dan 39 buah kapal dengan kapasitas angkut kurang lebih 354.400 DWT.

Untuk pelajaran chusus (tramp service) tersedia 23 buah kapal dengan kapasitas angkut kurang lebih 50.000 DWT. Disamping itu terdapat pula armada kapal-kapal tunda dengan tongkang-tongkang jang ditarik (sea trains) dengan kekuatan 10 buah kapal tunda dengan kapasitas tarik kurang lebih 7.180 PK. dan 35 buah tongkang dengan kapasitas muat kurang lebih 8.640 DWT.

Pelajaran lokal memiliki armada dengan kekuatan kurang lebih 355 buah kapal dengan kapasitas kurang lebih 36.900 DWT. Selain itu terdapat armada perahu lajar jang ditaksir berkekuatan kurang lebih 10.000 buah dengan kemampuan daja angkut kurang lebih 30.000 ton.

Adapun perkembangan kapasitas Armada Niaga Nasional selama 5 tahun terachir adalah sebagai berikut :

Tahun	Pelajaran antar Pulau			Pelajaran Samudra		
	Djumlah kapal	Djumlah DWT.	Kenaikan (+) Penurunan (—)	Djumlah kapal	Djumlah DWT.	Kenaikan (+) Penurunan (—)
1964	332	305.785	— 0,7%	29	227.920	+ 114,0%
1965	197	281.205	— 8,0%	49	402.800	+ 76,7%
1966	190	268.405	— 4,5%	45	370.100	+ 8,1%
1967*)	225	303.536	+ 13,0%	35**)	352.300	— 5,7%
1968	221	306.250	+ 0,8%	39	354.300	+ 0,6%

*) Termasuk 5 kapal (± 6.250 DWT) jang berstatus hire-purchase.

**) Termasuk 21 kapal (± 213.200 DWT) jang berstatus hire-purchase.

910088-(8).

Kenaikan tonnage jang pesat pada tahun-tahun 1964 dan 1965 bagi pelajaran samudra disebabkan oleh pembelian kapal-kapal dalam bentuk hire purchase. Sebelumnja, untuk mentjukupi kebutuhan kapal dipakai charter kapal-kapal asing.

Penurunan tonnage armada disebabkan oleh pendjualan kapal-kapal jang telah tua atau tidak memenuhi sjarat lagi.

Armada pelajaran nusantara jang tersedia sebenarnja sudah tjukup untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan angkutan laut pelajaran nusantara ditahun-tahun depan djika diingat bahwa dewasa ini armada pelajaran nusantara hanja mengangkut lebih kurang 4,5 ton/DWT setiap tahun sedangkan diwaktu-waktu jang lampau dapat mentjapai antara 15 — 17 ton/DWT tiap tahun.

Kemunduran ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi prasarana angkutan laut, kekurangan tenaga ahli/skill dan masalah kelebihan tenaga kerdja pada beberapa perusahaan pelajaran.

Kapal-kapal jang memerlukan peredaran (turn-around) kapal jang tjepat tidak dapat memperoleh fasilitas-fasilitas jang diperlukan. Buruknja fasilitas-fasilitas pelabuhan dan terminal termasuk alur-alur pelajaran, keterlambatan dalam melakukan docking/reparasi kapal-kapal, tidak tjukupnja fasilitas dock/reparasi kapal-kapal, kurangnja spare-parts dan bahan baku serta keuangan jang diperlukan, tidak tjukupnja fasilitas-fasilitas keamanan pelajaran seperti perambuan-perambuan dan sebagainja, dan tidak tjukupnja sistim telekomunikasi, merupakan beberapa sebab kemunduran itu.

Akibat kurangnja ruang di-dock dan kurangnja spare-parts serta bahan baku dan kurangnja pembiajaan, lebih kurang 30 persen dari kapal-kapal pelajaran nusantara selalu mengalami kelambatan dalam docking/reparasi.

Dibidang pelajaran samudra dengan kekuatan armada jang ada, bagian jang dapat diangkut oleh kapal-kapal perusahaan-perusahaan pelajaran nasional dari volume impor dan ekspor Indonesia selama lima tahun terachir (1964, 1965, 1966, 1967, 1968) adalah lebih kurang 9,2 persen, 23 persen, 12,7 persen, 10 persen dan 23 persen.

Hal ini berarti bahwa bagian terbesar daripada volume perdagangan luar negeri Indonesia masih diangkut oleh kapal-kapal asing.

Keadaan demikian memberatkan neratja pembajaran luar negeri kita, karena lebih kurang 10 — 20 persen daripada nilai impor dan ekspor kita berupa freight diterima oleh kapal-kapal asing. Hal tersebut terutama disebabkan oleh djumlah tonnage armada nasional kita jang terbatas, persaingan jang keras dengan kapal-kapal asing (terutama trampers) dan belum synchroonnja scheduling kapal dengan load readiness barang-barang dipelabuhan serta turn around kapal-kapal nasional jang belum effisien karena pelbagai faktor, antara lain fasilitas dipelabuhan.

Kebidjaksanaan dan langkah-langkah.

Untuk mengatasi masalah-masalah seperti diuraikan diatas, maka dalam rangka Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969/70 — 1973/74 titik berat kebidjaksanaan diletakkan pada :

(a) peningkatan produktivitas armada niaga nasional;

(b) penghilangan pelbagai hambatan-hambatan strukturil, fungsionil dan operasionil.

Untuk itu maka diperlukan tindakan-tindakan penjehatan terhadap perusahaan-perusahaan pelajaran disamping langkah-langkah rehabilitasi dan penggantian (replacement) armada jang diperlukan.

Kebidjaksanaan pelajaran dalam negeri mentjakupi pokok-pokok bahwa :

(1) Pelajaran dalam negeri dibina menurut pola pembinaan wawasan Nusantara, dengan tjara penjelenggaraan suatu Pelajaran Nusantara jang tetap dan teratur (regular liner service) diseluruh Indonesia.

(2) Penjelenggaraan Pelajaran Nusantara jang tetap dan teratur tersebut ditingkatkan selaras dengan peningkatan pola perdagangan (trade pattern) jang tersebar diseluruh Nusantara dan jang merupakan pusat-pusat akumulasi hasil daerah dan pusat-pusat dealokasi (distribusi) muatan kedaerah-daerah jang bersangkutan.

(3) Pelajaran jang tetap dan teratur itu perlu ditundjang oleh penjelenggaraan pelajaran lokal, pelajaran rakjat, pelajaran perairan, terusan-terusan, sungai dan lain-lain.

(4) Penjelenggaraan pelajaran jang tetap dan teratur ini berbentuk suatu joint operation agar terbina suatu liner service jang mantep dan menjeluruh diseluruh Nusantara dan sekaligus dapat menertibkan setjara effektif ketidak seimbangan antara muatan dan penawaran ruangan kapal, dan menertibkan persaingan jang tidak sehat dari kapal-kapal luar negeri dan kapal-kapal non kommersiil didalam negeri.

(5) Untuk menundjang adanja pusat-pusat perdagangan (trade centres) tersebut sebagai pusat-pusat djaringan trajek-trajek jang tetap dan teratur dari pelajaran maka perlu didorong kegiatan akumulasi dan transhipment, ditindjau kembali zeehaven-region dan kriteria penentuan pelabuhan serta klasifikasinja.

(6) Kegiatan-kegiatan ekspedisi muatan kapal laut dan per-veem-an dipelabuhan-pelabuhan serta kegiatan-kegiatan pelabuhan itu sendiri harus ditingkatkan sebagai unsur-unsur penundjang jang utama. Kebidjaksanaan Pelajaran Luar Negeri dilandaskan pada "liner system" untuk pelajaran samudra djauh dan dekat dan dimaksudkan agar dapat dibina sehingga dalam rangka usaha Pemerintah meningkatkan ekspor dan

kegiatan ekonomi pada umumnja diperoleh saham (share) jang wadjar oleh pelajaran Indonesia dalam hal lalu-lintas muatan internasional ke dan dari Tanah Air, dengan tetap mengindahkan kemampuan-kemampuan jang riil serta effisiensi perusahaan dan service.

Dengan kebidjaksanaan dan langkah-langkah seperti tersebut diatas diharapkan pada achir rentjana pembangunan angkutan laut dalam negeri dapat ditingkatkan efektivitas dan effisiensinja sehingga kapal-kapal dapat mengundjungi pelabuhan dengan lebih teratur sedangkan angkutan laut keluar negeri berangsur-angsur dapat pula berkembang.

Target dan Lokasi Pembangunan.

(a) Armada pelajaran nusantara.

Dibidang armada pelajaran nusantara selama 5 tahun jang akan datang titik berat diletakkan pada usaha peningkatan kemampuan armada jang ada untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan angkutan. Untuk maksud tersebut perlu diadakan rehabilitasi armada seperti tertera dalam Tabel VIII-C-1.

Volume perdagangan antar-pulau termasuk ke/dari Singapore pada waktu ini sebesar kurang lebih 1,6 djuta ton dan diperkirakan karena pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun pada achir tahun 1973/74 akan ditjapai kurang lebih 2 djuta ton, djika diambil asumsi kenaikan volume lalulintas perdagangan rata-rata 5 persen setiap tahun.

Apabila target effisiensi ekonomis armada Nusantara ditingkatkan dari 4½ ton/DWT tahun mendjadi lebih kurang 8 ton/DWT tahun, maka diperlukan minimal 250.000 DWT ruangan armada. Djika volume perdagangan meningkat lebih tjepat dari dugaan semula dan tingkat effisiensi adalah lebih rendah dari dugaan semula maka sudahlah tjukup apabila armada Nusantara terdiri dari lebih kurang 266.450 DWT, atau 194 buah kapal. Dengan demikian perlu dikurangi djumlah kapal jang sekarang dengan 27 buah kapal (39.800 DWT).

Pada tahun-tahun pertama daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun perlu dilakukan rehabilitasi terhadap sedjumlah besar kapal, sebagai pra-kondisi bagi penjelenggaraan regular liner service. Tahun-tahun berikutnja lebih banjak diperlukan normal maintenance dan rehabilitasi kapal-kapal. Pelaksanaan pembangunannja diserahkan kepada perusahaan-perusahaan pelajaran Nasional.

(b) Armada pelajaran Samudra.

Dibidang pelajaran samudra maka pembangunan diarahkan pada peningkatan kemampuan kapal-kapal armada samudra nasional untuk dapat mengangkut bagian jang wadjar (fair-share) daripada volume perdagangan luar negeri Indonesia.

Untuk maksud tersebut kemampuan operasionilnja perlu ditingkatkan. Banjak kapal-kapal nasional telah tua (over-aged). Hal ini mengurangi kepertjajaan shippers serta menaikkan insurance claim dan sebagainja maka perlu diadakan replacement armada seperti tertera dalam Tabel VIII-C-1.

Disamping itu dapat diusahakan agar kapal-kapal jang berada dalam hire-purchase dapat mendjadi milik dan berbendera Indonesia.

Volume perdagangan luar negeri Indonesia diluar minjak bumi pada waktu ini kurang lebih 4,2 djuta ton/m^3 dan diperkirakan pada achir Rentjana Pembangunan Lima Tahun dapat meningkat mendjadi kurang lebih 5,2 djuta ton/m^3. Rata-rata komposisi daripada perdagangan luar negeri Indonesia diluar minjak bumi terdiri dari 45 persen general cargo dan 55 persen barang-barang bulk.

Dengan demikian pembangunan dibidang armada pelajaran samudra nasional harus diarahkan untuk dapat mengangkut bagian jang wadjar daripada volume tersebut. Sasaran jang hendak ditjapai setjara bertahap adalah cargo share sebesar 40 persen daripada volume perdagangan luar negeri Indonesia.

Kemampuan pembiajaannja bagi replacement ataupun perluasan armada diserahkan kepada perusahaan-perusahaan pela-

jaran Nasional dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan kerdja-sama dengan modal asing.

(c) Armada pelajaran lokal.

Pembangunan dibidang armada pelajaran lokal ditekankan kepada langkah-langkah rehabilitasi dan replacement jang ada dengan mengutamakan pengerahan sumber jang terdapat dalam masjarakat dan daerah.

(d) Armada Chusus dan Armada Tunda.

Pembangunan dibidang armada chusus untuk memenuhi kebutuhan angkutan barang-barang chusus jang memerlukan kapal-kapal jang bersifat chusus pula terutama untuk memenuhi kebutuhan industri diserahkan kepada swasta dan modal swasta baik dalam maupun luar negeri.

Dibidang armada tunda ingin diusahakan rehabilitasi kapal-kapal tunda dan tongkang, antara lain sedjumlah 82 kapal tunda, 66 buah steel-lighters dan 202 tongkang kaju.

(e) Armada perahu lajar.

Dibidang armada perahu lajar usaha dititik beratkan pada peningkatan penelitian tentang modernisasi perahu-perahu lajar tersebut serta peningkatan segi-segi keselamatan berlajar. Pelaksanaan modernisasi tersebut diserahkan sepenuhnja kepada swasta.

PELABUHAN DAN PRASARANA LAINNJA.

Keadaan dan Masalah.

Di Indonesia ada 61 pelabuhan laut dan 17 pelabuhan pantai jang terbuka bagi perdagangan luar negeri setjara terbatas, dan ratusan buah pelabuhan jang hanja dipergunakan untuk perdagangan dalam negeri sadja. Keadaan umum daripada pelabuhan-pelabuhan dan fasilitas-fasilitasnja tidak menggembirakan. Kebanjakan dari fasilitas-fasilitas pelabuhan tidak dapat memenuhi tugasnja sebagaimana mestinja berhubung dengan kondisi:

TABEL VIII - C - 1

RENTJANA REHABILITASI/REPLACEMENT
ARMADA NIAGA ANGKUTAN LAUT
1969/70 — 1973/74

Tahun	Banjaknja/tonnage kapal													
	Antar Pulau						Samudra						Djumlah	
	Djumlah	DWT	Rehabilitasi		Replacement		Djumlah	DWT	Rehabilitasi		Replacement		Unit	DWT
			Unit	DWT	Unit	DWT			Unit	DWT	Unit	DWT		
1968/69	221 [1]	306.250	—	—	—	—	39 [2]	354.400	—	—	—	—	260	650.600
1969/70	194 [3]	266.450	90	130.000	—	—	39	354.400	—	—	2	18.800	233	620.850
1970/71	194	266.450	10	10.000	10	10.000	39	354.400	—	—	2	18.800	233	620.850
1971/72	194	266.450	10	10.000	11	13.000	39	354.400	—	—	3	27.600	233	620.850
1972/73	194	266.450	10	10.000	11	13.000	39	354.400	—	—	3	27.600	233	620.850
1973/74	194	266.450	11	12.000	11	12.000	39	354.400	—	—	4	36.400	233	620.850
Djumlah :			131	172.000	43	48.000			—	—	14	129.200		

Note : [1]) Tidak termasuk kapal-kapal berukuran dibawah 500 BRT.
[2]) Termasuk kapal-kapal dalam status hire-purchase sebanjak 21 kapal (± 213. 200 DWT).
[3]) 27 buah kapal didjual.

(a) tambatan/dermaga, dimana kurang lebih 75 persen dari tambatan-tambatan kaju berada dalam keadaan buruk;

(b) gudang, kurang lebih 30 persen dari padanja berada dalam keadaan buruk;

(c) fasilitas air, hanja kurang lebih 30 persen dari kebutuhan air kapal dapat disediakan;

(d) fasilitas listrik, hanja kurang lebih 40 persen dari kebutuhan listrik dapat disediakan;

(e) kapal tunda pelabuhan, kurang lebih 30 persen berada dalam keadaan buruk dan

(f) alat-alat bongkar muat, kurang lebih 50 persen berada dalam keadaan buruk/tua.

Demikian pula pengerukan pelabuhan-pelabuhan sangat terlantar akibat kurangnja kapal-kapal keruk, sedangkan jang ada tidak dapat bekerdja dengan kapasitas jang semestinja. Dari 24 buah kapal keruk jang ada 15 persen tak dapat dipergunakan lagi, 25 persen memerlukan perbaikan berat (ada jang umurnja sudah melebihi 40 tahun) dan 60 persen selalu mengalami kelambatan docking/reparasi karena kurangnja spare-parts, bahan baku, djuga ruangan dock. Sedangkan dari alat-alat bantunja kurang lebih 50 persen adalah tua.

Akibatnja adalah bahwa keperluan pengerukan alur-alur pelajaran dan kolam-kolam pelabuhan jang diperkirakan sebanjak 16 djuta meter kubik tiap tahun, hanja 11 djuta meter kubik sadja jang dapat dikeruk. Tiap tahun tertinggal sisa 5 djuta meter kubik jang tidak dapat dikeruk. Hal ini menggganggu kelantjaran pelajaran.

Keadaan fasilitas keamanan Pelajaran djuga mengalami kemerosotan. Dari berbagai matjam djenis alat keamanan baru 30 persen jang dapat dilengkapi dengan sumber sinar. Dari keseluruhan peralatan dan perlengkapan lebih kurang 45 persen sadja jang berdjalan dengan normal.

Peralatan dan perlengkapan djaring-djaring telekomunikasi pelajaran memiliki 35 buah setasiun radio pantai dan 46 buah

setasiun radio fixed diseluruh kepulauan Indonesia. Dari djumlah tersebut kurang lebih 60 persen kurang dapat dipertanggung-djawabkan dan telah berusia lebih dari 15 tahun.

Keadaan fasilitas dock dan reparasi kapal-kapal tidak berbeda dengan keadaan fasilitas-fasilitas lainnja. Dock jang mampu melajani Armada Nasional adalah dock Surabaja dan Tandjung Priuk di Djakarta. Karena kekurangan spare-parts dan bahan baku maka perbaikan tahunan dari pada kapal-kapal mendjadi terlantar, sedangkan perbaikan kapal-kapal diluar negeri menghadapi kesulitan devisa.

Buruknja keadaan pelabuhan dan prasarana lainnja menjebabkan lambatnja peredaran (turn around) kapal dan rendahnja produktivitas armada kapal-kapal.

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah.

Pelabuhan dan prasarana lainnja merupakan infrastruktur bagi angkutan laut, maka perbaikannja merupakan prasarat terselenggaranja angkutan laut jang effektif dan effisien. Oleh karena itu usaha diarahkan kepada rehabilitasi dan penambahan ruang dock, rehabilitasi pelabuhan beserta fasilitas-fasilitasnja, rehabilitasi alat-alat keruk serta alat-alat bantunja, perbaikan fasilitas keamanan pelajaran seperti rambu-rambu (navigational aids) termasuk telekomunikasi pelajaran serta penggantian peralatan jang sudah tua.

Dengan adanja backlog dalam pengerukan maka pekerdjaan pengerukan perlu dilakukan setjepat-tjepatnja terutama untuk pelabuhan-pelabuhan Surabaja, Bandjarmasin, Belawan, Palembang, Pontianak dan Djambi. Demikian pula pengangkatan kerangka kapal-kapal perlu dikerdjakan selekasnja.

Mengenai pelabuhan Tandjung Priuk akan ditelaah kemungkinan diperluasnja dengan suatu „wilajah industri" jang dilengkapi dengan suatu pelabuhan container. Langkah-langkah berikutnja akan diserasikan dengan hasil survey dan penelaahan feasibility serta dana pembiajaan jang tersedia.

Guna meningkatkan effisiensi dari tugas pelabuhan, maka langkah-langkah kebidjaksanaan diambil untuk menjehatkan port administration dan port handling operations dengan pokok-pokok sebagai berikut:

(a) Semua pelabuhan dan daerah kepentingannja diseluruh Nusantara jang bukan merupakan pelabuhan chusus ABRI, dibina oleh dan dalam ruang lingkup wewenang suatu instansi sadja sebagai realisasi dari pada prinsip management tunggal (single management).

(b) Pelabuhan sebagai terminal harus merupakan satu unit ekonomi dimana terdjamin kelantjaran kegiatan-kegiatan, koordinasi, kebidjaksanaan-kebidjaksanaan serta pelaksanaannja dengan effisiensi semaksimal mungkin. Untuk mentjapai ini diperlukan perbaikan-perbaikan institusionil, organisatoris strukturil dan operasionil jang berpedoman pada landasan-landasan sebagai berikut:

(i) Pelabuhan merupakan lingkungan kerdja jang penjelenggaraannja dan penguasaannja dilaksanakan oleh suatu Administrator Pelabuhan, jang dalam pelaksanaan tugasnja didampingi oleh sebuah Badan Musjawarah Pelabuhan.

(ii) Tugas Administrator Pelabuhan adalah bidang „port administration dan port handling" dan meliputi tugas tanggung djawab Pengawasan dan Koordinasi demi kelantjaran flow of goods and documents dan muatan-muatan lainnja serta kelantjaran penjediaan dan pelaksanaan fasilitas-fasilitas pelabuhan.

(iii) Administrator Pelabuhan melaksanakan tugasnja berdasarkan dan berpedoman pada kebidjaksanaan (policy) jang ditentukan oleh Pemerintah dan petundjuk-petundjuk dari Badan Musjawarah Pelabuhan (B.M.P.).

(iv) Badan Musjawarah Pelabuhan beranggotakan semua instansi Pemerintah tingkat Departemen jang berfungsi di Pelabuhan serta organisasi-organisasi swasta jang bersangkutan.

(v) Administrator Pelabuhan mempunjai tugas tanggung-djawab pengawasan dan koordinasi semua instansi-instansi

Pemerintah serta unit-unit Swasta dan Negara jang aktif melaksanakan tugas didaerah pelabuhan.

(c) Djika dianggap perlu dan djika ada pelabuhan-pelabuhan jang telah memenuhi sjarat-sjarat berdikari dalam investasi dan operasi, maka dapat dibentuk suatu pelabuhan otonom.

Dengan kebidjaksanaan dan langkah-langkah seperti tersebut diatas diharapkan pada achir rentjana pembangunan:

(1) perbaikan waktu peredaran (turn around) kapal;
(2) penjelenggaraan angkutan laut jang aman;
(3) lenjapnja bahaja kongesti dipelabuhan;
(4) pengurangan idle port time.

Target dan Lokasi Pembanguman

Fasilitas-fasilitas Pelabuhan.

Pengerukan backlog lumpur ingin diselesaikan dalam masa 5 tahun jang akan datang. Kerangka-kerangka kapal jang meliputi 281 buah dengan taksiran tonnage sebesar 247.578 (G/T) direntjanakan pengangkatannja sebesar 173.305 G/T. Mengenai rentjana dibidang fasilitas-fasilitas pelabuhan akan meliputi: rehabilitasi kade sepandjang 16.833 m dan penambahan sepandjang 840 m; rehabilitasi gudang seluas 425.990 m^2 dan penambahan seluas 21.300 m^2; rehabilitasi air sebesar 35.830 ton/hari dan penambahan sebesar 53.660 ton/hari; rehabilitasi listrik sebesar 2.560 KVA dan penambahan sebesar 5.250 KVA; dan rehabilitasi alat bongkar muat sebesar 750 ton dan penambahan sebesar 430 ton dengan matjam-matjam bentuk sesuai dengan penggunaan disetiap tempat.

Pembangunan kapal-kapal/alat-alat keruk akan meliputi rehabilitasi, replacement, dan penambahan berbagai-bagai djenis dan ukuran kapal-kapal keruk, seperti kapal keruk timba, kapal keruk tjangkram, kapal penghisap lumpur beserta peralatan-peralatan lainnja seperti bak lumpur, barges, tugboat dan sebagainja. Penambahan armada keruk akan meliputi penambahan 2 kapal keruk timba, 2 buah kapal keruk tjang-

kram, 28 buah bak lumpur, 4 buah rumah apung, 4 buah bak minjak, 22 buah kapal gandeng, 7.000 meter pipa ponton laut, 10.000 meter pipa ponton darat, 10 buah bus, 2 buah steiger dan alat-alat bengkel.

Rehabilitasi/penambahan kade, gudang, air, listrik dan alat bongkar muat, pengerukan backlog lumpur, pengangkatan kerangka-kerangka kapal, dan rehabilitasi, replacement serta penambahan kapal-kapal/alat-alat keruk direntjanakan pelaksanaannja dalam tahun-tahun dan tempat seperti tertera dalam tabel VIII-C-2.

Sebelum rentjana ini dikerdjakan, terlebih dahulu akan diadakan penelaahan feasibility agar terdjaminlah effisiensi dari pada penggunaan dana pembiajaan dan tenaga.

Fasilitas Keamanan Pelajaran.

Rentjana 5 tahun dibidang Keamanan Pelajaran meliputi rehabilitasi, penggantian dan penambahan fasilitas-fasilitas telekomunikasi pelajaran, fasilitas perambuan dan penerangan pantai, serta fasilitas pengawasan keselamatan pelajaran. Dalam hubungan ini diusahakan untuk dibangun 6 unit stasiun radio pantai, 20 unit stasiun radio fixed, serta penambahan perlengkapan-perlengkapan lainnja.

Dibidang perambuan dan penerangan pantai antara lain akan dibangun fasilitas darat, rehabilitasi dan penambahan kapal-kapal bagi perambuan dan penerangan pantai, pengadaan peralatan dan stores, pembangunan sistim lampu propane, elektrifikasi, pembangunan menara suar dan perambuan suar.

Dibidang pengawasan keselamatan pelajaran akan diusahakan penambahan 15 orang tenaga ahli ukur kapal, 50 orang tenaga pengawas keselamatan kapal, 10 orang tenaga kedjuruan pendaftar kapal, 60 orang tenaga pandu laut dan bandar, dan 26 kapal-kapal motor untuk pandu. Sebelum rentjana ini dilaksanakan terlebih dahulu akan dilakukan penelaahan-feasibility supaja terdjamin effisiency daripada penggunaan dana dan tenaga.

Fasilitas Dock dan Reparasi Kapal-kapal.

Selain rehabilitasi fasilitas dock dan reparasi kapal-kapal serta pengadaan spare-parts dan bahan baku, akan diusahakan pula penambahan ruang dock dengan mengadakan pembangunan unit-unit untuk fasilitas reparasi kapal-kapal di Belawan dengan kapasitas 5.000 TLC. (total lifting capacity), dan di Pontianak dengan kapasitas 800 TLC. Perintjian rentjana ini tertera dalam tabel VIII-C-2.

Dalam rangka peningkatan kelantjaran ekonomi, direntjanakan untuk mendirikan Bonded Warehouse. Dengan adanja Bonded Warehouse ini maka kehilangan waktu jang disebabkan oleh prosedur impor dapat dikurangi, sedangkan modal jang diperlukan untuk keperluan stock-piling bahan-bahan/spare-parts mendjadi relatip ketjil.

Prasarana Pelengkap.

Jang termasuk dalam bidang prasarana pelengkap adalah survey, research dan perentjanaan untuk evaluasi penjempurnaan kebidjaksanaan dibidang perhubungan laut, kerdja sama tehnik luar negeri, pendidikan dan rehabilitasi aparatur Pemerintah. Pembangunan bidang ini tidak dapat dipisah-pisahkan dari pembangunan bidang-bidang lainnja karena tanpa hal-hal diatas pembangunan bidang-bidang lainnja akan tidak bisa terlaksana dengan baik. Bidang survey, research dan perentjanaan untuk evaluasi penjempurnaan kebidjaksanaan perhubungan laut meliputi usaha melakukan monitoring pengumpulan, kompilasi, dan pengolahan serta analisa data dari seluruh aktivitas perhubungan laut guna landasan-landasan perbaikan selandjutnja. Survey dan research jang teratur dan kontinu akan memungkinkan tersusunnja perumusan kebidjaksanaan jang tepat, misalnja dalam pengarahan, bimbingan dan perentjanaan-perentjanaan operasionil, seperti standard efisiensi, standard produktivitas, standard efektivitas, dan standard operasionil lainnja jang sangat penting artinja baik bagi operasi-operasi perhubungan laut maupun bagi ilmu pengetahuan pada umumnja.

Bidang kerdjasama tehnik luar negeri berkisar pada usaha melakukan kerdjasama tehnik luar negeri sedemikian rupa sehingga bantuan-bantuan tehnik luar negeri dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin, dan diarahkan kepada keperluan-keperluan pembangunan jang bersifat fisik maupun nonfisik.

Pembangunan dibidang pendidikan akan berkisar pada penambahan fasilitas-fasilitas perlengkapan berupa buku-buku peladjaran, perpustakaan, alat-alat peladjaran, perlengkapan laboratorium, bengkel-bengkel, gedung-gedung dan fasilitas-fasilitas lainnja serta tenaga-tenaga pengadjar bagi: Akademi Ilmu Peladjaran di Djakarta; Kursus Ulangan dan Tambahan Ilmu Pelajaran di Djakarta; Kursus untuk upgrading di Djakarta; Sekolah Menengah Pelajaran di Semarang dan Makassar; Sekolah Pelajaran Dasar di Surabaja, Makassar dan Belawan; dan Penjelenggaraan udjian-udjian Negara bagi sekolah-sekolah swasta maritim.

TABEL
PEMBANGUNAN PELABUHAN
1969/70 —

Jang akan dikerdjakan	Pelabuhan	
	1969/70	1970/71
(1)	(2)	(3)
1. Rehabilitasi/Penambahan Fasilitas Terminal. (Kade/gudang/air/listrik/alat-alat bongkar-muat/penahan gelombang/Pelabuhan Coaster/Djalan², pagar² di Pelabuhan). x)	Meliputi berbagai tempat, diantaranja diluar Djawa: Belawan, Makassar, Pandjang, Ambon, Benoa, Bitung, Donggala, Ternate, Teluk Bajur, Tenau, Samarinda, Bandjarmasin, Pontianak, Meulaboh, Lho Seumawe, Ulee-Lheue, Dumai, Pakan Baru, Kendari, Sampit, Muara Sabah, Sibolga, Bengkulu dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja diluar Djawa: Belawan, Palembang, Pandjang, Tenau, Ambon, Ternate, Selat Pandjang, Rengat, Bima, Tembilahan, Bengkulu, Makassar, Pakan Baru, Muara Sabah, Sibolga, Bandjarmasin, Bitung dll.
2. Pengangkatan Kerangka Kapal.	Daerah pelabuhan : Djakarta, Surabaja, Tjilatjap, Palembang, dan Bangka Strait.	Daerah pelabuhan : Djakarta, Surabaja, Belawan.
3. Pengerukan Backlog Lumpur.	Seluruh Indonesia, diantaranja diluar P. Djawa : Sungai Musi, Djambi, Bandjarmasin, Belawan.	— idem 1969/70.
4. Rehabilitasi/Penambahan Dock dan Repair Unit.	Dock : Djakarta, Surabaja.	Palembang, Semarang, Djakarta.
5. Rehabilitasi/replacement/penambahan telekomunikasi Pelajaran:		
a) Station Pemantjar dan Penerima.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja diluar Djawa: Ambon, Makassar, Palembang, Pontianak, Belawan, Irian Barat, Sampit dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja diluar Djawa: Dumai, Bitung, dll.

x) Tidak setiap pelabuhan memerlukan rehabilitasi/penambahan fasilitas setjara keseluruhan; misalnja suatu pelabuhan hanja dibangun Kade sadja, atau Kade dan Fasilitas air, dst.

/tempat pelabuhan.

1971/72	1972/73	1973/74
(4)	(5)	(6)
Meliputi berbagai tempat, diantaranja diluar pulau Djawa: Menado, Bandjarmasin, Makassar, Djambi, Balikpapan, Tenak Bajur, Dumai, Ambon Pakan Baru, Sambit, Bengkalis, Bitung, Lembar, Belawan, Bengkulu, Muara Sabah, Sibolga, Pandjang, Banjarmasin dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja diluar pulau Djawa: Ambon, Dumai, Kupang, Sibolga, Belawan, Menado, Ulee Lheue, Tembilahan, Pontianak, Gorontalo, Djambi, Bengkulu, Irian Barat, Palembang, Makassar, Bandjarmasin, Boa, Pontianak, Pandjang dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja diluar pulau Djawa: Donggala, Benoa, Belawan, Makassar, Palembang, Pandjang, Balikpapan, Lembar, Bima, Rengat, Dumai, Irian Barat, Pontianak, Sabang, Bitung, Boa, dll.
Daerah pelabuhan : Djakarta, Surabaja dan Lampung - Bay.	Daerah pelabuhan : Djakarta, Surabaja dan Balikpapan.	Daerah pelabuhan : Djakarta, Surabaja dan Balikpapan.
— idem 1969/70.	— idem 1969/70.	— idem 1969/70.
Tjirebon, Padang.	Belawan, Pontianak.	Belawan, Pontianak.
Meliputi berbagai tempat diantaranja diluar Djawa: Sabang, Banjarmasin, dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja diluar Djawa: Pakan Baru, Kupang, Tual, dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja diluar Djawa : Waingapu, Ulee Lheue, Muara Sabah, dll.

(1)	(2)	(3)
b) Asrama Markonis.	Diantaranja diluar pulau Djawa : Ambon, Makassar, Palembang, Pontianak, Belawan, Irian Barat, Sampit dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja diluar Djawa: Dumai, Bitung dll.
6. Rehabilitasi/replacement/penambahan Perambuan dan Penerangan Pantai (Mertju Suar, rambu², pelampung, bengkel P3), gudang P3, Dermaga P3, Asrama Pendjaga, lampu menara, Asrama Pelaut, Stasiun Pandu.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja: Menado, Talise, P. Serutu, Langkuas, Gorontalo, Palembang, Bandjarmasin, Nipah, Rob Roy Bank, Dumai, Tg. Pinang, Samarinda, Ambon, Makassar, Pontianak, Ampenan, Irian Barat, dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja: P.P. Klah, Tempurung, Mandalika, Tjimiring, Sabang, Makassar, Samarinda, Dumai, Tg. Pinang, Kupang, Menado, Belawan, Padang, Bandjarmasin, dll.
7. Bangunan Unit Kerdja : Bangunan Kantor, Bangunan Kesehatan Pelaut, Rumah Kedapel/karyawan, dan Unit transport.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja: Gunung Sitoli, Kuala Tungkal, Pontianak, Singkawang, Tjirebon, Ambon, Djakarta, Surabaja, Semarang, Samarinda, Bandjarmasin, Irian Barat, Makassar, Kupang dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja: Waingapu, Bagan Siapi-api, Kupang, Endeh, Djakarta, Surabaja, Semarang, Bandjarmasin, Sabang, Palembang, Ambon, Makassar, dll.

(4)	(5)	(6)
Meliputi berbagai tempat, diantaranja: Sabang, dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja: Sabang, Bandjarmasin, dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja: Waingapu, Ulee Lheue, Muara Sabah, dll.
Meliputi berbagai tempat, diantaranja: Ambon, Suwangei, Suba-Suba, Tg. Djang, Djambi, Pandjang, Samarinda, Dumai, Tg. Pinang, Kupang, Bandjarmasin, Rengat, Tembilahan, dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja: P. Matang, P. Kares, Tg. Kalinget, Palembang, Muntok, Kupang, Pangkal Balam, P. Klah dan P. Beras, Palembang, Dumai, Tg. Pinang, Samarinda, Tual, Ulee Lheue, Gilimanuk dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja: Diamont Point, P.P. Sapudi, P.P. Cape William, Kepulauan Riau, Irian Barat, Samarinda, Sorong, Dumai, Palembang Tg. Pinang, P. Klah dan P. Beras, Lho Seumawe, Bengkulu, P. Balam, Muntok, Bangsal dll.
Meliputi berbagai tempat, diantaranja: Ampenan, Dumai, Mentok, Tembilahan, Balikpapan, Samarinda, Kupang, Sabang, Donggala, Irian Barat, Ambon, Makassar, dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja: Bengkalis, Ambon, Ternate, Rengat, Benoa, Sabang, Balikpapan, Kupang, Donggala, Bengkulu, Pangkal Balam, Djambi dll.	Meliputi berbagai tempat, diantaranja: Bengkalis, Sumbawa, Oa Palangka Raya, Lembar, Pangkal Balam, Tapak Tuan, Sabang, Kupang, Donggala, Langsa, Dumai, Belawan, Ulee Lheue, dll.

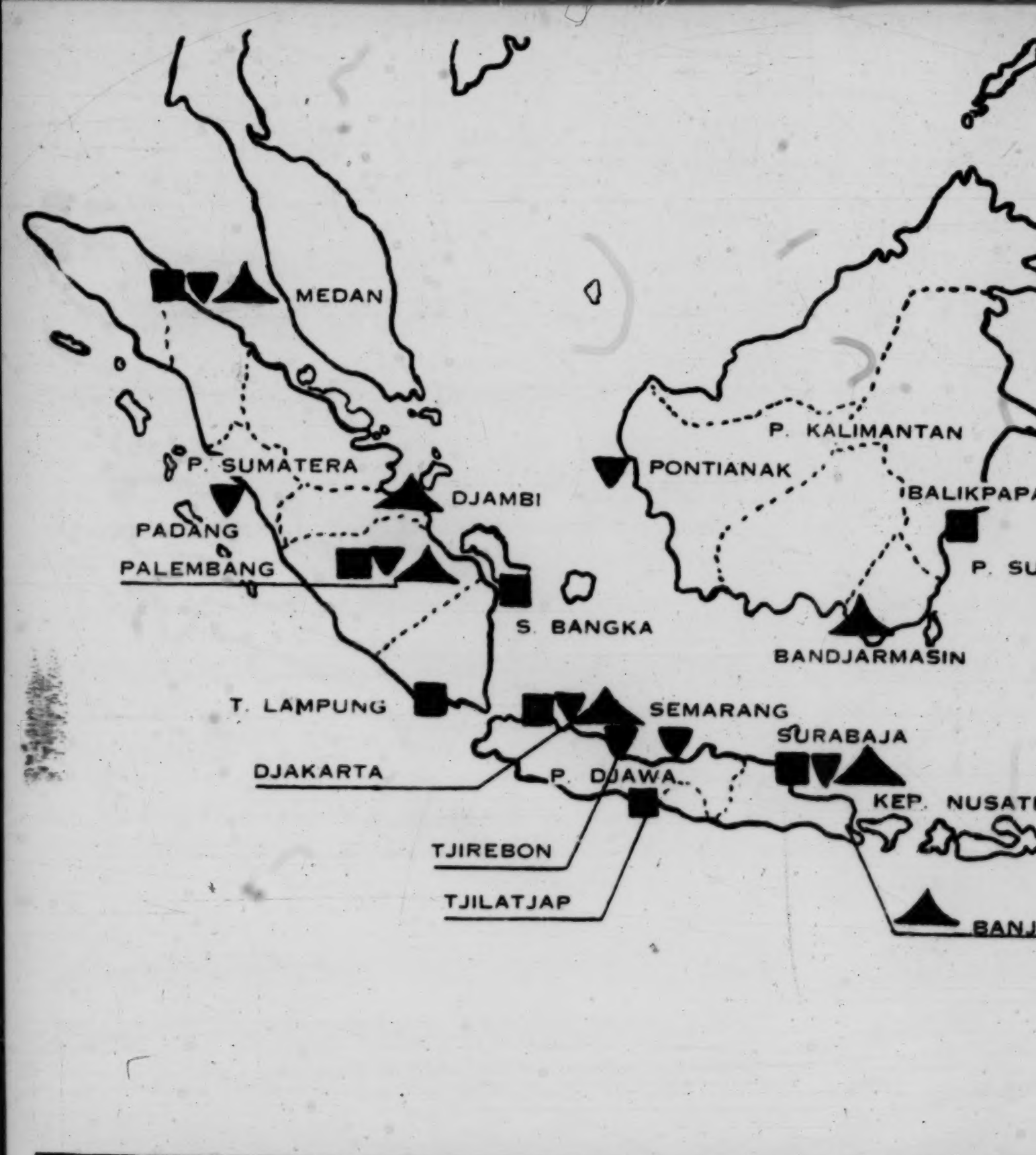
MEDAN
P. SUMATERA
DJAMBI
PADANG
PALEMBANG
S. BANGKA
T. LAMPUNG
DJAKARTA
SEMARANG
SURABAJA
P. DJAWA
TJIREBON
TJILATJAP
P. KALIMANTAN
PONTIANAK
BANDJARMASIN
PENGERUKAN BACKLOG LUMPUR
REHAB./PENAMBAHAN FASILITAS
PENGANGKATAN KERANGKA KAPAL

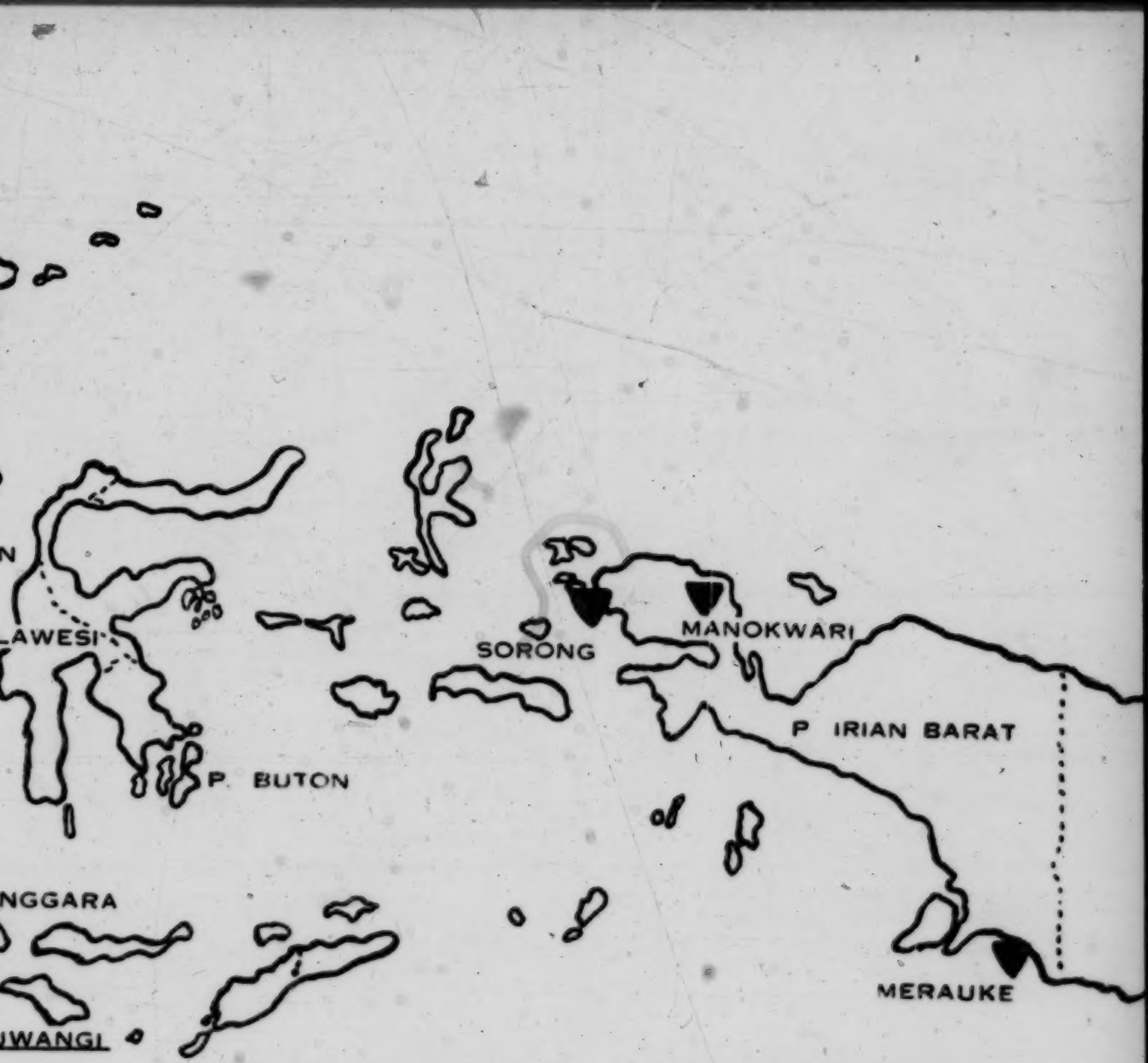

SUB SEKTOR: PERHUBUNGAN

PERHUBUNGAN LAUT

REHAB / REPLACEMENT PENAMBAHAN
TELEKOMUNIKASI PELAJARAN

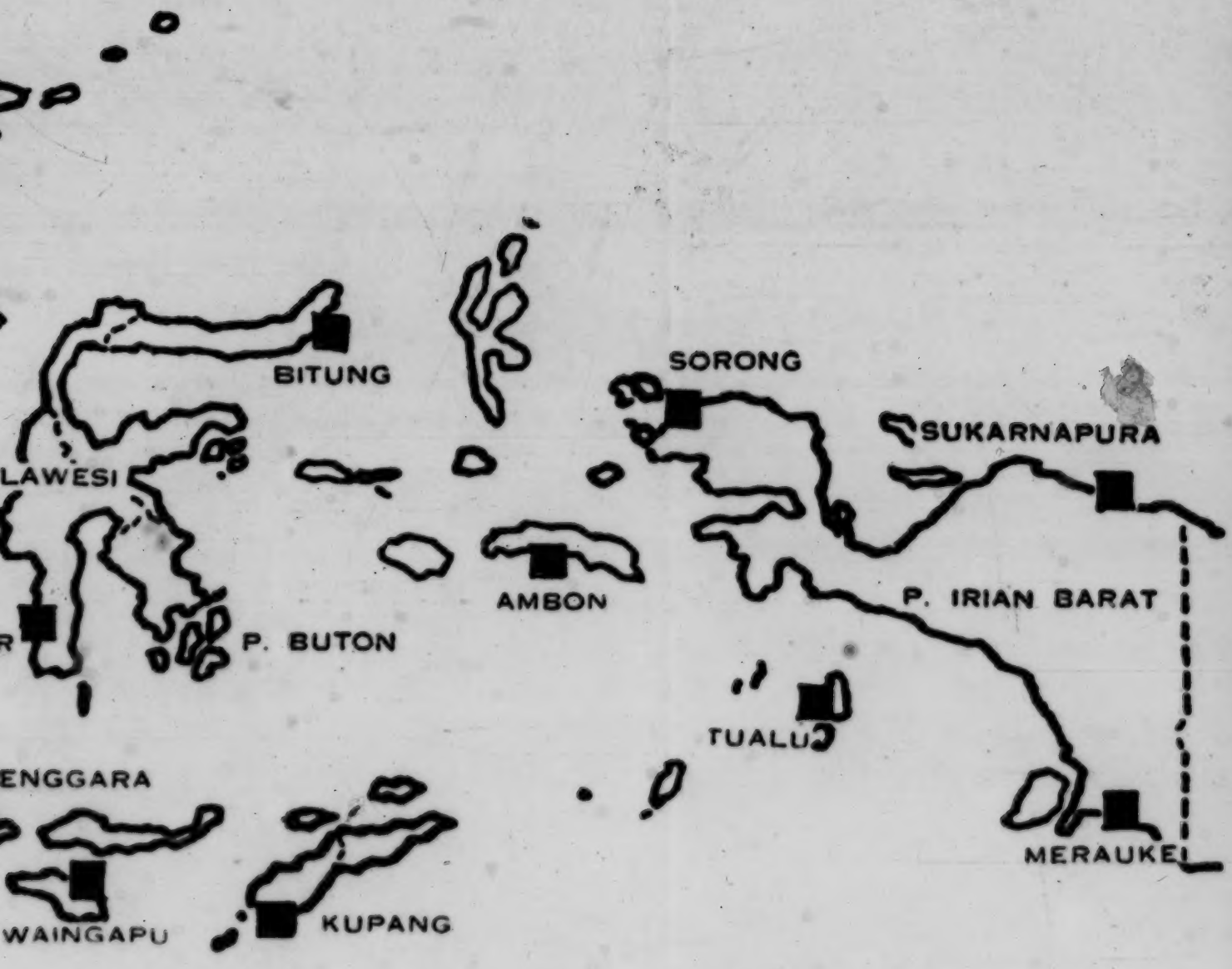

SUB SEKTOR: PERHUBUNGAN

PERHUBUNGAN LAUT

▲ REHAB./PENAMBAHAN FASILITAS TERMINAL. KADE. GUDANG. FASILITAS LISTRIK. AIR. ALAT BONGKAR-MUAT

SUB SEKTOR: PERHUBUNGAN

PERHUBUNGAN LAUT

d. Perhubungan Udara.

FASILITAS LAPANGAN TERBANG DAN FASILITAS LAINNJA.

Keadaan dan Masalah.

Landasan

Hampir semua fasilitas landasan, sedjak pada saat dibangunnja sampai sekarang, hanjalah mengalami sedikit perobahan. Perobahan ini hanjalah terbatas pada perpandjangan landasan sadja, sedangkan peningkatan daja dukungnja (bearing capacity) pada umumnja tidak ada.

Dengan kemadjuan dan perkembangan angkutan udara, dimana dipergunakan pesawat-pesawat terbang jang bertambah besar dan bertambah tjepat, maka keadaan dan kekuatan landasan tidak lagi seimbang dengan kemadjuan dan perkembangan tersebut.

Lapangan terbang jang dipergunakan untuk angkutan udara sipil berdjumlah 38 dan keadaan kekuatan, dan pandjangnja adalah sedemikian, sehingga hanja dapat didarati oleh beberapa djenis pesawat terbang jang kini dipergunakan di Indonesia atau bila dapat didarati oleh pesawat-pesawat jang lebih besar, dengan operasi terbatas.

Fasilitas-fasilitas lapangan terbang.

Fasilitas-fasilitas pokok lapangan terbang terdiri dari:

(a) Telekomunikasi penerbangan dan alat-alat pembantu navigasi (navigational aids).
(b) Pembangkit tenaga listrik.
(c) Penerangan landasan (runway lighting), approach lighting dan sebagainja.
(d) Meteorologi penerbangan.
(f) Gedung terminal, gedung-gedung untuk fasilitas darat instalasi air, perumahan operasionil dan pengangkutan operasionil.

1. **Telekomunikasi penerbangan dan navigational aids.**

Meskipun pada tahun terachir sudah diusahakan modernisasi dan penggantian alat-alat telekomunikasi, adalah suatu kenjataan, bahwa dewasa ini tidak semua fasilitas telekomunikasi penerbangan memenuhi sjarat-sjarat minim. Hal ini disebabkan karena tjepatnja perkembangan angkutan udara, baik dari segi besar, tjepat pesawat terbang, maupun traffic density.

Fasilitas perhubungan antara stasiun darat satu dengan lainnja tidak memenuhi ketjepatannja karena system komunikasinja sudah ketinggalan atau alat-alat telekomunikasinja sering mengalami kerusakan karena sudah tua.

Perhubungan antara stasiun darat dengan pesawat terbang sering terganggu atau tidak dapat mentjapai djarak jang ditetapkan, sehingga mengurangi keamanan penerbangan, karena tidak terdjaminnja pengawasan dan pengaturan lalu-lintas udara. Tanpa navigational aids jang terpertjaja sukar untuk dapat mentjapai tudjuan jang direntjanakan atau mengatur keamanannja dengan sempurna.

Berhubung dengan itu navigational aids seperti VOR/DME RADAR disamping NDB dapat ditelaah manfaat penggunaannja.

2. **Pembangkit tenaga listrik.**

Dibeberapa lapangan terbang kebutuhan akan tenaga listrik belum dapat dipenuhi oleh PLN. Karena antara lain letak dari pada lapangan terbang itu sendiri. Oleh karena itu maka lapangan-lapangan terbang ini perlu dilengkapi dengan sumber tenaga listrik.

Sumber tenaga listrik tersebut merupakan sumber tenaga tjadangan, untuk mendjamin tetap tersedianja tenaga listrik bila PLN mengalami kerusakan, atau sumber tetap apabila tidak tersedia listrik dari PLN.

3. **Penerangan landasan.**

Pada waktu ini pendaratan malam hanja dapat diadakan dipelabuhan-pelabuhan udara Medan, Djakarta, Surabaja, Denpasar, Makassar, Menado dan Biak.

Untuk memungkinkan pendaratan diwaktu malam, disedjumlah lapangan terbang lainnja perlu dipasang penerangan landasan.

4. **Meteorologi penerbangan.**

Karena kurangnja fasilitas operasionil, termasuk gedung-gedung kendaraan operasionil dan perhubungan radio dengan tempat-tempat lain, maka pada saat ini sebagian besar dari stasiun-stasiun meteorologi penerbangan hanja dapat mengadakan observasi dan penerusannja ketempat pengumpulan data-data pada siang hari sadja, sedangkan sesungguhnja perlu mengadakan operasi terus-menerus selama 24 djam.

5. **Gedung terminal, gedung-gedung untuk fasilitas darat, instalasi air, perumahan dan pengangkutan operasionil.**

Disedjumlah lapangan terbang perlu dibangun gedung terminal atau perluasan untuk disesuaikan dengan bertambahnja arus penumpang dan barang, sehingga mempertjepat ground handling penumpang maupun barang. Gedung-gedung operasionil seperti tower, gedung listrik, operations centre perlu dibangun disebagian besar lapangan terbang untuk dapat mengimbangi pemakaian instalasi baru.

Pada umumnja letak lapangan terbang djauh dari kota, sehingga belum dapat diberikan saluran air, sehingga dibanjak lapangan terbang perlu disediakan instalasi air tersendiri.

Fasilitas-fasilitas lainnja.

Meteorologi pertanian dan maritim.

Untuk menundjukkan pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang titik beratnja ialah peningkatan produksi pangan, penelitian chusus pengaruh tjuatja pada pertanian perlu ditingkatkan. Maksud itu dapat ditjapai dengan menjempurnakan stasiun-stasiun meteo pertanian. Disamping itu djuga pengamatan-pengamatan meteorologi dilaut perlu dilakukan dengan perantaraan kapal-kapal niaga jang dikoordinir oleh stasiun-stasiun meteo maritim. Data ini perlu untuk peningkatan produksi pangan dan djuga untuk keamanan pelajaran.

Geofisik.

Pelajanan geofisik terhadap permintaan data magnit bumi seismo dan gravitasi untuk keperluan pembangunan perindustrian memerlukan penjempurnaan stasiun-stasiun geofisika.

Komunikasi antara stasiun dengan pusat perlu dibina terutama untuk penjaluran berita-berita gempa setjara tjepat.

Kesehatan penerbangan.

Disamping fasilitas-fasilitas jang lain, faktor manusia memegang peranan jang penting didalam keamanan penerbangan, sebab menurut statistik jang didapat lebih dari 70 persen dari pada ketjelakaan pesawat terbang adalah disebabkan oleh faktor manusia. Untuk mendjamin keamanan operasi pesawat terbang, para awak pesawat dan pegawai-pegawai operasional tertentu didarat harus mendjalani medical check berkala sesuai dengan sjarat-sjarat jang telah ditentukan.

Pendidikan.

Kebutuhan tenaga bagi pelajanan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas didapat dari pendidikan jang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara.

Search and Rescue.

Dalam melaksanakan kewadjibannja terhadap dunia penerbangan dan demi untuk perikemanusiaan, Indonesia pada waktu ini belum dapat menjediakan fasilitas pentjarian dan pertolongan pesawat terbang (Search and Rescue Service). Untuk meningkatkan kepertjajaan dunia penerbangan internasional terhadap kemampuan Indonesia melaksanakan kewadjiban-kewadjibannja ingin diusahakan untuk melengkapi equipment jang diperlukan.

Kebidjaksanaan dan langkah-langkah.

Setjara bertahap langkah-langkah jang ingin diambil adalah:

(a) perbaikan serta upgrading lapangan-lapangan terbang jang penting bagi lalu-lintas perdagangan;

(b) perbaikan fasilitas fisik seperti landasan, terminal, telekomunikasi penerbangan, airport lighting, alat-alat pembantu pendaratan, meteorologi dan sebagainja.

Usaha ini akan didahului dengan survey dan penelaahan jang tjermat sehingga terdjaminlah effisiensi daripada penggunaan dana dan biaja.

Diantara pelbagai landasan-terbang, perhatian chusus diberikan kepada maksud untuk meningkatkan modernisasi pelabuhan udara Kemajoran sehingga mampu menampung lalu-lintas udara dengan lebih effisien, tjepat, aman dan teratur. Suatu penelaahan feasibility serta perhitungan ratio biaja dan faedah akan dilakukan terlebih dahulu guna menilai manfaatnja.

Dengan langkah kebidjaksanaan ini diharapkan agar dalam lima tahun penerbangan jang aman dan teratur dapat ditingkatkan.

Target dan Lokasi Pembangunan

Lapangan Terbang.

Target jang hendak ditjapai adalah merehabilitir dan meningkatkan kemampuan lapangan-lapangan terbang sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan djam terbang pesawat rata-rata dengan 30-50 persen.

Rentjana dan target pembangunan adalah seperti tertera dalam tabel VIII-D-1.

Dari 32 lapangan terbang jang akan dibangun, 14 buah direhabilitir (lapangan-lapangan terbang Kidjang, Dabo, Bulutumbang, Pangkalpinang, Tarakan, Sumbawabesar, Waingapu, Maumere, Palu, Gorontalo, Djailolo, Rengat, Tandjungkarang dan Bengkulu) dan 18 di-upgrade sehingga 3 buah dapat didarati sedjenis pesawat turbo-jets Douglas DC-8 dengan m.t.o./ maximum take-off weight 142.880 kg. (Polonia, Tuban, Hasanudin); 3 buah bisa didarati sedjenis pesawat turbo-jets Douglas DC-9 dengan m.t.o. 35.200 kg. (Talangbetutu, Ulin dan Mapa-

nget); 10 buah bisa didarati sedjenis pesawat turbo-props Fokker/Fairchild F-27 dengan m.t.o. 16.194 kg (Blangbintang, Simpang Tiga, Paalmerah, Tabing, Sungai Durian, Adisutjipto, Sepinggan, Rembiga, Panfui, Pattimura); 1 buah bisa didarati sedjenis pesawat piston Douglas DC-3/Dakota dengan m.t.o. 11.431 kg. (Palangka Raya); sedangkan dilapangan terbang Kemajoran dilakukan up-grading 2 buah landasan 08-26 dan 17-36 sehingga dapat didarati sedjenis pesawat jet DC-8 tanpa pembatasan dan mampu menampung lalu-lintas penerbangan sampai waktu 10 tahun jang akan datang.

Pendidikan:

(a) rehabilitasi fasilitas penerbangan;

(b) penggantian/pembaharuan training equipments dan training aids;

(c) perluasan gedung operasionil; dan

(d) penggantian/penambahan pengangkutan operasionil.

Meteorologi pertanian:

(a) penjediaan alat-alat untuk 3 stasiun pertanian utama dan 9 stasiun pertanian biasa;

(b) penjediaan alat-alat untuk 300 buah stasiun hidrometeorologi.

Geofisika: penjediaan alat-alat untuk stasiun-stasiun geofisika di Djakarta dan Tanggerang.

TABEL VIII-

RENTJANA PEMBANGUNAN PRA-

1969/70-

Pelabuhan udara	Landasan	Telekomunikasi dan Navigational Aids	Pembangkit tenaga listrik
(1)	(2)	(3)	(4)
1. **Blangbintang. Banda Atjeh**	Up-grading sampai mentjapai kekuatan 41.000 lbs, perluasan apron.	Rehabilitasi, up-grading dan pemasangan baru.	Peningkatan ngan pengganti generating set b ru (min power quirement 75 KVA).
2. **Polonia. Medan.**	Up-grading dan perpandjangan untuk mentjapai kekuatan 300.000 lbs, perluasan apron.	S.d.a.	Peningkatan ngan penambah penggantian ge rating set baru (min power req rement 175 KV
3. **Simpang Tiga. Pakanbaru.**	Up-grading dan perpandjangan sampai mentjapai kekuatan 41.000 lbs, perluasan apron.	S.d.a.	S.d.a. (min power req rement 75 KVA
4. **Paalmerah. Djambi.**	S.d.a.	S.d.a.	S.d.a. (min power req rement 50 KVA
5. **Tabing. Padang.**	S.d.a.	S.d.a.	S.d.a. (min power req rement 75 KVA

Keterangan :

Mengenai up-grading lapangan-lapangan terbang dalam 5 tahun pembangunan pertama akan dilaksanakan sebesar ± 60-75% dari target.

D-1

SARANA ANGKUTAN UDARA

1973/74.

Penerangan landasan	Meteorologi penerbangan	Unit pemadam kebakaran	Gedung2 Operasionil dan Instalasi air	Alat pengangkutan Oprasionil
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemasangan air-port lighting.	Rehabilitasi dan peningkatan dengan penjediaan dan pemasangan alat2 perlengkapan meteorologi.	Penggantian unit pemadam kebakaran jang sesuai dgn. operation.	Pembuatan gedung Operasionil, perumahan operasionil dan perluasan gedung terminal termasuk tempat parkir.	Penambahan/pembaharuan.
Penjempurnaan air-port lighting system.	S.d.a.	S.d.a.	Pembuatan gedung operasionil, perumahan operasionil, gedung terminal.	S.d.a.
Pemasangan air-port lighting.	S.d.a.	S.d.a.	Perluasan gedung operasionil, gedung Setasion, tempat parkir, gedung telkom VOR dsb.	S.d.a.
S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.	Pembuatan gedung Setasion, gedung operasionil, gedung telekomunikasi.	S.d.a.
S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.	Perluasan gedung Setasion, perumahan operasionil.	S.d.a

(1)	(2)	(3)	(4)
6. **Djapura.** Rengat.	Rehabilitasi.	Rehabilitasi, up-grading dan pemasangan baru.	Peningkatan dengan penambahan penggantian generating set baru (min. power requirements 175 KVA).
7. **Padangkemiling.** Bengkulu.	Rehabilitasi.	S.d.a.	S.d.a. (min. Power requirements 50 KVA).
8. **Branti.** Tg. Karang.	Rehabilitasi.	Rehabilitasi, up-grading dan pemasangan baru.	Peningkatan, penggantian generating set baru (min. power requirements 50 KVA).
9. **Talang Betutu.** Palembang.	Up-grading dan perpandjangan sampai kekuatan 116.000 lbs, perbaikan dan perluasan apron.	S.d.a.	S.d.a. (min. power requirements 175 KVA).
10. **Sungai Durian.** Pontianak.	S.d.a. Sampai kekuatan 41.000 lbs.	S.d.a.	S.d.a.
11. **Palangkaraya.**	Up-grading utk. mentjapai kekuatan 25.000 lbs.	Pemasangan baru.	Pemasangan baru (min. power requirements 50 KVA).
12. **Ulin.** Bandjarmasin.	Up-grading dan perpandjangan untuk mentjapai kekuatan 116.000 lbs, perbaikan dan perluasan apron.	S.d.a.	S.d.a. (min. power requirements 125 KVA).
13. **Sepinggan.** Balikpapan.	Up-grading dan perpandjangan untuk mentjapai kekuatan 41.000 lbs, pembuatan apron.	Rehabilitasi, up-grading dan pemasangan baru.	Peningkatan dengan penggantian generating set baru (min. power req. 100 KVA).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemasangan Air-port lighting.	Rehabilitasi dan peningkatan dengan penjediaan dan pemasangan alat2 perl. meteorologi.	Penggantian unit pemadam kebakaran jang sesuai dgn. operation.	Perluasan gedung Setasion, perumahan operasionil.	Penambahan dan pembaharuan.
S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.
S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.	Pembuatan gedung terminal, gedung2 operasionil, perumahan operasionil.	Penambahan dan penggantian/ pembaharuan
S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.	Perluasan gedung terminal, pembuatan gedung operasionil, perumahan operasionil.	S.d.a.
—	S.d.a.	S.d.a.	Rehabilitasi gedung terminal, gedung2 operasionil, perumahan operasionil.	S.d.a.
—	Pengadaan Station meteorologi.	Penempatan unit pemadam kebakaran.	S.d.a.	S.d.a.
Pemasangan air port lighting.	Rehabilitasi dan peningkatan dengan penjediaan dan pemasangan alat2 perlengkapan meteorologi.	Penggantian unit pemadam kebakaran jang sesuai dengan Operation.	Perluasan gedung Station, pembangunan gedung operasionil, perumahan operasionil.	S.d.a.
S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.	Pembuatan gedung terminal, tempat parkir, gedung2 operasionil dan perumahan operasionil.	S.d.a.

(1)	(2)	(3)	(4)
14. **Adisutjipto.** Jogjakarta.	Up-grading dan perpandjangan untuk mentjapai kekuatan 41.000 lbs. pembuatan apron.	Pemasangan baru.	S.d.a. (min. power requirements 75 KVA).
15. **Tuban.** Denpasar.	S.d.a. 300.000 lbs.	S.d.a.	S.d.a. (min. power requirements 375 KVA).
16. **Rembiga.** Ampenan.	S.d.a. 41.000 lbs.	S.d.a.	S.d.a. (min. power requirements 50 KVA).
17. **Penfui.** Kupang.	S.d.a. 41.000 lbs. pembuatan apron.	S.d.a.	S.d.a. (min. power requirements 75 KVA).
18. **Hasanuddin.** Makassar.	S.d.a. 260.000 lbs.	Rehabilitasi, upgrading dan pemasangan baru.	S.d.a. (min. power requirements 200 KVA)
19. **Mapanget.** Menado.	S.d.a. 116.000 lbs., perluasan apron.	S.d.a.	S.d.a. (min. power requirements 125 KVA)
20. **Pattimura.** Ambon.	Up-grading dan perpandjangan utk mentjapai kekuatan 41.000 lbs., perluasan apron.	Rehabilitasi, upgrading dan pemasangan baru.	Peningkatan dengan penggantian generating set baru (min. power req. 125 KVA).
21. **Kemajoran.** Djakarta.	Up-grading, konstruksi baru dan perpandjangan 08 — 26 sampai 400.000 lbs., 17 — 35 sampai 285.000 lbs.; perluasan apron, djalan masuk.	S.d.a.	S.d.a. (min. power req. 1.500 KVA).
22. **Kidjang.** Tg. Pinang.	Rehabilitasi.	S.d.a.	S.d.a. (min. power. req. 50 KVA).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemasangan airport lighting.	—	—	Perluasan gd. terminal, gd. operasionil, perumahan operasionil.	Penambahan dan penggantian/ pembaharuan.
—	Rehabilitasi dan peningkatan dengan penjediaan dan pemasangan alat2 perlengkapan meteorologi.	Penggantian unit pemadam kebakaran jang sesuai dengan operation.	Pembuatan gd. terminal, perumahan operasionil.	S.d.a.
Pemasangan airport lighting.	S.d.a.	—	Perluasan gd. terminal, pemb. gd. operasionil, perumahan operasionil.	S.d.a.
S.d.a.	S.d.a.	—	S.d.a.	S.d.a.
S.d.a.	S.d.a.	Penggantian unit pemadam kebakaran jang sesuai dengan operation.	Pembuatan gedung terminal, operation, tempat parkir, perumahan operasionil.	S.d.a.
S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.
S.d.a.	Rehabilitasi dan pengangkatan dengan penjediaan dan pemasangan alat2 perlengkapan meteorologi.	Penggantian unit pemadam kebakaran jang sesuai dengan operation.	Pembangunan gedung terminal, tempat parkir, gedung2 operasionil dan perumahan operasionil.	S.d.a.
S.d.a.	S.d.a.	S.d.a.	Pembuatan area baru lengkap dengan gedung terminal, tempat parkir, catering.	S.d.a.
—	S.d.a.	—	—	S.d.a.

(1)	(2)	(3)	(4)
23. **Dabo.** Singkep.	Rehabilitasi.	Pemasangan baru.	S.d.a. (min. power. re 50 KVA).
24. **Bulutumbang.** Tg. Pandan.	Rehabilitasi.	S.d.a.	S.d.a. (min. power. re 50 KVA).
25. **Pangkal-pinang.** Pangkalpinang	Rehabilitasi.	S.d.a.	S.d.a. (min. power. re 75 KVA).
26. **Tarakan.** Tarakan.	Rehabilitasi.	S.d.a.	Peningkatan d ngan penggantia generating set b ru (min. powe req. 75 KVA).
27. **Sumbawa-besar.**	Rehabilitasi.	S.d.a.	S.d.a. (min. power req. 75 KVA).
28. **Waingapu.**	Rehabilitasi.	S.d.a.	S.d.a. (min. power req. 75 KVA).
29. **Maumere.**	Rehabilitasi.	S.d.a.	S.d.a. (min. power req. 75 KVA).
30. **Palu.**	Rehabilitasi.	Rehabilitasi, up-grading dan pe-masangan baru.	S.d.a. (min. power req. 75 KVA).
31. **Gorontalo.**	Rehabilitasi.	S.d.a.	S.d.a. (min. power req. 75 KVA).
32. **Djailolo.**	Rehabilitasi.	S.d.a.	S.d.a. (min. power req. 50 KVA).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
—	Rehab. dan peningkatan dengan penjediaan dan pemasangan alat² perlengkapan meteorologi.	—	—	Penambahan dan penggantian/ pembaharuan.
—	S.d.a.	—	Rehabilitasi gedung terminal, gedung² operasionil, perumahan operasionil.	S.d.a.
—	S.d.a.	Penggantian unit pemadam kebakaran jang sesuai dengan operation.	S.d.a.	S.d.a.
—	S.d.a.	—	Gedung operasionil.	S.d.a.
S.d.a.	S.d.a.	—	Pembuatan gedung terminal, gedung² operasionil, perumahan operasionil.	S.d.a.
S.d.a.	S.d.a.	—	S.d.a.	S.d.a.
S.d.a.	S.d.a.	—	S.d.a.	S.d.a.
-	S.d.a.	—	S.d.a.	S.d.a.
-	S.d.a.	—	S.d.a.	S.d.a.
—	S.d.a.	—	Gedung operasionil.	S.d.a.

ARMADA UDARA NIAGA

Keadaan dan Masalah.

Dalam tahun 1968 Armada Udara Niaga Nasional terdiri dari 32 buah pesawat terbang milik P.N. Garuda jang dipergunakan untuk melajani dinas penerbangan djarak djauh (trunkline service) didalam negeri dan dinas penerbangan keluar negeri. Pesawat-pesawat jang dipakai untuk penerbangan dalam negeri adalah: 2 buah pesawat turboprops Lockheed Electra, 11 buah pesawat piston Convair 440/340, dan 16 buah pesawat piston Douglas DC-3 (Dakota), jang masing-masing mempunjai kapasitas 66-85, 44-52, dan 21 tempat duduk setiap pesawat. Untuk penerbangan keluar negeri dipergunakan 1 buah pesawat turbo-jets Douglas DC-8 dan 2 buah pesawat turbo-jets Convair 990 A jang masing-masing mempunjai kapasitas 118-175 dan 96-121 tempat duduk setiap pesawat. Selain dari pada itu masih ada 1 buah pesawat DC-8 jang dipergunakan untuk penerbangan keluar negeri jang disewa (dry lease) dari perusahaan penerbangan Belanda K.L.M.

Armada Udara Niaga Nasional jang melajani feederline service jang diselenggarakan oleh P.N. Merpati Nusantara terdiri dari 5 buah pesawat Dakota dan 24 pesawat ketjil dari berbagai-bagai djenis seperti Twin Pioneer, Otter, Pilatus Porter, Dornier, dan Twin Otter jang masing-masing mempunjai kapasitas angkut 16, 11, 7, 5, 7 orang setiap pesawat. Disamping itu masih ada beberapa pesawat jang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan penerbangan swasta.

Keadaan pesawat Dakota sudah sangat tua dan merupakan djenis pesawat jang tertua dari pada djenis pesawat lainnja. Produktivitasnja rendah, kurang lebih hanja mentjapai antara 2 - 2,5 djam sehari setiap pesawat jang disebabkan terutama oleh tidak tersedianja spare-parts. Pesawat-pesawat Convair 340/440 djuga tergolong sudah tua dan mengalami kekurangan spare-parts sehingga produktivitasnja relatip rendah j.i. kurang lebih 2,5 - 3 djam sehari setiap pesawat. Kemudian menjusul pesawat

Electra jang lebih muda dari kedua djenis pesawat tadi tetapi djuga produktivitasnja belum seperti apa jang diharapkan karena selain kesukaran akan spare-parts djuga karena terbatasnja lapangan-lapangan terbang jang bisa didarati oleh pesawat djenis ini, jaitu hanja kurang lebih 11 buah sadja dari djumlah lapangan terbang seluruhnja 38 buah. Produktivitas pesawat ini kurang lebih mentjapai 7 - 8 djam setiap hari setiap pesawat Pada umumnja semua pesawat-pesawat jang tersebut diatas dapat mentjapai effisiensi ekonomis jang tjukup tinggi jang dapat dilihat dari tinggi rendahnja load-factor jang tertjatat rata-rata antara 70 - 80 persen, sehingga dengan demikian sebenarnja kebutuhan akan djasa angkutan udara dalam negeri masih perlu ditingkatkan.

Pesawat Convair 990 A djuga dipergunakan untuk penerbangan dalam negeri. Akan tetapi sangat terbatas karena sedikitnja djumlah lapangan terbang jang bisa didarati (Kemajoran, Surabaja/Waru dan Biak).

Berbeda dengan penerbangan keluar negeri jang mempergunakan pesawat Convair 990 A dan DC-8 dimana hanja dapat mentjapai efisiensi ekonomis jang sangat rendah (antara 35 — 40 persen) masalahnja adalah meningkatkan load-factor sedemikian rupa sehingga penerbangan keluar negeri paling sedikit dapat selfsupporting.

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah.

Dari keadaan dan masalah jang dihadapi, maka kebidjaksanaan dibidang Armada Udara Niaga menitik beratkan kepada terpenuhinja kebutuhan djasa angkutan udara didalam negeri dan kemudian meningkatkan effisiensi ekonomisnja terutama untuk penerbangan keluar negeri. Untuk ini diambil langkah-langkah sebagai berikut:

(1) a. operasi penerbangan dalam negeri dibedakan mendjadi: angkutan udara semi-trunk lines, trunk, dan regional. Pada pokoknja penjelenggara angkutan udara dalam negeri dilakukan oleh perusahaan penerbangan Garuda dan Merpati Nusantara.

b. sesuai dengan kemadjuan-kemadjuan dibidang penerbangan perlu menjusun armada dalam negeri jang lebih ekonomis.

c. modal swasta nasional diberi kesempatan untuk ikut menjelenggarakan angkutan udara feeder-lines/semi trunk lines.

d. modal asing diberi kesempatan untuk menjelenggarakan angkutan udara semi-trunk lines dan feederlines dengan mengadakan kerdja-sama modal nasional.

e. perusahaan-perusahaan jang bergerak dibidang air-charter dapat bergerak diseluruh Indonesia atas dasar charter.

(2) Dalam angkutan udara Internasional dibedakan mendjadi: penerbangan perbatasan, penerbangan regional dan penerbangan internasional. Penerbangan perbatasan dimaksudkan untuk menampung border-traffic, jang ada antara negara tetangga dan Indonesia. Penerbangan regional meliputi hubungan udara didaerah Asia Tenggara dan Asia, mendapatkan prioritas pula mengingat National Flag Carrier Garuda telah beroperasi didaerah ini. Dibidang penerbangan internasional diusahakan untuk meningkatkan effisiensi ekonomis dan ikut mengambil bagian menampung lalu-lintas Internasional.

Dengan kebidjaksanaan dan langkah-langkah ini diharapkan agar dalam lima tahun angkutan udara dapat meningkat dengan lebih efektip dan efisien.

Target dan Lokasi Pembangunan.

a. untuk menjusun armada nasional jang lebih ekonomis akan diusahakan penggantian pesawat DC 3 untuk penerbangan dalam negeri, dan penggunaan pesawat DC 3 dialihkan kelapangan-lapangan terbang jang masih kurang fasilitasnja.

b. mengusahakan trajek baru untuk menampung border traffic antara: Pekanbaru — Singapore; Medan — Penang; Kupang — Darwin; Pontianak — Kuching; Tarakan — Tawao; Menado — Zamboanga/Davao.

c. mengusahakan traffic right agar Indonesia dapat beroperasi dibeberapa negara tetangga jang sampai sekarang belum atau tidak ada persetudjuan mengenai hubungan udara antara lain: Laos, Kambodja, Vietnam Selatan, Taiwan dan Korea Selatan.

d. menjempurnakan operasi Garuda dinegara-negara Asia seperti Djepang, Hongkong, Philipina, Muang Thai, Malaysia dan Singapore.

e. Menjempurnakan operasi Garuda ke Eropa.

Perhubungan Pos dan Telekomunikasi

POS DAN GIRO

Keadaan dan Masalah.

Fungsi Pos dan Giro adalah untuk menjediakan fasilitas perhubungan Pos dalam dan luar negeri, menjelenggarakan lalulintas berita melalui Pos dalam dan luar negeri, menjelenggarakan lalu-lintas uang, baik untuk Pemerintah maupun untuk umum dan menjelenggarakan dinas-dinas lain, diantaranja dinas Paket Pos.

Pelajanan (service) bidang Pos hingga saat ini masih belum mentjapai apa jang diharapkan, oleh karena peningkatan kebutuhan masjarakat tidak seimbang dengan pertambahan peralatan. Pelaksanaan tugas bidang perhubungan Pos sangat tergantung pada alat-alat angkutan jang dimiliki fihak ketiga jang djuga menghadapi kesukaran.

Sungguhpun begitu perlu dilakukan usaha-usaha jang terus menerus untuk meningkatkan pelajanan (service) terhadap masjarakat, antara lain dengan memperluas dinas pos kilat kekota-kota penting dengan mempergunakan kereta-api tjepat, bus malam dan sebagainja. Meningkatkan terus segi keamanan pos. Memberikan prioritas dan tindakan pengamanan dalam pengiriman dokumen-dokumen Bank dalam maupun luar negeri. Membuka Dinas Giro dan Tjek Pos jang memungkinkan agar

uang jang digiralkan dapat diterima dalam waktu jang singkat. Dinas Giro dan Tjek Pos jang didirikan pada tahun 1961 adalah unsur pelengkap dari pada pekerdjaan-pekerdjaan perbankan.

Dalam rangka melaksanakan prinsip cost accounting disamping usaha-usaha peningkatan effisiensi djuga berbagai usaha didjalankan guna menambah penghasilan, antara lain: membuka dinas surat bank kilat, mengeluarkan kartu-pos kilat, mengadakan pungutan bea serah bungkusan dari luar negeri, memperluas djaringan pos kilat dan mengadakan kontrak-kontrak dengan instansi jang menarik bermatjam-matjam pembajaran dari publik agar menggunakan djasa-djasa Dinas Giro dan Tjek Pos.

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah.

Untuk menampung kesibukan lalu-lintas pos sebagai akibat perluasan Ibu Kota, mentjapai waktu pengiriman surat-surat pos sesingkat-singkatnja, melajani sebagian besar penduduk Indonesia jang tersebar dipedalaman/pedesaan dan mengeffektifkan dan meningkatkan pengawasan terhadap penjelenggaraan Dinas-dinas Pos dan Giro, maka dalam rentjana pembangunan 5 tahun pertama ini ingin dilaksanakan penjempurnaan dinas Pos di Ibu Kota Djakarta, perluasan djaringan pos kilat, pendaja-gunaan Dinas Pos transit Ambulans, peningkatan pelajanan pos dipedesaan, perluasan penjempurnaan Dinas Giro dan Tjek Pos dan penjempurnaan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan dinas.

Dengan kebidjaksanaan dan langkah-langkah seperti tersebut diatas diharapkan pada achir pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun pelajanan (service) giro mendjadi lebih effisien, effektif dan lebih merata dari pada sekarang.

Target dan Lokasi Pembangunan.

Target jang hendak ditjapai dan lokasi jang dipilih adalah sebagai berikut:

BANDA ATJEH (41.000)
MEDAN (300.000)
RENGAT
TG PINANG
P. BARU (41.000)
P. SUMATERA
SINGKEP
PADANG (41.000)
PK PINANG
DJAMBI (41.000)
PALEMBANG (116.000)
BENGKULU
TG. PANDAN
T KARANG
P KALIMANTAN
PONTIANAK (41.000)
P RAYA
B. MASIN (116.000)
P DJAWA
DJAKARTA (400.000)
JOGJAKARTA (41.000)
TUBAN (30C
REHAB /UPGRAD /PERLUASAN LANDASAN UDARA (DLM LBS) DAN FASILITAS PEL UDARA
(300-400.00
(116.000)

(41.000)

(41.000)

SUB SEKTOR: PERHUBUNGAN

PERHUBUNGAN UDARA

1. Pembangunan 5 buah kantor pos di Ibu Kota jang meliputi pembangunan Kantor Pos Djakarta Pusat (Pasar Baru), Kebajoran Baru, Rawamangun, Pasar Kodja dan Grogol.
2. Perluasan djaringan Pos Kilat jang meliputi 19 buah hubungan diantaranja dari Djakarta — Djabar — Djateng — Djatim — Sumatera — Kalimantan — Sulawesi — Nusa Tenggara — Maluku — Irian Barat.
3. Pembangunan trajek angkutan Pos Kilat baru sebanjak 23 hubungan, jaitu antara Djakarta dan kota-kota pedalaman lainnja, diantaranja Banda Atjeh, Langsa, Tondano, Tomohon dan Bitung.
4. Pembangunan Dinas Pos Ambulans jang meliputi:
   a. Dinas Pos Keliling untuk 19 kota: diantaranja Djakarta, Surabaja, Medan, Makassar, Pontianak, Denpasar, Menado, Jogjakarta, Ampenan.
   b. Dinas Pos Kereta-api untuk trajek-trajek: Djakarta-Semarang-Surabaja p.p., Djakarta-Tjirebon-Jogjakarta-Surabaja p.p., Bandung-Jogjakarta-Surabaja p.p., Merak-Djakarta p.p., Kertapati-Pandjang p.p. dan Surabaja-Banjuwangi p.p.
5. Mengadakan djaringan angkutan Pos (sebagai feeder lines) disetasion-setasion: Tasikmalaja, Tjirebon, Semarang, Jogjakarta, Solo, Madiun, Djakarta, Serang, Palembang dan Djember dengan mempergunakan kendaraan bermotor.
6. Menjempurnakan pelajanan pos dipedesaan/pedalaman jang meliputi:
   a. up-grading 360 buah rumah pos mendjadi kantor pos desa;
   b. up-grading pelajanan kantor-kantor pos tetap kepada pedesaan/pedalaman: Djawa 179 buah, Sumatera 63 buah, Kalimantan 20 buah, Sulawesi 16 buah, Maluku 8 buah, Nusa Tenggara 22 buah dan Irian Barat 19 buah;
   c. Mengadakan 25 buah kantor pos bergerak/mobil: Djawa Tengah 9 buah, Djawa Timur 4 buah, Djawa Barat

3 buah, Sumatera Selatan dan Lampung 2 buah, Sumatera Utara dan Atjeh 3 buah, Kalimantan Barat 2 buah dan Sulawesi 2 buah.

7. Perluasan penjempurnaan Dinas Giro dan Tjek jang meliputi:
   a. pembangunan 4 buah kantor sentral Giro di Medan, Makassar, Surabaja dan Palembang;
   b. pembangunan 5 buah kantor sentral Giro Gabungan di Djember, Menado, Denpasar, Pontianak dan Bandjarmasin.
8. Penjempurnaan pengawasan dan pengamanan terhadap penjelenggaraan dinas jang meliputi:
   a. perluasan gedung kantor pusat P.N. Pos dan Giro di Bandung;
   b. pembangunan 4 buah Biro Kepala Daerah Pos dan Giro di Semarang, Palembang, Medan dan Denpasar;
   c. perluasan 2 buah gedung peralatan dan perbengkelan di Bandung.

TABEL VIII-E-1

MEMUAT RENTJANA PENAMBAHAN PEMBANGUNAN POS DAN GIRO

TABEL
RENTJANA PENAMBAHAN/
1969/70

Tahun	Djumlah Penambahan/Pembangunan							
	Kantor Pos Besar	Kantor Pos Pembantu	Kantor Pos Tambahan	Rumah Pos	Sentral Giro	Sentral Giro Gabungan	Dinas Pos Keliling	Kantor Pos Bergerak
1968/69	—	—	—	—	—	—	—	—
1969/70	—	1	3	70	1	1	3	4
1970/71	—	2	5	80	2	2	5	6
1971/72	—	2	3	80	1	1	5	6
1972/73	—	—	2	70	1	1	4	5
1973/74	—	—	2	60	—	—	2	5
Djumlah	—	5	15	360	5	5	19	26

VIII-E-I

PEMBANGUNAN POS DAN GIRO — 1973/74

Djumlah Seluruhnja

Kantor Pos Besar	Kantor Pos Pembantu	Kantor Pos Tambahan	Rumah Pos	Sentral Giro	Sentral Giro Gabungan	Dinas Pos Keliling	Kantor Pos Bergerak
191	66	771	1348	8	2	—	—
191	67	774	1418	9	3	3	4
191	69	779	1498	11	5	8	10
191	71	782	1578	12	6	13	16
191	71	784	1648	13	7	17	21
191	71	784	1708	13	7	19	26

TELEKOMUNIKASI

Keadaan dan Masalah.

Telekomunikasi sebagai unsur prasarana mempunjai peranan jang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan negara. Sedjalan dengan kebidjaksanaan Pemerintah, usaha-usaha selalu ditingkatkan untuk perbaikan service dengan selangkah demi selangkah mengganti peralatan jang sudah tidak effisien lagi serta mengadakan pembangunan baru disana-sini.

Djaringan telekomunikasi pada saat ini dapat digambarkan sebagai berikut: (a) 23 sentral telepon otomat; 33 sentral telepon manual dengan Central Battery (CB); 480 sentral telepon manual dengan Local Battery (LB); 17 hubungan telegrap internasional; 450 hubungan telegrap dalam negeri; dan 17 sentral teleprinter/telex; (b) kapasitas sambungan telepon pada saat ini adalah ± 172.000 sambungan. Kota-kota besar seperti Djakarta, Bandung, Solo, Malang, Palembang, pada umumnja telah ada sentral otomat; (c) untuk menjalurkan hubungan djarak djauh, baik telegrap ataupun telepon, maka dipergunakan saluran kawat atau saluran radio; (d) Antara Djakarta — Bandung telah dipergunakan hubungan micro-wave jang sekaligus memungkinkan Sambungan Langsung Djarak Djauh (S.L.D.D.).

Keadaan dari pada djaring telekomunikasi tersebut adalah djauh dari pada mentjukupi untuk dapat menampung kebutuhan jang meningkat. Dalam pertumbuhan telekomunikasi turut memberikan peranan jang tjukup besar adalah: (a) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel; (b) Lembaga Pendidikan Postel. Disamping mengerdjakan applied research, pada saat ini Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel telah mempunjai pabrik telepon dengan kapasitas produksi untuk tahun pertama sebesar 10.000 sambungan. Lembaga Pendidikan Postel mendidik tenaga-tenaga telekomunikasi menengah maupun tenaga akademisi. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan Lembaga tersebut mendapat bantuan dalam rangka U.N.D.P. berupa equipments dan experts.

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah.

Dalam masa lima tahun ingin diusahakan rehabilitasi dan setjara berangsur pengembangan dan perluasan dari sistim telekomunikasi sehingga dapat mentjakupi bagian-bagian terpenting dari wilajah Indonesia.

Untuk mewudjudkan kebidjaksanaan ini maka direntjanakan:

1. penambahan fasilitas hubungan djarak-djauh jang ada sistim micro-wave untuk wilajah Sumatera-Djawa-Bali-Nusa Tenggara, dan H.F. sistim untuk djaringan-pembantu (feeder lines).
2. otomatisasi dan pembangunan sentral tangan untuk tilpon dibeberapa kota penting.

Untuk keperluan penting bagi pemerintahan maka hubungan radio tilpon akan diusahakan.

Sebelum rentjana pembangunan dilaksanakan setjara effektif, maka akan didahului dengan survey dan penelaahan feasibility untuk mendjamin effisiensi jang maksimal dari penggunaan dana dan tenaga jang terbatas. Dalam rangka ini maka dewasa ini Pemerintah Australia dan Bank Dunia telah memperbantukan team-survey dan tenaga-ahli dalam rangka kerdjasama bantuan luar-negeri.

Agar penjelenggaraan baik perentjanaan maupun pelaksanaan bidang telekomunikasi dapat lebih effektif dan effisien **perlu adanja single management** dimana hanja sebuah instansi sadja jang berwenang mengurus segala sesuatunja jang bersangkutan dengan telekomunikasi.

Dengan kebidjaksanaan dan langkah-langkah seperti tersebut diatas harapan pada achir pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun adalah dapat terselenggaranja dialing satu sama lain antara kota-kota dari Banda Atjeh sampai Kupang, dan melalui backbone in principe dapat mengadakan hubungan keluar negeri lewat Singapore dan lain-lain.

Target dan Lokasi Pembangunan.

Target jang hendak ditjapai.

(1) Kapasitas sambungan telepon ditingkatkan dari 172.000 sambungan mendjadi 257.500 sambungan pada achir 1973/74 atau ± 50% dalam 5 tahun;

(2) Perluasan dari sedjumlah 54 hubungan djarak djauh transmisi saluran serta pembangunan 11 hubungan dengan djarak djauh melalui micro-wave/radio sinar dan pembangunan 18 hubungan radio telepon dan 8 hubungan radio telegrap.

(3) Peningkatan mutu transmisi telegrap sebanjak 10 hubungan, perluasan hubungan telex — H.F.: 9 buah, peningkatan morse H.F.: 15 buah serta peningkatan Printer saluran: 20 buah.

(4) Gedung-gedung dan bangunan harus disediakan untuk menempatkan peralatan bagi hubungan-hubungan jang akan diadakan.

(5) Pendidikan: perlu melatih/mendidik tenaga untuk tehnik telepon 1.360 orang, operator telepon dan administrasi telepon 1.850 orang, tehnik telegrap 840 orang, operator dan administrasi telegrap 1.710 orang, transmisi 1.345 orang, dan Kantor Pusat 530 orang.

(6) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel :

a) Assembling alat telepon:
Sentral telepon otomat: 120.000 sambungan.
Pesawat telepon medja : 160.000 buah.
Papan sambung: 425 buah.

b) Produksi pemantjar berbagai djenis: 316 buah.

c) Assembling pesawat-pesawat carrier equipment berbagai djenis: 91 pesawat.

d) Produksi beberapa alat ukur meliputi djumlah 100 buah.

Lokasi Pembangunan.

(1) Pembangunan telepon otomat.

Djumlah pembangunan telepon otomat jang meliputi perluasan dan pembangunan baru adalah sebagai berikut:

a) Djawa sebanjak 53.680 nomor;
b) Sumatera sebanjak 20.000 nomor;
c) Sulawesi sebanjak 5.600 nomor;
d) Kalimantan sebanjak 5.600 nomor.

(2) Pembangunan telepon tangan sistim C.B. (Central Battery):

Penggantian telepon tangan dari sistim L.B. (Local Battery) mendjadi sistim C.B. meliputi 52.280 nomor dan perluasan dari sistim C.B. sendiri meliputi 2.340 nomor.

(3) Peningkatan/penambahan nomor telepon seperti tertera dalam Tabel VIII-E-2.

(4) Pembangunan telekomunikasi untuk ketjamatan-ketjamatan terutama di Irian Barat dengan S.S.B. Transceiver.

(5) Pembangunan hubungan djarak djauh :

a) Projek transmisi saluran sistim gelombang pembawa:
1) Sistim gelombang pembawa dengan saluran atas tanah sebanjak 49 hubungan jang terdiri dari bermatjam-matjam/djenis channels.
2) Sistim gelombang pembawa dengan saluran kabel sebanjak 5 hubungan jang terdiri dari 60 voice channels dan 36 teleprinter channels.

b) Pembangunan Transmisi Radio/Radio Sinar/Microwave:
1) Microwave Djawa-Bali-Nusa Tenggara: Semarang — Surabaja; Surabaja — Denpasar; Denpasar — Kupang.
2) Microwave Djawa-Sumatera: Djakarta — Tandjung Karang; Tandjung Karang — Palembang; Pakanbaru — Medan.
3) Projek tropo scatter: Djambi — Pakan Baru; Surabaja — Bandjarmasin; Bandjarmasin — Makassar.

4) Radio Sinar/V.H.F.: Atjeh — Sabang; Medan — Malaysia; Solong — Taliwong.

5) Telepon Radio (H.F.) sebanjak 18 buah hubungan.

6) Telegrap Radio sebanjak 8 buah hubungan.

c) Pembangunan hubungan telegrap:

1) Peningkatan mutu/perluasan dan sistim transmisi telegrap, sebanjak 10 buah hubungan, jang menghubungkan antara kota-kota besar dan kota perdagangan.

2) Perluasan hubungan/peningkatan telex H.F. sebanjak 9 buah hubungan untuk kota-kota besar dan daerah penghasil ekspor/perdagangan.

3) Peningkatan hubungan morse (H.F.) sebanjak 15 buah hubungan, untuk daerah umumnja.

4) Peningkatan/perluasan hubungan Printer saluran sebanjak 20 buah hubungan untuk daerah-daerah lainnja.

TABEL VIII-E-2

RENTJANA PENINGKATAN/PENAMBAHAN TILPON
1969/70 — 1973/74

Tahun	Djumlah No. Tilpon jang akan dibangun	Djumlah No. Tilpon seluruhnja	Kenaikan %
1968/69	—	172.000	—
1969/70	5.100	177.100	3
1970/71	12.820	189.920	4,2
1971/72	17.000	206.920	9
1972/73	20.000	226.920	9,6
1973/74	30.580	257.500	13,4
Djumlah	87.220		

RENTJANA PENINGKATAN/PENAMBAHAN TILPUN

DJUMLAH Nº TILPUN SELURUHNJA

1968/69 — 1973/74

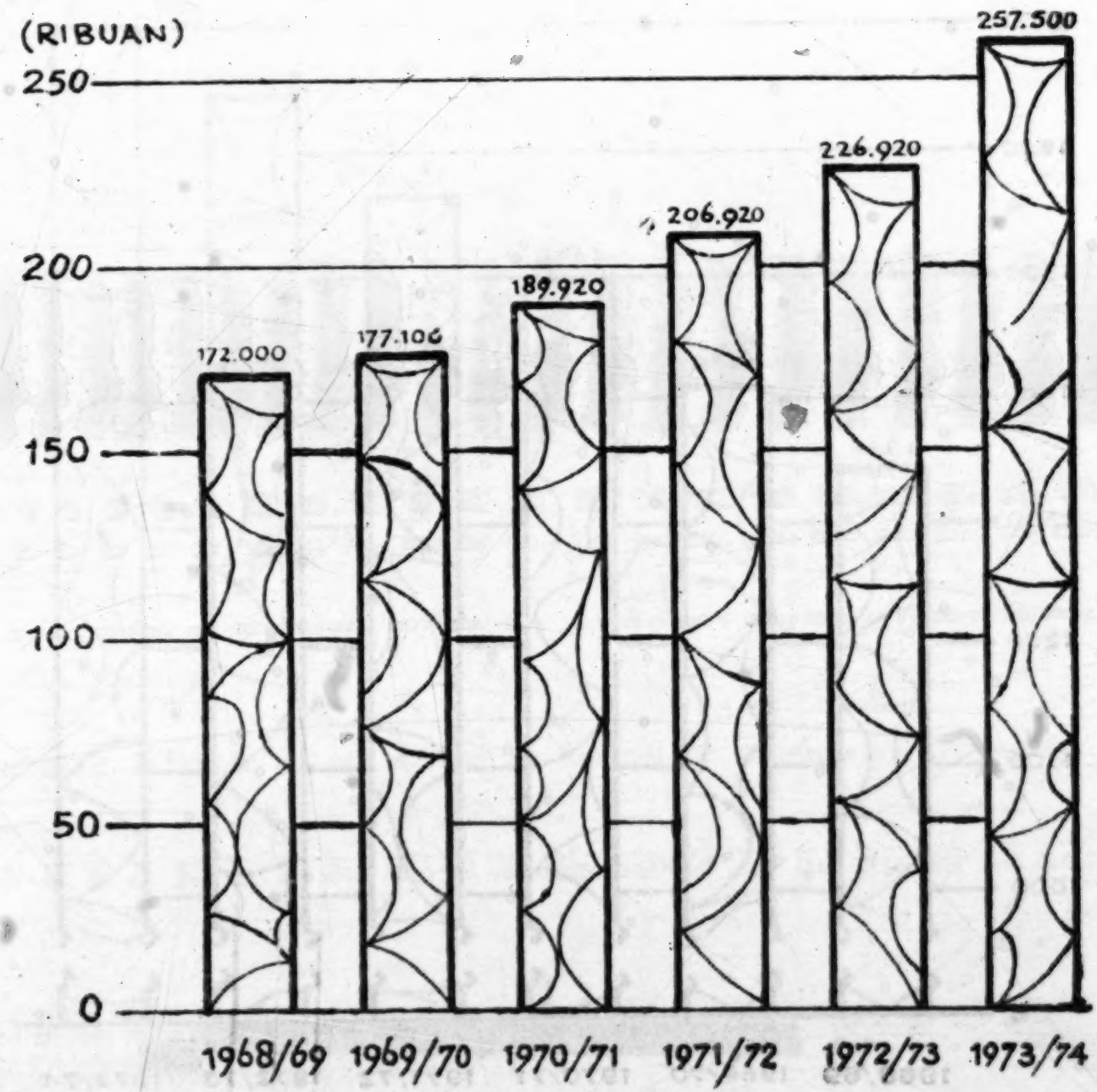

RENTJANA PENAMBAHAN/PEMBANGUNAN RUMAH POS

1968/69 — 1973/74

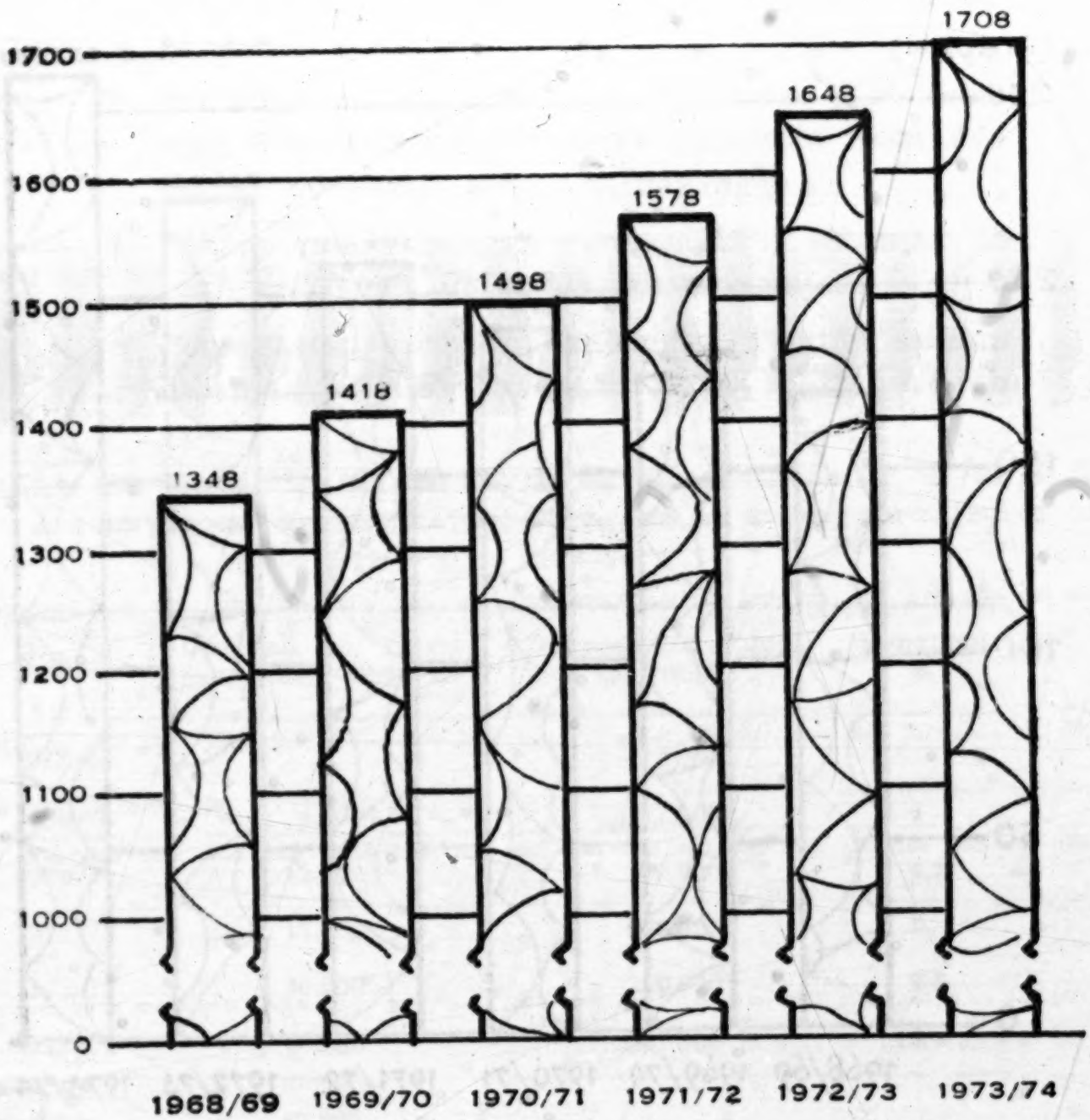

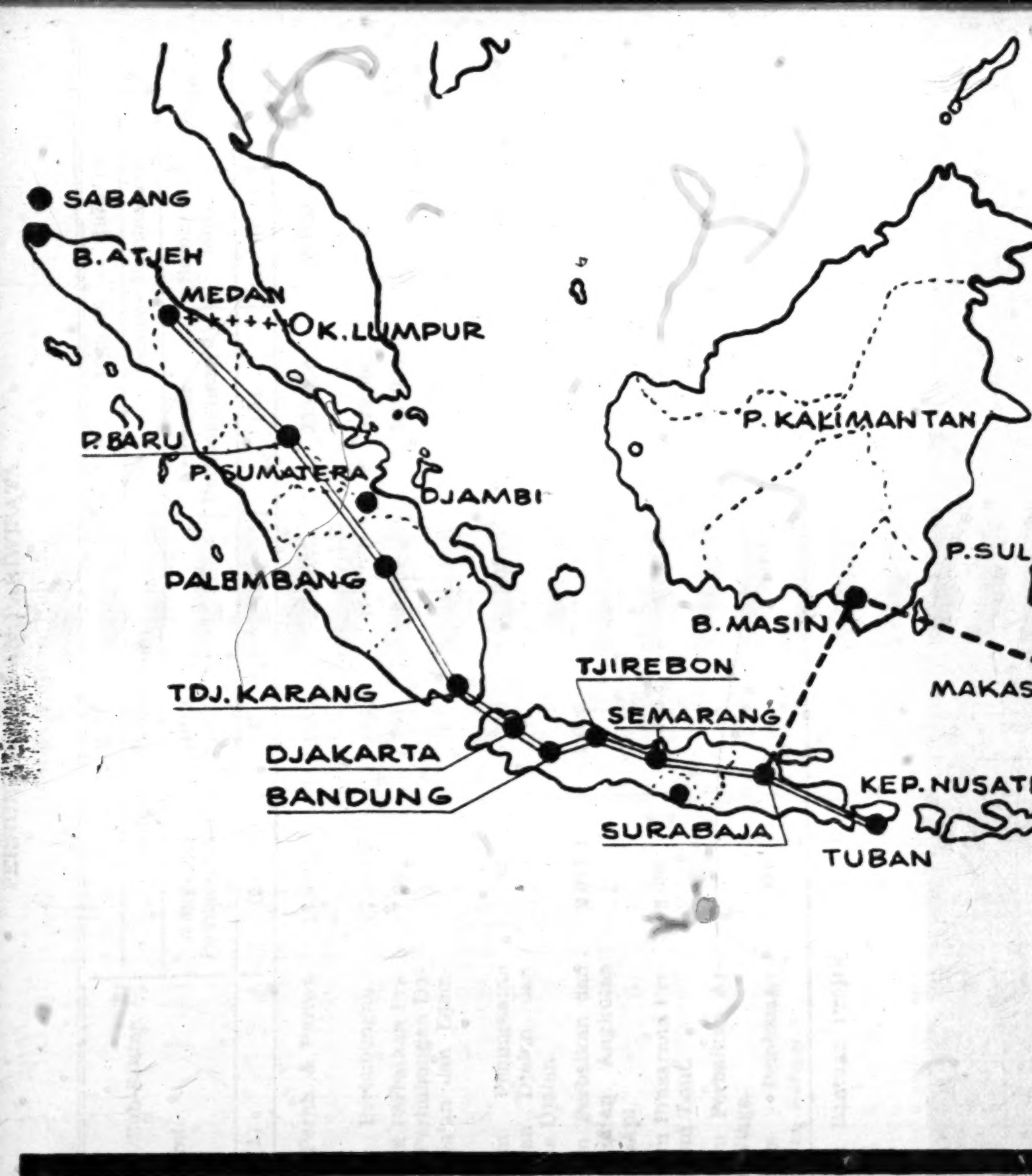
SABANG
B. ATJEH
MEDAN
OK. LUMPUR
P. BARU
P. SUMATERA
DJAMBI
PALEMBANG
TDJ. KARANG
P. KALIMANTAN
P. SUL
B. MASIN
MAKAS
TJIREBON
SEMARANG
DJAKARTA
BANDUNG
KEP. NUSAT
SURABAJA
TUBAN
TRANSMISI MICRO-WAVE
" TROPO - SCATTER
" RADIO SINAR/VHF

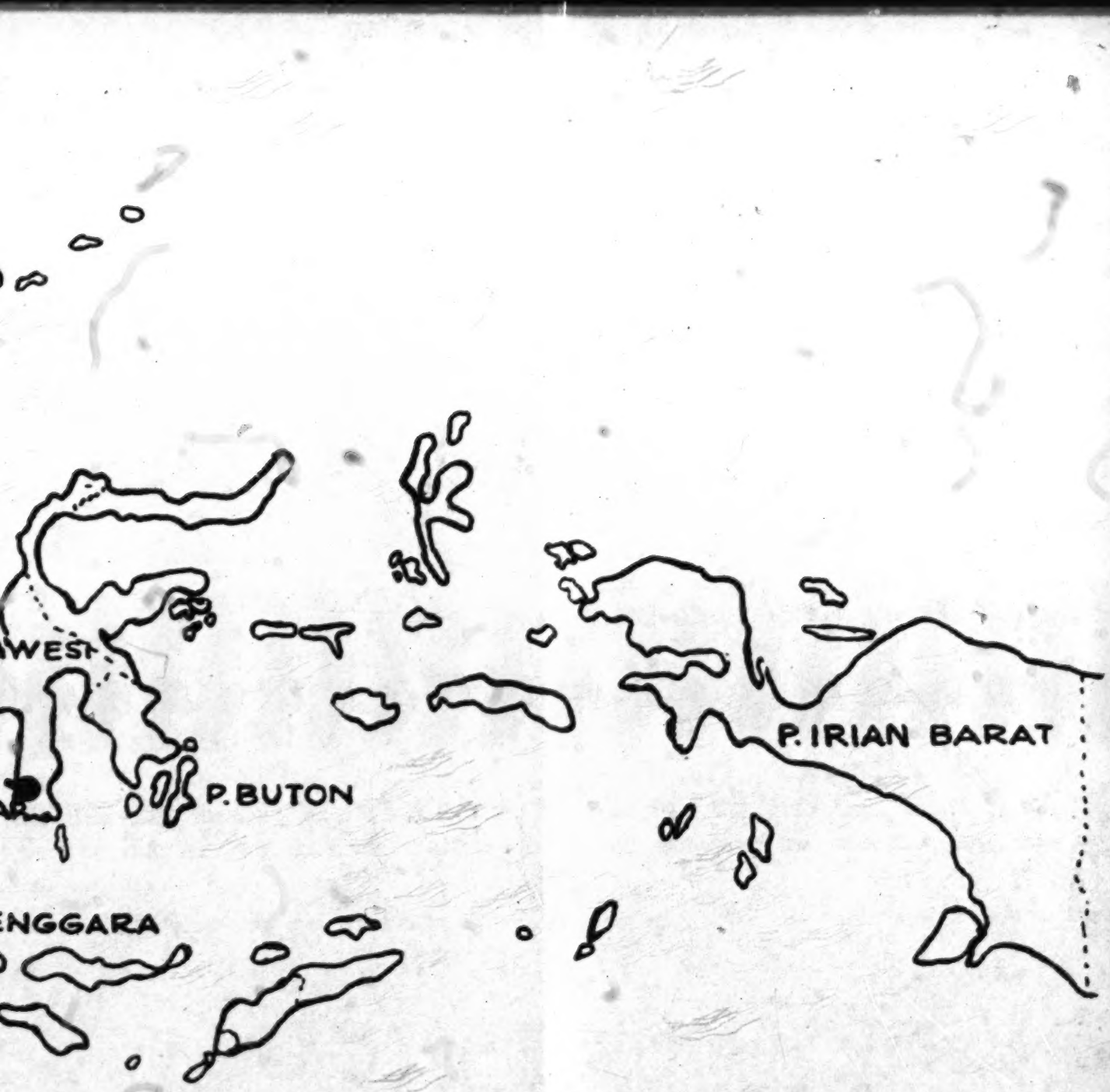

SUB SEKTOR : PERHUBUNGAN
POS DAN TELEKOMUNIKASI

TABEL VIII-F - I

PEMBIAJAAN RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
(1969/70 — 1973/74)
PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
(dalam djutaan Rupiah)

Bidang/Sektor/Sub-Sektor. Program Bidang Ekonomi	1969/70			1969/70 — 1973/74		
	Sumber Pembiajaan			Sumber Pembiajaan		
	Anggaran Pembangunan	Bantuan Projek	Total	Anggaran Pembangunan *)	Sumber² lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Sektor Perhb. & Pariwisata.	17.982,2	9.138,5	27.120,7	230.000	35.000	265.000,—
1. Sub-Sektor Perhubungan :	17.932,2	9.138,5	27.070,7	229.500	33.300	262 800,—
a. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Darat (Djalan dan Djembatan).	7.000	1.701	8.701	100.000	—	100.000,—
b. Program Peningkatan Angkutan Djalan dan Fasilitas Djalan.	90	315	405	4.100	8.300	12.400,—
c. Program Perbaikan dan Peningkatan Angkutan Kereta-Api.	2.978,2	2.009	4.987,2	33.250	—	33.250,—
d. Program Prasarana Perhubungan Laut.	3.688	3.045,4	6.733,4	45.020	—	45.020,—
e. Program Perbaikan Armada Niaga.	—	—	—	—	9.500	9.500,
f. Program Pembinaan Angkutan Sungai.	110	—	110	600	—	600

*) Termasuk Bantuan Projek.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
g. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Udara.	1.560	1.053,5	2.613,5	21.280	3.000	24.280,-
h. Program Pembinaan Armada Udara Niaga.			*)		6.000	6.000,-
i. Program Peningkatan Djasa Pos dan Giro.	110		110	1.250		1.250,-
j. Program Perbaikan dan Peningkatan Djasa Telekomunikasi.	2.396	1.014,6	3.410,6	24.000	6.500	30.500,-
2. Sub-Sektor Pariwisata.	50		50	500	1.700	2.200,-
Program Pengembangan Pariwisata.	50		50	500	1.700	2.200,-
B. **Kegiatan-kegiatan Perhubungan dan Pariwisata jang pembiajaannja diperhitungkan dalam sektor-sektor lain.**						
a. } Tidak ada. b. }						

*) Belum dimasukkan pembiajaan dari sumber-sumber lain jang sebagian akan di-disburs dalam tahun 1969

B. PARIWISATA

Pendahuluan.

Kepariwisataan merupakan faktor potensiil didalam usaha pembangunan. Dengan memanfaatkan dan memperkembangkan segi ini dapat ditimbulkan maupun ditingkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi dibidang djasa-djasa, industri keradjinan rakjat serta pendjualan barang-barang. Dengan demikian kegiatan-kegiatan pariwisata, baik nasional maupun internasional, dapat mentjiptakan serta memperluas lapangan kerdja maupun memberikan pengaruh perkembangan terhadap sektor-sektor lainnja.

Indonesia memiliki potensi-potensi kepariwisataan jang tjukup besar dan tersebar, baik dalam segi kebudajaan maupun segi alam, termasuk flora, fauna dan lain-lain (lihat Gambar 1). Letak geographis Indonesia antara kontinen Asia dan kontinen Australia menguntungkan dalam route tudjuan wisatawan-wisatawan internasional dan memberikan harapan bagi perkembangan kepariwisataan Asia Timur (lihat Gambar 2).

Sebaliknja, objek-objek kepariwisataan jang telah berkembang dinegara-negara tetangga, seperti Hawaii, Tokyo, Hongkong, Kambodja, Muangthai, Guam, Ceylon, Tahiti, Australia dan New Zealand, mentjiptakan route-route kepariwisataan internasional, jang menguntungkan kepariwisataan Indonesia. Demikian pula, adanja negara-negara tetangga jang telah memiliki tingkat pendapatan jang tinggi, sehingga merupakan sumber-sumber dari wisatawan-wisatawan, seperti Djepang, Hongkong, Australia dan New Zealand, memberikan kemungkinan jang mejakinkan bagi Indonesia, untuk mengusahakan sektor pariwisata sebagai sektor penghasil devisa jang tjukup besar.

Keadaan dan Masalah.

Djumlah wisatawan internasional jang dewasa ini mengundjungi Indonesia, mentjapai sekitar 30.000 orang setahunnja. Djumlah ini adalah sangat ketjil, apabila dibandingkan dengan adanja potensi-potensi wisatawan maupun arus wisatawan-wisatawan internasional jang terdjadi dinegara-negara tetangga, seperti Hongkong (900.000), Djepang (800.000) Muangthai (800.000) dan Australia (350.000).

Gambaran diatas, disatu pihak memberikan harapan jang baik untuk dapat meningkatkan kegiatan pariwisata internasional di Indonesia dan dilain pihak mengingatkan akan masih banjak terdapatnja kekurangan-kekurangan maupun hambatan-hambatan disektor kepariwisataan di Indonesia.

a) Mengenal kepariwisataan Indonesia dari segi pengetahuan umum :

Objek-objek pariwisata di Indonesia, chususnja Bali, telah dapat menarik perhatian dan dikenal diseluruh dunia, terutama segi kebudajaannja jang mempunjai tjiri chas. Terkenalnja Bali dari segi ini adalah bersifat kekal, tidak terpengaruhi oleh perkembangan politik masa lampau di Indonesia. Ini adalah sesuatu jang sangat berharga dan sudah seharusnja dimanfaatkan bagi perkembangan pariwisata dimasa mendatang.

b) Mengenal kepariwisataan Indonesia dengan melalui promotion :

Telah banjak dilakukan usaha-usaha promotion. Namun peranan daripada promotion itu didalam masalah kepariwisataan keseluruhannja adalah belum banjak menentukan. Hal ini disebabkan karena masih banjaknja pelajanan-pelajanan, jang njata kurang memuaskan bagi wisatawan-wisatawan luar negeri, terutama jang menjangkut segi perhubungan, pengangkutan serta lingkungan kehidupan jang seharusnja memenuhi sjarat-sjarat kesehatan dan kebersihan serta keamanan.

c) Situasi politik dan keamanan :

Adanja perobahan pada situasi politik telah dirasakan dengan tjepat pengaruhnja pada kegiatan-kegiatan pariwisata.

Keadaan stabilisasi politik jang relatif baik dewasa ini telah menimbulkan kembali hasrat para wisatawan-wisatawan internasional untuk mengundjungi Indonesia. Adapun situasi keamanan dewasa ini sedemikian rupa sehingga masih banjak memintakan perhatian. Gangguan keamanan memberikan pengaruh negatif kepada perkembangan kepariwisataan.

d) Fasilitas penerbangan sampai kepintu gerbang Indonesia, Kemajoran :

Berdasarkan djumlah flight jang sedang berlangsung dewasa ini, penerbangan dari luar negeri memungkinkan untuk memperoleh kundjungan wisatawan sebanjak lebih dari 150.000 orang setahunnja. Mengingat bahwa pada umumnja para wisatawan internasional mengikuti suatu rangkaian program tertentu, maka ditindjau dari frekwensi penerbangan jang masuk ke Indonesia, angka tersebut belum tertjapai.

e) Fasilitas penerbangan dalam negeri :

Djumlah tempat duduk jang tersedia untuk membawa wisatawan sampai ketempat tudjuan mentjukupi. Akan tetapi karena frekwensi penerbangan rendah maka djumlah tempat duduk mendjadi tidak tjukup lagi. Sebagai tjontoh, penerbangan dari Kemajoran ke Bali dapat menampung sebanjak 30.000 wisatawan setahunnja, sedangkan hanja kira-kira sebanjak 10.000 orang sadja jang berkundjung ke Indonesia melandjutkan perdjalanannja ke Bali, berarti ⅓ dari seluruh wisatawan jang berkundjung ke Indonesia. Padahal, sebenarnja objek pariwisata jang dikenal adalah djustru pulau Bali.

f) Penjelesaian imigrasi dan douane :

Masih terdapat kesulitan-kesulitan proseduril dan hambatan-hambatan didalam penjelenggaraannja.

g) Penginapan dengan akomodasi internasional :

Penginapan dengan akomodasi internasional telah terdapat ditiga daerah dengan kapasitas berupa kamar sebagai berikut :

Djawa Barat = 792 kamar
Djawa Tengah = 112 kamar
Pulau Bali = 465 kamar

Dengan djumlah kamar-kamar tersebut diperkirakan sebanjak lebih 150.000 orang dalam setahunnja dapat ditampung. Akan tetapi karena djumlah tersebut hanja terkonsentrasikan pada beberapa tempat sadja, maka untuk perkembangan kegiatan pariwisata selandjutnja diperlukan penambahan djumlahnja.

h) Penjadjian objek-objek pariwisata, rekreasi, pertundjukan-pertundjukan serta pelajanan umum dan swasta pada umumnja :

Objek-objek pariwisata pada umumnja memerlukan banjak perhatian dalam hal pemeliharaan dan peningkatan mutu. Tambahan pula tempat-tempat rekreasi jang memenuhi sjarat-sjarat kesehatan dan kebersihan belum tjukup tersedia. Pertundjukan-pertundjukan memerlukan seleksi maupun peningkatan mutu dan pengarahan tehnik penjadjiannja, untuk menghindarkan kesan-kesan jang mendjemukan. Selain daripada itu pelajanan umum, terutama jang menjangkut segi djalan-djalan darat, angkutan umum dan perhubungan, pada umumnja belum lantjar. Hal ini pada umumnja meletihkan wisatawan. Demikian pula jang berupa tempat-tempat umum, seperti taman-taman dan tempat-tempat istirahat, masih kurang mendapat perhatian. Rumah-rumah makan/minum dan kedai-kedai makanan jang memenuhi sjarat-sjarat kesehatan dan kebersihan belum tjukup tersedia dan tersebar. Padahal, dengan adanja tempat-tempat demikian ini, para wisatawan dapat lebih mengikuti sebagian dari kehidupan masjarakat setempat, sehingga menimbulkan suasana jang lebih menarik.

Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan.

a) Pada tingkat perkembangan dewasa ini kegiatan pembangunan dibidang pariwisata tidak dilakukan setjara menjeluruh dan bersamaan, melainkan dipusatkan terlebih dahulu dipulau

Bali. Kemudian penjebaran kegiatan pariwisata diatur dan diarahkan dengan bertolak dari pulau Bali. Namun demikian ini bukan berarti, bahwa segala kegiatan pariwisata dilain-lain daerah tidak mendapatkan perhatian, melainkan tetap akan dilakukan persiapan-persiapan kearah perkembangan seterusnja.

b) Biaja-biaja pembangunan dibidang pariwisata jang mendjadi beban Anggaran Negara, adalah untuk prasarana serta pelajanan-pelajanan jang bersifat umum, sedangkan selebihnja dibebankan kepada sektor swasta.

c) Pengembangan pariwisata untuk wisatawan dalam negeri, pada tingkat perkembangan dewasa ini akan dibina oleh daerah, sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah serta sedjalan dengan rentjana perkembangan daerah jang bersangkutan.

d) Mentjiptakan iklim jang mendjamin pengembangan kepariwisataan.

Langkah-langkah.

a. Membagi wilajah Indonesia mendjadi tiga bagian, jaitu Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur (lihat Gambar 3). Masing-masing akan diperkembangkan menurut tahap-tahap. Pertama, Indonesia bagian Tengah jang berpusat di Bali dengan meliputi wilajah-wilajah Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kedua, Indonesia bagian Barat jang berpusat di Medan dengan meliputi wilajah-wilajah objek-objek pariwisata Sumatera Utara.

b. Menarik wisatawan internasional ke Indonesia. Sebagian terbesar dapat diperhitungkan sebagai penumpang-penumpang dari perusahaan-perusahaan penerbangan (85 sampai 90 persen). Langkah-langkah jang akan diambil adalah: pertama, meningkatkan promosi diluar negeri, dengan membuka kantor-kantor tjabang kepariwisataan di Djepang, Australia, Eropah dan Amerika Utara. Kedua, penjelesaian lapangan terbang Tu-

ban/Bali untuk memungkinkan pendaratan penerbangan-penerbangan luar negeri setjara langsung, dengan frekwensi penerbangan jang besar.

c. Memperbaiki pelajanan para wisatawan di Indonesia dengan mengadakan usaha-usaha rehabilitasi serta peningkatan potensi-potensi objek pariwisata. Bersamaan dengan itu mengadakan penelitian dan penjelidikan dalam rangka promosi jang terarah dan sistimatis. Setelah selesai usaha-usaha tersebut diatas, baru akan diadakan pengembangan baru objek-objek pariwisata. Selain itu hambatan-hambatan akan dikurangi melalui pembentukan "National Facilitation Committee", jang mempersiapkan semua peraturan-peraturan dan tjara pelaksanaan jang memudahkan dan menghilangkan hambatan-hambatan masuknja wisatawan-wisatawan ke Indonesia, misalnja dalam bentuk "special air agreement". Selandjutnja akan dibentuk "Tourist Information Centres" dalam tahun 1969 terutama di Bali dan Djakarta, sedangkan package tours akan diperkembangkan.

Kemudian pendidikan akan ditingkatkan untuk memperting-gi mutu keahlian dalam bidang travel dan bidang perhotelan. Disamping itu lembaga-lembaga pendidikan pariwisata akan ditingkatkan sedangkan pembinaan dan perlindungan objek-objek kepariwisataan akan diintensipkan.

d. Memperbaiki pelajanan kepada para wisatawan di Indonesia, chususnja di Bali. Untuk itu kegiatan-kegiatan akan dipusatkan disuatu daerah terbatas jaitu meliputi daerah lingkar Denpasar — Kintamani — Singaradja — Bedugul — Denpasar. Didaerah tersebut dipersiapkan setjara lengkap dan matang, terutama dalam hubungannja dengan sjarat-sjarat internasional jang harus terpenuhi. Daerah tersebut selandjutnja dipergunakan sebagai tjontoh bagi daerah-daerah lainnja.

Perintjian berupa projek-projek dapat diikuti pada Lampiran I dan chususnja untuk Pulau Bali dapat diikuti pula pada Gambar 4.

LAMPIRAN I

PERINTJIAN PROJEK-PROJEK TAHUN 1969 — 1970

I. Rehabilitasi prasarana/sarana-sarana objek pariwisata

(akomodasi, komunikasi serta pelajanan dan lain-lain).

A. PERHUBUNGAN

Perhubungan darat :

a. **B a l i** — rehabilitasi/up-grading djalan-djalan utama seperti: Denpasar — Kintamani — Singaradja — Bedugul — Denpasar dan Denpasar — Karangasem — Singaradja — Gilimanuk — Denpasar dan Pengastulan — Antosari.

b. **Djawa Timur** — up-grading djalan-djalan jang menghubungkan Bali dengan Surabaja — Jogja dan Djakarta.

— djalan-djalan penghubung ke Baluran dan Bremo.

c. **Djawa Tengah** — Jogja — Borobudur (Mungkil — Borobudur).

— Jogja — Dieng (circular road diatas Dieng).

— djalan-djalan disekitar Prambanan.

Perhubungan Laut :

a. **B a l i** — rehabilitasi pelabuhan ferry Gilimanuk — Banjuwangi.

— rehabilitasi pelabuhan Benoa dan Padang baai.

Perhubungan Udara :

a. **B a l i** — penjelesaian/peningkatan kapasitas airport Tuban.

b. **Djawa Timur** — up-grading fasilitas airport Djuanda-Waru.

c. **Djawa Tengah** — up-grading fasilitas airport Adisutjipto.

d. **Djakarta** — peningkatan kemampuan airport Kemajoran.

Telekomunikasi — peningkatan telekomunikasi Denpasar — Gilimanuk — Banjuwangi — Surabaja — Jogjakarta — Djakarta.

— peningkatan dan pengadaan telekomunikasi lokal di Bali, Denpasar — Gianjar — Tampaksiring — Kintamani — Singaradja — Bedugul — Denpasar.

— peningkatan telekom antara pusat-pusat pariwisata di Indonesia Tengah dengan negara-negara sumber wisatawan dan objek-objek pariwisata internasional, chususnja pariwisata „Pasifik" dengan melewati telex internasional dan setelite station Djatiluhur.

B. **PELAJANAN** (akomodasi dan pengangkutan).

Akomodasi — up-grading akomodasi jang telah ada.

— pembangunan prototype-prototype tourist-village dan motel system di Bali dan Djakarta, Jogja.

Transport	—	peningkatan transport lokal di Bali — Djakarta — Djawa Tengah — Djawa Timur — Sumatera Utara.
	—	up-grading pengangkutan djarak djauh Djakarta — Jogja — Surabaja — Bali.
Air Minum & Listrik	—	peningkatan dan rehabilitasi pelajanan air minum dan listrik di Bali dan Djawa Tengah.

II. **Pembinaan Rehabilitasi & Restorasi Objek-objek Pariwisata.**

Pembinaan melalui kontrol jang aktip bagi perkembangan/pembangunan daerah-daerah kepariwisataan di Bali (Denpasar, Sanur, Ubud, Kintamani dan lain-lain).
Restorasi/rehabilitasi objek-objek pariwisata di Bali, antara lain mesium Denpasar — Pura Besakih dan lain-lain dan di Djawa Tengah: Borobudur, Tamansari, Dieng

III. **Lain-lain kegiatan dibidang kepariwisataan.**

Pendidikan untuk peningkatan mutu keahlian dibidang travel dan perhotelan dengan :

a. Pendidikan didalam negeri.
b. Job training diluar negeri.

Research dan Survey untuk pembinaan dan penelitian-penelitian jang diperlukan untuk perentjanaan pengembangan kepariwisataan.

GAMBAR 1 ●

1:25.000.000.

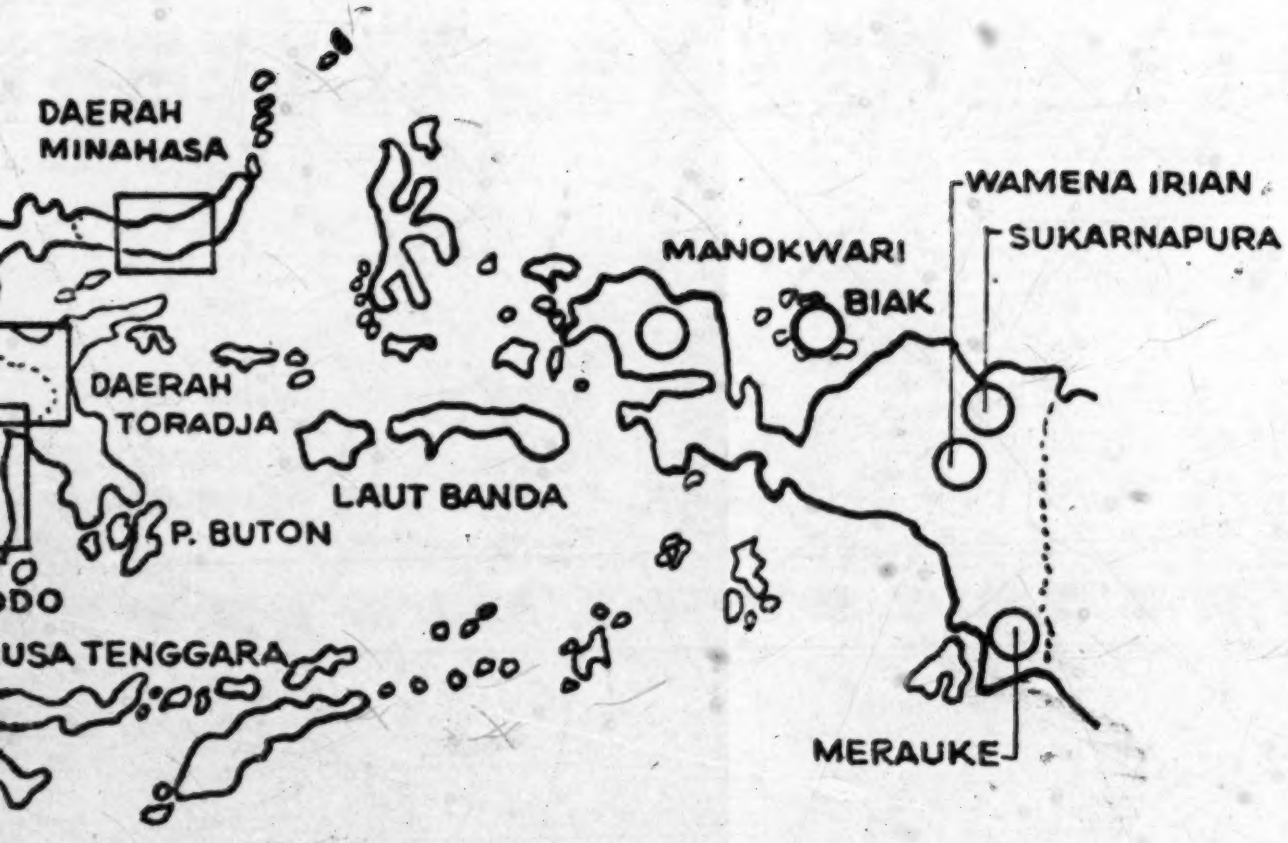

AN

NG DITUNDJUK UNTUK DIKEMBANGKAN

RAH DIMAKSUDKAN TERUTAMA UNTUK PARIWISATA INTERNASIONAL (PRIORITAS) ●

NG DITUNDJUK UNTUK STABILISASI

RAH JG. DAPAT MENDUKUNG PERKEMBANGAN DAERAH ● A

RAH JG. DIMAKSUDKAN UNTUK PARIWISATA NASIONAL (REGIONAL)

RAH JG. DITUNDJUK SEBAGAI TJALON PENGEMBANGAN

GAMBAR 2

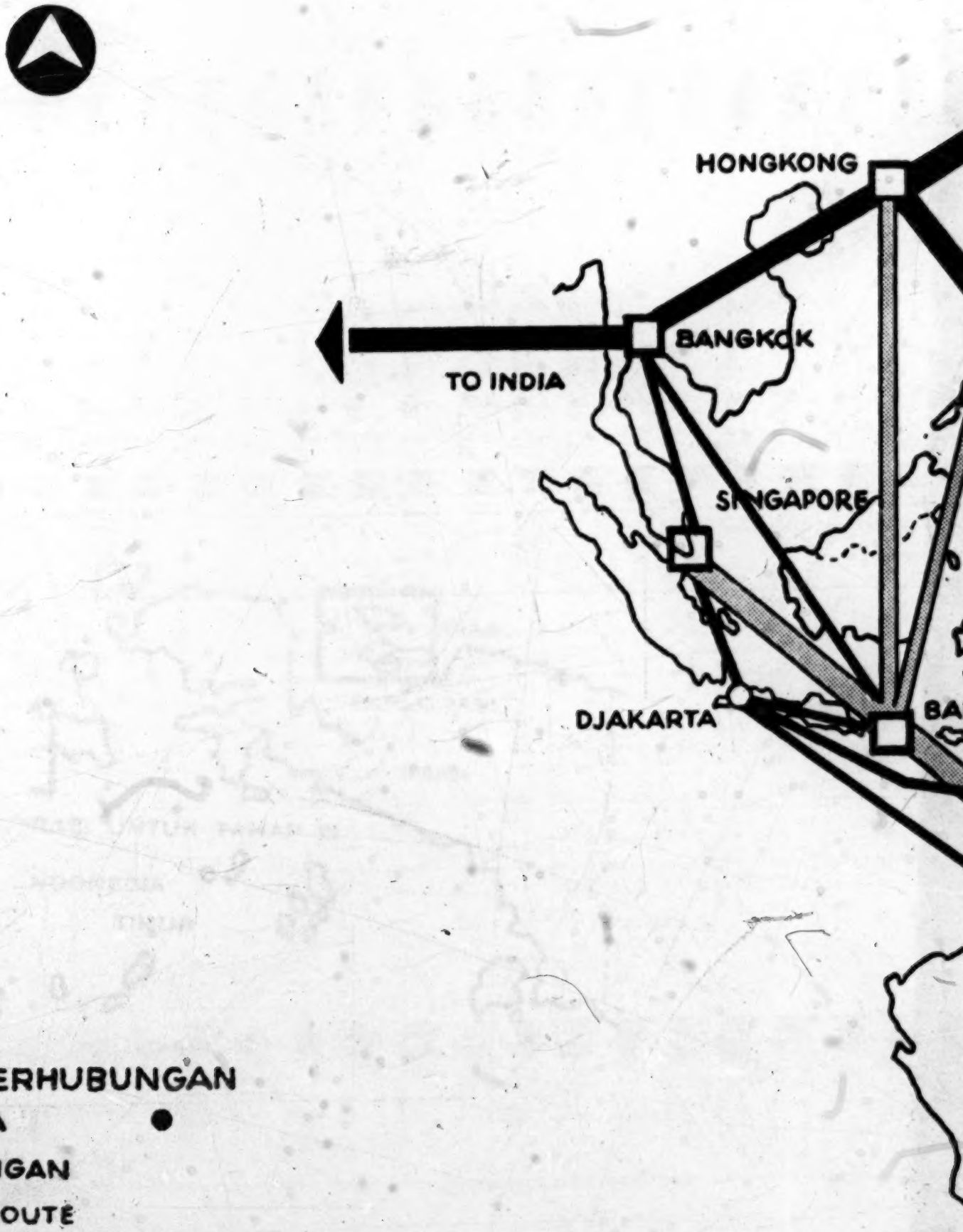

PETA PERHUBUNGAN UDARA

KETERANGAN

ROUTE JANG ADA

KEMUNGKINAN ROUTE BARU

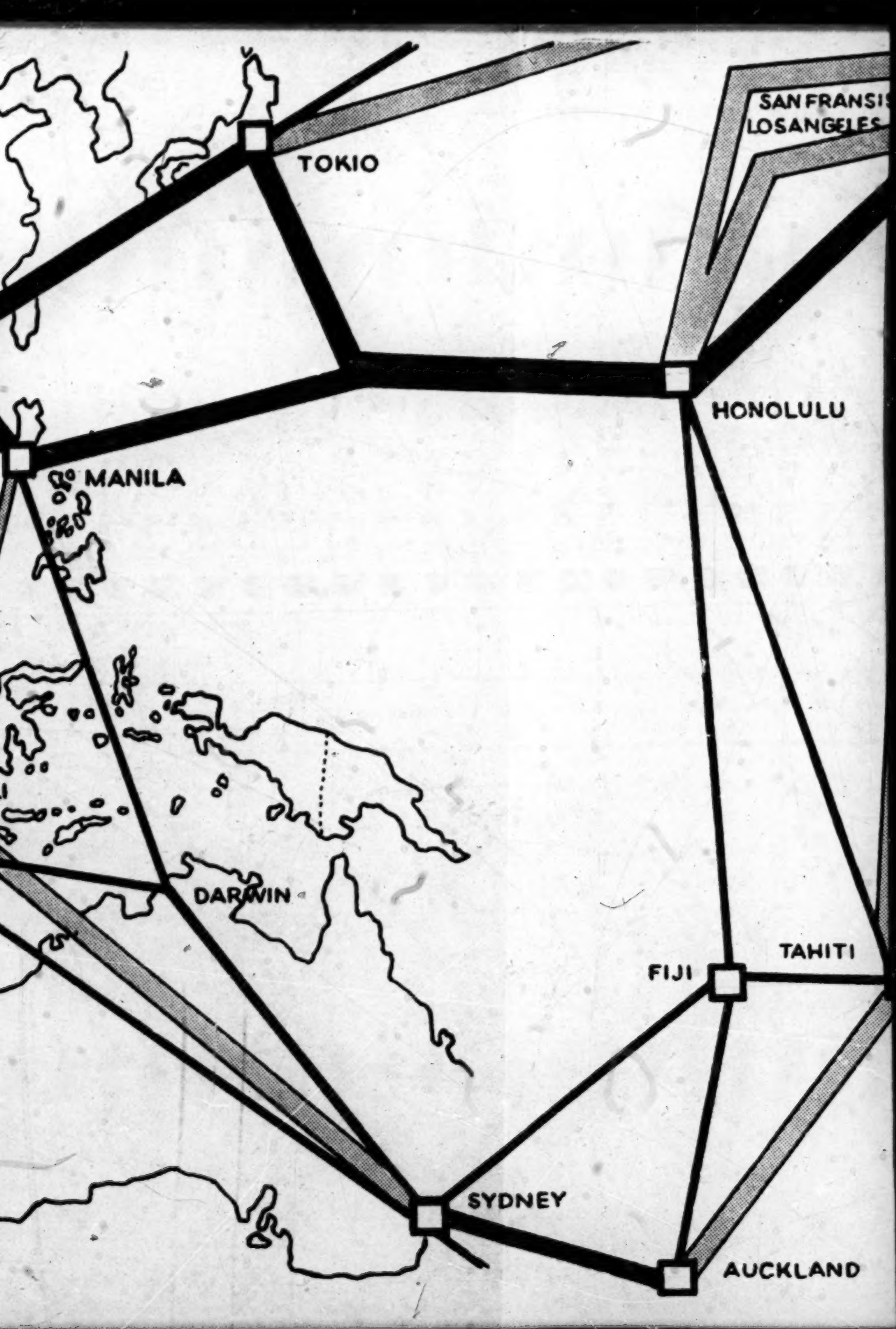
TOKIO
SAN FRANSIS
LOSANGELES
HONOLULU
MANILA
DARWIN
TAHITI
FIJI
SYDNEY
AUCKLAND

GAMBAR 2

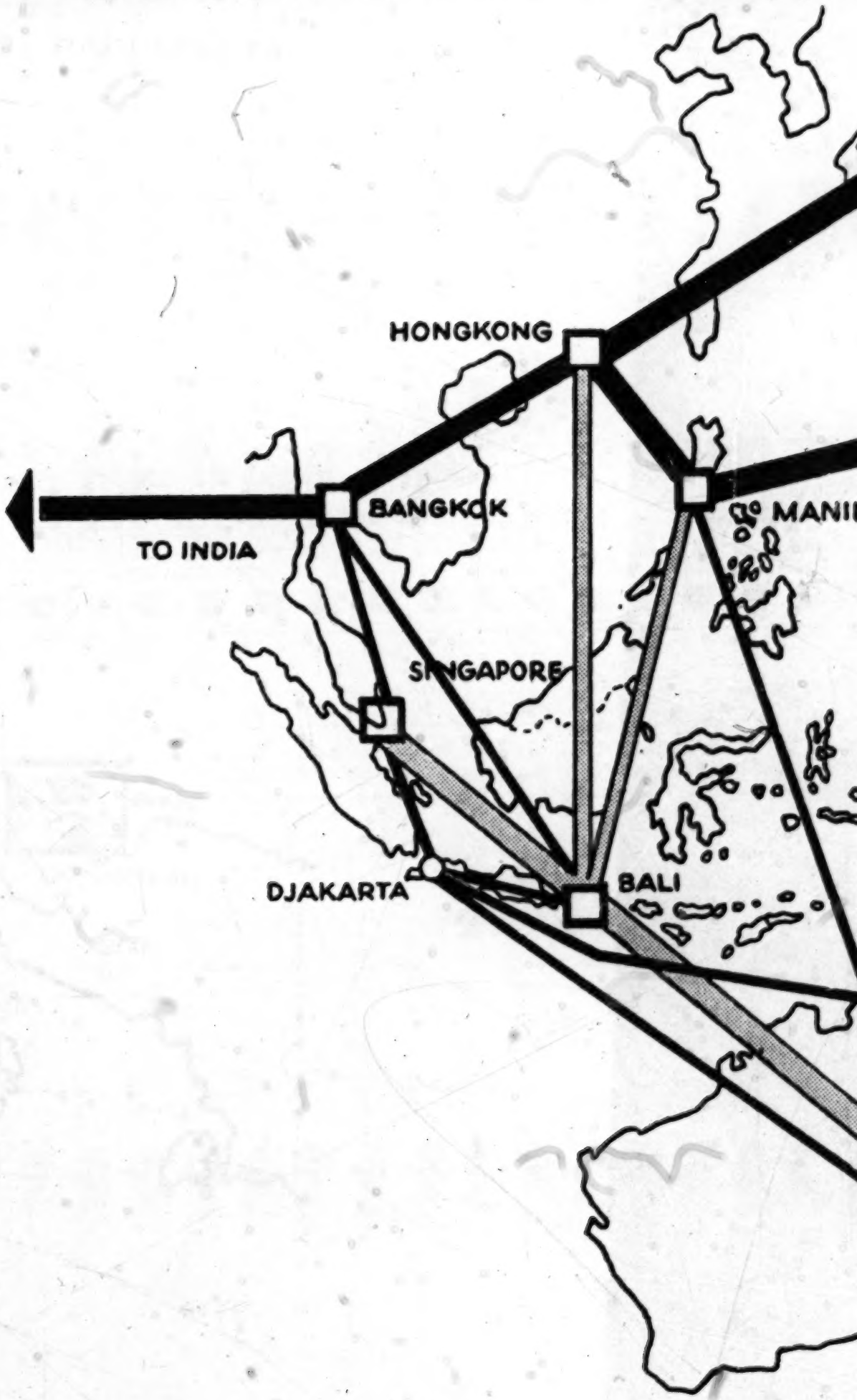

HUBUNGAN

N

TE

ADA

UNGKINAN

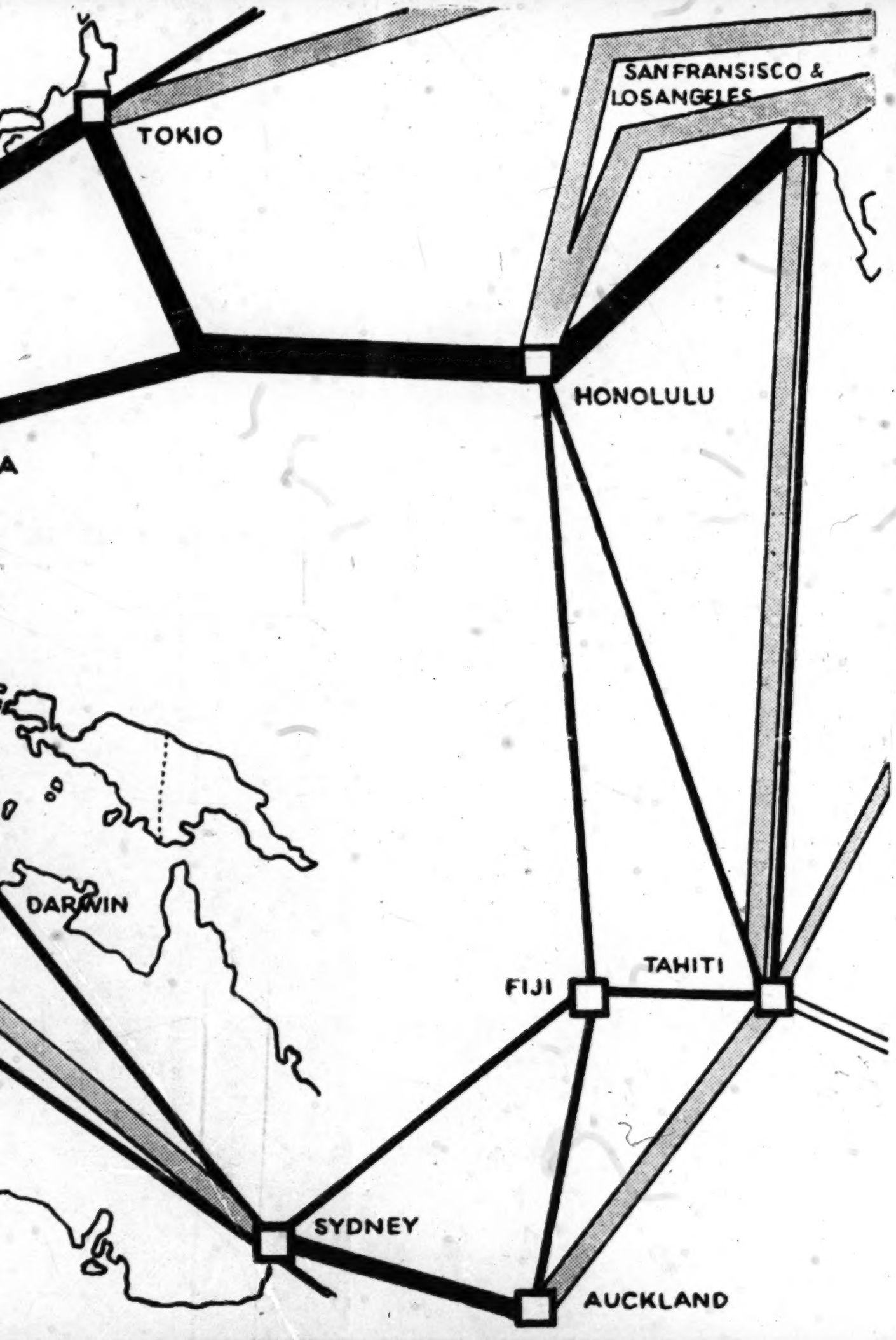
SAN FRANSISCO &
LOSANGELES
TOKIO
HONOLULU
DARWIN
TAHITI
FIJI
SYDNEY
AUCKLAND

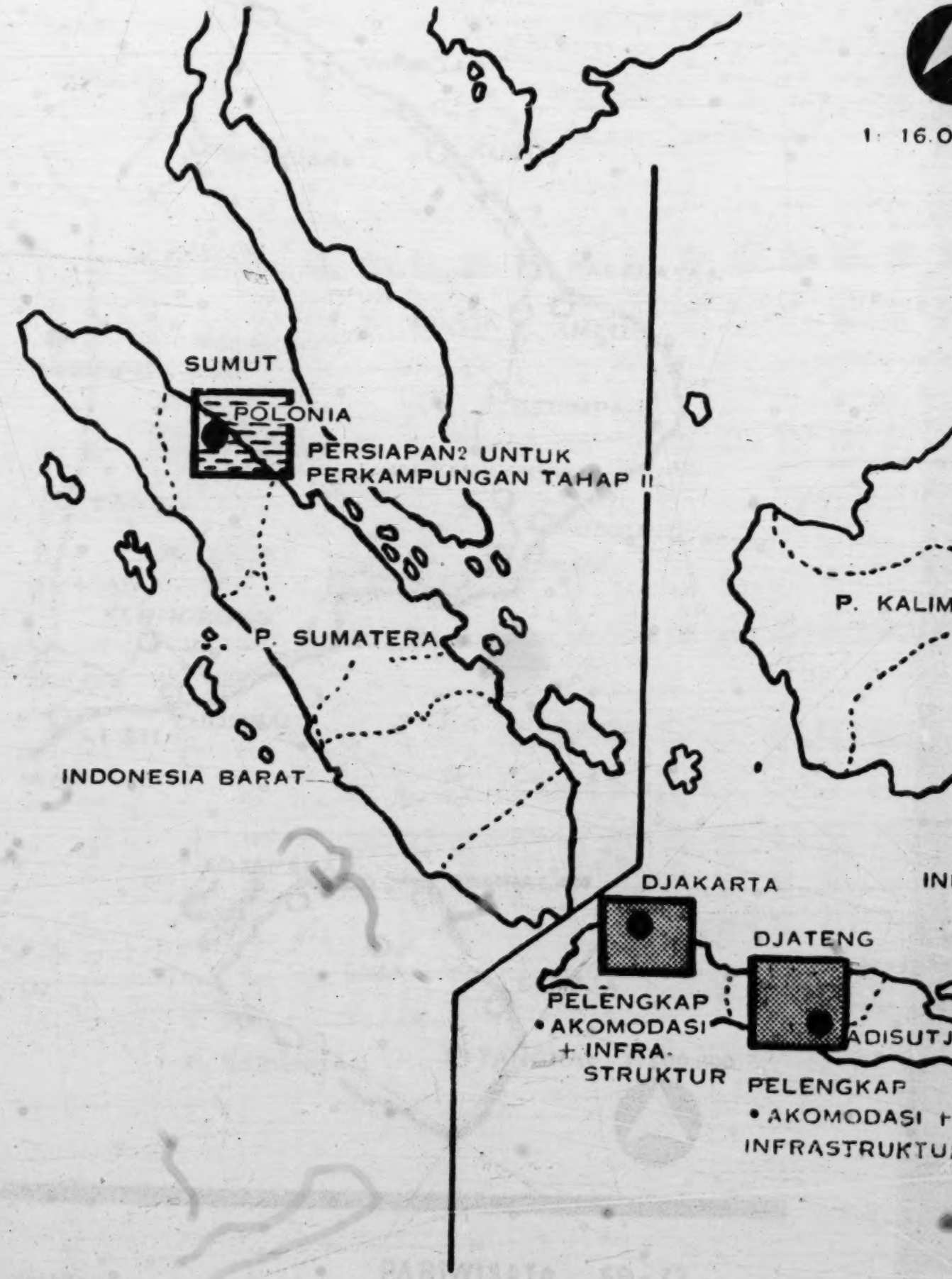
1 : 16.0
SUMUT
POLONIA
PERSIAPAN2 UNTUK
PERKAMPUNGAN TAHAP II
P. SUMATERA
INDONESIA BARAT
P. KALIM
DJAKARTA
DJATENG
PELENGKAP
• AKOMODASI
+ INFRA-
STRUKTUR
PELENGKAP
• AKOMODASI +
INFRASTRUKTU

GAMBAR 3 POLA PENGEMBANGA

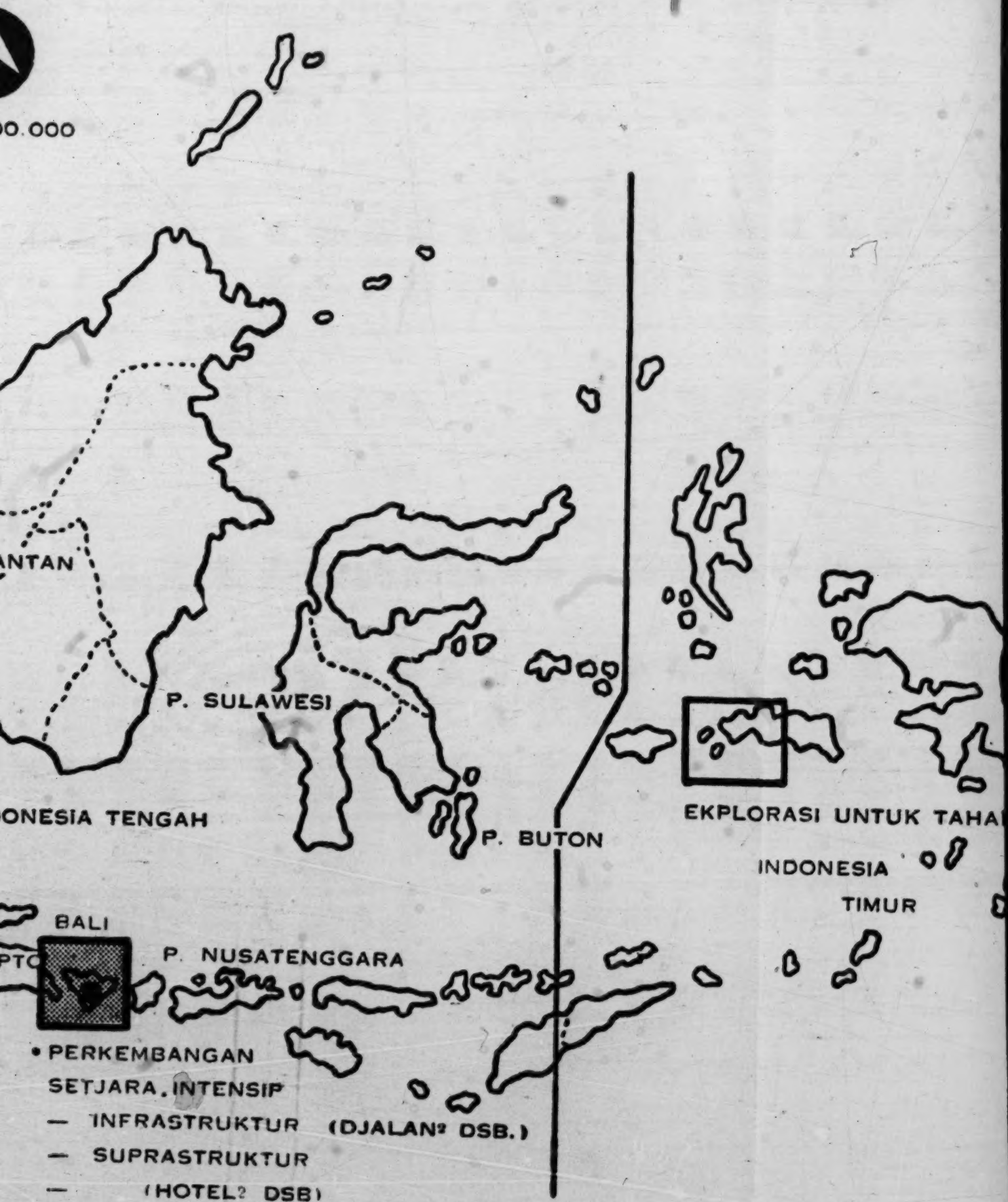

GAMBAR

1 : 16.000.000
SIAPAN2 UNTUK
KAMPUNGAN TAHAP II
TERA
P. KALIMANTAN
P. SULAWESI
INDONESIA TENGAH
DJAKARTA
DJATENG
BALI
P. NUSATENGGARA
PELENGKAP
• AKOMODASI
+ INFRA-
STRUKTUR
ADISUTJIPTO
PELENGKAP
• AKOMODASI +
INFRASTRUKTUR
• PERKEMBANGAN
SETJARA, INTENSIP
— INFRASTRUKTUR (DJALAN
— SUPRASTRUKTUR
— (HOTEL2 DSB)
TAHAP I

3 ● POLA PENGEMBANGAN PARIWISATA

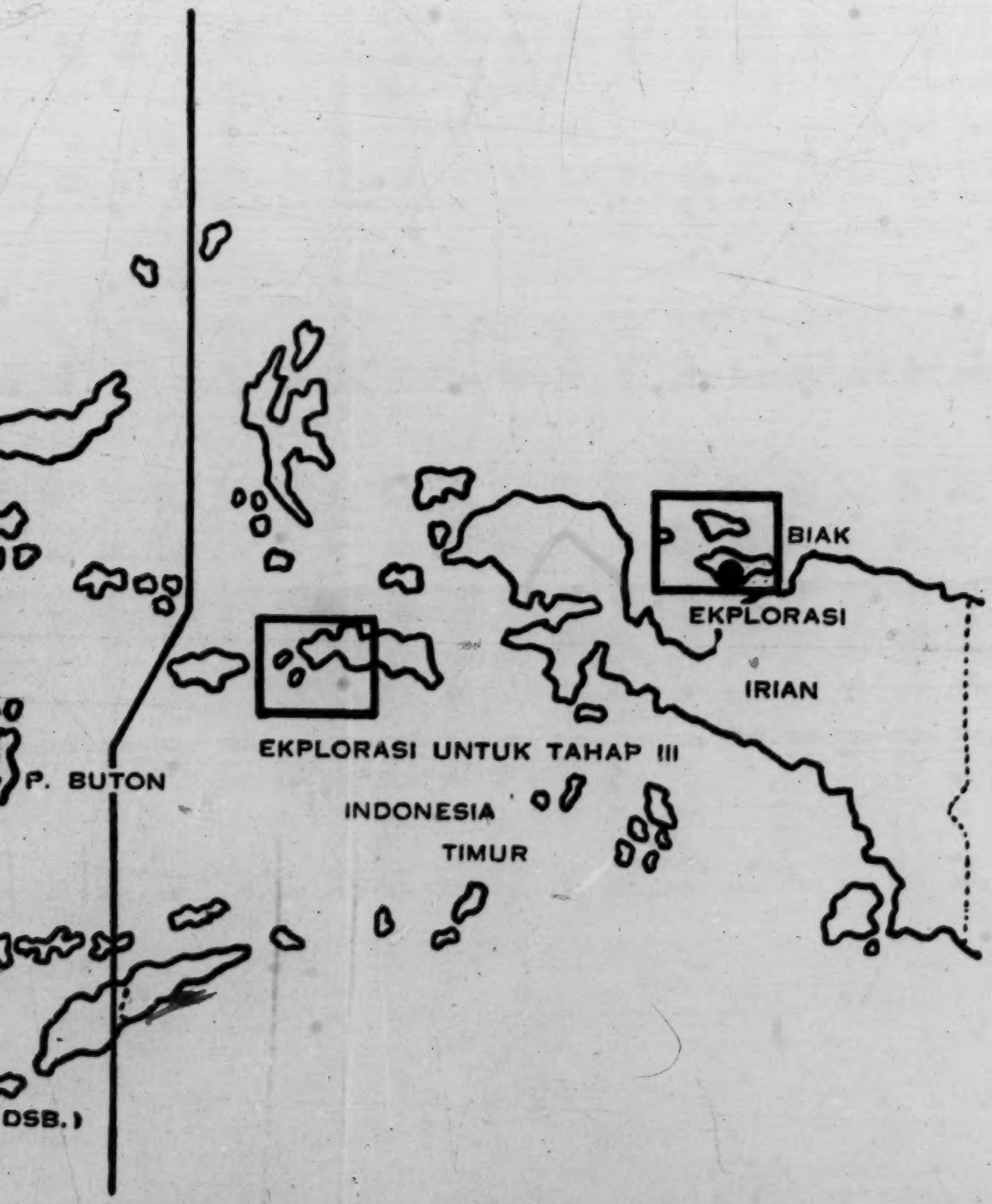

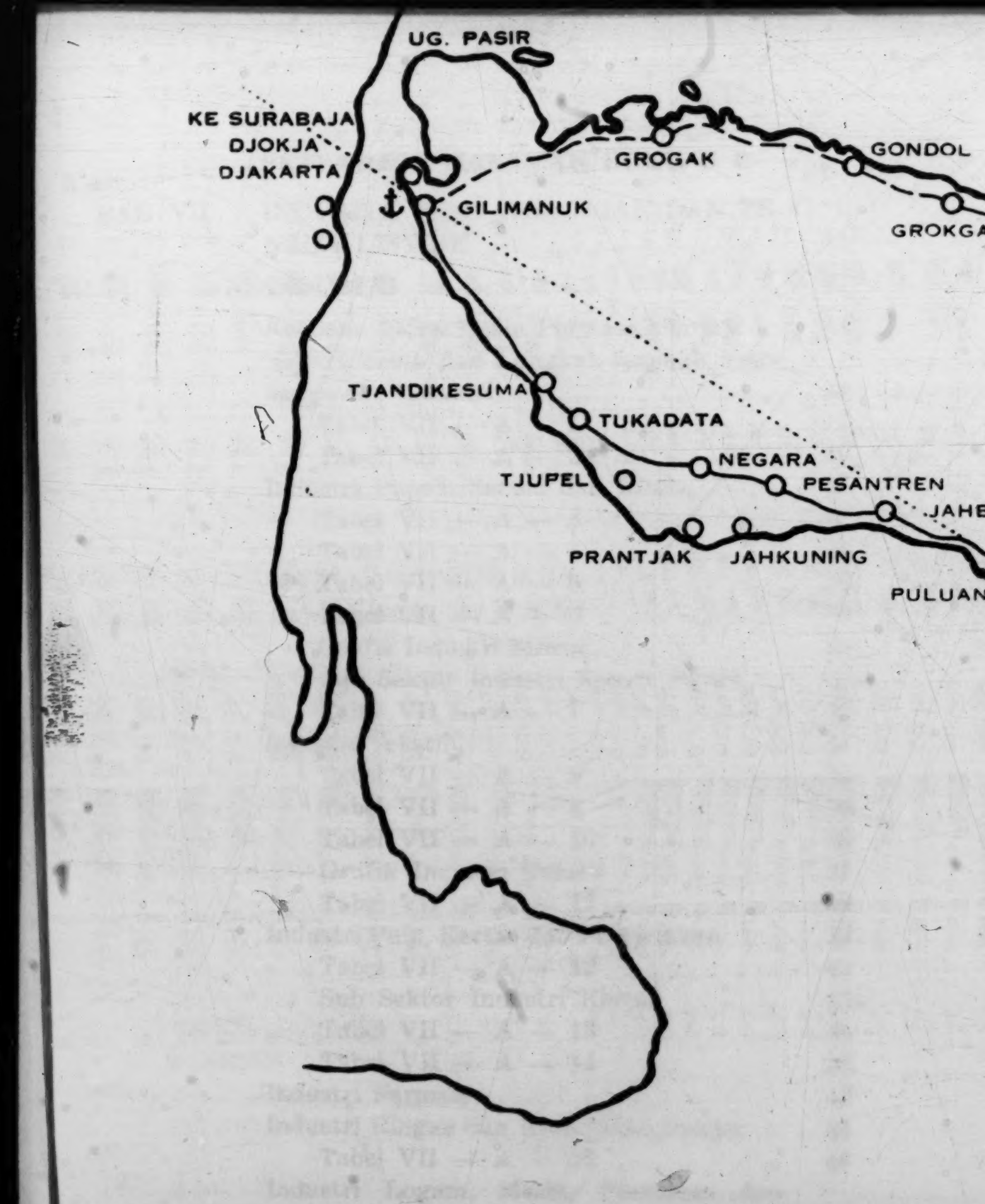

UPGRADING/ REHABILITAS
TAHAP I (1969 - 1970)

UPGRADING/ REHABILITAS
TAHAP II (1970 - 1973)

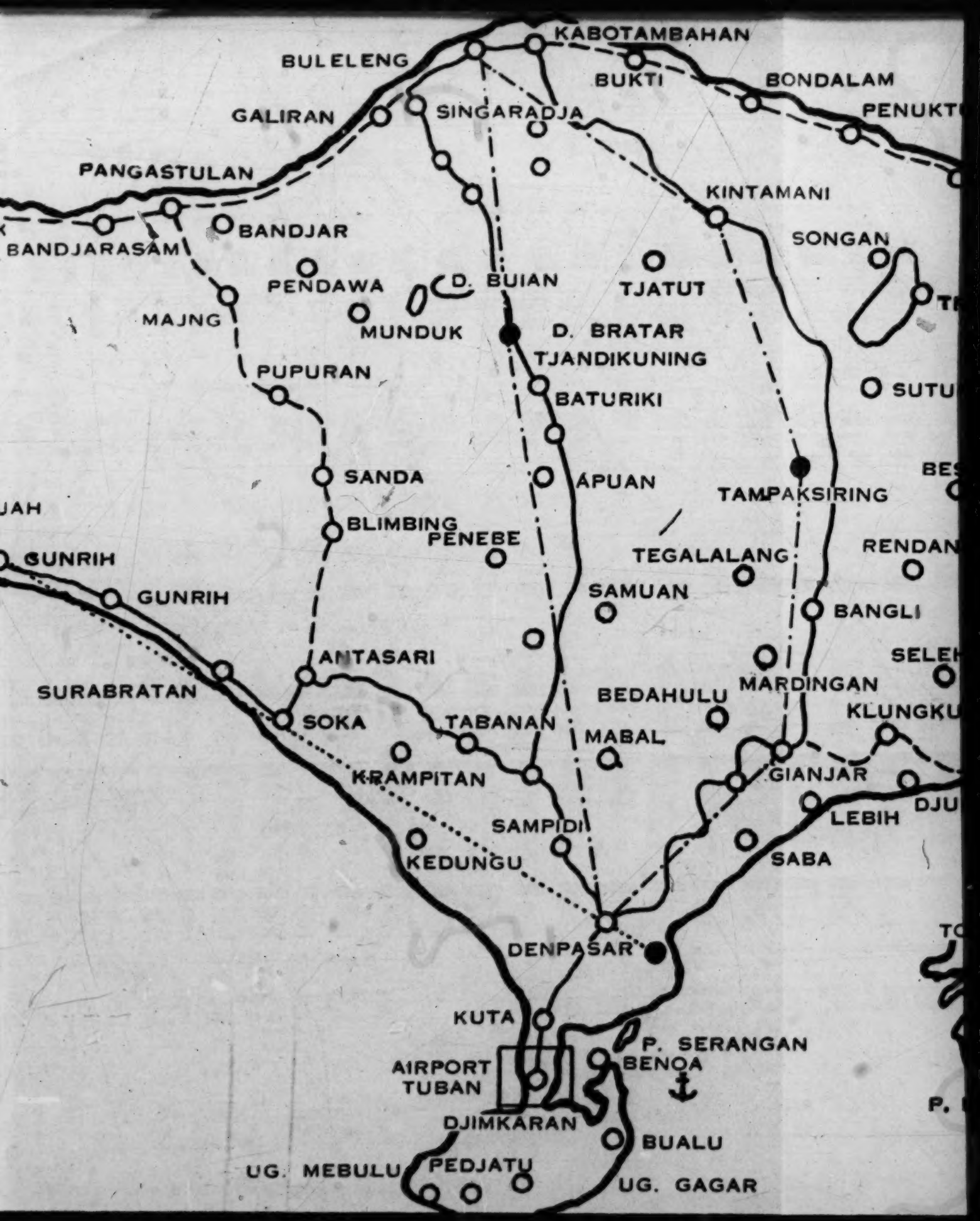
KABOTAMBAHAN
BULELENG
BUKTI
BONDALAM
GALIRAN
SINGARADJA
PENUKT
PANGASTULAN
KINTAMANI
BANDJAR
BANDJARASAM
SONGAN
PENDAWA
D. BUIAN
TJATUT
MAJNG
MUNDUK
D. BRATAR
TJANDIKUNING
PUPURAN
BATURIKI
SUTU
SANDA
APUAN
TAMPAKSIRING
BLIMBING
PENEBE
TEGALALANG
RENDAN
GUNRIH
GUNRIH
SAMUAN
BANGLI
ANTASARI
SELEH
MARDINGAN
SURABRATAN
BEDAHULU
KLUNGKU
SOKA
TABANAN
MABAL
KRAMPITAN
GIANJAR
LEBIH
SAMPIDI
SABA
KEDUNGU
DENPASAR
KUTA
P. SERANGAN
AIRPORT TUBAN
BENOA
DJIMKARAN
BUALU
UG. MEBULU
PEDJATU
UG. GAGAR
DJALAN2/DJEMBATAN
SALURAN TELEKOM
TELEPON LOKAL/REGIONAL
DJALAN2/DJEMBATAN
LOKASI PROTOTIPE PROJECT

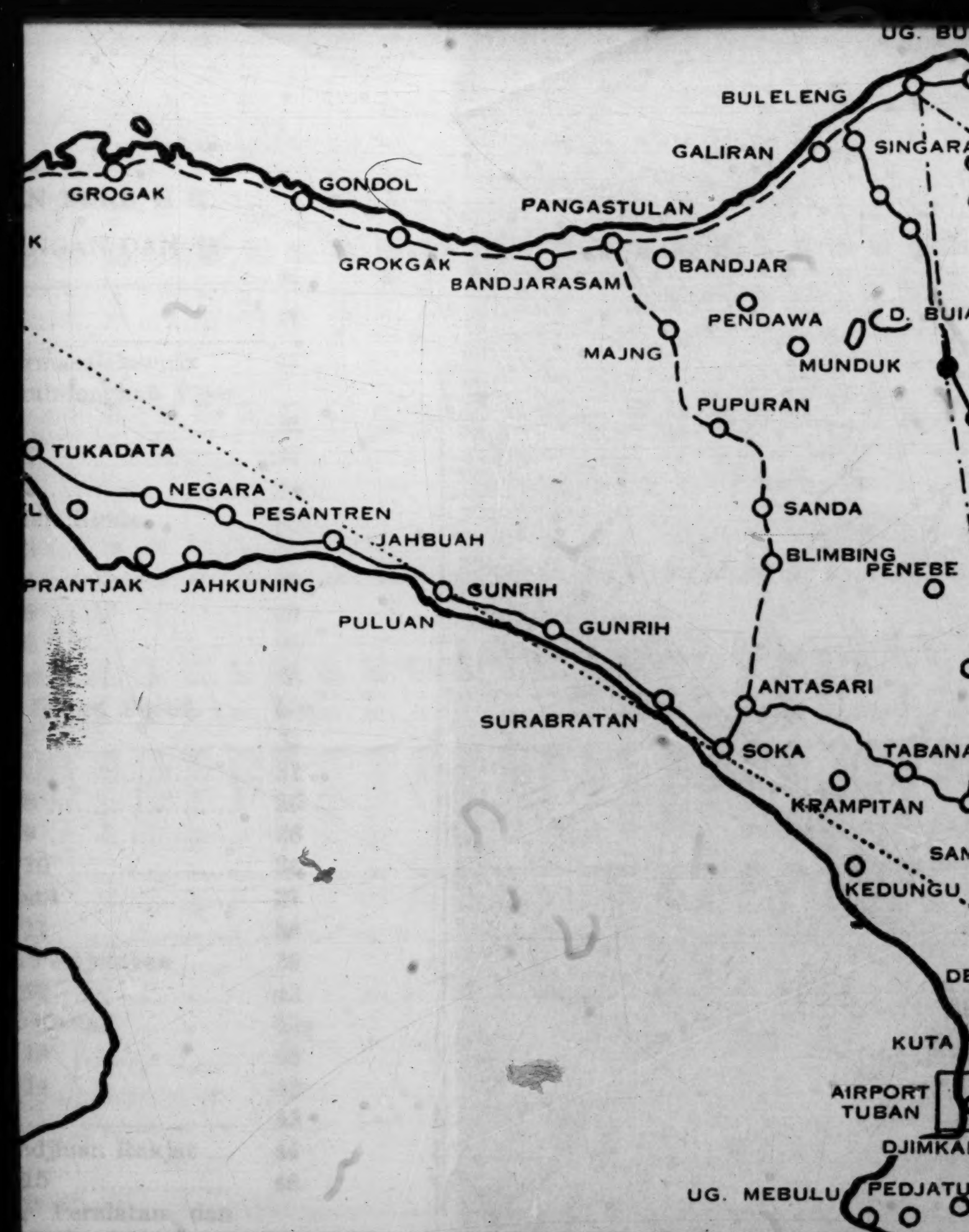

UPGRADING/REHABILITASI DJALAN2/DJEMBATAN
TAHAP I (1969 - 1970)

UPGRADING/REHABILITASI DJALAN2/DJEMBATAN

GAMBAR 4

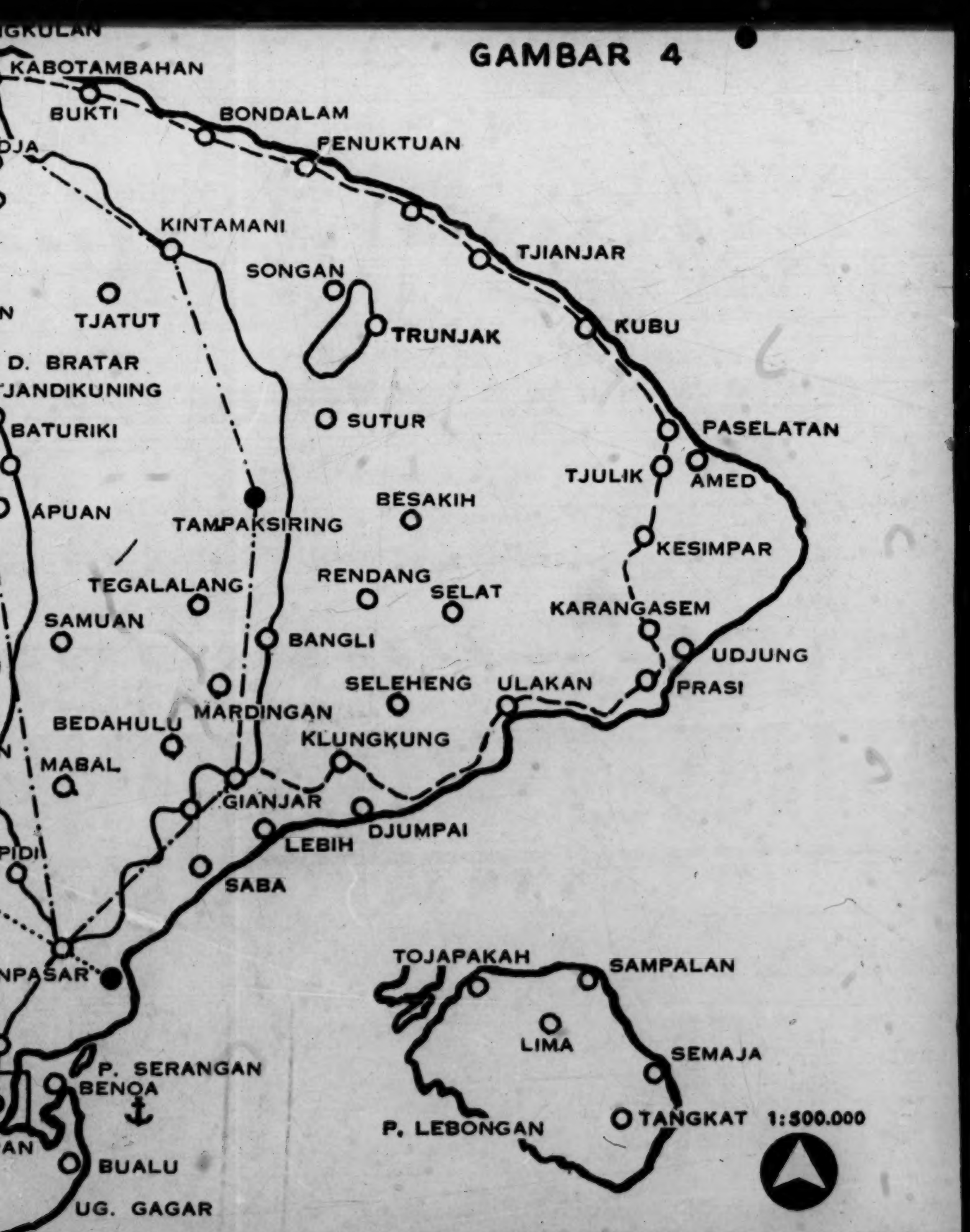

SALURAN TELEKOM

TELEPON LOKAL/REGIONAL

LOKASI PROTOTIPE PROJECT

PARIWISATA 69 - 73

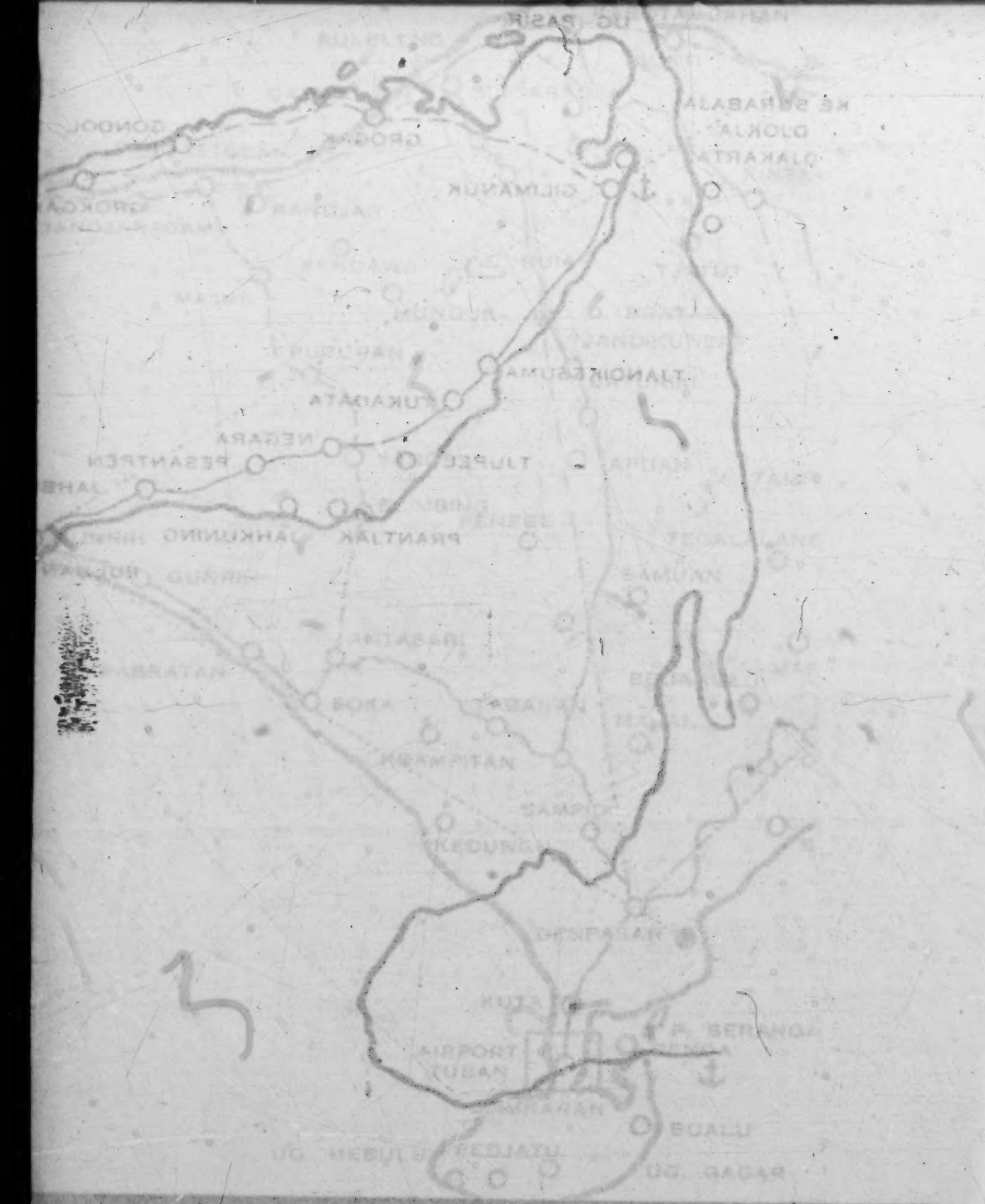

PETUNDJUK HALAMAN BUKU II B

BAB VII INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK 11

A. INDUSTRI 11

Keadaan Industri dan Permasalahannja ... 11

Kebidjaksaan dan Langkah-langkah Pembangunan Industri 14

Tabel VII — A — 1 17

Tabel VII — A — 2 19

Industri Pupuk, Semen dan Kimia 21

Tabel VII — A — 3 27

Tabel VII — A — 4 28

Tabel VII — A — 5 28

Tabel VII — A — 6 28

Grafik Industri Semen 29

Sub Sektor Industri Semen Pupuk ... 30a

Tabel VII — A — 7 31

Industri Tekstil 31

Tabel VII — A — 8 36

Tabel VII — A — 9 36

Tabel VII — A — 10 36

Grafik Industri Tekstil 37

Tabel VII — A — 11 38

Industri Pulp, Kertas dan Pertjetakan 39

Tabel VII — A — 12 42

Sub Sektor Industri Kertas 42a

Tabel VII — A — 13 43

Tabel VII — A — 14 43

Industri Farmasi 43

Industri Ringan dan Keradjinan Rakjat ... 44

Tabel VII — A — 15 46

Industri Logam, Mesin, Peralatan dan Prasarana 47

910088-(12).

B. PERTAMBANGAN 50
Keadaan dan Masalah-masalah 50
1. Pendahuluan 50
2. Minjak dan Gas Bumi 51
3. Timah 52
4. Bauksit 53
5. Nikkel 53
6. Emas dan Perak 53
7. Mangan 54
8. Belerang 54
9. Intan 54
10. Batubara 54
KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH 55
1. Pengembangan dan Pembinaan 55
2. Eksplorasi dan Penelitian 56
3. Pendidikan 57
4. Kontrak Karya/Penanaman Modal Asing 57
5. Minjak dan Gas Bumi 58
Tabel VII — B — 1 61
6. T i m a h 63
Tabel VII — B — 2 64
7. Bauksit 64
Tabel VII — B — 3 65
8. Nikkel 65
9. Emas dan Perak 66
Tabel VII — B — 4 66
Sub Sektor Pertambangan, Timah, Nikkel, Bauksit, Belerang Minjak & Gas Bumi 66a
Sub Sektor Pertambangan Minjak dan Gas Bumi 66b
10. Belerang 67
11. Batubara 67
Tabel VII 68

C. TENAGA LISTRIK 70
Keadaan Listrik dan Masalahnja 70
Langkah-langkah dan Kebidjaksanaan Pembangunan 75
1. Rehabilitasi dan Perluasan Djaringan Transmigrasi dan Distribusi Tenaga Listrik 79
2. Rehabilitasi dan Pembangunan Pusat-pusat Listrik 81
Pusat Listrik Tenaga Air Asahan 81
Pusat Listrik Tenaga Air Batang-Agam 82
Pusat Listrik Tenaga Air Garung 83
Pusat Listrik Tenaga Air Ngebel 83
Pusat Listrik Tenaga Air Karangkates 83
Pusat Listrik Tenaga Air Seloredjo ... 84
Pusat Listrik Tenaga Air Riam-Kanan 84
Pusat Listrik Tenaga Air Tonsea-Lama 84
3. Pembangunan Pusat Listrik Tersebar ... 86
4. Perbaikan Institusionil dan Effisiensi ... 86
5. Survey, Penelaahan Feasibility, Penelitian dan lain-lain 87
Tabel VII — C — 1 89
Sub Sektor Tenaga Listrik 90a

BAB VIII PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA ... 91

A. PERHUBUNGAN 91
a. Pendahuluan 91
b. Perhubungan Darat 93
DJALAN 93
Keadaan dan Masalah 94
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 95
Target dan Lokasi Pembangunan 98
Tabel VIII — B — 1 99
ANGKUTAN DJALAN RAYA 100
Keadaan dan Masalah 100

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 101
Target dan Lokasi Pembangunan 101

ANGKUTAN SUNGAI 103
Keadaan dan Masalah 103
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 104
Target dan Lokasi Pembangunan 105

ANGKUTAN KERETA API 105
Keadaan dan Masalah 105
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 106
Target dan Lokasi Pembangunan 108
Tabel VIII — B — 2 111
Tabel VIII — B — 3 112
Sub Sektor Perhubungan Angkutan Kereta-Api 112a

c. Perhubungan Laut 113

ARMADA NIAGA 113
Keadaan dan Masalah 113
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 115
Target dan Lokasi Pembangunan 117

PELABUHAN DAN PRASARANA LAINNJA 119
Keadaan dan Masalah 119
Tabel VIII — C — 1 120
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 122
Target dan Lokasi Pembangunan 124
Fasilitas-fasilitas Pelabuhan 124
Fasilitas Keamanan Pelajaran 125
Fasilitas Dock dan Reparasi Kapal-kapal 126
Prasarana Pelengkap 126
Tabel VIII — C — 2 128
Sub Sektor Perhubungan Laut 132a
Sub Sektor Perhubungan Laut 132b
Sub Sektor Perhubungan Laut 132c

d. Perhubungan Udara 133
Fasilitas Lapangan Terbang dan fasilitas Lainnja 133
Keadaan dan Masalah 133
Landasan 133
Fasilitas-fasilitas Lapangan Terbang 133
1. Telekomunikasi Penerbangan dan Navigational aids 134
2. Pembangkit Tenaga Listrik 134
3. Penerangan Landasan 134
4. Meteorologi Penerbangan 135
5. Gedung Terminal, Gedung-gedung untuk fasilitas Darat, Instalasi Air. Perumahan dan Pengangkutan Operasionil 135
Fasilitas-fasilitas Lainnja 135
Meteorologi Pertanian dan Maritim 135
Geofisik 136
Kesehatan Penerbangan 136
Pendidikan 136
Search and Rescue 136
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 136
Target dan Lokasi Pembangunan 137
Lapangan Terbang 137
Pendidikan 138
Meteorologi Pertanian 138
Geofisika 138
Tabel VIII — D — 1 140
ARMADA UDARA NIAGA 149
Keadaan dan Masalah 149
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 150
Target dan Lokasi Pembangunan 151
e. Perhubungan Pos dan Telekomunikasi 152
Pos dan Giro 152

Keadaan dan Masalah 152
Sub Sektor Perhubungan Udara 152a
Target dan Lokasi Pembangunan 153
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 153
Tabel VIII — E — 1 156
TELEKOMUNIKASI 158
Keadaan dan Masalah 158
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 159
Target dan Lokasi Pembangunan 160
Tabel VIII — E — 2 162
Grafik Rentjana Peningkatan/Penambahan Tilpon 163
Grafik Rentjana Penambahan/Pembangunan Rumah Pos 164
Sub Sektor Perhubungan Pos dan Telekomunikasi 164a
Tabel VIII — F — 1 165
B. PARIWISATA 167
Pendahuluan 167
Keadaan dan Masalah 168
Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan 170
Langkah-langkah 171
LAMPIRAN I 173
PERINTJIAN PROJEK-PROJEK TAHUN 1969-1970 173
I. Rehabilitasi prasarana/sarana-sarana objek pariwasata 173
II. Pembinaan Rehabilitasi & Restorasi Objek-objek Pariwisata 175
III. Lain-lain kegiatan dibidang Kepariwisataan 175
Gambar 1 ..... 176a
Gambar 2 ..... 176b
Gambar 3 ..... 176c
Gambar 4 ..... 176d

IDC

RECEIVED
21 AUG 1969
CLD
Acquisitions
Section

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969/70 — 1973/74

II C

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

29 SEP 1969

14153
V 2

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
CENTRAL LIBRARY AND
DOCUMENTATION BRANCH

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 319 TAHUN 1968
TENTANG
RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. *bahwa tudjuan perdjoangan Orde-Baru adalah meningkatkan tingkat kehidupan Rakjat Indonesia, jang hanja dapat ditjapai dengan pelaksanaan pembangunan bertahap dan berentjana ;*
2. *bahwa hasil-hasil jang telah ditjapai dalam program stabilisasi politik dan ekonomi, dewasa ini telah merupakan landasan jang tjukup kuat guna pelaksanaan pembangunan ;*
3. *bahwa berdasarkan ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, penjusunan dan pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun mendjadi salah satu tugas Kabinet Pembangunan ;*
4. *bahwa dewasa ini Pemerintah telah berhasil menjiapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969—1973, jang akan mendjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan ketetapan MPRS tersebut tahun-demi-tahun ;*
5. *bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969—1973 ;*

Mengingat :

1. *Pasal 4 ajat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;*
2. *Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 ;*
3. *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 Tahun 1968 ;*

Mendengar : *Pertimbangan BAPPENAS dan Sidang-sidang Kabinet ;*

M E M U T U S K A N

Menetapkan : *KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969 — 1973.*

Pasal 1.

Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973 sebagaimana termuat dalam Buku I, II dan III lampiran Keputusan Presiden ini merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti jang ditugaskan oleh MPRS.

Pasal 2.

Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pelaksanaan daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun, akan dituangkan dalam Rentjana Tahunan jang tertjermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara serta kebidjaksanaan-kebidjaksanaan lainnja.

Pasal 3.

Penuangan dalam Rentjana Tahunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perobahan dan perkembangan keadaan jang memerlukan penjesuaian terhadap Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 30 Desember 1968
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL — TNI

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

1969/70 — 1973/74

L A M P I R A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 319 TAHUN 1968

tentang

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

II C

REPUBLIK INDONESIA

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1969/70 — 1973/74

DAFTAR ISI KESELURUHAN

BUKU PERTAMA
U M U M

Bab. I Tudjuan, Sasaran dan Kebidjaksanaan

Bab. II Sumber-sumber Pembiajaan

Bab. III Neratja Pembajaran Internasional

Bab. IV Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa

Bab. V Administrasi Pemerintah, Pelaksanaan Rentjana dan Rentjana Operasionil Tahunan

BUKU KEDUA
RENTJANA BIDANG-BIDANG

Bab. VI Pertanian dan Irigasi

Bab. VII Industri, Pertambangan dan Tenaga Listrik

Bab. VIII Perhubungan dan Pariwisata

Bab. IX A g a m a

Bab. X Pendidikan dan Tenaga Kerdja

Bab. XI Kesehatan dan Keluarga Berentjana

Bab. XII Perumahan dan Kesedjahteraan Sosial

Bab. XIII Tertib Hukum dan Penerangan

Bab. XIV Transmigrasi dan Koperasi

Bab. XV Pertahanan dan Keamanan Nasional

Bab. XVI Penelitian dan Pengembangan Statistik

BUKU KETIGA
PERINTJIAN MENURUT DAERAH

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1969/70 — 1973/74

DAFTAR ISI

B U K U II C

RENTJANA BIDANG-BIDANG

Bab. IX A g a m a

Bab. X Pendidikan dan Tenaga Kerdja
- A. Pendidikan
- B. Tenaga Kerdja

Bab. XI Kesehatan dan Keluarga Berentjana
- A. Kesehatan
- B. Keluarga Berentjana

Bab. XII Perumahan dan Kesedjahteraan Sosial
- A. Perumahan dan Air Minum
- B. Kesedjahteraan Sosial

Bab. XIII Tertib Hukum dan Penerangan
- A. Tertib Hukum
- B. Penerangan

Bab. XIV Transmigrasi dan Koperasi
- A. Transmigrasi
- B. Koperasi

Bab. XV Pertahanan dan Keamanan Nasional

Bab. XVI Penelitian dan Pengembangan Statistik
- A. Research
- B. Pengembangan Statistik

BAB IX

AGAMA

BAB IX

AGAMA

B A B IX

A G A M A

KEDUDUKAN DAN PERANAN AGAMA

Agama mempunjai kedudukan jang penting dalam Negara Republik Indonesia sesuai dengan Dasar Falsafah Negara Pantja-Sila.

Peranan Agama dalam Negara Republik Indonesia, ketjuali jang bersifat universil, jakni sebagai pengabdian dari machluk terhadap pentjiptanja — Chalik —, djuga merupakan faktor penting dalam membuat warga negara Indonesia berbudi luhur jang merupakan prasarana mental untuk suksesnja usaha pembangunan.

Agama djuga merupakan benteng jang kokoh terhadap ratjun Atheisme-Komunisme jang hendak merobohkan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pantja-Sila.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS No. XXVII/1966, maka Pemerintah mempunjai tugas kewadjiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlantjar usaha mengembangkan agama sesuai dengan adjaran agama masing-masing, dan melakukan pengawasan, sedemikian rupa, agar supaja setiap warga negara dalam melaksanakan adjaran agama dan dalam usaha pengembangan agama sesuai dengan kepertjajaan masing-masing itu dapat berdjalan dengan lantjar, tertib dan dalam suasana kerukunan. Pemerintah berkewadjiban untuk melindungi setiap usaha pengembangan agama serta pelaksanaan agama sesuai dengan adjaran agama masing-masing, sepandjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum jang berlaku serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

KEADAAN DAN MASALAH-MASALAH.

Kenjataan jang ada menundjukkan, bahwa djiwa Pantja-Sila dan djiwa Agama, sebagai dasar terbentuknja moral dan achlak jang tinggi serta mental jang kuat, jang akan mendjadi sarana pokok bagi berhasilnja program pembangunan setjara keseluruhan, belum tertanam dengan baik dikalangan masjarakat.

Sementara itu sebagai akibat penanaman dan penjebaran adjaran-adjaran/faham atheisme oleh golongan komunis pada waktu jang lalu, sedikit-banjak masih terdapat pengaruh adjaran-adjaran/faham atheisme tersebut didalam masjarakat.

Kehidupan toleransi antara agama didalam masjarakat, terutama didalam pelaksanaan program pembangunan dan penjebaran masing-masing agama, kadang-kadang masih menundjukkan gedjala-gedjala jang kurang harmonis.

Pendidikan agama dan pengembangan djiwa agama dalam lingkungan lembaga-lembaga pendidikan dan dalam lembaga-lembaga pendidikan agama sendiri belum berdjalan dengan lantjar ; antara lain masih dirasakan belum diketemukannja bentuk kurikulum jang tepat, disamping kurangnja tenaga-tenaga pengadjar jang tjukup ahli serta fasilitas-fasilitas materiil lainnja.

Tempat-tempat peribadatan, seperti mesdjid dan geredja belum berfungsi sewadjarnja sebagai pusat kegiatan keagamaan masing-masing.

Dalam pada itu dibeberapa daerah tertentu masih terdapat suku-suku terasing, jang pada umumnja masih menganut animisme dan atau tidak menganut agama sama sekali. Maka sedjalan dengan program dibidang kesedjahteraan sosial untuk "memasjarakatkan" suku-suku terasing tersebut, kehidupan ke-Agama-an bagi mereka djuga merupakan problem jang harus dipetjahkan.

Masalah pembiajaan dan tenaga pelaksana hingga dewasa ini masih tetap merupakan masalah, jang harus mendapatkan perhatian sepenuhnja.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.

Berdasarkan problem-problem jang dihadapi tersebut diatas, maka sasaran-sasaran jang hendak ditjapai dalam pembangunan lima tahun dibidang ke-Agama-an, adalah :

a. golongan jang belum/tidak beragama/tidak berke-Tuhan-an Jang Maha Esa, termasuk golongan-golongan atheistis dan animistis ; diusahakan agar mereka berke-Tuhan-an Jang Maha Esa sesuai dengan kejakinan dan pilihannja sendiri ;

b. golongan jang sudah beragama/berke-Tuhan-an Jang Maha Esa, diusahakan agar mereka makin dalam keimanannja dan luhur budinja berdasarkan kejakinan agama masing-masing ;

c. pembinaan dan penumbuhan djiwa toleransi agama diantara pemeluk agama jang berlainan.

Kebidjaksanaan pembangunan bidang agama pertama-tama diarahkan agar pertumbuhan djiwa agama dari warga negara Indonesia

dapat tertjermin dan terwudjud setjara njata dalam laku hidup sehari-hari sesuai dengan adjaran agama masing-masing.

Untuk penanaman dan penjebaran djiwa agama, baik terhadap mereka jang belum beragama maupun jang sudah, maka kegiatan penerangan agama kepada berbagai lapisan masjarakat perlu ditingkatkan. Dalam hubungan ini, bekas-bekas anggota PKI dan anggota-anggota organisasi afiliasinja beserta keluarganja akan mendapatkan perhatian chusus.

Untuk kelantjaran dan ketertiban pelaksanaan penerangan agama ini akan diusahakan bantuan fasilitas jang diperlukan seperti bahan-bahan penerangan serta pedoman-pedoman untuk chotbah-chotbah, pengadjaran agama dan sebagainja.

Demikian pula setjara bertahap akan diusahakan perbaikan/penjempurnaan serta pemanfaatan setjara efektif tempat-tempat ibadah, pusat-pusat keagamaan, pesantren dan sebagainja serta usaha-usaha setjara teratur dan berentjana untuk meng-up-grade guru-guru agama dan djuru-djuru penerangan agama, sehingga mereka ini mendjadi djuru-djuru penerang dan pendidik agama jang berpengetahuan luas dan berdjiwa Pantja-Sila.

Bersamaan dengan itu akan digiatkan pula usaha-usaha untuk mentjegah timbulnja/berkembangnja unsur-unsur kekuatan dan faham-faham jang menentang agama atau sesuatu agama jang diakui oleh Pemerintah dan praktek-praktek kepertjajaan jang melanggar norma-norma agama.

Dibidang pendidikan agama akan diusahakan perbaikan/penjempurnaan kurikulum, isi dan methodologie pendidikan agama, disamping usaha-usaha untuk penambahan dan up-grading guru-guru agama, baik bagi lembaga-lembaga pendidikan agama Pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan agama Swasta.

Salah satu sjarat penting untuk berhasilnja program pembinaan djiwa agama, adalah tersedianja dengan tjukup kitab-kitab sutji masing-masing agama. Untuk itu pembangunan pertjetakan kitab-kitab sutji jang telah dirintis, diusahakan kelandjutan pelaksanaannja dalam masa Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini.

Kegiatan agama dibidang kesedjahteraan sosial dilandjutkan, terutama dalam lapangan pemberian nasehat/penerangan mengenai soal-soal perkawinan, pertjeraian dan lain-lain. termasuk tentang keluarga berentjana sesuai dengan adjaran/moral agama masing-masing.

Untuk mendjaga dan membina pertumbuhan toleransi agama jang mantap, maka Badan Musjawarah Antar Agama perlu lebih digiatkan dengan program-program jang lebih konkrit dan jang dapat menampung persoalan-persoalan jang timbul dilapangan ini.

Dalam rangka menertibkan dan menjesuaikan hukum jang berlaku dewasa ini, agar lebih sesuai dengan aspirasi dan kehidupan Bangsa Indonesia jang berdasarkan Pantja-Sila, maka perlu diadakan penindjauan kembali dan pentjiptaan hukum/undang-undang baru jang mengatur kehidupan warga negara Indonesia jang erat hubungannja dengan norma-norma agama. Usaha pentjiptaan hukum/undang-undang ini akan dilakukan dalam hubungannja dengan tertib hukum serta pembinaan hukum Nasional setjara keseluruhan.

Pelaksanaan usaha-usaha/program tersebut diatas sebagian besar tergantung pada partisipasi masjarakat, baik pembiajaan maupun pelaksanaannja, sedangkan kegiatan Pemerintah terbatas pada pembimbingan, pembinaan, bantuan fasilitas serta pengawasan ketertiban pelaksanaan. Bantuan luar negeri jang ada akan diatur dan dipergunakan semaksimal mungkin bagi kepentingan masjarakat.

PEMBANGUNAN SARANA-SARANA KEHIDUPAN BERAGAMA.

Kitab Sutji.

Dalam djangka waktu lima tahun diusahakan dapat disediakan kitab-kitab sutji dalam djumlah menurut prosentase djumlah pemeluk agama masing-masing, serta pembiajaan jang tersedia.

Projek pertjetakan Al-Qur'an di Tjiawi akan diusahakan penjelesaiannja dengan mengusahakan dana-dana dari masjarakat Islam sendiri.

Tempat Peribadatan.

Djumlah Rumah-rumah Ibadat jang ada sekarang ini djauh dari mentjukupi dan kurang memenuhi sjarat. Ummat beragama masih mengalami kesulitan untuk dapat membangun sendiri rumah-rumah peribadatan jang sempurna karena keadaan ekonomi jang lemah. Diusahakan agar dapat diberikan bantuan untuk mendirikan/merehabiliteer tempat-tempat ibadat pada tempat-tempat tertentu, sesuai dengan kemampuan Pemerintah.

Balai Pernikahan dan Balai Penasehat Perkawinan/Kesedjahteraan Keluarga.

Dalam rentjana lima tahun mendatang diharapkan dapat didirikan Balai Pernikahan dan Balai Penasehat Perkawinan/Kesedjahteraan Keluarga, menurut kebutuhan dan biaja jang dapat disediakan.

PENDIDIKAN AGAMA.

P.G.A.N. dan I.A.I.N.

Pembangunan PGAN dan IAIN jang belum terselesaikan akan dilandjutkan dan diharapkan dapat selesai pada tahun 1973.

Penelitian untuk penjempurnaan pendidikan agama akan ditingkatkan, dengan terutama memanfaatkan PGAN dan IAIN jang telah ada.

URUSAN HADJI/ZIARAH.

Pembangunan asrama-asrama hadji dikota-kota pelabuhan akan digerakkan dengan dana-dana masjarakat dengan bimbingan, bantuan dan pengawasan Pemerintah. Ketjuali itu akan diperkembangkan tjara-tjara pembiajaan jang lebih baik untuk pelaksanaan naik hadji ini.

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun
(1969/70 — 1973/74)
AGAMA

(dalam djutaan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub-Sektor/ Program.	*Anggaran Pembangunan Negara.*	
	1969/1970	*1969/1970—1973/1974*
Bidang Sosial		
Sektor Agama	*606*	*5.290*
1. *Sub-Sektor Agama*	*606*	*5.290*
a. Program Penjediaan sarana kehidupan beragama	200	1.746
b. Program Penerangan dan Bimbingan Agama	49	428
c. Program Peningkatan Kesedjahteraan Perdjalanan Hadji	24	210
d. Program Pengawasan dan Bantuan kepada Lembaga-lembaga Keagamaan Swasta	13	113
e. Program Pembangunan Mesdjid Istiqlal	320	2.793
Kegiatan-kegiatan Agama jang pembiajaannja diperhitungkan dalam sektor lain :		
a. Pendidikan Agama (termasuk Sektor Pendidikan dan Kebudajaan, Sub-Sektor Pendidikan dan Penelitian Institusionil)	533	4.344
b. Research Agama (termasuk Sektor Pendidikan dan Penelitian Institusionil)	35	298
c. Penjempurnaan Prasarana Fisik (termasuk Sektor Pemerintahan Umum, Sub-Sektor Pemerintah Umum)	146	821

BAB X

PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA

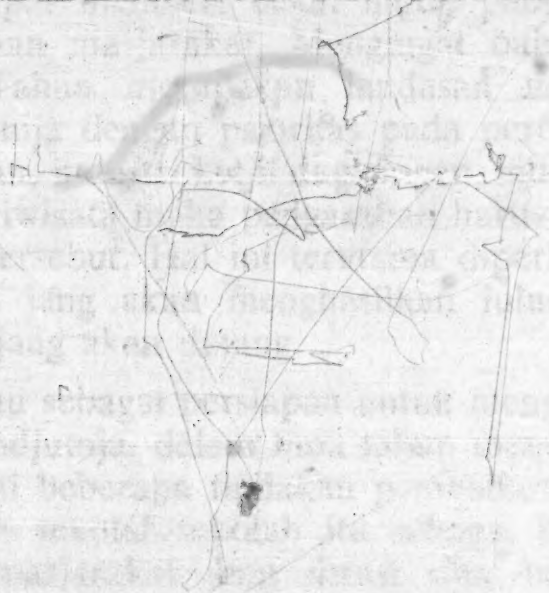

BAB X

PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA

B A B X

PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA

A. P E N D I D I K A N

PENDAHULUAN.

Pendidikan harus mempunjai hubungan jang erat dengan kebutuhan serta kemungkinan-kemungkinan perkembangan ekonomi dan sosial, sehingga dapat memberi bekal hidup pada murid-murid dan memenuhi kebutuhan masjarakat. Mengingat bahwa Rentjana Pembangunan Lima Tahun merupakan landasan untuk pembangunan tahap-tahap berikutnja dengan prioritas pada pertanian, industri jang menjokong pertanian, industri ketjil dan ringan, industri pertambangan, prasarana serta pariwisata maka pengarahan harus disesuaikan dengan prioritas-prioritas tersebut. Hal ini terutama diperlukan pada tingkat-tingkat pendidikan jang akan menghasilkan lulusan dalam djangka waktu lima tahun jang akan datang.

Dalam pada itu sebagai persiapan untuk menghadapi tahap-tahap pembangunan selandjutnja, dalam lima tahun mendatang ini pendidikan perlu mengalami beberapa tindakan pembaharuan jang tudjuannja untuk mendjadikan sekolah-sekolah itu sebagai bagian mutlak daripada kehidupan masjarakat jang serasi dan bermanfaat. Dengan demikian pada achir Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini diharapkan dapat diperoleh suatu landasan bagi suatu sistim dan struktur pendidikan jang mantap jang berorientasi pada usaha-usaha pembangunan ekonomi dan sosial selandjutnja.

KEADAAN DAN MASALAH-MASALAH.

a. Keadaan pendidikan di Indonesia menundjukkan adanja beberapa ketidak-seimbangan.

Pertama, ialah ketidak-seimbangan mengenai djumlah penduduk jang berumur tjukup untuk sekolah dengan djumlah fasilitas jang dapat disediakan bagi mereka. Hal ini lebih-lebih dirasakan karena adanja kesadaran dan keinginan masjarakat jang lebih besar daripada tahun-tahun jang lampau untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan.

Kedua, ialah ketidak-seimbangan pendidikan setjara horisontal, jaitu antara djenis/bidang pendidikan. Tingkat kemadjuan jang ditjapai dibidang pendidikan kedjuruan dan tehnik setjara relatif kurang sekali dibanding dengan bidang pendidikan umum. Pada waktu ini perbandingan djumlah murid sekolah umum dan kedjuruan pada Sekolah Landjutan Pertama (S.L.T.P.) adalah 2 : 1. Djumlah

murid dalam tahun 1967 ialah S.L.T.P. djurusan umum (S.M.P.) 772.000 orang dan djurusan kedjuruan 224.000 orang, sedang dari 477.000 murid S.L.T.A. terdapat 260.000 orang pada djurusan umum, 117.000 orang pada djurusan tehnik dan kedjuruan serta 100.000 orang pada pendidikan keguruan.

Arus mahasiswa kedjuruan non-eksakta ditingkat pendidikan tinggi djauh melebihi arus mahasiswa dalam djurusan-djurusan jang relatif lebih terasa kebutuhannja seperti pertanian, tehnologi dan sebagainja. Perbandingan djumlah mahasiswa djurusan sosial dan eksakta adalah 2 : 1 dengan djumlah masing-masing 155.000 orang dan 75.000 orang mahasiswa pada tahun 1967.

Ketidak-seimbangan ini menimbulkan akibat kurang sesuainja persediaan tenaga kerdja dengan kebutuhan tenaga kerdja untuk pembangunan. Chususnja dibidang pertanian jang merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar Rakjat Indonesia dan jang mendapat prioritas utama dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini, pendidikan menengah dan tinggi dibidang ini masih menundjukkan banjak kekurangan.

Ketiga, ialah ketidak-seimbangan setjara vertikal, jaitu perbandingan antara sekolah dasar, sekolah landjutan menengah dan perguruan tinggi/akademi-akademi. Kenjataan menundjukkan bahwa sekolah-sekolah tingkat menengah, terutama sekolah-sekolah menengah dibidang kedjuruan dan tehnik, ketinggalan perkembangannja dibanding dengan tingkat-tingkat pendidikan jang lain.

Pada tahun 1967 terdapat 13 djuta murid S.D., 1 djuta murid S.L.T.P., 500.000 murid S.L.T.A. dan 230.000 mahasiswa pada pelbagai Universitas, Institut dan Akademi-akademi Negeri maupun Swasta.

b. Dalam kenjataannja masih terdapat buta-huruf jang tjukup besar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan djumlah penduduk, chususnja penduduk jang berumur tjukup untuk sekolah, tetapi karena pelbagai sebab tidak (pernah) bersekolah, dan tidak adanja pembinaan lebih landjut dari mereka jang telah selesai mengikuti kursus-kursus pemberantasan buta-huruf.

c. Ketjuali itu masih terdapat suatu djumlah jang terlampau besar daripada siswa jang melepaskan diri (keluar) dari sekolah sebelum waktunja terutama di S.D. dan Perguruan-perguruan Tinggi. Drop-out di S.D. sangat besar, jaitu lebih dari 50 persen. Hal ini dapat dilihat dari banjaknja murid di S.D. pada tahun 1967, jaitu 3.213.000 orang dikelas I dan hanja ada 978.000 orang dikelas VI.

Dilingkungan Perguruan Tinggi tingkat drop-out dapat disimpulkan/diperkirakan dari djumlah-djumlah prosentase mahasiswa diseluruh djenis fakultas pada masing-masing tingkat jang dalam tahun 1967 adalah sebagai berikut :

Tingkat I, 49 persen, tingkat II, 18,9 persen, tingkat III, 16 persen, tingkat IV, 9,5 persen, tingkat V, 5,7 persen dan tingkat VI, 0,9 persen (Fakultas Kedokteran). Hal ini djelas merupakan kerugian jang besar dalam investasi dibidang pendidikan dan menghambat usaha pembangunan. Sebab-sebabnja terletak pada kurang baiknja mutu pendidikan serta faktor-faktor sosial-ekonomi jang membatasi kesempatan beladjar para anak didik.

d. Kwalitas hasil pendidikan masih dirasakan kurang, oleh karena kelemahan-kelemahan dibidang kurikulum dan masih kurangnja tenaga-tenaga pengadjar, terutama jang berwenang.

1. Kurikulum jang tidak sesuai dengan kebutuhan masjarakat, terutama disekolah-sekolah landjutan, mengakibatkan adanja lulusan-lulusan sekolah landjutan umum jang memiliki ketjakapan jang tidak dapat langsung digunakan untuk pembangunan.
2. Methode mengadjar masih perlu disempurnakan. Tjara evaluasi (tjara menilai kedjuruan murid) dalam beladjar jang menitik-beratkan kepada udjian mengakibatkan tjara beladjar jang tidak teratur, sehingga beladjar itu hanja ditudjukan untuk udjian.

e. Mengenai masalah guru, terutama perlu dipetjahkan masalah kekurangan tenaga-tenaga guru jang tjukup berwenang.

Misalnja 24 persen dari guru-guru S.D. pada tahun 1967 (jang seluruhnja berdjumlah 286.000 orang) tidak berwenang dan lebih dari 54 persen hanja berwenang untuk sebagian. Kekurangan guru itu antara lain diakibatkan adanja pembersihan oknum-oknum G.30.S/PKI, kurangnja penghargaan kepada djasa tenaga pengadjar sehingga ada jang meninggalkan bidang pendidikan serta kurangnja out-put pendidikan guru.

f. Didalam segi administrasi pendidikan masih terdapat pelbagai kekurangan-kekurangan.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.

Pembangunan pendidikan berdasarkan atas Falsafah Negara Pantja-Sila dan didasarkan kepada prinsip bahwa pendidikan adalah investasi Nasional jang bersifat suatu investasi ketrampilan manusia

Tudjuan daripada pembangunan disektor pendidikan selain untuk menghasilkan tenaga kerdja terdidik untuk pembangunan, djuga mengusahakan perubahan kearah suatu masjarakat jang lebih rasionil dan demokratis sesuai dengan kepribadian Indonesia dengan memperkembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Program pendidikan setjara horizontal akan lebih diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan pendidikan dan latihan untuk sektor-sektor pembangunan jang diprioritaskan, seperti pertanian, industri jang mendukung pertanian, industri ringan dan keradjinan rakjat, pertambangan, prasarana serta pariwisata.

Setjara vertikal program pendidikan akan diarahkan kepada perbaikan keseimbangan dengan menitik-beratkan kepada tingkat pendidikan menengah. Perhatian akan diberikan kepada usaha-usaha perluasan pendidikan tingkat menengah bidang tehnik dan kedjuruan sesuai dengan kebutuhan akan tenaga-tenaga disektor-sektor pembangunan jang diprioritaskan.

Pendidikan pertanian akan memperoleh perhatian utama karena bidang pertanian mendapat prioritas pertama dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Djuga akan dilakukan usaha-usaha pendidikan para petani guna meningkatkan ketrampilan mereka dan memberikan pengetahuan tentang tjara-tjara baru untuk meningkatkan produktivitas. Pun akan ditingkatkan training dan up-grading bagi para tehnisi pertanian.

Selain daripada itu akan dikembangkan methode-methode pengadjaran jang lebih madju dengan memperkembangkan penggunaan alat-alat ilmu alam jang sangat sederhana, praktis dan murah dan berorientasi pada pertanian. Dimana mungkin akan digunakan pula alat-alat audio-visuil, antara lain radio dan televisi. Didalam hal ini bantuan luar negeri akan dimanfaatkan sedjauh mungkin dalam penjelenggaraannja.

Sebagai faktor jang paling menentukan usaha peningkatan mutu pendidikan, perhatian chusus akan diberikan kepada peningkatan mutu para guru jang ada dan usaha penjediaan tenaga guru jang berwenang. Tidak kurang pentingnja adalah usaha penjebaran tenaga guru jang lebih merata sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah masing-masing disamping penilaian jang lebih lajak terhadap djabatan guru/pendidik.

Dalam hubungan ini perbaikan perbandingan diantara guru dan tenaga administrasi dibidang pendidikan sehingga mendjadi lebih seimbang, merupakan aspek jang penting dalam usaha lebih meng-

effektifkan pemanfaatan tenaga-tenaga pengabdi pendidikan maupun biaja jang disediakan untuk pendidikan.

Usaha pemberantasan buta-huruf akan lebih diintensifkan dengan tindakan-tindakan pembinaan sesudahnja jang diintegrasikan dengan program pendidikan orang dewasa jang bertudjuan menumbuhkan kesadaran berwarganegara serta peningkatan ketrampilan bekerdja menurut lapangan kehidupan masing-masing termasuk pendidikan wanita dengan menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam mengurus rumah tangga.

Pendidikan kebudajaan melalui pendidikan formil dan informil terus dikembangkan. Disamping itu pembinaan terhadap hasil-hasil kebudajaan, (museum dan tjandi-tjandi) dan peninggalan kuno lainnja dikembangkan, jang memungkinkan djuga perkembangan turisme.

Pendidikan olah raga ditudjukan kepada pembinaan fisik dan mental jang sehat dan kuat serta perluasan kegemaran berolah raga dikalangan masjarakat.

Pembinaan kepramukaan dan kepemudaan diusahakan sebagai pembinaan pelengkap diluar sekolah daripada achlak dan kepribadian serta ketrampilan tunas bangsa diluar sekolah sebagai persiapan praktis untuk mendjadi warga-negara jang bermanfaat.

Kebidjaksanaan seperti digariskan diatas memerlukan pembinaan sarana-sarana pendidikan seperti alat-alat peladjaran dan gedung. Djuga dalam hal ini diutamakan rehabilitasi dan pemanfaatan alat-alat peladjaran dan gedung jang sudah ada dan peningkatan effisiensi penggunaannja. Perluasan apa jang sudah ada diutamakan daripada pembangunan baru. Dibidang buku-buku dan penerbitan bahan peladjaran akan diberikan perhatian utama kepada penerbitan buku-buku dasar. Demikian pula akan diusahakan perbaikan perpustakaan-perpustakaan jang sudah ada. Suatu "paket buku" untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah akan dikembangkan.

Kegiatan-kegiatan penelitian dan survey akan dipusatkan dan diarahkan kepada usaha-usaha jang langsung berhubungan dengan program-program pembangunan. Penelitian dibidang perkembangan pendidikan dan pengadjaran dititik-beratkan dan diarahkan kepada pembangunan. Dalam pada itu akan dikembangkan pula penelitian jang menjangkut soal-soal perubahan sosial jang menjertai dan sebagai akibat pembangunan dan modernisasi.

Biaja untuk pendidikan disamping akan disediakan oleh Pemerintah menurut kemampuan keuangan jang ada djuga merupakan

tanggungan dari masjarakat dan orang-tua murid. Hal ini akan diatur setjara lebih wadjar, sehingga pemanfaatan biaja akan lebih effektif dan penjalah-gunaan dapat dihindarkan.

1. *Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar.*

Pintjangnja keseimbangan pendidikan didalam struktur vertikal bukan hanja disebabkan kurang berkembangnja tingkat pendidikan menengah, tetapi djuga karena banjaknja murid jang gagal dalam peladjarannja ditingkat pendidikan sekolah dasar. Hal itu selain menimbulkan keketjewaan pada pihak-pihak jang bersangkutan, djuga sangat merugikan dilihat dari sudut tenaga, uang dan waktu jang telah diberikan.

Pelbagai kebidjaksanaan akan ditempuh untuk mengatasi masalah ini, antara lain dengan mengusahakan meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar, dengan memperbaharui kurikulum dan methode mengadjar jang sesuai dengan lingkungan fisik dan sosial, meningkatkan djumlah serta mutu alat-alat peladjaran, menggunakan media massa, mempererat kerdjasama antara orang-tua murid dengan guru dan masjarakat, dan usaha-usaha lain untuk mengurangi djumlah murid jang gagal dalam peladjarannja.

Disamping usaha-usaha tersebut diatas, masalah jang sangat penting adalah usaha meningkatkan kwalitas para guru.

Diharapkan dengan usaha-usaha tersebut djumlah murid jang naik kelas akan dapat ditingkatkan rata-rata 3 sampai 5 persen setahun, sehingga djumlah murid sekolah dasar pada tahun 1973 sudah mengalami kenaikan 31 persen dibandingkan dengan keadaan dalam tahun 1968. (Perkembangan djumlah murid S.D., seperti terlihat pada tabel X-A-1).

Tabel X - A - 1

Murid Sekolah Dasar Tahun 1967 - 1973
(Dalam ribuan)

Tahun	*Djumlah*	*Prosentase Golongan Umur 7 — 12 tahun*
1967	13.023	63
1968	13.544	64
1969	14.086	67
1973	17.748	80

Ditingkat sekolah dasar akan diadjarkan praktek-praktek hidup sehat dan dasar-dasar sanitasi, soal-soal gizi, bertjotjok tanam, pemeliharaan hewan, keradjinan tangan dan lain-lain jang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan masjarakat lingkungannja.

Sementara itu anak-anak jang berumur antara 7 dan 12 tahun jang belum pernah bersekolah diusahakan untuk ditampung pada petang hari agar supaja sekurang-kurangnja dapat menguasai 3 - M (membatja, menulis dan menghitung), ditambah dengan latihan ketrampilan sebagai modal untuk bekerdja.

Lulusan sekolah dasar jang tidak melandjutkan peladjarannja diusahakan untuk ditampung dalam kelas-kelas pembangunan jang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan bantuan Pemerintah Pusat.

Usaha-usaha tersebut diatas akan mulai dilaksanakan dalam tahun 1969 dan dilandjutkan dalam tahun-tahun berikutnja setjara bertahap dan teratur, setiap kali dengan memperhitungkan sepenuhnja penjediaan biaja dan kemungkinan-kemungkinan pelaksanaannja.

2. *Program Penambahan Pendidikan Kedjuruan pada Sekolah Landjutan Umum.*

Disekolah Landjutan Umum akan diberikan pendidikan kedjuruan sebagai mata peladjaran pelengkap, berupa peladjaran-peladjaran pertanian, peternakan, pengetahuan rumah tangga, azas-azas tata-buku, keradjinan tangan, ketrampilan tehnik dan pengetahuan serta ketrampilan chusus lainnja jang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan masjarakat daerah lingkungan.

Mengingat kegagalan murid jang masih tjukup tinggi pada tingkat pendidikan ini, maka program tersebut akan membantu memberi persiapan kepada mereka guna mentjari mata pentjaharian jang lajak didalam masjarakat.

Disamping program rehabilitasi dan perluasan terbatas Sekolah Landjutan Umum ini, akan diusahakan pula untuk mendirikan tempat-tempat pembinaan ketrampilan jang mempunjai management tersendiri dan jang dapat dipergunakan oleh berbagai djenis sekolah ditingkat pendidikan menengah. Tempat-tempat pembinaan ketrampilan tersebut akan mempunjai unsur-unsur laboratorium, workshop dan perpustakaan, dan masing-masing akan terbagi dalam unit-unit tertentu.

Untuk memenuhi tenaga guru jang berwenang, akan dilakukan up-grading serta "inservice training" setjara intensif bagi guru-guru jang ada, dan disamping itu akan diikut-sertakan tenaga-tenaga ahli jang berada dimasjarakat dan instansi-instansi lain didalam maupun

diluar Departemen P. dan K. Usaha jang terachir ini harus dilaksanakan untuk sekaligus mengatasi persoalan kwantitatif dan kwalitatif dalam pembinaan tenaga-tenaga pendidikan kedjuruan.

3. *Program Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan.*

Program Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan sebagai program inti pendidikan dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun, terutama ditudjukan kepada rehabilitasi ruang praktikum, laboratoria, mesin-mesin dan alat-alat lainnja.

Rehabilitasi gedung akan diusahakan dalam batas-batas jang memungkinkan. Usaha-usaha tersebut akan dimulai didaerah-daerah jang paling membutuhkan serta jang keadaan peralatannja paling terbelakang.

Sampai dengan tahun 1971/1972 akan diutamakan djurusan-djurusan pertanian dan sesudahnja sampai tahun 1973/1974 djurusan tehnik dan kedjuruan lainnja.

Sebagai usaha penjaluran lulusan-lulusan dari tingkat pendidikan dasar, pada sekolah landjutan tingkat pertama setjara bertahap akan dilakukan perluasan dengan 35.000 tempat baru untuk 70.000 murid.

Begitu pula pendidikan tehnik dan kedjuruan ditingkat landjutan atas akan diperluas dengan 45.000 tempat baru untuk 90.000 siswa (kenaikan 77½ persen dari keadaan dewasa ini).

Diharapkan bahwa dengan demikian achirnja setiap kabupaten akan sudah mempunjai satu sekolah tehnik kedjuruan tingkat atas dan/atau sekolah tehnik kedjuruan tingkat pertama, dengan mengutamakan djurusan-djurusan jang diperlukan bagi usaha-usaha pembangunan dilingkungan wilajahnja.

Dengan demikian perbandingan perluasan antara sekolah-sekolah landjutan tingkat pertama direntjanakan seperti terlihat dalam tabel X - A - 2.

Tabel X - A - 2

Perluasan Sekolah Landjutan Pertama Negeri
(1967 — 1973)

TAHUN	*S E K O L A H*			*PERBANDINGAN*
	S.M.P.	*TEHNIK*	*KEDJURUAN LAIN*	*S.M.P. : ST / Kedjuruan*
1967	1.294	557	479	100 : 80
1973	1.394	807	562	100 : 98

Sedangkan perbandingan perluasan sekolah-sekolah landjutan tingkat atas dapat dilihat dalam tabel X - A - 3 sebagai berikut :

Tabel X - A - 3

Perluasan Sekolah Landjutan Atas Negeri

(1967 — 1973)

TAHUN	*S E K O L A H*			*PERBANDINGAN*	
	SMA	*TEHNOLOGI*	*KEDJURUAN LAIN*	*SMA :*	*SMT/ Kedjuruan Lain*
1967	397	89	245	100 :	84
1973	462	235	310	100 :	112

Pelaksanaan rentjana perluasan akan banjak tergantung daripada kondisi-kondisi setempat. Untuk ini partisipasi masjarakat perlu diperhitungkan dan dibina sehingga sekolah-sekolah tersebut dirasakan sebagai milik masjarakat dan dibangun untuk kepentingan mereka. Masaalah penjebaran lokasi harus diperhitungkan dengan baik bersama-sama masaalah effisiensi. Dengan tjara jang tepat sekolah tersebut bukan sadja akan dirasakan kegunaannja oleh para siswa, tetapi terutama oleh masjarakat, karena sekolah adalah merupakan pusat daripada pembentukan ketrampilan dalam arti jang sebenarnja.

4. *Program Peningkatan Pendidikan Guru.*

Program peningkatan pendidikan guru dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini akan lebih ditekankan pada aspek kwalitatif daripada aspek kwantitatif. Intensifikasi penggunaan kapasitas lembaga pendidikan guru jang ada sekarang diharapkan akan memberikan hasil jang dapat memenuhi kebutuhan kwantitatif didalam masa Lima Tahun mendatang. Didalam keadaan jang lebih mendesak maka kekurangan guru-guru sekolah dasar, akan diusahakan memenuhinja dengan menjalurkan tenaga-tenaga pegawai negeri dan ABRI jang berlebih, dengan diberi training terlebih dahulu agar mereka dapat mengadjar.

Kekurangan tenaga guru untuk mata peladjaran kedjuruan, tehnologi dan ilmu eksakta dapat diusahakan mengatasinja dengan djalan melaksanakan ketentuan-ketentuan wadjib mengadjar.

Akan tetapi titik-berat akan diletakkan pada peningkatan mutu guru-guru jang sudah ada dengan memberikan bimbingan dan penjuluhan kepada mereka, jang bertudjuan selain memberikan kewenangan jang lebih tinggi, djuga untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan mereka didalam memahami dan melaksanakan gagasan-gagasan baru dibidang pembaharuan pendidikan (pembaharuan metode dan tehnik pendidikan). Oleh karena itu bimbingan penjuluhan jang dimaksudkan bukan sadja diberikan didalam bentuk up-grading, tetapi djuga refreshing, training, workshop dan sebagainja.

Bentuk-bentuk pendidikan guru jang bersifat darurat sedapat mungkin akan dibatasi dan sebaliknja usaha dipusatkan pada penjempurnaan standard-standard lembaga-lembaga seperti S.P.G. dan I.K.I.P. untuk achirnja menudju kepada kesatuan pendidikan guru.

Penentuan perbandingan djumlah murid terhadap tenaga-tenaga pendidikan, seperti guru, tenaga-tenaga tehnis (misalnja penilik sekolah, penjuluh pekerdjaan, ahli psychologi dan inspektur pendidikan), dan tenaga-tenaga administrasi tidak dapat ditentukan setjara mutlak. Tetapi pedoman umum jang dipergunakan ialah untuk senantiasa memperketjil ratio murid-guru menudju efisiensi jang optimal. Pada taraf pertama perlu diusahakan agar ratio guru-murid untuk sekolah dasar 1 : 35 ; sekolah landjutan 1 : 25 ; dan untuk perguruan tinggi 1 : 15.

a. *Pendidikan Guru Sekolah Dasar.*

Apabila peningkatan efisiensi pendidikan sekolah dasar berhasil sesuai dengan jang direntjanakan, maka pertambahan murid sekolah dasar mulai tahun 1968 sampai dengan achir Rentjana Pembangunan Lima Tahun diperkirakan sebesar 4.200.000 orang, sehingga djumlah seluruhnja pada tahun 1973 adalah 17.748.000 orang. Dengan ratio murid-guru 42 : 1, maka untuk ini diperlukan 422.000 guru.

Guru sekolah dasar jang ada sekarang ialah 332.000 ; dikurangi dengan tenaga-tenaga tersebut karena pensiun, berhenti, meninggal dunia atau pindah lapangan pekerdjaan diperkirakan sebesar 4 persen setiap tahun atau 22,5 persen untuk djangka waktu 5 tahun (atau sama dengan 74.600 orang), maka kekurangan tenaga guru sekolah dasar adalah 164.600 orang.

Lulusan sekolah-sekolah pendidikan guru pada waktu ini lebih kurang 26.000 orang, atau 130.000 orang untuk lima tahun. Kekurangan sebesar 35.000 orang dapat diatasi dengan mengadakan perluasan 12.500 tempat baru untuk 25.000 murid SPG Negeri, intensifikasi hasil sekolah-sekolah negeri jang sudah ada dan dengan menggunakan tjara dua shift disekolah-sekolah dasar serta pemindahan kembali tenaga guru jang pada waktu ini bekerdja dibidang lain.

Rata-rata diusahakan supaja setiap Kabupaten dapat memiliki SPG dengan mendahulukan daerah-daerah jang sangat membutuhkan. Dengan tjara ini dimaksudkan supaja setiap tjalon guru mengenal daerah lingkungannja.

b. *Pendidikan Guru Sekolah Landjutan Tingkat Pertama.*

Berkurangnja guru-guru S.L.T.P. karena berhenti, pindah lapangan pekerdjaan, pensiun dan meninggal dunia adalah 4 persen tiap

tahunnja atau sebesar 24 persen dalam djangka waktu 1967 sampai dengan 1973. Djumlah guru pada tahun 1967 adalah 61.700 sehingga dalam djangka waktu itu guru-guru jang ada akan berkurang sebanjak 14.800 orang. Lain daripada itu dalam djangka waktu jang sama, murid akan bertambah sehingga mendjadi 1.779.000 orang jang berarti memerlukan tenaga guru sebanjak 71.160 orang. Dengan demikian djumlah kekurangan guru SLTP dalam djangka waktu sampai dengan tahun 1973 ialah 24.260 orang.

Untuk mengatasi kekurangan guru tersebut, mulai tahun 1969 dan selandjutnja akan dikerahkan lulusan sardjana muda I.K.I.P. jang pada waktu ini diperkirakan djumlahnja sekitar 3.000 orang sehingga dalam djangka waktu 5 tahun akan menghasilkan 15.000 orang. Kekurangan jang tinggal sebanjak 9.260 orang akan dapat dipenuhi dengan tenaga-tenaga lulusan P.G.S.L.P. (jang pada waktu ini mempunjai lulusan sedjumlah 2.300 orang setahunnja).

P.G.S.L.P. jang ada sekarang setjara berangsur-angsur akan diintegrasikan kedalam I.K.I.P. sehingga ditjapai penjederhanaan serta efisiensi pendidikan guru sekolah landjutan. Usaha pengintegrasian ini diharapkan dapat selesai sebelum achir Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini.

5. *Pembinaan Perguruan Tinggi.*

Pembinaan Perguruan Tinggi akan meliputi usaha-usaha :

Rehabilitasi Perguruan Tinggi, terutama meliputi fakultas-fakultas/djurusan-djurusan eksakta : Pertanian, Kedokteran/Farmasi/ Tenaga Kesehatan lainnja dan Fakultas Tehnologi serta Keguruan Ilmu Eksakta/Tehnik/Kedjuruan jang sesuai dengan prioritas pembangunan. Rehabilitasi djuga diadakan bagi Fakultas-fakultas non-eksakta jang membantu memperlantjar pembangunan.

Bagi Fakultas Pembina Djurusan Eksakta akan mendapat perlengkapan dan fasilitas-fasilitas laboratoria, perpustakaan dan alat peraga jang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Bagi djurusan/fakultas eksakta, rehabilitasi untuk meningkatkan kwalitas tersebut diatas diadakan diseluruh tanah air. Bagi fakultas/ djurusan sosial, rehabilitasi diadakan difakultas-fakultas pembina. Untuk Fakultas-fakultas Pembina djurusan eksakta tersebut diatas sebagian besar sudah akan selesai diperlengkapi pada tahun 1972.

Disamping rehabilitasi dan pembinaan fasilitas, kurikulum akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Lembaga-lembaga Pene-

litian Ilmiah akan diperkuat dilingkungan Perguruan-perguruan Tinggi dan dimanfaatkan dalam rangka program pengabdian kepada masjarakat.

6. *Pendidikan Masjarakat dan Orang Dewasa.*

Masalah jang perlu segera mendapatkan pemetjahan adalah usaha mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pendidikan masjarakat dan orang dewasa jang dilakukan oleh berbagai instansi, sehingga program-program jang dilaksanakan akan lebih mudah diintegrasikan dengan program-program pembangunan lainnja dan lebih effektif didalam pelaksanaannja.

Program pendidikan masjarakat dan orang dewasa merupakan bagian penting dari program pembangunan desa pada umumnja.

Dalam hubungan ini maka usaha tersebut akan ditudjukan kepada para pemuka desa didalam bidangnja masing-masing (seperti pemuka pertanian, pertukangan, keradjinan tangan dan sebagainja), dan melalui mereka ini kemudian disebar-luaskan kepada seluruh massa rakjat desa.

Sekolah-sekolah jang merupakan lembaga modernisasi didaerahnja dimanfaatkan sebagai satu pusat kegiatan pendidikan orang desa, disamping tugas utamanja menjelenggarakan pendidikan formil.

7. *Program Pengembangan Pendidikan.*

Perbaikan mutu untuk semua tingkat dan djenis pendidikan merupakan salah satu atjara terpenting didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Program perbaikan mutu tersebut pada gilirannja adalah sebahagian dari program pendidikan jang akan diarahkan kepada tjorak pendidikan untuk pembangunan. Unsur-unsur kegiatannja bersifat penelitian dan pengembangan, antara lain mengenai pembaharuan sistim pendidikan, metode-metode mengadjar, pembinaan kurikulum, sistim pendidikan/latihan serta up-grading tenaga guru, pembaharuan naskah-naskah buku-buku peladjaran, alat-alat peraga dan alat-alat peladjaran lainnja. Termasuk pula didalamnja penjelenggaraan pendidikan dan latihan untuk tenaga-tenaga administrasi pengawas dan ahli pendidikan serta tenaga-tenaga penelitian pendidikan.

Persiapan dan pelaksanaan program pengembangan pendidikan ini, dengan demikian memerlukan usaha-usaha jang bersifat penelitian dan pengembangan jang bersifat luas dan kontinu. Untuk ini akan didirikan suatu Badan Pengembangan Pendidikan, jang mempunjai pula wewenang koordinatif terhadap lembaga-lembaga penelitian lainnja jang sedjenis.

8. *Pembinaan Kebudajaan dan Olah Raga.*

Program pengembangan kebudajaan nasional diarahkan kepada tiga sasaran pokok :

Pertama, penggalian unsur-unsur kebudajaan, termasuk kepurbakalaan dan permuseuman sebagai pusat-pusat penelitian dan penjaluran serta penanaman dan pengembangan kebudajaan.

Kedua, pembinaan kebudajaan jang antara lain meliputi pembinaan lembaga-lembaga pendidikan kesenian dan kegiatan-kegiatan kebudajaan didaerah-daerah.

Ketiga, pentjegahan kemungkinan pengaruh-pengaruh negatif kebudajaan asing.

Selain daripada itu pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala sebagai objek-objek pariwisata akan ditingkatkan.

Selandjutnja sedjalan dengan program pengembangan kepariwisataan akan diusahakan untuk membuka pusat-pusat kesenian, konservatori-konservatori karawitan dan diselenggarakannja restorasi museum-museum/tjandi-tjandi disekitar beberapa projek pariwisata.

Program pengembangan olah raga ditudjukan kepada peningkatan dan prestasi olah raga disekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi, dikalangan pegawai negeri sipil dan ABRI maupun dilingkungan masjarakat luas.

Untuk menundjang program tersebut akan ditingkatkan dan diperluas pendidikan tenaga-tenaga pembina olah raga dengan memanfaatkan sekolah olah raga jang sudah ada.

Adapun lulusan sekolah-sekolah tersebut jang direntjanakan adalah sebagai berikut :

Tabel X - A - 4

Rentjana Lulusan S.T.O.

Tingkat	*T A H U N*				
	(1969)	(1970)	(1971)	(1972)	(1973)
Sardjana Muda :	300	300	400	600	800
Sardjana :	50	50	80	100	125

Sardjana Muda S.T.O. akan dipekerdjakan sebagai guru olah raga disekolah-sekolah landjutan atas dan lulusan Sardjana S.T.O. akan dipekerdjakan sebagai guru olah raga baik disekolah landjutan atas maupun diperguruan tinggi.

Tabel X - A - 5

Rentjana Lulusan S.M.O.A.

S.M.O.A.	T A H U N				
	(1969)	(1970)	(1971)	(1972)	(1973)
Djumlah lulusan	1500	1500	2000	4000	6000

Kegiatan-kegiatan Lain.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan guru-guru olah raga di sekolah dasar maka akan diselenggarakan usaha-usaha untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pembina olah raga di sekolah dasar.

Usaha-usaha tersebut meliputi : peningkatan kurikulum di sekolah pendidikan guru, upgrading guru-guru sekolah dasar dalam bidang olah raga serta upgrading instruktur-instruktur olah raga.

9. *Pendidikan dan Latihan Institusionil.*

a. *Bidang-bidang Fisik :*

Usaha-usaha pendidikan dibidang-bidang ini meliputi pendidikan dibidang :

(1). *Pertanian.*

Untuk meningkatkan aparatur pertanian, akan dilaksanakan projek pendidikan pendjendjangan para pegawai serta perbaikan perpustakaan dan dokumentasi dalam waktu 5 tahun.

Bersamaan dengan itu usaha-usaha pendidikan akan diadakan pula dalam lapangan :

(a). *Pendidikan dan Penjuluhan Pertanian.*

Dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang pertama ini pendidikan akan merupakan variabel jang vital dalam usaha untuk mentjapai sasaran-sasaran jang telah ditentukan.

Demikian djuga halnja dengan usaha-usaha mentjapai target produksi beras, pendidikan akan memegang peranan jang penting.

Pendidikan dibidang Pertanian dapat ditudjukan kepada golongan-golongan bukan petani, jang tidak mempunjai hubungan langsung dengan pertanian, golongan bukan petani jang melajani kepentingan petani dan kepada golongan petani sendiri.

Pendidikan Pertanian diwaktu-waktu jang lampau kurang mendapat perhatian jang selajaknja. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum-kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Me-

nengah Atas, dimana pendidikan pertanian tidak masuk dalam kurikulum tersebut. Ini merupakan kelemahan djika dibandingkan dengan kenjataan bahwa lebih dari 70 persen penduduk Indonesia mata pentjahariannja tergantung dari sektor pertanian. Sebagai akibat dari kelemahan kurikulum tersebut appresiasi mengenai pentingnja pertanian diperekonomian Indonesia sangat dirasakan.

Karenanja setjara berangsur-angsur selama lima tahun jang akan datang ini akan dilaksanakan perubahan kurikulum pada sekolah-sekolah tersebut diatas agar peladjar-peladjar mendapat peladjaran disegi pertanian untuk setidak-tidaknja meningkatkan appresiasi serta pengertian mereka mengenai usaha pertanian dan peranan petani dalam pembangunan ekonomi.

Untuk golongan bukan petani jang melajani kepentingan petani (tenaga-tenaga penjuluhan, perentjanaan dan pendidikan) memang sudah ada suatu sistim pendidikan, meskipun tarapnja harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan jang membanjak dan meningkat mutunja. Rentjana Pembangunan Lima Tahun akan menitik-beratkan pada perbaikan mutu penjuluhan, penelitian, perentjanaan dan pendidikan pada taraf perguruan tinggi.

Untuk golongan petani disediakan dua djenis pendidikan, jaitu pendidikan dasar dan pendidikan penjuluhan.

Pendidikan dasar ditudjukan untuk mendidik petani membatja, menulis dan menghitung, sedangkan pendidikan penjuluhan ditudjukan untuk meningkatkan keahliannja sebagai petani. Kedua djenis pendidikan ini menutupi kekurangan satu sama lain dan tudjuan jang sama dari kedua djenis pendidikan tersebut adalah memperluas pandangan dan pengetahuan petani mengenai alternatief-alternatief jang ada, dan akan memberikan kesadaran padanja dia bebas dalam memilih alternatief jang terbaik untuk dia.

Bimas merupakan suatu metode penjuluhan dengan tjara integrated action dari semua instansi jang bergerak dibidang peningkatan produksi padi. Walaupun dengan adanja Bimas dapat ditjapai hasil jang menggembirakan, namun usaha-usaha penjuluhan masih perlu ditingkatkan agar dapat mentjapai sasaran produksi jang sudah digariskan di Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Peningkatan kegiatan usaha penjuluhan tergantung dari mutu dan ketrampilan para petugas, mobilitas, sarana-sarana penjuluhan petugas, terutama pada tingkat ketjamatan.

Mutu dan ketrampilan para petugas-petugas tehnis pertanian jang berdjumlah lebih kurang 4.000 orang tersebar diseluruh Indo-

nesia perlu ditingkatkan dengan pendjendjangan, penggantian petugas-petugas dengan petugas-petugas jang lebih mampu, pembinaan subject matter specialist untuk tingkat kabupaten serta beberapa daerah dibawahnja jang mempunjai kegiatan-kegiatan jang chusus.

Dalam hal pengisian petugas-petugas baru jang harus menggantikan petugas-petugas jang lama, lulusan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) negeri jang berdjumlah 10 buah dan jang dapat menghasilkan 400 orang per-tahun, Sekolah Pertanian Menengah Atas daerah-daerah dan swasta jang berdjumlah 57 buah dalam tahun 1969 diharapkan dapat menghasilkan 200 orang, dapat segera mengisinja. Diwaktu-waktu jang lampau hambatan dalam pelaksanaannja terutama terletak pada tidak adanja formasi dan anggaran didaerah-daerah.

Djadi dalam lima tahun jang akan datang ini lebih kurang 40 persen dari petugas-petugas tehnis diketjamatan-ketjamatan setjara berangsur-angsur akan diganti dengan lulusan Sekolah Pertanian Menengah Atas dan 60 persen lainnja perlu di-upgrade hingga pengetahuan mereka mentjapai taraf Sekolah Pertanian Menegah Atas.

Penjempurnaan mobilitas tenaga-tenaga penjuluh dengan menambah djumlah alat-alat transport untuk kegiatan penjuluhan, tersedianja anggaran belandja jang tjukup serta memperlengkapi dinas-dinas penjuluhan antara lain audio visual units akan membantu memperlantjar pekerdjaan penjuluhan.

Disamping itu penjediaan unit-unit perpustakaan pertanian jang minimal untuk ketjamatan dan kabupaten sudah merupakan program jang mendesak bila diingat akan perkembangan kemadjuan tehnologi dan perlunja para petugas mendapat informasi dan ilmu jang up to date.

Dalam rangka memperluas djaringan dan luas penjuluhan, tidak ketjil peranan-peranan manual-manual dan publikasi-publikasi sehingga sudah dipandang perlu adanja pengadaan pusat produksi informasi pertanian dipusat dan daerah agar supply bahan-bahan tentang ini bisa lebih tjepat tertjapainja serta dalam djumlah jang lebih mentjukupi dari sekarang.

Disamping penggunaan mass-media tersebut datas jang sifatnja dalam djangka waktu jang akan datang masih terbatas akan diusahakan dengan lebih intensif kontak-kontak kelompok dan kontak-kontak perseorangan. Disini peranan formal dan informal farm localleader sangat besar. Mereka dapat merupakan perantara jang effectief dalam membawakan hal-hal baru antara petugas pertanian diketjamatan dan para petani dilingkungannja.

Selain usaha-usaha tersebut diatas dalam lima tahun jang akan datang ini akan diusahakan pembinaan kerdjasama antara lembaga-lembaga penjuluhan, penelitian, pendidikan dan perentjanaan untuk saling memperoleh manfaat serta memperbesar pengaruhnja terhadap tertjapainja target-target produksi. Antara lembaga-lembaga penelitian dan penjuluhan harus diadakan kerdjasama jang erat untuk memungkinkan lembaga-lembaga penelitian mendapat feed-back keterangan mengenai persoalan-persoalan jang dihadapi oleh penjuluh dalam aplikasi hasil-hasil penelitian dilapangan.

Melalui penjuluhan petani akan diberi tahu mengenai adanja tehnologi baru, input baru jang lebih tinggi produktivitasnja, mengenai tjara-tjara untuk memasarkan hasil-hasilnja jang lebih effisien dan mengenai segi-segi ekonomi dari proses produksi. Terutama jang terachir ini diwaktu-waktu jang lampau kurang diperhatikan meskipun diakui bahwa penjuluhan aspek-aspek ekonomi lebih sukar daripada aspek-aspek tehnis.

(b). Disamping pendidikan dan penjuluhan pertanian Departemen Pertanian akan mengadakan usaha-usaha pendidikan didalam lapangan-lapangan jang berada dibawah asuhan Departemen tersebut, jaitu pendidikan kehutanan, pembinaan aparatur dan tenaga peternakan dengan djalan antara lain pembangunan Sekolah-sekolah Kehewanan Menengah Atas di Bogor, Atjeh, Makassar, Kupang dan Semarang dan pendidikan perikanan.

(2). *Pendidikan Dibidang Industri Tekstil dan Keradjinan Rakjat.*

Untuk mngatasi persoalan-persoalan tenaga kerdja dibidang perindustrian Departemen Perindustrian menjelenggarakan usaha-usaha pendidikan. Usaha-usaha tersebut adalah :

(a). Berbagai Akademi seperti Akademi Tekstil Bandung jang telah diintegrasikan dengan Perguruan Tinggi Ilmu Tekstil, Akademi Tehnologi Kulit Jogjakarta, Akademi Kimia Analis Bogor, Akademi Pimpinan Perusahaan di Djakarta diperkirakan akan tjukup dapat memenuhi kebutuhan tenaga akademis.

(b). Untuk memenuhi tenaga-tenaga kader dibidang (keradjinan) telah didirikan sekolah/kursus-kursus kedjuruan seperti pendidikan Tehnologi Tekstil di Bandung, Pendidikan Keramik di Bandung, Kursus Tehnologi Batik di Jogja, Sekolah Tehnologi Menengah Atas dan Sekolah Perindustrian Menengah Atas di Jogja.

Didalam Rentjana Lima Tahun kegiatan-kegiatan pendidikan jang akan diselenggarakan adalah :

Mengadakan pendidikan/upgrading untuk tenaga pengawas menengah dan rendah dibidang perindustrian dengan djalan :

— Meningkatkan upgrading tenaga-tenaga jang ada.

— Mendorong diadakannja kursus-kursus perindustrian oleh perusahaan-perusahaan sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

— Menejmpurnakan dan memperbesar daja tampung hasil pendidikan kader perindustrian menengah.

— Mengadakan penjempurnaan kurikulum pada pendidikan tinggi dan menengah.

Dibidang Keradjinan Rakjat akan diadakan :

— Penjelenggaraan latihan-latihan dan kursus-kursus keradjinan, direntjanakan didirikan untuk setiap Dati I.

— Membantu penjelenggaraan Sekolah Pendidikan Industri Keradjinan, dalam rangka kerdjasama dengan Direktorat Pendidikan Kedjuruan. Penjelenggaraan dan pembentukan Akademi chusus dalam bidang seni dan keradjinan, dan diharapkan dapat digabungkan dengan Universitas Negeri jang telah ada.

Pengiriman kader-kader keradjinan keluar negeri, sebanjak tiga orang setiap Dati I untuk tiap-tiap tahun.

(3). *Pendidikan dilingkungan Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik.*

Didalam rangka mempersiapkan aparatur, Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik mengadakan usaha-usaha pendidikan untuk mempertinggi mutu para pegawai baik berupa kursus-kursus regulair, kursus-kursus upgrading dan refreshing jang diselenggarakan oleh instansi diluar Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Usaha-usaha pendidikan jang telah didjalankan antara lain :

a). Sekolah/kursus regulair seperti : Kursus Tehnik (Kurtek) di Jogja dan Surabaja, Kursus Kader Tehnik (Kukat) di Jogja dan Medan, Akademi Tehnik Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik (ATPUT) di Bandung, Sekolah Staf dan Pimpinan Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik.

b). Kursus upgrading dan refreshing jaitu : Kursus Konstruksi Djalan di Jogja, Kursus Administrasi Keuangan, Kursus Logistik, Kursus Bina Marga, Udjian Dinas, Kursus Irigasi.

c). Usaha-usaha lain seperti tjeramah-tjeramah dan lain-lainnja.

Kegiatan jang direntjanakan didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun adalah :

a). Kursus-kursus regulair seperti : SESPUT dengan target 200 — 300 orang dalam 5 tahun. ATPUT dengan target 400 — 500 orang, KUKATPUT dengan target 600 — 700 orang.

b). Kursus-kursus singkat dengan target 2.000 — 2.900 orang jang terdiri dari bermatjam tenaga jang dibutuhkan. Total target dalam 5 tahun adalah 3.200 — 4.400 orang.

(4). *Pendidikan Dibidang Perhubungan.*

Untuk lebih meningkatkan keahlian serta dalam rangka mentjukupi tenaga-tenaga jang terdidik setjara chusus dibidang perhubungan oleh Departemen Perhubungan diadakan lembaga-lembaga pendidikan baik dalam pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah serta kursus.

(a) Demikianlah untuk perhubungan udara dalam bidang pendidikan tinggi telah diadakan Akademi Penerbangan Indonesia di Tjurug, Tanggerang, Akademi Meteorologi dan Geofisika di Djakarta. Kursus-kursus djuga diadakan didalam lapangan meteorologi dan geofisika, klimatologi dan telegrafis.

(b) Untuk masalah-masalah jang menjangkut perhubungan laut didalam taraf Perguruan Tinggi/Akademi telah ada Akademi Ilmu Pelajaran di Djakarta ; sedangkan dalam tingkat pendidikan di Semarang dan Makassar. Kursus-kursus djuga diadakan dalam lapangan ilmu pelajaran dan pelabuhan.

(c) Berkenaan dengan perhubungan darat telah ada Sekolah Opseter Kereta Api di Bandung disamping kursus-kursus untuk pimpinan dalam lapangan tersebut.

(d) Untuk masalah-masalah jang menjangkut pos dan telekomunikasi telah ada Akademi Pos dan Telekomunikasi di Bandung, serta kursus Pembimbing dan penjusun Pos dan Giro, telekomunikasi.

b. *Bidang Ekonomi dan Keuangan.*

Masalah-masalah pendidikan jang diselenggarakan dalam bidang-bidang ini meliputi bidang-bidang :

(1) *K e u a n g a n.*

Dalam usaha meningkatkan kwalitas petugas-petugas keuangan dalam tingkat pendidikan tinggi telah ada :

(a) Sekolah Tinggi Keuangan Negara di Djakarta jang antara tahun 1961 — 1968 telah menghasilkan sedjumlah lebih dari 3.000 orang.

(b) Akademi Akuntan Padjak di Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaja, Makassar, Palembang dan Medan dengan out-put antara 20-74 bagi masing-masing tempat tersebut.

(c) Akademi Adjun Akuntan Negara di Bandung, Djakarta, Semarang, Surabaja, Makassar, Medan, Palembang dan Ambon, jang telah menghasilkan hampir 300 orang.

(d) Akademi Thesauri Negara di Djakarta, Medan dan Surabaja. Kursus-kursus diadakan dalam lapangan perpadjakan dan keuangan Negara.

(2) *Pendidikan Dibidang Perdagangan.*

Untuk meningkatkan kwalitas tenaga perdagangan dalam tingkat pendidikan tinggi telah ada Akademi Dinas Perdagangan di Djakarta dan Akademi Metrologi di Bandung, disamping itu untuk meningkatkan kwalitas dari skilled level manpower diadakan kursus-kursus administrasi dan pemasaran serta upgrading para karyawan Departemen dan Perusahaan-perusahaan Negara. Tugas beladjar kepada pegawai diadakan djuga baik keluar negeri maupun di Universitas-universitas dalam negeri.

(3) *Pendidikan Dibidang Koperasi.*

— Pendidikan perkoperasian di Indonesia masih kurang, baik dimasjarakat, disekolah-sekolah maupun diperguruan tinggi dan demikian pula halnja dengan usaha-usaha penjuluhan/penerangan/publikasi.

— Sampai sekarang tidak ada training-centre. Kegiatan-kegiatan jang akan diselenggarakan didalam bidang pendidikan dan penjuluhan perkoperasian dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun adalah meliputi :

(a) Pembangunan training-centre di Djakarta, Banda Atjeh, Mataram, Bandjarmasin dan Makassar.

(b) Training keluar negeri.

c. *Bidang-bidang Sosial.*

Usaha-usaha jang termasuk didalam bidang ini adalah :

(1) *Pendidikan Dibidang Kesehatan.*

Pendidikan kesehatan dilakukan oleh Departemen Kesehatan. Usaha-usaha tersebut meliputi pendidikan tenaga-tenaga kesehatan jang diselenggarakan melalui :

(a) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah-sekolah/fasilitas pendidikan jang ada untuk meningkatkan djumlah lulusan.

(b) Mempergiat pendidikan tenaga-tenaga para medis untuk mentjukupi kebutuhan baik karena kekurangan jang ada maupun karena perluasan dan peningkatan usaha-usaha lajanan kesehatan jang direntjanakan.

(c) Mengadakan kursus-kursus orientasi dibidang public-health dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga untuk P.K.M., dengan membuka training-centre ditiap Propinsi.

(2) *Pendidikan Dibidang Penerangan.*

Usaha-usaha pendidikan dibidang penerangan diselenggarakan oleh Departemen Penerangan. Usaha-usaha tersebut meliputi : pendidikan djurupenerang, seperti :

(a) Pendidikan pegawai staf Departemen Penerangan tingkat pertama dan atas, dengan masa pendidikan 1 tahun.

(b) Akademi Penerangan dengan masa pendidikan 3 tahun.

(c) Kursus-kursus djangka pendek.

(d) Bermatjam-matjam pendidikan media komunikasi massa diluar negeri jang ditudjukan buat para petugas-petugas pengawasan.

Kegiatan-kegiatan jang direntjanakan dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini adalah : Upgrading tenaga penerangan dalam arti luas baik melalui pendidikan formil (Akademi Penerangan, PPSDA, PPSD) maupun melalui kursus-kursus upgrading dan aplikasi, setjara intensip, sehingga dalam waktu lima tahun djumlah tenaga-tenaga jang mendapat upgrading/pendidikan dipelbagai matjam bidang dapat ditingkatkan dengan 100 persen dengan perbandingan 20 persen dari tingkat atas dan 80 persen dari tingkat menengah. Prioritas diberikan kepada kursus-kursus/pendidikan djangka pendek supaja segera dapat menghasilkan tenaga-tenaga jang diperlukan.

(3). *Pendidikan Dibidang Kesedjahteraan Sosial.*

Usaha-usaha pendidikan dibidang kesedjahteraan rakjat diselenggarakan oleh Departemen Sosial. Usaha-usaha tersebut didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun meliputi :

(a) Pendidikan/latihan social worker, untuk meningkatkan mutu daripada pekerdja-pekerdja sosial.

(b) Pentjiptaan tenaga dengan pengembangan serta upgrading tenaga-tenaga pimpinan melalui kursus-kursus/latihan singkat bagi karyawan-karyawan pemerintah dan swasta.

(c) Perluasan/pembangunan S.T.K.S. jang sampai sekarang baru ada sebuah di Bandung, penambahan tenaga pengadjar untuk K.K.S.P., K.K.S.M. dan S.T.K. S.

(d) Penjuluhan dan bimbingan sosial kepada masjarakat, dengan djalan media massa, publikasi, kundjungan dari rumah kerumah dan sebagainja.

(4). *Pendidikan Dibidang Agama.*

Usaha-usaha pendidikan dibidang agama diselenggarakan oleh Departemen Agama. Usaha-usaha tersebut meliputi :

(a) Perluasan I.A.I.N. serta mengadakan kegiatan-kegiatan jang bersifat ilmiah (survey, seminar dan lain-lain).

(b) Rehabilitasi P.G.A.N.

(c) Usaha-usaha perbaikan kurikulum, isi dan methode untuk peningkatan mutu merupakan bagian terpenting didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun bidang Agama.

(5). *Pendidikan Dibidang Administrasi Pemerintahan.*

Kegiatan-kegiatan jang direntjanakan oleh Departemen-departemen tersebut diatas adalah kegiatan-kegiatan jang bersifat tehnis operasionil. Untuk kegiatan-kegiatan pendidikan jang bersifat administratif dan management diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Berkenaan dengan ini untuk meningkatkan mutu para pegawai akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan jang meliputi :

(a) Training chusus bagi tenaga-tenaga dalam bidang jang urgent dalam rangka RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN.

(b) Training Bendaharawan.

(c) Training bagi para perentjana ditingkat pusat/daerah.

(d) Administrative Staff College untuk para pegawai senior.

(e) Administrative Development Research Centre.

(f) Training pedjabat-pedjabat personalia.

(g) Training pedjabat-pedjabat daerah.

Pendjelasan lebih landjut dapat dilihat dalam uraian pendidikan dibidang jang bersangkutan.

10. *Program Peningkatan Penelitian/Survey.*

Kegatan ilmiah dilakukan oleh :

a. Lembaga-lembaga research dalam lingkungan Departemen, jang terutama ditudjukan pada usaha-usaha memetjahkan persoalan tehnis dan membantu dalam pengarahan pelaksanaan tugas Departemen jang bersangkutan.

b. Universitas-universitas, jang melakukan basic research dan applied research jang terutama diarahkan untuk kepentingan pendidikan tenaga-tenaga ilmiah serta usaha-usaha memetjahkan problema dan usaha memenuhi kebutuhan masjarakat.

c. Lembaga research dalam lingkungan non Departemen (termasuk L.I.P.I., BATAN dan L.A.N.).

Masalah jang dihadapi dalam lapangan ini adalah kurangnja tenaga tehnis serta pelaksanaan research jang bermutu karena belum terbinanja dengan baik factor-factor jang menundjang kegiatan research tersebut seperti factor suasana politis dan ekonomis, factor kepustakaan ilmiah jang up to date, factor peralatan dan bahan-bahan ilmiah disamping factor-factor pembiajaan.

Dalam rangka pembangunan dewasa ini pengarahan kegiatan-kegiatan research akan dititik-beratkan kepada applied research dan terutama jang bersifat quick-yielding didalam sektor pertanian/agraria, sandang, natural resources, penduduk, kesehatan, industri, perhubungan.

Sama halnja dengan penelitian sasaran pokok daripada survey dalam rangka pembangunan dewasa ini akan ditudjukan kepada :

a. Peningkatan produksi pertanian-pangan.

b. Peningkatan industri jang menundjang pertanian.

c. Peningkatan kegiatan-kegiatan jang menghasilkan devisa.

d. Peningkatan effectivitas dan efficiensi prasarana.

e. Perluasan lapangan kerdja dan

f. mentjiptakan peri-kehidupan bangsa jang berke-Tuhan-an Jang Maha Esa bermental dan berachlak jang dapat merangsang proses pembangunan.

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun
(1969/70 — 1973/1974)

PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN

(dalam djutaan rupiah)

Bidang/Sektor/ Sub-Sektor/Program	*Anggaran Pembangunan Negara*	
	1969/1970	*1969/1970—1973/1974*
Bidang Sosial		
Sektor Pendidikan dan Kebudajaan	10.538 x)	95.000
1. *Sub-Sektor Pendidikan*	5.813 x)	53.729
a. Program Peningkatan mutu Sekolah Dasar	360	3.348
b. Program Penambahan Pendidikan Kedjuruan pada Sekolah Landjutan Umum	300	2.500
c. Program Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan	2.454	21.373
d. Program Peningkatan Pendidikan Guru	239	2.621
e. Program Pembinaan Perguruan Tinggi	1.700	15.500
f. Program Peningkatan Pendidikan Masjarakat dan Orang Dewasa	160	1.742
g. Program Pengembangan Pendidikan	—	6.645
2. *Sub-Sektor Kebudajaan*	*370*	*5.271*
a. Program Pengembangan Kebudajaan Nasional	279	4.305
b. Program Peningkatan Kegiatan Olah Raga	91	966
3. *Sub-Sektor Pendidikan dan Penelitian Institusionil*	*4.355*	*36.000*
a. Program Pendidikan/ Latihan Institusionil	3.200	26.164
b. Program Peningkatan Penelitian/Survey	1.155	9.836

x) Termasuk Rp. 600.000.000,— bantuan projek/bantuan tehnis untuk Sektor Pendidikan dan Kebudajaan.

B. TENAGA KERDJA

KEADAAN DAN MASALAH-MASALAH.

Sama halnja dengan negara lain jang sedang berkembang, maka Indonesia masih menampakkan tjiri-tjiri dari ekonomi tradisionil jang sebagian besar pertanian, tingkat pendapatan per capita jang rendah, penjebaran pendapatan nasional jang tidak merata dan tingkat penabungan dan investasi jang rendah pula.

Rendahnja tingkat perkembangan ekonomi dan banjaknja keterbelakangan jang harus dikedjar, memerlukan penggunaan jang effektif dari semua sumber-sumber jang tersedia seperti sumber manusia (tenaga kerdja), modal dan material.

Sedjak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia telah menentukan bahwa salah satu tanggungdjawab dan kewadjiban Pemerintah ialah menjediakan kesempatan kerdja bagi tiap warga-negara jang ingin dan mampu bekerdja. Hal ini adalah pengrealisasian dari ketentuan jang tertjantum dalam pasal 27 ajat (2) dari Undang-undang Dasar 1945, jang berbunji :

> "tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan jang lajak bagi kemanusiaan".

Dalam hubungan ini salah satu tudjuan Rentjana Pembangunan Lima Tahun ialah memperluas kesempatan kerdja untuk mengurangi pengangguran serta menampung pertambahan tenaga kerdja.

Dalam rangka pelaksanaan dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun, kebidjaksanaan pokok dalam bidang tenaga kerdja ditudjukan kepada penjediaan tenaga kerdja dalam djumlah jang tjukup dengan keahlian jang diperlukan sesuai dengan perkembangan dalam kegiatan ekonomi, dan penjediaan kesempatan kerdja.

Kebidjaksanaan ini membawa konsekwensi bahwa sebagian besar tenaga kerdja akan dibina dan dikembangkan kesanggupannja serta dipergunakan dengan sebaik-baiknja.

Untuk mempermudah pelaksanaan kebidjaksanaan akan disusun rentjana tenaga kerdja sebagai bagian integral dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Dengan demikian usaha-usaha untuk mentjapai sasaran dalam bidang tenaga kerdja berdjalan bersama-sama dengan usaha-usaha untuk mentjapai sasaran-sasaran jang lainnja.

Pembinaan dan penggunaan sumber tenaga kerdja setepat-tepatnja djelas akan turut menghasilkan peningkatan produksi, memper-

baiki penjebaaran pendapatan nasional, sehingga dengan demikian sasaran pengluasan kesempatan kerdja tidaklah akan menjulitkan tertjapainja sasaran jang lain.

Perkiraan menundjukkan bahwa penduduk Indonesia meningkat dengan tjepat dalam tahun-tahun terachir.

Penjebaran penduduk Indonesia setjara geografis sangat tidak merata. Tambahan pula 85 persen dari penduduk Indonesia terdapat didaerah-daerah pedesaan sehingga pertumbuhan penduduk dan angkatan kerdja jang meningkat terdapat dipedesaan dimana kegiatan-kegiatan ekonomi terbatas pada pertanian. Pada pihak lain didaerah-daerah luar Djawa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan luas dalam bidang pertanian. Menurut perkiraan tanah jang dikerdjakan didaerah luar Djawa dan Madura hanja meliputi 10 persen dari seluruh wilajah sehingga masih tersedia tempat untuk pengluasan pertanian setjara besar-besaran.

Sebagian besar angkatan kerdja Indonesia ada pada sektor-sektor kegiatan ekonomi sebagai berikut :

	Sensus penduduk 1961 (persen)	*Susenas* 1964/1965 (persen)
Pertanian	71,9	70,4
Pertambangan	0,3	0,3
Manufacturing (Industry)	5,7	4,8
Bangunan	1,0	1,8
Gas dan Air	0,1	0,1
Perdagangan, Bank dan Asuransi	6,7	7,8
Pengangkutan/Perhubungan	2,1	2,1
Djasa-djasa termasuk pegawai	9,5	12,2
Sektor-sektor lain	1,5	0,8

Setjara kwantitatip pendidikan di Indonesia sedjak kemerdekaan memperoleh kemadjuan-kemadjuan pesat dari tingkat sekolah dasar sampai keperguruan tinggi.

Dari angka-angka mengenai djumlah sekolah dan murid, sekolah-sekolah dasar, menengah dan pendidikan tinggi djelaslah bahwa pendidikan menengah di Indonesia lebih banjak mendjurus kepada pendidikan umum, sedang pada pendidikan tinggi djumlah mahasiswa jang mengikuti mata peladjaran ilmu sosial lebih banjak.

Karena struktur pendidikan jang tidak seimbang ini maka dalam taraf pembangunan sekarang ini sangat dirasakan kekurangan-kekurangan jang kritis akan tenaga-tenaga kerdja terlatih, dibidang tehnik

dan kedjuruan rendahan, menengah dan tingkat tinggi sehingga timbul usaha-usaha pembukaan kursus-kursus dan akademi-akademi dinas dari Departemen-departemen maupun dari beberapa perusahaan besar. Usaha-usaha terachir ini adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada Departemen-departemen atau perusahaan jang bersangkutan.

Koordinasi serta penjesuaian latihan-latihan jang diadakan dengan keadaan kebutuhan dalam masjarakat harus diusahakan, dengan memanfaatkan seluas-luasnja segala fasilitas jang terdapat dipusat-pusat latihan, baik jang terdapat di Departemen-departemen ataupun diperusahaan-perusahaan.

Dizaman pra-Gestapu/PKI hubungan perburuhan sangat buruk berhubung peranan dari SOBSI/PKI jang mendominir semua kegiatan-kegiatan buruh. Djuga berhubung banjak tekanan diberikan pada perselisihan antara buruh dan perusahaan, maka suatu suasana saling tidak mempertjajai dan bermusuhan terdapat pada waktu itu. Satu dan lainnja sangat menghalangi peningkatan produksi. Untuk mendjamin effisiensi dan djuga untuk meningkatkan produksi pada perusahaan, akan diusahakan tertjapainja suatu hubungan perburuhan jang sehat.

MASALAH-MASALAH.

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerdja lebih tjepat dari pada pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembentukan modal untuk mentjiptakan kesempatan kerdja pada pelbagai sektor kegiatan ekonomi untuk menampung ladjunja pertambahan angkatan kerdja.

Penjebaran penduduk dan angkatan kerdja jang tidak merata menimbulkan kepadatan penduduk didaerah-daerah tertentu dan kelebihan tenaga kerdja pada sektor-sektor tertentu mengakibatkan meradja-lelanja setengah pengangguran, chusus didaerah-daerah pedesaan di Djawa. Sementara itu didaerah-daerah luar Djawa sangat dirasakan kekurangan tenaga kerdja mulai dari tenaga tidak terlatih sampai ketingkat tenaga ahli dan sardjana-sardjana.

Akibat terbatasnja daja tampung tanah pertanian jang tersedia, maka lebih banjak tenaga kerdja berlebihan mengalir kekota-kota besar di Djawa, chususnja Djakarta. Hal ini mengakibatkan pertambahan penduduk dikota-kota, dimana tidak tersedia kesempatan kerdja bagi mereka, sehingga setengah pengangguran didaerah-daerah pedesaan meluas kekota-kota, jang terachir ini kemudian mendjadi pengangguran kentara dan memperbesar djumlah penganggur dikota.

Pengangkatan pegawai Pemerintah dan Perusahaan-perusahaan Negara dizaman rezim lama didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politis. Hal ini telah menimbulkan overstaffing pada pelbagai instansi, terutama pada tingkatan rendahan jang telah sangat mempengaruhi effisiensi aparat Pemerintah dan Perusahaan-perusahaan Negara.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.

Kebidjaksanaan dalam bidang tenaga kerdja merupakan suatu bagian jang integral dari seluruh proses Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Berhubung dengan itu akan diperhatikan effeknja terhadap keadaan tenaga kerdja dari semua tindakan-tindakan jang diandjurkan oleh Pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, baik dalam sektor Pemerintah maupun Swasta. Beberapa tindakan atau aparat adalah usaha-usaha pelaksanaan kebidjaksanaan, chusus dalam bidang tenaga kerdja, antara lain, jang mengenai upah, penempatan tenaga, pentjiptaan kesempatan kerdja, latihan kerdja dan lain-lain.

Untuk membantu pelaksanaan dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun, maka sasaran umum dari perentjanaan tenaga kerdja ditudjukan kepada mengatasi kekurangan dari persediaan tenaga kerdja terlatih dan tenaga-tenaga ahli tingkat tinggi supaja dapat mendjamin pelaksanaan projek-projek dan kebidjaksanaan pembangunan dan mentjiptakan sebanjak mungkin kesempatan kerdja untuk mentjegah lebih memburuknja keadaan kesempatan kerdja dan djika mungkin memperbaikinja.

Dari segi lain pengangguran dan setengah pengangguran dapat merupakan faktor jang krisis dalam usaha pembangunan. Dalam hubungan ini maka dapat dianggap perlu kesempatan kerdja diberi prioritas walaupun dengan ini perlu diadakan penjesuaian dari beberapa sasaran, misalnja lebih menekankan projek-projek jang bersifat padat-karya serta lain pekerdjaan darurat.

Dengan demikian maka sasaran kesempatan kerdja harus merupakan bagian jang tidak terpisahkan dari lain sasaran pembangunan nasonal. Ini berarti bahwa penjediaan tenaga kerdja, dengan keahlian jang diperlukan dan pentjiptaan kesempatan kerdja harus ditudjukan untuk membantu sektor-sektor pembangunan jang mendapat prioritas, jaitu pertanian, industri pembantu pertanian, penghasil devisa (perhubungan, pariwisata, perkebunan, kehutanan), pertekstilan dan prasarana serta djuga industri ketjil-ketjil. Dalam usaha-usaha untuk mentjapai sasaran diatas maka prioritas akan diberikan kepada (1) pemberian fasilitas training untuk mengatasi kematjetan jang disebabkan keku-

rangan tenaga kerdja terlatih, (2) pentjiptaan kesempatan kerdja diwilajah-wilajah jang mengalami kepadatan penduduk dan setengah pengangguran, (3) usaha-usaha mentjegah meningkatnja pengangguran tenaga muda, (4) perbaikan dalam hubungan perburuhan, (5) peningkatan mutu organisasi dan kepemimpinan, (6) pendaja-gunaan pegawai pemerintah/reorganisasi aparat pemerintah dan (7) pengumpulan data-data tentang tenaga kerdja.

Dalam menghadapi masalah pertambahan penduduk dan angkatan kerdja jang tjepat maka perentjanaan keluarga merupakan kebidjaksanaan djangka pandjang jang pengaruhnja baru dapat dirasakan dalam djangka waktu 10 — 15 tahun.

Perentjanaan keluarga akan dapat menekan djumlah orang-orang jang mendjadi tanggungan, chusus didaerah-daerah jang padat penduduknja. Dengan demikian maka dapat tertjapai peningkatan kemampuan untuk menabung dan pembentukan permodalan serta investasi jang akan mengakibatkan meluasnja kesempatan kerdja dan dana jang sebelum ini diperuntukkan bagi pembiajaan orang-orang jang mendjadi tanggungan sehingga dapat dipergunakan untuk memelihara kesehatan dan kesedjahteraan angkatan kerdja jang sehat dan bekerdja lebih produktip.

Dalam menghadapi tidak seimbangnja penjebaran penduduk dan angkatan kerdja serta kepadatan penduduk dan kelebihan tenaga kerdja di Djawa dan Madura, maka dalam djangka pandjang rentjana transmigrasi jang dikaitkan dengan usaha-usaha pembangunan merupakan salah satu usaha jang dapat membantu mengurangi kepadatan penduduk di Djawa.

Untuk penggunaan sumber tenaga kerdja setjara lebih baik dan penuh maka penggunaan setjara intensif dari modal dan alat-alat harus diusahakan. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan bahan-bahan baku/penolong, seperti bibit unggul, pupuk dan lain-lain, djuga dengan menggunakan alat modal lebih effisien, misalnja memperbanjak djumlah djam kerdja tiap hari. Langkah-langkah ini dapat diadakan dibidang-bidang pertanian dan sektor-sektor lainnja seperti bangunan, pengangkutan dan lain-lain.

Penggunaan sebagian besar dari alat-alat modal bekerdja dengan 2 atau 3 shift maka baik kesempatan kerdja maupun output dapat dilipat-gandakan. Hal ini djuga dapat meningkatkan penggunaan dari managerial, supervisory dan technical skill jang sangat terbatas di Indonesia.

Kebidjaksanaan terhadap penjesuaian dari persediaan tenaga kerdja dengan kebutuhan untuk pembangunan ekonomi harus ditudjukan kearah pembaharuan dari system pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Penindjauan kembali dari kurikulum akan diadakan sehingga terdapat kesempatan untuk mendapat peladjaran praktek jang memungkinkan dipeladjarinja segi praktis dari pengetahuan jang diikutinja.

Dalam djangka pendek dan untuk dapat membantu pelaksanaan rentjana pembangunan maka perhatian penuh harus diberikan terhadap latihan kerdja, upgrading, refreshing atau advanced courses. Untuk para penganggur harus diberi kesempatan untuk memperoleh kedjuruan jang sesuai dengan kebutuhan.

Langkah-langkah djangka pandjang ditudjukan untuk :

(1) mengadakan peraturan untuk mengawasi atau membatasi pembukaan sekolah-sekolah menengah umum dan fakultas sosial politik dan memperbanjak sekolah-sekolah kedjuruan. Mendorong pengembangan dari fakultas untuk ilmu pengetahuan exact,

(2) meratakan dasar bagi pembaharuan dari system pendidikan dan penjempurnaan dari kurikulum jang diarahkan kepada pengetahuan-pengetahuan praktis sesuai dengan kebutuhan masjarakat dengan menjediakan fasilitas-fasilitas seperti alat-alat, laboratorium untuk praktek dan lain-lain peralatan jang memungkinkan peladjaran-peladjaran praktek,

(3) memperluas pendidikan guru dan keguruan tinggi serta meningkatkan mutu kesanggupan mereka,

(4) dalam bidang perguruan tinggi lebih diutamakan pertanian, tehnik, ekonomi, kedokteran dan keguruan.

Dalam djangka pendek, akan diperluas dan diintensifkan latihan kerdja Departemen Tenaga Kerdja dan kursus-kursus lainnja jang diselenggarakan oleh instansi-instansi Pemerintah dan Swasta.

Untuk sekurang-kurangnja dapat mempertahankan kesempatan kerdja jang ada atau sekedar dapat meningkatkannja maka usaha-usaha djangka pendek harus diadakan dengan mempeladjari semua kemungkinan/djalan jang ada untuk mentjiptakan kesempatan kerdja sebagai berikut : (1) Penggunaan lebih intensif dari tanah pertanian dan tenaga kerdja, baik dibidang pertanian maupun dibidang industri, penggunaan penuh dari kapasitas jang ada atau menambah djumlah shifts, dan lain-lain. (2) Pembukaan kegiatan-kegiatan baru atau pengluasan dalam sektor-sektor ekonomi dengan mengutamakan kepadat-karyaan. Didaerah pedesaan pengusahaan kembali tanah di Djawa atau pem-

bukaan baru diluar Djawa, pengluasan perikanan dan kehutanan, industri ketjil dan keradjinan tangan, dan lain-lain. Didaerah kota : pembangunan industri-industri baru dengan modal asing dengan mengutamakan padat-karya dimana mungkin, dan bantuan kepada industri sedang dan ketjil dengan pemberian kredit, bantuan tehnis, dan lain-lain, seperti bengkel mobil, bengkel reparasi, dan lain-lain. (3) Projek-projek pekerdjaan darurat dan lain-lain kegiatan bersifat padat-karya. Projek-projek padat-karya daerah pedesaan pengluasan tanah, pembuatan irigasi, djalan-djalan, padat-karya waduk-waduk dan lain-lain. Projek-projek padat-karya didaerah kota misalnja pembuatan djalan-djalan, perumahan dan lain-lain. (4) Mentjiptakan kondisi-kondisi jang baik untuk lantjarnja pelaksanaan rentjana transmigrasi dan pemindahan-pemindahan tenaga kerdja diluar Djawa jang dikaitkan dengan usaha-usaha pembangunan dengan djalan memperbaiki perhubungan/pengangkutan antar daerah ; memperluas fasilitas penampungan penduduk/tenaga kerdja dalam perdjalanan menunggu keberangkatan, dan persiapan-persiapan fasilitas (perumahan dan lain-lain) didaerah tudjuan (5) peningkatan kesempatan kerdja djuga dapat ditjapai melalui peningkatan latihan kerdja sesuai dengan kebutuhan pembangunan dengan djalan penggunaan semaximal mungkin latihan-latihan dalam pekerdjaan. (6) Pendaja-gunaan pegawai Pemerintah (Negeri) dengan kesempatan kerdja kepada pegawai berlebihan melalui upgrading dan penempatan disektor-sektor atau wilajah-wilajah dimana terdapat kekurangan tenaga kerdja.

PERAWATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERDJA, PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN.

Dalam bidang ini perlu diadakan usaha-usaha untuk mengarahkan hubungan perburuhan ini mendjadi suatu hubungan perburuhan jang mendjamin adanja ketenteraman dan ketenangan kepada kaum buruh. Untuk ini harus diadakan usaha seperti berikut :

— mengadakan usaha-usaha agar serikat buruh itu maupun pengusaha sebagai partner dalam produksi ikut bertanggung-djawab dalam pelaksanaan serta berhasilnja Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

— mengadakan pendidikan dan upgrading bagi pimpinan serikat buruh dengan tudjuan agar serikat buruh itu mendjadi suatu kekuatan sosial jang bertanggung-djawab terhadap perkembangan ekonomi nasional.

— mengarahkan pertumbuhan serikat buruh kita pada terbentuknja suatu wadah kerdjasama.

— memperkembangkan/mengadakan upgrading bagi personnel managers sehingga mereka mengerti pentingnja suatu hubungan perburuhan jang sehat.

— mengusahakan terbentuknja badan-badan tripartite dan bipartite.

— mengadakan penjelidikan tentang hal-hal jang biasanja menjebabkan perselisihan perburuhan.

— mengatur persoalan-persoalan perselisihan dengan undang-undang untuk mengurangi djumlah perselisihan.

PENGUPAHAN DAN DJAMINAN SOSIAL.

Dengan menginsjafi sepenuhnja bahwa perbaikan pengupahan dan djaminan sosial harus mendjurus ke dan dibarengi dengan kenaikan produktivitas, maka perlu kiranja diadakan langkah-langkah sebagai berikut :

— mengusahakan agar upah minimum dapat memenuhi kebutuhan Fisik Minimum jang sesuai dengan pola konsumsi jang riil dan memenuhi sarat-sarat minimum baik mengenai kesehatan maupun kesedjahteraan.

— mengadakan demokratisasi pengupahan dalam arti mengusahakan adanja keseimbangan jang lajak baik setjara nasional maupun setjara industri ataupun dalam suatu perusahaan antara upah minimum dan upah maximum, dengan tetap memperhatikan perlunja ada perangsang jang tjukup bagi golongan-golongan tertentu.

— mengusahakan adanja keseragaman baik dalam systim maupun dalam djumlah dalam tiap sektor industri.

— bilamana dalam ongkos-ongkos perburuhan masih ada kemungkinan, maka hendaknja diadakan perbaikan dalam bidang kesedjahteraan sosial.

— mengadakan penjelidikan mengenai djaminan sosial untuk kemudian diarahkan kepada suatu djaminan sosial jang diwadjibkan.

BAB XI

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENTJANA

B A B XI

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENTJANA

A. K E S E H A T A N

Salah satu tudjuan pembangunan ialah memperbaiki tingkat kesehatan rakjat. Dengan demikian perbaikan kesehatan rakjat pada dirinja adalah suatu tudjuan tersendiri. Dalam pada itu perbaikan kesehatan rakjat setjara langsung djuga meningkatkan produktivitas kerdja, sehingga mempertjepat ladju pembangunan. Oleh karena itu perbaikan kesehatan rakjat adalah pula suatu bentuk investasi pembangunan, jakni "investasi dalam manusia" ("human investment"), jang bersifat komplementer dengan "investasi dalam modal" ("capital investment").

KEADAAN DAN MASALAH.

Usaha-usaha dalam bidang kesehatan jang dilakukan menurut konsep kesehatan masjarakat ("public-health"), jang dimulai sesudah tahun 1950, mentjapai kemadjuan setapak demi setapak, tetapi kemudian hasil-hasil jang ditjapai itu mulai menurun, lebih-lebih dengan semakin ladjunja inflasi. Kemunduran terlihat disegala bidang, terutama keadaan rumah-rumah sakit dan dalam pemberantasan penjakit menular. Dewasa ini sektor kesehatan mulai menundjukkan kemadjuan-kemadjuan lagi setelah mengalami kemunduran-kemunduran jang mengchawatirkan.

Keadaan kesehatan jang tidak memuaskan serta belum meratanja kesadaran untuk hidup setjara lebih sehat tidak sadja terdapat didaerah-daerah pedesaan, tetapi djuga dikota-kota. Keadaan kesehatan jang demikian itu mengurangi produktivtas kerdja masjarakat, dan dengan demikian menghambat usaha-usaha pembangunan.

1. *Penjakit Menular :*

Malaria : Pada achir tahun 1963 dengan sistim pembasmian malaria dengan djalan penjemprotan rumah-rumah penduduk dengan DDT diseluruh Djawa, Bali dan Lampung, 64,5 djuta penduduk dapat diberikan perlindungan terhadap serangan penjakit malaria. Kemudian keadaan merosot kembali, terutama karena kekurangan biaja dan penghentian bantuan luar negeri berupa DDT dan alat-alat.

Dalam survey-survey jang diselenggarakan ternjata, bahwa djumlah penderita penjakit malaria di Djawa, Bali, dan Lampung tiap tahun meningkat ; bahkan daerah-daerah jang tadinja sudah bebas malaria, waktu achir-achir ini mempunjai penderta malaria lagi.

Tjatjar : Masalah jang mendesak ialah matjetnja pentjatjaran routine, jang mengakibatkan rendahnja immunitas dimasjarakat, terutama diantara baji-baji dan anak-anak dibawah umur 15 tahun. Pada 3 — 5 tahun terachir ini terdapat puluhan ribu casus penderita tjatjar diberbagai daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah jang baru diamankan. Dalam tahun 1967 djumlah casus jang dilaporkan adalah 12.700 orang ; djumlah penderita jang sebenarnja djauh lebih besar, mungkin lima kali angka tersebut. Ibu Kota Djakarta Raya hingga saat ini masih belum bebas dari tjatjar.

Tuberculosis : Penjakit ini diderita oleh kira-kira 4 persen dari seluruh djumlah penduduk. Sebagian besar termasuk golongan umur jang produktif (15-45 tahun).

Cholera El Tor : Walaupun pada waktu ini tidak banjak lagi terdapat penjakit Cholera El Tor, tetapi penjakit ini tetap merupakan bahaja potensiil jang besar. Wabah dapat sewaktu-waktu terdjadi, karena kesehatan lingkungan jang masih buruk. Daerah-daerah jang digolongkan sebagai endemis untuk Cholera El Tor ialah : Djawa, Bali, Lombok, Timor dan Sumbawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Barat.

Pes : Berkat usaha pemberantasan dengan penjemprotan DDT sedjak tahun 1952 penjakit pes dapat dikatakan telah berhasil dibasmi pada tahun 1963. Tetapi karena beberapa sebab dalam tahun 1968 terdjadi eksplosi penjakit pes didaerah Bojolali.

Framboesia : Usaha-usaha TCPS jang pada achir tahun 1968 sudah meliputi 2851 ketjamatan, jaitu 1466 di Djawa dan 1385 dipulau-pulau lain.

2. *Hygiene dan Sanitasi :*

Walaupun telah ada Undang-undang No. 11 Tahun 1962 dan No. 2 Tahun 1966 jang mengatur soal ini, namun pelaksanaannja masih djauh dari memuaskan, apabila dibandingkan dengan usaha-usaha kesehatan lainnja. Keadaan sosial-ekonomi jang masih kurang baik, dan kekurangan tenaga petugas dalam djumlah dan mutu jang mentjukupi mendjadi sebab-sebab utama.

3. *Fasilitas-fasilitas Kesehatan :*

Fasilitas kesehatan, jaitu rumah-rumah sakit, balai-balai pengobatan, Balai Kesedjahteraan Ibu dan Anak, laboratorium-laboratorium, sanatorium-sanatorium, rumah-rumah obat serta alat-alat perlengkapan kesehatan lainnja, masih sangat kurang keadaannja.

Perkembangan rumah-sakit tidak dapat mengimbangi pertambahan djumlah penduduk sedjak beberapa tahun pemeliharaan rumah-rumah sakit dan penggantian alat-alat kedokteran jang rusak (antara lain alat-alat rontgen) tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinja.

Perbandingan djumlah tempat tidur terhadap djumlah penduduk adalah 8 per 10.000 penduduk. Rumah-rumah sakit pada umumnja, ketjuali R.S.U.P. dikota-kota besar, telah lama menderita kekurangan obat dan alat-alat, disamping keadaannja sangat kurang memuaskan. Oleh karena kekurangan-kekurangan tersebut rumah sakit Kabupaten hanja dapat dimanfaatkan seperempat dari kapasitasnja.

Djumlah balai pengobatan antara tahun 1959 dan 1965 meningkat dari 3.945 mendjadi 5.671, tetapi kebanjakan masih mengalami kekurangan obat-obatan. Djumlah Balai Kesehatan Ibu dan Anak (B.K.I.A.) antara 1950 dan 1967 meningkat dengan 300 - 400 buah tiap tahunnja. Djumlah kundjungan wanita hamil baji dan anak sangat menurun selama tahun-tahun dihentikannja bantuan susu bubuk dan obat dari Unicef.

Alat perlengkapan kesehatan keadaannja masih djauh dari mentjukupi. Hal ini terutama disebabkan karena penjediaannja tergantung sekali dari impor. Laboratorium-laboratorium kesehatan pada waktu ini djuga mengalami kekurangan perlengkapan dan tenaga sehingga tidak dapat mendjalankan fungsinja sebagaimana mestinja.

4. *Tenaga Medis dan Para-medis :*

Keadaan kesehatan jang masih belum sebagaimana mestinja itu antara lain disebabkan karena kurangnja tenaga-tenaga kesehatan, baik tenaga-tenaga dokter maupun tenaga-tenaga para-medis, djika dibandingkan dengan djumlah penduduk.

Djumlah tenaga dokter pada tahun 1968 diperkirakan 5.000 orang dengan djumlah penduduk 115 djuta orang, sehingga terdapat satu orang dokter untuk tiap 23.000 orang penduduk (tahun 1954 perbandingan tersebut adalah 1 : 60.000). Mulai tahun 1968 tiap tahun akan dihasilkan kurang lebih 600 orang dokter, 150 orang dokter gigi dan 150 orang apotheker. Tetapi tenaga-tenaga dokter tersebut terpusat dikota-kota besar. Didaerah-daerah pedesaan tersedia 1 orang dokter untuk 100 sampai 120 ribu penduduk, sedangkan dikota-kota 1 orang dokter untuk 5.000 - 6.000 orang penduduk.

Kekurangan tenaga para-medis djuga sangat terasa. Effisiensi tenaga dokter akan meningkat bilamana mereka dibantu oleh tenaga-tenaga para-medis jang tjakap dan dalam djumlah jang tjukup.

Kemampuan lembaga-lembaga pendidikan tenaga para-medis jang sangat terbatas dan pembatasan djumlah siswa jang diterima sebagai akibat naiknja biaja pengasramaan siswa-siswa mengakibatkan djumlah lulusan pendidikan tersebut mendjadi semakin ketjil. Dengan demikian ratio djumlah tenaga para-medis terhadap djumlah penduduk dan terhadap djumlah dokter mendjadi makin buruk. Disamping itu banjak bidan dan perawat minta berhenti dari pekerdjaannja karena tekanan ekonomi.

Penempatan tenaga medis dan para-medis jang baru lulus dan penempatan/pemindahan dokter-dokter spesialis dengan mengutamakan daerah-daerah diluar Djawa, tidak dapat dilaksanakan, karena kekurangan biaja perdjalanan.

5. *F a r m a s i :*

Pengadaan perbekalan farmasi sebagian besar berasal dari impor dan hanja kurang lebih 10 persen ditjukupi oleh produksi dalam negeri. Produksi obat-obatan dalam negeri dengan bahan-bahan baku impor dan dalam negeri telah mulai berkembang. Dibidang ini diperlukan pengawasan jang tjermat, sehingga produksi obat-obatan tersebut benar-benar sesuai dengan sjarat-sjarat kesehatan. Produksi obat-obatan asli dewasa ini ada pada tingkat permulaan.

6. *Alat-alat Pengangkutan :*

Fasilitas pengangkutan, diantaranja kendaraan ambulance, sangat terasa kekurangannja. Disamping itu keadaan pengangkutan umum djuga mempengaruhi kegunaan fasilitas-fasilitas perawatan dan pengobatan bagi sebagian besar penduduk jang membutuhkan.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.

Keadaan dan masalah seperti dikemukakan diatas mendjadi dasar bagi perentjanaan kebidjaksanaan dan langkah-langkah dalam Rentjana Kesehatan, jang terutama bertudjuan untuk lebih meningkatkan effisiensi dan lebih meratakan lajanan kesehatan kepada rakjat.

Dalam rangka mentjapai tudjuan itu, maka integrasi usaha-usaha kuratif dan preventif melalui integrasi fungsionil antara unit-unit organisasi dinas kesehatan, serta *"team approach"* dalam mengatasi masalah kesehatan oleh para petugas, merupakan prinsip jang sangat penting, chususnja dalam rangka pelaksanaan konsepsi "public health". Pelaksanaan prinsip itu djuga sangat perlu untuk mentjapai effisiensi maksimal dengan fasilitas-fasilitas kesehatan jang relatif masih sangat terbatas djumlah dan kapasitasnja. Rehabilitasi fasilitas kesehatan

jang sudah ada diutamakan, sedang pembangunan baru hanja dilakukan didaerah-daerah jang relatif terbelakang dibandingkan dengan daerah-daerah lainnja.

Sesuai dengan kebidjaksanaan jang memprioritaskan bidang produksi pangan dan sektor penghasil devisa, perbaikan kesehatan didesa dan daerah-daerah penghasil ekspor akan memperoleh perhatian jang sungguh-sungguh. Selandjutnja diharapkan bahwa auto-aktifitas masjarakat akan dapat berkembang lebih tjepat, apabila pengetahuan akan tjara-tjara dan kesadaran para anggota masjarakat akan pentingnja usaha-usaha perawatan kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesedjahteraan mental, fisik dan sosial mentjapai taraf jang lebih tinggi dan lebih meluas.

1. *Pendidikan Kesehatan kepada Masjarakat.*

Pada hakekatnja adalah menanam kebiasaan sehari-hari jang sehat kepada perorangan, disamping dengan kursus-kursus, tulisan disurat kabar, penjiaran radio atau televisi, djuga melalui tempat-tempat pentjontohan.

Sasarannja adalah :

a. *Usaha Kesehatan Sekolah.*

Jang ditjapai ialah anak sekolah (6-15 tahun). Jang didjalankan ialah memberi peladjaran ilmu kesehatan dikelas, mengawasi kebersihan badan murid (terutama tangan dan kuku), mentjiptakan lingkungan kehidupan sekolah jang memenuhi sjarat-sjarat kesehatan (tjukup air bersih, latrine jang baik), memberikan pelajanan kesehatan disekolah (pengobatan ringan, vaksinasi, dan sebagainja).

Kegiatan-kegiatan jang direntjanakan berupa intensifikasi U.K.S. jang telah ada dan perluasan sekolah-sekolah dasar dalam lingkungan 153 kota madya dan kabupaten, jang meliputi 36 ribu sekolah dasar dengan 8,3 djuta orang murid.

Djuga diselenggarakan latihan-latihan untuk para petugas U.K.S. di Djakarta, Djawa Barat, Djawa Tengah, D.I. Jogjakarta, Djawa Timur, Bali, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, dan kursus-kursus bagi guru-guru sekolah.

b. *Hygiene dan Sanitasi.*

Usaha ini meliputi penjehatan persediaan air dan pembuangan kotoran, pengawasan pendjualan makanan pada umum serta pembasmian serangga dan binatang jang menjebarkan penjakit-penjakit menular.

Kegiatan-kegiatan jang direntjanakan antara lain ialah :

— penjediaan air minum dengan perbaikan serta pembuatan sumur-sumur jang memenuhi sjarat-sjarat kesehatan, pembuatan saringan-saringan air sederhana, pemanfaatan kotoran serta pengolahan sampah,

— pengawasan dan bimbingan mengenai persediaan air minum sehat, melindungi sumber-sumber dan mata air, terutama didaerah pedesaan, didaerah-daerah jang menderita kesulitan memperoleh air minum dan didaerah-daerah jang terdapat banjak penjakit perut (terutama di Lampung, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan).

c. *Penjuluhan Gizi.*

Usaha ini meliputi pendidikan gizi dan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam makanan sehari-hari berdasarkan keadaan sekeliling ("Applied Nutrition Program", A.N.P.). Kegiatan-kegiatan penjuluhan jang diintegrasikan pada usaha-usaha B.K.I.A. bertudjuan mentjegah kekurangan gizi pokok pada ibu hamil dan menjusui, pada baji dan pada anak-anak jang terutama kekurangan vitamin A. Penjuluhan gizi djuga dilakukan dengan kundjungan-kundjungan rumah serta usaha-usaha lain jang langsung mentjapai keluarga-keluarga. Pendidikan gizi dilakukan sebagai mata-peladjaran disekolah-sekolah umum dan berupa kursus-kursus gizi dan tehnologi makanan.

d. *Pengikut-sertaan Masjarakat Dalam Berbagai Usaha, diantaranja Pemberantasan Penjakit Menular.*

Usaha ini meliputi pelbagai tindakan untuk menimbulkan partisipasi masjarakat. Kegiatan-kegiatan meliputi pentjatjaran semua penduduk dan pemberian vaksinasi BCG, termasuk semua baji jang baru lahir, pembasmian serangga dan binatang penjebar penjakit, penjediaan air bersih dirumah-rumah penduduk buat keperluan minum, pendjagaan kebersihan diri dan lingkungan, pengikut-sertaan pamong desa, guru sekolah dan organisasi-organisasi masjarakat dalam usaha menjebar-luaskan pengertian tentang pentjegahan dan pemberantasan penjakit-penjakit menular serta dalam tindakan-tindakan pelaksanaannja.

2. *Pengembangan Infrastruktur Kesehatan.*

a. *Pusat Kesehatan Masjarakat (PKM).*

Pusat Kesehatan Masjarakat adalah suatu "Unit" jang memberikan pelajanan dalam bidang :

I. "kuratif" (pemeriksaan dan pengobatan) ;

II. "preventif" (pentjegahan penjakit, peningkatan kesehatan, pendidikan kesehatan atau "health education") ;

III. kesehatan lingkungan ("environmental sanitation").

Bidang "kuratif" dahulu dilakukan oleh poliklinik (balai pengobatan) dan rumah sakit, sedangkan bidang "preventif" diselenggarakan oleh B.K.I.A. (Balai Kesedjahteraan Ibu dan Anak) dan ditudjukan chusus terhadap ibu, baji dan anak. Bidang kesehatan lingkungan dahulu dilaksanakan oleh petugas-petugas jang termasuk dalam staf Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kewedanaan.

Hingga sekarang Balai Pengobatan dan B.K.I.A. mengerdjakan usahanja setjara terpisah dan letak bangunannja terpisah djuga.

Dalam tahun-tahun jang akan datang diusahakan mentjapai kegiatan-kegiatan Pusat Kesehatan Masjarakat setjara fungsionil, dalam arti : meskipun bangunan Balai Pengobatan dan B.K.I.A. letaknja masih berdjauhan namun didalam kegiatan-kegiatannja ada integrasi. Didalam pendirian Pusat Kesehatan Masjarakat jang baru diusahakan supaja semua kegiatan-kegiatan itu didjalankan didalam satu bangunan.

Ada 3 tingkat Pusat Kesehatan Masjarakat :

a. Pusat Kesehatan Masjarakat Pembina ;

b. Pusat Kesehatan Masjarakat Ketjamatan ;

c. Pusat Kesehatan Masjarakat Desa.

Perbedaannja terletak dalam petugas-petugas jang mendjalankan kegiatan, misalnja pada Pusat Kesehatan Masjarakat Pembina bekerdja seorang dokter, seorang "public health nurse", beberapa orang bidan dan perawat, tenaga dalam bidang kesehatan lingkungan dan beberapa orang pembantu ; pada Pusat Kesehatan Masjarakat Ketjamatan pegawai-pegawainja terdiri dari seorang "public health nurse" sebagai pemimpin, 1 á 2 orang bidan dan perawat dengan pembantu-pembantunja ; pada Pusat Kesehatan Masjarakat Desa bertugas 2 orang pendjenang kesehatan dengan 1 — 2 orang pembantu.

Lajanan jang diberikan berbeda djuga : pada Pusat Kesehatan Masjarakat Pembina lebih lengkap daripada di Pusat Kesehatan Masjarakat Ketjamatan atau Desa, tergantung dari petugas-petugas jang memberikan pertolongan.

Pusat Kesehatan Masjarakat Pembina mengawasi dan memberi bimbingan pada 3 — 5 buah Pusat Kesehatan Masjarakat Ketjamatan ; suatu Pusat Kesehatan Masjarakat Ketjamatan mengawasi 3 — 5 buah Pusat Kesehatan Masjarakat Desa.

Pada achir Rentjana Pembangunan Lima Tahun diharapkan telah tersedia 525 P.K.M. Pembina, 2633 P.K.M. Ketjamatan dan 1058 P.K.M. Desa. Dalam tahun 1969/70 djumlah-djumlah tersebut masing-masing diharapkan 172, 345 dan 710 buah.

Diperkirakan bahwa untuk melajani P.K.M. dalam djangka waktu lima tahun jang akan datang diperlukan antara lain sekitar 500 dokter, 500 "public health nurse", 3.000 bidan, 3.000 perawat dan 10.000 pendjenang kesehatan.

Adapun penjelenggaraan P.K.M. termasuk dalam tugas Propinsi dan Kabupatan. Disamping itu adalah penting sekali bahwa masjarakat setjara aktif ikut-serta dalam mensukseskan program P.K.M. ini dengan menjelenggarakan P.K.M. Desa atas dasar auto-aktivitas.

b. *Balai Pengobatan dan B.K.I.A.*

Balai Pengobatan dan B.K.I.A. dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun didjuruskan kearah persiapan pembentukan Pusat-pusat Kesehatan Masjarakat.

Diusahakan mempersiapkan tenaga-tenaga kesehatan pada Balai-balai Pengobatan jang ada, disamping pendirian Pos-pos Kesehatan ditempat-tempat dimana belum ada Balai Pengobatan. Perkembangan djumlah Balai Pengobatan jang direntjanakan adalah untuk meningkat dari 6.500 dalam tahun 1968/69 mendjadi 8.000 dalam tahun 1973/74.

Kegiatan-kegiatan B.K.I.A. jang direntjanakan adalah :

— untuk meningkatkan pendidikan kesehatan pada ibu-ibu terutama mengenai gizi dan pemeliharaan kesehatan dengan mengadakan kundjungan kerumah,

— meluaskan pemberian immunisasi dan vaksinasi dalam rangka pentjegahan penjakit-penjakit menular,

— mengintensifkan pendidikan pada dukun-dukun baji,

— mempersiapkan tenaga-tenaga kesehatan dengan up-grading/ in service training,

— membantu usaha-usaha keluarga berentjana melalui integrasi dengan usaha-usaha kesehatan lain,

— memberi pertolongan persalinan,

— meningkatkan kesehatan anak 0 — 5 tahun.

Direntjanakan bahwa pada tahun 1973 telah dapat ditjapai djumlah 7.500 buah B.K.I.A. diseluruh Indonesia jang berarti suatu penambahan sedjumlah 2.200 buah B.K.I.A. :

Tabel XI - A - 1

Perkembangan Djumlah Balai Pengobatan Dan B.K.I.A.

1968/69 — 1973/74

Tahun	*Balai Pengobatan*	*B.K.I.A.*
1968/69	6.500	5.300
1969/70	6.800	5.600
1973/74	8.000	7.500

c. *Rumah Sakit.*

Fungsi-fungsi Rumah Sakit adalah :

— pemulihan kesehatan dengan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi penderita,

— rumah sakit sebagai tempat praktek bagi siswa-siswa sekolah para-medis dan bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran,

— penjelidikan untuk memperkembangkan ilmu kedokteran, perawatan serta ilmu gizi,

— tugas-tugas dalam rangka "integrated health service",

— memberikan pendidikan dan penerangan kesehatan.

Kegiatan-kegiatan jang direntjanakan meliputi melandjutkan pembangunan rumah-sakit-rumah-sakit jang telah dimulai (antara lain di Banda Atjeh, Pakanbaru, Tandjung Karang dan lain-lain), rehabilitasi rumah-sakit-rumah-sakit, pembinaan tenaga-tenaga kesehatan, penjempurnaan pengadaan obat-obatan, dan sebagainja. Pembiajaan R.S.U.P. adalah oleh Pemerintah Pusat, sedang rumah-sakit lainnja dibiajai oleh Propinsi dan Kabupaten.

d. *Laboratorium Kesehatan.*

Direntjanakan mengadakan "upgrading" laboratoria kesehatan jang ada dengan menambah perlengkapan-perlengkapan dan bahan-bahan (di Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaja, Denpasar, Mataram, Medan, Palembang, Bandjarmasin dan Makasar), mempersiapkan laboratorium Pusat di Djakarta, membangun beberapa laboratoria kesehatan tingkat Propinsi (masing-masing antara lain di Padang, Tandjung Karang, Samarinda). Selandjutnja akan dipersiapkan 50 buah laboratoria sederhana pada P.K.M. Pembina.

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN

1969/70 - 1973/74

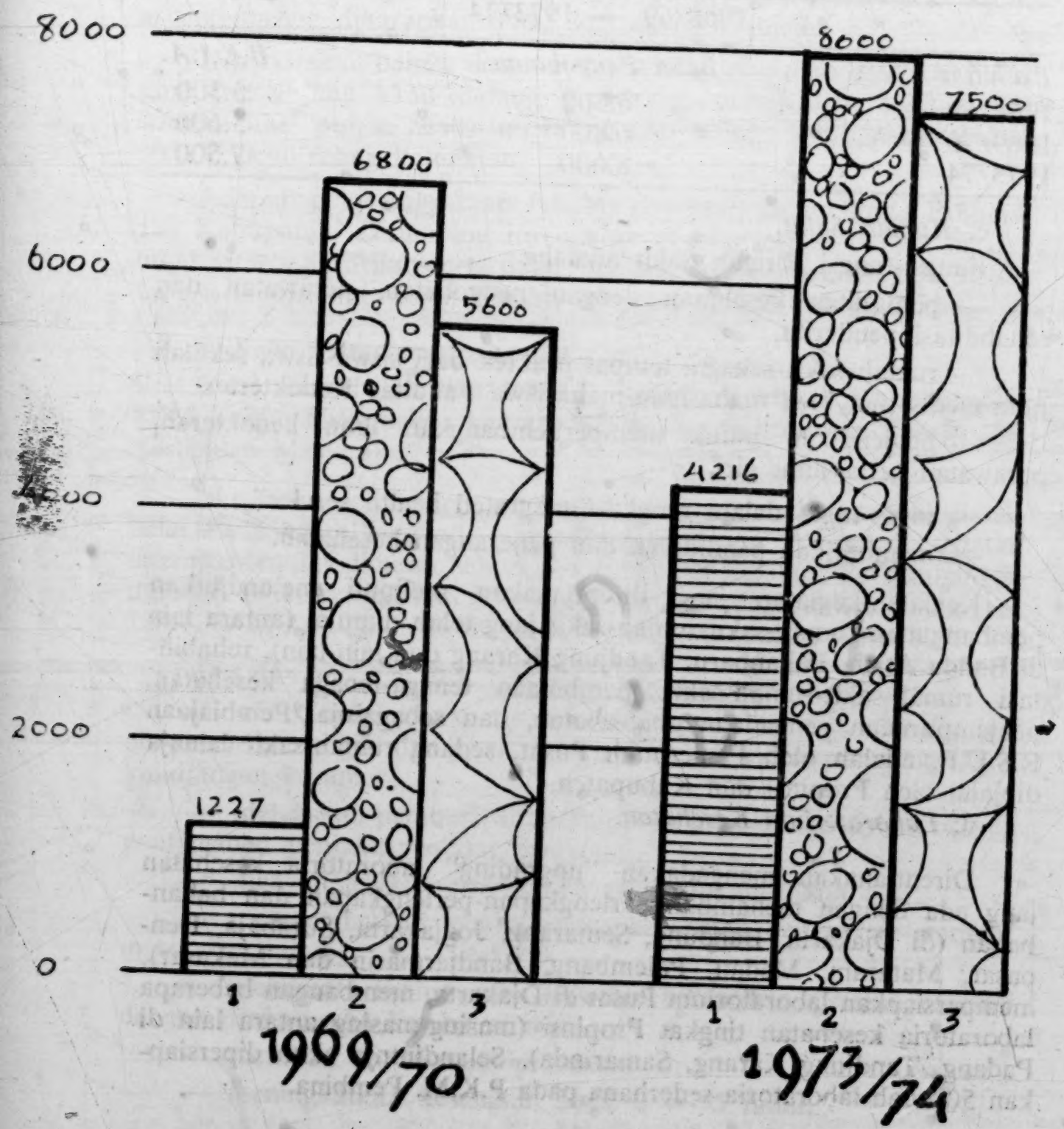

1 : PKM (PEMBINA, KETJAMATAN, DESA)

2 : B. PENGOBATAN

3 : B.K.I.A.

3. *Pemberantasan Penjakit Menular.*

Sasaran pokok adalah penjakit-penjakit : malaria, tjatjar, tbc., framboesia, penjakit kelamin, kusta, pes dan cholera.

a. *Malaria.*

Konsolidasi hasil-hasil jang telah ditjapai di Djawa dan Bali diutamakan. Kegiatan-kegiatan jang akan didjalankan akan disesuaikan dengan hasil-hasil surveillance dikedua pulau ini jang untuk maksud itu telah dibagi dalam 3 wilajah.

Didaerah-daerah diluar Djawa dan Bali usaha dipusatkan pada : daerah-daerah transmigrasi ; projek-projek pertanian pasang-surut dan kehutanan ; daerah-daerah industri dengan pertambangan, kota-kota pelabuhan penting dengan "endemicity" malaria jang tinggi, dan projek-projek pembangunan lainnja misalnja projek pariwisata. Djuga di Kalimantan Barat akan diselenggarakan pemberantasan malaria.

b. *Tuberculose.*

Program pemberantasan tuberculose dilakukan dengan BCG vaksinasi pada anak dibawah umur 16 tahun dengan mengutamakan baji-baji, menemukan penderita TBC untuk diobati dengan mengutamakan penderita jang menular, meng-upgrade dokter-dokter dan petugas-petugas kesehatan lain-lain dalam pemberantasan TBC, serta mengikut-sertakan masjarakat dalam usaha ini.

Usaha Pemberantasan TBC diintegrasikan didalam Pusat Kesehatan Masjarakat, sedang ditingkat ibu-kota kabupaten dan propinsi diselenggarakan Balai Pemberantasan Penjakit Paru-paru.

Selama djangka Rentjana Pembangunan Lima Tahun diusahakan untuk menjelenggarakan 11 BP-4 dibeberapa Propinsi, antara lain di Riau, Djambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah.

c. *Tjatjar.*

Pentjatjaran telah diintensifkan kembali pada tahun 1968 dengan bantuan WHO didaerah Djawa dan Bali. Dengan target tahun 1974 penjakit tjatjar harus sudah terbasmi di Indonesia, perlu kegiatan-kegiatan : primaire vaksinasi untuk menutup "backlog" jang disebabkan oleh matjetnja pentjatjaran routine pada masa jang lalu, pentjatjaran baji-baji, pentjatjaran ulangan 3 tahun sekali, penjempurnaan sistim surveillance, pentjatjaran penduduk pada waktu terdjadi wabah tjatjar setjara tjepat dan serentak dan pentjukupan tenaga djuru tjatjar.

d. *Framboesia.*

Pemberantasan penjakit framboesia dilakukan dengan bantuan UNICEF. Pemberantasan dilakukan dalam dua fase, ialah fase pemberantasan dan fase konsolidasi, jang antara lain ditudjukan kearah Sumatera Selatan dan Lampung.

e. *Penjakit Kelamin.*

Untuk pemberantasan penjakit kelamin diadakan pemeriksaan darah golongan-golongan tertentu dan penjuntikan wanita tuna susila setjara periodik.

f. *K u s t a.*

Usaha pemberantasan penjakit kusta akan diperluas kedaerah-daerah Atjeh, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Maluku, Riau, Djambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur. Pada tahun 1973/74 semua propinsi sudah melaksanakan pemberantasan setjara sistimatis.

g. *P e s.*

Dalam usaha memberantas penjakit pes, surveillance dilandjutkan dengan memperhatikan keadaan tikus dan pindjal tikus sebagai penjebar pes, terutama didaerah Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Magelang, Bojolali dan Sleman. Disamping usaha-usaha penerangan kepada masjarakat, penelitian ecologis dilandjutkan di Bojolali. Diadakan pengasingan dan pengobatan penderita, DDT-spraying dan vaksinasi bila terdjadi letusan penjakit.

h. *K o l e r a.*

Penjakit kolera diharapkan terberantas terutama dengan menjediakan air minum jang hygienis setjara besar-besaran bagi seluruh penduduk, mengadakan laboratorium dimana kolera terdapat endemis, mengisolasi penderita serta mengirimkan team assistensi kedaerah dimana terdjangkit wabah kolera.

i. *K a r a n t i n a.*

Usaha karantina bertudjuan untuk mentjegah masuk/keluarnja penjakit-penjakit karantina (menular) dari/ke Indonesia dan dari/kesuatu wilajah atau pulau di Indonesia.

Untuk melaksanakan tudjuan tersebut maka dikapal-kapal dan kapal-kapal udara serta alat-alat pengangkut lainnja dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan karantina dari pada alat-alat pengangkut (kapal-kapal, kapal udara), pengawasan kapal-kapal dengan HCN untuk

membasmi tikus-tikus dengan pindjal-pindjalnja serta penghapusan serangga dikapal-kapal laut dan udara.

Demikian pula didarat dilakukan pengawasan penjediaan air minum, makanan dan sanitasi lingkungan, serta pemberantasan dan pengawasan vector-vector penjakit-penjakit karantina (pindjal, tikus dan njamuk Aedes Aegypti).

Dalam djangka Rentjana Pembangunan Lima Tahun diusahakan penjempurnaan ditempat-tempat sebagai berikut : Palembang, Surabaja, Tuban dan Rumah Sakit Karantina Tandjung Priok, Bitung, Belawan, Pandjang, Makassar, Mandai, Tjirebon, Talang-Betutu, Dumai, Semarang, Polonia, Samarinda, Ambon, Pontianak, Bandjarmasin, Pakanbaru, Balikpapan, Menado, Padang.

4. *Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan.*

a. *Perbaikan Gizi.*

Perbaikan gizi bertudjuan untuk mengadakan perbaikan gizi masjarakat dan penilaian nilai gizi jang ada pada djenis-djenis bahan pangan.

Tindakan-tindakan untuk memperbaiki keadaan gizi, diantaranja masalah gizi chusus, seperti kalori-protein-malnutrition, masalah-masalah gizi dalam "institusi", seperti rumah-rumah sakit dan asrama, masalah-masalah gizi pada pelbagai golongan-golongan jang "vulnarable" dan masalah-masalah gizi jang timbul sebagai akibat faktor-faktor sosial-ekonomi, pembinaan perundang-undangan dibidang gizi dan makanan, serta standardisasi tingkat gizi.

Untuk mentjukupi kebutuhan tenaga-tenaga pelaksananja, akan ditingkatkan pengadaan tenaga-tenaga gizi dari pelbagai tingkat.

b. *Kesehatan Djiwa.*

Usaha kesehatan djiwa jang terpenting ialah pengintegrasian usaha-usaha dibidang kesehatan djiwa pada Pusat Kesehatan Masjarakat. Disamping itu diusahakan rehabilitasi dengan menjalurkan mereka jang telah sembuh kemasjarakat, pengobatan bagi mereka jang mempunjai gedjala-gedjala sakit djiwa, pentjukupan tenaga kesehatan djiwa, usaha-usaha training dan upgrading serta merubah sifat penampungan Rumah Sakit Djiwa.

c. *Kesehatan Gigi.*

Dalam usaha kesehatan gigi termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan, memelihara, mendjaga dan memulihkan kesehatan gigi dan mulut guna mentjapai kesehatan umum jang setinggi-tingginja.

Program selama djangka waktu Rentjana Pembangunan Lima Tahun ditudjukan untuk golongan masjarakat sebagai berikut : murid-murid Sekolah Dasar, ibu-ibu hamil, murid-murid Sekolah Landjutan Pertama, murid-murid Sekolah Kedjuruan, para penderita penjakit kronis, jang berusia landjut, penderita tjatjat mental dan fisik, dan golongan-golongan lain. Selandjutnja akan direhabilitasi 80 Balai Pengobatan gigi dan membuka 50 Balai Pengobatan gigi baru serta dipergiat Survey dan Research gigi dan mulut.

d. *Kesehatan Mata.*

Usaha pemeliharaan kesehatan mata meliputi usaha pentjegahan kebutaan dan pentjegahan penjakit mata menular.

Usaha-usaha jang didjalankan adalah pembentukan Dinas Kesehatan Mata Propinsi di Propinsi-propinsi, terutama Djambi, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta, penempatan dokter-dokter ahli mata ditiap ibu-kota Propinsi dan kota-kota besar, pengadaan fasilitas pengobatan spesialistis mata dan pendidikan/pemberian kursus aplikasi pada perawat mata ditingkat Rumah Sakit Umum Kabupaten dan Propinsi.

Rehabilitasi dan pembangunan Rumah-rumah Sakit Mata meliputi : perluasan Rumah Sakit Mata Bendungan di Semarang dengan kapasitas 100 tempat tidur dan memperlengkapi instrumentarium pada Rumah Sakit Mata Tjitjendo di Bandung. Mempersiapkan pembentukan Rumah Sakit Mata di Tandjungkarang dan Makassar, memperluas Rumah Sakit Mata di Palembang dan memperlengkapi unit perawatan mata pada Rumah Sakit Umum di Tondano (Sulawesi Utara). Menanggulangi masalah tuna-netra jang disebabkan oleh kekurangan Vitamin A dengan menggunakan kelapa sawit merah.

5. *Penjelidikan dan Penelitian.*

Usaha-usaha ini meliputi pentjiptaan dasar-dasar perkembangan research disektor kesehatan untuk memberantas penjakit dan meningkatkan kesehatan rakjat, mengusahakan perentjanaan program kesehatan nasional jang berdasarkan angka-angka jang dapat dipertjajai dan penilaian jang objektif, serta menemukan metodik jang effisien dan effektif dalam penjelenggaraan program pemberantasan penjakit menular dan usaha-usaha kesehatan lainnja.

Dalam tahun 1969 diusahakan untuk mewudjudkan Lembaga Research Kesehatan Nasional jang bertugas :

Melakukan applied research dan surveys jang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Program Kesehatan Nasional, memberikan bimbingan dan memperkembangkan usaha-usaha research dibidang kesehatan, mengkoordinir segala kegiatan "applied research" dibidang kesehatan, menilai hasil research untuk penggunaan dalam penjelenggaraan usaha-usaha kesehatan. Djuga diusahakan untuk menjelenggarakan projek-projek research dan surveys dalam bidang pemberantasan penjakit menular, gizi dan operational studies mengenai integrated health services.

Selama djangka waktu Rentjana Pembangunan Lima Tahun diusahakan melangsungkan projek-projek research dan surveys, melakukan penilaian objektip terhadap pelaksanaan Rentjana Lima Tahun dibidang kesehatan, menjelenggarakan seminar tentang hasil-hasil projek research.

6. *Usaha Pendidikan Tenaga Kesehatan.*

Pendidikan tenaga kesehatan meliputi usaha-usaha rehabilitasi dan pembangunan sekolah/fasilitas-fasilitas pendidikan jang ada untuk terutama meningkatkan djumlah tenaga medis dan para-medis, mempergiat pendidikan tenaga-tenaga para-medis untuk mengatasi kekurangan-kekurangan jang ada sekarang dan mentjukupi tambahan kebutuhan berhubung dengan perluasan dan peningkatan usaha-usaha lajanan kesehatan jang direntjanakan dengan membuka field-training dan in-service training centres.

Mengadakan kursus-kursus orientasi dibidang public health dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga untuk PKM dengan membuka Training Centre ditiap Propinsi.

Kegiatan jang direntjanakan ditudjukan untuk mentjapai target-target penambahan tenaga kesehatan dalam djangka waktu lima tahun sebagai berikut :

Tabel XI - A - 2

Pertambahan Tenaga Kesehatan, 1969/70 — 1973/74

Nomor	*Djenis Tenaga*	*D j u m l a h*
1.	Penilik Kesehatan	495
2.	Perawat (lulusan akademi)	653
3.	Djuru Perawat/bidan/pemelihara kesehatan masjarakat	594
4.	Penata gizi	315

Nomor	Djenis Tenaga	Djumlah
5.	Sanitarian	882
6.	Pengatur Rawat	8.592
7.	B i d a n	4.212
8.	Pengatur gizi	405
9.	Pengatur Rontgen	154
10.	Pengatur analisa	432
11.	Pengatur farmasi (ass. apotheker)	2.430
12.	Pengatur rawat gizi	279
13.	Pengatur statistik	293
14.	Pengatur Pendjenang Kesehatan	25.145

7. *Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan.*

Dalam hal ini akan diusahakan peningkatan produksi obat-obatan dalam negeri, pengadaan obat-obatan melalui impor dari luar negeri, peningkatan ekspor bahan-bahan farmasi, penjelidikan-penjelidikan sederhana terhadap obat asli Indonesia, serta peningkatan penjelidikan terhadap obat-obat baru (drug control).

Untuk maksud itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas produksi obat-obatan jang terutama dikaitkan dengan modal swasta nasional maupun asing, standardisasi dan normalisasi kebutuhan Pemerintah dengan menjempurnakan sistim impor Pemerintah, mentjukupi obat-obatan untuk pemberantasan penjakit rakjat, memperbesar volume impor swasta dan menertibkan impor obat-obatan dengan memberi izin pedagang besar farmasi kepada importir dengan kewadjiban mengimpor obat-obat djadi, bahan-bahan baku dan alat-alat kesehatan. Dalam hal pengawasan obat-obatan maupun penelitian akan direhabilitir lembaga farmasi nasional sebagai pusat research dan drug-control didaerah, chususnja dimana perindustrian dan perdagangan farmasi telah berkembang.

Dibidang ekspor bahan-bahan farmasi, diadakan penjempurnaan (penertiban) ekspor bahan-bahan farmasi dengan bimbingan Pemerintah, meningkatkan kwalitas dan kwantitas produksi bahan-bahan farmasi dalam negeri.

Dibidang distribusi diusahakan memperlantjar distribusi dan lebih meratakan penjaluran obat-obat pada rakjat, pun dengan menjelenggarakan laboratorium untuk melakukan penjelidikan terhadap obat-obatan baru jang akan didistribusikan kepada umum.

B. KELUARGA BERENTJANA

Keadaan kesehatan dan taraf kesedjahteraan ibu dan anak serta keluarga di Indonesia hingga kini belum mentjapai tingkat jang wadjar karena berbagai matjam faktor ; salah satu faktor jang penting ialah besarnja djumlah sesuatu keluarga. Bagi suatu keluarga dengan djumlah anggota keluarga jang tidak besar, terbuka kemungkinan untuk menjediakan sarana-sarana kehidupan jang lebih baik, misalnja dalam hal pangan, sandang, pendidikan dan lain-lain. Demikian pula halnja dengan keadaan kesehatan, baik kesehatan para ibu maupun kesehatan anak-anak. Perentjanaan kelahiran membantu meningkatkan kesehatan dan kesedjahteraan ibu, dan sekaligus memungkinkan para ibu untuk menjelenggarakan perawatan kesehatan anak-anak dengan lebih baik.

Masaiah lain berhubungan dangan ketjepatan pertambahan penduduk. Sebagai hasil usaha-usaha dibidang kesehatan, maka angka kematian telah mulai menurun, sedang kelahiran tetap tinggi. Akibatnja ialah bertambah tjepatnja pertambahan panduduk. Keadaan ini mulai berlangsung sedjak tahun 1950-an. Dengan demikian dalam tahun-tahun jang akan datang djumlah wanita jang telah mentjapai usia perkawinan akan meningkat. Djumlah perkawinan akan bertambah dengan tjepat dan pada gilirannja akan menjebabkan bertambahnja kelahiran. Bertambahnja kelahiran berlangsung dengan berkurangnja kematian, sehingga djumlah penduduk akan meningkat dengan lebih tjepat lagi. Dengan sendirinja hal ini akan menimbulkan tekanan-tekanan pada penjediaan pangan, lapangan kerdja, fasilitas pendidikan kesehatan dan lain-lain.

Dalam hubungan dengan kedua masalah tersebut itulah maka disusun program Keluarga Berentjana.

KEADAAN DAN MASALAH-MASALAH.

Perkumpulan Keluarga Berentjana dewasa ini sudah mempunjai 25 tjabang.

Berbagai fasilitas dan tenaga jang telah tersedia diantaranja ialah :

a. Diseluruh pulau Djawa dan Bali tersedia fasilitas-fasilitan kesehatan jang segera dapat dimanfaatkan berupa B.K.I.A. jang tersebar sampai kedesa-desa; rumah-rumah sakit, chususnja rumah rumah sakit bersalin; dokter, dan bidan-bidan jang chusus bekerdja di K.I.A.
b. Tenaga-tenaga jang telah mengikuti latihan-latihan Keluarga Berentjana.

c. Fasilitas-fasilitas dan tenaga-tenaga dari Departemen Sosial, Agama, Dalam Negeri, Pendidikan dan Kebudajaan dan lain-lain.

d. Organisasi kemasjarakatan jang sudah bergerak dalam usaha-usaha Keluarga Berentjana, antara lain Perkumpulan Keluarga Berentjana Indonesia, Klinik dari Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, Veteran, Muhammadijah, Katholik, Protestan, dan lain-lain.

e. Klinik-klinik Keluarga Berentjana jang telah berdjalan terdapat sebanjak 226 buah, jaitu di Djakarta 50, Djawa-Barat 34, Djawa Tengah 78, Djawa Timur 34, Jogjakarta 8 dan Bali 22.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.

Program Keluarga Berentjana adalah suatu program nasional jang diselenggarakan oleh masjarakat dengan bantuan, dukungan serta perlindungan sepenuhnja dari Pemerintah, melalui Lembaga Keluarga Berentjana Nasional Indonesia.

Bantuan Pemerintah diberikan berupa fasilitas tempat, tenaga, peralatan serta biaja. Tudjuan pokok program Keluarga Berentjana Indonesia ialah :

1. meningkatkan deradjat kesehatan dan kesedjahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnja ;
2. meningkatkan taraf kehidupan rakjat dengan tjara menurunkan angka kelahiran, sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan kita untuk menaikkan produksi.

Pelaksanaan program Keluarga Berentjana bersifat sukarela dan sesuai dengan moral Pantja-Sila dan adjaran-adjaran agama jang bersangkutan.

Pada tahap pertama, sasarannja ialah pulau Djawa dan Bali, dimana tinggal 66 persen dari penduduk diatas tanah jang hanja seluas 7 persen dari seluruh luas wilajah Indonesia.

Pelaksanaan program akan dimulai di Ibukota Propinsi-propinsi, Kota-kota Madya, kemudian Ibukota Kabupaten-kabupaten dan dalam tahun-tahun terachir dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun akan diluaskan ke Ketjamatan-ketjamatan. Kota-kota didahulukan karena disini terdapat lebih banjak fasilitas dan tenaga serta penduduk jang lebih tjepat terdorong untuk menerima gagasan Keluarga Berentjana.

Sasaran program ini dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ialah menghindari kurang lebih 600.000 sampai dengan 700.000

kelahiran dengan djalan mentjapai 3.000.000 acceptors ("eligible-women" jang menerima program Keluarga Berentjana).

Setjara terperintji, sasaran jang akan ditjapai selama masa lima tahun adalah :

Tabel XI-B-1

Sasaran Pelajanan Keluarga Berentjana

Tahun	*Djumlah " Acceptors "*	*Djumlah Kumulatief*
1969	100.000	100.000
1970	200.000	300.000
1971	400.000	700.000
1972	800.000	1.500.000
1973	1.500.000	3.000.000

Untuk melaksanakan program jang berhubungan dengan penerangan dan perangsangan (motivasi), diselenggarakan kontak-kontak setjara pribadi, pertemuan-pertemuan, diskusi dan pembitjaraan-pembitjaraan setjara formil, djuga penggunaan mass-media, seperti surat kabar, radio, pamflet, poster-poster dan sebagainja. Untuk melaksanakan hubungan atau kontak setjara pribadi, diperlukan pekerdja lapangan (field-workers). Kebutuhan akan tenaga-tenaga dokter, bidan, djuru rawat, pekerdja lapangan dan lain-lain akan dipenuhi dengan usaha-usaha pendidikan dan upgrading.

Sumber pembiajaan diharapkan dari masjarakat, Pemerintah dan bantuan luar-luar negeri. Untuk melaksanakan program lima tahun Keluarga Berentjana dengan sasaran mendapatkan "acceptors" sebanjak 3.000.000 diperkirakan biaja jang diperlukan adalah Rp. 5,25 miljar (biaja seluruhnja untuk mentjapai seorang "acceptor" adalah Rp. 1.750).

Djenis usaha program Keluarga Berentjana akan berupa penerangan, pendidikan, pelajanan (service), penjediaan perlengkapan, penelitian dan penjusunan peraturan perundang-undangan.

Penerangan.

Isi dan usaha-usaha penerangan umum ditudjukan untuk menimbulkan pengertian, motivasi dan apresiasi masjarakat. Penerangan setjara chusus ditudjukan kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu hamil pengundjung B.K.I.A., ibu-ibu sesudah melahirkan, jang berdjumlah lebih 8 djuta dikota dan dipedesaan sedangkan wanita-wanita "child bearing age" sebanjak 15 djuta orang.

Penerangan tersebut dapat dilakukan dengan tjara-tjara langsung (face to face) melalui mass-media, seperti radio, T.V., surat kabar,

bulletin, pamflet-pamflet ; melalui pendidikan resmi seperti sekolah-sekolah dan universitas-universitas; tjeramah-tjeramah, diskusi kelompok, kundjungan/penerangan dari rumah kerumah dan sebagainja.

Pendidikan.

Tenaga-tenaga pelaksana tehnis diambil dari tenaga-tenaga jang memang tersedia, seperti dokter, bidan, perawat, dengan memberikan tambahan pengetahuan Keluarga Berentjana melalui upgrading/ kursus-kursus.

Tenaga-tenaga lapangan (field-workers) akan diambil dari tenaga-tenaga sukarela dari Instansi-instansi/Organisasi massa/petugas penerangan dengan memberikan kursus-kursus selama 2-3 minggu. Djika keadaan telah mengidjinkan, tenaga field-workers ini akan dipekerdjakan setjara teratur atau full time. Untuk keperluan pendidikan akan dibuka sebuah "Pusat Latihan Nasional", jaitu di Djakarta jang mendidik/melatih dokter, bidan, pekerdja lapangan dan tenaga lainnja sebanjak 1.500 orang (rata-rata 300 orang per-tahun). Sedangkan pada tingkat propinsi akan dibuka 6 buah "Pusat Latihan Propinsi", jaitu di Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaja, dan Denpasar jang bertugas mendidik tenaga-tenaga pelaksana di Daerah-daerah (kira-kira 2.220 orang per-tahun, sehingga mentjapai 14.000 orang).

Untuk peningkatan pengetahuan dan perluasan pengalaman akan diusahakan untuk mengikuti perkembangan program dan hasil-hasil usaha Keluarga Berentjana diluar negeri.

Pelajanan (service).

Pusat pemberian pelajanan/service ialah rumah-rumah sakit, P.K.M.-P.K.M., health centre (K.I.A.) dan klinik chusus. Dewasa ini dipulau Djawa, Bali dan Madura terdapat 3.000 tempat tidur rumah sakit bersalin, 2752 K.I.A. (TYPE A/B/C) dan klinik-klinik chusus Keluarga Berentjana.

Setiap tahun djumlah klinik jang akan dibuka adalah sebagai berikut :

Tabel XI - B - 2

Djumlah Klinik Keluarga Berentjana

Tahun	*Lengkap*	*Sederhana*
1969	300	300
1970	150	200
1971	200	200
1972	250	250
1973	300	300
Djumlah	1.200	1.250

Untuk sementara hanja klinik-klinik jang ada dokternja jang diperbolehkan memberikan pelajanan dengan tindakan-tindakan medis, sedangkan klinik-klinik jang lain terutama melaksanakan penerangan-penerangan jang kemudian meneruskan "pasien" kepada klinik-klinik jang ada dokternja.

Akan diusahakan, agar pada tahun 1969 setidak-tidaknja 300 klinik lengkap dimana disediakan bermatjam-matjam contraceptives dan tergantung kepada acceptornja untuk memilih mana jang disukai, dengan pembajaran menurut kesanggupan (direntjanakan semurah mungkin ataupun tjuma-tjuma). Setiap pekerdja-lapangan jang mendapatkan acceptor dan pelaksana-pelaksana tehnis-medis akan diberikan insentif. Dokter-dokter jang praktek sore hari akan diikut-sertakan pula dalam program ini.

Penjediaan Perlengkapan.

Perlengkapan jang meliputi contraceptives, perlengkapan kantor, audio-visual aid, peralatan medis, alat laboratorium, kendaraan (mobil dan sepeda) perpustakaan dan lain-lain, diambil dari persediaan jang ada dan dari bantuan pemerintah serta masjarakat serta bantuan luar negeri. Personalia/tenaga kerdja sedapat mungkin dipenuhi dengan bantuan dari instansi-instansi pemerintah dan tenaga-tenaga sukarela dari masjarakat.

Penelitian.

Untuk lebih memperlantjar dan lebih mengarahkan pelaksanaan program, akan diusahakan melengkapi data-data tentang penduduk, pandangan/pendapat golongan-golongan, agama, adat-istiadat, dan sikap masjarakat, fasilitas-fasilitas dan tenaga-tenaga pelaksana, untuk lebih memperlantjar dan lebih mengarahkan pelaksanaan program. Dan bersamaan dengan implementasi dari program akan diadakan evaluasi effektivitas, effisiensi, biaja, hasil-hasil jang ditjapai, untuk dipakai memperbaiki pelaksanaan program setjara kontinu.

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun
(1969/70 — 1973/74)

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENTJANA

(dalam djutaan rupiah)

Bidang/Sektor/ Sub-Sektor/Program	*Anggaran Pembangunan Negara*	
	1969/70	*1969/70 - 1973/74*
Bidang Sosial		
Sektor Kesehatan dan Keluarga Berentjana	*4.609 x)*	*42.000*
1. *Sub-Sektor Kesehatan*	*4.139 x)*	*36.000*
a. Program Pendidikan Kesehatan Masjarakat	42	233
b. Program Pengembangan Infra-struktur Kesehatan	1.655	13.204
c. Program Pemberantasan Penjakit Menular	836	4.622
d. Program Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan	106	1.751
e. Program Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan	900	16.190
2. *Sub-sektor Keluarga Berentjana*	*470 x)*	*6.000*
a. Program Pembinaan Keluarga Berentjana	470 x)	6.000
Kegiatan-kegiatan Kesehatan dan Keluarga Berentjana jang pembiajaannja diperhitungkan dalam		
Sektor-sektor lain :		
a. Pendidikan Tenaga Kesehatan (termasuk Sektor Pendidikan dan Kebudajaan, Sub-sektor Pendidikan dan Penelitian Institusionil)	305	1.700

b. Pengembangan Research Kesehatan (termasuk Sektor Pendidikan dan Kebudajaan, Subsektor Pendidikan dan Penelitian Institusionil)	20	160
c. Penjediaan Air Minum daerah Pedesaan (termasuk Sektor Perumahan, Kesedjahteraan Sosial dan Penjediaan Air Minum dan Assainering)	16	140

x) Termasuk Rp. 600.000.000,— bantuan projek/bantuan tehnis untuk Sub-sektor Kesehatan dan Rp. 350.000.000,— untuk Sub-sektor Keluarga Berentjana.

BAB XII

PERUMAHAN DAN KESEDJAHTERAAN SOSIAL

BAB XII

PERUMAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

B A B XII

PERUMAHAN DAN KESEDJAHTERAAN SOSIAL

A. PERUMAHAN DAN AIR MINUM

PENDAHULUAN.

Perumahan merupakan kebutuhan utama disamping pangan dan sandang bagi setiap orang. Perumahan merupakan salah satu unsur pokok kesedjahteraan rakjat. Ketjuali merupakan kebutuhan, keadaan perumahan djuga mempunjai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting pula terhadap produktivitas kerdja seseorang. Dengan demikian keadaan perumahan jang baik dapat menundjang usaha pembangunan ekonomi. Tetapi dilain pihak kemampuan untuk mengusahakan adanja perumahan jang lajak tergantung sekali daripada adanja perkembangan serta pembangunan ekonomi.

Keadaan perumahan di Indonesia masih djauh daripada mentjukupi, dilihat daripada djumlah maupun dilihat dari kwalitas/kondisi perumahannja jang sebagian besar belum memenuhi persjaratan-persjaratan jang lajak. Djumlah kekurangan lebih terasa dikota-kota besar karena adanja tingkat urbanisasi jang tjukup tinggi. Kekurangan persjaratan-persjaratan (kwalitas) perumahan jang lajak terdapat terutama dipedesaan dan djuga dikota-kota besar (slums). Kekurangan-kekurangan dibidang perumahan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnja penduduk jang tjukup umur untuk kawin. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat kelahiran jang tinggi pada tahun-tahun lima puluhan. Demikian pula terdapat suatu tingkat urbanisasi, jaitu arus perpindahan penduduk kekota-kota besar, jang tinggi. Kerusakan selama perang kemerdekaan dan gangguan-gangguan keamanan memberikan pengaruh pula terhadap kekurangan perumahan ini. Dan jang terachir masalah ekonomi dan tingkat kehidupan jang belum meningkat dan kurang tersedianja fasilitas ataupun sarana-sarana pembangunan perumahan merupakan salah satu sebab pula. Kekurangan perumahan ini bila tidak ditanggulangi setjara baik akan bertambah parah diwaktu-waktu jang akan datang. Karena ketjuali harus mengedjar ketinggalan-ketinggalan jang ada, pembangunan dibidang perumahan harus pula mengikuti perkembangan djumlah penduduk.

Masalah perumahan dapat dibagi mengenai perumahan kota dan perumahan daerah pedesaan. Mengenai perumahan kota dapat dibagi pula mendjadi masalah perumahan kota-kota besar dan masalah perumahan kota-kota ketjil. Mengenai perumahan kota-kota besar djumlahnja ditandai oleh sangat kurangnja djumlah rumah jang ada dibandingkan dengan banjaknja penduduk.

Ketjuali itu banjaknja rumah-rumah jang tidak memenuhi persjaratan-persjaratan kehidupan dan pembangunan jang lajak, jaitu perkampungan-perkampungan dipinggir kota dan gubuk-gubuk liar didalam kota. Demikian pula terdapat kesulitan-kesulitan mengenai tanah, fasilitas air minum, keadaan penerangan, kesehatan lingkungan dan sebagainja. Djuga dapat disebutkan adanja perbedaan jang besar antara biaja pembangunan atau sewa dalam bentuk kontrak sesuatu rumah dengan kemampuan penduduk kota pada umumnja. Mengenai masalah perumahan dikota-kota ketjil setjara relatief keadaannja lebih baik daripada koto-kota besar, namun masalah kota besar djuga sudah timbul disini. Masalah perumahan pedesaan kekurangannja terletak terutama kepada kwalitas dalam arti kata kurangnja persjaratan-persjaratan tehnik dan konstruksi rumah. Demikian pula kalau diperhatikan persjaratan-persjaratan sosial, fasilitas kesehatannja masih buruk.

Kekurangan akan perumahan dikota-kota mempunjai hubungan dengan tingkat pertumbuhan sosial-ekonomi didesa-desa. Kekurangan-kekurangan rumah dikota, adalah sangat besar dan sifatnja mendesak. Ini disebabkan terutama oleh pertambahan penduduk kota jang pesat karena adanja proses urbanisasi. Mengalirnja penduduk desa kekota-kota sedemikian itu menundjukkan masih kurangnja adanja keseimbangan sosial-ekonomi antara desa-desa dan kota-kota.

Sebaliknja adanja kegiatan-kegiatan pembangunan bidang perumahan dikota-kota dapat menimbulkan atau meningkatkan produksi bahan-bahan bangunan didesa-desa. Hal ini akan memperluas lapangan kerdja dan djuga berarti meningkatkan pendapatan masjarakat desa. Setjara tidak langsung berarti pula membantu pemetjahan masalah perumahan didesa-desa, oleh karena masalah perumahan-perumahan desa tersebut disebabkan terutama oleh tingkat pendapatan jang rendah.

Suatu masalah lain jang masih perlu dikembangkan ialah perentjanaan kota. Perentjanaan kota meliputi perentjanaan penggunaan tanah untuk tempat-tempat perumahan, tempat-tempat niaga, daerah industri, djaringan transport, tempat-tempat rekreasi dan lain-lain dari sesuatu kota. Perentjanaan kota ini sudah dimulai diberbagai kota besar, namun hasilnja masih belum sesuai dengan jang diharapkan. Dengan perentjanaan kota pengaturan serta penjelenggaraan masalah perumahan akan dapat dilaksanakan setjara lebih baik.

Pembiajaan merupakan salah satu masalah perumahan jang paling sulit. Seperti telah disebutkan terdapat perbedaan jang besar antara

biaja pembangunan atau sewa rumah dengan kemampuan penduduk kota pada umumnja. Hal ini tidak memberikan stimulasi pembangunan perumahan-perumahan jang ditudjukan kepada masjarakat jang penghasilannja sedang atau rendah. Untuk beberapa golongan masjarakat tertentu seperti sebagian pegawai negeri dan karyawan dari perusahaan-perusahaan negara maupun swasta, penjediaan perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah bagi Pegawai Negeri dan perusahaan-perusahaan tertentu bagi karyawannja. Pemetjahan lain dibidang pembiajaan pembangunan perumahan akan diusahakan.

Ketjuali perentjanaan kota dibidang peraturan dan ketentuan mengenai perumahan masih banjak jang perlu disempurnakan. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan jang sekarang ada belum dapat memberikan tertib perumahan (housing peace) setjara baik. Lagi pula tidak terdapat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang sewa, sewa-beli, pembelian sedemikian rupa sehingga menstimulir pembangunan perumahan ini.

Ketjuali itu masih banjak terdapat kesimpang-siuran kewenangan antara berbagai badan pemerintahan mengenai perumahan ini, misalnja sadja antara Departemen Pekerdjaan Umum, Departemen Sosial, Kota-Pradja dan lain-lain instansi. Dalam hal ini djuga diperlukan perbaikan-perbaikan setjara menjeluruh.

Masalah perumahan kota-kota maupun perumahan daerah pedesaan jang mempunjai hubungan erat dan pengaruh timbal-balik akan diatur dan diarahkan melalui suatu pola, jaitu tata-kota dan tata-daerah.

Usaha-usaha jang dapat dilakukan dalam rangka pembangunan bidang perumahan mentjakup berbagai persoalan termasuk dalam bidang tugas Pemerintah Pusat maupun Daerah, bidang usaha swasta dan masjarakat sendiri. Didalam perentjanaan bidang perumahan, masalah-masalah maupun pemetjahannja akan dikelompokkan dalam klasifikasi perumahan kota, perumahan desa serta tata-kota dan daerah.

KEADAAN DAN MASALAH-MASALAH.

1. *Perumahan Kota.*

Ketjuali hal-hal jang telah disebutkan terlebih dahulu, seperti kekurangan dalam djumlah (kwantitas), perumahan perkampungan jang tidak memenuhi sjarat, gubuk-gubuk liar jang tidak terkendalikan, terdapat pula masalah kepadatan penghuni perumahan terutama

dikota-kota besar. Hal ini disebabkan karena perbandingan antara perumahan jang ada dan djumlah penduduk memang amat tidak sesuai.

Kebutuhan akan perumahan diperkirakan sedjumlah 300.000 buah per-tahunnja. Sedangkan kemampuan daripada kegiatan pembangunannja hanja mentjapai sekitar 40.000 buah per-tahunnja.

Kota-kota sebenarnja memiliki fasilitas-fasilitas jang memberikan kemungkinan untuk melaksanakan pembangunan perumahan. Misalnja tjara pembiajaan dengan melalui sistim sewa-beli atau sistim perkreditan djangka pandjang lainnja belum berkembang. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanja inflasi ditahun-tahun jang lampau. Usaha-usaha dalam bentuk ini telah pernah berdjalan dikota-kota tingkat Daswati II jang menghasilkan kurang lebih 12.500 rumah dalam waktu sepuluh tahun (dalam rangka peraturan Menteri Pekerdjaan Umum tahun 1951). Tjara pembiajaan dan pembangunan seperti tersebut diatas memberikan kemungkinan untuk menstimulir kegiatan perumahan dengan melalui industri perumahan. Hal ini djuga akan merupakan peningkatan penjediaan lapangan kerdja.

Bagi golongan karyawan Pemerintah (pegawai negeri dan pegawai perusahaan-perusahaan negara), sebahagian disediakan perumahannja oleh Pemerintah atas beban anggaran negara dan berupa pembiajaan langsung. Walaupun hal ini merupakan beban pembiajaan jang tjukup besar bagi negara, namun sifat dari penjediaan perumahan tersebut masih sangat terbatas. Tjara ini akan dirobah dengan sesuatu sistim pembiajaan penjediaan rumah-rumah bagi karyawan Pemerintah jang lebih baik. Mengenai djenis dan besarnja perumahan jang disediakan bagi golongan karyawan Pemerintah, belum terlihat adanja peraturan jang efektif. Demikian pula belum terdapat suatu ketentuan sehingga tjara-tjara dan prosedur penempatan perumahan dapat terlaksana setjara adil, wadjar dan memberikan ketenteraman penghuni.

Untuk dapat memberikan perentjanaan serta program pembangunan dibidang perumahan setjara lebih baik, masih perlu dilakukan kegiatan-kegiatan penelitian, misalnja mengenai kondisi dan kebutuhan perumahan dihubungkan dengan tingkat pendapatan berbagai golongan masjarakat dikota-kota.

Keadaan seperti digambarkan tersebut diatas keadaannja relatif lebih baik bagi kota-kota ketjil.

2. *Perumahan Daerah Pedesaan.*

Masalah perumahan daerah pedesaan ditandai terutama oleh keadaan perumahan jang pada umumnja djauh dari memenuhi per-

sjaratan tehnis, sosial dan kesehatan jang lajak. Sebagai gambaran dapat dikemukakan disini bahwa rumah-rumah pedesaan 73 persen masih berlantai tanah. Hanja 32 persen mempunjai sumber air didalam pekarangan, 23 persen memiliki kamar mandi sendiri dan 12 persen memiliki kakus sendiri.

Keadaan perumahan jang demikian itu adalah akibat dari tingkat pendapatan masjarakat desa jang masih sangat rendah dan akibat dari pengaruh pola kehidupan masjarakat desa jang masih statis. Demikian pula masih sangat kurang bimbingan dan penjuluhan masjarakat mengenai perumahan, serta belum berkembangnja pengusahaan bahan-bahan bangunan setempat untuk membangun perumahan rakjat desa.

Persoalan kekurangan djumlah rumah tidak begitu dirasakan sebagaimana halnja dikota-kota. Kekurangan tersebut lebih tjepat dapat teratasi karena adanja tjara kerdja gotong-rojong dalam pembangunan perumahan jang telah mendjadi tradisi kehidupan masjarakat desa.

3. *Tata-kota dan Tata-daerah.*

Suatu masalah jang mempunjai pengaruh terhadap perkembangan daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah pedesaan ialah soal pertambahan penduduk dan penjebarannja kearah pemusatan pada kota-kota tertentu. Hal ini mempunjai akibat-akibat jang perlu mendapatkan pemikiran dan pemetjahan.

Perkembangan urbanisasi membawa hasil kesulitan-kesulitan dalam bidang perumahan, lapangan kerdja, penjediaan perlengkapan-perlengkapan kota serta fasilitas-fasilitas lingkungan kehidupan jang sehat dikota-kota. Salah satu usaha untuk menanggapi masalah tersebut diatas ialah dengan penjediaan dan pengaturan tanah jang sangat langsung dirasakan kebutuhannja bagi berbagai aktivitas penduduk serta perlengkapan dasar jang diperlukan. Penjediaan dan pengaturan tanah jang dimaksud itu dapat merangsang pembangunan perumahan dan lapangan usaha baru setjara teratur dan terarah. Perentjanaan jang baik dapat menentukan tanah-tanah jang paling baik untuk maksud-maksud perumahan, industri, pertanian, perdagangan, agama, rekreasi dan kebutuhan lain-lain daripada masjarakat. Adapun penjediaan dan pengaturan tanah tersebut dirumuskan dalam pola tata-kota (perentjanaan kota).

Perkembangan jang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan dapat dipetjahkan melalui usaha-usaha dalam rangka perentjanaan pola tata-daerah.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.

1. *U m u m.*

Disamping pembangunan dan pemetjahan masalah dibidang sandang dan pangan, maka pembangunan perumahan merupakan salah satu unsur pokok kesedjahteraan rakjat dalam masjarakat adil dan makmur. Keadaan perumahan jang lebih baik djuga akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas kerdja dan dengan demikian pula akan meningkatkan kegiatan ekonomi pada umumnja.

Tudjuan pembangunan dibidang perumahan ialah menjediakan kediaman (tempat tinggal) dalam suatu lingkungan jang memenuhi sjarat-sjarat kehidupan (keluarga) jang lajak dipandang dari berbagai segi kehidupan masjarakat, jaitu sosial, ekonomi, kesehatan serta kenikmatan penghuni. Hal ini terutama ditudjukan dalam bidang perumahan rakjat.

2. *Perumahan Kota.*

Kenjataan-kenjataan pada waktu ini menundjukkan bahwa sumber-sumber bahan-bahan maupun pembiajaan bagi keperluan pembangunan perumahan tersebut masih amat terbatas. Oleh karena itu penanggulangan masalah ini akan dilakukan setjara bertahap dan dengan menentukan suatu skala prioritas. Kebidjaksanaan dan langkah-langkah ditudjukan untuk mentjegah, sedikit-sedikitnja mengurangi makin memburuknja keadaan perumahan. Demikian pula akan diusahakan penjediaan dan pemberian fasilitas fisik supaja penjelenggaraan pembangunan perumahan dapat distimulir dan dilaksanakan sebagian besar oleh masjarakat sendiri. Fasilitas-fasilitas ini akan berupa penjediaan tanah, keringanan perpadjakan, penjediaan air, djalan-djalan, riolering, pembuangan sampah dalam suatu pola tata-kota. Ketjuali itu hambatan-hambatan didalam bidang perumahan ini akan dihilangkan.

Mengenai pembiajaan bagi pembangunan dibidang perumahan diusahakan pula supaja sebagian besar diusahakan oleh masjarakat sendiri. Pembiajaan jang dibebankan dari anggaran negara ditudjukan untuk pengadaan sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas untuk menstimulir pembangunan perumahan seperti jang telah disebutkan terlebih dahulu.

Ketjuali itu usaha-usaha penelitian dan survey serta penjelenggaraan projek-projek perumahan pertjontohan akan dilakukan oleh Pemerintah. Projek-projek pertjontohan perumahan tersebut adalah untuk mengarahkan penggunaan bahan-bahan bangunan serta tjara-

tjara melaksanakan pembangunan perumahan jang effisien, sehingga dapat diperoleh djenis perumahan jang tjukup murah harganja tetapi tjukup sehat dan kuat.

Tjara-tjara pembiajaan melalui perkreditan djangka pandjang serta sistim sewa-beli akan dilaksanakan sebagai salah satu usaha menstimulir pembangunan dibidang perumahan. Dan dengan demikian pula mendorong tertjiptanja iklim industri perumahan jang sehat.

Penjediaan perumahan bagi golongan karyawan negara ditingkatkan. Akan tetapi untuk tidak terlalu mendjadi beban keuangan negara, diusahakan untuk mengalihkan setjara bertahap sistim pembiajaan langsung jang telah dilakukan oleh Pemerintah kesistim subsidi atau dengan pemberian kredit lunak berdjangka pandjang melalui sistim sewa-beli. Aturan-aturan mengenai standard perumahan, tjara-tjara penempatan dan sewa-beli akan diatur setjara lebih baik.

Setjara terperintji akan dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

(a) Untuk mendorong usaha-usaha dibidang perumahan, diusahakan kredit bank dengan sjarat-sjarat jang ringan bagi badan-badan jang tidak mentjari keuntungan. Disamping itu diusahakan dan diatur djaminan bagi bank-bank jang menjediakan kredit serta para penanam modal jang bergerak dibidang perumahan.

(b) Dalam rangka penjediaan sarana dan fasilitas pembangunan perumahan, ditetapkan pola penggunaan tanah, termasuk pengaturan untuk mentjegah timbulnja spekulasi dan kenaikan harga tanah untuk pembangunan. Disamping itu diperkembangkan usaha-usaha pematangan tanah dan ditingkatkan penjediaan fasilitas-fasilitas utama lingkungan perumahan, seperti djalan-djalan, saluran-saluran air dan air minum.

(c) Dalam rangka menundjang peningkatan usaha-usaha dibidang perumahan, chususnja dari segi tehnis-tehnologis, diadakan dan ditingkatkan pengadaan standardisasi dan normalisasi bahan-bahan bangunan dan elemen-elemen bangunan, disamping menjelenggarakan projek-projek perumahan pertjontohan ataupun projek-projek prototype rumah kuat, sehat dan murah. Projek-projek perumahan pertjontohan dan prototype diadakan disetiap ibukota propinsi.

(d) Mengadakan usaha-usaha penerangan dan penjuluhan masjarakat, terutama mengenai segi-segi kesehatan perumahan, tehnik dan tjara pembuatan serta penggunaan bahan bangunan. Penerangan dan penjuluhan masjarakat dilakukan melalui Pusat Informasi Perumahan (Bangunan).

(e) Dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi bahan bangunan, disempurnakan dan dikembangkan industri bahan bangunan rakjat serta diadakan eksplorasi, survey dan penelitian untuk mendapatkan bahan dan bangunan baru. Sedangkan untuk mengatasi masalah distribusi bahan bangunan, diarahkan pembangunan perumahan dengan mengutamakan penggunaan bahan bangunan lokal maupun dikembangkan produksi setjara massal dari elemen-elemen bangunan rumah.

(f) Untuk meningkatkan penjediaan perumahan bagi golongan karyawan negara, diusahakan untuk mengalihkan sistim pembiajaan langsung kesistim subsidi dan kredit, dengan disertai penjesuaian standard perumahannja. Standard perumahan jang sedemikian, sehingga karyawan negara mampu untuk mengangsur melalui sistim sewabeli sebagian dari biaja pembangunannja, jang diluar bagian dari subsidi Pemerintah, dalam djangka waktu 20 tahun.

(g) Sebagai persiapan bagi pelaksanaan program pembangunan dibidang perumahan, diadakan survey, penelitian dan statistik serta perantjangan-perantjangan, sehubungan dengan kebutuhan dan kondisi perumahan. Disamping itu diadakan survey, penelitian dan statistik, dalam tingkat dan pembagian pendapatan golongan masjarakat dikota-kota.

(h) Untuk dapat menampung dan melaksanakan usaha-usaha ataupun kegiatan-kegiatan, sesuai dengan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang diuraikan terdahulu, dilakukan pembinaan dan penjempurnaan terhadap aparat jang meliputi instansi dan badan-badan di Pemerintah Pusat dan Daerah, usaha Swasta, Koperasi serta Jajasan-jajasan jang bergerak dibidang perumahan. Dalam rangka itu pula didirikan dan diperluas Pusat Informasi Perumahan (Bangunan) didaerah-daerah tingkat Propinsi, Kota Madya dan Kabupaten.

3. *Perumahan Desa.*

Pemetjahan masalah perumahan desa dilakukan dalam rangka pembangunan masjarakat desa setjara menjeluruh, diantaranja ialah pemupukan kesadaran masjarakat desa sendiri serta mempertinggi ketrampilan (skill). Pembangunan perumahan setjara gotong-rojong didesa-desa jang telah mendjadi tradisi kehidupan masjarakat didesa dikembangkan dan ditingkatkan mendjadi suatu sistim bagi pemetjahan masalah pembangunan perumahan didesa-desa.

Dalam usaha meningkatkan kegiatan pembangunan perumahan dipedesaan, diintensifkan usaha-usaha penjuluhan, bimbingan dan pemupukan kesadaran masjarakat dan mendorong timbulnja pemba-

ngunan perumahan-perumahan baru. Usaha ini dilakukan dengan penjusunan dan penjebaran publikasi-publikasi serta latihan-latihan mengenai perumahan pedesaan, jang menjangkut segi sosial, tehnis dan kesehatan. Untuk memberikan bimbingan tehnis mengenai pembangunan perumahan desa setjara gotong-rojong perlu disusun buku perumahan gotong-rojong. Buku ini akan memuat soal pengembangan, penjempurnaan produksi bahan-bahan bangunan serta tempat pemakaiannja. Ketjuali itu diuraikan pula mengenai tehnik pembangunan perumahan, peralatan bangunan sederhana serta organisasi kerdja dan pembiajaannja.

Untuk memberikan bahan-bahan pengalaman dan memberikan tjontoh guna mengembangkan kegiatan pembangunan perumahan desa setjara efektif serta sistimatis diselenggarakan projek-projek prototype lingkungan perumahan desa. Projek-projek ini diadakan disetiap daerah Propinsi.

4. *Tata-kota dan Tata-daerah.*

Dalam djangka waktu lima tahun jang akan datang akan diusahakan supaja seluruh propinsi/daerah tingkat I telah mempunjai pola tata-daerah untuk masing-masing propinsi, dan pola tata-kota untuk tiap-tiap ibukota propinsi dan kota-kota utama (pelabuhan, industri, perdagangan dan lain-lain). Demikian pula akan dibentuk unit-unit perentjanaan tata-kota dan tata-daerah dimasing-masing daerah.

Dibidang perentjanaan tata-kota diutamakan penjusunan rentjana-rentjana bagi kota-kota jang mengalami pertambahan penduduk jang besar dan mempunjai problim-problim sosial-ekonomi jang sulit seperti : Djakarta, Bandung, Surabaja, Medan, Palembang dan Semarang. Kemudian djuga kota-kota jang penting seperti kota-kota pelabuhan dan kota-kota jang merupakan pusat perkembangan baru, jaitu antara lain Tjirebon, Bitung, Pandjang, Dumai, Karawang, Tasikmalaja, Malang dan Solo. Selain itu akan direntjanakan industrial estates, dan lain-lain.

Dibidang perentjanaan tata-daerah diutamakan penjusunan rentjana-rentjana bagi daerah-daerah jang berpenduduk padat dengan persoalan-persoalan penjediaan lapangan kerdja jang besar, seperti daerah-daerah Djawa Barat, Djawa Timur, Sumatera Utara dan Bali. Demikian djuga daerah-daerah jang potensiil kemungkinan perkembangannja besar seperti Lampung, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Pada tingkat pertama penjusunan pola tata-kota ditudjukan pada pengarahan dan pengaturan tata-penggunaan tata-kota (urban land-

use) sebaik-baiknja, sedangkan pola tata-daerah ditudjukan kepada penjusunan pola-pola kemungkinan perkembangan daerah.

Undang-undang tata-kota sebagai pengganti S.V.O. 1948 dan penjusunan baru Undang-undang tata-daerah akan dilakukan. Demikian pula akan disusun standardisasi serta pedoman kerdja perentjanaan kota dan perentjanaan tata-daerah.

5. *Tehnik Penjehatan (Air-minum, Assainering/Riolering).*

Fasilitas-fasilitas Tehnik Penjehatan (air minum, assainering/riolering) ini pada umumnja masih belum memenuhi sjarat-sjarat jang sesuai dengan kebutuhan masjarakat. Kekurangan akan fasilitas-fasilitas tehnik penjehatan tersebut terutama ialah mengenai air minum. Kekurangan ini terasa sekali dikota-kota besar jang sangat padat penduduknja, dan dimana penduduk tersebut sangat tergantung kebutuhannja dari suatu pusat penjediaan air (central water-supply). Sasaran utama perbaikan fasilitas tehnik penjehatan akan dilakukan pada kota-kota besar seperti ibukota-ibukota Propinsi, kota pelabuhan dan kota-kota jang merupakan pusat-pusat industri, turisme dan lain-lain sebagainja. Semua ini disesuaikan pula dengan perentjanaan bidang-bidang lain jang memperoleh prioritas.

Dalam usaha peningkatan penjediaan air minum diambil kebidjaksanaan untuk memanfaatkan terlebih dahulu sumber-sumber jang berasal dari air tanah (mata air sumur). Tjara ini adalah jang paling sederhana serta murah dalam eksploitasinja, sebab pada umumnja air tanah sudah djernih sehingga tidak perlu pengolahan, ketjuali pembubuhan chloor untuk pembunuhan kuman-kuman penjakit.

Kegiatan jang akan dilakukan dalam bidang air minum ini meliputi intensifikasi, jaitu merehabilitir dan meningkatkan kapasitas fasilitas air minum jang ada, sehingga mentjapai kembali kapasitas jang optimal. Ketjuali itu akan dilakukan kegiatan ekstensifikasi, jaitu dengan meluaskan dan/atau membangun baru ditempat-tempat jang kebutuhannja sangat mendesak. Seperti antara lain di Ambon, Palembang, Surabaja, Semarang, Padang, Tandjungubah, Bogor, Menado, Djakarta, Kupang, Makassar, Solo, Denpasar, Bitung, Jogjakarta dan Sukabumi.

Sasaran jang akan ditjapai pada achir tahun 1973 adalah produksi sebesar 8.000 liter/detik. Dengan kapasitas jang sekarang ada (± 9.000 liter/detik), maka djumlah kapasitas seluruhnja mendjadi 17.000 liter/detik.

Dalam bidang assainering/riolering dan pembuangan sampah antara lain akan dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kebersihan kota dan menghindari terdjadinja bandjir didalam kota. Kegiatan jang akan dilakukan meliputi rehabilitasi dan pemanfaatan kembali fasilitas-fasilitas pembakaran sampah jang ada serta mengintensifkan dan penjempurnaan sistim pengumpulan dan pembuangan sampah dengan alat-alat jang ada. Merehabilitir dan / atau memperluas fasilitas assainering / riolering jang ada sehingga minimum dapat dihindarkan bandjir didalam kota pada waktu hudjan.

B. KESEDJAHTERAAN SOSIAL

PENDAHULUAN.

Dalam bidang kesedjahteraan sosial terdapat masalah-masalah fakir-miskin, jatim-piatu, suku terasing, penderita-penderita tjatjad dan lain-lain jang memerlukan perhatian. Terdapat pula masalah-masalah korban G-30-S/PKI, repatriasi, tuna-karja, anak nakal dan sebagainja.

Disamping itu diperlukan kegiatan-kegiatan jang membebaskan masjarakat Indonesia dari tradisi-tradisi usang jang menghambat pembangunan. Minat dan partisipasi rakjat dalam pembangunan perlu ditingkatkan.

KEADAAN DAN MASALAH-MASALAH.

Lembaga Sosial Desa dewasa ini berdjumlah sekitar 33.400. Sebagai suatu lembaga organisasi lokal dan kemasjarakatan disamping organisasi lain seperti koperasi desa dan sebagainja Lembaga Sosial Desa dapat memegang peranan utama dalam pelaksanaan program-program sosial untuk usaha-usaha pembangunan desa

Setiap usaha Pembangunan Nasional pada hakekatnja akan membawa perobahan-perobahan sosial. Usaha-usaha tersebut dapat mengalami banjak hambatan apabila faktor-faktor penghalang jang bersumber pada alam fikiran tradisionalisme, irrasionalisme dan feodal isme tidak dengan sadar diusahakan untuk dihilangkan.

Untuk pemetjahan problema-problema sosial diperlukan tenaga-tenaga pelaksana sosial jang tjukup berpengalaman dan terlatih dengan baik. Untuk itu sangat diperlukan latihan-latihan, bimbingan dan pendidikan. Disamping itu untuk perentjanaan dan gerak operasionil diperlukan research dan survey.

Gedjala-gedjala tidak sehat dilingkungan kehidupan keluarga, anak-anak dan pemuda disebabkan oleh berbagai faktor jang sangat kompleks. Usaha pemetjahannja memerlukan serangkaian tindakan diberbagai bidang setjara terarah dan terkoordinir, diantara segala fihak jang berkepentingan.

Disamping itu anak-anak jatim jang terlantar dan anak-anak jang mempunjai sesuatu hambatan fisik/mental belum semuanja tertam-

pung dirumah-rumah asuhan/perawatan. Tempat rekreasi untuk pemuda-pemuda seperti Karang Taruna djumlahnja djuga masih sangat kurang dan belum sempurna.

Penderita tjatjat dibagi dalam beberapa golongan, jaitu penderita tjatjat tubuh atau anggota badan, penderita tjatjat indera (tuna-netra, tuna-witjara dan tuna-rungu), penderita tjatjat mental, penderita tjatjat gangguan djiwa dan penderita tjatjat sosial (tuna-susila dan tuna-karya).

Masalah tuna-karya sebagian besar disebabkan karena kurangnja lapangan pekerdjaan didesa-desa sehingga mereka terpaksa mengalir kekota-kota. Akibatnja mereka mendiadi tuna-karya, dalam arti tidak mempunjai mata pentjaharian jang lajak bagi kemanusiaan.

Para pedjuang kemerdekaan digolongkan sebagai Perintis Kemerdekaan ; Pedjuang Kemerdekaan, Pahlawan Revolusi ; Sukarelawan/ Sukarelawati ; Pahlawan Ampera, dan sebagainja. Kepada mereka dan keluarga jang ditinggalkan belum diberi bantuan/penjantunan jang tjukup lajak dan teratur.

Korban-korban bentjana alam seperti akibat peletusan gunung berapi, bandjir, prae H.O. (kekurangan makan) dan sebagainja jang nampir tiap tahun terdjadi didaerah-daerah tertentu belum dapat diberikan penjantunan jang semestinja.

Korban-korban akibat G.30.S./PKI merupakan masalah mengenai tjara merehabilitir dan menjantunnja agar tidak menimbulkan hal-hal jang negatif.

Selandjutnja di Negeri Belanda masih terdapat orang-orang Indonesia jang ingin kembali ketanah-airnja, tetapi tidak mempunjai kesanggupan sendiri dan jang setibanja di Indonesia membutuhkan penampungan sementara.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.

1. *Kesedjahteraan Sosial Desa.*

Lembaga Sosial Desa.

Sedjalan dengan usaha-usaha penertiban organisasi dan prosedur kerdja aparatur pemerintah pusat dan daerah sampai ketingkat desa dan didalam rangka usaha peningkatan pembangunan desa akan dilan-

djutkan pembinaan/pengembangan Lembaga Sosial Desa. Pembinaan ini antara lain akan dilakukan dengan mengadakan latihan-latihan bagi pengurus Lembaga Sosial Desa. Selain daripada itu akan diusahakan untuk mendorong terbentuknja kira-kira 4.500 Lembaga Sosial Desa untuk tahun 1969 dan untuk masa lima tahun diharapkan ditiap-tiap desa sudah terdapat Lembaga-lembaga Sosial Desa.

Pemasjarakatan Suku-suku Terasing.

Usaha-usaha jang akan dilaksanakan untuk tahun 1969 — 1973 adalah mengadakan survey dan registrasi didaerah-daerah tempat suku-suku terasing ; mengadakan approach/bimbingan pada masing-masing kelompok suku-suku terasing, untuk hidup bermasjarakat ; membangun perkampungan pertjontohan ; dan sebagainja.

Dalam tahun 1969, targetnja adalah tiga buah projek dan untuk lima tahun 15 projek. Projek-projek tersebut adalah di Djambi (Batanghari/Sarko), Sumatera Selatan (Musi Rawas/Musi Banjuasin), Riau (Bengkalis, Indragiri), Sumatera Barat (Mentawai), Kalimantan Timur (Tabang dan Bulongan), Kalimantan Selatan (Hulu-Banju dan Peramasan Dua-Kali Sanga), Kalimantan Barat (Kapuas Hulu), Sulawesi Tengah (Danau Moto/Donggala), Sulawesi Selatan (Polmas/Mamudju), Nusa Tenggara Timur (Soe dan Flores), Maluku (Ceram dan Halmahera).

2. *Perubahan Sosial.*

Guna menentukan kebidjaksanaan dan langkah-langkah kearah perubahan sosial setjara berentjana dan terkendalikan perlu difahami berbagai proses dan berlakunja kekuatan-kekuatan sosial jang sangat kompleks. Sebagai sjarat pertama akan dilakukan penelitian/survey pendahuluan, baik didaerah perkotaan maupun pedesaan. Penelitian tersebut akan memberikan landasan dan pedoman-pedoman bagi usaha kelandjutan berupa penerangan dan bimbingan.

3. *Pendidikan, Research/Survey, Bimbingan dan Pembinaan.*

Usaha jang akan dilaksanakan untuk tahun 1969 — 1973 ialah pendidikan/latihan pekerdja sosial (social worker) dengan lebih menitik-beratkan kepada pendidikan/up-grading dan kerdja praktek. Pun diadakan perluasan Sekolah Kesedjahteraan Sosial di Bandung, selandjutnja akan dibuka Kursus Kedjuruan Sosial Menengah di Kupang, Padang, Djakarta Raya dan Medan.

Djuga akan dilaksanakan research dan survey terhadap masalah-masalah sosial untuk kepentingan perentjanaan dan kegiatan operasionil.

Untuk lebih mempositifkan pengikut-sertaan tenaga-tenaga dan potensi masjarakat, akan lebih di-intensifkan bimbingan dan penjuluhan kepada masjarakat melalui kursus-kursus sosial dan mass-media, publikasi, kundjungan dari rumah kerumah, dan sebagainja.

Disamping itu dilaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap potensi, dana dan daja masjarakat untuk dapat lebih diarahkan kearah sasaran-sasaran jang positif.

4. *Kesedjahteraan Anak, Keluarga dan Masjarakat.*

Untuk menanggulangi problim-problim gedjala tidak sehat dilingkungan keluarga, anak dan pemuda, maka dalam masa Rentjana Pembangunan Lima Tahun, diichtiarkan penjuluhan jang luas bagi kehidupan keluarga jang sehat dan harmonis, bimbingan dan kesempatan pendidikan terarah untuk anak-anak dan pemuda-pemuda jang mendjadi masaalah sosial serta penjediaan kesempatan ber-rekreasi sehat dan bermanfaat bagi para pemuda penganggur. Usaha-usaha jang telah ada akan ditingkatkan mutunja dan diperluas geraknja, ditambah dengan usaha-usaha/kegiatan-kegiatan baru jang serasi, terarah dan berentjana.

Kesedjahteraan Anak-anak.

Dibidang kesedjahteraan anak-anak diusahakan meningkatkan perawatan, bimbingan dan pendidikan anak-anak nakal/terlantar dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Panti-panti Asuhan, Panti-panti Guna dan Panti-panti Pendidikan. Djuga dengan penjelenggaraan Projek-projek Pertjontohan Panti-panti Sosial. Dalam tahap pertama diperlukan pembangunan 9 (sembilan) Projek Pertjontohan, sebuah akan didirikan untuk tahun 1969. Djuga diselenggarakan Projek Latihan Kerdja untuk anak-anak tjatjat, baik dalam bentuk workshop maupun sheltered workshop.

Kesedjahteraan Taruna.

Penjusunan Rantjangan Pembentukan Undang-undang Pokok Kesedjahteraan Anak akan dimulai dalam tahun 1969.

Akan dikembangkan bakat atau keinginan pemuda-pemuda dengan rekreasi sehat dengan mendjalankan intensifikasi dan ekstensifikasi Karang Taruna.

Djuga menjelenggarakan Projek Sanggar Rekreasi Sehat. Dalam tahap pertama diperlukan pembangunan 25 Sanggar, untuk tiap-tiap tahunnja 5 buah.

Mengingat prosentase anak dan taruna jang tinggi dari penduduk Indonesia, adalah penting sekali bahwa tiap-tiap sektor pembangunan dalam tahap pertama sudah mulai memperhitungkan kepentingan-kepentingan anak dan taruna. Diusahakan untuk mendapatkan pengertian jang lebih seksama mengenai berbagai masalah dan pemetjahannja tentang anak dan taruna serta pengintegrasiannja dengan usaha-usaha pembangunan lainnja.

Kesedjahteraan Keluarga.

Keluarga jang sedjahtera memberikan iklim jang baik terhadap perkembangan pribadi anak-anak.

Langkah-langkah jang diambil ialah mengadakan usaha-usaha bimbingan dan penjuluhan keluarga sedjahtera. Melaksanakan usaha-usaha bantuan bagi ibu-ibu jang bekerdja dengan menumbuhkan dan mengembangkan Taman Penitipan Anak/Baji. Mengadakan usaha-usaha penjantunan bagi keluarga-keluarga jang mengalami kesulitan dan berantakan (broken homes).

5. *Rehabilitasi Penderita Tjatjat.*

Untuk menanggulangi masaalah penderita tjatjat diselenggarakan berbagai usaha dibidang pekerdjaan rehabilitasi melalui program pembinaan mental, pemberian fasilitas-fasilitas penjantunan dan latihan kedjuruan dan fasilitas penempatan mereka dalam lapangan pekerdjaan jang lajak.

Diteruskan usaha-usaha jang telah dimulai pada tahun-tahun jang lalu dengan memberikan aksentuasi pada 3 bidang usaha, ialah pemberian fasilitas penjantunan dan latihan kedjuruan, penjaluran dan penempatan tenaga penderita tjatjat (pentja), pemberian stimulans/bantuan sekaligus dalam rangka pembinaan partisipasi masjarakat.

6. *Kesedjahteraan Korban-korban Perdjuangan.*

Adalah suatu kebidjaksanaan dan mendjadi kewadjiban Pemerintah untuk memberikan penghargaan selajaknja kepada para pahlawan. Dalam masa tahun 1969 — 1973 registrasi jang lebih sempurna dari para korban/perdjuangan, Perintis Kemerdekaan, Sukarelawan/Sukarelawati dan Pahlawan Ampera akan diselenggarakan. Perbaikan peningkatan penjantunan/bantuan akan diusahakan.

7. *Penjantunan Korban Bentjana Alam/Korban-korban Lain.*

Penjantunan para korban bentjana alam dan rehabilitasi korban-korban akibat G.30.S/PKI dalam masa tahun 1969 — 1973 meliputi usaha-usaha sebagai berikut :

Bentjana Alam.

Peningkatan bantuan kepada korban bentjana alam akan diusahakan dengan perbaikan organisasi pengumpulan dan tjara-tjara penjaluran bantuan. Sementara itu intensifikasi dan ekstensifikasi pentjegahan bentjana alam akan diselenggarakan dengan meningkatkan kerdjasama instansi di Pusat dan Daerah.

Korban Akibat G.30.S./PKI.

Mengusahakan pembinaan dan bimbingan mental para korban generasi mudanja dalam rangka pengembalian kemasjarakat. Pemanfaatan tenaga-tenaga para korban jang telah direhabilitir kearah bidang produksi. Bagi para korban akibat G.30.S/PKI jang sulit untuk diterima kembali dimasjarakat setempat akan diusahakan kesempatan bekerdja ditempat-tempat lain.

8. *Repatriasi.*

Dalam pelaksanaan repatriasi orang-orang Indonesia jang ingin kembali ketanah-air (repatrian), akan diusahakan persiapan bagi mereka sebelumnja di Luar Negeri (mental psychologis). Demikian pula persiapan-persiapan di Dalam Negeri bagi penampungan mereka setjara berentjana jang bersifat sementara maupun seterusnja, dengan mempersiapkan mereka untuk memasuki masjarakat kembali.

9. *Dana Sosial.*

Usaha-usaha akan dilakukan untuk membimbing serta membina kesadaran dan tanggung-djawab masjarakat akan kewadjiban berdana untuk tudjuan sosial. Kemudian koordinasi dan kerdjasama dalam rangka pengumpulan dana-dana ini ditingkatkan. Djuga akan dilakukan pengawasan jang intensif terhadap pengumpulan dan penggunaan dana-dana sosial dari masjarakat oleh Jajasan-jajasan Sosial.

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun
(1969/70 — 1973/74)

PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL DAN PENJEDIAAN AIR MINUM

(dalam djutaan rupiah)

Bidang/Sektor/ Sub-sektor/Program	*Anggaran Pembangunan Negara*	
	1969/70	*1969/70 — 1973/74*
Bidang Sosial		
Sektor Perumahan, Kesedjahteraan Sosial dan Penjediaan Air Minum	*1.521*	*13.278*
1. ***Sub-sektor Perumahan Rakjat, Tata-Kota dan Tata-Daerah***	*250*	*2.183*
a. Program Penjuluhan Pembangunan Perumahan Kota dan Perumahan Desa	180	1.572
b. Program Perentjanaan Tata-Kota dan Tata-Daerah	70	611
2. ***Sub-sektor Kesedjahteraan Sosial***	*205*	*1.790*
a. Program Pembinaan Perubahan Sosial	25	219
b. Program Bantuan Sosial	180	1.571
3. ***Sub-sektor Air Minum dan Assainering***	*1.066*	*9.305*
a. Program Peningkatan Persediaan Air Minium	1.016	8.869

b. Program Peningkatan Assainering	50	436
Kegiatan-kegiatan Kesedjahteraan Sosial jang pembiajaannja diperhitungkan dalam Sektor-sektor lain		
a. Pendidikan Tenaga Sosial (termasuk Sektor Pendidikan dan Kebudajaan, Sub-sektor Pendidikan dan Penelitian Institusionil)	18	147
b. Research Perubahan Sosial (termasuk Sektor Pendidikan dan Kebudajaan, Sub-sektor Pendidikan dan Penelitian Institusionil)	2	19
c. Penjempurnaan Prasarana Fisik (termasuk Sektor Pemerintahan Umum, Sub-sektor Pemerintahan Umum)	50	281

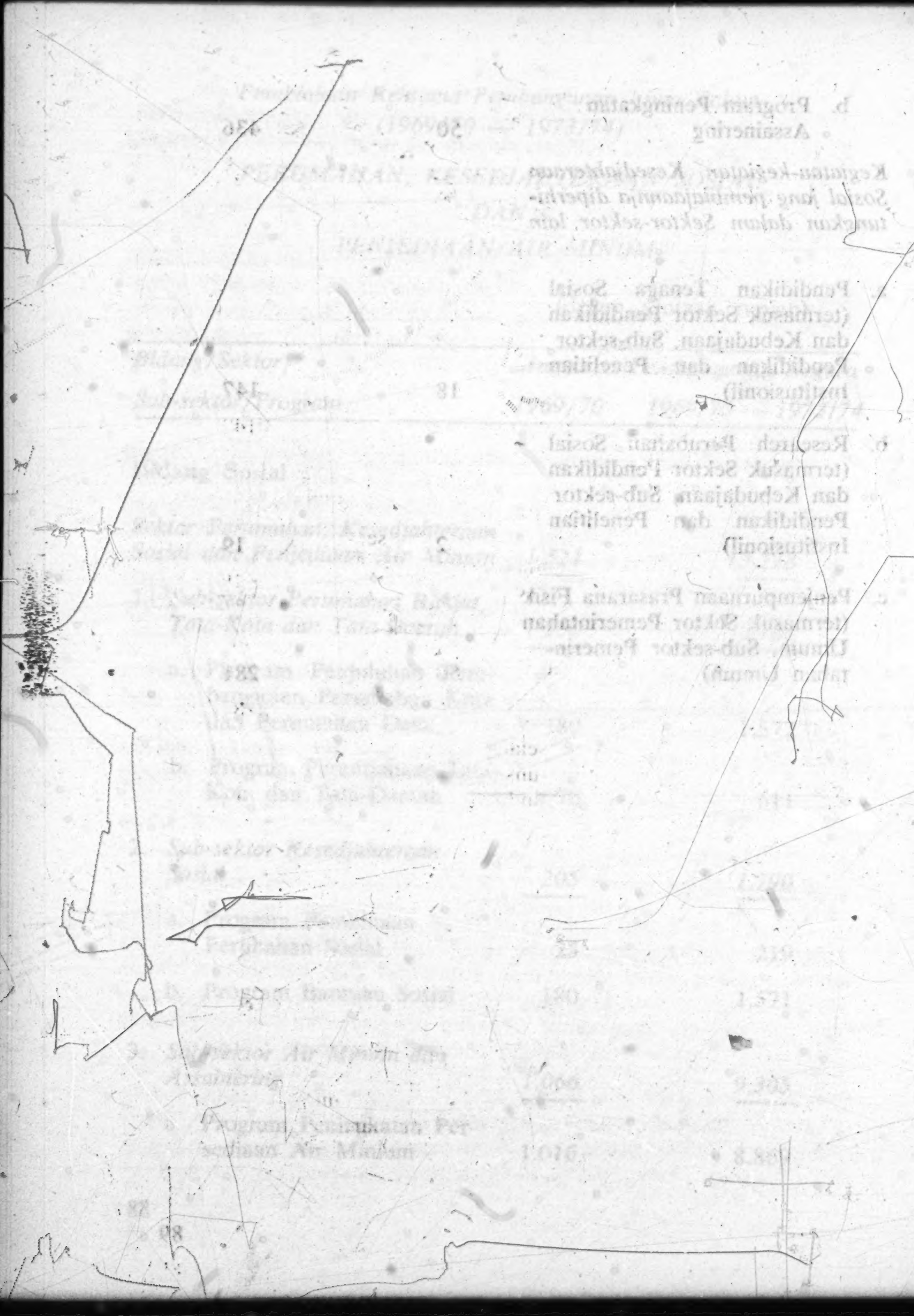

BAB XIII

TERTIB HUKUM DAN PENERANGAN

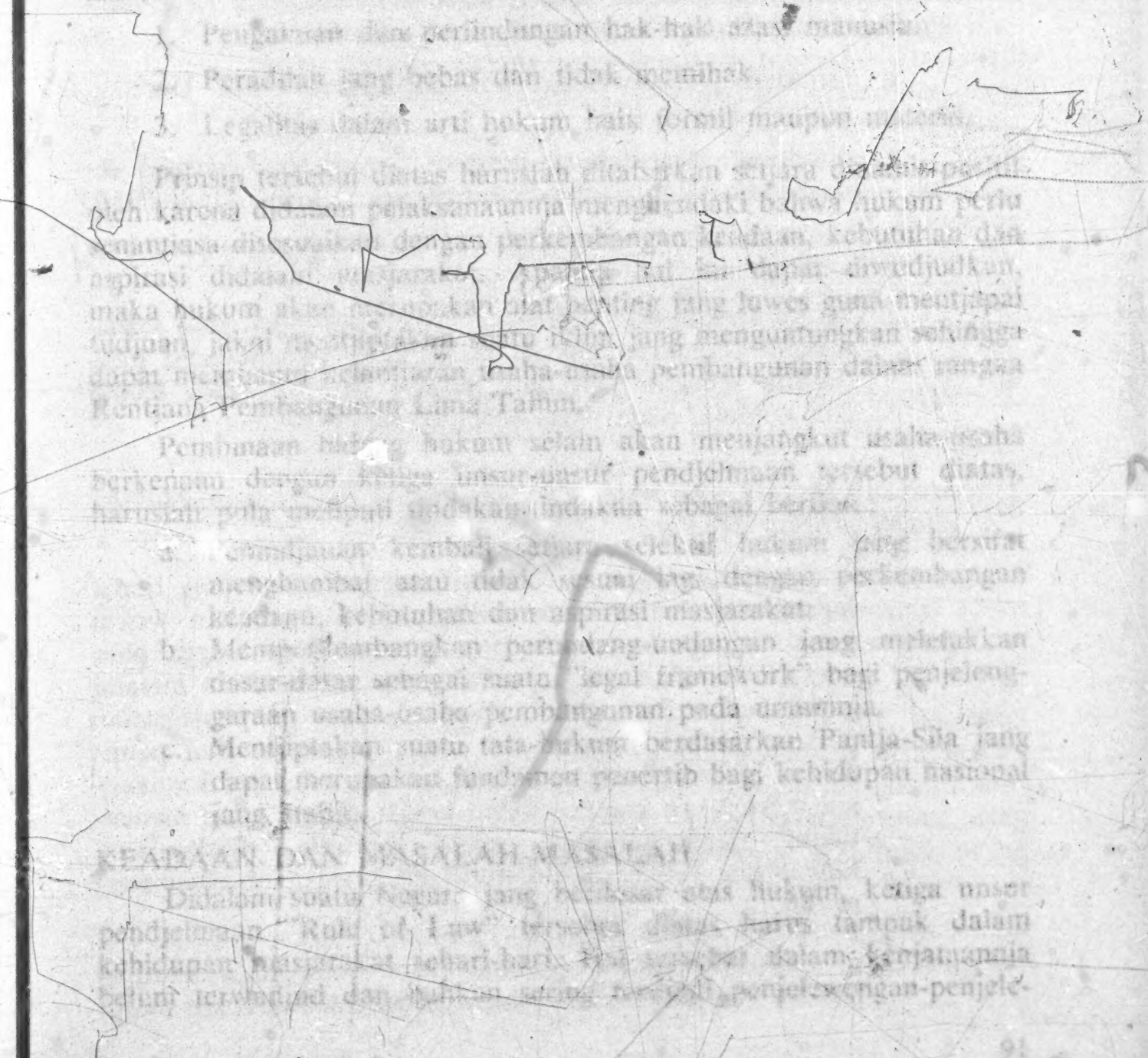

BAB XIII

TERTIB HUKUM DAN PENEGAKAN

B A B XIII

TERTIB HUKUM DAN PENERANGAN

A. T E R T I B H U K U M

PENDAHULUAN.

Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara jang berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan semata-mata. Sebagai suatu Negara jang berdasar atas hukum, prinsip "Rule of Law" dipegang setjara teguh. Prinsip ini terdjelma dalam tiga unsur utamanja, jakni :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi manusia.
2. Peradilan jang bebas dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum baik formil maupun materiil.

Prinsip tersebut diatas haruslah ditafsirkan setjara dinamis-positif oleh karena didalam pelaksanaannja menghendaki bahwa hukum perlu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan dan aspirasi didalam masjarakat. Apabila hal ini dapat diwudjudkan, maka hukum akan merupakan alat penting jang luwes guna mentjapai tudjuan, jakni mentjiptakan suatu iklim jang menguntungkan sehingga dapat membantu kelantjaran usaha-usaha pembangunan dalam rangka Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Pembinaan bidang hukum selain akan menjangkut usaha-usaha berkenaan dengan ketiga unsur-unsur pendjelmaan tersebut diatas, haruslah pula meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. Penindjauan kembali setjara, selektif hukum jang bersifat menghambat atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, kebutuhan dan aspirasi masjarakat.
b. Memperkembangkan perundang-undangan jang meletakkan dasar-dasar sebagai suatu "legal framework" bagi penjelenggaraan usaha-usaha pembangunan pada umumnja.
c. Mentjiptakan suatu tata-hukum berdasarkan Pantja-Sila jang dapat merupakan fundamen penertib bagi kehidupan nasional jang stabil.

KEADAAN DAN MASALAH-MASALAH.

Didalam suatu Negara jang berdasar atas hukum, ketiga unsur pendjelmaan "Rule of Law" tersebut diatas harus tampak dalam kehidupan masjarakat sehari-hari. Hal tersebut dalam kenjataannja belum terwudjud dan bahkan sering terdjadi penjelewengan-penjele-

wengan terhadap prinsip "Rule of Law" di Negara kita. Setiap kali kita dihadapkan atas peristiwa-peristiwa sebagai perkosaan terhadap hak-hak azasi, penjalah gunaan kekuasaan baik jang bersifat perorangan maupun institusionil. Pada hakekatnja *penjelewengan-penjelewengan* atau masalah-masalah hukum jang kita hadapi terletak dalam 2 bidang:

1. Bidang legislatif (law-making) atau pembentukan hukum.
2. Bidang pelaksanaan hukum (law-enforcement) atau pengetrapan hukum.

1. *Masalah-masalah Hukum jang terletak dalam Bidang Legislatif/ Pembentukan Hukum adalah sebagai berikut:*
   a. masalah penjelewengan terhadap pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.
   b. dikeluarkannja Penpres-penpres dan Perpres-perpres sebagai kelandjutan dari ditetapkannja Dekrit 5 Djuli 1959.
   c. masih adanja Undang-undang dan Perpu-perpu jang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
   d. belum tersedianja kodifikasi hukum nasional jang sesuai dengan kesadaran hukum rakjat jang berdemokrasi Pantja-Sila sebagai pengganti hukum jang berdjiwa feodal dan kolonial pada masa sebelum Kemerdekaan.

2. *Masalah Hukum jang terletak dalam Bidang Pelaksanaan Hukum adalah sebagai berikut:*
   a. belum terselenggaranja administrasi peradilan jang tjepat dan tertib. Penjelesaian perkara jang memakan waktu lama, bahkan kadang-kadang berlarut-larut hingga para pentjari keadilan enggan untuk meminta keadilan melalui badan-badan Pengadilan. Rangkaian proses penjelesaian perkara pidana jang terdiri dari pengusutan atau penjidikan, penuntutan dan penghukuman serta pelaksanaannja merupakan bagian-bagian kegiatan jang akan menentukan tjepat-lambatnja suatu perkara diselesaikan. Mekanisme juridis administratif ini perlu lebih disempurnakan.

Dalam perkara perdata pada hakekatnja bantuan hukum jang dilakukan oleh pengatjara dan advokat meru-

pakan faktor penentuan pula mengenai djangka waktu perkara dapat diselesaikan.

b. belum terbentuknja Peradilan Administrasi, menimbulkan hambatan-hambatan dalam usaha pemberian perlindungan rakjat terhadap tindakan diluar batas kewenangan penguasa atau pedjabat hukum jang merugikan rakjat, seperti penjalah-gunaan kekuasaan dan hukum.

c. dalam hal-hal penahanan, pensitaan, penggeledahan dan sebagainja, masih sering terdjadi pelanggaran hukum atjara jang berlaku.

d. pengaruh-pengaruh faktor extra-judisiil dalam peradilan harus disingkirkan demi mendjaga objektivitas dan kebebasan Hakim dalam mendjalankan tugasnja. Peradilan bebas dan tidak memihak merupakan salah satu batu udjian bagi Negara kita jang dalam pelaksanaannja dapat ditindjau dari segi institusionil dan individuil. Pada pribadi Hakim setjara individuil terletak djaminan jang utama. Hal ini menjangkut kedudukan Hakim disamping faktor-faktor lain jang menentukan dan memberikan djaminan bahwa Hakim akan bertindak objektif, bebas dan tidak memihak dalam memutus suatu perkara.

e. masih perlu diadakan penjempurnaan administrasi chusus tentang: barang bukti, barang rampasan, uang hasil denda, uang hasil denda damai, uang ganti rugi perkara, uang penggantian biaja saksi dan tahanan.

f. dalam hal perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum masih perlu adanja penjesuaian sistim dan penjelenggaraan pemasjarakatan dengan djiwa kepribadian Indonesia jang ber-Pantja-Sila, dalam arti sistim jang bersifat sosial edukatif tanpa mengabaikan tindakan-tindakan jang bersifat represif.

g. masalah tindak pidana korupsi dan ekonomi terutama penjelundupan memerlukan penanggulangan, pentjegahan dan penindakan jang tegas dan menjeluruh. Dalam hubungan ini chusus mengenai rongrongan ekonomi oleh anasir asing perlu adanja pengawasan lalu-lintas orang asing jang intensif.

h. mengenai bidang penegakan dan pengetrapan hukum baik bagi karyawan sipil maupun ABRI masih perlu diusahakan tertjapainja kesatuan.

i. kesadaran hukum masjarakat jang belum tinggi merupakan hambatan terdjadinja proses untuk terwudjudnja kehidupan berdasarkan "Rule of Law". Kebiasaan mendambakan diri kepada "Rule of Man" pada masa-masa jang silam telah mendjadikan sikap dan pandangan kita kebal terhadap eksposisi-eksposisi kekuasaan jang merugikan.

j. keadaan sarana personil dan materiil masih perlu lebih disempurnakan.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH.

Keadaan dan masalah-masalah sebagai jang diutarakan tersebut diatas mendjadi dasar untuk menetapkan kebidjaksanaan dan langkah-langkah jang akan ditempuh dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini.

1. *Bidang Legislatif/Pembentukan Hukum.*

a. Melaksanakan perundang-undangan atas kuasa/perintah Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang menjangkut berbagai bidang :

1. S o s i a l.
2. Keuangan Negara.
3. Pertahanan dan Keamanan Negara.
4. P o l i t i k.
5. Hukum dan Kehakiman.

b. Mengusahakan *pembentukan* kodifikasi hukum nasional atas :
1) Hukum Pidana.
2) Hukum Perdata.
3) Hukum Dagang.
4) Hukum Atjara Pidana.
5) Hukum Atjara Perdata.

2. *Bidang Pelaksanaan Hukum/Pengetrapan Hukum.*

a. Mengusahakan terselenggaranja administrasi peradilan jang tjepat dan tertib.
Proses penjelenggaraan peradilan merupakan rangkaian kegiatan jang saling berhubungan. Dalam proses perkara pidana, maka proses kegiatan terdiri dari pengusutan, penjidikan pe-

nuntutan, penghukuman dan pelaksanaannja. Demikian jang terlibat setjara fungsionil dalam proses tersebut, jaitu polisi, djaksa dan hakim. Dalam perkara perdata pada pokoknja bantuan hukum jang diberikan pengatjara/advokat merupakan pula bagian dari proses jang ikut menentukan djuga tjepat-lambatnja penjelesaian perkara. Untuk melaksanakan peradilan jang tjepat dan tertib akan diusahakan untuk meningkatkan koordinasi fungsionil diantara pihak-pihak tersebut. Disamping itu ketjakapan dan kedjudjuran dari penegak dan pedjabat hukum jang bersangkutan dalam melaksanakan hukum merupakan faktor jang utama.

b. Mengusahakan pembentukan peradilan administrasi ;

c. **Pengawasan dan penertiban terhadap penahanan/penggeledahan/pensitaan.**
Dalam hal ini, diusahakan menempatkan kewenangan dari pedjabat hukum pada proporsi jang sebenarnja, termasuk pengetrapan hukum atjara sebagaimana mestinja.

d. **Faktor-faktor extra-judisiil.**
Untuk mendjamin peradilan bebas dan tidak memihak faktor-faktor extra-judisiil akan disingkirkan. Berhubung dengan azas kebebasan tersebut diusahakan clearance hubungan institusionil antara Lembaga-lembaga Negara jang mempunjai kewenangan dalam bidang peradilan baik kewenangan administratif maupun judisiil. Dari segi individuil maka pribadi hakim merupakan djaminan jang utama. Mengenai hal ini diusahakan perbaikan kedudukan hakim dalam bidang penggadjian dan kepegawaian. Disamping itu perlu diusahakan fasilitas materiil dalam rangka pelaksanaan tour of duty dengan mengadakan perumahan dinas.

e. Penjempurnaan administrasi chusus tentang :
barang bukti, barang rampasan, uang hasil denda, uang hasil denda damai, uang ganti rugi perkara, uang penggantian biaja saksi dan tahanan.

f. **Perbaikan aparatur dan penjempurnaan sistim pemasjarakatan.**
Usaha ini didjalankan dengan mengadakan rehabilitasi physik /pembangunan lembaga-lembaga pemasjarakatan (pendjara), guna memungkinkan mendidik ketrampilan bekerdja untuk mendapat bekal ketjakapan para nara-pidana dalam kembali hidup di masjarakat. Sistim pemasjarakatan dilaksanakan de-

ngan perlakuan para pelanggar hukum atau nara-pidana atas dasar perikemanusiaan jang bersumber kepada djiwa Pantja-Sila.

g. **Perbaikan aparatur ke-imigrasi-an dalam rangka mendjamin keamanan dan integritas Nasional.**

Lebih meningkatkan intensifikasi pengawasan lalu-lintas orang asing dengan azas kebidjaksanaan selektif. Terutama diperlukan peningkatan kegiatan pengawasan lalu-lintas perbatasan antar-pulau, antara lain dengan rehabilitasi dan penjempurnaan peralatan untuk komunikasi dan transport. Koordinasi antara bidang keimigrasian, douane, kepolisian, kedjaksaan dan penguasa lain jang berwenang akan ditingkatkan.

h. Mengusahakan persamaan penegakan dan pengetrapan hukum, bagi karyawan sipil dan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

i. Meningkatkan kesadaran hukum masjarakat.

j. Perbaikan sarana personil dan materiil.

k. **Pendidikan/training dan upgrading.**

Program-program pendidikan/training dan upgrading setjara bertahap jang sistematis dan teratur akan diperkembangkan baik untuk tenaga-tenaga tehnis-fungsionil maupun tenaga-tenaga administratif, di Pusat dan Daerah-daerah.

Untuk pengadilan-pengadilan diadakan training/upgrading Hakim dan Panitera, untuk pemasjarakatan bagi petugas-petugas pemasjarakatan, untuk keimigrasian bagi petugas-petugas imigrasi dan untuk administrasi bagi petugas-petugas administratif. Dalam masing-masing bidang diselenggarakan "executive development program" sebagai pembentukan tenaga-tenaga kader pimpinan.

Untuk Kedjaksaan-kedjaksaan diselenggarakan training/upgrading dalam bidang umum dan dalam bidang hukum bagi tenaga tehnis-fungsionil djaksa dan pembantu djaksa maupun training/upgrading administrasi bagi tenaga-tenaga administratifnja.

Guna maksud tersebut diatas maka dalam batas-batas pembiajaan jang dapat disediakan akan diusahakan rehabilitasi, peningkatan mutu dan kapasitas pusat-pusat atau Lembaga-lembaga pendidikan/latihan jang sudah ada dilingkungan fungsionil unsur-unsur penegak hukum masing-masing. Djuga kesempatan-kesempatan pendidikan dan latihan

institusionil jang diselenggarakan oleh lain-lain instansi akan sebanjak mungkin dimanfaatkan.

Dalam rangka peningkatan keseragaman didalam penegakan hukum dan guna meningkatkan koordinasi fungsionil dalam pelaksanaan tugas, dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan diadakannja training dan upgrading bersama kehakiman dan kedjaksaan sipil dan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

1. **Rehabilitasi dan perluasan pengadilan-pengadilan dan kedjaksaan-kedjaksaan.**

   Usaha-usaha ini akan dilakukan setjara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan biaja jang dapat disediakan. Sekaligus akan diutamakan usaha untuk mengurangi ketidak-seimbangan didalam penjebaran unsur-unsur penegak hukum tersebut, demi meningkatkan effektivitas pelajanan hukum kepada rakjat dan kelantjaran administrasi peradilan.

   Untuk memungkinkan persidangan-persidangan berdjalan sebagaimana mestinja akan diusahakan penjediaan ruangan-ruangan sidang jang tjukup.

   Dalam hubungan ini maka sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan apresiasi rakjat terhadap fungsi unsur-unsur penegak hukum, pengertian dan bantuan Pemerintah. Daerah setempat dalam hal penjediaan gedung/ruangan kantor jang lajak akan sangat besar artinja. Pada azasnja akan diusahakan supaja disetiap kabupaten terdapat sebuah pengadilan negeri dan sebuah kedjaksaan negeri, sedangkan disetiap propinsi sebuah pengadilan tinggi dan sebuah kedjaksaan tinggi.

   Diharapkan bahwa keadaan ini akan tertjapai dalam dua tahap. Masa Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini adalah tahap pertama, dimana sebagian sasaran itu hendak ditjapai dengan pengertian bahwa dilihat dari segi effisiensinja perlu dipertimbangkan pula penjesuaian dengan djumlah penduduk wilajah hukumnja. Hal ini akan turut menentukan kelas pengadilan dan kedjaksaan jang bersangkutan dan menjangkut masalah standard-formasi masing-masing.

   Terutama untuk Daerah-daerah dengan wilajah hukum jang luas akan diadakan persidangan setjara berkeliling disertai pengaturan masalah-masalah transportnja.

m. Perpustakaan dan kepustakaan Hukum.

Sebagai bagian jang integral daripada pengadilan-pengadilan dan kedjaksaan-kedjaksaan, maka perpustakaan-perpustakaan dan kepustakaan-kepustakaan hukumnja akan dikembangkan dan dilengkapi.

Disamping buku-buku ilmu kemasjarakatan, chususnja dalam bidang hukum serta buku-buku dan bahan-bahan reference jang lebih up to date, akan diusahakan kumpulan-kumpulan jurisprudensi, madjalah-madjalah hukum, peraturan-peraturan dan perundang-undangan dan sebagainja.

Bantuan luar negeri dan kerdja-sama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi dalam hal ini akan dimanfaatkan sedjauh mungkin.

Selain daripada itu akan dimulai/ditingkatkan pula usaha penjusunan setjara sistematis keputusan-keputusan pengadilan sebagai sumber jurisprudensi.

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun

(1969/70 — 1973/74)

TERTIB HUKUM

(dalam djutaan rupiah)

Bidang/Sektor/ Sub-sektor/Program	*Anggaran Pembangunan Negara*	
	1969/70	*1969/70 — 1973/74*
Bidang Sosial		
Sektor Tertib Hukum	1.060	9.269
1. *Sub-sektor Tertib Hukum*	1.060	9.269
a. Program Pembinaan Tertib Hukum	645	5.631
b. Program Pemasjarakatan/ Reklasering	415	3.638
Kegiatan-kegiatan Tertib Hukum jang pembiajaannja diperhitungkan dalam sektor lain :		
a. Pendidikan tenaga penegak hukum (termasuk sektor Pendidikan dan Kebudajaan, Sub-sektor Pendidikan dan Penelitian Institusionil).	40	204

B. PENERANGAN

PENDAHULUAN.

Untuk lebih mendjamin berhasilnja pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun akan diusahakan menjebar-luaskan pengertian serta apresiasi terhadap rentjana pembangunan tersebut, sehingga dengan demikian terdapat suatu partisipasi jang aktif dari seluruh masjarakat. Guna menanamkan pengertian serta apresiasi tersebut diatas diperlukan penerangan jang efektif.

Karena usaha-usaha jang bersifat penerangan dilakukan oleh Pemerintah maupun sebagian besar oleh masjarakat sendiri, maka akan disusun suatu program penerangan jang bersifat nasional. Penerangan mengenai rentjana maupun pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun dilakukan terutama oleh peralatan Penerangan Pemerintah. Pemerintah djuga memberikan pengarahan kebidjaksanaan terhadap usaha-usaha penerangan jang dilakukan oleh masjarakat. Namun stimulasi serta dorongan untuk mengembangkan serta meningkatkan penerangan oleh masjarakat sendiri perlu ditingkatkan. Karena hal ini tidak sadja berarti penghematan daripada sarana-sarana penerangan jang dapat diusahakan oleh Pemerintah, tetapi dengan demikian dapat pula memanfaatkan usaha-usaha penerangan lainnja jang mampu memberikan pendjelasan mengenai hal-hal tertentu serta lebih dapat diterima oleh karena datang dari masjarakat sendiri. Mengenai hal jang terachir ini akan diusahakan supaja kegiatan penerangan tersebut tetap sesuai dan didalam rangka untuk mensukseskan tudjuan dan sasaran-sasaran Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Suatu sistim penerangan nasional jang mengikut-sertakan tokoh-tokoh masjarakat (dibidang keilmuan maupun kemasjarakatan lainnja) didalam rangka pemanfaatan penerangan kepada masjarakat. Ini akan efektif oleh karena lebih mudah menimbulkan apresiasi.

Demikian pula akan diusahakan perbaikan-perbaikan didalam tjara-tjara penerangan. Tjara-tjara penerangan jang bersifat instruktif diganti dengan tjara-tjara partisipasi, seperti misalnja media diskusi kelompok, seminar, kuliah subuh dan lain-lain. Tenaga-tenaga penerangan Pemerintah sendiri perlu ditingkatkan kemampuannja.

Sarana-sarana penjebaran informasi memang perlu dan akan disempurnakan didalam pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Hal ini perlu diintegrasikan dengan menggunakan serta memanfaatkan sarana-sarana dibidang lain jang dapat membantu penerangan seperti misalnja Postel Perhubungan dan lain-lainnja.

Demikianlah program penerangan dalam Pembangunan Lima Tahun ini merupakan suatu program tidak sadja untuk meningkatkan kemampuan penerangan, melainkan djuga mengubah sistem penerangan sesuai dengan alam demokrasi Pantja-Sila.

KEADAAN DAN MASALAH-MASALAH

Sistem maupun keadaan penerangan diwaktu jang lampau bersifat penerangan jang indoktrinatif serta oratoris. Penerangan lebih bersifat slogan-slogan daripada pendjelasan tentang usaha-usaha konkrit dan manfaat bagi masjarakat pada umumnja. Ketjuali itu penerangan sangat terpimpin sehingga menumpulkan daja kreasi penerangan jang kreatif oleh masjarakat sendiri.

Kondisi para petugas penerangan Pemerintah baik mengenai keadaan mental, keahliannja serta dapat diterimanja oleh masjarakat masih memerlukan pembinaan-pembinaan. Pendidikan kader-kader penerangan dan upgrading para djuru penerang termasuk djuga tenaga jang berpendidikan dalam bidang grafika, film, radio, televisi dan lain-lain pada saat sekarang masih sangat terbatas.

Keadaan sarana-sarana fisik penerangan Pemerintah berupa media komunikasi massa masih sangat kurang dibandingkan dengan luas wilajah negara maupun penjebaran penduduknja. Lagi pula sudah banjak jang memerlukan rehabilitasi atau perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tehnologi. Alat-alat penerangan seperti radio, TV, pers dan unsur pembantu seperti mobil unit audio visual aids dan public adress system sangat diperlukan untuk penerangan langsung kepada rakjat.

Pada umumnja terdapat pula kekurangan-kekurangan mengenai bahan-bahan penerangan, seperti foto-foto, film dokumenter atau tjerita, barang-barang pameran dan lain-lain.

Dibidang penerangan luar negeri keadaannja djuga memerlukan perbaikan baik didalam peralatannja jang sudah tua dan tidak memadai maupun dalam tjara penerangan.

Demikian pula mengenai penerangan jang dilakukan oleh berbagai instansi Pemerintah memerlukan koordinasi jang lebih baik.

Diberbagai bidang sarana-sarana penerangan keadaannja menurun diwaktu-waktu achir ini. Misalnja sadja mengenai oplaag surat kabar dan madjalah, jaitu 2 djuta eksemplar seharinja sebelum tahun 1967 mendjadi hanja 900.000 eksemplar sehari sekarang ini. Pers Daerah pada umumnja masih sangat terbelakang serta pertumbuhannja tidak berkembang dibanding dengan Pers Djakarta karena ham-

batan-hambatan materiil jang menjolok. Kapasitas pertjetakan di Indonesia jang dilihat dari segi djumlahnja memenuhi kebutuhan, tetapi karena penjebarannja serta distribusi dari hasil jang tidak lantjar, maka keadaan pertjetakan didaerah-daerah adalah sangat kurang. Keadaan matrys sampai beberapa waktu jang lalu djuga sulit, sehingga banjak surat kabar daerah keluar dengan huruf-huruf jang rusak. Soal ini kini sudah diatasi dengan pengimporan matrys. Selain itu telah didirikan tambahan 2 unit pertjetakan di Djakarta dan Surabaja, dan 2 sedang didirikan di Makassar dan Medan.

Dibidang TV terdapat beberapa kemadjuan, namun sekarangpun sudah memerlukan beberapa perbaikan. Pada waktu ini terdapat dua studio TV, jaitu di Djakarta dan Jogjakarta, 6 buah station penerus siaran TV, dan 3 Transmitter Stations, untuk memungkinkan daerah sepandjang hubungan Djakarta — Jogja menerima siaran TV, jaitu di Nagrak, Gombel dan Tawangmangu. Ketjuali itu terdapat masalah jang perlu perhatian, jaitu bahwa beberapa daerah di Sumatera setjara langsung dapat menangkap siaran-siaran TV dari Malaysia dan Singapore. Tentang radio pada waktu ini terdapat satu studio Nasional, tiga studio Nusantara dan 38 studio local regional jang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia. Disamping ini terdapat beberapa studio radio amatir. Dengan selesainja pemantjar Nasional Tjimanggis (pada waktu ini 3 pemantjar a 110 kw dan 2 pemantjar a 5 kw) diharapkan siaran-siaran radio kita dapat ditangkap diseluruh pelosok Nusantara, djuga di Eropa, Asia dan Australia. Keadaan dunia perfilman lebih buruk lagi. Film dokumenter dan tjerita produksi dalam negeri jang diedarkan sedikit sekali. Pada tahun 1968 film dokumenter dan berita hanja tersedia 15 buah, sedangkan film tjerita ukuran 35 mm hanja 10 buah. Sekarang sudah mulai dirintis usaha untuk mulai mengembangkan produksi film nasional.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH

1. *Kebidjaksanaan dan Sasaran Penerangan.*

Kebidjaksanaan penerangan akan diarahkan untuk meningkatkan pengertian serta partisipasi setjara aktif masjarakat terhadap Rentjana Pembangunan Lima Tahun, sekaligus menanamkan kesadaran untuk membangun. Hal ini akan dilakukan dengan pendajagunaan serta meningkatkan sarana-sarana maupun tenaga-tenaga penerang Pemerintah serta mendorong dan menstimulir kegiatan-kegiatan penerangan masjarakat sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah

tersebut diatas oleh masjarakat sendiri. Stimulasi dan dorongan terhadap usaha dari djaringan-djaringan jang betul-betul efektif jang telah ada dalam masjarakat, penerangan jang mempunjai spesialisasi dalam pemberian penerangan-penerangan tertentu akan lebih meringankan beban Pemerintah didalam usaha penerangan. Ketjuali itu penerangan akan dapat lebih efektif dan menimbulkan apresiasi serta partisipasi dalam masjarakat.

Pemanfaatan daripada tokoh-tokoh dibidang keilmuan, dibidang kekaryaan, keagamaan dan kemasjarakatan lain dapat memberikan bantuan kepada program penerangan tersebut.

Pengarahan, stimulasi, dorongan terhadap penerangan jang diselenggarakan masjarakat sendiri akan dilakukan oleh Pemerintah dengan djalan antara lain penjediaan bahan-bahan, laporan, briefing, konperensi pers Pemerintah dan lain-lain tjara sehingga masjarakat mengetahui dan mengerti kebidjaksanaan Pemerintah (well-informed). Ketjuali itu akan diusahakan penjediaan fasilitas-fasilitas pendidikan, upgrading dan training dibidang tehnik-tehnik penerangan jang lebih madju misalnja dibidang djurnalistik, grafika, pemotretan. Dibangunkan Balai-balai Wartawan. Kepada mereka jang bergerak dibidang penerangan masjarakat ini diberikan kesempatan untuk mengundjungi projek-projek, mengikuti andjangsana pengechekan oleh pedjabat-pedjabat pemerintah sehingga dapat mendjelaskan tentang keadaan-keadaan "on the spot". Masalah-masalah pembangunan dapat di-seminar-kan dan kesimpulan-kesimpulannja disebar-luaskan sendiri. Misalnja mengenai modernisasi desa, penjebaran bibit unggul, pengumpulan dana-dana, urbanisasi dan lain-lain. Dan terachir akan terus dilaksanakan setjara kontinu dengan konsultasi, dialog dan bentuk kerdjasama-kerdjasama lain antara peralatan penerangan Pemerintah dengan peralatan penerangan masjarakat.

Dibidang penerangan jang dilakukan oleh Pemerintah sendiri akan diusahakan untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai usaha penerangan oleh badan-badan Pemerintah. Sehingga dengan demikian dapat ditingkatkan effisiensi maupun daja hasilnja.

Sistim penerangan akan lebih menekankan kepada penerangan langsung kepada rakjat, baik dilakukan melalui media komunikasi jang tersedia (seperti radio, televisi), dengan tjara lain seperti kundjungan andjangsana, forum seminar, kuliah subuh dan lain-lain. Demikian pula media komunikasi massa lainnja seperti pers, pemutaran film, rapat-rapat umum, penerbitan-penerbitan dan lain-lain akan dimanfaatkan sebanjak mungkin. Tjara penerangan jang bersifat visuil dan dalam bentuk penjampaian jang mudah, misalnja dalam

bahasa daerah akan ditingkatkan. Ketjuali itu akan diusahakan untuk lebih menggunakan tjara-tjara partisipasi daripada tjara-tjara indoktrinasi.

Kesemuanja itu membutuhkan suatu kemampuan djuru penerang jang berbeda daripada jang dipunjai dimasa jang lalu. Para djuru penerang perlu dilengkapi dengan kemampuan tehnis komunikasi jang baik, mental jang tjukup kuat untuk dapat memberikan pendjelasan jang dapat diterima oleh masjarakat. Pendidikan dan kursus untuk para djuru penerang ini akan dilakukan. Pendidikan formil akan dilakukan melalui Akademi Penerangan, P.P.S.D.P., P.P.S.D.A. Ketjuali itu akan diselenggarakan kursus-kursus upgrading dan aplikasi. Diharapkan dalam djangka waktu lima tahun seluruh tenaga penerangan dapat menerima pendidikan dan upgrading. Akan diutamakan kepada djuru penerang tingkat menengah. Demikian pula disektor masjarakat sendiri akan didorong untuk meningkatkan kemampuan tehnik komunikasi daripada tenaga penerangan sektor tersebut.

Mengenai sasaran-sasaran penerangan terutama akan ditudjukan kepada penerangan untuk suksesnja program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi dan politik, berhasilnja Rentjana Pembangunan Lima Tahun, terselenggaranja pemilihan umum setjara baik dan penggalangan kewaspadaan Nasional untuk mentjegah kembalinja G.-30.-S./PKI. Namun demikian dalam rangka sasaran-sasaran tersebut diberikan prioritas utama kepada usaha-usaha penerangan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi dan politik, terutama daerah Djawa — Tengah, Djawa — Timur, Kalimantan Barat dan Irian Barat. Demikian pula mengenai penerangan tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun akan ditekankan terutama kepada sektor-sektor jang memperoleh prioritas, seperti bidang pertanian, industri pertanian, pariwisata dan lain-lain. Untuk ini akan diusahakan alat-alat perlengkapan seperti mobil unit, mobil unit air dengan peralatan public adress system, projektor film 16 mm dan sistim tape recorder, alat-alat potret, cine camera, overhead projector dan lain-lain.

2. *Sarana-sarana Penerangan.*

Mengenai sarana-sarana penerangan dapat dikemukakan bahwa akan dibentuk satu *Pusat Publikasi Pemerintah*. Pusat Publikasi ini akan mengumpulkan dan menjediakan bahan-bahan publikasi pemerintah setjara menjeluruh. Demikian pula mengenai laporan kegiatan Pemerintah serta progress pembangunan setjara periodik.

Dibidang *pers* akan diusahakan untuk meningkatkan rasio antara pembatja dan surat kabar di Indonesia. Hal ini akan diatasi melalui proses meningkatkan oplaag surat kabar. Penjediaan kertas koran, perbaikan management dan lain-lain disesuaikan dengan program peningkatan oplaag tersebut. Didaerah-daerah dipersiapkan langkah-langkah untuk menerbitkan surat kabar, chususnja didaerah-daerah jang belum ada. Kebidjaksanaan diarahkan pula untuk mempertinggi mutu djurnalistik.

Dibidang *pertjetakan dan grafika* akan dilakukan rehabilitasi pertjetakan-pertjetakan terutama didaerah-daerah. Kapasitas pertjetakan dan zet pada penerbitan surat kabar dan madjalah akan ditingkatkan, terutama pada perusahaan-perusahaan jang tersebar diluar Djawa. Pembangunan pertjetakan Ex Djerman Timur akan diteruskan, jaitu di Makassar dan Medan. Demikian pula akan diusahakan pembangunan unit-unit pertjetakan baru didaerah di luar Djawa.

Mengenai *radio* akan diselesaikan pemantjar Nasional dan Internasional Tjimanggis (ditambah dengan 2 pemantjar Nasional dan 2 pemantjar Internasional). Dengan demikian dapat didjangkau seluruh wilajah Nusantara dan djuga luar negeri dengan penjiaran Radio Republik Indonesia setjara lebih baik. Studio Sukarnapura dan Bandjarmasin akan ditingkatkan mendjadi Studio Nusantara. Daerah-daerah distimulir untuk membangun studio-studio daerah dengan biaja daerah sendiri. Chususnja mengenai siaran-siarannja akan ditingkatkan baik mengenai nilainja maupun dapat diterimanja oleh masjarakat. Siaran-siaran dengan bahasa daerah dan penjadjian jang sederhana tetapi menarik akan dilakukan. Ketjuali itu akan dilakukan pembangunan monitoring centre dan mechanical workshop untuk pekerdjaan-pekerdjaan reparasi dibidang radio. Mengingat sebagian besar rakjat kita masih tinggal didaerah jang belum mendapat penerangan listrik, maka pemakaian radio transistor mendjadi penting.

Intensifikasi maupun ekstensifikasi pembangunan *T.V.* akan diadakan, disatu pihak dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas studio, menaikkan mutu siaran dan dilain pihak untuk memperluas daja pantjar siaran sehingga makin banjak jang dapat mengikuti siaran-siaran T.V. Chusus mengenai perluasan daja pantjar siaran ini akan dibangun beberapa Stasiun pemantjar baru dan link-stations dalam rangka transmisi siaran-siaran T.V. Tentang hal ini akan diadakan kerdjasama dengan P.N. Telekomunikasi sehingga dapat dilaksanakan dengan tjara jang effektip dan effisien. Demikian pula akan dibangun T.V.-T.V. umum ditempat-tempat jang terpentjil. Kemungkinan untuk pembangunan djaringan T.V. di Sumatera disiapkan.

Diduniа *perfilman* akan dimulai usaha untuk merintis pembangunan kembali produksi film nasional. Dalam rangka usaha penerangan akan disediakan kepada daerah-daerah film-film ukuran 16 mm baik dokumenter, penerangan, berita maupun hiburan. Untuk ini dapat digunakan mobil-mobil unit dan unit-unit projector 16 mm. Guna penjediaannja tersebut, perlu ditingkatkan pembuatan film-film 16 mm.

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun
(1969/70 — 1973/74)

PENERANGAN

(dalam djutaan rupiah)

Bidang/Sektor/ Sub-sektor/Program	*Anggaran Pembangunan Negara*	
	1969/70	*1969/70 — 1973/74*
Bidang Sosial		
Sektor Penerangan	*840* x)	*5.147*
1. *Sub-sektor Penerangan*	*840* x)	*5.147*
a. Program Peningkatan Penerangan Rakjat	81	708
b. Program Pengembangan Alat-alat mass-media	509	4.439
Kegiatan-kegiatan Penerangan jang pembiajaannja diperhitungkan dalam Sektor-sektor lain :		
a. Pendidikan Tenaga-tenaga Penerangan (termasuk Sektor Pendidikan dan Kebudajaan, Sub-sektor Pendidikan dan Penelitian Institusionil)	46	375
b. Research Penerangan (termasuk Sektor Pendidikan dan Kebudajaan, Sub-sektor Pendidikan dan Penelitian Institusionil)	5	45
c. Penjempurnaan Prasarana Fisik (termasuk Sektor Pemerintahan Umum, Sub-sektor Pemerintahan Umum)	116	654

x) Termasuk Rp. 250.000.000,— bantuan projek/bantuan tehnis untuk Sektor Penerangan.

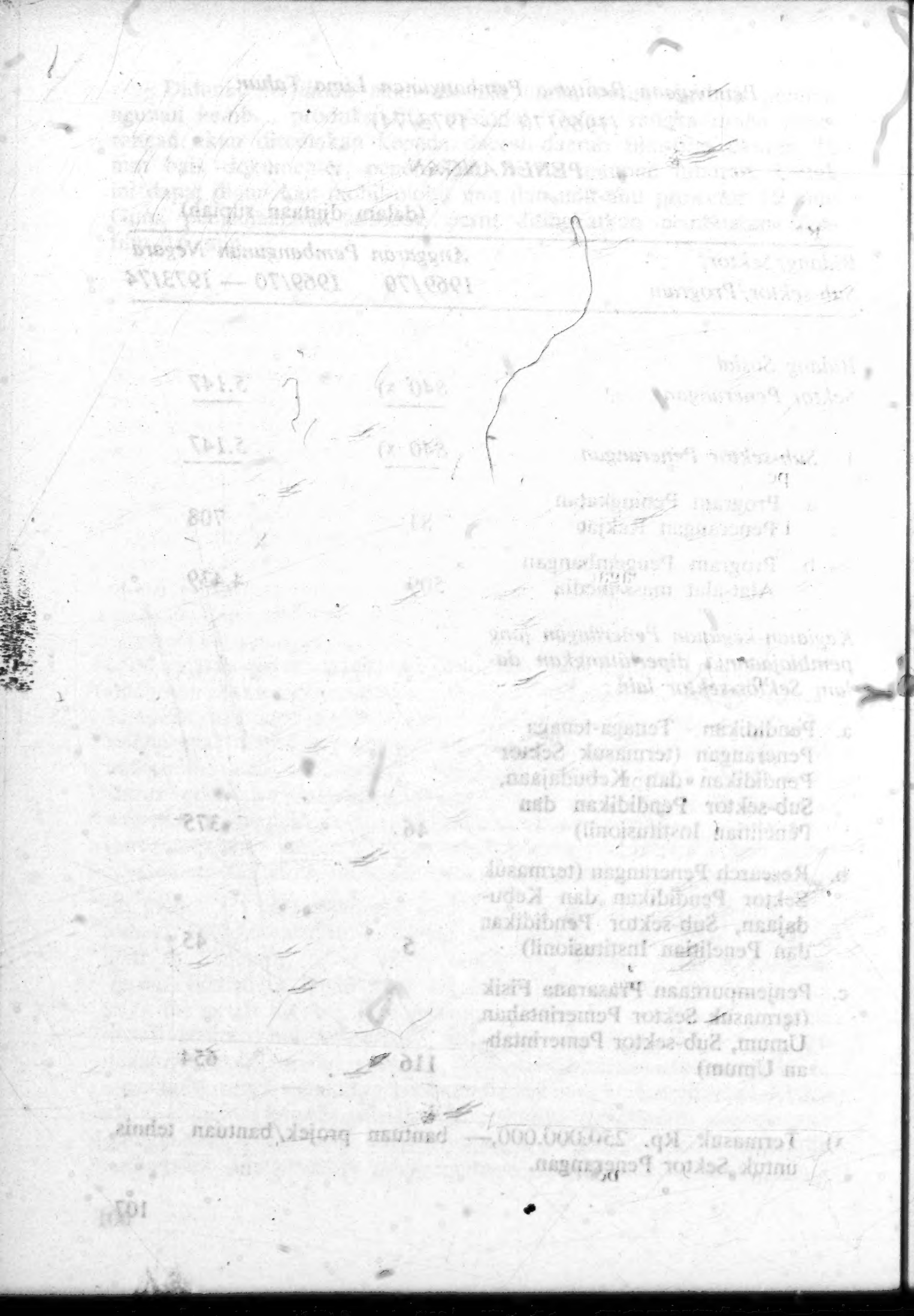

BAB XIV

TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

BAB XII

TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

BAB XIV

TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

A. TRANSMIGRASI

PERMASALAHAN

Masalah transmigrasi pada hakekatnja dapat dilihat dari dua sudut penglihatan. Pertama dari sudut penglihatan masalah penjebaran penduduk dan kedua dari sudut penglihatan pemenuhan kebutuhan tenaga kerdja untuk pembangunan.

Dipandang dari segi masalah penjebaran penduduk maka tudjuan transmigrasi adalah untuk mentjapai penjebaran penduduk jang lebih seimbang dan lebih merata diseluruh wilajah Indonesia. Pandangan ini membawa konsekwensi bahwa bagian jang tidak ketjil dari penduduk Djawa harus dapat dipindahkan kepulau-pulau lain jang dewasa ini kekurangan penduduk.

Dipandang dari sudut penglihatan kebutuhan tenaga kerdja maka transmigrasi adalah pemindahan tenaga kerdja untuk melaksanakan pembangunan berbagai projek-projek didaerah-daerah jang kekurangan tenaga kerdja. Tudjuan utama bukanlah untuk mentjapai penjebaran penduduk jang lebih seimbang dan lebih merata, melainkan untuk melaksanakan pembangunan projek-projek jang dipandang perlu untuk peningkatan produksi Nasional.

Pada dasarnja kedua sudut penglihatan tersebut tidak terpisah satu sama lainnja. Dalam taraf Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang pertama ini maka transmigrasi harus dikaitkan dengan pembangunan projek-projek. Djumlah tenaga kerdja jang dibutuhkan dan dengan demikian djumlah biaja jang diperlukan tergantung daripada djumlah tenaga kerdja jang diperlukan untuk pembangunan projek-projek jang memerlukan tenaga kerdja tersebut. Adapun pembangunan projek-projek tersebut bukanlah pertama-tama untuk menampung tenaga kerdja jang dipindahkan dari daerah lain melainkan untuk melaksanakan pembangunan guna peningkatan produksi Nasional. Dibangunnja projek-projek tersebut didaerah-daerah jang kebetulan kekurangan tenaga kerdja bukanlah pertama-tama untuk memindahkan tenaga kerdja melainkan karena tudjuan jang hendak ditjapai, jaitu peningkatan produksi Nasional dapat terwudjud sebaik-baiknja dengan pembangunan didaerah-daerah tersebut.

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH

Dalam rangka pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun transmigrasi dikaitkan dengan usaha-usaha serta kegiatan pembangunan dan tidak berdiri sendiri. Dengan demikian usaha transmi-

grasi adalah untuk menundjang kegiatan pembangunan didaerah-daerah dan projek-projek jang memerlukan tenaga kerdja.

Dengan pendekatan kegiatan transmigrasi dari sudut pengaitan dengan usaha serta kegiatan pembangunan jang setjara integral, maka kwantitas dan kwalitas transmigran akan sangat ditentukan oleh kebutuhan usaha pembangunan diberbagai daerah tersebut. Berbagai kegiatan pembangunan-pembangunan jang memerlukan tenaga kerdja antara lain adalah untuk peningkatan produksi pangan dengan pembukaan tanah baru jang terutama akan berbentuk pembukaan persawahan pasang-surut di Kalimantan dan Sumatera. Untuk peningkatan produksi dan ekspor kaju serta hasil hutan lainnja dimana akan dibangun projek-projek kehutanan diberbagai daerah diluar Djawa, diperlukan tenaga kerdja transmigran baik jang sudah skilled maupun jang masih memerlukan latihan ketrampilan chusus dibidang produksi hutan. Selandjutnja untuk peningkatan produksi dan ekspor, dimana diperlukan rehabilitasi dan pembangunan prasarana diberbagai pulau diluar Djawa, diantaranja up-grading djalan, rehabilitasi pelabuhan, rehabilitasi lapangan terbang, pemasangan transmissi listrik dan lain sebagainja, diperlukan tenaga kerdja jang tidak sedikit djumlahnja dan jang harus dipindahkan dari daerah jang berkelebihan tenaga kerdja. Demikian pula pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan memerlukan banjak sekali tenaga kerdja. Dengan sendirinja tenaga kerdja jang diperlukan untuk masing-masing bidang adalah berbeda-beda pensjaratannja. Bahkan untuk masing-masing projek diperlukan tenaga kerdja jang berbeda pula ketjakapannja. Oleh karena itu maka pengiriman transmigran untuk melaksanakan pembangunan dibidang-bidang serta projek-projek tersebut sudah seharusnja disesuaikan dengan kebutuhan bidang-bidang serta projek-projek tersebut.

Dalam hubungan ini maka didaerah-daerah jang djumlah tenaga kerdjanja relatif banjak diadakan persiapan-persiapan agar supaja transmigran-transmigran jang akan membantu pembangunan projek-projek didaerah lain tersebut benar-benar memenuhi pensjaratan jang diminta. Untuk ini diperlukan latihan ketrampilan jang akan mendjamin peningkatan produktivitas mereka ditempat pekerdjaannja jang baru. Dengan demikian usaha transmigrasi benar-benar merupakan suatu kegiatan jang langsung menundjang pelaksanaan pembangunan jang telah direntjanakan diberbagai bidang.

Landasan baru dalam bidang transmigrasi ini akan terus dikembangkan berdasarkan pengalaman jang lampau serta kemungkinan jang

akan datang. Sebagai akibat daripada luasnja persiapan-persiapan dan kegiatan-kegiatan transmigrasi ini maka pembinaan operasionil akan menjangkut kegiatan berbagai instansi dan masjarakat. Untuk ini diperlukan persiapan-persiapan dan tjara kerdja jang serasi. Dengan demikian transmigrasi memegang peranan jang sangat penting sebagai unsur penundjang pembangunan projek-projek jang telah diprioritaskan dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

B. KOPERASI

PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi rakjat jang berwatak sosial dan chususnja bagi golongan rakjat jang potensi ekonominja masih sangat lemah, dapat merupakan suatu alat untuk melindungi para anggotanja dari tekanan dan penghisapan oleh kekuatan-kekuatan dari luar serta untuk menaikkan pendapatan anggota-anggotanja setjara adil dan merata.

Untuk lebih memungkinkan Koperasi mendjalankan fungsi-fungsi tersebut diatas, maka usaha-usaha jang telah dimulai untuk mengembalikan Koperasi kepada landasannja jang murni akan dilandjutkan dan ditingkatkan. Usaha-usaha tersebut berpokok pangkal kepada hal-hal sebagai berikut :

(a) mengembalikan hak tertinggi didalam Koperasi kepada rapat anggota sesuai dengan azas demokrasi ;

(b) menghilangkan pengaruh-pengaruh langsung atau tidak langsung jang mempolitikkan Koperasi; dan

(c) mengembalikan kondisi Koperasi kepada azas dan sendi-sendi dasarnja jang sebenarnja, baik sebagai suatu lembaga ekonomi dan suatu perusahaan maupun sebagai usaha lembaga sosial.

Menurut pasal 37 Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, maka peranan Pemerintah didalam pembinaan Koperasi tersebut adalah memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap Koperasi serta memampukannja untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar hukum bagi pembinaan Koperasi adalah :

(a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ajat (1) beserta pendjelasannja ;

(b) Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII tahun 1966; dan

(c) Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

KEADAAN DAN MASALAH

Didalam usaha melandjutkan pembinaan perkoperasian dihadapi masalah-masalah sebagai berikut :

(a) kekurangan tenaga untuk melakukan tugas bimbingan dan pengawasan, baik dalam segi kwalitas maupun kwantitas ;

(b) masih adanja kekurangan pengertian dikalangan masjarakat serta unsur-unsur Pemerintah tentang tempat Koperasi didalam struktur ekonomi nasional ;
(c) masih kurangnja keinsafan anggota Koperasi mengenai peranan Koperasi sebagai alat untuk memperdjuangkan perbaikan hidupnja ;
(d) masih adanja berbagai kelemahan, seperti kurangnja pendidikan dan pengetahuan para anggota Koperasi, kelemahan management serta lemahnja permodalan ; dan
(e) sebahagian besar potensi masjarakat, chususnja kaum tani dan nelajan, belum seluruhnja menggabungkan diri didalam suatu wadah organisasi Koperasi.

Dewasa ini, setelah diadakan penjesuaian dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, diperkirakan bahwa jang dapat memenuhi sjarat sebagai Koperasi hanja akan berdjumlah lebih kurang 15.000 perkumpulan. Djadi Koperasi jang memiliki hak untuk meneruskan kelangsungan hidupnja hanja berkisar antara 20 — 25 persen dari keadaan Koperasi tahun 1967.

Persentasi kenaikan djumlah Koperasi rata-rata tiap tahun selama lima tahun terachir ini ialah 10 persen. Dalam keadaan jang sama maka dapat diperkirakan bahwa dalam waktu lima tahun mendatang perkembangan Koperasi setiap tahunnja akan berkisar disekitar 10 persen djuga. Akan tetapi, dengan meningkatnja pertambahan penduduk dan kegiatan untuk merehabilitasi Koperasi jang terkena saringan tersebut diatas, maka sangat mungkin perkembangan Koperasi akan mendjadi lebih besar dari 10 persen setahun.

Pada tahun 1967 keadaan Koperasi menurut djenisnja adalah seperti tertjantum dalam Tabel XIV-B-1.

Tabel XIV — B — 1.

Keadaan Koperasi Menurut Djenisnja, 1967

Djenis Koperasi	*Djumlah*	*Anggota*
Simpan-pindjam	11.096	1.510.951
Pelajanan	2.540	355.613
Pertanian	12.387	1.157.351
Peternakan	315	21.519
Keradjinan dan Industri	2.934	243.220
Konsumsi	14.400	3.436.614
Serba Usaha	19.324	5.351.791
	64.096	12.197.346

KEBIDJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH

Sebagai kelandjutan usaha pembinaan perkoperasian maka koperasi jang memiliki prospek-prospek untuk kelangsungan hidupnja akan dibina, dibimbing dan dilindungi. Untuk ini diadakan berbagai matjam kegiatan, seperti kursus penjuluhan dan pemberian fasilitas-fasilitas tertentu jang diperlukan untuk berkembangnja koperasi.

Dalam tahap pertama kegiatan-kegiatan tersebut diatas diarahkan kepada program-program jang diprioritaskan didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun, chususnja disektor pertanian, dan terutama dititik-beratkan kepada pendidikan dan penjuluhan, pengembangan organisasi dan pengawasan, bimbingan dan usaha dalam bidang perkoperasian, serta pemberian fasilitas-fasilitas kredit, perpadjakan dan usaha.

Diharapkan bahwa djumlah koperasi berkembang dari tahun ketahun seperti tertjantum dalam Tabel XIV-B-2.

Tabel XIV - B - 2

Perkembangan Koperasi 1969 — 1973

Tahun	*Koperasi*	*Anggota*
1969	15.000	2.250.000
1970	16.000	2.500.000
1971	18.000	2.750.000
1972	20.000	3.000.000
1973	22.000	3.400.000

1. *Pendidikan, Penjuluhan dan Penelitian*

Tudjuan pendidikan, penjuluhan dan penelitian perkoperasian adalah :

(a) menanam dan menjebar-luaskan kesadaran berkoperasi kepada masjarakat dari segala lapisan dan golongan ;

(b) meningkatkan pengetahuan masjarakat tentang perkoperasian ;

(c) meningkatkan ketrampilan berkoperasi para anggota dan karyawan koperasi ;

(d) membentuk dan membina kader-kader koperasi ;

(e) memperoleh gambaran daripada perkoperasian di Indonesia setjara djelas dan jang setjara ilmiah dapat dipertanggung-djawabkan.

Karena hambatan-hambatan sosial, ekonomi dan psychologis jang ada dalam masjarakat, maka Pemerintah berusaha mempertjepat proses pertumbuhan koperasi dengan djalan pembinaan, bimbingan,

pengawasan pendidikan, penjuluhan, dan penerangan. Sampai sekarang masih dirasakan kurangnja kader-kader koperasi, baik kwantitatif maupun kwalitatif. Demikian pula pembentukan dan pembinaan kader masih dirasakan kurang effektif. Selain itu tenaga-tenaga pembimbing, pembina dan pengawas dilingkungan instansi pemerintah, chususnja instansi jang membina gerakan koperasi, kurang mampu melaksanakan tugas mereka karena belum effektif upgrading, training, dan kursus in-service.

Karena pembentukan kader koperasi jang telah dilakukan belum dapat mengimbangi perkembangan gerakan koperasi, maka sistim pembentukan kader akan dirobah, antara lain dengan mendjadikan Sekolah Koperasi Menengah Atas (SKOPMA) mendjadi SMEA Koperasi dan Akademi Koperasi merupakan in-service-training bagi pegawai Direktorat Djenderal Koperasi.

2. *Pengembangan Organisasi dan Pengawasan Perkoperasian*

Untuk ini diambil langkah-langkah sebagai berikut :

(a) Memberikan pengesahan Badan Hukum kepada perkumpulan-perkumpulan Koperasi (pendaftaran) jang sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;
(b) Membina pengorganisasian Koperasi dan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN), berdasarkan sikap Tut Wuri Handajani;
(c) Mengadakan konsolidasi dan rasionalisasi diantara Koperasi-koperasi, guna mentjapai mentalitas, organisasi dan usaha jang sehat;
(d) Mengusahakan pendidikan dalam management, pembukuan dan pengawasan perkoperasian ;
(e) Melakukan pengawasan atas pembukuan perkoperasian jang bersifat edukatif dan membimbing ; dan
(f) Mengumpulkan perangkaan statistik jang lebih lengkap mengenai Koperasi dan Perkoperasian seluruh Indonesia.

3. *Bimbingan Usaha Koperasi*

Untuk ini ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

(a) Mengusahakan pembinaan kader-kader jang tjakap, jang setiap saat dapat menjediakan tenaga mereka guna kepentingan koperasi ;
(b) Mengusahakan fasilitas-fasilitas perpadjakan dan perkreditan bagi koperasi serta kebebasan mendjalankan usaha-usaha dibidang produksi dan djasa-djasa ;
(c) Berusaha mentjiptakan iklim jang menguntungkan bagi gerakan koperasi ;
(d) Membentuk sebuah Lembaga Djaminan Kredit bagi koperasi.

BAB XV

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

BAB XV

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

BAB XV

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL (HANKAMNAS)

U M U M.

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas) tidak dapat dipisahkan daripada Pembangunan Nasional dalam keseluruhannja. Pada satu pihak Pembangunan Nasional diarahkan pada tertjapainja peningkatan kesedjahteraan bangsa, pada pihak lain tingkat kesedjahteraan bangsa itu wadjib diamankan terhadap segala bentuk antjaman jang dapat mengganggu, bahkan dapat menghantjurkannja dalam bentuk satu perang terbuka. Oleh sebab itu perlu adanja kekuatan jang pada satu pihak mempunjai pengaruh pentjegahan terhadap mereka-mereka jang hendak mengantjam kelangsungan hidup bangsa, pada pihak lain mampu menggagalkan antjaman tersebut dengan kekuatan sendjata. Kekuatan inti daripada Pertahanan dan Keamanan Nasional adalah Angkatan Bersendjata, oleh sebab itu meskipun unsur-unsur daripada kekuatan Hankamnas adalah beraneka-ragam tjoraknja, namun unsur Angkatan Bersendjata-lah jang memegang peranan terpenting jang perlu dibangun dan dikembangkan dalam rangka perlindungan dan pengamanan bangsa dan negara terhadap segala antjaman, dalam segala bentuk dan manifestasinja.

HANKAMNAS :

1. Politik Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Pada dasarnja Politik Pertahanan dan Keamanan Nasional kita (Hankamnas) diarahkan pada sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

a. Kedalam, mentjiptakan suasana dan keadaan aman, tenteram, tertib dan dinamis, jang merupakan landasan dan iklim bagi tiap usaha dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

b. Keluar, ikut-serta mendjamin adanja perdamaian dunia, dan mewudjudkan kestabilan di Wilajah Asia Tenggara.

c. Siap menghadapi segala kemungkinan antjaman dalam segala bentuk dan manifestasinja baik dari luar maupun dari dalam, jang dapat menghambat, mengganggu serta dapat membahajakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional diarahkan kepada pembentukan, pengembangan serta penggunaan kekuatan-kekuatan

dan unsur-unsur Hankam untuk mendjamin tertjapainja dan terwudjudnja Politik Pertahanan dan Keamanan Nasional.

3. Fungsi-fungsi Pertahanan dan Keamanan Nasional.

a. Membentuk suatu kekuatan Hankamnas jang berintikan potensi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, disamping potensi-potensi jang lain.

b. Memelihara dan mempertinggi Ketahanan Nasional disegala bidang, baik dalam bidang mental-ideologi, politik, sosial, budaja maupun militer.

c. Memelihara serta mempertinggi kewaspadaan serta kesiapsiagaan nasional.

d. Mengembangkan integrasi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dengan Rakjat, integrasi intern Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, serta integrasi intern Angkatan-angkatan.

KE-KARYA-AN ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA :

Sebagai akibat daripada perdjoangan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam rangka perdjoangan bangsa untuk menegakkan kemerdekaan dan nilai-nilai kehidupan, maka Angkatan Bersendjata Republik Indonesia memperoleh kedudukan dan peranan sebagai Golongan Karya jang berwenang untuk bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnja menentukan haluan perdjoangan Bangsa.

Tugas pokok kekaryaan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam masa pembangunan adalah setjara aktif ikut-serta dalam segala usaha, daja-upaja dan kegiatan Negara dan Bangsa dalam bidang pembangunan, sesuai dengan kemampuan jang ada pada Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

PENILAIAN KEADAAN :

Keadaan Ekonomi-Keuangan Negara pada dewasa ini mendjadi faktor pembatas utama bagi pengembangan kekuatan-kekuatan Hankamnas, sampai pada tahun 1973/74 baru mampu untuk mendukung usaha-usaha pembangunan bagi kepentingan kesedjahteraan Bangsa, sedangkan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan hanja dapat disediakan dana-dana jang sangat terbatas.

Namun demikian perlu adanja kemampuan untuk dapat melindungi dan mengamankan usaha-usaha pembangunan terhadap antjam-

an-antjaman jang hendak menggagalkan usaha pembangunan Bangsa.

Kemungkinan adanja antjaman bahaja jang berbentuk serangan terbuka terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, dalam djangka waktu dekat jang akan datang ini adalah sangat ketjil kemungkinannja.

Antjaman bahaja jang dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan akan berbentuk tindakan spionase, sabotase, infiltrasi, subversi dan pemberontakan-pemberontakan, baik jang bersumber pada kekuatan-kekuatan asing maupun jang berasal dari kekuatan-kekuatan dalam negeri sendiri.

Oleh sebab itu setjara optimal kekuatan-kekuatan Hankamnas harus mampu menghadapi segala antjaman tersebut diatas dan dapat meniadakan efek-efek negatif daripadanja, tanpa melupakan persiapan-persiapan jang diperlukan untuk dapat dan mampu menghadapi kemungkinan serangan jang bersifat terbuka.

Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sebagai kekuatan inti HANKAMNAS memerlukan waktu untuk mengadakan konsolidasi dan stabilisasi kedalam, sebagai akibat daripada pelaksanaan tugas dalam rangka TRIKORA dan DWIKORA serta penjelesaian Keamanan dan Ketertiban dalam negeri. Konsolidasi dan stabilisasi ini merupakan landasan bagi pengembangan kekuatan lebih landjut. Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sebagai Kekuatan Sosial-Golongan Karya, sesuai dengan kondisi dan situasi dewasa ini baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaja, wadjib mengadakan penindjauan setjara menjeluruh tentang pelaksanaan peranan dan fungsinja sebagai Golongan Karya tersebut, agar lebih dapat bermanfaat bagi usaha pembangunan Bangsa disegala bidang.

POKOK-POKOK KEBIDJAKSANAAN :

Realisasi pembangunan sektor Hankam sangat dibatasi oleh keadaan Ekonomi-Keuangan Negara dewasa ini, oleh sebab itu Pembangunan Hankam disesuaikan dengan kondisi dan situasi tersebut. Dalam babakan Pembangunan Lima Tahun jang akan datang ini, aksentuasi pembangunan Hankam akan diletakan kepada :

1. Hal-hal jang bersifat konsepsionil.
   a. Penjelesaian Undang-undang Pokok Pertahanan dan Keamanan Nasional, beserta Undang-undang lainnja jang diperlukan.
   b. Penjelesaian lebih landjut daripada Konsep Strategi Nasional kita.
   c. Penentuan dan penetapan Rentjana Kekuatan didarat, laut,

udara dan kepolisian, serta komposisi masing-masing Angkatan.

d. Pengembangan Sistim Sendjata baik sosial maupun tehnologi, Industri Militer serta wewenang pembinaannja.
e. Penetapan sistim Komando dan Pengendalian.
f. Penetapan sistim Administrasi, Logistik, Personil dan Pendidikan.
g. Penetapan sistim Pemeliharaan Daja Tahan.
h. Penentuan tingkat-tingkat kesiap-siagaan pada suatu taraf waktu tertentu, chususnja dalam djangka waktu Realisasi Pembangunan Lima Tahun (Rentjana Pembangunan Lima Tahun).
i. Penetapan program Konsolidasi — Stabilisasi.

Landasan-landasan jang bersifat konsepsionil tersebut diatas diperlukan bagi penentuan arah pembangunan Hankam selandjutnja.

2. Dalam rangka konsolidasi-stabilisasi kekuatan-kekuatan Hankam, serta dalam rangka mendjamin keamanan usaha-usaha pembangunan Bangsa, djuga dalam rangka Konsepsi Strategi Nasional kita, diadakan RE-GROUPING Kekuatan. Penggantian-penggantian (Replacement) baik personil maupun materiil setjara selektif, dan peningkatan mutu Pradjurit pada umumnja.
3. Dalam rangka Kekaryaan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia diadakan penindjauan setjara menjeluruh terhadap segala persoalan jang bersangkutan dengan fungsi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sebagai Kekuatan Sosial.
4. Meletakkan kembali pengertian dan pelaksanaan CIVIC-ACTION dalam rangka CIVIC-MISSION Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam proporsi jang sebenarnja.
5. Usaha-usaha pembangunan disektor-sektor lain jang dilakukan oleh Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dibatasi pada bidang-bidang jang belum atau belum tjukup mampu dikerdjakan oleh potensi sipil.

LANGKAH-LANGKAH :

1969/70 1. Penjelesaian Rentjana-rentjana jang bersifat Konsep-
1970/71 sionil.
2. Realisasi tingkat kesiap-siagaan jang telah ditentukan.
3. Realisasi konsolidasi-stabilisasi Kekuatan.
1971/72 1. Realisasi tingkat kesiap-siagaan jang telah ditentukan.
1972/73
1973/74 2. Realisasi Rentjana-rentjana jang bersifat Konsepsionil.

3. Realisasi alih-tugas Pradjurit setjara bertahap, dikaitkan dengan usaha-usaha pembangunan pada sektor-sektor jang lain.
4. Siap menghadapi Realisasi Pembangunan Hankam dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang ke-II.
5. Melandjutkan realisasi konsolidasi-stabilisasi kekuatan.

1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75
Realisasi Pembangunan Lima Tahun <——————————————> sekaligus adalah Realisasi Pembangunan Infra-Struktur Hankam					
Penjelesaian hal-hal <——————> 1. Legalistis/konsepsionil. 2. Realisasi konsolidasi dan stabilisasi kekuatan.			Realisasi Rentjana-Rentjana <——————> 1. Struktur kekuatan serta sistim komando dan pengendaliannja. 2. Sistim Logistik serta Pembinaan Sistim Sendjata-Tehnologi. 3. Replacement Personil — Materiil (selektif-terbatas) 4. Realisasi Alih-Tugas Pradjurit. 5. Re-structuring Kekaryaan ABRI. 6. Penertiban Civic Actions. 7. Realisasi Integrasi ABRI setjara fundamentil-konsepsionil. 8. Realisasi Kekaryaan ABRI setjara fundamentil-konsepsionil. <——————> Persiapan menghadapi pembangunan Hankam selandjutnja.		RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KE-II

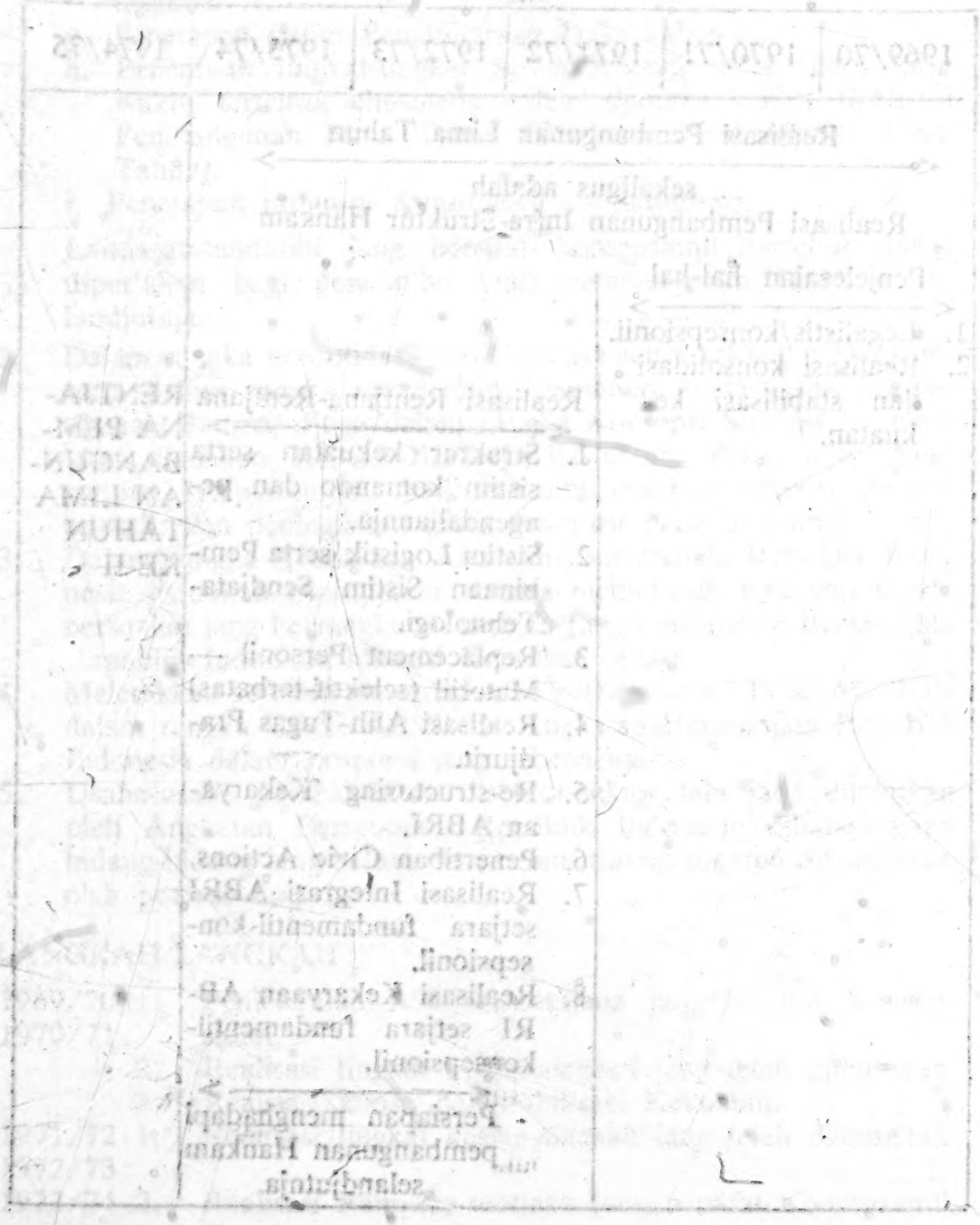

BAB XVI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK

BAB XVI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK

B A B XVI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK

A. R E S E A R C H

KEADAAN PADA WAKTU SEKARANG

Sudah merupakan kenjataan dewasa ini bahwa penggunaan jang tepat dan luas daripada ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam rangka pembangunan negara dapat mempertjepat usaha-usaha untuk meningkatkan kemakmuran rakjat.

Maka dirasakan perlu pengembangan dan peningkatan daripada sumber-sumber daja ilmiah (scientific resources) guna dimanfaatkan bagi keperluan pembangunan negara.

Disamping itu lebih-lebih bagi negara jang sedang berkembang maka penggunaan setjara luas dari ilmu pengetahuan dan tehnologi jang sudah ada sebagai hasil Research diluar negeri adalah djalan jang paling tjepat kearah kemadjuan masjarakat. Penilaian mengenai keadaan ilmu pengetahuan dan tehnologi dewasa ini dapat didasarkan atas : 1) keadaan prasarana ilmiah dan 2) penilaian kwalitatip.

Adapun penilaian daripada prasarana ilmiah didasarkan atas besarnja djumlah tenaga-tenaga ilmiah dan tehnologi, terutama tenaga-tenaga jang bekerdja dalam bidang research, djumlah lembaga-lembaga/badan ilmiah dan research jang melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah beserta keadaan fisiknja, jaitu keadaan alat-alat ilmiah, bahan-bahan ilmiah dan kepustakaannja, dan besarnja biaja jang disediakan dan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Penilaian kwalitatip didasarkan atas penilaian-penilaian jang berhubungan dengan hasil-hasil ilmiah (misalnja: nilai ilmiah daripada hasil tersebut) disamping djumlahnja karangan-karangan ilmiah jang dihasilkan. Disamping itu tingkat ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam suatu negara diukur pula dari ketjepatan penggunaan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam praktek.

Pengumpulan dan penilaian data-data kwantitatip masih belum sempurna. Untuk masa jang akan datang pengumpulan data harus dilakukan setjara teratur, dan terutama methode penilaian harus lebih disempurnakan. Apa jang akan disadjikan ini didasarkan atas data-data jang telah dapat dikumpulkan selama ini. Perlu dikemukakan bahwa banjak lembaga-lembaga/badan-badan ilmiah dan research

masih belum merasakan faedahnja akan pengumpulan data-data kwantitatip ini.

ORGANISASI ILMIAH INDONESIA :

Kegiatan research dinegara kita dilakukan :

i. lembaga-lembaga research dalam lingkungan Departemen-departemen.

ii. universitas-universitas.

iii. lembaga-lembaga research diluar lingkungan Departemen atau lembaga-lembaga non-Departemen.

a. Research jang dilakukan dilembaga-lembaga research dalam lingkungan Departemen-departemen terutama ditudjukan pada usaha memetjahkan persoalan teknis dan membantu dalam pengarahan pelaksanaan tugas Departemen bersangkutan. Dengan demikian research jang dilakukan lebih disesuaikan dengan tugas Departemen masing-masing, dengan perkataan lain lebih bersifat "mission-oriented". Dalam beberapa lembaga dilakukan pula pekerdjaan "testing" dan "control".

b. Dalam lingkungan universitas dilakukan research dasar (basic research) dan research terapan (applied research) jang erat hubungannja dengan fungsi pendidikan tenaga-tenaga ilmiah. Disamping itu, dalam memenuhi tridarma universitas diarahkan pula pada usaha memetjahkan problema dan usaha memenuhi kebutuhan masjarakat. Kalangan universitas sendiri mengadakan pembagian dalam 3 kategori, jaitu Universitas Pembina, Universitas Madya dan Universitas Muda. Menurut pembagian ini maka research terutama dilakukan di Universitas Pembina.

c. Dalam kategori ini termasuk lembaga-lembaga research dalam lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Tenaga Atom Nasional. Disamping itu terdapat Lembaga Administrasi Negara jang djuga melakukan kegiatan ilmiah dan Biro Pusat Statistik jang memegang peranan penting dalam perstatistikan dinegara kita. Research jang dilakukan oleh badan-badan ini tidak terbatas pada kepentingan satu Departemen, melainkan menindjau persoalan-persoalan jang diselidikinja itu setjara lebih luas.

d. *Tenaga Ilmiah dan Teknisi*

Setjara kwantitatip maka djumlah lulusan universitas negeri me-

rupakan djumlah jang tjukup banjak. Laporan Team Statistik Perguruan Tinggi 1967 menundjukkan bahwa lulusan sardjana dari 24 Universitas Negeri (dari 40 Universitas Negeri) sedjak tahun 1950 sampai tahun 1967 adalah : 21.832, jang terdiri dari :

Bidang Eksakta	:	11.050
Bidang Non-Eksakta	:	9.345
Bidang Keguruan	:	1.437
Djumlah	:	21.832

Universitas merupakan sumber utama daripada "tenaga ilmiah tingkat tinggi" (high level scientific manpower) jang bekerdja dalam bidang research. Tetapi untuk mendjadi seorang tenaga research jang baik memerlukan waktu jang lama, sehingga bidang research merupakan bidang jang mengalami kekurangan tenaga. Dari survey serta data-data lain jang dikemukakan dalam berbagai laporan mengenai bidang research, dapat dikemukakan beberapa hal :

i. djumlah tenaga research dan teknisi dalam beberapa lembaga research adalah *minimal tjukup,* apabila djumlah ini dihubungkan dengan kegiatan research jang dewasa ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut (walaupun masih harus ditentukan pengukuran-pengukuran lain).

ii. terdapat kekurangan tenaga research dan teknisi, apabila lembaga-lembaga bersangkutan ingin memenuhi fungsinja sebagai suatu lembaga research.

iii. sangat diperlukannja tenaga-tenaga research jang berpengalaman, jaitu tenaga-tenaga dari siapa dapat diharapkan untuk memberikan bimbingan dalam menjelenggarakan research.

iv. sangat dirasakan kebutuhan akan tenaga-tenaga jang mempunjai keahlian chusus, seperti misalnja ahli dokumentasi ilmiah (documentalist).

Selandjutnja terdapat beberapa faktor jang merupakan sebab bahwa bidang research masih mengalami kekurangan tenaga, jaitu :

i. keadaan ekonomi, sehingga seorang tenaga research tidak dapat semua perhatiannja kepada research.

ii. belum adanja penghargaan jang lajak bagi para tenaga research sehingga research belum dapat dianggap sebagai suatu bidang kerdja dimana seorang dapat membuat karier.

iii. kebutuhan akan tenaga-tenaga jang baik disektor-sektor pemerintah dan sektor lainnja, jang merupakan "drain" dari bidang research dan kegiatan ilmiah lainnja.

Dari 20 lembaga research jang mengembalikan questionare dikemukakan akan adanja kekurangan tenaga research sebesar 645 orang, dengan perintjian sebagai berikut :

Kedokteran 12, ilmu Pengetahuan Alam 86, Tehnik 433, Pertanian 13, Ilmu Sosial 6, tanpa spesifikasi 97.

KEPUSTAKAAN ILMIAH.

Kepustakaan ilmiah jaitu buku-buku dan madjalah-madjalah ilmiah maupun micro-film-fiche merupakan salah satu sumber pengetahuan jang penting untuk melakukan research jang bermutu. Tetapi sedjak tahun 1958, jaitu dengan adanja perbatasan jang semakin keras terhadap penggunaan devisa, maka pembelian bahan literatur ilmiah dari luar negeri sangat terbatas.

Dengan adanja bantuan dari berbagai badan asing (nasional maupun internasional) kesukaran untuk mendapat buku-buku ilmiah dari negara untuk sebagian ketjil dapat diatasi.

Tetapi, langganan madjalah-madjalah ilmiah luar negeri tetap merupakan persoalan jang gawat. Disamping itu berkurangnja penerbitan madjalah-madjalah ilmiah di Indonesia sendiri, karena berbagai sebab (lihat bawah), tidak memungkinkan adanja program pertukaran madjalah jang effektif. Keadaan ini djelas merupakan suatu hambatan terhadap adanja "flow" daripada hasil terbaru dalam bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi dari luar negeri. Tidak adanja pengetahuan jang "up to date" mengenai kemadjuan ilmu pengetahuan dan tehnologi menjebabkan kemungkinan adanja duplikasi daripada usaha research, jaitu mengulangi hal-hal jang sudah dilakukan atau diketahui hasilnja. Ini berarti suatu pemborosan tenaga, biaja dan waktu.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI ILMIAH.

Publikasi ilmiah merupakan media penting dalam informasi dan komunikasi ilmiah didalam negeri. Berkurangnja penerbitan buku-buku dan madjalah-madjalah ilmiah didalam negeri dapat disebabkan

karena : i) kurangnja kegiatan research, ii) tingginja biaja pertjetakan sehingga banjak madjalah ilmiah jang terpaksa menghentikan atau mengurangi penerbitannja.

Tingginja biaja pertjetakan merupakan sebab daripada timbulnja penerbitan-penerbitan atau laporan-laporan survey/research dalam bentuk stensil. Tetapi, djumlah maupun bidang-bidang jang ditjakup dalam laporan tersebut sukar untuk diketahui. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena :

i). laporan-laporan tersebut distensil dalam djumlah jang sedikit, lebih kurang 500 banjaknja,

ii). laporan-laporan itu diteruskan kepada perorangan jang dianggap memerlukan laporan tersebut, dan tidak dikirimkan kepada perpustakaan-perpustakaan,

iii). tidak adanja badan dalam pemerintahan jang ditundjuk sebagai tempat penjimpanan daripada penerbitan-penerbitan jang "copyrighted" dan penerbitan pemerintah lainnja,

iv). tidak adanja badan jang bertugas untuk menjusun daftar daripada penerbitan-penerbitan tersebut, jang dapat dipergunakan oleh seorang untuk mengetahui bahan-bahan/laporan-laporan apa jang telah pernah dituliskan dalam bidangnja.

Theses untuk mentjapai gelar sardjana dan disertasi untuk mentjapai gelar Doctor tidak dilaporkan setjara teratur kepada Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi, sehingga sukar pula untuk dapat mengetahui apa jang pernah dituliskan.

Berkurangnja penerbitan dalam negeri atau tidak lantjarnja "flow" daripada informasi menjebabkan kurangnja pengetahuan mengenai research jang dilakukan diberbagai lembaga, sehingga kemungkinan adanja duplikasi bertambah besar.

Konperensi ilmiah, seminar, dan sebagainja didalam maupun diluar negeri merupakan media penting dalam komunikasi ilmiah. Adanja pertemuan-pertemuan tersebut memungkinkan pertukaran pikiran dan pengetahuan mengenai kemadjuan-kemadjuan jang ditjapai dalam bidang masing-masing.

Keadaan ekonomi negara menjebabkan terbatasnja kemungkinan bagi sardjana-sardjana Indonesia untuk menghadiri konperensi-konperensi ilmiah diluar negeri.

Komunikasi antara lembaga research dan "pengguna" hasil research adalah sangat penting. Karena adanja pengaruh daripada

research dan pengembangan atas ekonomi tergantung daripada penggunaan hasilnja mendjadi produk baru dalam industri, peningkatan produksi dalam pertanian dan sebagainja. Dalam hal ini maka peranan pekerdja penjuluhan, modal jang tjukup besar untuk melakukan pertjobaan-pertjobaan penggunaan hasil atau tjara-tjara baru memegang peranan jang penting. Mengenai hal ini masih perlu diadakan penelitian „besarnja" pengaruh research atas perkembangan ekonomi dinegara kita, dan „bottleneck" daripada penjaluran hasil research kepada para „pengguna".

ALAT-ALAT ILMIAH.

Alat-alat ilmiah jang lajak dan modern merupakan aspek penting dalam kegiatan research. Survey dan berbagai laporan mengenai hal ini menundjukkan beberapa hal sebagai berikut:

i. bagi lembaga-lembaga jang tidak mempunjai afiliasi atau mendapat bantuan dari badan-badan asing, maka sedjak tahun 1958 hampir tidak terdapat tambahan atau pembaharuan alat-alat ilmiah.

ii. tidak tersedianja devisa untuk pembelian bahan-bahan aus (bahan-bahan jang habis terpakai) dan chemicals jang diperlukan, menjebabkan terhentinja atau terhambatnja suatu usaha research.

iii. bagi lembaga-lembaga jang masih baru maka persoalan jang dihadapi ialah mendapatkan alat-alat ilmiah, bahan-bahan aus dan chemicalia.

iv. pemeliharaan dan perbaikan alat-alat ilmiah, baik kerusakan besar maupun ketjil, memerlukan keahlian tertentu. Tetapi, ada kemungkinan bahwa alat-alat tersebut tidak dapat diperbaiki disebabkan karena tidak adanja spare-parts jang diperlukan.

Dengan demikian, apabila kita masih memikirkan bagaimana mendapatkan alat-alat ilmiah biasa, bahan-bahan aus dan chemicalia jang diperlukan, maka negara-negara lain sudah djauh leoih madju dengan peralatannja. Keadaan ini merupakan suatu hambatan atau memperlambat suatu usaha research. Sedjarah perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi menundjukkan bahwa adanja alat-alat ilmiah jang up-to-date merupakan salah satu unsur jang menjebabkan adanja research jang intensip, jang memungkinkan dihasilkannja penemuan jang bermutu.

FASILITAS RUANGAN.

1. Adanja ruangan jang minimal tjukup untuk melakukan kegiatan research merupakan suatu unsur jang menimbulkan kegairahan bekerdja. Bagi lembaga-lembaga jang telah lama ada maka persoalan jang dihadapi adalah "maintenance" dan/atau perluasan daripada ruangan jang sudah ada.

2. Bagi lembaga-lembaga baru, maka persoalan-persoalan jang dihadapi ialah memenuhi kebutuhan minimal daripada ruangan-ruangan kerdja.

KEADAAN RESEARCH DI INDONESIA.

Masih harus diteliti berapa djauh hasil-hasil research itu telah dipergunakan dalam praktek dan pengaruhnja terhadap perkembangan masjarakat. Sementara ini dapat dikemukakan beberapa hal:

a. dalam bidang kesehatan maka hasil-hasil research dapat lebih tjepat dipergunakan dalam praktek. Hal ini terutama disebabkan karena mereka jang melakukan research, jaitu terutama di Fakultas-Fakultas Kedokteran, dapat sekaligus mempergunakannja dalam praktek mereka sehari-hari. Pengetahuan baru jang didapat merupakan pula sumbangan penting bagi ilmu kedokteran umumnja, peningkatan kesehatan masjarakat chususnja. Adanja bantuan badan internasional memungkinkan bahwa pemberantasan berbagai penjakit rakjat dapat dilakukan dengan baik. Dalam bidang obat-obatan masih banjak diperlukan research mengenai kemungkinan penggunaan bahan-bahan jang terdapat dinegara kita sendiri.

b. Dalam bidang pertanian maka, disamping banjak persoalan teknis jang harus dipetjahkan, faktor-faktor sosial ekonomis memegang peranan penting dalam penggunaan hasil-hasil maupun tehnologi baru dalam bidang tersebut. Adapun faktor-faktor itu ialah:

   i) tidak adanja modal pada petani untuk mengambil risiko bersangkutan dengan melakukan pertjobaan penggunaan hasil-hasil baru,
   ii) masalah pemasaran,
   iii) masalah prasarana,
   iv) penjuluhan dan berbagai faktor kemasjarakatan lainnja, seperti tradisi dan sebagainja.

c. Pernah dikemukakan bahwa kita telah ketinggalan selama 30 tahun dalam bidang industri dan tehnologi. Hal itu disebabkan karena antara lain:

i) research industri jang masih kurang madju dan kurang banjak,

ii) bidang industri jang masih kurang "science-minded",

iii) tidak adanja modal jang tjukup untuk melakukan pertjobaan-pertjobaan penggunaan dalam industri,

iv) pemasaran barang-barang produksi dalam negeri.

Disamping itu faktor-faktor sosio-ekonomis memegang peranan jang penting.

d. Ilmu sosial memegang peranan penting dalam proses pembangunan negara, jaitu sebagai alat tidak sadja untuk mendapatkan pengetahuan baru, tetapi djuga untuk dapat menentukan tindakan apa jang diperlukan dalam masjarakat. Ilmu sosial dapat memberikan informasi jang diperlukan untuk dapat lebih mengerti kondisi, implikasi dan sasaran atau perubahan jang diperlukan dalam suatu masjarakat sebelum dikeluarkannja suatu keputusan penting. Kenjataan menundjukkan bahwa research dalam berbagai tjabang ilmu sosial masih belum dapat memberikan informasi atau data-data jang diperlukan dalam masjarakat kita.

e. Dalam perentjanaan pembangunan maka angka-angka statistik merupakan alat jang urgent. Merupakan kenjataan bahwa diwaktu-waktu jang lampau, dan djuga diwaktu ini, data-data statistik pada umumnja :

i) serba tidak lengkap,

ii) sangat terbatas penjadjiannja,

iii) sering timbul doublures,

iv) kurang reliable,

v) lambat sekali terkumpulnja.

Hal ini menjebabkan bahwa dalam usaha perentjanaan jaitu selalu terbentur pada kesulitan-kesulitan dalam memperoleh data-data jang diperlukan. Keadaan ini disebabkan beberapa faktor, disamping kekurangan tenaga ahli statistik, kekurangan fasilitas dan pembiajaan, jaitu :

i) belum adanja iklim perstatistikan jang favourable bagi peningkatan kegiatan-kegiatan maupun mutu statistik jang diperlukan.

ii) belum dirumuskannja spesifikasi, standardisasi dan klasifikasi berbagai statistik jang berorientasi dengan pertumbuhan keadaan di Indonesia jang menjebabkan bahwa beberapa data statistik jang aggregate belum dapat disusun, dan sebagainja.

Penilaian kwalitatip masih perlu disempurnakan, sehingga dapat diadakan analisa dan evaluasi jang lebih objektip untuk dapat mengetahui tingkat ilmu pengetahuan dan tehnologi dinegara kita dan menemukan "bottle-necks" dalam usaha mengembangkan dan penggunaannja dalam masjarakat. Adanja pengetahuan ini memungkinkan kita untuk menentukan "target" perkembangannja dengan lebih baik.

MASALAH JANG DIHADAPI.

Penelitian (research) perlu diarahkan kepada mensukseskan program Pembangunan Lima Tahun jang meliputi sektor-sektor :

a. Intensifikasi/ekstensifikasi pertanian, peternakan, perkebunan dan eksploitasi hutan.
b. Pembangunan industri agraria.
c. Pembangunan industri ringan.
d. Pembangunan industri sedang jang dapat menundjang keperluan tersebut pada a, b, dan c diatas.
e. Pembangunan prasarana dan perhubungan.
f. Merentjanakan industri berat untuk tahap landjutannja.

Untuk mensukseskan program tersebut maka perlu dilaksanakan research jang bermutu. Pelaksanaan research jang bermutu masalah jang gawat dewasa ini karena harus ditjiptakan/dibina faktor-faktor jang menundjang kegiatan research tersebut.

Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor *suasana* baik politis maupun ekonomis jang memungkinkan berkembangnja kegiatan-kegiatan dan penggunaan hasil-hasil research.
b. Faktor kepustakaan ilmiah jang up-to-date.
c. Faktor peralatan dan bahan-bahan ilmiah.
d. Faktor pembiajaan jang tjukup.
e. Faktor tenaga research (research workers and technicians) jang tjukup setjara kwantitatip dan kwalitatip.

Indonesia merupakan salah satu negara jang sedang berkembang dalam bidang tehnologi sedang industrinja belum madju dan belum ada "basic industries". Mengingat akan hal-hal tersebut maka usaha-usaha meningkatkan kegiatan serta mutu research dalam rangka Rentjana Pembangunan Lima Tahun diarahkan pada memperbaiki prasarana ilmiah serta meningkatkan taraf sumber daja ilmiah (scien-

tific resources), jaitu mentjukupi kebutuhan akan tenaga-tenaga research dan tehnisi baik setjara kwantitatip maupun setjara kwalitatip, bahan-bahan kepustakaan ilmiah, alat-alat ilmiah dan tertjapainja suatu suasana ilmiah (scientific atmosphere) dalam masjarakat.

Dalam pengarahan kegiatan research maka perlu diberikan prioritas kepada research terapan (applied research) dengan tidak mengabaikan dilakukannja research dasar (basic research) jang diperlukan sebagai dasar daripada research terapan itu. Dalam hubungan ini maka penelitian dalam bidang atom perlu mendapat perhatian pula.

PENGARAHAN.

Agar research benar-benar dapat merupakan kegiatan jang tidak sadja menundjang proses pembangunan dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun tetapi djuga merupakan dasar bagi usaha-usaha pembangunan dimasa jang akan datang, maka dalam rangka Rentjana Pembangunan Lima Tahun pertama ini perhatian terutama akan diberikan kepada :

1. *Rehabilitasi Lembaga Research Jang Sudah Ada.*

Agar dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun pertama ini sudah dapat dimulai dengan pelaksanaan usaha-usaha research jang bermutu, maka dalam tahun-tahun pertama prioritas akan diberikan kepada rehabilitasi lembaga-lembaga research jang sudah ada. Usaha rehabilitasi diarahkan pada memenuhi kebutuhan fasilitas dasar jang diperlukan sehingga lembaga-lembaga research itu dapat mendjalankan tugasnja dengan baik, jaitu :

a. peralatan ilmiah jang lajak, bahan-bahan kimia dan bahan-bahan aus. Untuk sementara peralatan serta bahan-bahan itu masih harus diimpor, sehingga perlu disediakan dana devisa jang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan tersebut.

b. kepustakaan ilmiah, terutama madjalah-madjalah ilmiah dari luar negeri, jang up-to-date. Untuk memenuhi kebutuhan ini djuga perlu disediakan dana devisa jang tjukup.

c. peningkatan taraf tenaga-tenaga research dan tehnisi, serta penambahannja setjara bertahap.

d. memberikan pembiajaan jang mentjukupi untuk kegiatan-kegiatan research.

Suatu survey jang kontinu mengenai keadaan serta kebutuhan lembaga-lembaga research perlu dilakukan. Dalam masa jang lampau pembangunan lembaga-lembaga research tidak dilakukan menurut suatu pola tertentu, berdasarkan kebutuhan riil. Oleh sebab itu mulai sekarang perlu dilakukan penilaian terhadap lembaga-lembaga jang ada mengenai hak hidupnja, dan bahwa pada masa jang akan datang, pembentukan lembaga-lembaga research baru harus diatur sedemikian rupa sehingga terdjamin bahwa lembaga-lembaga itu mendjalankan fungsi jang benar-benar berguna dan bahwa kemungkinan duplikasi sebanjak mungkin dihindarkan.

Disamping rehabilitasi lembaga-lembaga research jang sudah ada, tetap harus diberikan perhatian kepada :

2. *Pembinaan Tenaga Ilmiah dan Tehnisi* (Scientific Manpower and Technicians).

Untuk mendapatkan tenaga-tenaga ilmiah dan tehnisi jang bermutu diperlukan waktu jang lama. Peningkatan taraf pengetahuan mengenai metode research, tjara-tjara pendekatan baru, perlu dilakukan setjara teratur. Disamping itu perlu dipupuk adanja dedikasi serta devosi pada pekerdjaan research.

Kwalitas daripada tenaga-tenaga tersebut sangat tergantung pula dari pendidikan jang diperoleh mereka. Oleh karena itu maka perlu diberikan perhatian pada *science education* ditingkat sekolah menengah maupun ditingkat Universitas.

Suatu survey jang kontinu mengenai djumlah tenaga ilmiah dan tehnisi, pembidangan keahliannja, penjebaran dan pekerdjaan jang dilakukannja, serta kebutuhan akan tenaga-tenaga itu dimasa jang akan datang, perlu dilakukan.

Disamping itu, kepada mereka jang bekerdja dalam bidang research perlu diberi kemungkinan untuk memusatkan perhatiannja terhadap pekerdjaan pokoknja.

3. Perluasan *Komunikasi dan Informasi* dalam *Bidang Ilmu Pengetahuan* dan Technologi.

Disamping usaha mendjamin adanja kontinuitas daripada "flow of scientific information" dari negara-negara lain, perlu diusahakan peningkatan penerbitan-penerbitan ilmiah didalam negeri. Suatu keringanan biaja *pertjetakan* bagi penerbitan-penerbitan ilmiah dalam negeri perlu mendapat perhatian.

Informasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi dapat memegang peranan penting bagi perkembangan industri kita, dengan

menggiatkan usaha-usaha informasi kepada para industriawan tentang penemuan-penemuan baru dalam bidang masing-masing baik jang ditemukan didalam negeri maupun diluar negeri.

Dalam hal penjaluran informasi berupa kepustakaan ilmiah, maka perhatian terutama harus diberikan kepada pusat-pusat informasi jang sudah ada. Dalam hal ini maka Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional, LIPI memegang peranan jang penting.

Penjelenggaraan simposium, seminar, kongres ilmiah dan sebagainja merupakan hal jang lazim dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai alat komunikasi dan informasi. Usaha-usaha komunikasi itu perlu dipergiat dan diperluas, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah nasional, regional maupun internasional.

4. *Alat-alat Ilmiah.*

Sampai kini maka alat-alat ilmiah, bahan-bahan aus dan bahan-bahan kimia untuk kepentingan research masih harus diimpor. Oleh karena itu, usaha-usaha research dalam pembuatan dan perbaikan alat-alat ilmiah perlu ditingkatkan. Dalam hal ini maka Lembaga Instrumentasi Nasional LIPI dapat memegang peranan penting.

Setjara kontinu perlu diadakan survey mengenai lokasi, keadaan, dan penggunaan alat-alat ilmiah di Indonesia, terutama alat-alat ilmiah chusus.

B. PENGEMBANGAN STATISTIK.

PENDAHULUAN.

Tudjuan utama dari program statistik adalah untuk mengetahui perkembangan dan meramalkan kesukaran-kesukaran dalam sektor-sektor tertentu. Dalam hubungan dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun djelaslah bahwa pengarahan pengumpulan data statistik ditentukan berdasarkan prioritas didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973 itu.

Karena persoalan pokok Indonesia didalam djangka waktu Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini adalah pangan, maka data statistik dari sektor inilah jang mendjadi prioritas utama, misalnja data mengenai areal tanam, areal panen, produksi per ha., terutama untuk beras, akan memudahkan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan didalam transport beras, menentukan import beras dalam waktu jang tepat apabila diperlukan, penggudangan dan lain-lainnja.

Sensus pertanian adalah penting, dan diharapkan akan diperoleh data hubungan antara faktor-faktor input dan produksi, demikian pula sensus penduduk dan SUSENAS merupakan tindakan-tindakan jang sangat penting didalam bidang perstatistikan.

PERTANIAN.

Data pertanian (areal tanam, panen, hasil dan sebagainja) biasanja diperoleh dari tiap-tiap desa oleh petugas pertanian/petugas statistik ditiap-tiap desa. Data ini dikirim ke Biro Pusat Statistik Djakarta melewati Kabupaten dan Kantor Gubernur.

Meskipun system ini telah berdjalan lama, sekurang-kurangnja 2 hal jang djelas akan diperbaiki jaitu :

1. Waktu pengiriman/penjerahan data akan diperbaiki. Diusahakan djuga agar data bulan ini bisa sampai di Biro Pusat Statistik pada achir bulan berikutnja.

2. Akan diadakan pengetjekan terhadap kebenaran dari data tersebut — misalnja dengan system sample. Untuk maksud ini telah diadakan satu projek pertjobaan di Jogjakarta.

Dengan adanja usaha-usaha menaikkan produksi (a.l. system Bimas), dapat diharapkan variasi jang berbeda besar daripada hasil rata-rata. Dengan demikian sistem pendugaan hasil ini perlu diperbaiki, dengan memperbanjak sample plot dan mengaturnja sebaik mungkin. Data mengenai beras adalah mutlak. Tak kalah pentingnja data-data mengenai bahan makanan lainnja seperti djagung, katjang-katjangan, jang dapat dikumpulkan dengan sample ini.

Sensus pertanian dimaksudkan untuk mendapatkan data statistik tentang faktor input dan hasil (output). Sample jang direntjanakan adalah tjukup besar untuk mendapatkan hasil jang memuaskan bagi tiap-tiap Kabupaten.

Prioritas berikutnja adalah hasil-hasil eksport, seperti : karet, kelapa sawit dan kopra. Sedjak 1953 praktis tidak pernah ada survey tentang perkebunan rakjat, jang diperkirakan memproduksikan 2/3 dari hasil karet dan 80 persen dari kopra. Angka-angka ini perlu, dan mungkin dapat digabungkan didalam angka statistik desa.

SENSUS PENDUDUK.

Tak kalah pentingnja dari statistik dan sensus pertanian, adalah sensus penduduk. Sensus penduduk ini penting, karena :

1. Data jang tepat mengenai penduduk ini sekarang tidak ada jang mengetahuinja, dimana data ini adalah sangat penting untuk berbagai maksud.

2. Untuk keperluan pemilihan umum.

3. Sensus penduduk dapat digunakan sebagai rangka untuk keperluan-keperluan lain (Penentuan Population Distribution).

4. Sebagai alat pengetjek dari survey-survey lain (Susenas dan sebagainja).

SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional).

Susenas tetap diadakan setiap tahun sebagai pelengkap dari sensus, dimana pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan tiap tahun tidak perlu sama. Beberapa data adalah penting bagi perkiraan pendapatan nasional.

INDUSTRI.

Jang terachir dari rangkaian prioritas ini, adalah sensus industri, jang disarankan untuk diadakan sesudah tahun 1974. Survey jang disarankan untuk dilakukan dalam bidang ini adalah mengenai beberapa industri berat dan survey industri ketjil jang dipandang perlu. (Tjatatan : industri rumah masuk dalam Susenas).

PERDAGANGAN.

Angka-angka statistik didalam perdagangan adalah tidak kurang pentingnja. Didalam rangka pembangunan statistik ini, minimal kita harus sempurnakan, angka-angka perstatistikan mengenai eksport/ import dan harga.

Didalam "harga" ini, terutama dimaksudkan adalah angka-angka perkembangan harga bahan-bahan pokok kita dan bahan-bahan dasar produksi dan produk-produk jang diprioritaskan (misalnja pupuk, insectisida etc.). Chusus untuk bahan-bahan pokok ini perlu diadakan penelitian tentang klasifikasi bahan-bahan pokok.

ANGKA-ANGKA STATISTIK DESA.

Angka-angka mengenai statistik desa seperti kelahiran, kematian, penduduk, areal panenan, ternak, industri dan lain-lain perlu diperbaiki.

Ada 3 kemungkinan untuk memperbaiki hal ini, jaitu :

1. Sistem tetap, tetapi mendidik/memperbaiki petugas-petugas-nja.
2. Dengan menggunakan "independent sample" dari masing-masing daerah kabupaten atau desa, untuk menentukan "overall eror" dari daerah tersebut.
3. Dengan menggunakan satu sample dari beberapa desa, untuk digunakan dasar bagi areal jang lebih luas.

Ketiga kemungkinan ini sedang diselidiki.

ORGANISASI STATISTIK.

Biro Pusat Statistik mengumpulkan data statistik dari asalnja maupun dari Departemen-departemen. Beberapa segi positip dibidang perstatistikan adalah :

1. Telah adanja Undang-undang Pokok Statistik (1960).
2. Adanja training program — Akademi Ilmu Statistik.
3. Tjabang-tjabang dihampir seluruh Indonesia (± 3.000 buah ditingkat ketjamatan).
4. Adanja sensus jang pernah dilakukan (sensus penduduk — 1961, sensus pertanian — 1963).

Satu hal jang amat penting adalah agar B.P.S. lebih didekatkan kepada "Center of government operations".

Perbaikan data statistik merupakan bagian dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Menurut Undang-undang Pokok Statistik 1960, B.P.S. diserahi koordinasi dari angka-angka statistik. Untuk ini diadakan konsultasi-konsultasi dengan Departemen-departemen menudju kearah pembangunan statistik nasional.

PETUNDJUK HALAMAN BUKU II C

HALAMAN

BAB IX

AGAMA 9

Kedudukan dan Peranan Agama 9
Keadaan dan Masalah-masalah 9
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 10
Pembangunan Sarana-sarana Kehidupan Beragama 12
Pendidikan Agama 13
Urusan Hadji/Ziarah 13

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun (1969/70 — 1973/74)
AGAMA 14

BAB X.

PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA 15

A. PENDIDIKAN 15
Pendahuluan 15
Keadaan dan Masalah-masalah 15
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 17
Tabel X - A - 1 20
Tabel X - A - 2 22
Tabel X - A - 3 23
Tabel X - A - 4 27
Tabel X - A - 5 28

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun (1969/70 — 1973/74)
PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN 38

B. TENAGA KERDJA 39
Keadaan dan Masalah-masalah 39
Masalah-masalah 41
Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 42
Perawatan dan Perlindungan Tenaga Kerdja, Pembinaan Hubungan Perburuhan 45

HALAMAN

Pengupahan dan Djaminan Sosial 46

BAB XI.

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENTJANA 47

A. KESEHATAN 47

Keadaan dan Masalah 47

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 50

Tabel XI - A - 1 55

Grafik Pengembangan Infrastruktur Kesehatan .. 56

Tabel XI - A - 2 61

B. KELUARGA BERENTJANA 63

Keadaan dan Masalah-masalah 63

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 64

Tabel XI - B - 1 65

Tabel XI - B - 2 66

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun (1969/70 — 1973/74)
KESEHATAN DAN KELUARGA BEREN-TJANA 68

BAB XII.

PERUMAHAN DAN KESEDJAHTERAAN SOSIAL..... 71

A. PERUMAHAN DAN AIR MINUM 71

Pendahuluan 71

Keadaan dan Masalah-masalah 73

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 76

B. KESEDJAHTERAAN SOSIAL 82

Pendahuluan 82

Keadaan dan Masalah-masalah 82

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 83

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun (1969/70 — 1973/74)
PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL DAN PENJEDIAAN AIR MINUM 88

HALAMAN

BAB XIII.

TERTIB HUKUM DAN PENERANGAN 91

A. TERTIB HUKUM 91

Pendahuluan 91

Keadaan dan Masalah-masalah 91

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 94

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun (1969/70 — 1973/74) TERTIB HUKUM 99

B. PENERANGAN 100

Pendahuluan 100

Keadaan dan Masalah-masalah 101

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 102

Pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun (1969/70 — 1973/74) PENERANGAN 107

BAB XIV.

TRANSMIGRASI DAN KOPERASI 109

A. TRANSMIGRASI 109

Permasalahan 109

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 109

B. KOPERASI 112

Pendahuluan 112

Keadaan dan Masalah 112

Tabel XIV - B - 1 113

Kebidjaksanaan dan Langkah-langkah 114

Tabel XIV - B - 2 114

BAB XV

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL (HAN KAMNAS) 117

HALAMAN

U m u m 117
Hankamnas 117
Kekaryaan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia 118
Penilaian Keadaan 118
Pokok-pokok Kebidjaksanaan 119
Langkah-langkah 120

BAB XVI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK.... 123
A. RESEARCH 123
Keadaan pada Waktu Sekarang 123
Organisasi Ilmiah Indonesia 124
Kepustakaan Ilmiah 126
Informasi dan Komunikasi Ilmiah 126
Alat-alat Ilmiah 128
Fasilitas Ruangan 129
Keadaan Research di Indonesia 129
Masalah Jang Dihadapi 131
Pengarahan 132
1. *Rehabilitasi Lembaga Research jang sudah ada* 132
2. *Pembinaan Tenaga Ilmiah dan Tehnisi* (Scientific Manpower and Technicians) 133
3. *Perluasan Komunikasi dan Informasi dalam Bidang Ilmu Pengetahuan* 133
4. *Alat-alat Ilmiah* 134

B. PENGEMBANGAN STATISTIK 134
Pendahuluan 134
Pertanian 135
Sensus Penduduk 135
Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) 136
Industri 136
Perdagangan 136
Angka-angka Statistik Desa 136
Organisasi Statistik 137

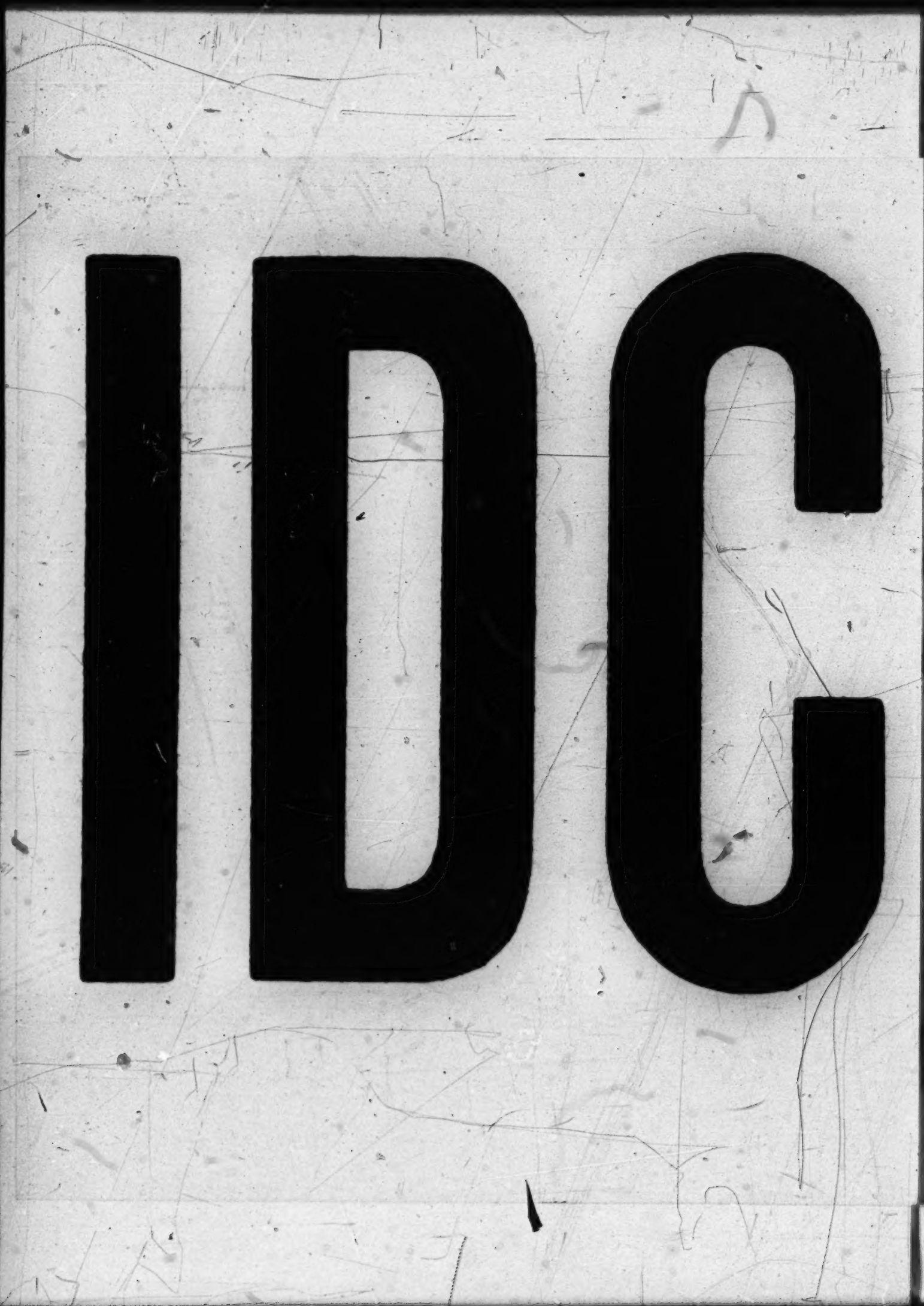
IDC

RECEIVED
21 AUG 1969
CLD
Acquisitions
Section

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969/70 — 1973/74

III

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

29 SEP 1969

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
CENTRAL LIBRARY AND
DOCUMENTATION BRANCH

14153
v 3

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969/70 — 1973/74

III

DEPARTEMEN PERKEBANGAN R.I.

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
CENTRAL LIBRARY AND
DOCUMENTATION BRANCH

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 319 TAHUN 1968
TENTANG
RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. *bahwa tudjuan perdjoangan Orde-Baru adalah meningkatkan tingkat kehidupan Rakjat Indonesia, jang hanja dapat ditjapai dengan pelaksanaan pembangunan bertahap dan berentjana;*
2. *bahwa hasil-hasil jang telah ditjapai dalam program stabilisasi politik dan ekonomi, dewasa ini telah merupakan landasan jang tjukup kuat guna pelaksanaan pembangunan;*
3. *bahwa berdasarkan ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, penjusunan dan pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun mendjadi salah satu tugas Kabinet Pembangunan;*
4. *bahwa dewasa ini Pemerintah telah berhasil menjiapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973, jang akan mendjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan ketetapan MPRS tersebut tahun-demi-tahun;*
5. *bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973;*

Mengingat :

1. *Pasal 4 ajat (1) Undang-Undang Dasar 1945;*
2. *Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968;*
3. *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 Tahun 1968;*

Mendengar : *Pertimbangan BAPPENAS dan Sidang-sidang Kabinet;*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969 — 1973.*

Pasal 1.

Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973 sebagaimana termuat dalam Buku I, II dan III lampiran Keputusan Presiden ini merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti jang ditugaskan oleh MPRS.

Pasal 2.

Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pelaksanaan daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun, akan dituangkan dalam Rentjana Tahunan jang tertjermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara serta kebidjaksanaan-kebidjaksanaan lainnja.

Pasal 3.

Penuangan dalam Rentjana Tahunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perobahan dan perkembangan keadaan jang memerlukan penjesuaian terhadap Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal 30 Desember 1968
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAL — TNI

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1969/70 — 1973/74

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 319 TAHUN 1968

tentang

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

III

REPUBLIK INDONESIA

RENCANA
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1969/70 — 1973/74

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1969

tentang

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

III

REPUBLIK INDONESIA

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

1969/70 — 1973/74

DAFTAR ISI KESELURUHAN

BUKU PERTAMA

U M U M

Bab. I Tudjuan, Sasaran dan Kebidjaksanaan

Bab. II Sumber-sumber Pembiajaan

Bab. III Neratja Pembajaran Internasional

Bab. IV Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa

Bab. V Administrasi Pemerintah, Pelaksanaan Rentjana dan Rentjana Operasionil Tahunan

BUKU KEDUA

RENTJANA BIDANG-BIDANG

Bab. VI Pertanian dan Irigasi

Bab. VII Industri, Pertambangan dan Tenaga Listrik

Bab. VIII Perhubungan dan Pariwisata

Bab. IX A g a m a

Bab. X Pendidikan dan Tenaga Kerdja

Bab. XI Kesehatan dan Keluarga Berentjana

Bab. XII Perumahan dan Kesedjahteraan Sosial

Bab. XIII Tertib Hukum dan Penerangan

Bab. XIV Transmigrasi dan Koperasi

Bab. XV Pertahanan dan Keamanan Nasional

Bab. XVI Penelitian dan Pengembangan Statistik

BUKU KETIGA

PERINTJIAN MENURUT DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

1969/70 — 1973/74

DAFTAR ISI KESELURUHAN

BUKU PERTAMA

U M U M

Bab. I Pendahuluan, Sasaran dan Kebijaksanaan
Bab. II Sumber-sumber Pembiajaan
Bab. III Neraja Pembajaran Internasional
Bab. IV Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa
Bab. V Administrasi Pemerintah, Pelaksanaan Rencana dan Rencana Operasional Tahunan

BUKU KEDUA

RENCANA BIDANG-BIDANG

Bab. VI Pertanian dan Irigasi
Bab. VII Industri, Pertambangan dan Tenaga Listrik
Bab. VIII Perhubungan dan Pariwisata
Bab. IX Perdagangan
Bab. X Pendidikan dan Tenaga Kerdja
Bab. XI Kesehatan dan Keluarga Berencjana
Bab. XII Perumahan dan Kesedjahteraan Sosial
Bab. XIII Tenaga Bulan dan Penerangan
Bab. XIV Transmigrasi dan Koperasi
Bab. XV Pertahanan dan Keamanan Nasional
Bab. XVI Penelitian dan Pengembangan Statistik

BUKU KETIGA

PERINTJIAN MENURUT DAERAH

RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

1969/70 — 1973/74

DAFTAR ISI

B U K U III

PERINTJIAN MENURUT DAERAH

1. Daerah A t j e h
2. Daerah Sumatera Utara
3. Daerah Sumatera Barat
4. Daerah R i a u
5. Daerah D j a m b i
6. Daerah Sumatera Selatan
7. Daerah B e n g k u l u
8. Daerah L a m p u n g
9. Daerah Djawa Barat
10. Daerah DCI Djakarta Raya
11. Daerah Djawa Tengah
12. Daerah Jogjakarta
13. Daerah Djawa Timur
14. Daerah Kalimantan Barat
15. Daerah Kalimantan Tengah
16. Daerah Kalimantan Selatan
17. Daerah Kalimantan Timur
18. Daerah Sulawesi Utara
19. Daerah Sulawesi Tengah
20. Daerah Sulawesi Selatan
21. Daerah Sulawesi Tenggara
22. Daerah B a l i
23. Daerah Nusa Tenggara Barat
24. Daerah Nusa Tenggara Timur
25. Daerah M a l u k u
26. Daerah Irian Barat.

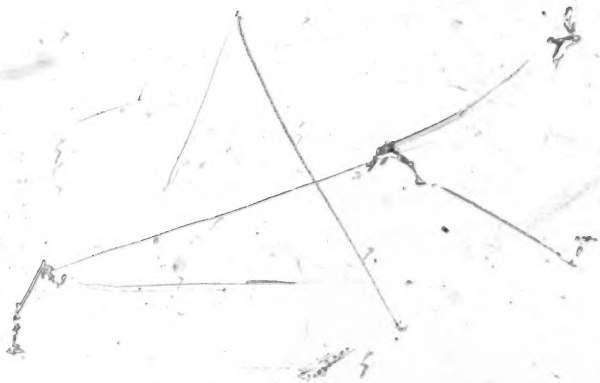

BUKU KETIGA

PERINTJIAN MENURUT DAERAH

LEGENDA

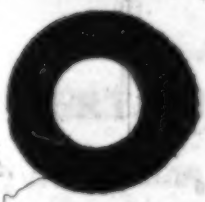

PROJEK-PROJEK PENGAIRAN :
termasuk perluasan irigasi, persawahan pasang-surut, pengembangan rawa dan pengembangan wilajah sungai.

PROJEK-PROJEK KEHUTANAN :
termasuk industri hasil hutan dan pengembangan produksi hutan.

PROJEK-PROJEK PERIKANAN :
termasuk rehabilitasi/upgrading pelabuhan ikan dan penangkapan ikan.

PROJEK-PROJEK PRASARANA PELABUHAN LAUT :
termasuk rehabilitasi/upgrading/penambahan kade, gudang, pengangkutan, kerangka kapal, pengerukan back-log lumpur, telekomunikasi maritim.

PROJEK-PROJEK PRASARANA PELABUHAN UDARA :
termasuk rehabilitasi/upgrading/perluasan landasan dan fasilitas-fasilitas pelabuhan udara.

PROJEK-PROJEK PEMBANGKIT LISTRIK :
termasuk PLTA; PLTD; PLTU; PLTG.

PROJEK REHABILITASI/UPGRADING DJALAN RAJA : termasuk djalan Negara dan djalan Propinsi jang penting.

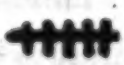

PROJEK REHABILITASI/UPGRADING DJALAN KERETA API :
termasuk penggantian dengan rel R 14

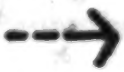

PROJEK HUBUNGAN TELEKOM DJARAK DJAUH :
termasuk microwave; radiosinar; troposcatter.

PROJEK-PROJEK
TAMBANG MINJAK

PROJEK-PROJEK
TAMBANG BELIRANG

PROJEK-PROJEK
TAMBANG TIMAH

PROJEK-PROJEK
TAMBANG MAS

PROJEK-PROJEK
TAMBANG BOUKSIT

PROJEK-PROJEK
TAMBANG TEMBAGA

PROJEK-PROJEK
TAMBANG NIKEL

PROJEK-PROJEK
TAMBANG ASPAL

PROJEK-PROJEK INDUSTRI PUPUK

PROJEK-PROJEK INDUSTRI SEMEN

PROJEK-PROJEK INDUSTRI KERTAS

PROJEK-PROJEK INDUSTRI TEKSTIL :
termasuk pemintalan, pertenunan dll.

PROJEK-PROJEK PENDIDIKAN KEDJURUAN

PROJEK-PROJEK PENINGKATAN FASILITAS KESEHATAN

LEGENDA

PROJEK-PROJEK PENGABAN :
termasuk permasan irigasi persawahan pasang surut, pengembangan rawa dan pengembangan wilajah sungai.

PROJEK-PROJEK KEHUTANAN :
termasuk industri hasil hutan dan pengembangan produksi hutan.

PROJEK-PROJEK PERIKANAN :
termasuk rehabilitasi upgrading pelabuhan ikan dan penangkapan ikan.

PROJEK-PROJEK PRASARANA PELABUHAN LAUT :
termasuk rehabilitasi upgrading penambahan kade, gudang, pengangkutan, kerangka kapal, pengeruhan back-log lumpur, telekomunikasi maritim.

PROJEK-PROJEK PRASARANA PELABUHAN UDARA :
termasuk rehabilitasi upgrading perluasan landasan dan fasilitas-fasilitas pelabuhan udara.

PROJEK-PROJEK PEMBANGKIT LISTRIK :
termasuk PLTA; PLTD, PLTU, PLTG...

PROJEK REHABILITASI UPGRADING DJALAN RAJA :
termasuk djalan Negara dan djalan Propinsi jang penting.

PROJEK REHABILITASI UPGRADING DJALAN KERETA API :
termasuk pengurutan dengan rel. R 14

PROJEK HUBUNGAN TELEKOM DJARAK DJAUH :
termasuk microwave; radiosmar; troposcatter.

1. DAERAH : ATJEH

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi Bahan Makanan		
Intensifikasi Penjuluhan		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan rakjat dan unit-unit pengolahannja		
Perluasan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Besar		
Rehabilitasi Tanaman Karet Perkebunan Besar		
Perikanan dan Kehutanan		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan	Pidi	
Pengendalian Bandjir dan Erosi		reboisasi
Peningkatan Produksi Hasil Hutan		modal asing
Peternakan		
Pengamanan, Penelitian dan Bimbingan Massal Peternakan		
Irigasi		
Rehabilitasi dan Perluasan Projek-projek Irigasi	Krueng Djrue Krueng Baro	
Pompa Air Irigasi Pedesaan		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri Ringan serta Keradjinan Rakjat dan Pengolahan Hasil Pertanian		
Pertambangan.		
Minjak dan Gas Bumi	Off dan on Shore	Penanaman modal asing.
Tenaga listrik.		
Penambahan daja listrik terpasang.		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERHUBUNGAN.		
Perhubungan Darat.		
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan djembatan.	Pada djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu.	
Projek djalan raya Takengon.	Bireuen-Takengon.	
Perhubungan Udara.		
Rehabilitasi/upgrading dan pemasangan baru Telekomunikasi udara dan Navigational Aid	Banda Atjeh.	
Rehabilitasi/upgrading lapangan udara.	Banda Atjeh.	
Stasiun Meteorologi.	Banda Atjeh.	
Perhubungan Laut.		
Pengangkatan kerangka-kerangka kapal.		
Telekomunikasi pelajaran.	Olele-Lokseumawe, Meulaboh.	
Perambuan dan Penerangan Pantai.	Sabang, Olele, Lokseumawe.	
Rehabilitasi/Penambahan : Kade, gudang, fasilitas penjediaan air, listrik dan alat-alat bongkar muat.	Lokseumawe - Olele, Kualalangsa - Meulaboh.	
Pos dan Telekomunikasi.		
Pembangunan trajek baru Dinas Pos Kilat.	Medan-Bindjai-Langsa. Banda Atjeh-Lokseumawe Langsa, Banda Atjeh. Meulaboh.	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Dinas Pos keliling.		
Pelajanan Pos dipedesaan.	Tersebar diseluruh daerah.	
Pembangunan hubungan telepon lokal.	Banda Atjeh.	
Peningkatan hubungan djarak djauh — telekom.	Banda Atjeh-Djakarta.	
Radio — sinar (VHF).	Banda Atjeh-Sabang.	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA.		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan.		
Pembinaan Perguruan Tinggi :		
Universitas Sjah Kuala, terutama Fakultas-Fakultas : Pertanian, Kedokteran Hewan dan Peternakan Tehnik.	Banda Atjeh.	
Pendidikan Guru Agama.		
Institut Agama Islam Negeri.	Banda Atjeh.	
KESEHATAN		
Kesehatan Sekolah.		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat.		
Rehabilitasi dan perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pembangunan R.S.U.P.	Banda Atjeh.	
Pemberantasan penjakit menular.		

Sabang
P WE
PBREUEH
BANDA ATJEH
SIGLI
MEUREUDU BAROH
Bireuen
Lammeula
LHOKSEUMAWE
GELIMPANG
Tjalang
RUMAHBARU
LAKENGON
Djamat
Djeuram
MEULABOH
Peukankuan
Blangpidie
TAPAKTUAN
Bakungan
P SIMEULUE
Sinabang
P LASIA
KEP. BANJAK
P TJANGKU
P BABI
P BANGKARU
TARGET REHAB & UPGRAD.
DJALAN '60/70 - '73/74 = 1:280 KM.

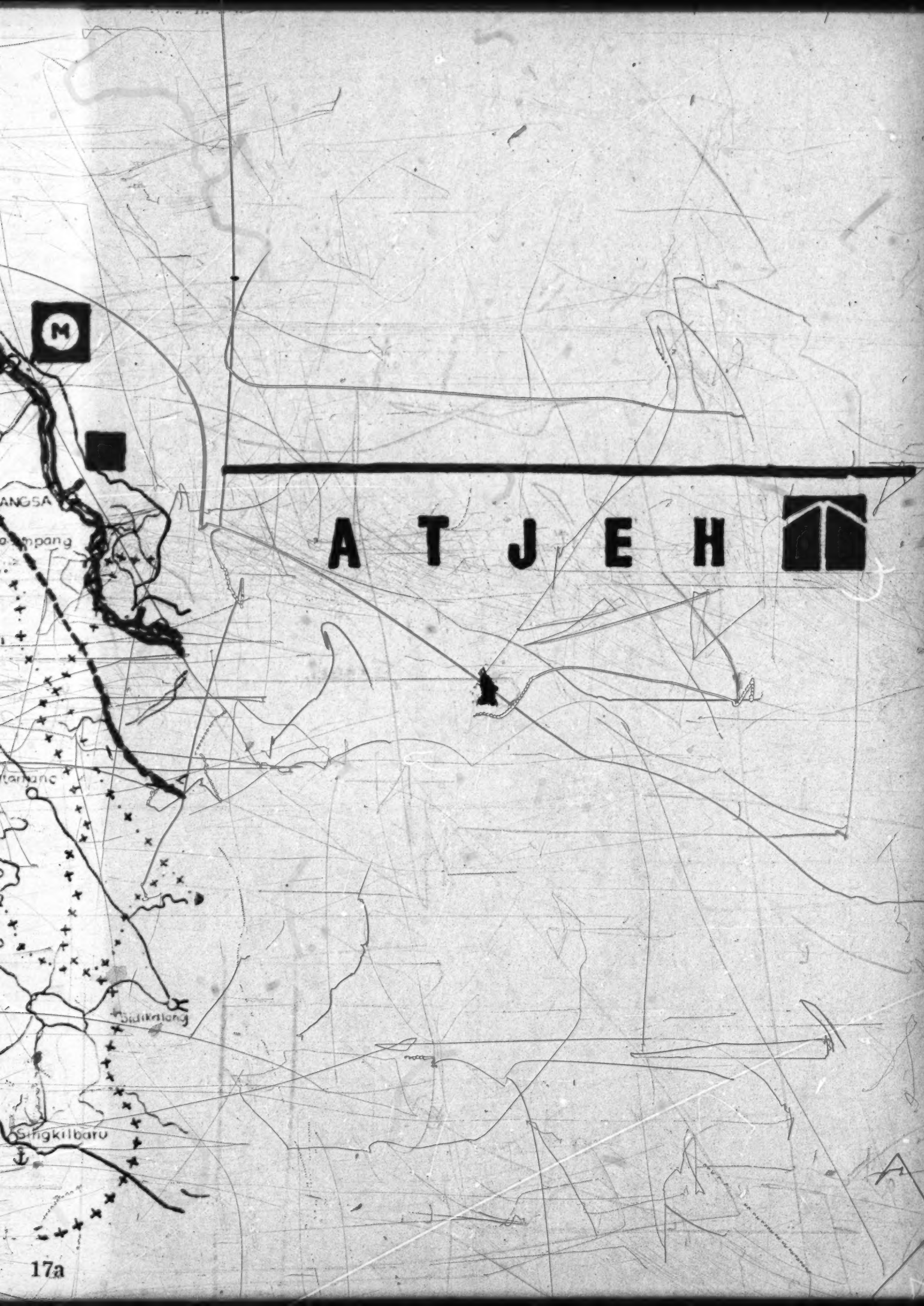
ATJEH
Singkilbaru

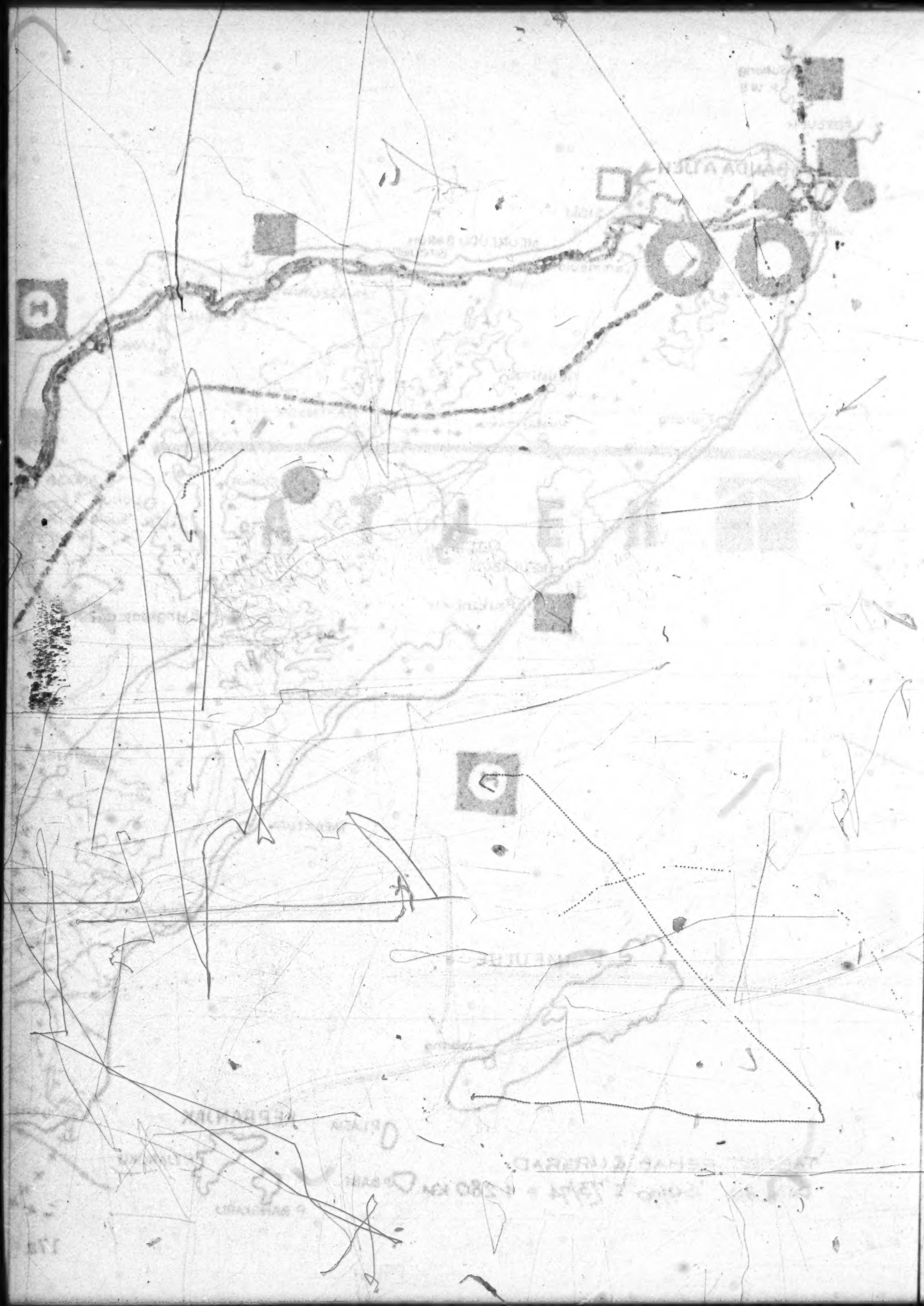

2. DAERAH : SUMATERA UTARA

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI.		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan.		
Intensifikasi penjuluhan.		
Produksi benih unggul.		
Perkebunan.		
Perbaikan perkebunan-perkebunan rakjat dan unit-unit pengolahannja.		
Rehabilitasi tanaman karet perkebunan besar.		
Pabrik Crumb-Rubber.		
Rehabilitasi pabrik pengolahan minjak sawit.		
Pemberantasan alang-alang dan perluasan tanaman Kelapa sawit.		
Rehabilitasi teh perkebunan besar.		
Pusat Penelitian.		
Perikanan dan Kehutanan.		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan.	Belawan.	
Kolam Pasang Surut.		
Pengawetan Ikan.		
Pengendalian Bandjir dan Erosi.		Reboisasi.
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan Kaju.		
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan bukan kaju.		
Peternakan.		
Pengamanan, penelitian dan bimbingan massaal peternakan.		
Irigasi.		
Pompa air irigasi pedesaan.		Tersebar.
Rehabilitasi dan perluasan irigasi.		Sisirgunting.
Pekerdjaan baru irigasi.		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK.		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Industri.		
Rehabilitasi pabrik kertas.	Pematang Siantar	
Pertambangan.		
Minjak dan gas bumi.	Off-shore.	
Pabrik asphalt.	Pangkalan Susu.	Pertamina (rehabilitasi).
Carbon black.	„	„
L.P.G.	„	„
Bauksit	Bagian Timur	Eksplorasi.
Tenaga Listrik.		
P.L.T.A. Asahan	Asahan.	
P.L.T.U. Medan.	Medan.	
Transmisi.	Medan.	
Distribusi.	Medan.	
PERHUBUNGAN.		
Perhubungan Darat.		
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan djembatan.		Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu.
Workshop untuk Rehabilitasi/Upgrading djalan.	Bireuen.	
Angkutan Kota.	Medan.	
Djembatan Timbang.		Didjalan-djalan Propinsi/Negara.
Rehabilitasi djalan dan djembatan Kereta-api.	Medan-Kisaran.	
Perhubungan Udara.		
Rehabilitasi/Upgrading dan pemasangan baru telekom udara serta navigational aid.	Medan.	
Rehabilitasi/Upgrading Lapangan Udara.	Polonia-Medan.	
Stasiun Meteorologi.	Medan.	
Perhubungan Laut.		
Pengerukan lumpur dipelabuhan.	Belawan.	
Pengangkatan kerangka-kerangka Kapal.	Daerah pelabuhan Belawan.	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Rehabilitasi/Penambahan kade, gudang, fasilitas penjediaan air, listrik dan alat bongkar-muat.	Belawan, Sibolga.	
Fasilitas Dock/Reparasi Kapal-kapal.	Belawan.	
Telekom Pelajaran.	Belawan, Sibolga, Gunung Sitoli, Teluknibung	
Perambuan dan Penerangan Pantai.	Belawan - Sibolga.	
Pembangunan Terminals dan Fasilitas-fasilitas bagi Angkutan Sungai.	Asahan.	
Pos dan Telekom.		
Upgrading Dinas Pos Kilat.	Djakarta - Medan - Sibolga.	
Pembangunan trajek baru Dinas Pos Kilat.	Medan - Bindjai - Langsa.	
Pembangunan Dinas Pos Ambulance/Dinas Pos Keliling.	Medan.	
Pelajanan Pos dipedesaan/ pedalaman.	Tersebar.	
Perluasan/penjempurnaan Dinas Giro dan Tjek.	Medan.	
Pembangunan hubungan telepon lokal.	Medan.	
Peningkatan hubungan djarak djauh telekom.	Medan - Djakarta.	
Perluasan telegraph dan telex dengan HF Radio dan VHF.	Medan - Belawan. Medan - Malaysia.	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA.		
Peningkatan pendidikan Tehnik dan Kedjuruan.	Tersebar.	Didaerah produksi.

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Pembinaan Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara terutama untuk Fakultas Pertanian, Kedokteran Hewan dan Peternakan, Kedokteran, IKIP.	Medan.	
Pengembangan Kebudajaan Nasional.		
a) Pusat Kesenian,	Medan.	
b) Museum.	Simalungun.	
Pendidikan Adjun Akontan.		
KESEHATAN.		
Pendidikan kesehatan masjarakat (Kesehatan Sekolah, Hygiene dan Sanitasi, untuk pendidikan kesehatan kepada masjarakat).		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat.		
Rehabilitasi dan perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Upgrading Laboratorium Kesehatan.	Medan.	
Pemberantasan penjakit menular.		
Karantina.	Belawan.	
PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL DAN PENJEDIAAN AIR MINUM.		
Perentjanaan Tata Kota.	Medan.	
Perentjanaan Tata Daerah.		
Bimbingan dan Pembinaan.		
Bimbingan Sosial	Medan.	

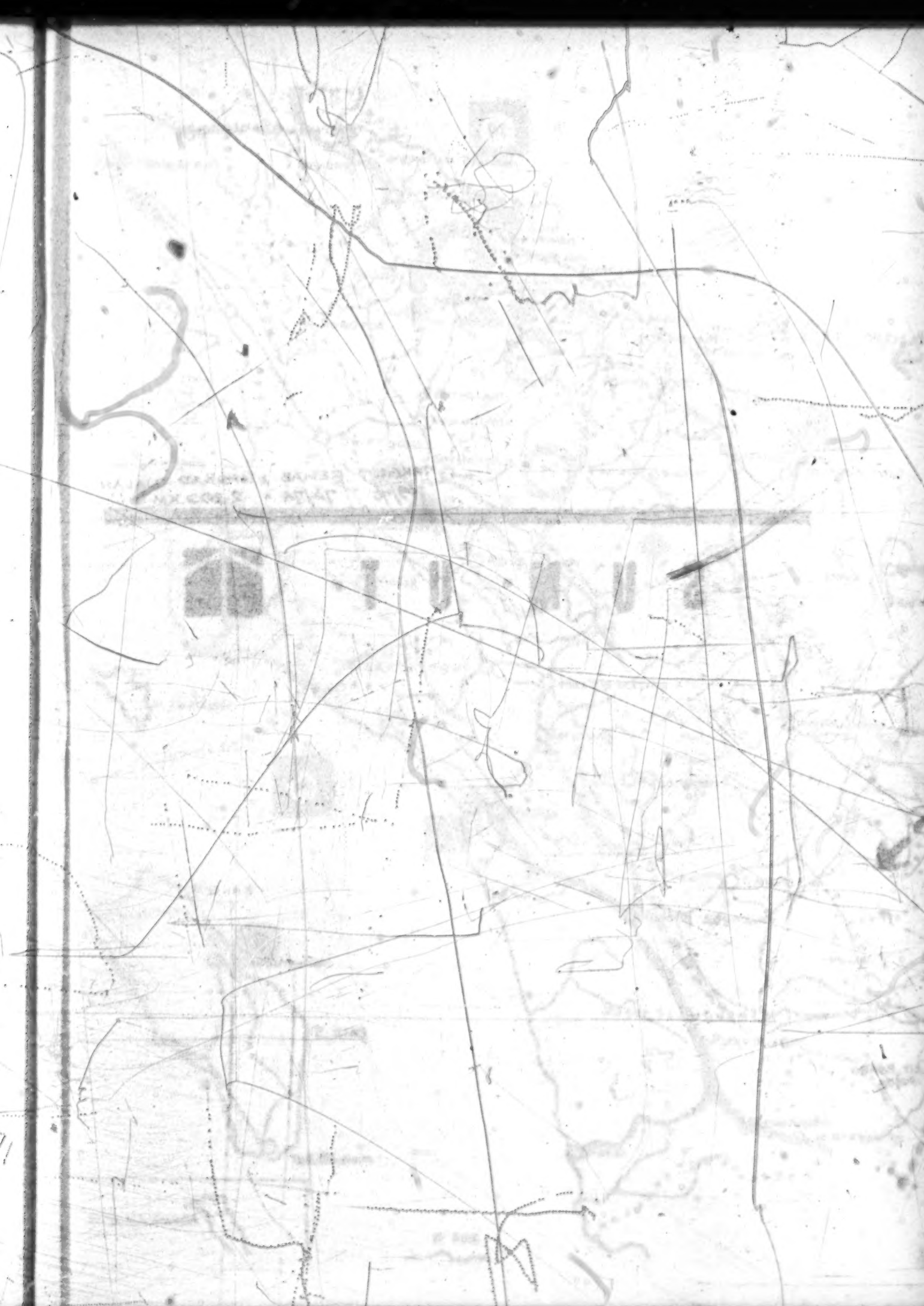

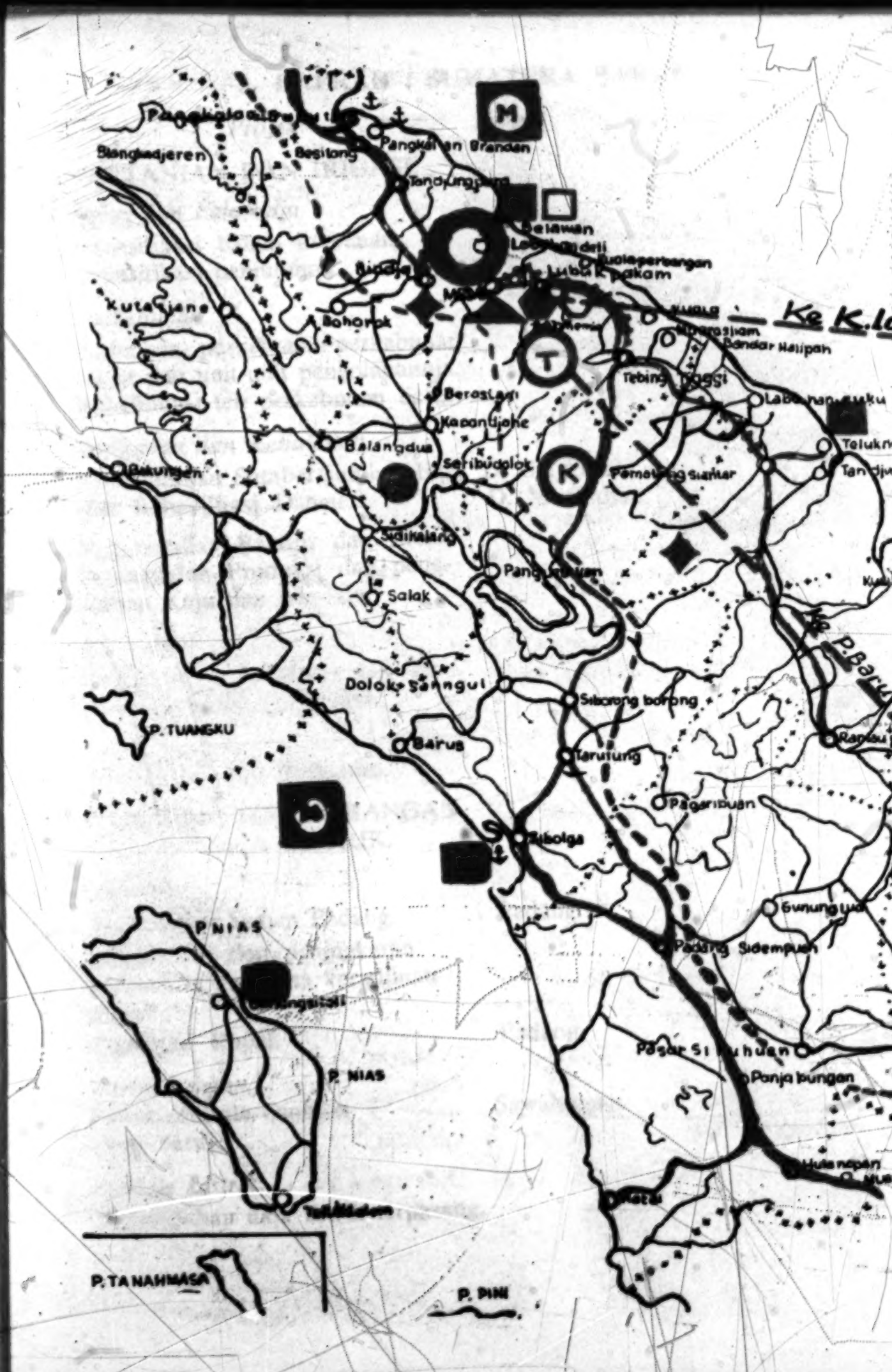

Blangkadjeren
Besitong
Pangkalan Brandan
Tandjungpura
Belawan
Kuala perbangan
Lubuk pakam
Kutatjane
Bohorok
Ke K.la
Bandar Halipan
Tebing Tinggi
Berastagi
Kapandjahe
Balangdua
Seribudolok
Pematang Siantar
Telukn
Bakungen
Sidikalang
Salak
Dolok Sanggul
Siborong borong
P. TUANGKU
Barus
Tarutung
Pagaribuan
Sibolga
Gunung Lua
Padang Sidempuan
P. NIAS
P. NIAS
Pasar Si Puhuan
Panja bungan
Hulanopan
P. TANAHMASA
P. PINI

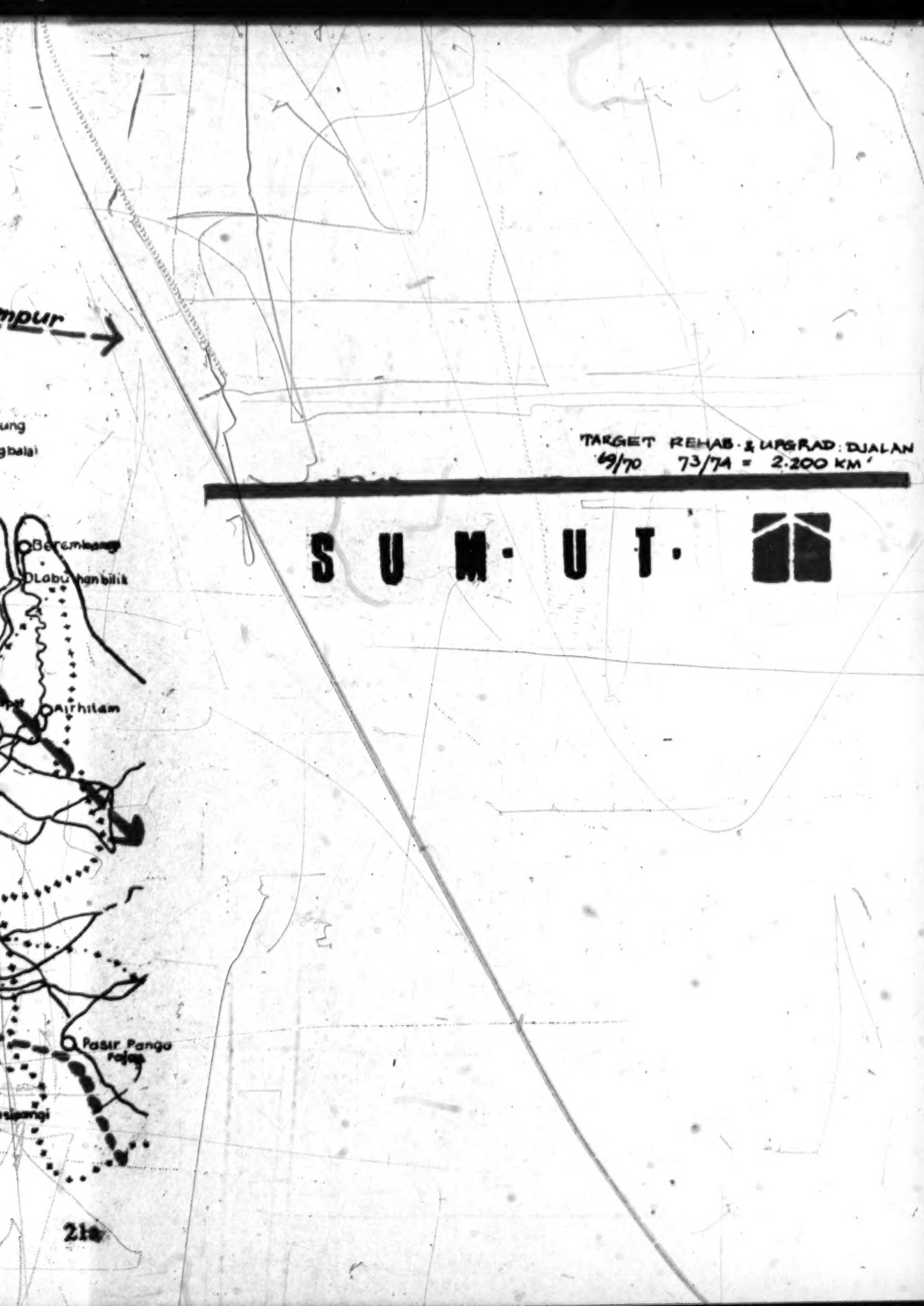
TARGET REHAB. & UPGRAD. JALAN
69/70 73/74 = 2.200 KM'
S U M · U T ·
Labuhanbilik
Airhitam
Pasir Pangaraian

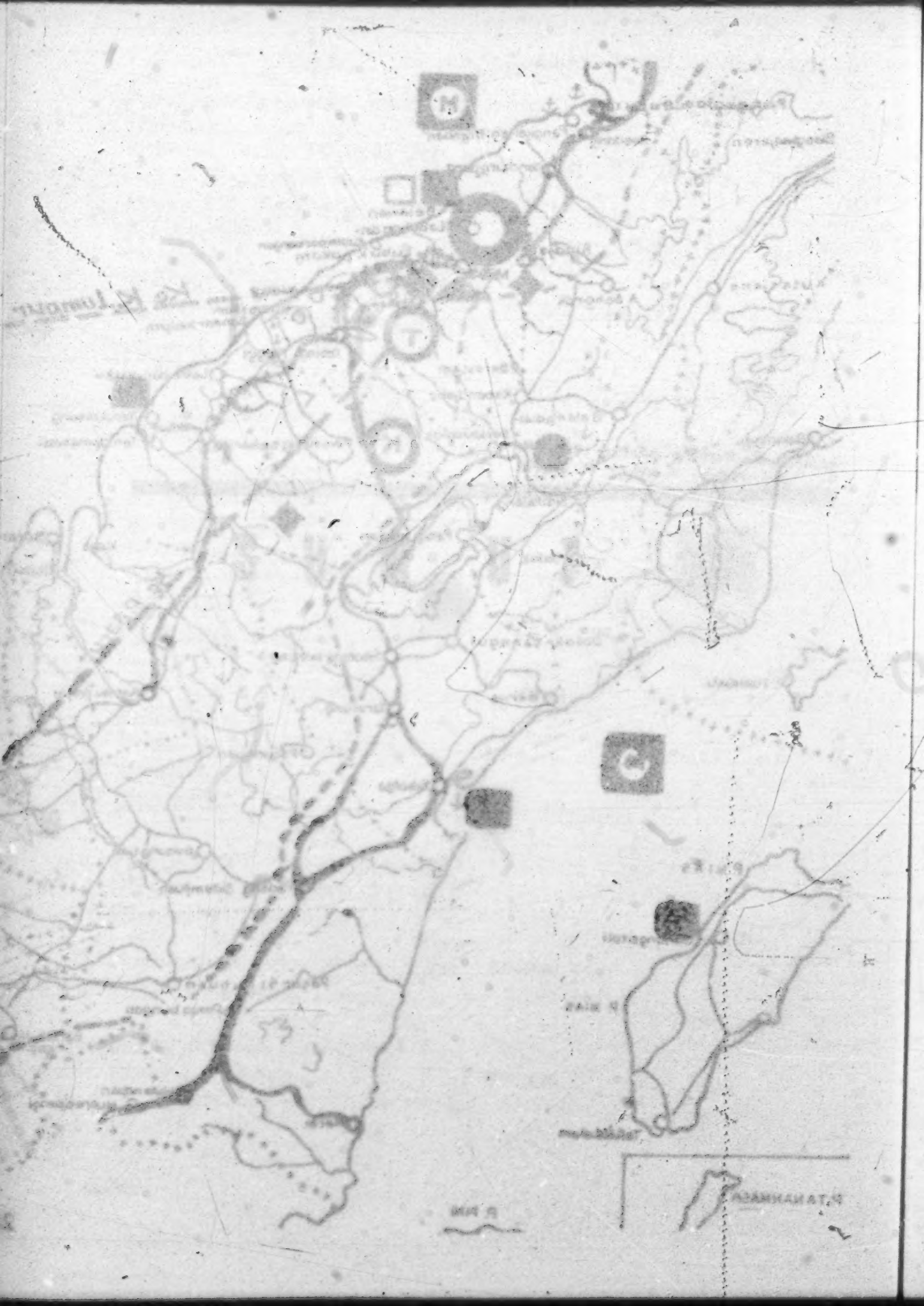

3. DAERAH : SUMATERA BARAT

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI.		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan.		
Intensifikasi penjuluhan.		
Perkebunan.		
Perbaikan perkebunan-perkebunan rakjat dan unit-unit pengolahannja.		
Rehabilitasi teh perkebunan besar.		
Perikanan dan Kehutanan.		
Pemeliharaan Sumber-sumber Ikan dan Rehabilitasi Danau.	D. Singkarak. D. Manindjau.	
Pengendalian Bandjir dan Erosi.		Reboisasi.
Peningkatan Produksi dan pengolahan Kaju dan lain-lain.		
Peternakan.		
Pengamanan, penelitian dan bimbingan massaal peternakan.		
Irigasi.		
Rehabilitasi dan Perluasan.		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK.		
Industri.		
Rehabilitasi Semen Padang.	Padang.	
Rehabilitasi dan peningkatan Industri ringan serta keradjinan rakjat.		
Galangan Kapal.	Padang.	
Pertambangan.		
Power-centrale Ombilin (batu-bara).	Sawahlunto.	Penjelesaian dan penggunaan.
Tenaga Listrik.		
Penambahan daja listrik terpasang.		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
P.L.T.A. Batang Agam.	Batang Agam.	
PERHUBUNGAN.		
Perhubungan Darat.		
Rehabilitasi/upgrading djalan-djalan/djembatan-djembatan. Rehabiiitasi/upgrading Sinjal, telekomunikasi dan elektronika kereta-api.		Pada djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu.
Workshop untuk Rehabilitasi/ upgrading djalan.	Padang.	
Perhubungan Udara.		
Upgrading lapangan udara.	Padang.	
Rehabilitasi/upgrading dan pemasangan telekomunikasi udara serta navigasional aid.		
Elektrifikasi lapangan terbang dan fasilitas-fasilitas Pemadam Kebakaran.		
Stasiun Meteorologi.	Padang.	
Perhubungan Laut.		
Pelabuhan dan fasilitas-fasilitasnja.	Padang.	Rehabilitasi/penambahan kade, gudang, fasilitas penjediaan air, listrik dan alat bongkar muat.
Penerangan Pantai dan Perambuan.	Padang.	
Pos dan Telekom.		
Upgrading Dinas Pos Kilat.	Djakarta - Padang - Bukittinggi - Pajakumbuh.	
Penambahan/pembangunan trajek baru Dinas Pos Kilat.	Djakarta - Padang.	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Dinas Pos Keliling.	Padang - Bukittinggi.	
Pelajanan Pos Pedesaan/ Pedalaman.		Tersebar didaerah-daerah.
Peningkatan Hubungan djarak djauh telekom.	Padang - Djakarta.	
	Padang/Pakanbaru melalui Bukittinggi.	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA.		
Peningkatan pendidikan Tehnik dan Kedjuruan.		
Pembinaan Perguruan Tinggi : Universitas Andalas terutama untuk Fakultas Pertanian dan Kedokteran.	Padang.	
Pengembangan Kebudajaan Nasional (Konservatori Karawitan).	Padang Pandjang.	
Pendidikan Guru Agama.		
KESEHATAN.		
Kesehatan Sekolah.		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat.		
Rehabilitasi dan perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.	Padang.	
Pembangunan R.S.U.P.	Padang.	Landjutan.
Pemberantasan penjakit menular.		
PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL DAN PENJEDIAAN AIR MINUM.		
Pemasjarakatan Suku-suku.		

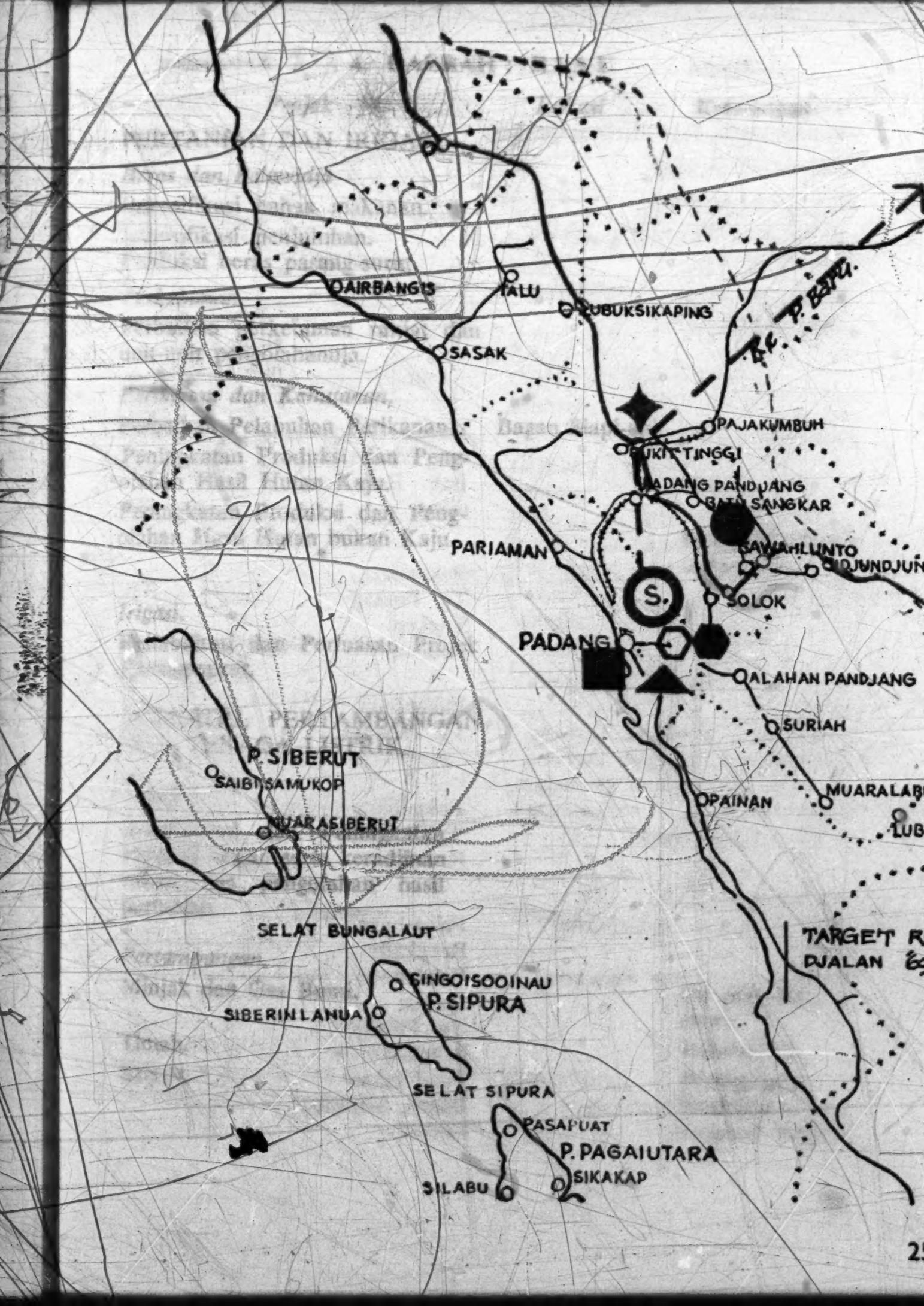
AIRBANGIS
TALU
SUBUKSIKAPING
P. BATU
SASAK
PAJAKUMBUH
BUKITTINGGI
PADANG PANDJANG
BATUSANGKAR
PARIAMAN
SAWAHLUNTO
SIDJUNDJUN
S.
SOLOK
PADANG
ALAHAN PANDJANG
SURIAH
P. SIBERUT
SAIBISAMUKOP
MUARASIBERUT
PAINAN
MUARALAB
LUB
SELAT BUNGALAUT
TARGET R
DJALAN
SINGOISOOINAU
P. SIPURA
SIBERINLANUA
SELAT SIPURA
PASAPUAT
P. PAGAIUTARA
SIKAKAP
SILABU
25

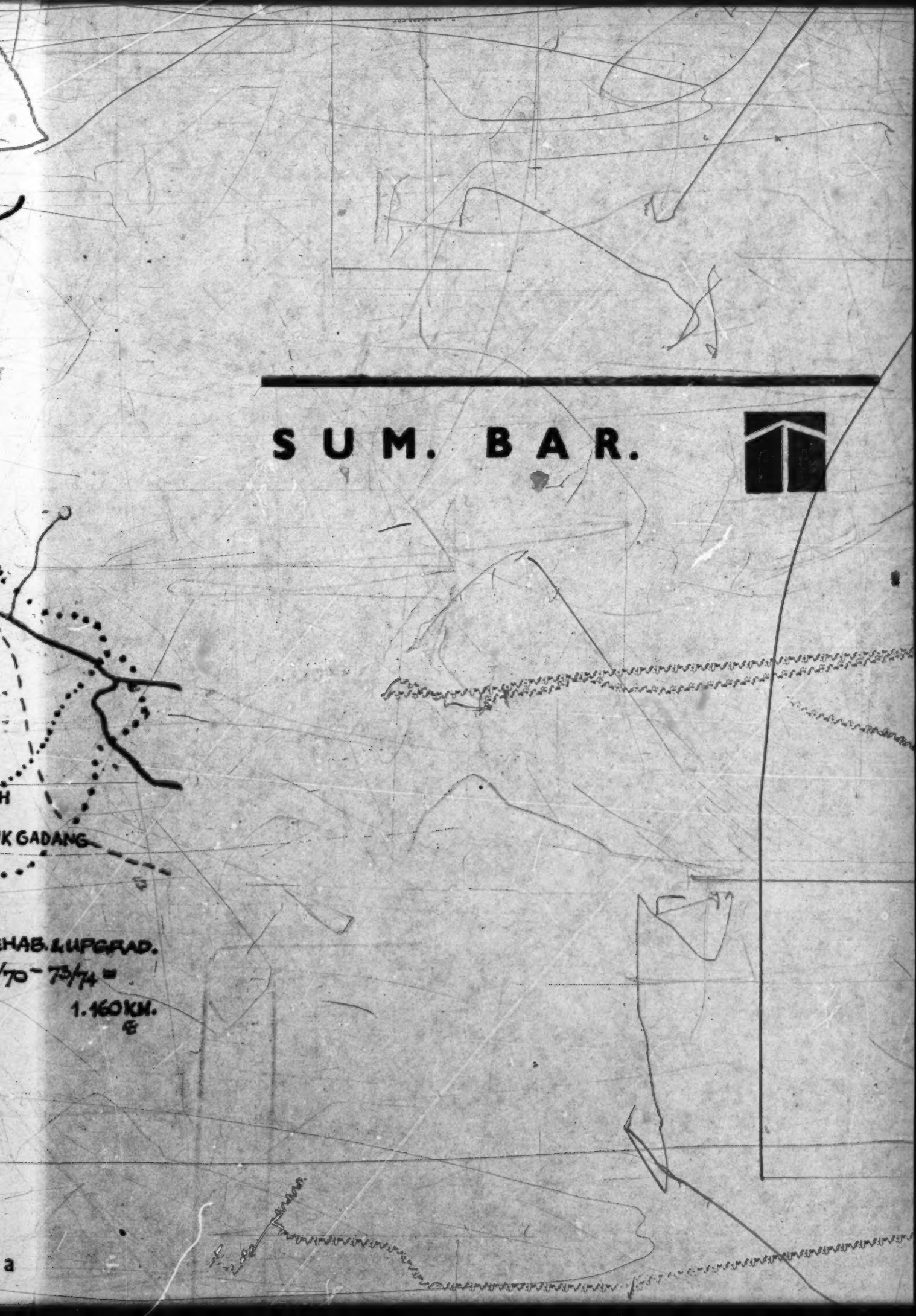
SUM. BAR.
H
K GADANG
HAB. & UPGRAD.
/70 - 73/74 =
1.160 KM.
a

4. DAERAH : RIAU

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI.		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan.		
Intensifikasi penjuluhan.		
Produksi beras pasang-surut.		
Perkebunan.		
Perbaikan perkebunan rakjat dan unit-unit pengolahannja.		
Perikanan dan Kehutanan.		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan.	Bagan Siapi-api.	
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan Kaju.		
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kaju.		Produksi Pengolahan rotan.
Irigasi.		
Rehabilitasi dan Perluasan Projek Pasang-surut.		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK.		
Industri.		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri ringan serta keradjinan rakjat dan pengolahan hasil pertanian.		
Pertambangan.		
Minjak dan Gas Bumi.		On dan off-shore.
Timah.		Rehabilitasi.
Bauxit.		Peningkatan Produksi + Investasi baru

Projek	Lokasi	Keterangan
Tenaga Listrik.		
Pertambahan daja listrik terpasang.		
PERHUBUNGAN.		
Perhubungan Darat.		
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan djembatan.		
Workshop untuk Rehabilitasi/ Upgrading djalan.	Riau.	Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu.
Djembatan baru.	Danau Bangkuang, Muara Mahat, Batu andjing.	
Perhubungan Udara.		
Telekomunikasi Udara dan navigational aid.	Pakanbaru Tg. Pinang Singkep Rengat.	
Upgrading landasan lapangan Terbang.	Pakanbaru	
Rehabilitasi lapangan Terbang	Tg. Pinang	
Elektrifikasi lapangan Terbang dan fasilitas-fasilitas pemadam kebakaran.	Pakanbaru	
Stasiun meteorologi.	Tg. Pinang Rengat	
Perhubungan Laut.		
Armada pantai (modernisasi perahu rakjat).	Pakanbaru/ Bengkalis	
Fasilitas Keamanan Pelajaran telekom/pelajaran.	Pakanbaru Dumai Tg. Pinang Bengkalis Tembilahan	
perambuan dan penerangan pantai.	Bagan Siapi-api Dumai	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Terminal dan Fasilitas Angkutan Sungai.	Siak, Indragiri	
Pos dan Telekomunikasi.		
Pembangunan trajek baru Dinas Pos Kilat.	Riau - Pakanbaru - Pajakumbuh.	
Pos Pedesaan dan Pedalaman/ Kantor Pos Tetap.		Tersebar diseluruh daerah.
Telepon lokal.	Riau	
Peningkatan hubungan djauh/ telekom.	Djakarta - Pakanbaru.	
Hubungan djarak djauh dengan :		
VHF Radio/micro wave	Djakarta - Palembang.	
3/12 Channel open wire Carrier VHF Radio	Padang - Pakanbaru melalui Bukittinggi.	
Tropo scatter	Pakanbaru - Djambi.	
Perbaikan hubungan Telegraf & Telex.	Pakanbaru - Djakarta.	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA.		
Peningkatan pendidikan Tehnik dan Kedjuruan.		
Pembinaan Perguruan Tinggi Universitas Riau terutama Fakultas Kehutanan.	Pakanbaru.	
Pendidikan Pertanian.		
Pendidikan Perikanan.	Dumai.	
KESEHATAN.		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat.		
Rehabilitasi dan perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pembangunan R.S.U.P.	Pakanbaru.	
Pemberantasan penjakit menular.		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL DAN PENJEDIAAN AIR MINUM.		
Pemasjarakatan Suku-suku Terasing.		

TARGET REHAB & UPGRAD. DJALAN
1969/70 – 73/74 600KM

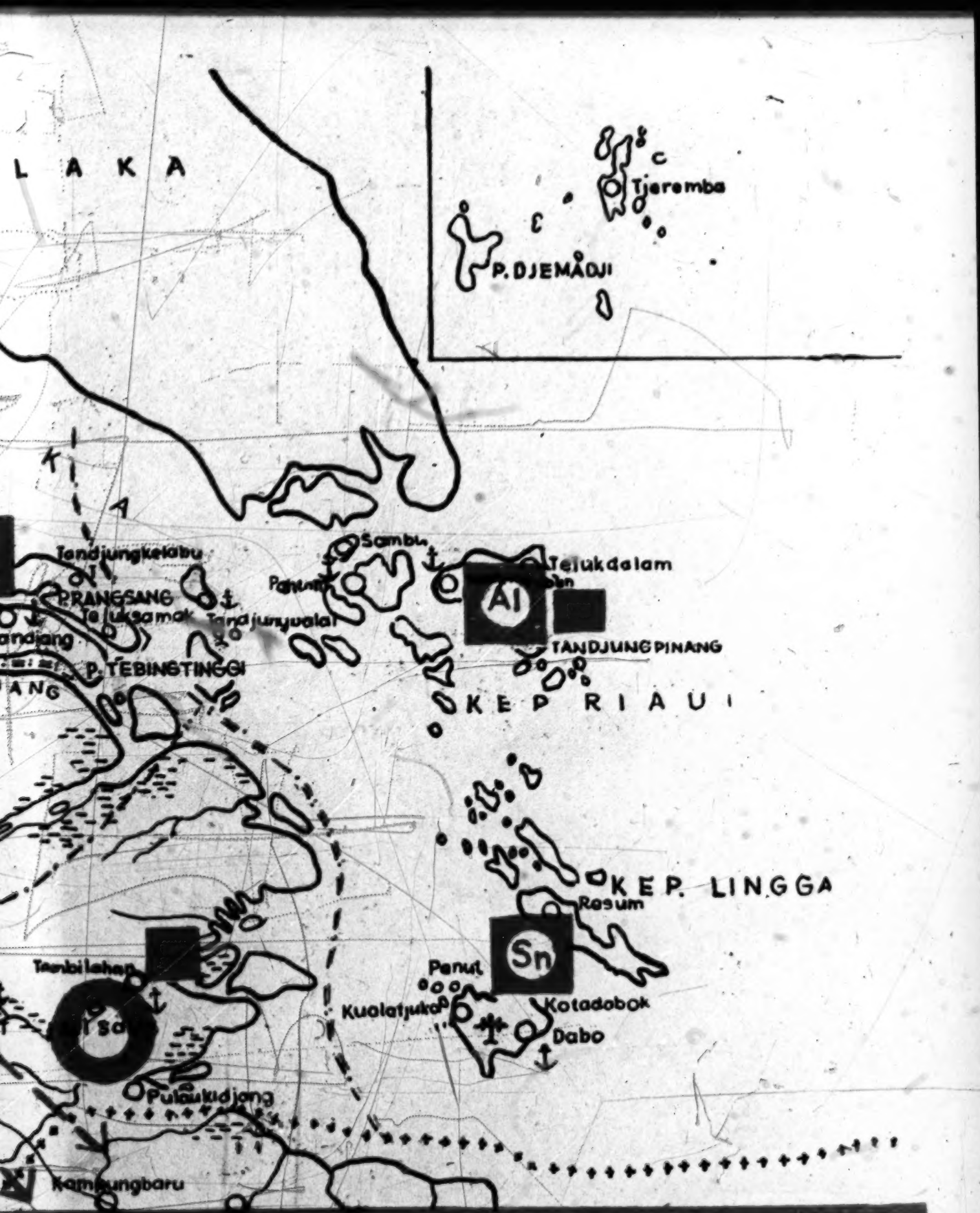
L A K A
Tjeremba
P. DJEMADJI
Tandjungkelabu
PRANGSANG
Teluksamak
Tandjunjualai
Sambu
Teluk dalam
Al
TANDJUNG PINANG
P. TEBINGTINGGI
KEP RIAU I
KEP. LINGGA
Resum
Sn
Tembilahan
Penuti
Kuala tjuka
Kotadobok
Dabo
Pulaukidjang
Kampungbaru

R I A U

5. DAERAH : DJAMBI

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI.		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan.		
Intensifikasi penjuluhan.		
Produksi beras pasang-surut.		
Perkebunan.		
Perbaikan perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja.		
Pabrik Crumb Rubber Karet Rakjat.	Muara Bunga.	
Perikanan dan Kehutanan.		
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Kaju.		
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kaju.		Produksi dan pengolahan rotan.
Irigasi.		
Rehabilitasi dan Perluasan Projek Pasang-Surut.		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK.		
Industri.		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri ringan serta keradjinan Rakjat dan pengolahan hasil pertanian.		
Pertambangan.		
Minjak dan Gas Bumi.	Djambi pantai.	Penanaman modal asing.
Bauksit	Bagian Timur	Eksplorasi.
Tenaga Listrik.		
Penambahan daja listrik terpasang.		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERHUBUNGAN.		
Perhubungan Darat.		
Rehabilitasi/upgrading djalan dan djembatan.	Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu.	
Workshop untuk Rehabilitasi/Upgrading djalan.	Djambi.	
Djembatan Timbang.	Pada djalan-djalan Negara/Propinsi.	
Perhubungan Udara.		
Rehabilitasi/upgrading/pemasangan telekomunikasi udara navigational aid, elektrifikasi lapangan terbang dan fasilitas pemadam kebakaran.	Djambi.	
Rehabilitasi/Upgrading lapangan udara	Djambi.	
Stasiun Meteorologi	Djambi.	
Perhubungan Laut.		
Rehabilitasi/penambahan kade, gudang, fasilitas air, listrik dan alat bongkar muat.	Djambi.	
Pengerukan backlog lumpur.	Djambi.	
Terminal dan fasilitas-fasilitasnja untuk angkutan sungai.	Batanghari.	
Rehabilitasi/Replacement/Penambahan Telekom Pelajaran.	Kuala Tungkal.	
Pos dan Telekomunikasi.		
Pelajanan Pos dipedesaan	Tersebar diseluruh daerah.	
Penambahan Telepon lokal.	Djambi.	
Hubungan tropo seatter.	Pakanbaru-Djambi	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA.		
Peningkatan pendidikan Tehnik dan Kedjuruan.		
Pembinaan Perguruan Tinggi. Universitas Telenaipura, terutama untuk Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan.	Djambi.	
KESEHATAN.		
Kesehatan Sekolah.		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat.		
Rehabilitasi dan perluasan Balai Pengobatan dan BKIA.		
Pembangunan R.S.U.P.	Djambi.	Pembangunan landjutan.
Pemberantasan penjakit menular		
PERUMAHAN DAN KESEDJAHTERAAN SOSIAL.		
Pembinaan Perubahan Sosial.		
Pemasjarakatan Suku-suku Terasing.	Djambi.	

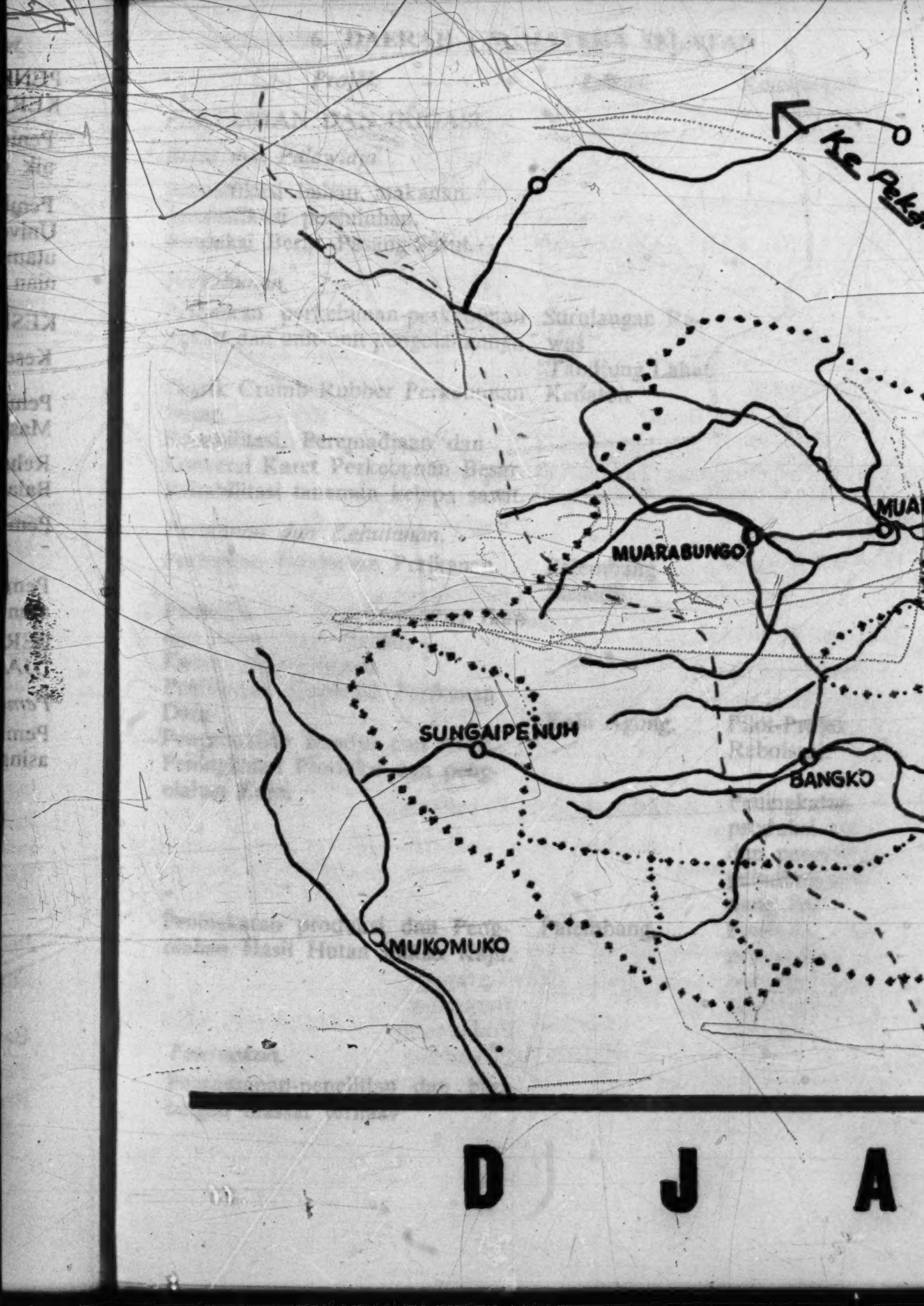
Ke Pekan
MUARABUNGO
SUNGAIPENUH
BANGKO
MUKOMUKO
D J A

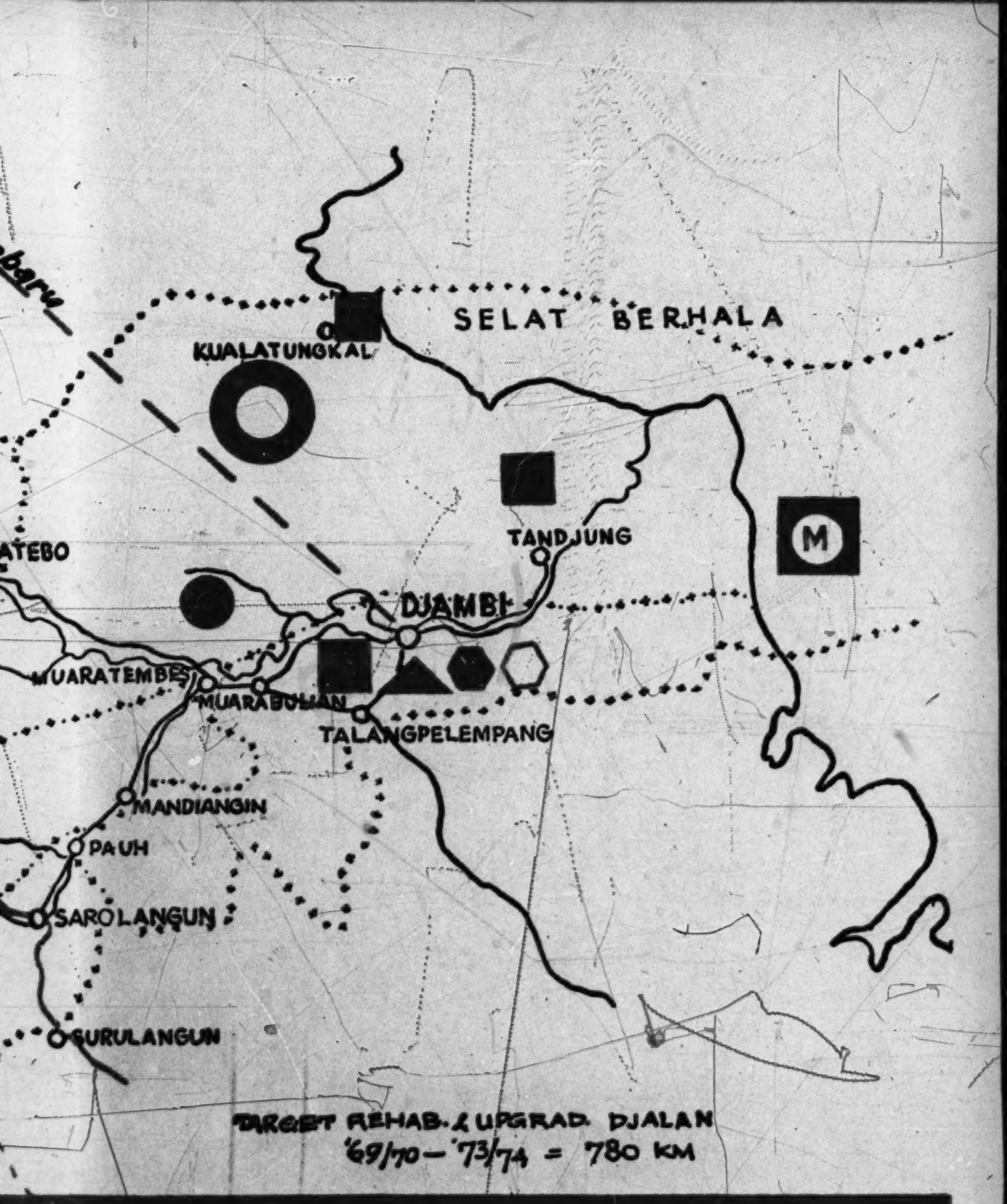
SELAT BERHALA
KUALATUNGKAL
TANDJUNG
M
DJAMBI
MUARATEMBESI
MUARABULIAN
TALANGPELEMPANG
MANDIANGIN
PAUH
SAROLANGUN
SURULANGUN
TARGET REHAB. & UPGRAD. DJALAN
'69/70 – '73/74 = 780 KM

M B I

MADRID

6. DAERAH : SUMATERA SELATAN

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI.		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan.		
Intensifikasi penjuluhan.		
Produksi Beras Pasang-Surut.		
Perkebunan.		
Perbaikan perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja.	Surulangan Rawas Tandjung Lahat.	
Pabrik Crumb Rubber Perkebunan Besar.	Kedaton	
Rehabilitasi, Peremadjaan dan Konversi Karet Perkebunan Besar.		
Rehabilitasi tanaman kelapa sawit.		
Perikanan dan Kehutanan.		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan.	Palembang Mesudji.	
Pemeliharaan Sumber-sumber Ikan dan Renabilitasi Danau.		
Kolam Pasang-Surut.		
Pembinaan Koperasi Perikanan Darat.		
Pengendalian Bandjir dan Erosi.	Kaju Agung.	Pilot-Projek, Reboisasi.
Peningkatan Produksi dan pengolahan Kaju.		Peningkatan produksi kaju dan penertiban peladang-peladang liar.
Peningkatan produksi dan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kaju.	Palembang.	Produksi dan pengolahan rotan dan hasil-hasil hutan lainnja.
Peternakan.		
Pengamanan-penelitian dan bimbingan massal ternak.		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Irigasi.		
Rehabilitasi dan perluasan Projek-projek irigasi/pesawahan.	Air Beliti Ogan Kramasan II dan III.	
Projek Pasang-Surut.		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK.		
Industri.		
Perluasan pabrik pupuk "PUSRI".	Palembang.	
Penjelesaian projek pemintalan.		
Pertambangan.		
Minjak dan Gas Bumi.		Explorasi dan exploitasi.
Rehabilitasi Tambang Timah.	Bangka-Biliton	
Rehabilitasi Tambang Batubara.	Tandjung Enim.	
Bauksit	Bagian Timur	Eksplorasi.
Tenaga Listrik.		
P.L.T.U. Palembang.	Palembang.	
PERHUBUNGAN.		
Perhubungan Darat.		
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan djembatan.		Pada djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu.
Workshop untuk Rehabilitasi/ Upgrading djalan.	Palembang	
Djembatan Timbang.		Pada djalan-djalan Negara/Propinsi.
Pembinaan Angkutan dalam kota.	Palembang.	
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan bangunan kereta-api.	Kertapati-Baturadja. Prabumulih-Palembang.	
Rehabilitasi/Upgrading sinjal dan elektronika kereta-api.		

Projek	Lokasi	Keterangan
Perhubungan Udara.		
Rehabilitasi/Upgrading pemasangan baru telekomunikasi udara dan navigational aid, elektrifikasi lapangan terbang dan fasilitas pemadam kebakaran.	Palembang. Pangkalpinang, Tg. Pandan. Palembang.	
Rehabilitasi/Upgrading lapangan terbang.	Palembang.	
Perhubungan Laut.		
Modernisasi perahu-perahu rakjat (armada pantai).	Palembang.	
Fasilitas-fasilitas pelabuhan.	Palembang-Bengkulu-Pangkalbalam.	Rehabilitasi/penambahan kade, gudang, air, listrik dan alat-alat bongkar-muat.
Pengangkatan kerangka kapal.	Palembang-Selat Bangka.	
Pengerukan lumpur.	Sungai Musi-Palembang.	
Rehabilitasi/Penambahan Dock Repair Unit.	Palembang.	
Rehabilitasi/Replacement/Penambahan Telekom Pelajaran.	Palembang-Pangkalbalam.	
Pembangunan terminal dan fasilitas-fasilitas pelajaran sungai.	Sungai Musi.	
Pos dan Telekom.		
Perluasan djaringan Pos Kilat.	Palembang-Kajuagung-Muara Dua.	
Dinas Pos Kereta-api.	Kertapati-Pandjang p.p.	
Pelajanan Pos dipedesaan dan daerah pedalaman.		Tersebar diseluruh daerah.

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Pembangunan hubungan djarak djauh (micro-wave Djawa — Sumatera).	Palembang-Tg. Karang-Djakarta.	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA.		
Peningkatan pendidikan Tehnik dan Kedjuruan.		
Pembinaan Perguruan Tinggi : Universitas Sriwidjaja, terutama Fakultas Pertanian, Tehnik, Kedokteran.	Palembang.	
KESEHATAN.		
Kesehatan Sekolah.		
Pembangunan Pusat Kesehatan Masjarakat.		
Rehabilitasi dan perluasan Balai Pengobatan dan BKIA.		
Pembangunan RSUP.	Palembang.	Penjelesaian.
Upgrading Laboratorium Kesehatan.	Palembang.	
Pemberantasan penjakit menular.		
PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL DAN PENJEDIAAN AIR MINUM.		
Perentjanaan Tata Kota.	Palembang.	

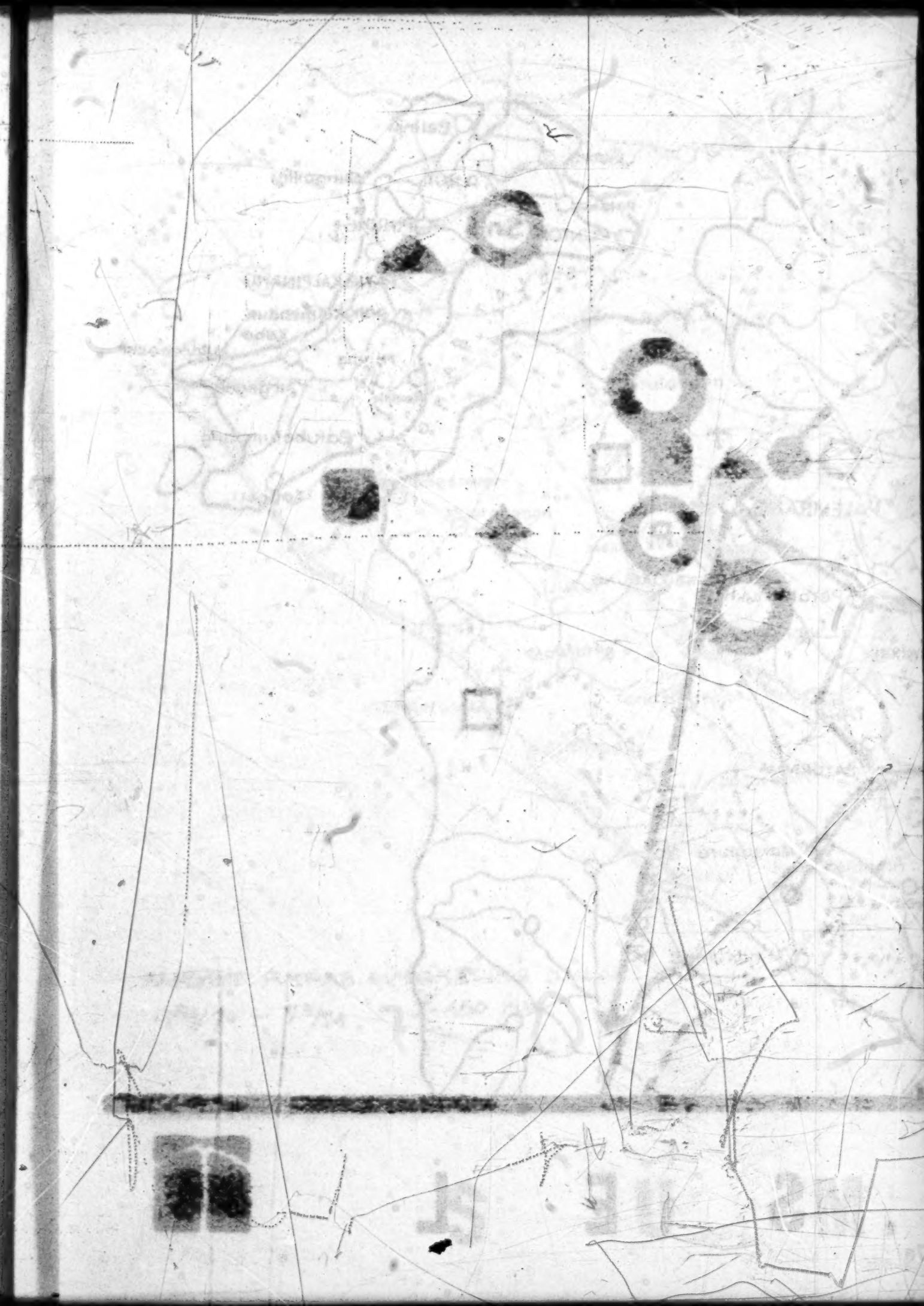

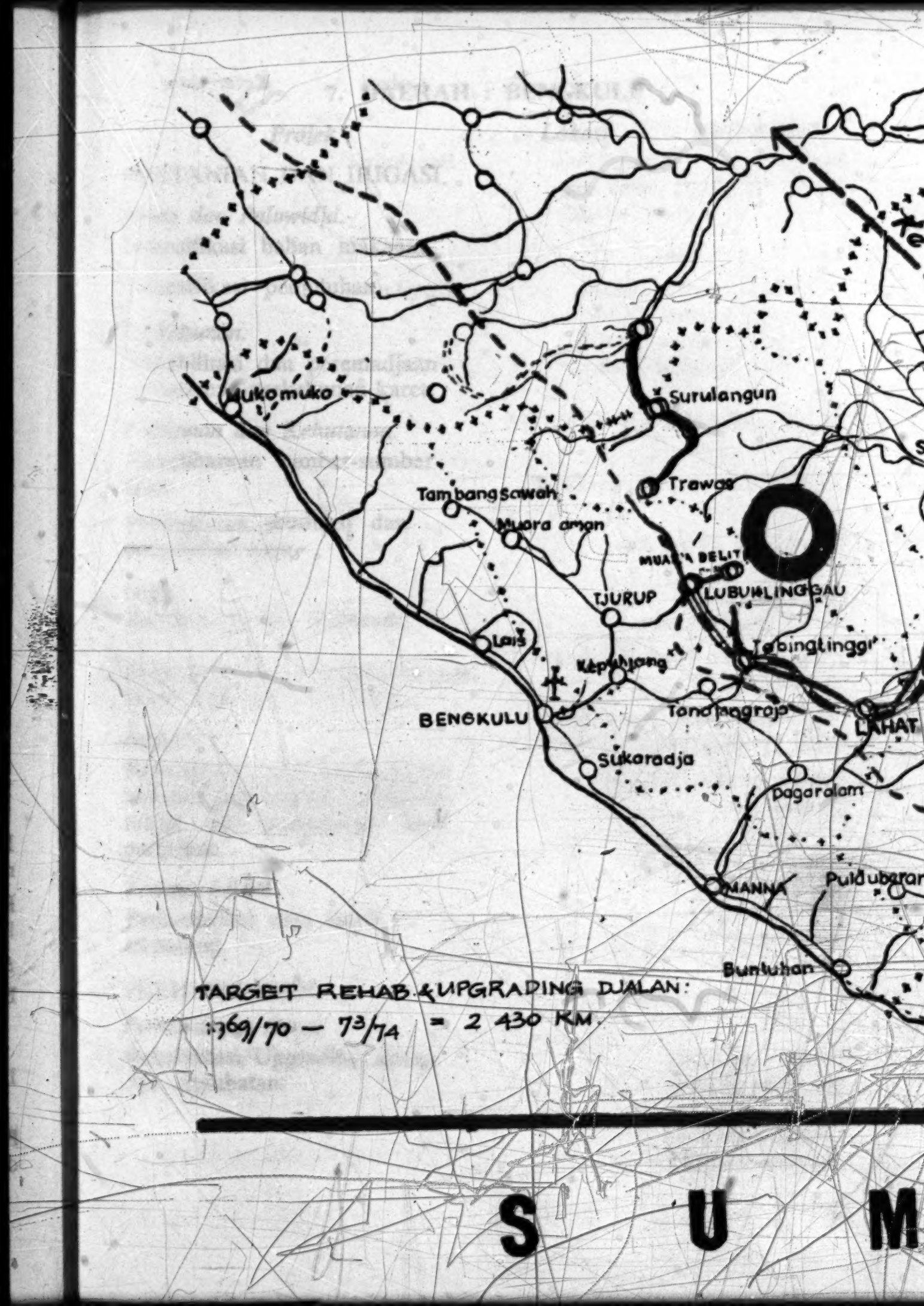
Mukomuko
Surulangun
Tambangsawah
Muara aman
Trawas
TJURUP
LUBUKLINGGAU
Lais
BENGKULU
Tebingtinggi
Tonopagroja
LAHAT
Sukaradja
Pagaralam
MANNA
Bunluhan
TARGET REHAB.&UPGRADING DJALAN:
'69/70 — 73/74 = 2 430 KM.
S U M

Belinju
Djebus
Pelelaan
MUNTOK
Sn
PUDING
Sungailiat
PANGKALPINANG
pangkalmendur
Koba
Lubuk besar
Pajung
Airgegas
Batubetumpang
TOBOALI
Rabo
PALEMBANG
P
KAJUAGUNG
MUARAENIM
BATURADJA
Martapura
Muaradua
Pekanbaru
SELAT BANGKA
S E L

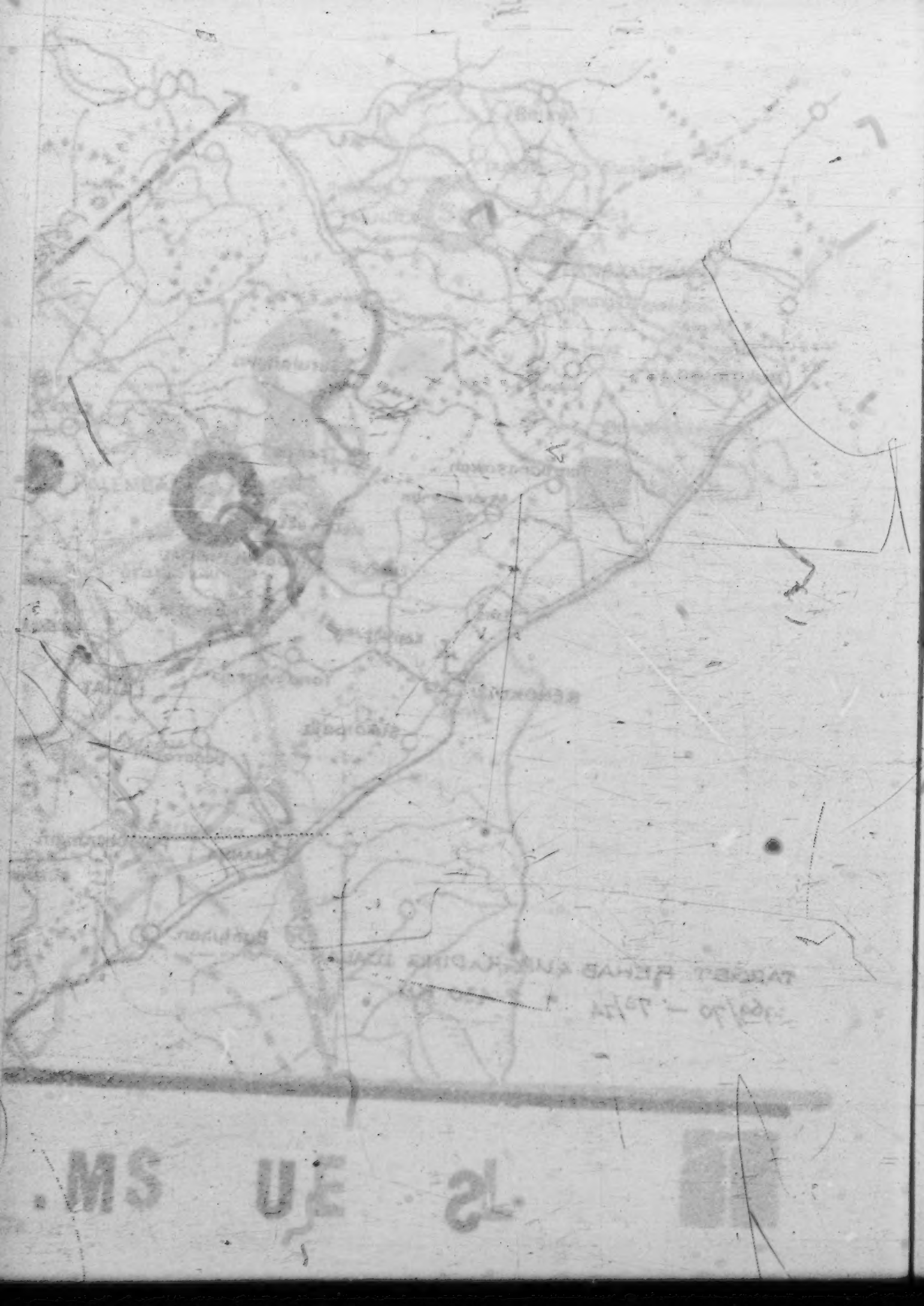

7. DAERAH : BENGKULU

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI.		
Beras dan Palawidja.		
Intensifikasi bahan makanan.		
Intensifikasi penjuluhan.		
Perkebunan.		
Rehabilitasi dan peremadjaan perkebunan-perkebunan karet.		
Perikanan dan Kehutanan.		
Pemeliharaan sumber-sumber ikan.		
Peningkatan produksi dan pengolahan kaju.		
Irigasi.		
Rehabilitasi dan perluasan.		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK.		
Industri.		
Rehabilitasi dan peningkatan industri ringan serta keradjinan rakjat dan pengolahan hasil pertanian.		
Tenaga Listrik.		
Penambahan daja listrik terpasang.		
PERHUBUNGAN.		
Perhubungan Darat.		
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan djembatan.		Tersebar seluruh daerah pada djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu.

Projek	Lokasi	Keterangan
Perhubungan Udara.		
Rehabilitasi/Upgrading/Perluasan landasan udara dan fasilitas pelabuhan udara.	**Bengkulu.**	
Perhubungan Laut.		
Rehabilitasi/penambahan fasilitas Terminal (Kade, Gudang, Fasilitas Listrik, Air, Alat Bongkar-Muat).	**Bengkulu.**	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA.		
Peningkatan pendidikan Tehnik dan Kedjuruan.		
Pendidikan Pertanian.		
KESEHATAN.		
Kesehatan Sekolah.		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat.		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan BKIA.		
Pemberantasan Penjakit menular.		

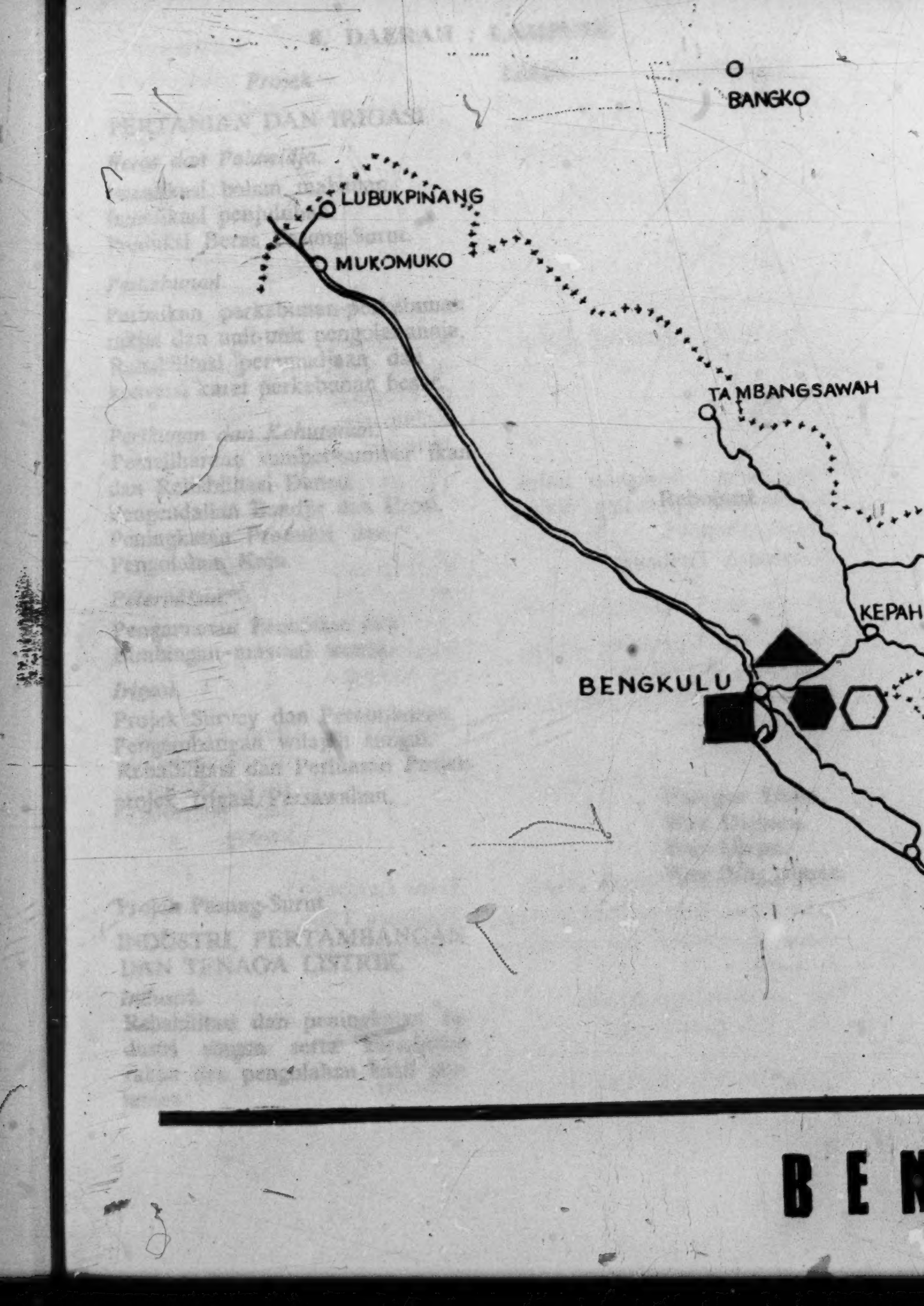
BANGKO
LUBUKPINANG
MUKOMUKO
TAMBANGSAWAH
KEPAH
BENGKULU
BEN

PALEMBANG
LUBUKLINGGAU
TEBINGTINGGI
LAHAT
PAGARALAM
BATURADJA
PASARTALO
MANA
BINTUHAN

G K U L U

8. DAERAH : LAMPUNG

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI.		
Beras dan Palawidja.		
Intenfikasi bahan makanan.		
Intenfikasi penjuluhan.		
Produksi Beras Pasang-Surut.		
Perkebunan.		
Perbaikan perkebunan-perkebunan rakjat dan unit-unit pengolahannja.		
Rehabilitasi peremadjaan dan konversi karet perkebunan besar.		
Perikanan dan Kehutanan.		
Pemeliharaan sumber-sumber ikan dan Rehabilitasi Danau.		
Pengendalian Bandjir dan Erosi.		Reboisasi.
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Kaju.		
Peternakan.		
Pengamanan Penelitian dan Bimbingan massaal ternak.		
Irigasi.		
Projek Survey dan Perentjanaan Pengembangan wilajah sungai.		
Rehabilitasi dan Perluasan Projek-projek Irigasi/Persawahan.		Punggur Utara Way Djepara. Way Umpu. Way Penggubuan.
Projek Pasang-Surut.		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK.		
Industri.		
Rehabilitasi dan peningkatan Industri ringan serta keradjinan rakjat dan pengolahan hasil pertanian.		

Projek	Lokasi	Keterangan
Pertambangan.		
Minjak dan Gas Bumi	Pantai Timur	Off-shore
Tenaga Listrik.		
Penambahan Daja Listrik terpasang.		
PERHUBUNGAN.		
Perhubungan Darat.		
Rehabilitasi/Upgrading djalan.		Pada djalan-djalan Negara/Propinsi/ Kabupaten tertentu.
Penambahan workshop untuk Rehabilitasi/Upgrading djalan Negara/Propinsi.	Tg. Karang.	
Djembatan Timbang.		Pada djalan-djalan Negara/Propinsi.
Rehabilitasi/Upgrading djalan, bangunan, Kereta-api,	Baturadja-Tg. Karang.	
Pelajanan sambungan Kereta-api Djawa-Sumatera.	Pandjang.	Perbaikan/pembangunan dermaga/penghantjuran dan pengerukan karang.
Perhubungan Laut.		
Pengangkatan kerangka kapal.	Teluk Lampung.	
Rehabilitasi/Replacement/penambahan perambuan dan penerangan pantai.	Tandjung Tjina. Tandjung Lajar.	
Pos dan Telekomunikasi.		
Dinas Pos Kereta-api.	Kertapati-Pandjang p.p.	
Pelajanan Pos dipedesaan/ pedalaman.	Tersebar	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Peningkatan Telepon Lokal.	Telukbetung.	
Hubungan djarak djauh (micro-wave).	Djakarta-Tandjungkarang-Palembang.	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA.		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan.		
Pembinaan Perguruan Tinggi, terutama untuk Fakultas-fakultas Pertanian & Tehnik.		
KESEHATAN.		
Kesehatan Sekolah.		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat.		
Rehabilitasi dan perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pembangunan R.S.U.P.	Tandjungkarang	Pembangunan landjutan.

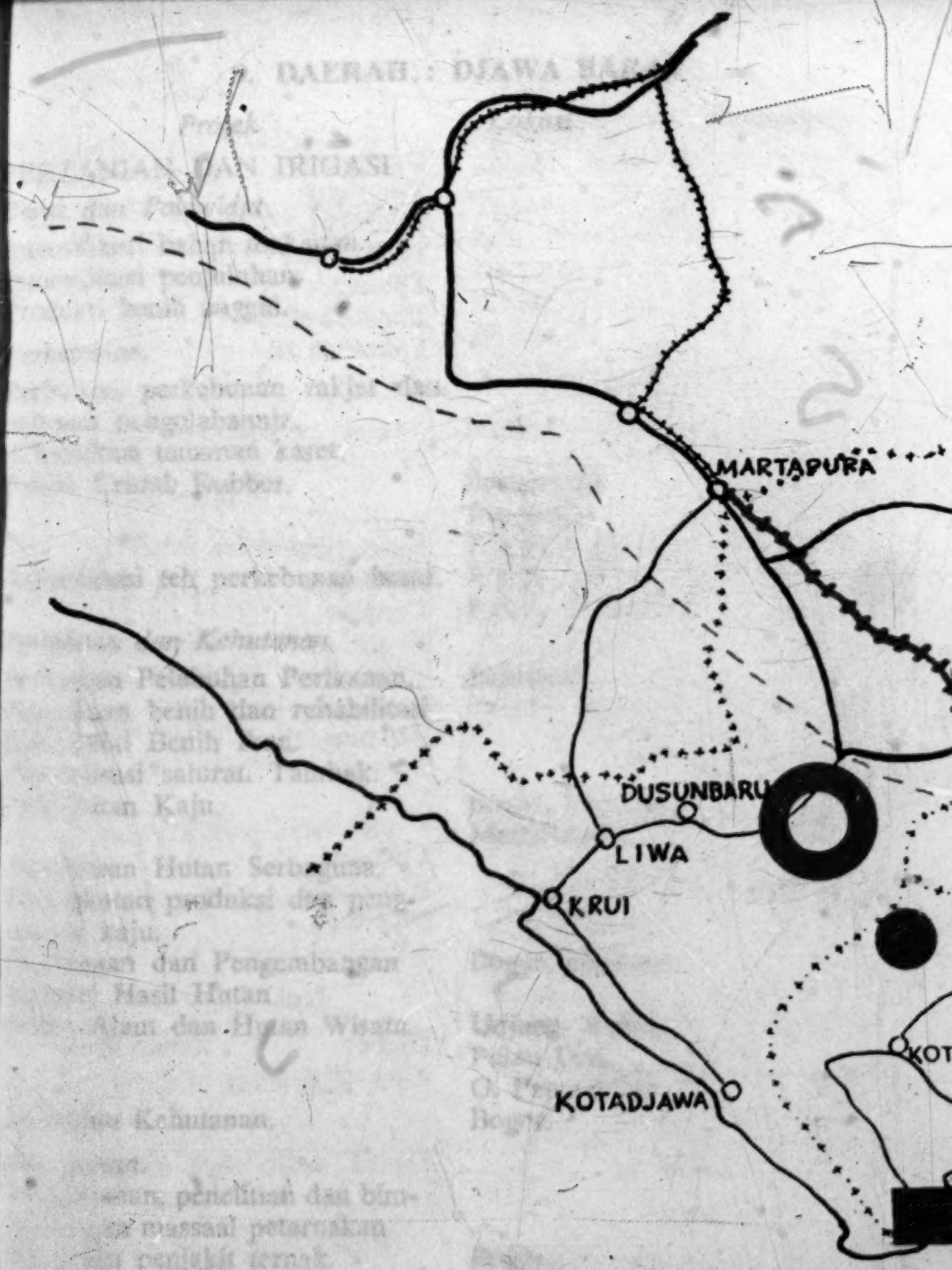

TARGET REHAB. & UPGRAD. DJALAN '69/70 – 73/74

L A M

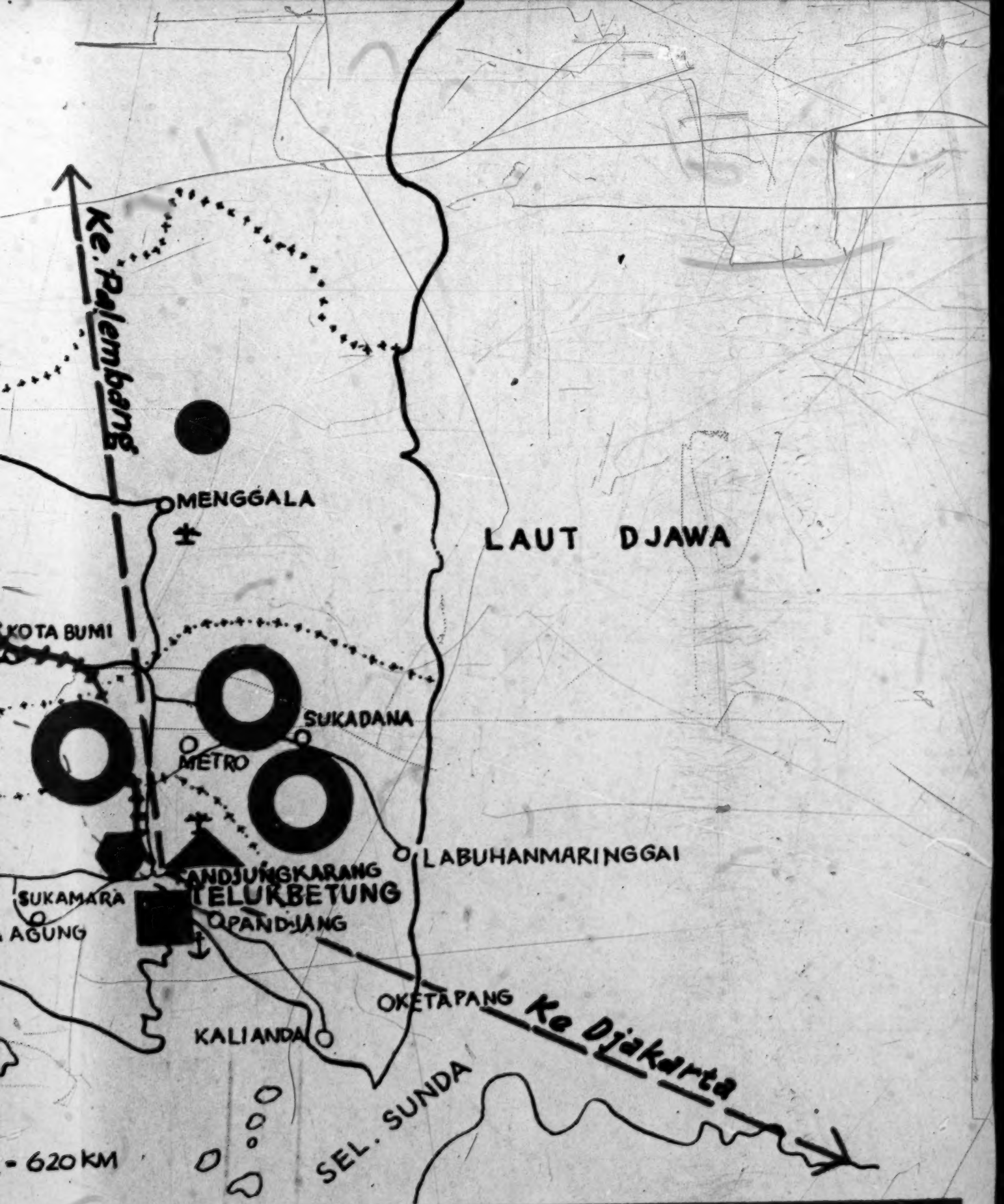
Ke. Palembang
MENGGALA
LAUT DJAWA
KOTA BUMI
SUKADANA
METRO
LABUHANMARINGGAI
ANDJUNGKARANG
TELUKBETUNG
PANDJANG
SUKAMARA
AGUNG
OKETAPANG
Ke Djakarta
KALIANDA
SEL. SUNDA
- 620 KM

P U N G

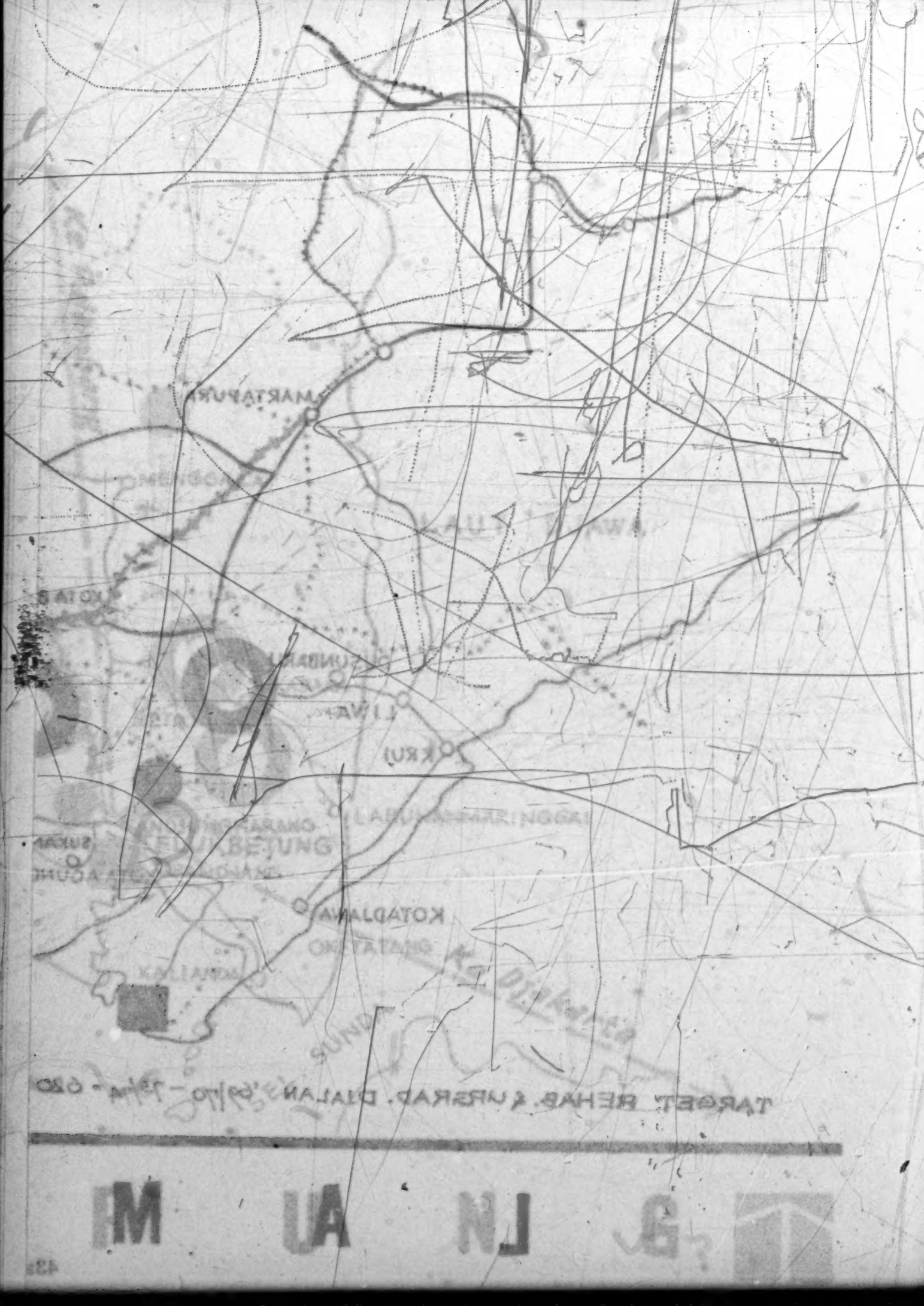
MARTAPURA
KOTA
LIWA
KRUJ
KOTADJAWA
KALIANDA
SUNDA

9. DAERAH : DJAWA BARAT

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan.		
Intensifikasi penjuluhan.		
Produksi benih unggul.		
Perkebunan.		
Perbaikan perkebunan rakjat dan unit-unit pengolahannja.		
Rehabilitasi tanaman karet.		
Pabrik Crumb Rubber.	Sukamadju Pangledjar P.N.P. XIII	
Rehabilitasi teh perkebunan besar.	P.N.P. XII P.N.P. XIII	
Perikanan dan Kehutanan.		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan.	Labuhan.	
Penjediaan benih dan rehabilitasi Balai-balai Benih Ikan.		
Normalisasi saluran Tambak.		
Pembibitan Kaju.	Bogor, Bandung, Madjalengka.	
Pembinaan Hutan Serbaguna.		
Peningkatan produksi dan pengolahan kaju.		
Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan	Bogor, Bandung.	
Suaka Alam dan Hutan Wisata.	Udjung Kulon, Pulau Dua, G. Papandajan.	
Penelitian Kehutanan.	Bogor.	
Peternakan.		
Pengamanan, penelitian dan bimbimbingan massaal peternakan		
Penelitian penjakit ternak.	Bogor.	
Irigasi.		
Projek Survey dan Perentjanaan.		
Pengembangan wilajah sungai.	Tjimanuk. Tjitanduj.	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Rehabilitasi dan perluasan Projek-projek Pengairan.	Djatiluhur. Tjiudjung. Tjidurian. Teluk Láda Tjiletuh. Tjipamingkis. Tjikunten II.	
Pompa air irigasi pedesaan.		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK.		
Industri.		
Rehabilitasi kertas Padalarang.	Padalarang.	
Semen Tjibinong.	Tjibinong.	
Projek Pupuk Tjirebon.	Tjirebon.	
Pabrik Ban.	Bogor.	Perluasan Pabrik Good Year.
Rehabilitasi Pabrik-pabrik Tekstil.		
Projek Peralatan Tekstil.	Bandung	
Pengolahan Ikan.		
Pertambangan.		
Tambang Emas	Tjikotok	
Tambang Belerang	Wanaradja	
Minjak dan Gas Bumi	Off-Shore	
Tenaga Listrik		
Djaringan Transmisi dan Distribusi	Djabar	Rehabilitasi
Penambahan Daja Listrik terpasang		
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan djembatan	Tersebar	Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu.

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Workshop untuk Rehabilitasi/ Upgrading djalan	Bandung Tjirebon	
Rehabilitasi/Upgrading djalan Kereta-api dan Sinjal, Telekomunikasi	Tjikampek-Tjirebon dan pada beberapa lintas lainnja di Exploitasi Barat.	
Perhubungan Laut		
Rehabilitasi/penambahan kade, gudang, fasilitas air, listrik dan alat bongkar-muat	Tjirebon	
Pos dan Telekomunikasi		
Dinas Pos Kilat	Bandung-Djakarta Bandung-Tjirebon	
Dinas Pos Keliling		
Kantor Pos Pedesaan		Tersebar diseluruh daerah.
Lembaga Penelitian Telekomunikasi	Bandung	
Telekomunikasi micro-wave	Djakarta-Bandung-Tjirebon-Semarang.	
Hubungan telepon lokal	Djakarta, Bandung, Tjirebon.	Rehabilitasi dan penambahan.
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi		
a. Universitas Pedjadjaran, terutama :	Bandung	
Fakultas Pertanian Fakultas Perikanan		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Fakultas Peternakan Fakultas Kehutanan		
b. I.T.B., terutama : Fakultas Bio Kimia Fakultas Tehnologi Mineral	Bandung	
c. I.P.B. : Semua Fakultas	Bogor	
d. I.K.I.P. Fakultas Keguruan Ilmu Tehnik	Bandung	
Pengembangan Kebudajaan Nasional : (Konservatori Karawitan)	Bandung	
Akademi Tekstil	Bandung	
Pendidikan Keramik	Bandung	
Pendidikan Penerbangan	Tjurug	
Pendidikan Kereta Api	Bandung	
Pendidikan Pos dan Telkom	Bandung	
Pendidikan Keuangan	Bandung	
Pendidikan Adjun Akuntan	Bandung	
S.K.M.A.	Bogor	
Pusat Pendidikan Keluarga Berentjana	Bandung	
Sekolah Tinggi Kesedjahteraan Sosial	Bandung	
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENTJANA		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Rehabilitasi R.S.U.P.	Bandung	
PERUMAHAN, KESEDJAHTE-RAAN SOSIAL DAN PENJE-DIAAN AIR MINUM.		
Perentjanaan Tata Kota	Bandung	
Perentjanaan Tata Daerah	Bandung	

10. DAERAH : D.C.I, DJAKARTA RAJA

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras - Palawidja		
Intensifikasi Bahan Makanan		
Intensifikasi Penjuluhan		
Perikanan dan Kehutanan		
Intensifikasi Perikanan Laut		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan		
Laboratorium Lembaga Tehnologi Perikanan.		
Penelitian Perikanan.		
Peternakan		
Projek Industri Pengobatan dan Instrumentaria		
I r i g a s i		
Projek Pengendalian Bandjir	Djakarta Raja	
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Perluasan/modernisasi Intirub	Djakarta	
Peningkatan Industri Alat-alat Perikanan	Djakarta	
Rehabilitasi Pabrik-pabrik Tekstil	Djakarta	
Industri Estate	Djakarta	
Tenaga Listrik	Djakarta	
Stasiun Tenaga Uap Tandjung Priok I s/d IV	Tandjung Priok	
Lembaga Masalah Ketenagaan	Djakarta	
P.L.T.G. Djakarta	Djakarta	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Bengkel Ketenagaan	Djakarta	
Djaring Distribusi Gas	Djakarta	Rehabilitasi
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading Djalan & Bangunan Kereta Api	Djakarta — Tjirebon	
Workshop untuk Rehabilitasi/ Upgrading Djalan	Tanggerang	
Rehabilitasi/Upgrading & sinjal, telekomunikasi dan elektronika Kereta Api		
Perhubungan Udara		
Stasiun Meterologi	Djakarta	
Projek Chusus Lapangan Udara	Djakarta/ Kemajoran	
Perhubungan Laut		
Pelabuhan dan fasilitas-fasilitas-nja	Djakarta	
Pengangkatan Kerangka Kapal dan Perambuan	Djakarta	
Pendidikan Pelajaran	Djakarta	
Pos dan Telekomunikasi		
Penjempurnaan Dinas Pos dan Giro Kota	Pasar Baru, Kebajoran Baru, Rawamangun, Pasar Kodja, Grogol.	
Djaringan-djaringan Pos Kilat	Djakarta	
Pos Keliling	Djakarta	
Kabel Tilpon bawah tanah	Djakarta	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar		
Penambahan Pendidikan Kedjuruan pada Sekolah Landjutan Umum.		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Pusat Latihan Pendidikan Kedjuruan	Djakarta	
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Peningkatan Pendidikan Guru		
Pembinaan Perguruan Tinggi	Djakarta	
Universitas Indonesia, terutama untuk Fakultas Tehnik dan Kedokteran ; IKIP djurusan Tehnik		
Pengembangan Kebudajaan Nasional (Pusat Kesenian, Konservatori Karawitan, Museum).	Djakarta	
Peningkatan Kegiatan Olah Raga		
Pendidikan Pertanian, Pendidikan untuk tenaga Pusat Kesehatan Masjarakat, Pendidikan Koperasi, PGA, IAIN, Akademi Pelajaran, Pendidikan Keuangan, Pendidikan Adjun Akuntan		
Akademi Penerangan	Djakarta Raja	
Sekolah Staf Pimpinan Deppen.	Djakarta Raja	
Sekolah Kader Radio	Djakarta Raja	
Penjediaan dan penggunaan tenaga kerdja, (Pusat Latihan Tenaga Kerdja)		
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENTJANA		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat.		
Rehabilitasi dan perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Rehabilitasi R.S.U.P.	Djakarta Raja	
Rehabilitasi R.S.U.	Djakarta Raja	R.S.U. Fatmawati R.S.U. Persahabatan

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Rehabilitasi dan Upgrading Laboratorium Kesehatan		
Persiapan Laboratorium Pusat	Djakarta Raja	
Pembangunan Emergency Hospital	Djakarta Raja	Persiapan
Pemberantasan penjakit menular		
Karantina	Tandjung Priok	
	Kemajoran	
Pengadaan obat-obatan dan alat-alat Kesehatan :	Djakarta Raja	
Peningkatan produksi obat-obatan/alat-alat Kesehatan		
Pusat Latihan Nasional Keluarga Berentjana		
PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL DAN PENJEDIAAN AIR MINUM		
Perentjanaan Tata Kota	Djakarta	

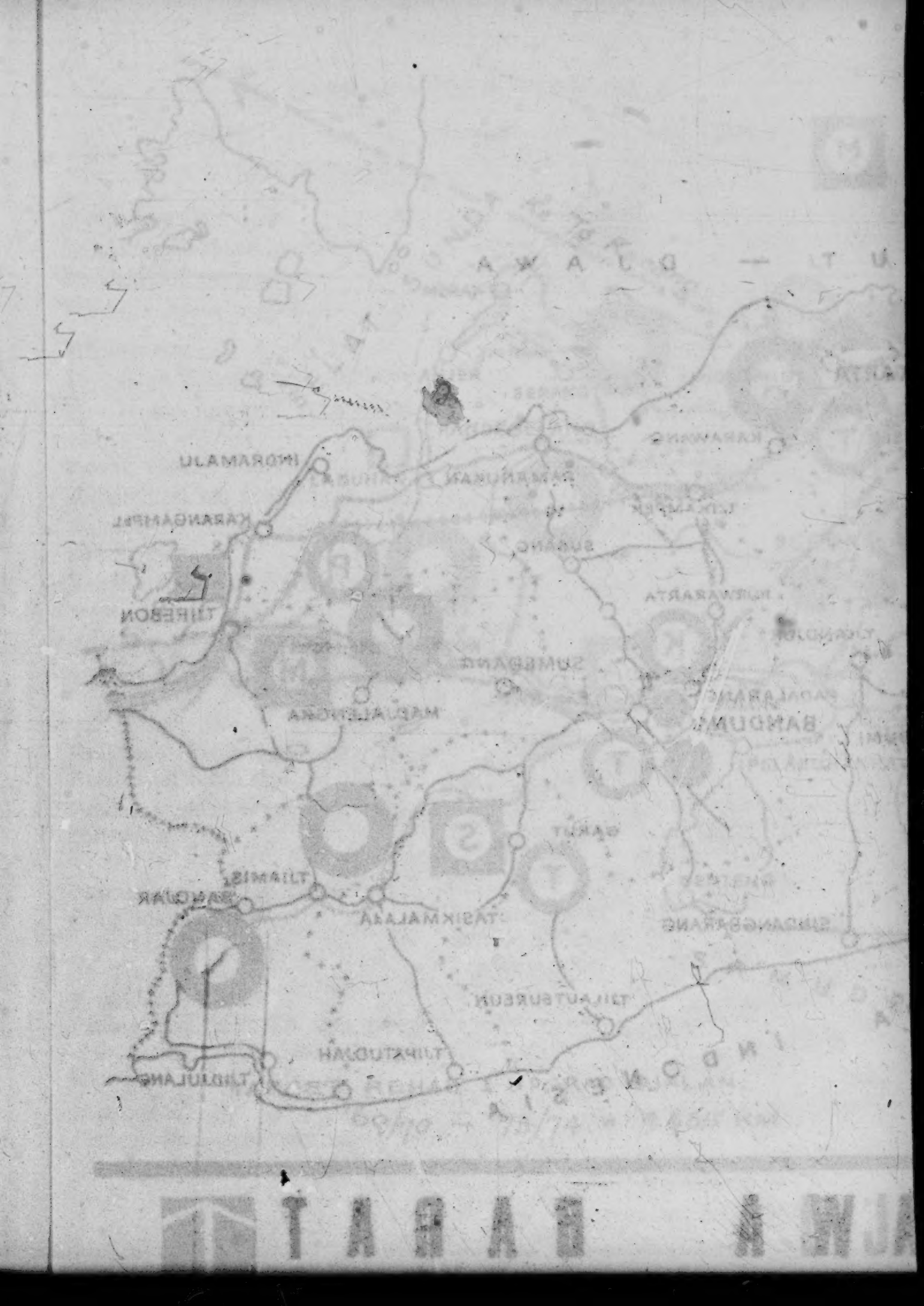

INDONESIA
TIREBON
SUMEDANG
MAJALENGKA
BANDUNG
GARUT
TASIKMALAJA
TJIAMIS
BANDJAR
TJILAUTSUREUN
TJIPATUDJAH
TJIDJULANG

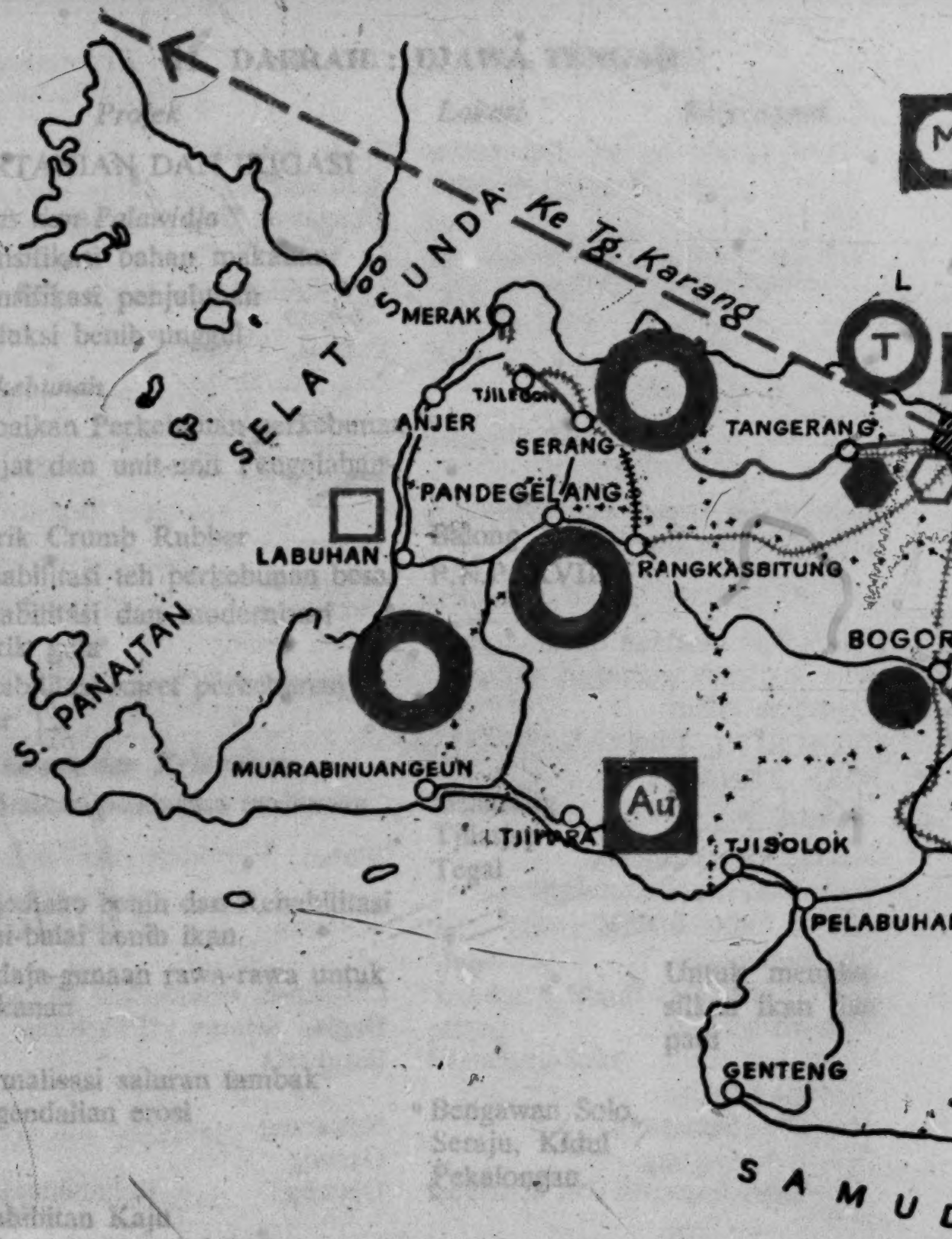

TARGET REHAB. & UPGRAD DJALAN:
'69/70 — '73/74 = 1.865 KM

A U T — D J A W A
DJAKARTA
BEKASI
KARAWANG
PAMANUKAN
INDRAMAJU
TJIKAMPEK
KARANGAMPEL
SUBANG
PURWARARTA
TJIREBON
TJIANDJUR
SUMEDANG
PADALARANG
BANDUNG
MADJALENGKA
SUKABUMI
RATU
GARUT
TJIAMIS
BANDJAR
TASIKMALAJA
SINDANGBARANG
TJILAUTEUREUN
TJIPATUDJAH
TJIDJULANG
E R A
I N D O N E S I A

J A W A B A R A T

11. DAERAH : DJAWA TENGAH

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Produksi benih unggul		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit Pengolahan-nja		
Pabrik Crumb Rubber	Balong	
Rehabilitasi teh perkebunan besar	P.N.P. XVIII	
Rehabilitasi dan modernisasi pabrik gula		
Rehabilitasi karet perkebunan besar		
Perikanan dan Kehutanan		
Perbaikan pelabuhan perikanan	Semarang Tjilatjap Tegal	
Penjediaan benih dan Rehabilitasi Balai-balai benih ikan		
Pendaja-gunaan rawa-rawa untuk perikanan		Untuk mengha-silkan ikan dan padi
Normalisasi saluran tambak		
Pengendalian erosi	Bengawan Solo, Seraju, Kidul Pekalongan.	
Pembibitan Kaju		
Peningkatan produksi dan peng-olahan kaju djati dan kaju-kaju lain		
Peternakan		
Pengamanan, penelitian dan bim-bingan massaal peternakan		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Irigasi		
Projek-projek survey dan perentjanaan pengembangan wilajah sungai	Kedu Selatan Kali Progo Bengawan Solo	
Rehabilitasi dan Perluasan Projek-projek Pengairan	Sempor Tadjum Pemali, Tjomal dan daerah sekitarnja Gambarsari dan Pesanggrahan	
Pompa Air Irigasi Pedesaan		
Pengendalian Bandjir	Bengawan Solo, Selaju, Kidul Pekalongan	
Perbaikan keadaan danau-danau	Rawa Pening	
Projek Penanggulangan akibat Bentjana Alam	Gunung Merapi	
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Pabrik kertas Blabak	Blabak	Rehabilitasi
Rehabilitasi pabrik tekstil		
Projek Super fosfaat	Tjilatjap	Penjelesaian
Pertambangan		
Minjak dan Gas Bumi	Off-shore	
Bauksit	Bagian Selatan Surakarta	Eksplorasi
Tenaga Listrik		
P.L.T.U. Semarang	Semarang	
P.L.T.A. Garung	Garung	
Djaringan transmisi dan distribusi listrik	Djateng	Rehabilitasi
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan djembatan		Tersebar seluruh daerah pada djalan-djalan Negara/Propinsi

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Djembatan Timbang		Pada djalan-djalan Negara/Propinsi
Workshop untuk Rehabilitasi/Upgrading djalan	Semarang Solo	
Rehabilitasi/Upgrading djalan kereta api, sinjal dan telekomunikasi	Tjirebon-Semarang-Surabaja Prupuk-Jogja-Solo.	
Perhubungan Udara		
Upgrading/perpandjangan landasan	Jogjakarta	
Elektrifikasi lapangan	Jogjakarta	
Perhubungan Laut		
Rehabilitasi/penambahan kade, gudang, air, listrik dan alat bongkar-muat	Semarang, Tegal	
Pengangkatan kerangka kapal	Tjilatjap	
Pengerukan backlog lumpur	Semarang	
Rehabilitasi/Replacement/penambahan telekom pelajaran	Semarang	
Pos dan Telekomunikasi		
Dinas pos kilat	Semarang-Ambarawa-Salatiga-Magelang	
Dinas pos ambulance	Semarang-Magelang Semarang-Solo	Termasuk dinas pos keliling dan dinas pos kereta api.
Kantor pos pedesaan		Tersebar seluruh daerah.
Kantor pos bergerak		Beroperasi kedaerah-daerah pedalaman.
Telepon lokal (otomatis)	Semarang	
Micro wave	Djakarta-Bandung Tjirebon-Semarang Surabaja.	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA.		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi: Universitas Diponegoro, terutama Fakultas-fakultas Pertanian dan Tehnologi	Semarang	
Universitas Djenderal Sudirman, untuk Fakultas Peternakan	Purwokerto	
I.K.I.P. Semarang, untuk Fakultas Keguruan Ilmu Exakta	Semarang	
I.K.I.P. Solo, untuk Fakultas Keguruan Ilmu Tehnik	Solo	
Konservatori Karawitan	Solo	
M u s e u m	Solo	
Restorasi Tjandi Borobudur	Magelang	
Pendidikan Guru Agama		
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENTJANA		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Rehabilitasi R.S.U.P.	Semarang	
Rehabilitasi R.S.U.	Klaten	
Rehabilitasi R.S. Mata	Semarang	
Upgrading dengan pembaharuan Laboratorium Kesehatan	Semarang	
Pemberantasan penjakit menular		Terutama penjakit pes di Temanggung, Bojolali dan Wonosobo.
PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL DAN PENJEDIAAN AIR MINUM		
Perentjanaan tata daerah	Semarang	

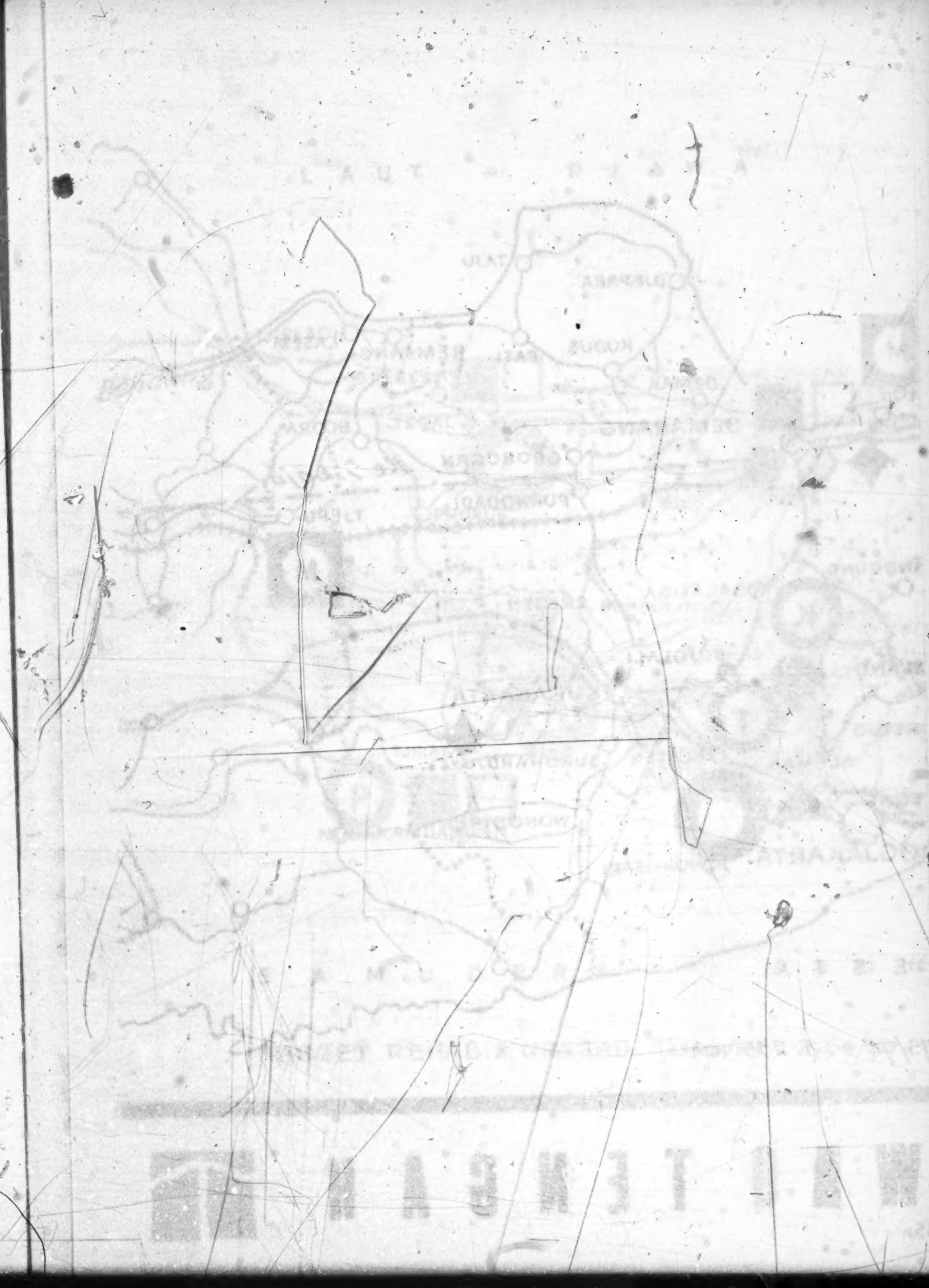

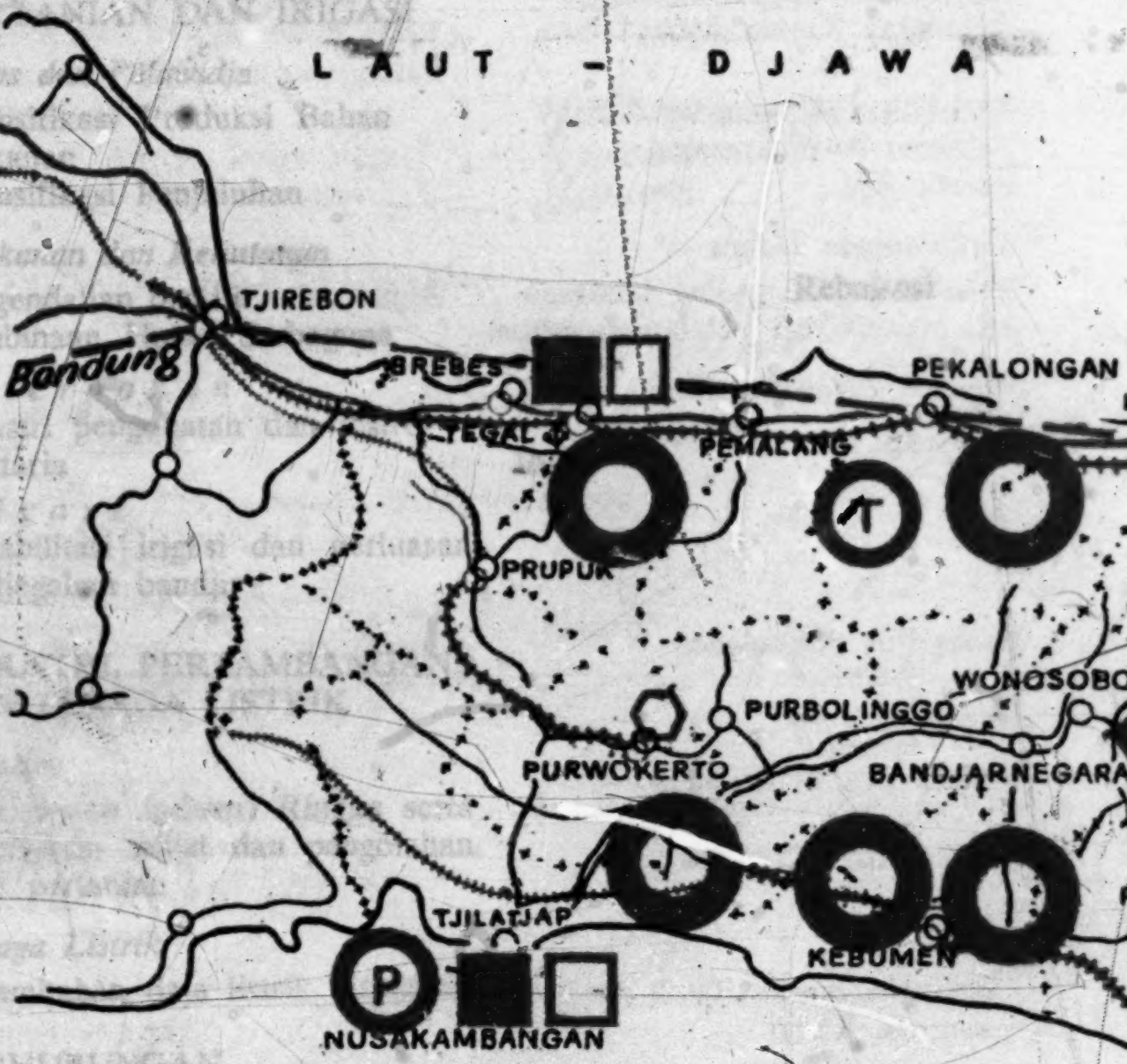

TARGET REHAB. & UPGRAD. DJALAN 1969/

D J

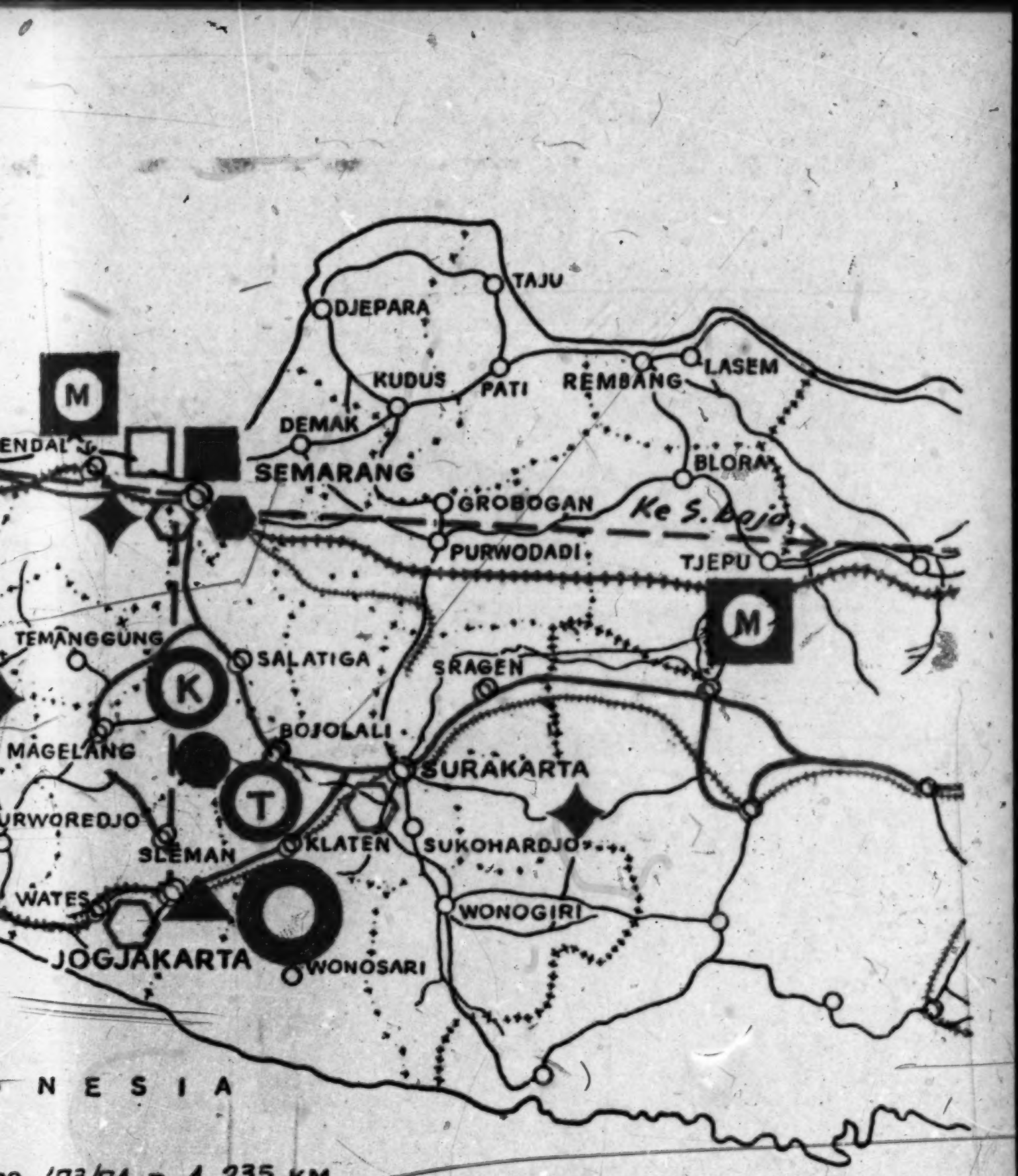
TAJU
DJEPARA
KUDUS
PATI
REMBANG
LASEM
DEMAK
SEMARANG
BLORA
GROBOGAN
Ke S. bajo
PURWODADI
TJEPU
M
TEMANGGUNG
SALATIGA
SRAGEN
K
BOJOLALI
MAGELANG
SURAKARTA
T
SLEMAN
KLATEN
SUKOHARDJO
WATES
WONOGIRI
JOGJAKARTA
WONOSARI
N E S I A
'73/74 = 1.235 KM
A W A T E N G A H

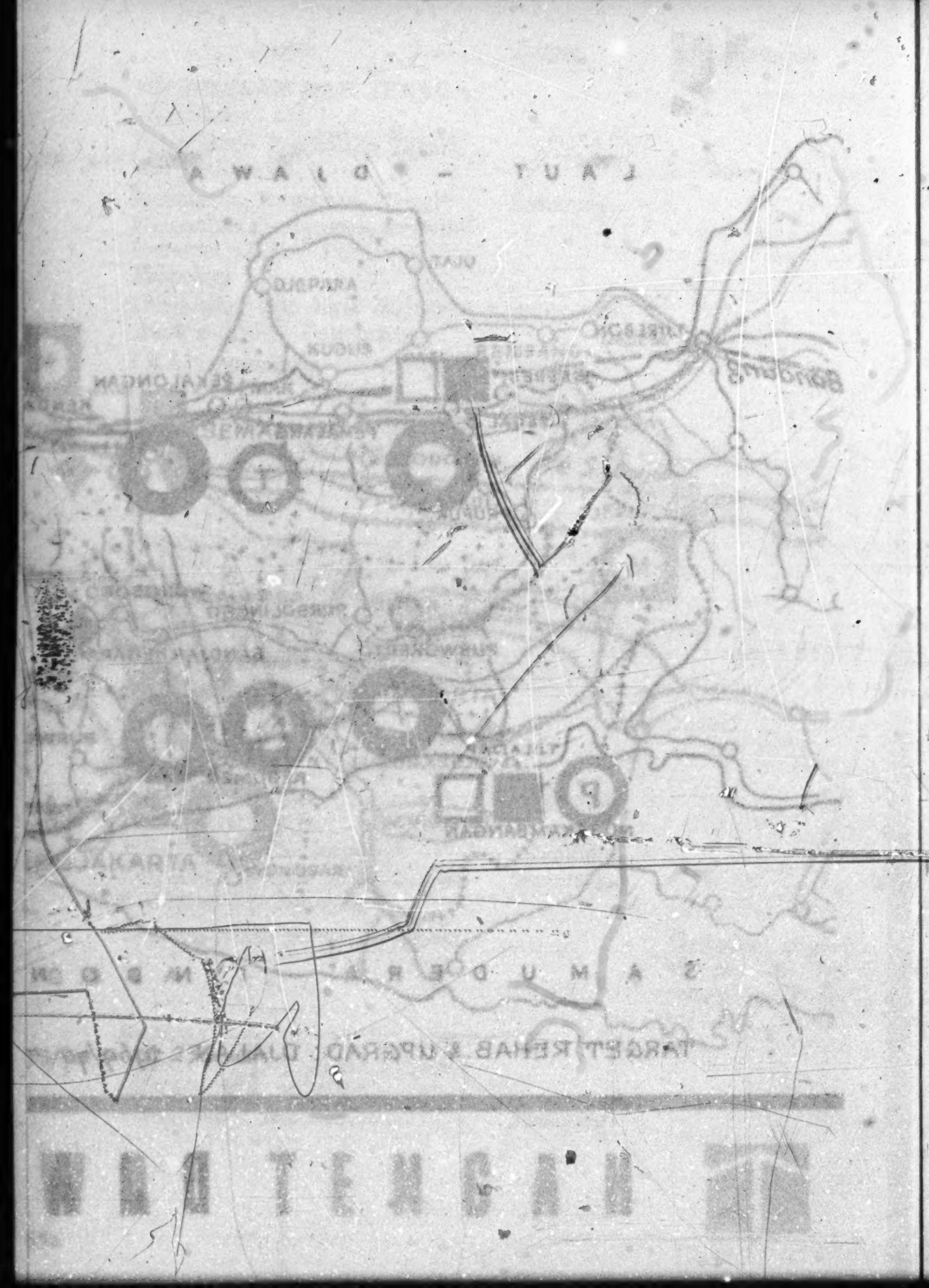

12. DAERAH : ISTIMEWA JOGJAKARTA

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi Produksi Bahan Makanan		
Intensifikasi Penjuluhan		
Perikanan dan Kehutanan		
Pengendalian bandjir		Reboisasi
Pembinaan Hutan Serbaguna		
Peternakan		
Industri pengobatan dan instrumentaria	Jogja	
Irigasi		
Rehabilitasi irigasi dan perluasan		
Pentjegahan bandjir		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Peningkatan Industri Ringan serta Keradjinan rakjat dan pengolahan hasil pertanian		
Tenaga Listrik		
Penambahan daja listrik terpasang		
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan djembatan		Tersebar pada djalan-djalan Negara/Propinsi/ Kabupaten tertentu.
Workshop untuk Rehabilitasi/ Upgrading djalan	Jogjakarta	
Angkutan Umum		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Angkutan Kota	Jogjakarta	
Rehabilitasi/Upgrading track/ djembatan Kereta Api	Prupuk, Jogjakarta	
Rehabilitasi/Upgrading Sinjal/ Telekom & Elektronica Kereta Api		
Perhubungan Udara		
Rehabilitasi/Upgrading landasan dan elektrifikasi pelabuhan udara.	Jogjakarta	
Pos dan Telekomunikasi		
Perluasan djaringan Pos Kilat		Antara Jogjakarta - Solo - Semarang - Djakarta dan lain-lain.
Dinas Pos Ambulance	Jogjakarta	Termasuk pos keliling dan pos Kereta Api
Kantor Pos Pedesaan		Tersebar diseluruh daerah
Kantor Pos Bergerak		Beroperasi keseluruh daerah pedalaman.
Hubungan djarak djauh dengan Transmisi Radio		Antara Jogjakarta - Semarang - Djakarta
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi :	Jogjakarta	
Universitas Gadjah Mada, terutama untuk Fakultas-fakultas : Pertanian, Tehnologi Pertanian, Kehutanan, Kedokteran Hewan dan Peternakan.		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Konservatori Karawitan	Jogjakarta	
Restorasi Tjandi Prambanan	Prambanan	
Pendidikan Perindustrian	Jogjakarta	
Pusat Pendidikan Keluarga Berentjana	Jogjakarta	
Institute Agama Islam Negeri	Jogjakarta	
Pendidikan Guru Agama	Jogjakarta	
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENTJANA		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Rehabilitasi Rumah Sakit Paru-paru	Pakem	
Pemberantasan Penjakit Menular		Terutama untuk penjakit pes di Seleman

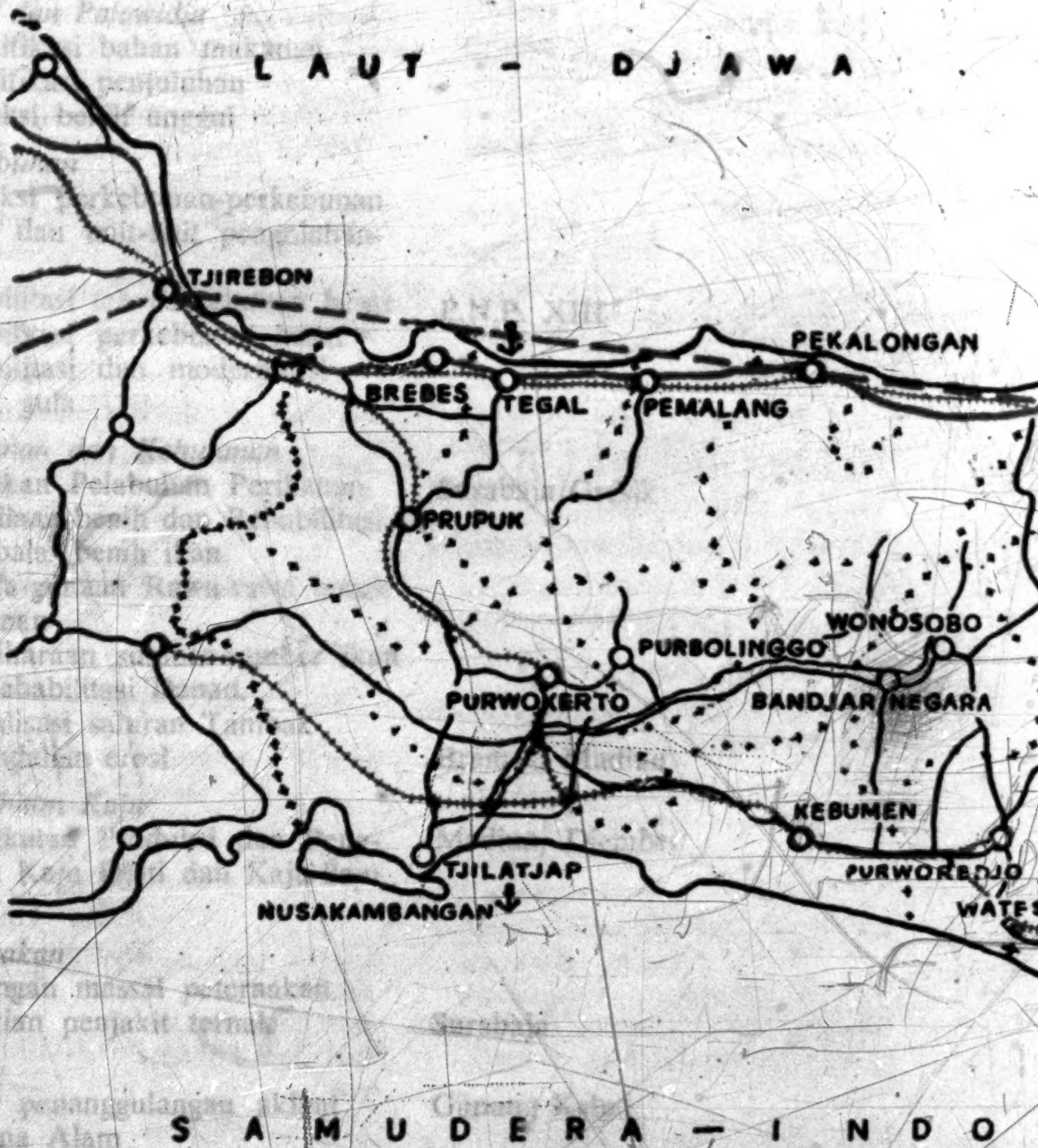

TARGET REHAB. & UPGRAD. DJALAN 1969/

D. I. JO

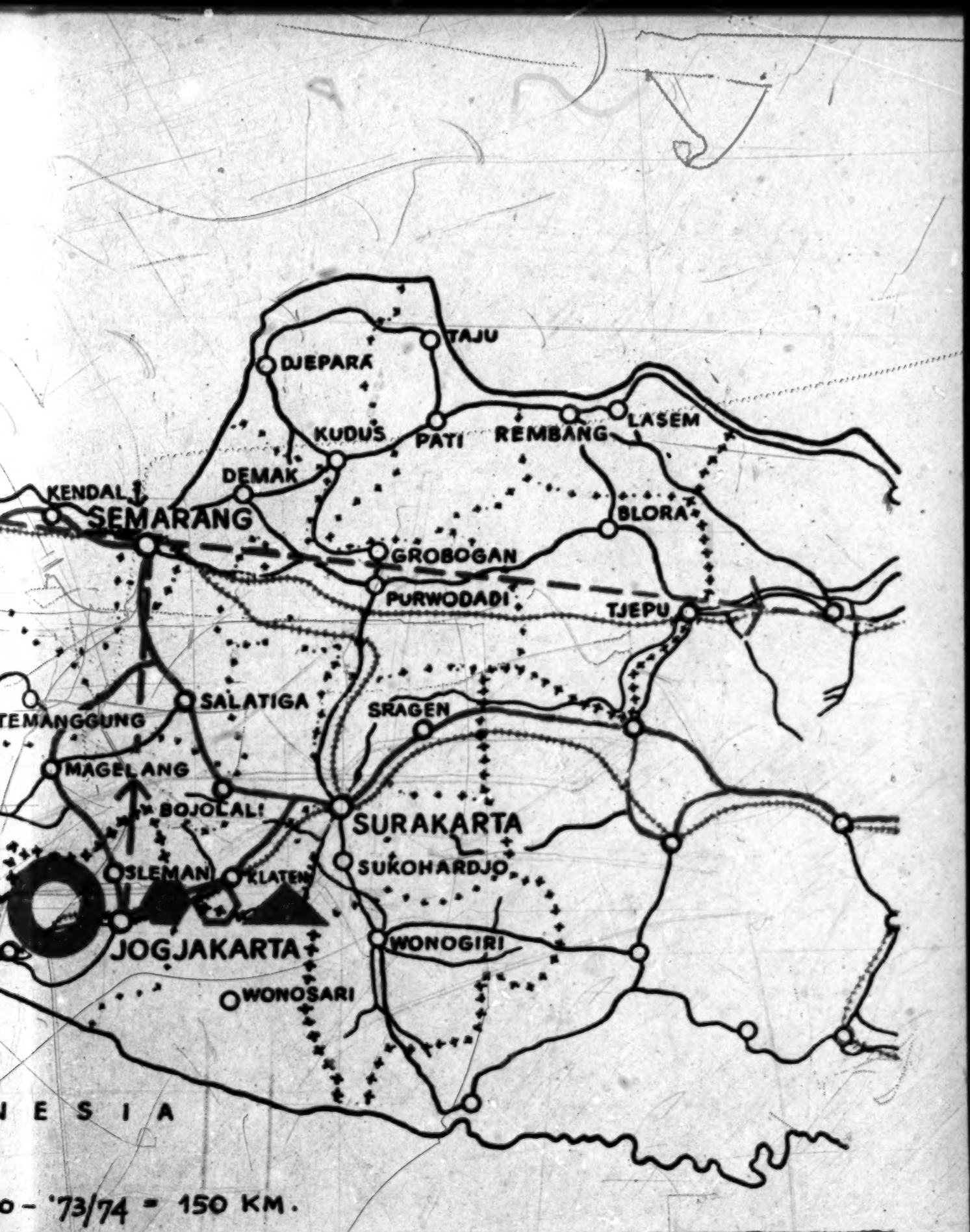
TAJU
DJEPARA
KUDUS
PATI
REMBANG
LASEM
DEMAK
KENDAL
SEMARANG
BLORA
GROBOGAN
PURWODADI
TJEPU
SALATIGA
SRAGEN
TEMANGGUNG
MAGELANG
BOJOLALI
SURAKARTA
SUKOHARDJO
SLEMAN
KLATEN
JOGJAKARTA
WONOGIRI
WONOSARI
I E S I A
o - '73/74 = 150 KM.

GJA

59a

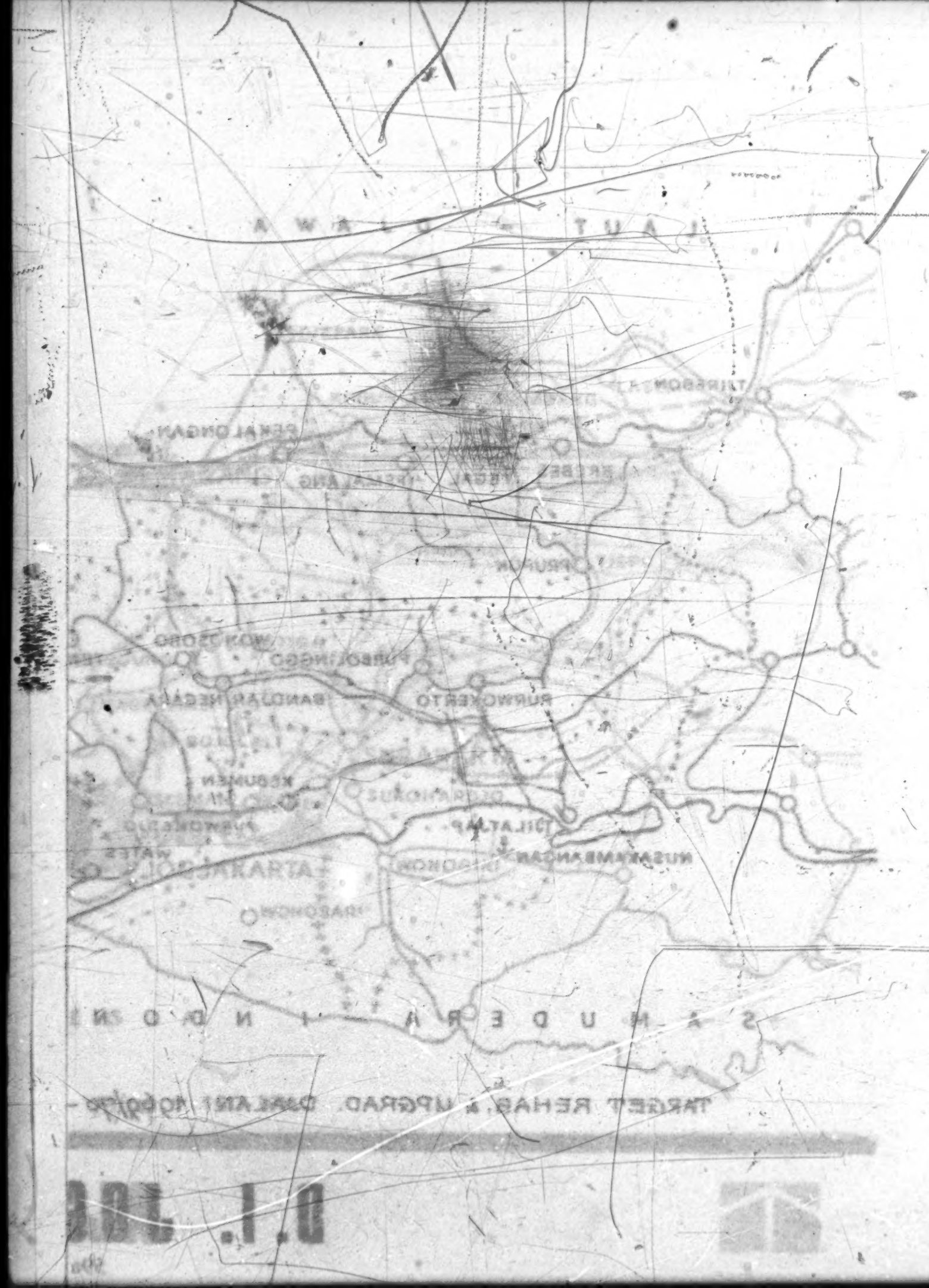

13. DAERAH : DJAWA TIMUR

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan.		
Intensifikasi penjuluhan		
Produksi benih unggul		
Perkebunan		
Produksi perkebunan-perkebunan rakjat dan unit-unit pengolahan-nja		
Rehabilitasi teh perkebunan besar	P.N.P. XIII	
Rehabilitasi perkebunan besar		
Rehabilitasi dan modernisasi pabrik gula		
Perikanan dan Kehutanan		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan	Surabaja/Gresik	
Penjediaan benih dan Rehabilitasi Balai-balai benih ikan.		
Pendaja-gunaan Rawa-rawa untuk Perikanan		
Pemeliharaan sumber-sumber ikan dan Rehabilitasi Danau.		
Normalisasi saluran Tambak		
Pengendalian erosi	Brantas, Madiun	
Pembibitan Kaju		
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Kaju Djati dan Kaju-kaju lain.	Madiun, Djember	
Peternakan		
Bimbingan massal peternakan		
Penelitian penjakit ternak	Surabaja	
Irigasi		
Projek penanggulangan akibat Bentjana Alam	Gunung Kelud	
Projek serbaguna Kali Brantas		
Rehabilitasi dan Perluasan		
Projek Irigasi	Sampean Baru	
Pompa Air Irigasi Pedesaan		
Pengendalian Bandjir	Brantas, Madiun	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK.		
Projek Kertas	Banjuwangi, Letjes	
Perluasan Pabrik Semen Gersik	Gresik	
Projek Petrokimia	Gresik	
Modernisasi Pabrik Soda Waru	Waru	
Pertambangan		
Minjak dan Gas Bumi	Off-shore	
Bauksit	Bagian Selatan Madiun	Eksplorasi
Tenaga Listrik		
P.L.T.A. Ngebel	Ngebel	Penjelesaian
P.L.T.A. Karangkates I, II	Karangkates	Persiapan
P.L.T.A. Seloredjo	Seloredjo	
Djaringan transmisi dan distribusi Djawa Timur		Rehabilitasi
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi dan Upgrading djalan dan djembatan		Tersebar seluruh daerah pada djalan-djalan Negara/Propinsi/ Kabupaten tertentu.
Angkutan Umum		Antar kota di Djatim
Angkutan Kota	Surabaja	
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan bangunan Kereta Api	Surabaja, Pasarturi dan Tjikampek	
Workshop untuk Rehabilitasi/ Upgrading djalan	Madiun, Pasuruan, Malang.	
Rehabilitasi/Upgrading Sinjal, Telekomunikasi dan Elektronika Kereta Api		Tersebar didaerah Exploitasi Timur.

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Perhubungan Laut		
Rehabilitasi/Upgrading Pelajaran	Kamal	
	Udjung	
Perbaikan/Pembangunan dermaga.	Ketapang	
Pelabuhan dan fasilitasnja	Surabaja	
Pengerukan dan rehabilitasi/Upgrading kade, gudang, listrik, air dan alat-alat bongkar-muat	Probolinggo Banjuwangi	
Pengangkatan kerangka kapal	Surabaja	
Rehabilitasi dockrepair	Surabaja	
Telekom, pelajaran dan perambuan pantai	Surabaja	
Pos dan Telekomunikasi		
Perluasan djaringan	Surabaja-Jogja	
Dinas Pos Kilat	Surabaja-Semarang	
	Surabaja-Banjuwangi	
Dinas Pos Keliling	Surabaja-Madiun	
	Surabaja-Malang	
Kantor Pos Pedesaan dan Ambulance	Surabaja, Modjokerto, Pasuruan, Djember.	
Pembangunan hubungan Telpon lokal	Surabaja dan Malang.	
Pembangunan hubungan djarak djauh (micro-wave)	Antara Djakarta - Bandung - Tjirebon - Semarang	
	Surabaja - Bali.	
Hubungan H.F.	Kupang - Denpasar - Surabaja	
Hubungan Troposcatter (djarak djauh)	Surabaja - Bandjarmasin	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA.		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi :		
Universitas Erlangga	Surabaja	
Fakultas Farmasi		
Fakultas Kedokteran		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Institut Tehnik Surabaja	Surabaja	
Fakultas Perkapalan		
Fakultas Kimia		
Universitas Brawidjaja	Malang	
Fakultas Pertanian		
Universitas Djember	Djember	
Fakultas Pertanian		
Pendidikan Adjun Akuntan		
Institut Agama Islam Negeri		
Restorasi Tjandi Trowulan		
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENTJANA		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pusat	Surabaja	
Upgrading dengan pembaharuan perlengkapan Laboratorium Kesehatan	Surabaja	
Pemberantasan Penjakit Menular Pengadaan obat-obatan dan alat-alat Kesehatan, peningkatan produksi obat-obatan, alat-alat Kesehatan	Surabaja	
PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL DAN PENJEDIAAN AIR MINUM		
Perentjanaan Tata Kota	Surabaja	
Perentjanaan Tata Daerah	Surabaja	

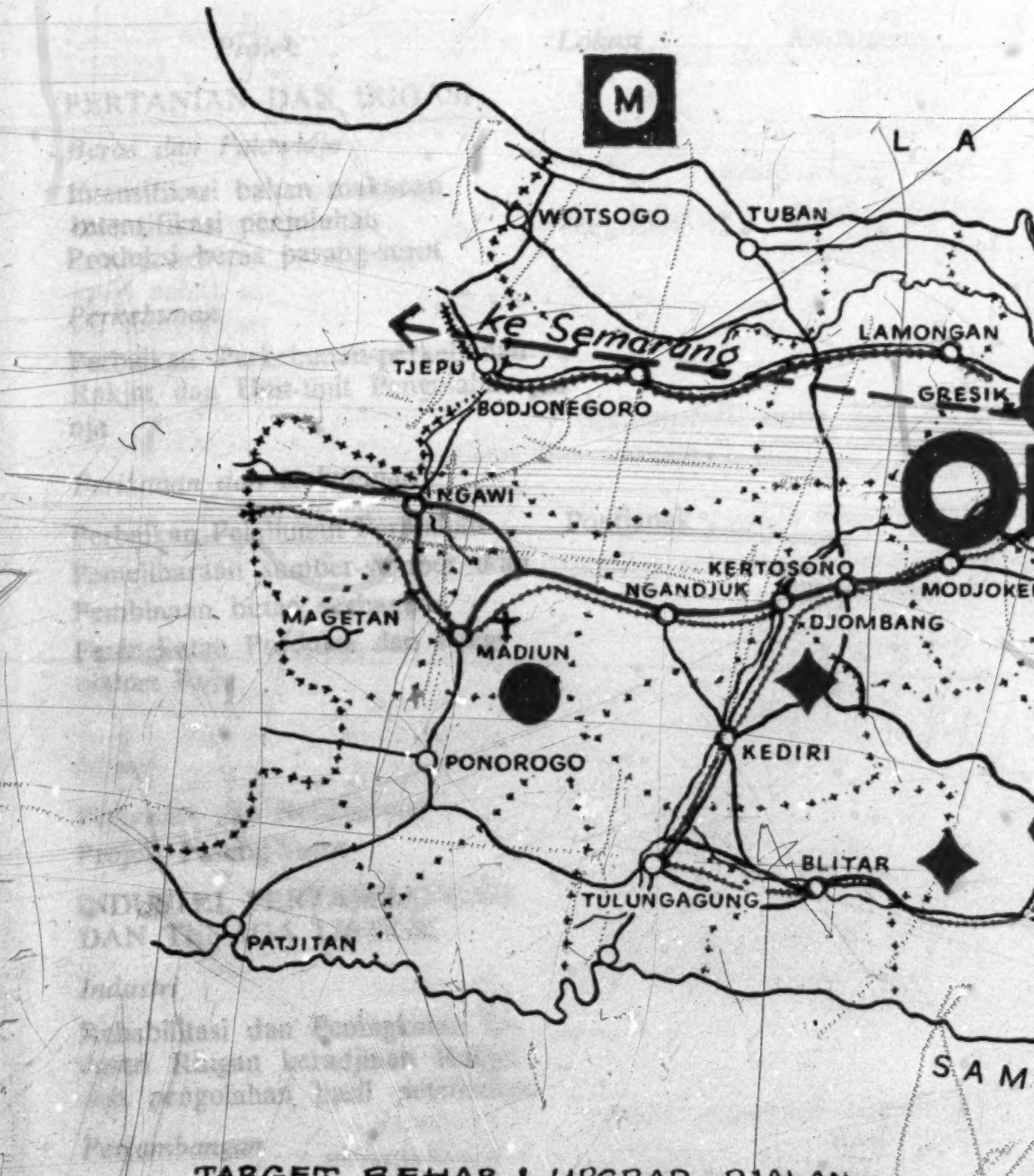
M
L A
WOTSOGO
TUBAN
ke Semarang
LAMONGAN
TJEPU
GRESIK
BODJONEGORO
NGAWI
KERTOSONO
NGANDJUK
MODJOKE
MAGETAN
DJOMBANG
MADIUN
KEDIRI
PONOROGO
BLITAR
TULUNGAGUNG
PATJITAN
S A M
TARGET REHAB & UPGRAD. DJALAN
1969/70 - '73/74 = 1.510 KM
D J

ke B'masin
J A W A
SUMENEP
BANGKALAN
P. PUTERAN
PAMEKASAN
SAMPANG
SURABAJA
WONOKROMO
SIDOARDJO
SEL. MADURA
PASURUAN
BESUKI
SITU BONDO
PROBOLINGGO
ke Tuban
BONDOWOSO
BADJULMATI
KLAKAH
MALANG
LUMADJANG
DJEMBER
BANJUWANGI
PUGE
SEL. BALI
INDONESIA

A W A T I M U R

14. DAERAH : KALIMANTAN BARAT

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Produksi beras pasang-surut		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan Unit-unit Pengolahan-nja		
Perikanan dan Kehutanan		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan	Pontianak	
Pemeliharaan sumber-sumber ikan		
Pembinaan hutan serbaguna		Tengkawang
Peningkatan Produksi dan Peng-olahan Kaju		
Irigasi		
Perluasan dan Rehabilitasi Projek Pasang-Surut		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri Ringan keradjinan Rakjat dan pengolahan hasil peternakan		
Pertambangan		
Minjak dan Gas Bumi	Pantai Barat dan Selatan	Off-shore
Timah	Pantai Barat	Off-shore
Bauksit	Bagian Barat	Eksplorasi

Projek	Lokasi	Keterangan
Tenaga Listrik		
Penambahan Daja Listrik terpasang		
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi dan Upgrading djalan dan djembatan		Tersebar diseluruh daerah pada djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu.
Workshop untuk Rehabilitasi/ Upgrading djalan	Pontianak	
Perhubungan Udara		
Lapangan Terbang dan fasilitas-fasilitasnja	Pontianak	
Perhubungan Laut		
Perbaikan dan Perluasan Pelabuhan dan sarana-sarananja	Pontianak Singkawang Pemangkat	Rehabilitasi/penambahan kade, gudang, air, listrik, dan alat bongkar-muat
Terminal dan fasilitas-fasilitasnja	Sungai Kapuas	
Pos dan Telekomunikasi		
Perluasan dan peningkatan hubungan pos	Pontianak Singkawang Pemangkas Sambas	
Peningkatan hubungan telekom djarak djauh	Pontianak - Bandjarmasin Pontianak - Djakarta.	
Peningkatan/perluasan hubungan lokal	Pontianak	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi :		
Universitas Tandjungpura, terutama Fakultas Pertanian	Pontianak	
KESEHATAN		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pemberantasan Penjakit Menular		
PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL		
Pembinaan Perubahan Sosial		
Pemasjarakatan Suku-suku terasing	Kalbar	

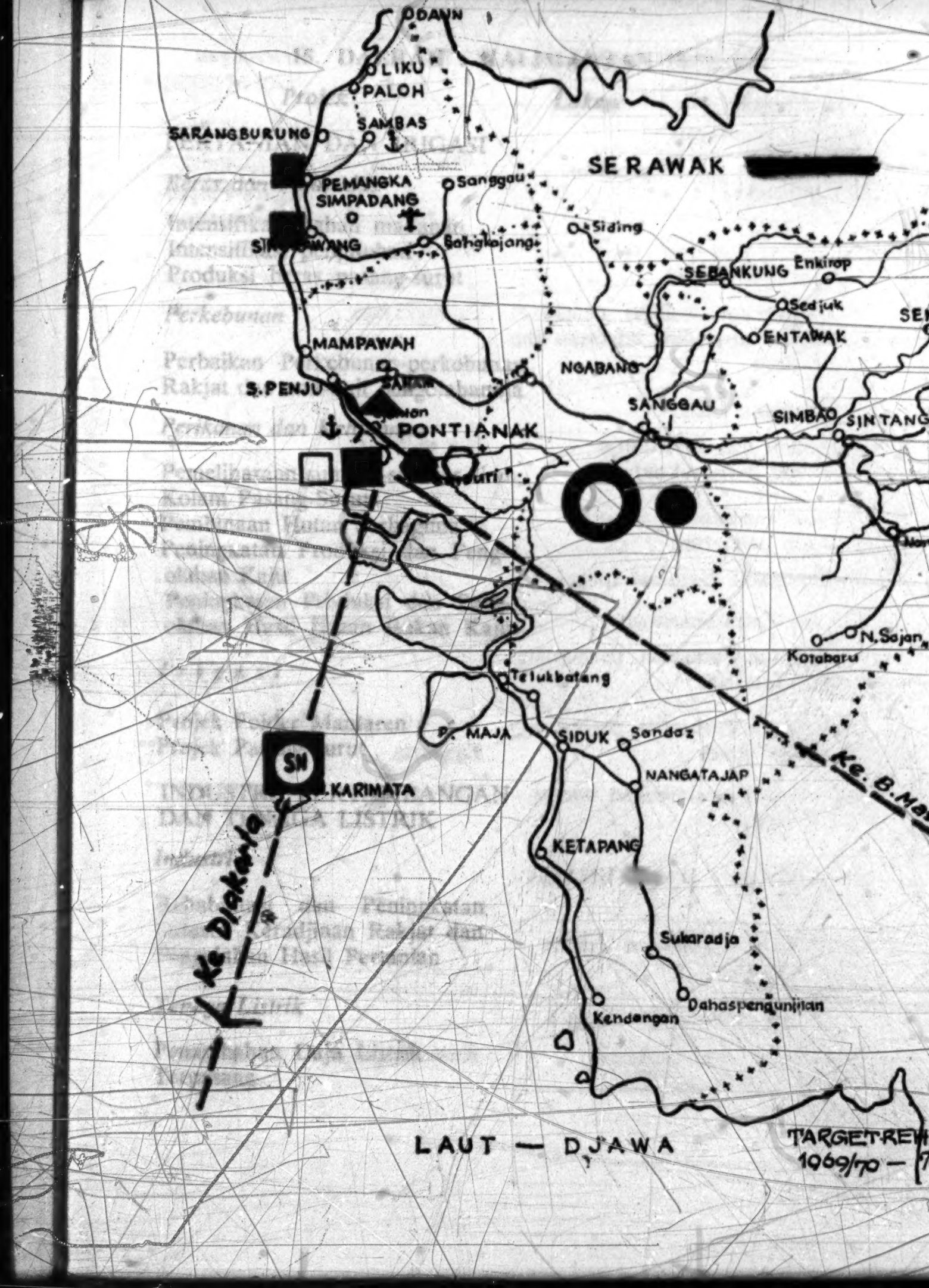
DANN
LIKU
PALOH
SAMBAS
SARANGBURUNG
SERAWAK
PEMANGKA
SIMPADANG
Sanggau
Siding
Sahgkajang
SEBANKUNG
Enkirop
Sedjuk
ENTAWAK
MAMPAWAH
NGABANG
S. PENJU
SANGGAU
SIMBAO
SINTANG
PONTIANAK
N. Sajan
Kotabaru
Telukbatang
P. MAJA
SIDUK
Sandaz
NANGATAJAP
KARIMATA
KETAPANG
Sukaradja
Dahaspengunjian
Kendengan
Ke Djakarta
LAUT — DJAWA
TARGETREN
1069/70 —

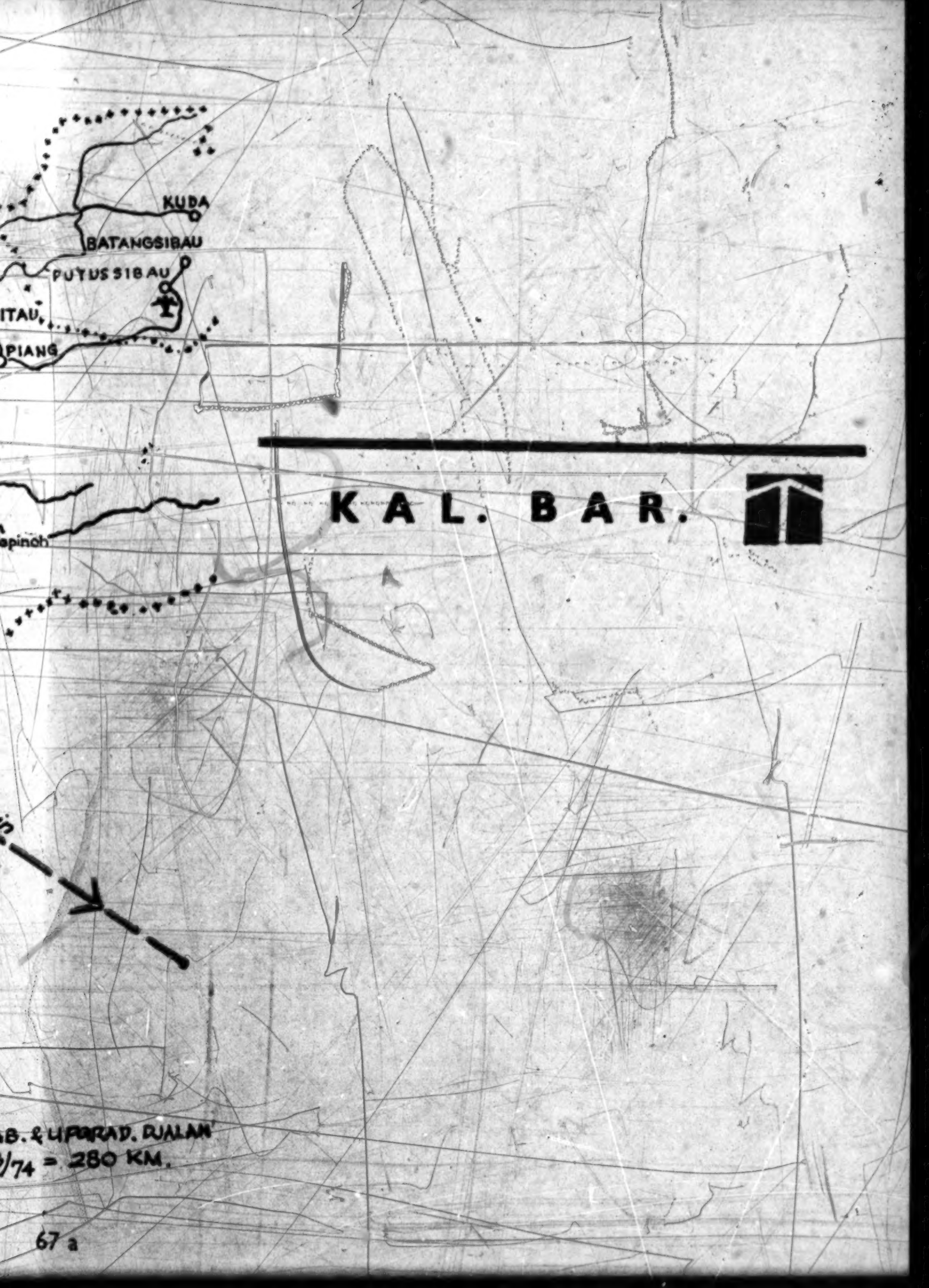
KUDA
BATANGSIBAU
PUTUSSIBAU
ITAU
PIANG
KAL. BAR.
apinoh
B. & UPORAD. DJALAN
/74 = 280 KM.

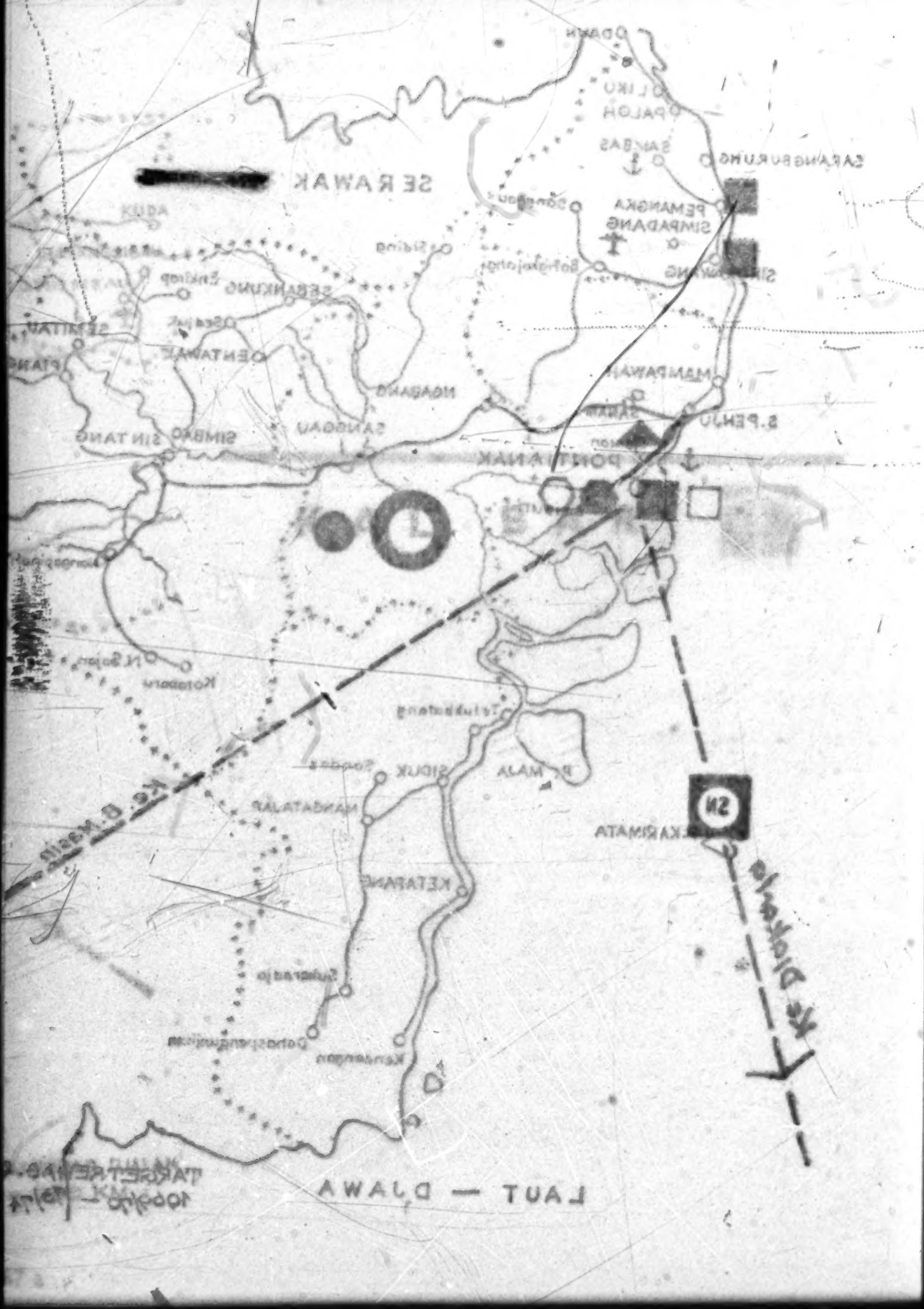
SERAWAK
PONTIANAK
LAUT — DJAWA
Ke Djakarta
Ke B.Masin
SN

15. DAERAH : KALIMANTAN TENGAH

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Produksi beras pasang-surut		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja		
Perikanan dan Kehutanan		
Pemeliharaan sumber-sumber Ikan, Kolam Pasang-Surut.		
Pembinaan Hutan Serbaguna		
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Kaju		
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kaju		
I r i g a s i		
Projek Polder Mantaren		
Projek Pasang-Surut		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri Keradjinan Rakjat dan Pengolahan Hasil Pertanian		
Tenaga Listrik		
Penambahan Daja Listrik Terpasang		

Proiek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan djembatan		Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu.
Perhubungan Udara		
Penjempurnaan fasilitas pemadam kebakaran, upgrading landasan dan elektrifikasi	Palangkaraja	
Perhubungan Laut		
Pelabuhan dan fasilitasnja (termasuk pengerukan)	S a m p i t	
Fasilitas keamanan pelajaran (telekom pelajaran)	S a m p i t	
Pembangunan terminal sungai		
Pos dan Telekomunikasi		
Peningkatan/Perluasan perhubungan Pos-Telekom		
Peningkatan/Perluasan perhubungan djarak djauh	Palangkaraja-Djakarta	
Peningkatan/penambahan nomor Tilpon Lokal	Palangkaraja	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi :		
Universitas Palangkaraja, Fakultas Pertanian dan Kehutanan	Kuala Kapuas	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
KESEHATAN		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pemberantasan Penjakit Menular.		

TARGET REHAB. & UPGRAD. DJALAN '69/70 – 73/74 = 45 KM.

TINOTUHAN
MALU
PURUKTJAHU
DJONGKANG
PARI
MUARATEWE
BUNTOK
TAMIANG LAJANG
AMUNTAI
MENTANGAIK
KANDANGA
BANDJARMASIN
MARTAPURA
KAL. TENG.

16. DAERAH : KALIMANTAN SELATAN

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Produksi beras pasang-surut		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja.		
Perikanan dan Kehutanan		
Pemeliharaan Sumber-sumber Ikan.		
Kolam Pasang-Surut.		
Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan.		
Irigasi		
Projek survey dan perentjanaan Pengembangan Wilajah Sungai		
Rehabilitasi dan Perluasan	Sei Barito	
Projek Polder Alabio.		
Projek Pasang-Surut.		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Rehabilitasi dan peningkatan Industri Ringan, Keradjinan Rakjat dan pengolahan hasil hutan.		
Penelaahan pabrik Kertas Martapura	Martapura	
Pertambangan		
Minjak dan Gas Bumi	Bagian Selatan dan Timur	on dan off-shore

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Tenaga Listrik		
P.L.T.A. Riam Kanan I, II	Riam Kanan	
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading Djalan dan Djembatan	Tersebar pada djalan-djalan Negara/Propinsi/ Kabupaten tertentu.	
Pembangunan dan Penjelesaian djalan baru	Antara Tandjung-Kuaro	
Angkutan Umum dan Angkutan Kota.	Bandjarmasin	
Perhubungan Udara		
Rehabilitasi/Upgrading Landasan dan Penambahan fasilitas	Bandjarmasin	
Stasiun Meteorologi	Bandjarmasin	
Perhubungan Laut		
Pelabuhan dan fasilitas-fasilitasnja	Bandjarmasin	
Pembangunan Terminal	Sei Barito	
Pos dan Telekom :		
Perluasan dan Penjempurnaan Dinas Pos dan Giro	Bandjatmasin	
Pembangunan Telekom (lokal dan djarak djauh)	Bandjarmasin	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA.		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan.		
Pembinaan Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Pertanian.	Bandjarmasin	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
KESEHATAN.		
Kesehatan Sekolah.		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat.		
Rehabilitasi dan perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Rehabilitasi dan Perluasan Rumah Sakit.		
Pemberantasan Penjakit Menular		
PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL DAN PENJEDIAAN AIR MINUM		
Pemasjarakatan Suku-suku terasing		

PENADJAM
BLIMBING
MUARAPAJANG
SEBAKUN
AMPAH
MUARAAJU
TANAHGROGOT
TAMIANG-LAJANG
TANDJUNG
KERANG
RIWANG
PARINGIN
KUALASIRAM
BATUMANDI
AMUNTAI
ULUNG
BIRAJANG
NEGARA
BARABAI
SUNGAIANJA
KANDANGAN
RANTAU
M
BANDJARMASIN
BATULITJIN
KOTABARU
MARTAPURA
BATUAMPARAN
SUNGAIBA
SINDJAKA
GOREDJA
MUARAPAGATAN
KALAAN
SEBAMBAN
P.LAUT
PELAIHARI
SATUL
SEMARA
KINTAP
TAPANBALOI
BABAKAN
SAWARANGAN
Ke S'BAJA
LAUT DJAWA
TARGET R
1969/70 -

SAMARINDA
SELAT MAKASAR
LIKPAPAN
KAL. SEL.
MAKASAR
EHAB & UPGRAD. DJALAN
'73/74 = 325 KM
75 a

17. DAERAH : KALIMANTAN TIMUR

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja		
Perikanan dan Kehutanan		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan Samarinda.		
Pemeliharaan Sumber-sumber Ikan.		
Peningkatan Produksi dan pengolahan kaju.		
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan bukan kaju.		
Inventarisasi Pengukuhan hutan		
I r i g a s i		
Perluasan dan Rehabilitasi		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
I n d u s t r i		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri Ringan, Keradjinan Rakjat dan Pengolahan Hasil Pertanian.		
Pertambangan		
Minjak dan Gas Bumi	Off-shore.	
Tenaga Listrik		
Penambahan daja listrik terpasang.		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading		Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu.
Pembangunan dan penjelesaian djalan baru	Balikpapan Samarinda	
Perhubungan Udara		
Rehabilitasi/Upgrading Lapangan Terbang dan fasilitas-fasilitasnja.	Balikpapan Tarakan	
Perhubungan Laut		
Rehabilitasi/Penambahan Kade, Gudang, Air, Listrik dan alat bongkar-muat	Samarinda Balikpapan	
Pengangkatan kerangka kapal	Balikpapan	
Rehabilitasi/Replacement/Penambahan Telekom Pelajaran	Balikpapan Samarinda	
Rehabilitasi/Replacement/Penambahan Perambuan dan Penerangan Pantai	Balikpapan	
POS DAN TELEKOMUNIKASI		
Penambahan fasilitas Pos dan Telekomunikasi		
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman, Fakultas Pertanian dan Kehutanan	Samarinda	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
KESEHATAN		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat.		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pemberantasan Penjakit Menular		
PERUMAHAN, KESEDJAH-TERAAN SOSIAL		
Pemasjarakatan Suku-suku terasing	Kalimantan Timur	

SIAU
MENSALONG
SERAWAK
MENDJALUTUNG
LONGRONGAN
TANGONO
KUDJAU
NJUNANG
TANDJUNGSEL
LONGLEDJAN
MUARAPANGEAN
KAMPUNGBARU
TANDJUNGREDEB
TK Bajur
LONGLANUK
MUARALASAN
LONGNAWAN
MUARAN
LONGNAN
KUBUMESASI
NGAJAU
LONGPAHANGAI
LONGBOH
TABANG
SENJIUR
TEPIANLANGSAT
LONGIRAM
TERING
MUARAKAMAN
ADAS
MURRALAWA
KOTABANGUN
TENGGARONG
SAMARINDA
BANUABU
ANGGANA
LOAJANAN
GUNUNGBUTU
MENTAWIR
KUALASAMBODJA
PENADJAM
BALIKPAPAN
TARGET REHAB & UPGRAD
DJALAN '69/70 - 73/74 = 130 KM

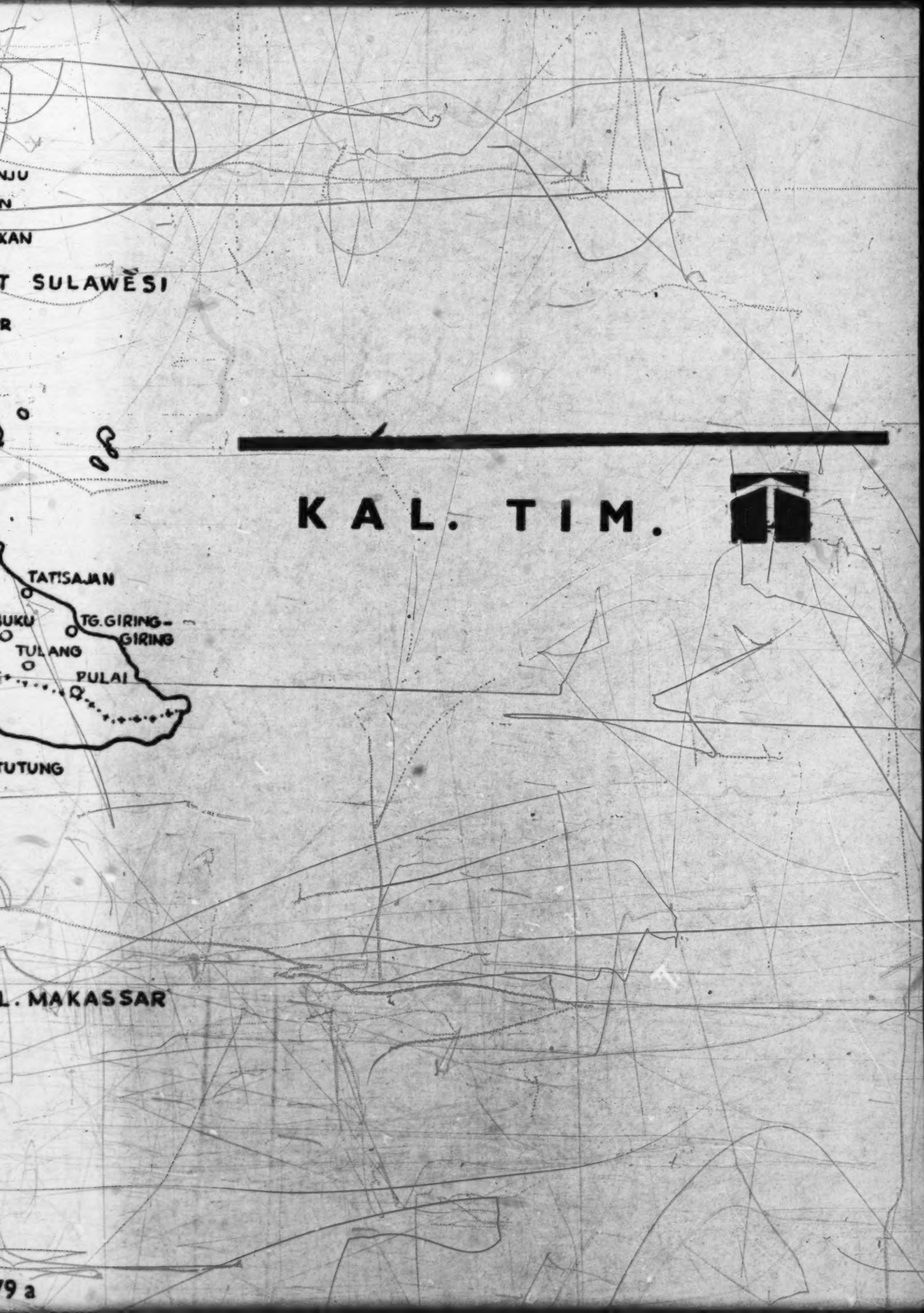
NJU
N
KAN
T SULAWESI
R
KAL. TIM.
TATISAJAN
UKU
TG. GIRING-GIRING
TULANG
PULAI
TUTUNG
L. MAKASSAR
79 a

18. DAERAH : SULAWESI UTARA

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifkasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja		
Perikanan dan Kehutanan		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan	Bitung	
Pemeliharaan Sumber-sumber Ikan dan Rehabilitasi Danau		
Irigasi		
Rehabilitasi dan Perluasan		
Projek Irigasi	Dumoga Kanan	
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri Ringan, Keradjinan Rakjat serta Pengolahan Hasil Pertanian		
Tenaga Listrik		
P.L.T.A.	Tonsea Lama	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading Djalan Raja dan Djembatan		Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu
Perhubungan Udara		
Rehabilitasi/Upgrading Lapangan Terbang dan elektrifikasi	Menado	
Rehabilitasi/Upgrading Lapangan Terbang dan fasilitas-fasilitasnja	Gorontalo	
Perhubungan Laut		
Modernisasi Perahu-perahu Rakjat	Bitung	
Rehabilitasi/Upgrading Pelabuhan	Bitung	
Pos dan Telekomunikasi		
Perluasan Dinas Pos & Giro	Menado/Tondano	
Projek Telekom	Menado	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi :		
Universitas Sam Ratulangi	Menado	
Fakultas Perikanan		
Fakultas Peternakan		
I.K.I.P. Menado, terutama Fakultas Keguruan Ilmu Tehnik		
KESEHATAN		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pemberantasan Penjakit Menular		

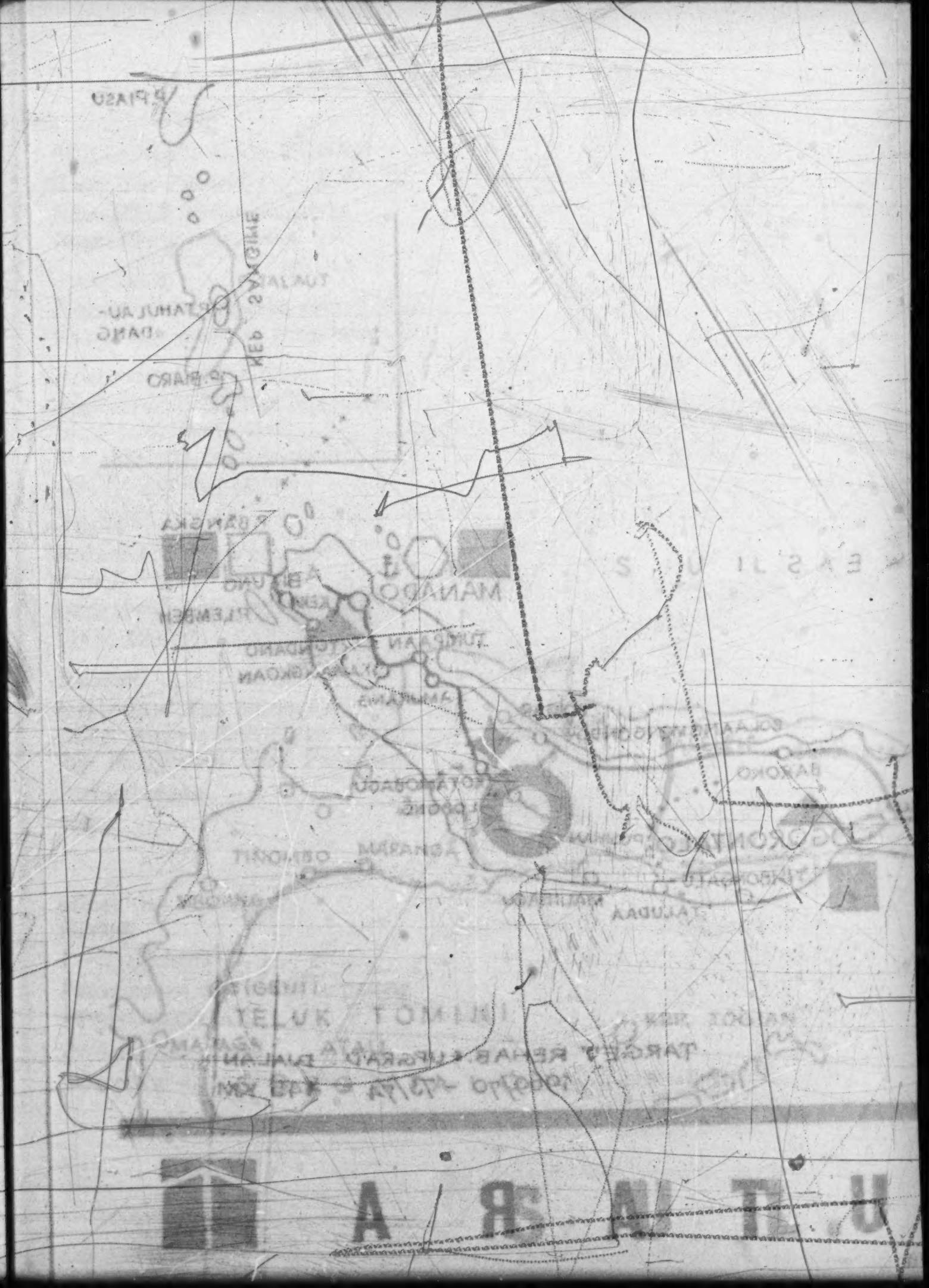

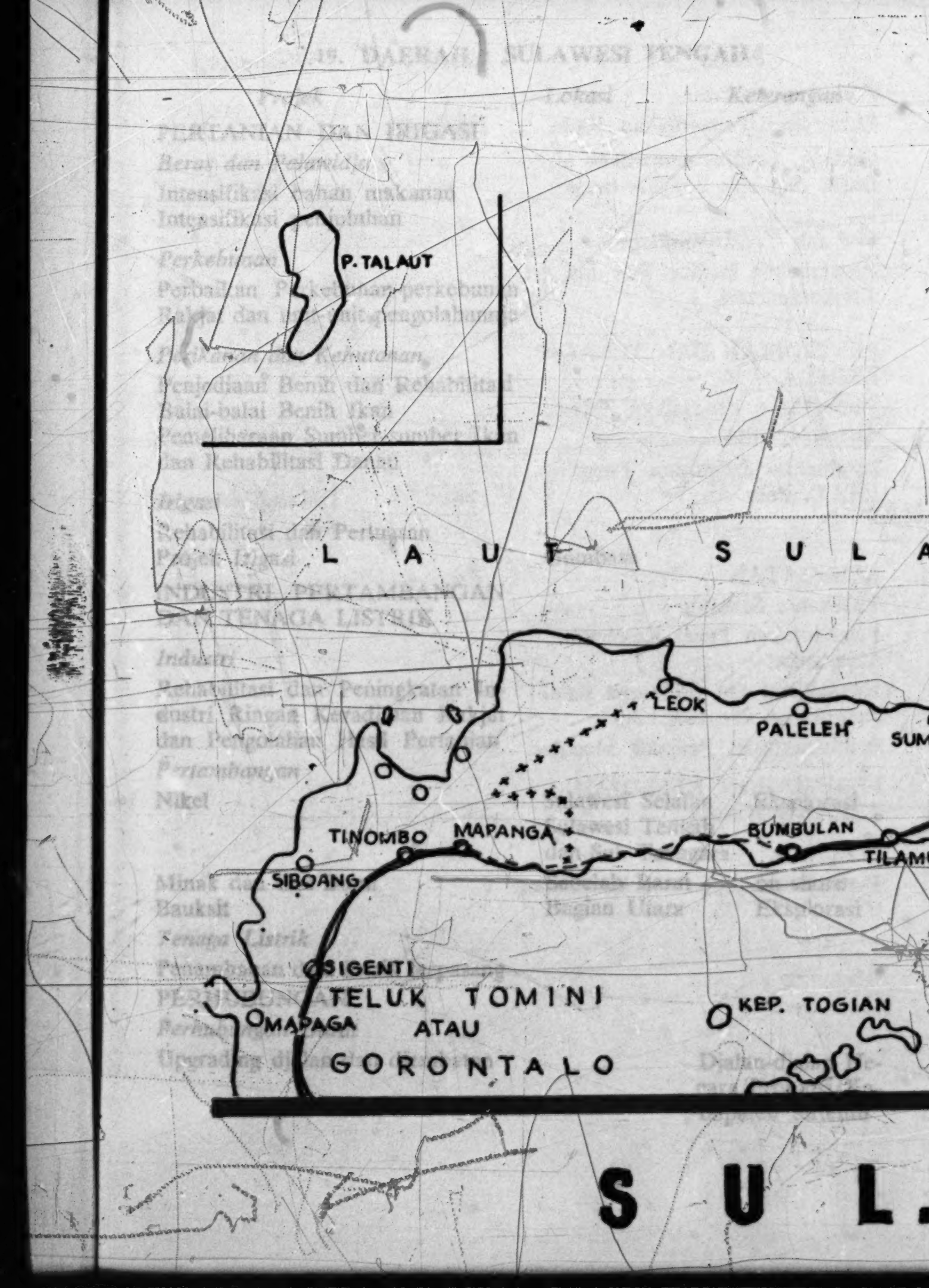
P. TALAUT
L A U T S U L A
LEOK
PALELEH
TINOMBO
MAPANGA
BUMBULAN
SIBOANG
SIGENTI
TELUK TOMINI
ATAU
GORONTALO
MAPAGA
KEP. TOGIAN
S U L

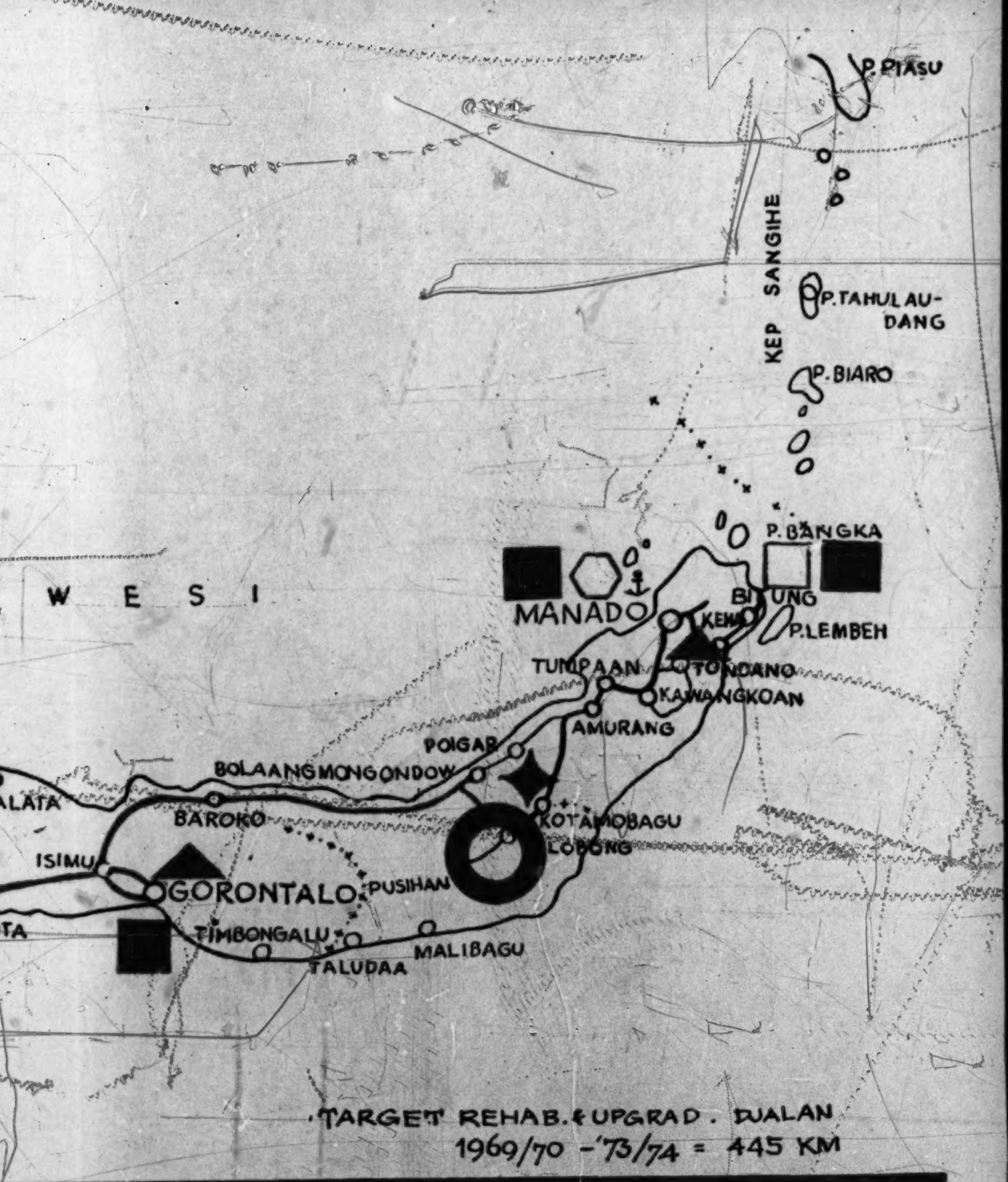
P. PIASU
KEP SANGIHE
P. TAHULAUDANG
P. BIARO
P. BANGKA
W E S I
MANADO
BITUNG
P. LEMBEH
TUMPAAN
TONDANO
KAWANGKOAN
AMURANG
POIGAR
BOLAANGMONGONDOW
ALATA
BAROKO
KOTAMOBAGU
LOBONG
ISIMU
GORONTALO
PUSIHAN
TA
TIMBONGALU
MALIBAGU
TALUDAA
TARGET REHAB. & UPGRAD. DUALAN
1969/70 - '73/74 = 445 KM
U T A R A

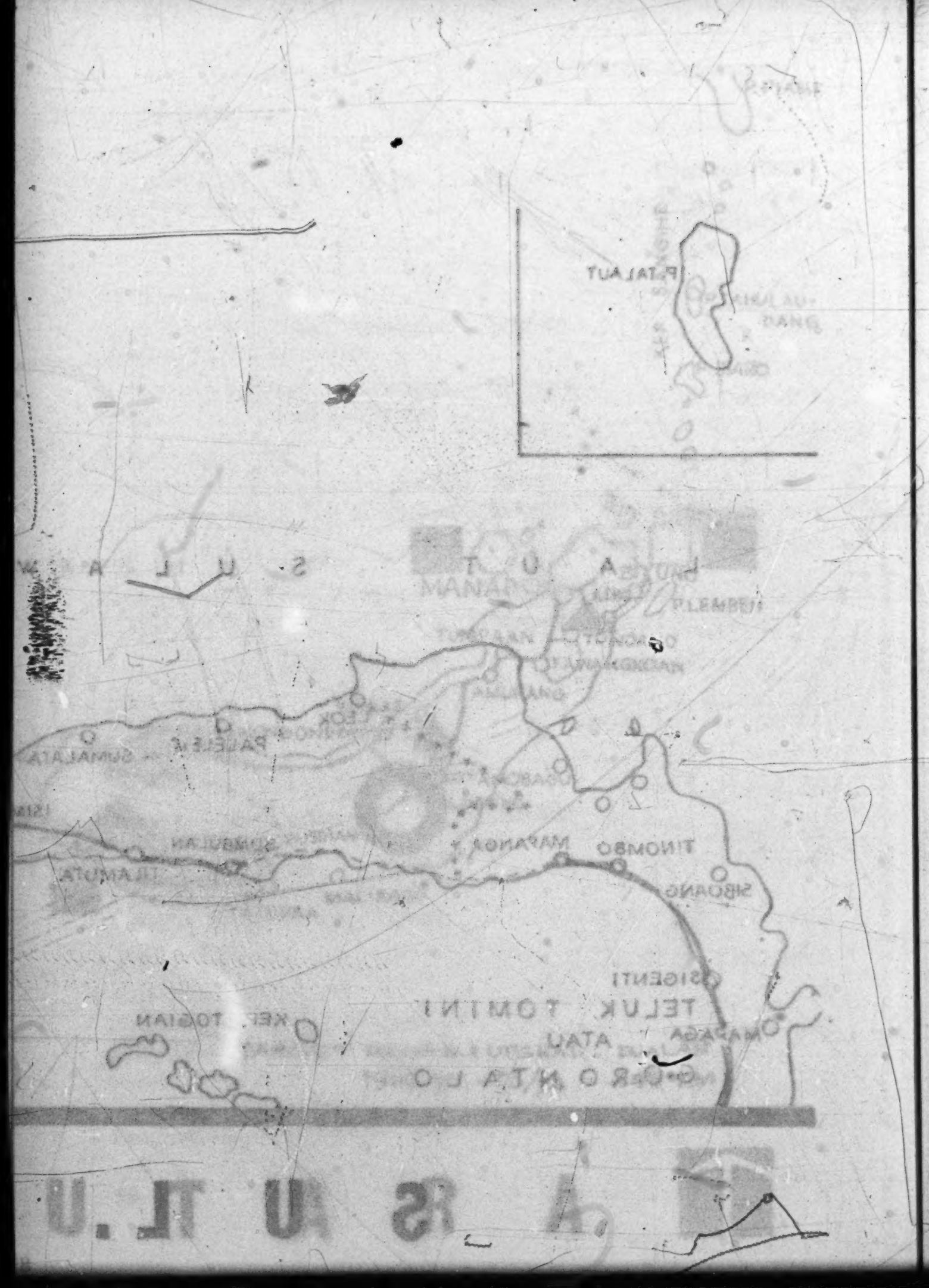
P.TALAUT
P.LEMBEJI
TINOMBO
SIBOANG
SIGENTI
TELUK TOMINI
MAPAGA
ATAU
KEPULAUAN
SUMALATA
PAULELEK
LEOK
MAPANGA
SUMBULAN
TILAMUTA

19. DAERAH : SULAWESI TENGAH

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja		
Perikanan dan Kehutanan		
Penjediaan Benih dan Rehabilitasi Balai-balai Benih Ikan		
Pemeliharaan Sumber-sumber Ikan dan Rehabilitasi Danau		
Irigasi		
Rehabilitasi dan Perluasan Projek Irigasi	Gumbasa	
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri Ringan Keradjinan Rakjat dan Pengolahan Hasil Pertanian		
Pertambangan		
Nikel	Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah dan Sul. Tenggara	Eksplorasi
Minak dan Gas Bumi	Sebelah Barat	on shore
Bauksit	Bagian Utara	Eksplorasi
Tenaga Listrik		
Penambahan daja listrik terpasang		
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Upgrading djalan dan djembatan		Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Perhubungan Laut		
Rehabilitasi/Penambahan Kade, Gudang, fasilitas penjediaan air, listrik dan alat bongkar-muat	Donggala	
Pos dan Telekomunikasi		
Penambahan fasilitas Pos dan Telekomunikasi		
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi I.K.I.P. Palu	Palu	Tjabang Hasanuddin
KESEHATAN		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pemberantasan Penjakit Menular		
PERUMAHAN, KESEDJAHTERAAN SOSIAL		
Pembinaan perobahan sosial		
Pemasjarakatan Suku-suku terasing		

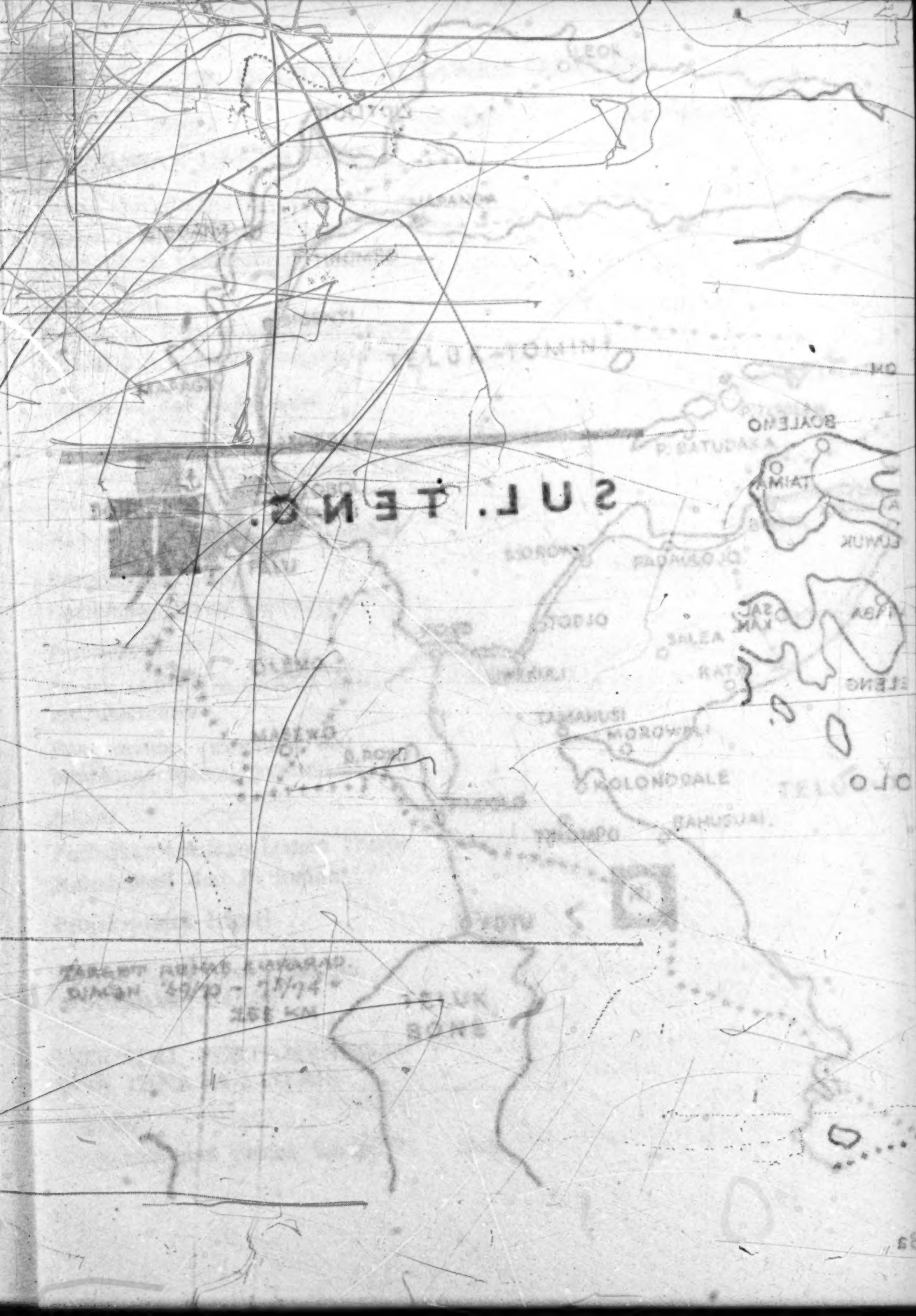
SUL. TENG.
BOALEMO
P. BATUDAKA
TAIMA
SALEA
TAMANUSI
MOROWALI
KOLONODALE
BAHUSUAI
TELUK BONE

LEOK
TOLITOLI
MAPANGA
SIBOANG
TINOMBO
SIGENTI
TELUK-TOMINI
MAPAGA
P.TOGIA
AMPEBABO
P. BATUDAKA
TOBOLI
DONGGALA
ARIGI
BUNTA
MOROWO
PADAULOJO
PALU
POSO
TODJO
SALEA
LEMO
UWEKULI
RATA
TAMANUSI
MASEWO
MOROWALI
D.POSO
KOLONODALE
PINDOLO
TINOMPO
BAHUSUAI
Ni
WOTU
TARGET REHAB. & UPGRAD.
DJALAN '69/70 - 73/74 =
255 KM
TELUK
BONE

TALATAKOH
BOALEMO
TAIMA
PAGIMANA
LUWUK
TATABA
SAL-
KAN.
P. PELENG
UK-TOLO

SUL. TENG.

TELUK BONE

20. DAERAH : SULAWESI SELATAN

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja		
Perikanan dan Kehutanan		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan	Makassar	
Pemeliharaan Sumber-sumber Ikan dan Rehabilitasi Danau		
Normalisasi dan Saluran Tambak		
Pengendalian Erosi		Reboisasi
Pembinaan Hutan Serbaguna		
Peternakan		
Projek industri perobatan dan instrumentaria	Makassar	
Pengamanan, penelitian dan bimbingan massal peternakan		
Irigasi		
Perbaikan keadaan Danau Tempe	Danau Tempe	
Rehabilitasi dan Perluasan		
Projek-projek Irigasi	Sadang Kelara	
Pompa Air Irigasi Pedesaan		
Pengendalian Bandjir		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Penjempurnaan projek kertas	Goa	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Unit Pabrik Kantong Semen	Tonasa	
Pabrik Gula Bone	Bone	
Galangan kapal	Makassar	
Pertambangan		
Eksplorasi Nikel		
Minjak dan Gas Bumi	Off-shore	
Tenaga Listrik		
P.L.T.U. Makassar	Makassar	
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan djembatan		Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu
Perhubungan Udara		
Rehabilitasi/Upgrading dan Perluasan Pelabuhan Udara dan fasilitas-fasilitasnja	Makassar (Mandai)	
Perhubungan Laut		
Modernisasi perahu lajar	Makassar	
Pembangunan Fasilitas Telekom Pelajaran	Makassar	
Pos dan Telekomunikasi		
Perluasan Djaringan-djaringan Pos dan Giro	Makassar	
Rehabilitasi/Upgrading dan Perluasan Djaringan Telekomunikasi	Makassar	
Peningkatan Telepon Lokal	Makassar	

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi :		
Universitas Hasanuddin, terutama :	Makassar	
Fakultas Pertanian		
Fakultas Tehnik		
Fakultas Kedokteran		
I.K.I.P. Makassar		
Fakultas Keguruan Ilmu Tehnik	Makassar	
KESEHATAN		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pemberantasan Penjakit Menular		

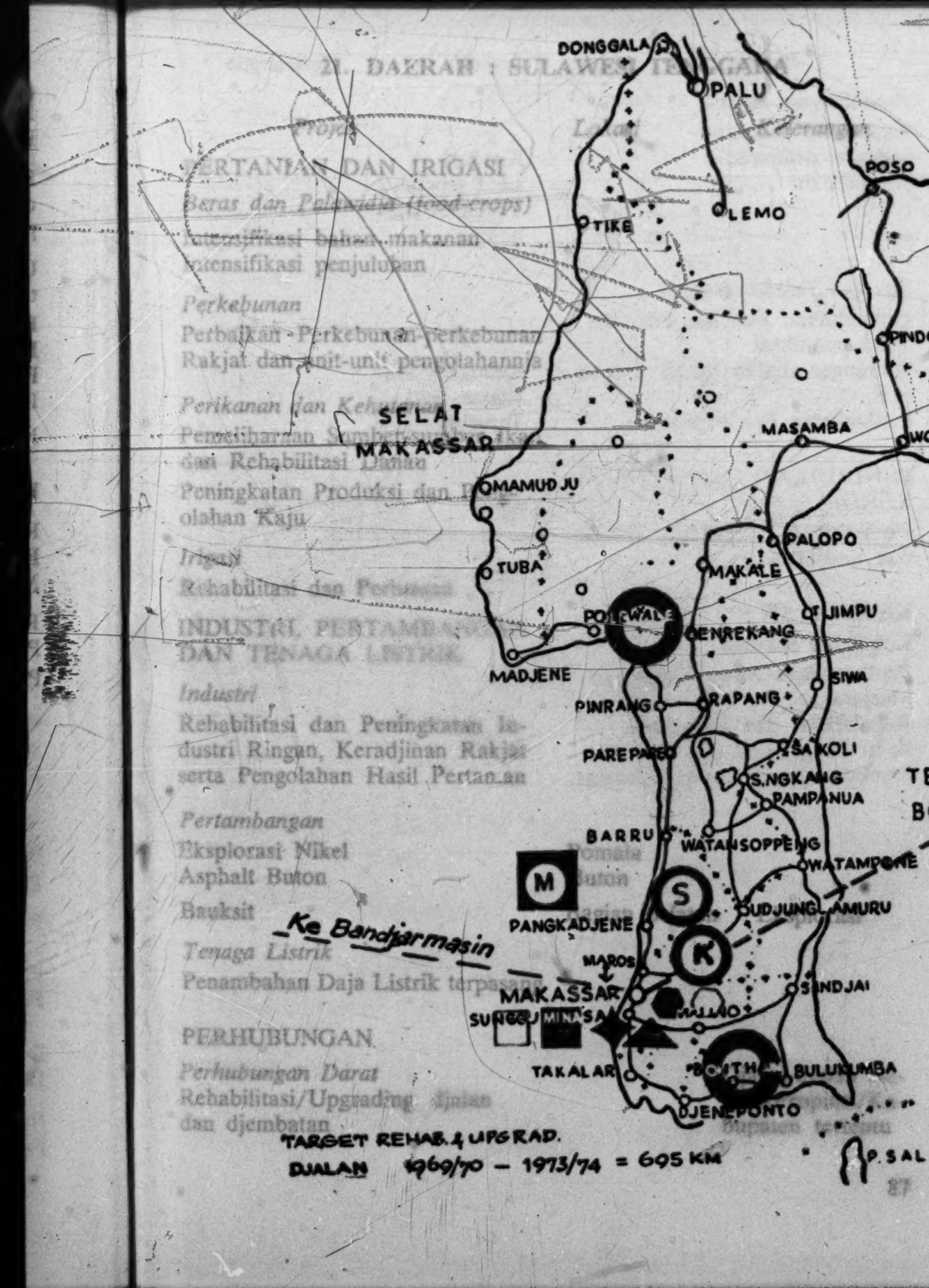
DONGGALA
PALU
POSO
LEMO
TIKE
SELAT
MAKASSAR
MASAMBA
MAMUDJU
PALOPO
TUBA
MAKALE
POLEWALI
JIMPU
ENREKANG
MADJENE
SIWA
PINRANG
RAPANG
PAREPARE
SAKOLI
S.NGKANG
PAMPANUA
BARRU
WATANSOPPENG
WATAMPONE
PANGKADJENE
UDJUNG PAMURU
Ke Bandjarmasin
MAROS
MAKASSAR
SINDJAI
TAKALAR
BULUKUMBA
DJENEPONTO
TARGET REHAB. & UPGRAD.
DJALAN 1969/70 – 1973/74 = 695 KM

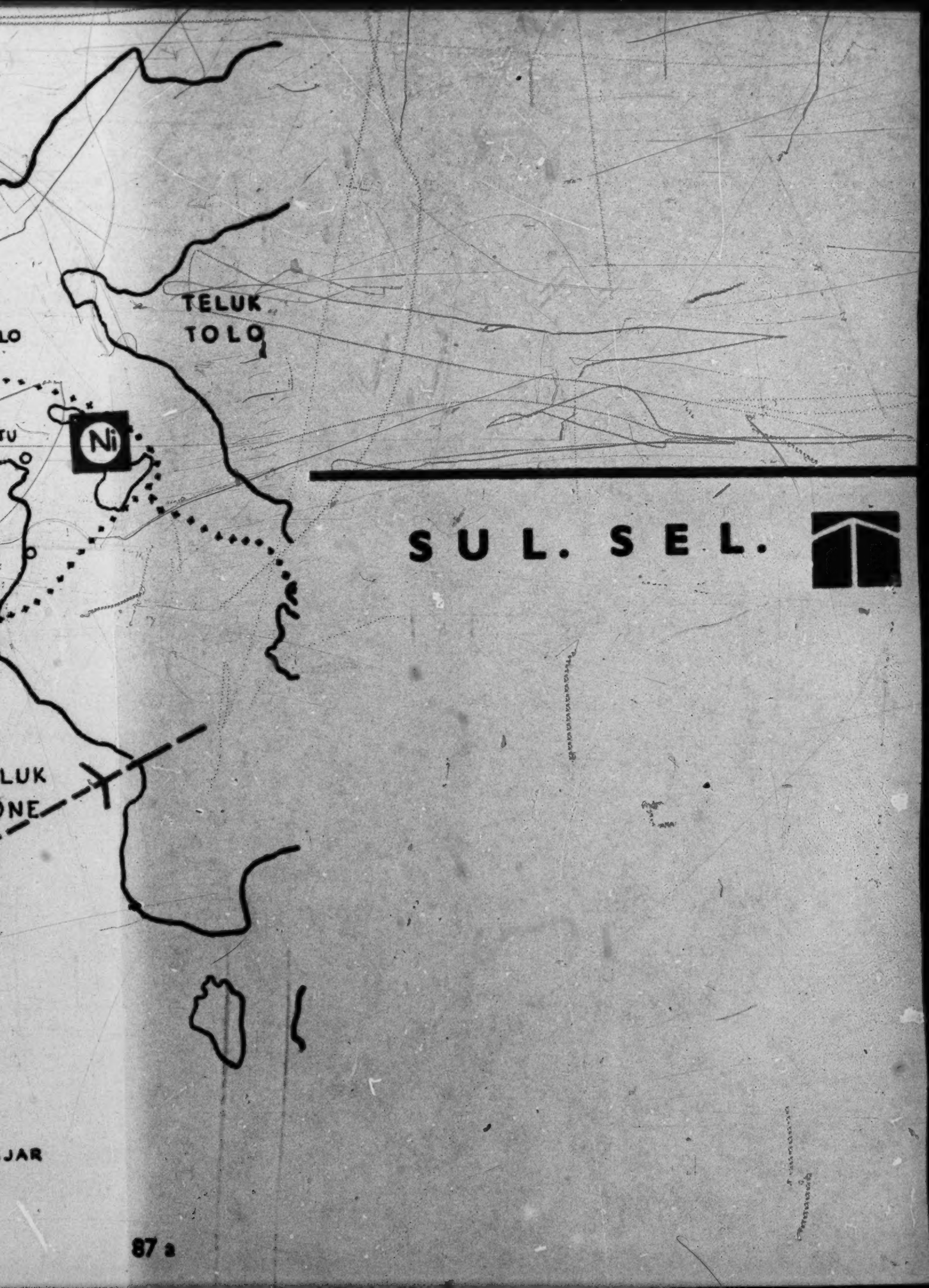
TELUK
TOLO
Ni
SUL. SEL.

SELAT
MAKASSAR
TELUK
BONE
MAKASSAR
M
S
K

21. DAERAH : SULAWESI TENGGARA

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja (food-crops)		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja		
Perikanan dan Kehutanan		
Pemeliharaan Sumber-sumber Ikan dan Rehabilitasi Danau		
Peningkatan Produksi dan Pengolahan Kaju		
Irigasi		
Rehabilitasi dan Perluasan		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri Ringan, Keradjinan Rakjat serta Pengolahan Hasil Pertanan		
Pertambangan		
Eksplorasi Nikel	Pomala	
Asphalt Buton	Buton	
Bauksit	Bagian Selatan	Eksplorasi
Tenaga Listrik		
Penambahan Daja Listrik terpasang		
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading djalan dan djembatan		Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu

Projek	Lokasi	Keterangan
Perhubungan Laut		
Keamanan pelajaran telekom pelajaran perambuan	Kendari Laut sebelah Tenggara Bonelipu	
Pos dan Telekomunikasi		
Penambahan Fasilitas Pos dan Telekomunikasi	Kendari - Makassar	
Hubungan djarak djauh dengan H.F.	Tersebar	
Peningkatan Pos Pedesaan		
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
KESEHATAN		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pemberantasan Penjakit Menular		

SUL. TENGG.

POSO
TODJO
TENORO
BATUL
DONGGI
TAMANUSI
KOLONODALE
TINOMPO
BUUMBELU
WOTU
MALILI
TJINAPUJI
TOKO
PALOPO
PAKUE
WIAU
LAWATA
WAWALANDAWE
O MAKALE
ASOLO
ANGGALO
OSIWA
WAWOTOBI
TAMBOLI
AMMUSU
KENDARI
KOLAKA
SINGKANG
Ke Makasar
MOTAHA
TELUK BONE
TANGKETADA
TOWARI
LAKARA
LANGKOWALA
RAHA
BAULE
KASIPUTIH
BUGINKALO
O SINDJA
O KADJANG
O BILA
BAUBAU
LAUT FLORES

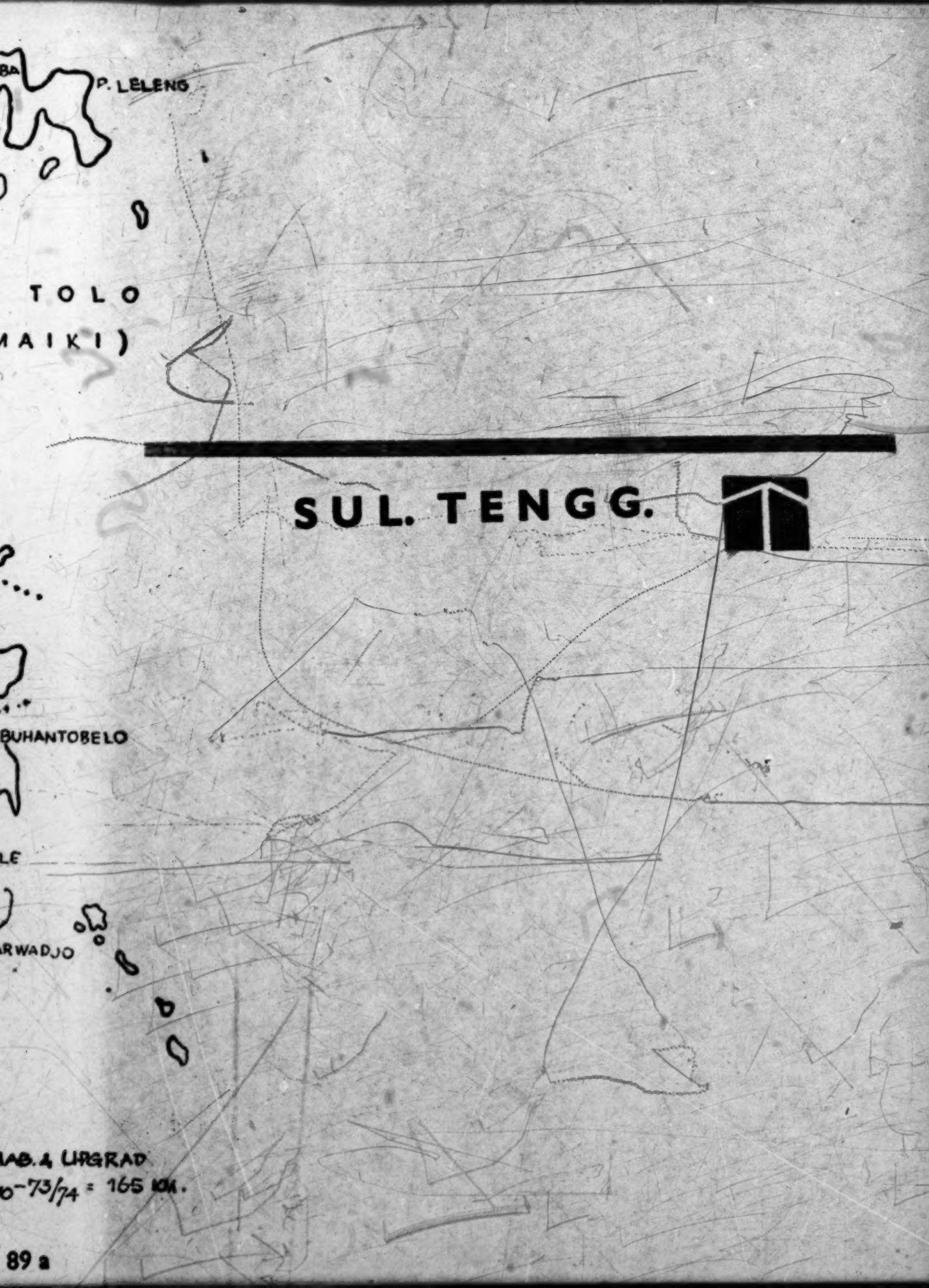
P. LELENG
TOLO
MAIKI)
SUL. TENGG.
BUHANTOBELO
LE
RWADJO
LAB. & UPGRAD
70-73/74 = 165 KM.

KENDARI
TELUK BONE
LAUT FLORES

22. DAERAH : BALI

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan Unit-unit Pengolahannja		
Perikanan dan Kehutanan		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan		
Pengendalian Erosi		Reboisasi
Rehabilitasi Kehutanan	G. Agung	
Pembinaan Hutan Serbaguna		
Peternakan		
Pengamanan, Penelitian dan bimbingan massal Peternakan		
Irigasi		
Rehabilitasi Irigasi dan Perluasan		
Projek Penanggulangan Bentjana Alam	G. Agung	
Pengendalian Bandjir		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri Ringan, Keradjinan Rakjat dan Pengolahan Hasil Pertanian		
Tenaga Listrik		
Penambahan daja listrik terpasang		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi dan Upgrading djalan dan djembatan		Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu
Perhubungan Udara		
Lapangan Terbang dan Fasilitas-fasilitasnja	Tuban	
Perhubungan Laut		
Pelabuhan dan prasarana lainnja :		
kade	Buleleng dan	
perambuan	Benoa dan Selat Bali	
telekomunikasi	Benoa	
Pos dan Telekomunikasi		
Dinas Pos Ambulance	Denpasar	
Perluasan Djaringan Dinas Pos Kilat	Djakarta - Surabaja - Banjuwangi - Denpasar	
Kantor Pos Pedesaan	Tersebar	
Perluasan/Penjempurnaan Dinas Giro dan Tjek	Denpasar	
Telekomunikasi (micro-wave)	Djakarta - Semarang - Surabaja - Denpasar	
Pariwisata	Tersebar	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi :	Denpasar	
Universitas Udajana		
Fakultas Pertanian		
Fakultas Kedokteran Chewan		
Fakultas Kedokteran		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Pengembangan Pusat Kesenian	Denpasar	
Konservatori Karawitan	Denpasar	
Museum	Denpasar	
Restorasi Goa Gadjah	Gianjar	
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENTJANA		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A		
Pemberantasan Penjakit Menular		

TARGET REHAB & UPGRAD. DJALAN
69/70 - 73/74 = 450 KM

Tg. Ungkulan
Kubutambanan
Bondalem
Bukti
SINGARADJA
Penuktuan
Sukasade
Sawan
Kb.Lupak
SIGIT
Kintamani
Tjianjar
Songan
D.BUJAN
2082
Tjatur
1717
G.Batur
D.BATUR
Triunjak
Kubu
D. BRATAR
2152
Tjandikuning
Boturiki
Sulur
Paselatan
2276
3142
G.Agung
Tjulik
Ameg
Besakih
Sanga
Apuan
Tampaksiring
Kesimpar
1174
Blumbing
Tegalalang
Rendang
KARANGASEM
Penebel
Selat
Samuan
BANGLI
Udjung
Prasi
Mandangsari
Badahulu
Seleheng
Ulakon
TABANAN
KLUNGKUNG
Krampitan
Mambal
SIANJAR
Djumpai
Lebih
Sempiai
Saba
SELAT BADUNG
DENPASAR
SANUR
Tojapaleh
Sampalan
PLEBONGAN
Lima
P. Serangan
KUTA
BENOA
Semaja
DJEMBRANA
Tangkad
Buaiu
Ug. Gagar
Pedjatu

B A L I

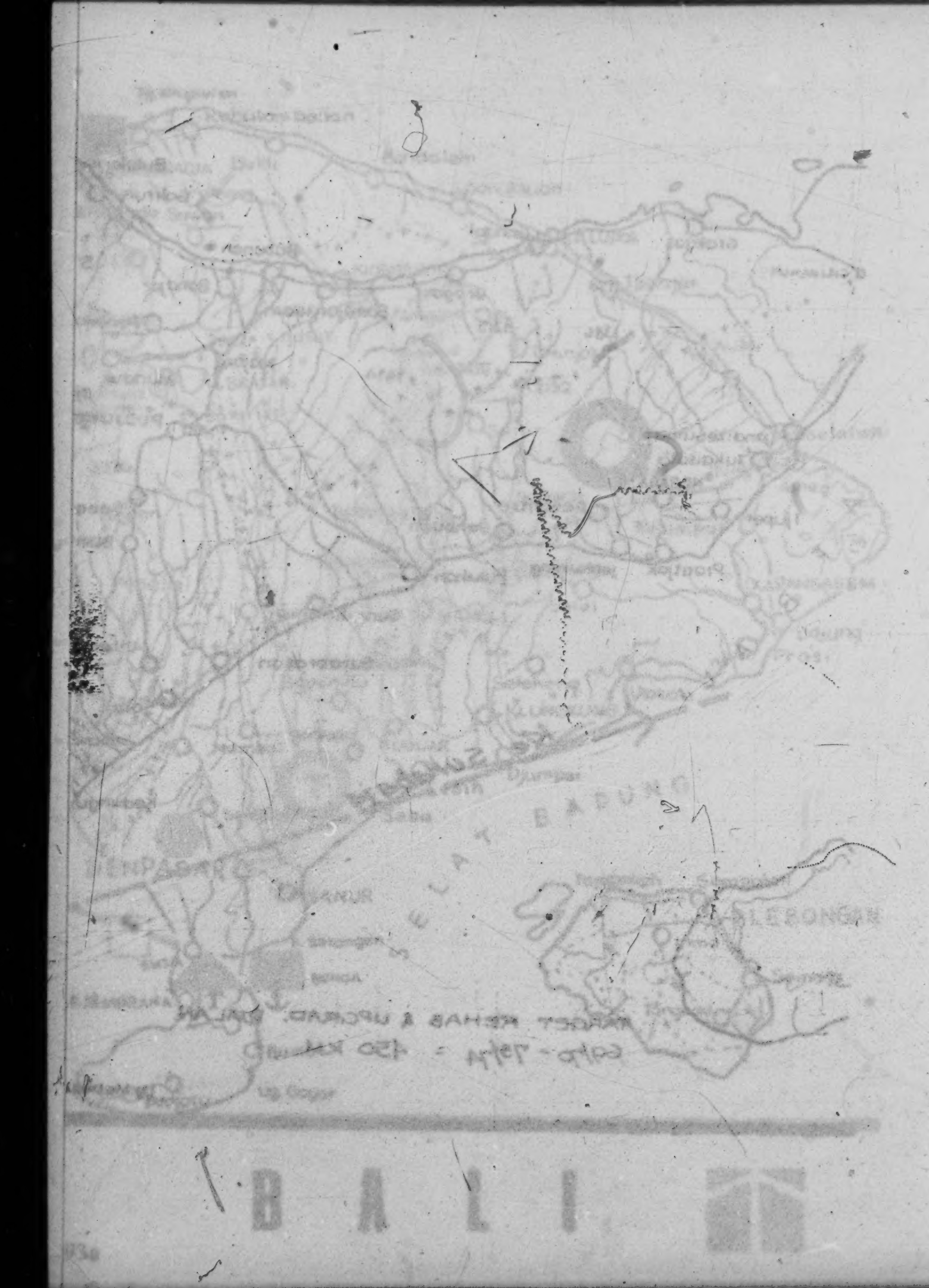
BALI

23. DAERAH NUSATENGGARA BARAT

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja		
Perikanan dan Kehutanan		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan		
Pengendalian Erosi		Reboisasi
Peternakan		
Pemasaran dan Pengolahan		
Pengamanan, Penelitian dan Bimbingan massal Peternakan		
Irigasi		
Rehabilitasi dan Perluasan		
Pengendalian Bandjir		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri Ringan, Keradjinan Rakjat dan Pengolahan Hasil Pertanian		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
Tenaga Listrik		
Penambahan daja listrik terpasang		
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi dan Upgrading djalan dan djembatan		Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu
Perhubungan Udara		
Rehabilitasi/Upgrading Lapangan Terbang dan fasilitas-fasilitasnja	Ampenan	
Perhubungan Laut		
Fasilitas dan Keamanan Pelajaran	Utara Lombok Pulau Sangeang	
Pos dan Telekomunikasi		
Perluasan dan Upgrading Pos dan Giro	Sumbawa Bima	
Pembangunan Hubungan Djarak Djauh	Mataram - Surabaja Dompu - Selong - Mataram	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Tenggara Barat Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Chewan dan Peternakan	Mataram	
KESEHATAN		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pemberantasan penjakit menular		

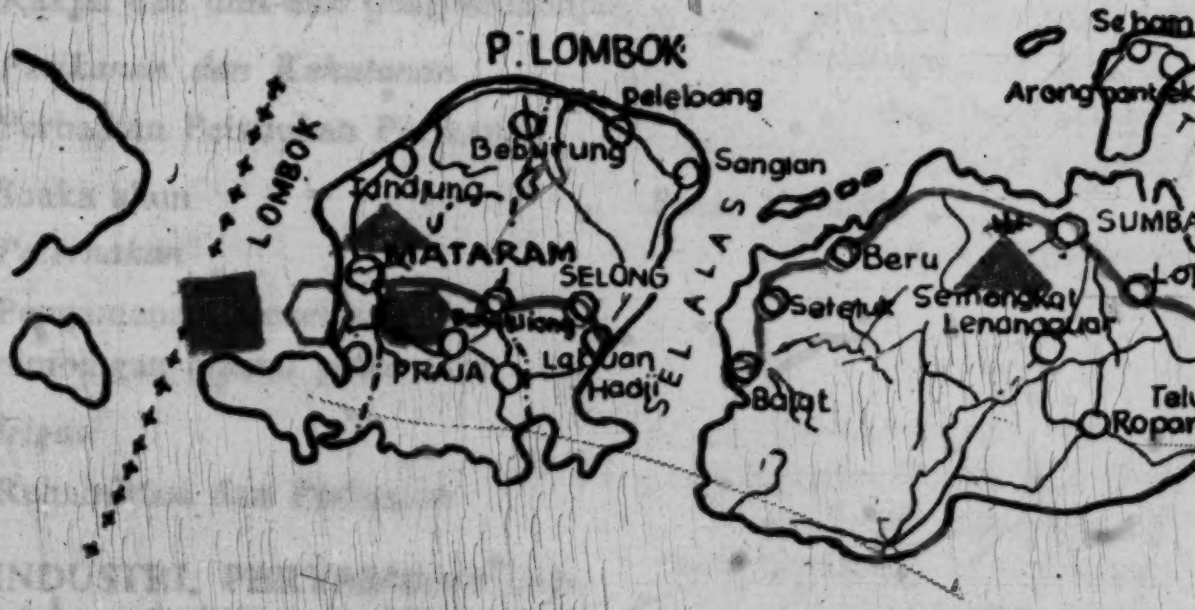

TARGET REHAB & UPGRAD. DJALAN '69/70

NUSATE

'73/74 = 230 KM

NGG. BARAT

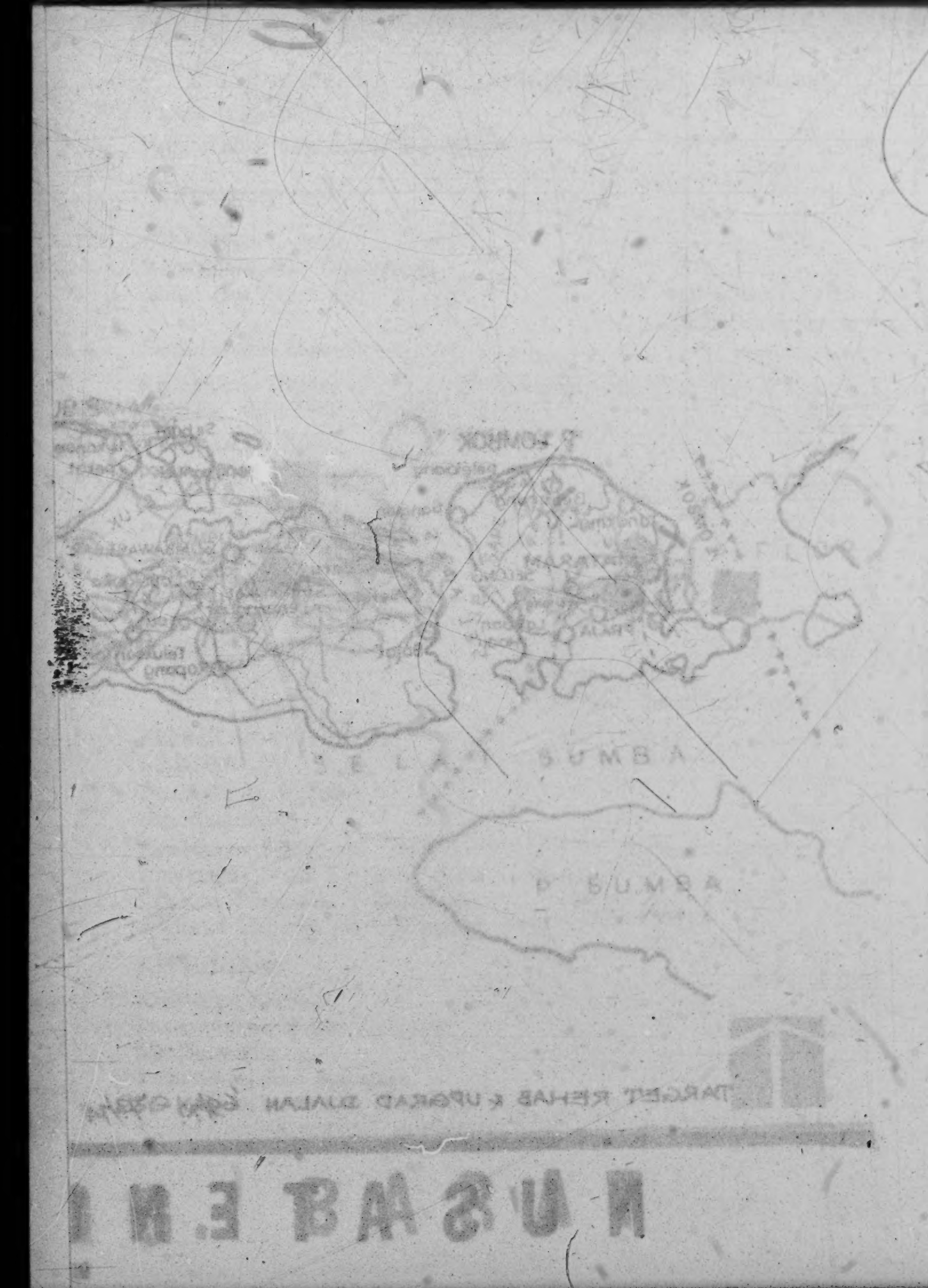

24. DAERAH : NUSATENGGARA TIMUR

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN & IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja		
Perikanan dan Kehutanan		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan		
Suaka alam	Pulau Komodo	
Peternakan		
Pengamanan, penelitian dan bimbingan massal peternakan		
Irigasi		
Rehabilitasi dan Perluasan		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri Ringan, Keradjinan Rakjat dan Pengolahan Hasil Perikanan		
Pertambangan		
Minjak dan Gas Bumi	Timor	Off-shore
Bauksit	P. Sumba	Eksplorasi
Tenaga Listrik		
Penambahan Daja Listrik terpasang		

Projek	Lokasi	Keterangan
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading Djalan dan Djembatan		Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu
Angkutan Umum dan Angkutan Kota	Kupang dan sekitarnja	
Workshop untuk Upgrading djalan		
Perhubungan Udara		
Rehabilitasi/Upgrading Lapangan Terbang dan fasilitasnja	Kupang	
Perhubungan Laut		
Fasilitas Keamanan Pelajaran	Waingapu, Enden	Penambahan Telekom, Pelajaran
Rehabilitasi/Penambahan fasilitas pelabuhan	Tenau (Kupang)	Fasilitas Gudang, Kade, Air, Listrik, alat-alat bongkar-muat
Pos dan Telekomunikasi		
Perluasan dan Pembangunan Djaringan Pos dan Giro	Kupang	
Pembangunan Telekomunikasi (djarak djauh)		
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Tjendana Fakultas Peternakan		
KESEHATAN		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan dan B.K.I.A.		
Pemberantasan Penjakit Menular		

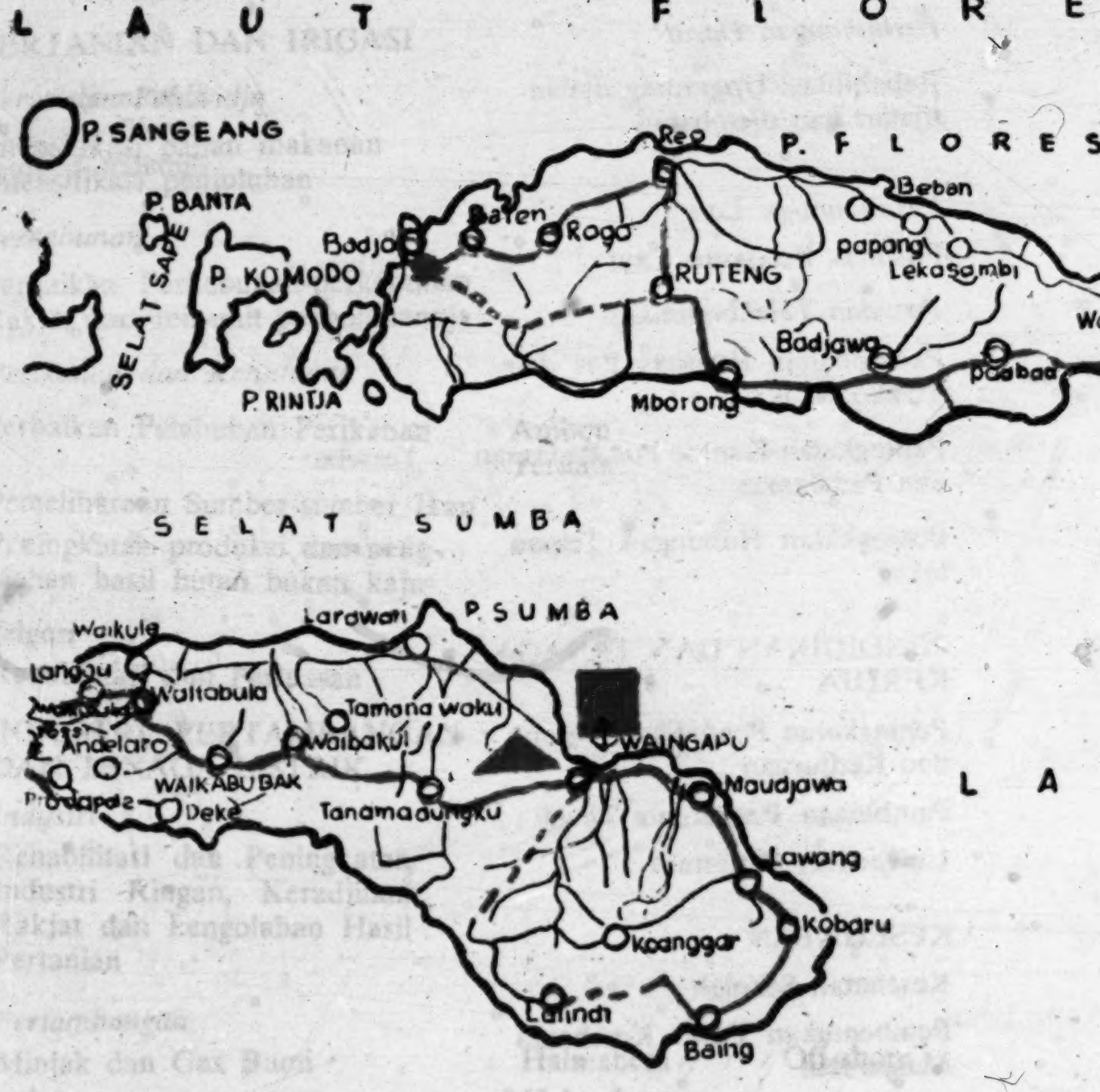
L A U T F L O R E
P. SANGEANG
P. BANTA
SELAT SAPE
P. KOMODO
P. RINTJA
Badjo
Baten
Rogo
Reo
P. F L O R E S
Beban
papang
Lekasambi
RUTENG
Badjawa
Mborong
SELAT SUMBA
Waikula
Larowari
P. S U M B A
Langgu
Waitabula
Tamana waku
Andelaro
Waibakul
WAINGAPU
WAIKABUBAK
Prodapdz
Deke
Tanamadungku
Maudjawa
Lawang
Kobaru
Kanggar
Lalindi
Baing
L A
TARGET REHAB. & URGRAD. DJALAN
'69/70 – '73/74 = 500 KM.
S A M U D E R A
I N D
N U S A T E N G

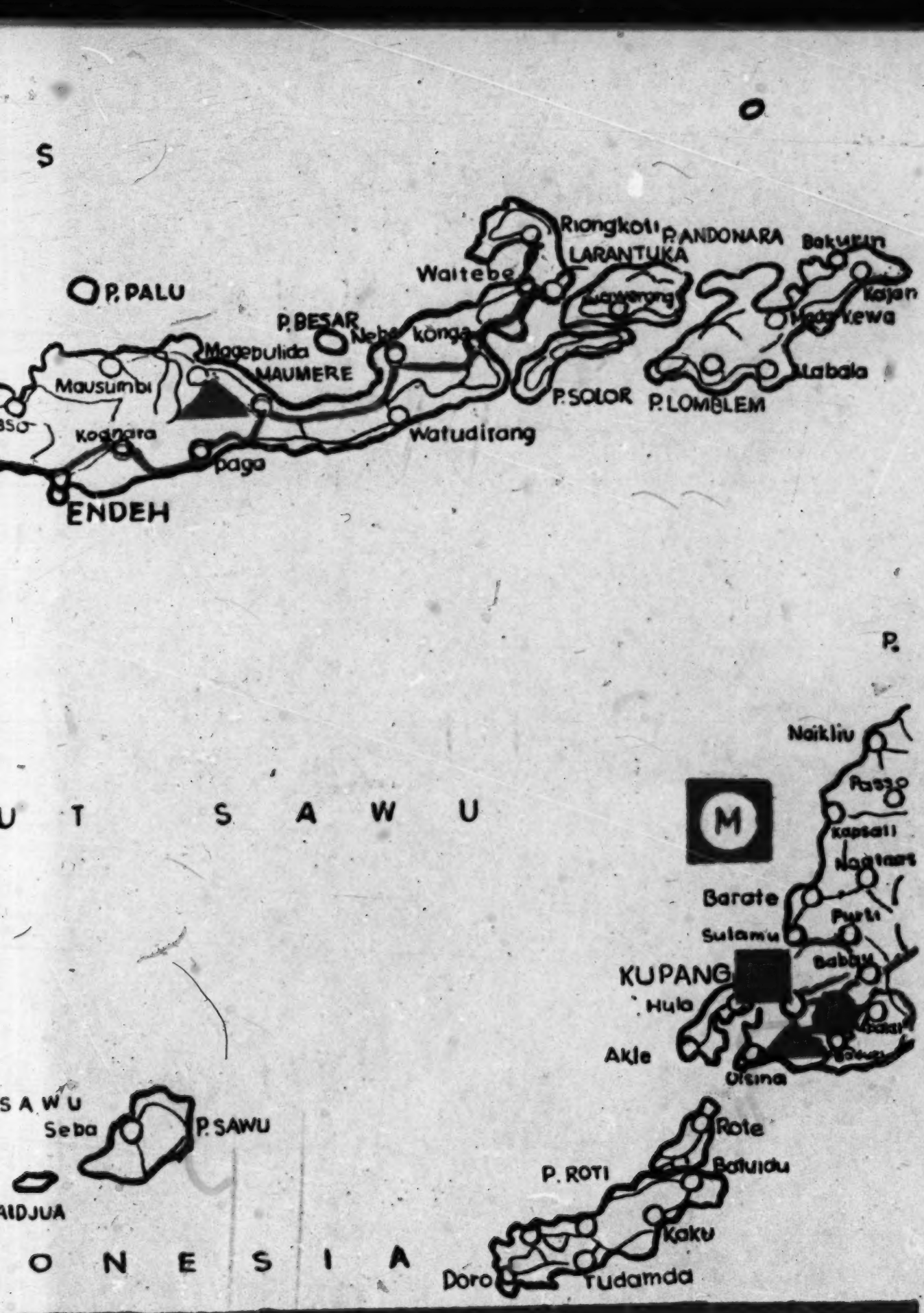
S
O
P. PALU
P. BESAR
Magebulida
MAUMERE
Mausumbi
Kognara
paga
ENDEH
Watudirang
Waitebe
Riongkoti
LARANTUKA
P. ANDONARA
Bakukin
Kajan
Kewa
Labala
P. SOLOR
P. LOMBLEM
P.
Naikliu
Passo
Kapsali
Barate
Sulamu
KUPANG
Hula
Akle
Olsina
U T S A W U
SAWU
Seba
P. SAWU
AIDJUA
O N E S I A
Rote
P. ROTI
Kaku
Doro
Tudamda

. TIMUR

KUPANG

25. DAERAH : MALUKU

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERTANIAN DAN IRIGASI		
Beras dan Palawidja		
Intensifikasi bahan makanan		
Intensifikasi penjuluhan		
Perkebunan		
Perbaikan Perkebunan-perkebunan Rakjat dan unit-unit pengolahannja		
Perikanan dan Kehutanan		
Perbaikan Pelabuhan Perikanan	Ambon Ternate	
Pemeliharaan Sumber-sumber Ikan		
Peningkatan produksi dan pengolahan hasil hutan bukan kaju		
Irigasi		
Rehabilitasi dan Perluasan		
INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN TENAGA LISTRIK		
Industri		
Rehabilitasi dan Peningkatan Industri Ringan, Keradjinan Rakjat dan Pengolahan Hasil Pertanian		
Pertambangan		
Minjak dan Gas Bumi	Halmahera	Off-shore
Nikel	Halmahera	
Bauksit	P. Taliabu, P. Mangale, P. Buru, P. Obi, P. Seram, Kep. Aru	Eksplorasi
Tenaga Listrik		
Penambahan daja listrik terpasang		

Projek	*Lokasi*	*Keterangan*
PERHUBUNGAN		
Perhubungan Darat		
Rehabilitasi/Upgrading djalan-djalan dan djembatan		**Djalan-djalan Negara/Propinsi/Kabupaten tertentu**
Perhubungan Laut		
Fasilitas Pelajaran Laut	**Ambon**	
Pos dan Telekomunikasi		
Penambahan Fasilitas Pos dan Telekomunikasi		
Peningkatan Kantor Pos Pedesaan dan Pedalaman	**Tersebar**	
Peningkatan Hubungan Telpon lokal	**Ambon**	
PENDIDIKAN DAN TENAGA KERDJA		
Peningkatan Pendidikan Tehnik dan Kedjuruan		
Pembinaan Perguruan Tinggi :		
Universitas Pattimura		
KESEHATAN.		
Kesehatan Sekolah		
Pembentukan Pusat Kesehatan Masjarakat		
Rehabilitasi dan Perluasan Balai Pengobatan B.K.I.A.		

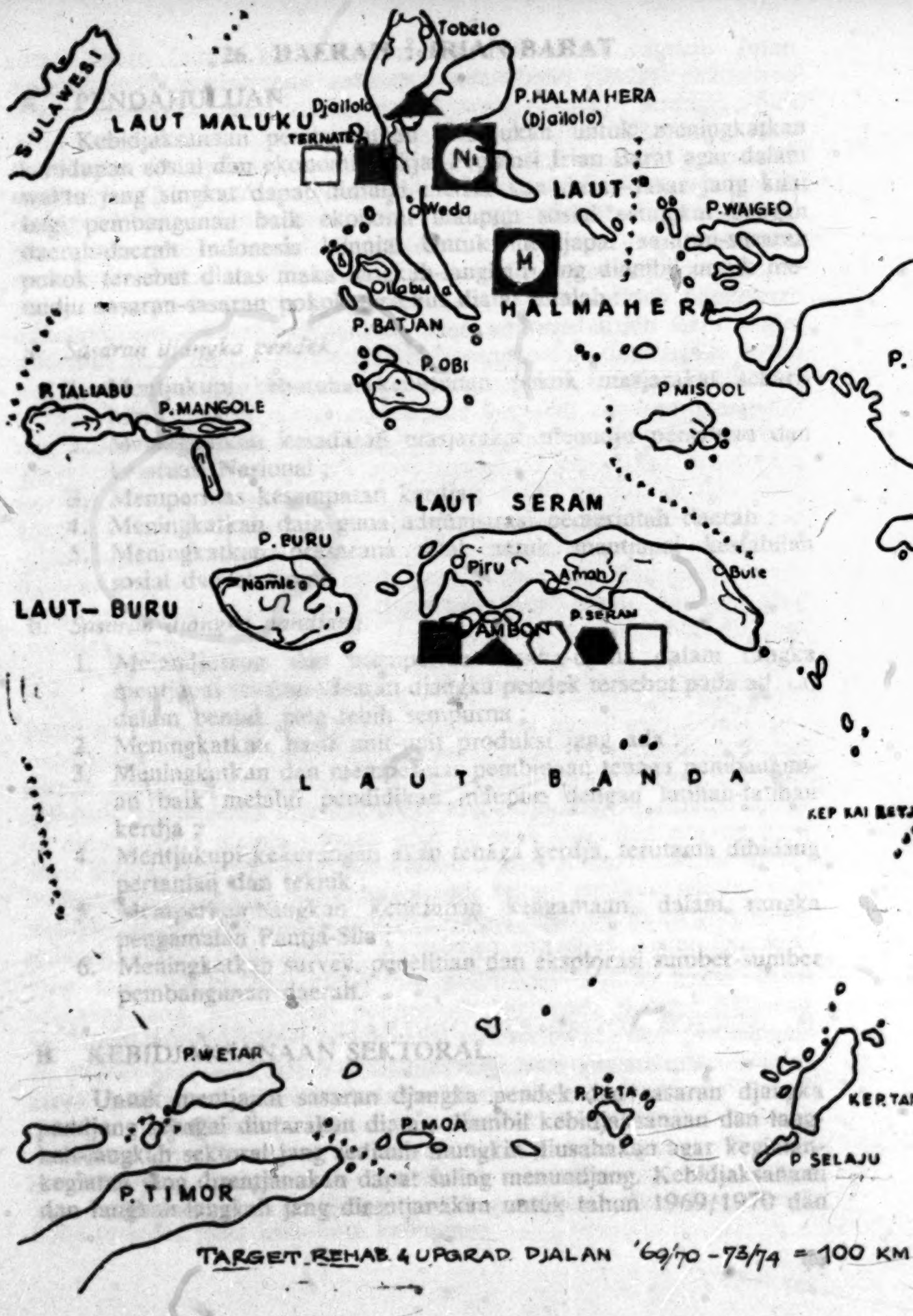
SULAWESI
LAUT MALUKU
Tobelo
Djailolo
TERNATE
P. HALMAHERA
(Djailolo)
Ni
LAUT
Weda
P. WAIGEO
M
Ollabu
HALMAHERA
P. BATJAN
P. OBI
P. TALIABU
P. MANGOLE
P. MISOOL
LAUT SERAM
P. BURU
Namlea
Piru
Amah
Bule
LAUT- BURU
P. SERAM
AMBON
L A U T B A N D A
KEP KAI
P. WETAR
P. PETA
P. MOA
P. TIMOR
P SELAJU
TARGET REHAB & UPGRAD DJALAN '69/70 - 73/74 = 100 KM

M A L U K U

Tobelo
P. HALMAHERA
(Djailolo)
Djailolo
LAUT MALUKU
SULAWESI
TERNATE
LAUT
P. WAIGEO
Wada
HALMAHERA
Ulobu
P. BATJAN
P. OBI
P. MISOOL
P. TALIABU
P. MANGOLE
LAUT SERAM
MALUKU
P. BURU
Bula
Amah
Piru
Namlea
LAUT-BURU
AMBON
LAUT BANDA
KEP KAI RATJU
KERRAMI
P. SELAJU
P. PETA
P. MOA
P. WETAR
P. TIMOR
TARGET REHAB & UPGRAD DJALAN '69/70-73/74 = 100 KM

26. DAERAH : IRIAN BARAT

A. PENDAHULUAN.

Kebidjaksanaan pembangunan ditudjukan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi Rakjat Propinsi Irian Barat agar dalam waktu jang singkat dapat dimulai meletakkan dasar-dasar jang kuat bagi pembangunan baik ekonomi maupun sosial setingkat dengan daerah-daerah Indonesia lainnja. Untuk mentjapai sasaran-sasaran pokok tersebut diatas maka langkah-langkah jang diambil untuk menudju sasaran-sasaran pokok tersebut diatas adalah :

a. *Sasaran djangka pendek.*

1. Mentjukupi kebutuhan-kebutuhan pokok masjarakat sehari-hari ;
2. Meningkatkan kesadaran masjarakat menudju persatuan dan kesatuan Nasional ;
3. Memperluas kesempatan kerdja ;
4. Meningkatkan daja guna administrasi pemerintah daerah ;
5. Meningkatkan prasarana vital untuk mentjapai kestabilan sosial dan ekonomi.

b. *Sasaran djangka pandjang.*

1. Melandjutkan dan memperluas usaha-usaha dalam rangka mentjapai sasaran-sasaran djangka pendek tersebut pada ad. (a) dalam bentuk jang lebih sempurna ;
2. Meningkatkan hasil unit-unit produksi jang ada ;
3. Meningkatkan dan memperluas pembinaan tenaga pembangunan baik melalui pendidikan maupun dengan latihan-latihan kerdja ;
4. Mentjukupi kekurangan akan tenaga kerdja, terutama dibidang pertanian dan teknik ;
5. Memperkembangkan kehidupan keagamaan, dalam rangka pengamalan Pantja-Sila ;
6. Meningkatkan survey, penelitian dan eksplorasi sumber-sumber pembangunan daerah.

B. KEBIDJAKSANAAN SEKTORAL.

Untuk mentjapai sasaran djangka pendek dan sasaran djangka pandjang sebagai diutarakan diatas, diambil kebidjaksanaan dan langkah-langkah sektoral jang sedjauh mungkin diusahakan agar kegiatan-kegiatan jang direntjanakan dapat saling menundjang. Kebidjaksanaan dan langkah-langkah jang direntjanakan untuk tahun 1969/1970 dan

untuk djangka waktu seluruh rentjana (lima tahun) djuga memperhatikan faktor pembinaan kapasitas administrasi pemerintahan dan aparatur pembangunan, pembatasan jang diakibatkan keadaan geografis serta masih sangat kurangnja fasilitas prasarana. Disamping batasan-batasan tersebut diatas, belum diexplorasikan dan dieksploitasikannja sumber-sumber kekajaan alam di Daerah djuga mendjadi salah satu masalah pokok dalam perentjanaan pembangunan ini. Berhubung dengan mendesaknja usaha-usaha jang diperlukan untuk mentjapai tudjuan konsolidasi dan stabilisasi politik, keamanan dan sosial dalam tahun 1969, maka program pembangunan untuk tahun 1969 dititik-beratkan pada peningkatan fasilitas pengangkutan untuk mendjamin kelantjaran dan kontinuitas supply dan distribusi dari bahan-bahan kebutuhan pokok masjarakat, baik jang ada didaerah pantai maupun didaerah pedalaman. Selain itu djuga diutamakan usaha-usaha jang bertudjuan meningkatkan kesadaran-nasional dan pembinaan kehidupan kemasjarakatan. Persoalan lain jang mendesak pada saat ini adalah belum berhasil terpenuhinja kebutuhan minimal akan fasilitas akomodasi bagi para petugas-petugas jang ada sekarang ini. Dalam hubungan dengan pelaksanaan pembangunan jang direntjanakan dalam lima tahun mendatang, masalah ini menuntut penjelesaian jang minimal harus dapat mentjegah timbulnja hambatan-hambatan jang diakibatkan kesukaran tersebut.

I. SEKTOR PERHUBUNGAN.

Untuk mendjamin kelantjaran dan kontinuitas supply dan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok masjarakat maupun memperlantjar djalannja roda pemerintahan daerah, jang merupakan sarana utama adalah perhubungan laut. Keadaan dan kemampuan dari alat perhubungan laut pada saat ini baru dapat melajani kurang lebih 40 persen dari kebutuhan, baik ditindjau dari segi alat angkutannja maupun fasilitas lain jang mutlak diperlukan untuk angkutan laut tersebut. Disamping itu djuga tidak dapat diabaikan keharusan mempergunakan angkutan udara kedaerah pedalaman, karena tidak adanja fasilitas perhubungan darat untuk mentjapai tempat-tempat tersebut.

II. SEKTOR SOSIAL/ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

Didalam rangka meningkatkan hidup sosial baik jang berada didaerah pantai maupun didaerah pedalaman, maka usaha jang direntjanakan dititik-beratkan pada perluasan pendidikan, terutama pendidikan dasar dan kedjuruan dan peningkatan serta perluasan usaha-usaha pemeliharaan kesehatan. Administrasi pemerintahan daerah menghadapi tugas-tugas jang tjukup berat, sebab selain mem-

bina kesedjahteraan rakjat, djuga sekaligus mempunjai kewadjiban membimbing anggauta masjarakat kearah peningkatan taraf hidup sosial dari keadaan jang relatif sangat terbelakang. Selain itu djuga hambatan jang diakibatkan oleh kondisi-kondisi phisik setempat merupakan tantangan jang harus diatasi dengan fasilitas jang sangat terbatas. Oleh karena itu mutlak perlu peningkatan alat dan sarana, baik jang bersifat material maupun mental, dari administrasi pemerintahan.

III. SEKTOR PRODUKSI.

Hingga saat ini kebutuhan hidup rakjat terutama jang berdiam didaerah pantai dan daerah sekeliling kota hampir seluruhnja dipenuhi dengan barang-barang import. Hal ini terdjadi karena produksi didaerah masih dalam taraf perkembangan jang minim dan terbatas pada beberapa matjam kebutuhan. Djuga kesulitan pelaksanaan perdagangan antar pulau kedaerah ini merupakan faktor lain jang mendorong besarnja import. Walaupun sumber-sumber bahan produksi dan tenaga kerdja sangat terbatas, dirasa perlu memanfaatkan potensi produksi daerah semaksimal mungkin untuk mengurangi kebutuhan akan import. Disamping itu kegiatan ini djuga akan memperluas kesempatan kerdja, sekaligus akan meningkatkan pendapatan daerah. Hal inipun akan membawa effek-effek jang positif dalam rangka pembinaan tata-tjara hidup sosial masjarakat sekitarnja, dan pembinaan golongan entrepreneur jang masih sangat lemah.

Dengan dibentuknja "Joint Development Commission" dalam rangka penggunaan FUNDWI, diharapkan sumber-sumber produksi potensiil daerah akan dapat diusahakan.

IV. SEKTOR PUBLIC UTILITIES.

Didalam rentjana ini sektor Public Utilities meliputi rehabilitasi dan pembangunan perumahan dinas, salurán air minum dan penjediaan tenaga listrik. Situasi jang ada didaerah pada dewasa ini, seperti jang telah disinggung diatas, mengharuskan adanja usaha untuk menanggulangi kekurangan perumahan bagi para petugas didaerah. Sekalipun disadari bahwa penggunaan sumber biaja untuk pembangunan perumahan dinas ini akan mengurangi luas dan intensitas pembangunan dalam sektor-sektor lain, tetapi karena daerah ini masih merupakan daerah jang baru dibuka (fasilitas akomodasi tidak mungkin diperoleh dengan tjara lain), maka pembangunan perumahan ini terpaksa dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan minimal.

Rehabilitasi dan perluasan saluran air minum dan tenaga listrik tetap terbatas pada kota-kota kabupaten.

C. PEMBIAJAAN.

Ditindjau dari segi pembiajaan, pembiajaan pembangunan Rentjana Pembangunan Lima Tahun Propinsi Irian Barat dengan rupiah, dapat dibedakan dalam dua golongan, jaitu :

a. Pembiajaan jang merupakan Counterpart dari FUNDWI.

b. Pembiajaan jang diluar Counterpart dari FUNDWI.

Penjusunan rentjana dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pembangunan dari kedua golongan pembiajaan tersebut diatas merupakan kegiatan-kegiatan jang satu sama lain diusahakan agar sedapat mungkin saling menundjang dan melengkapi.

Rentjana Pembangunan jang dituangkan dalam rangka FUNDWI dititik-beratkan pada rehabilitasi dan pembangunan dibidang ekonomi, sedang Rentjana Pembangunan Lima Tahun (1969/1970—1973/1974) diluar itu ditekankan pada rehabilitasi dan pembangunan dibidang sosial dan pemerintahan. Rentjana penggunaan Dana PBB untuk pembangunan Propinsi Irian Barat (FUNDWI) tersebut meliputi pembiajaan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sebesar US$ 30 djuta, untuk mana fihak Republik Indonesia diharapkan dapat menjediakan "counter-part contribution" dalam mata-uang Rupiah sebesar kira-kira Rp. 7 miljard bagi pelaksanaan projek-projek rehabilitasi dan pembangunan ekonomi, dan kurang-lebih Rp. 3,5 miljard untuk pelaksanaan projek-projek dibidang sosial non-ekonomi, dengan demikian djumlah biaja counterpart jang diperlukan untuk menampung pelaksanaan projek-projek dalam rangka FUNDWI berdjumlah sebesar lebih kurang Rp. 10,5 miljard.

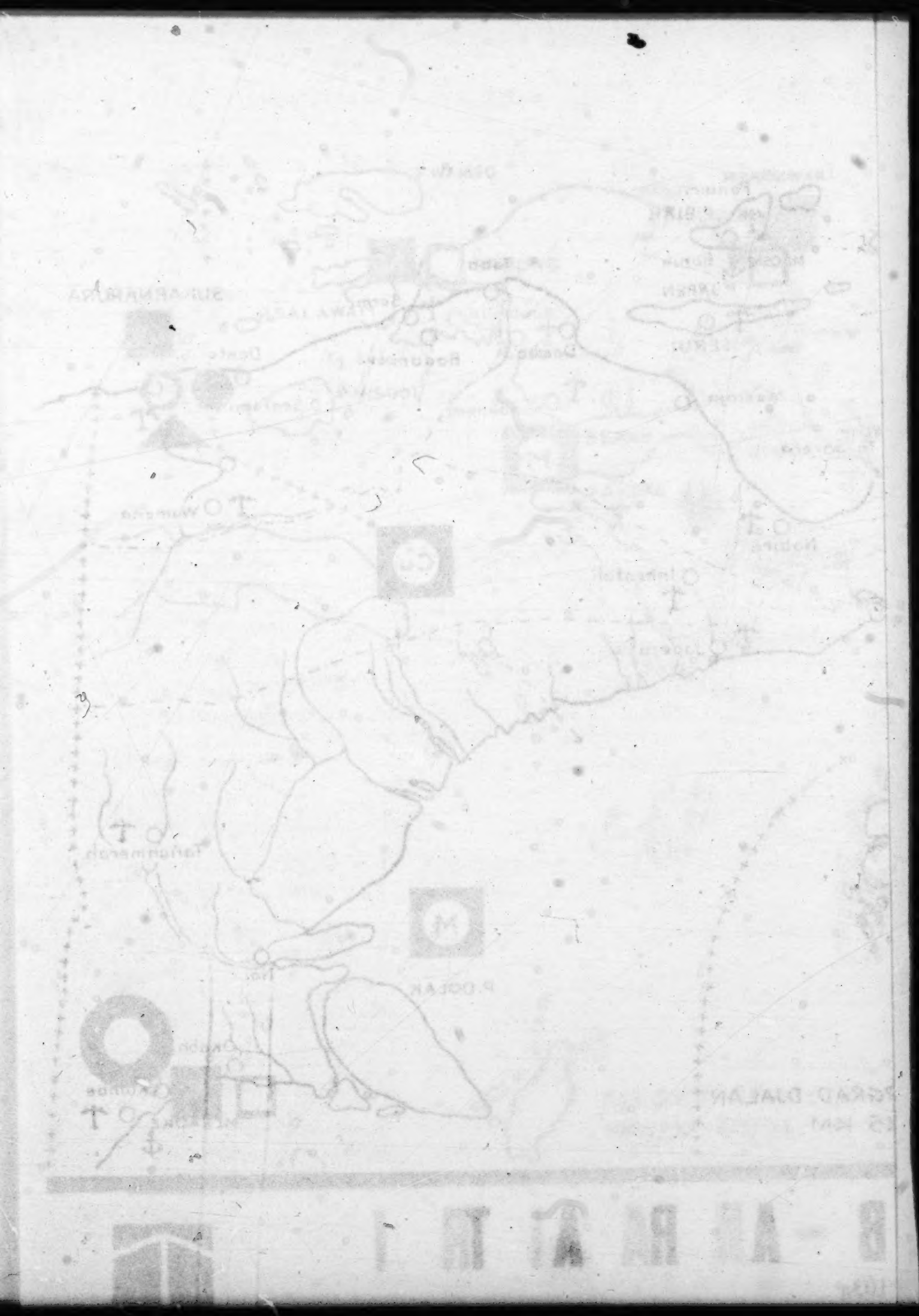

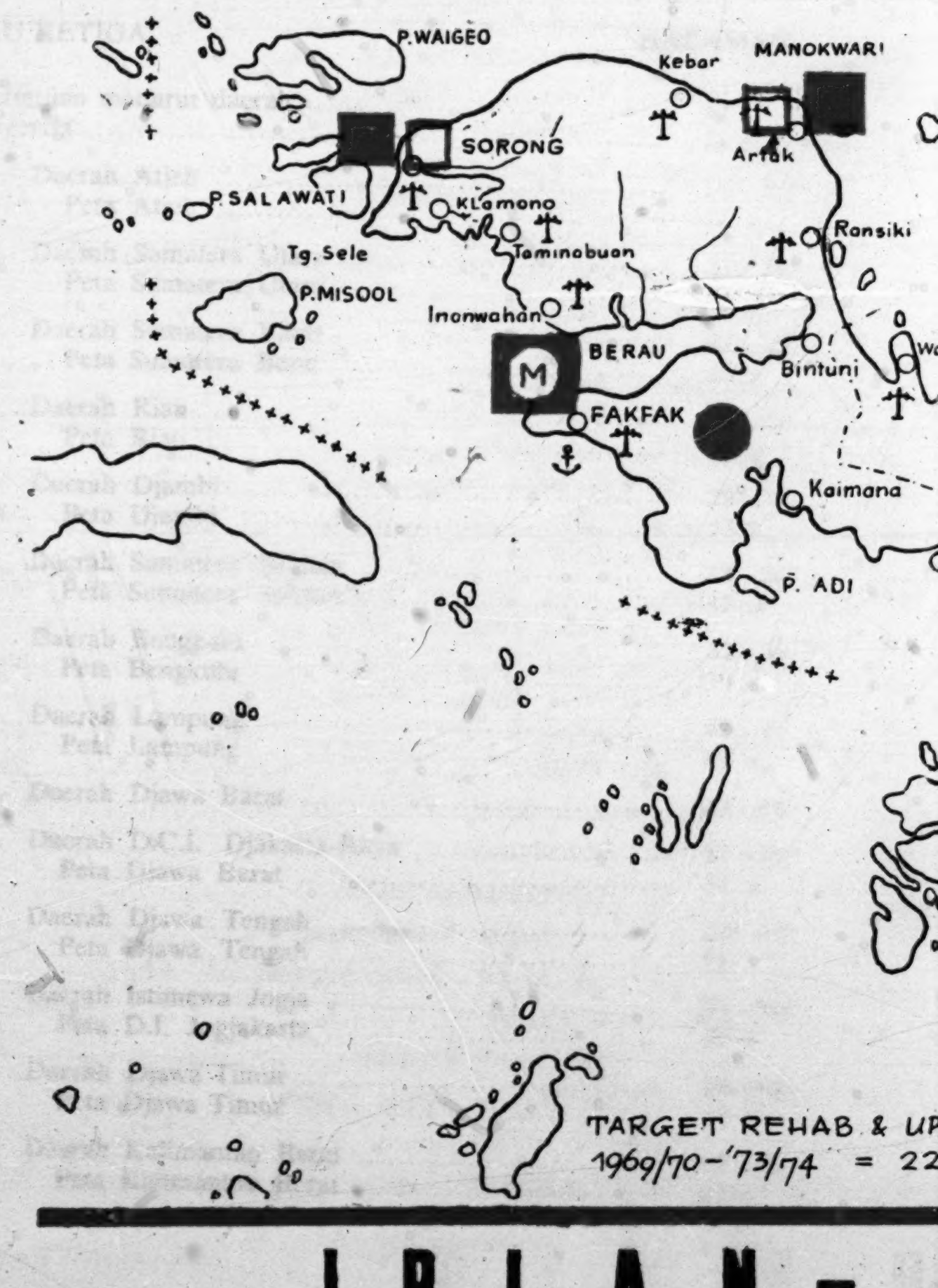
P.WAIGEO
Kebar
MANOKWARI
SORONG
Arfak
P.SALAWATI
KLamono
Ransiki
Tg. Sele
Taminobuan
P.MISOOL
Inanwahan
BERAU
Bintuni
FAKFAK
Kaimana
P. ADI
TARGET REHAB & UP
1969/70-'73/74 = 22

I R I A N -

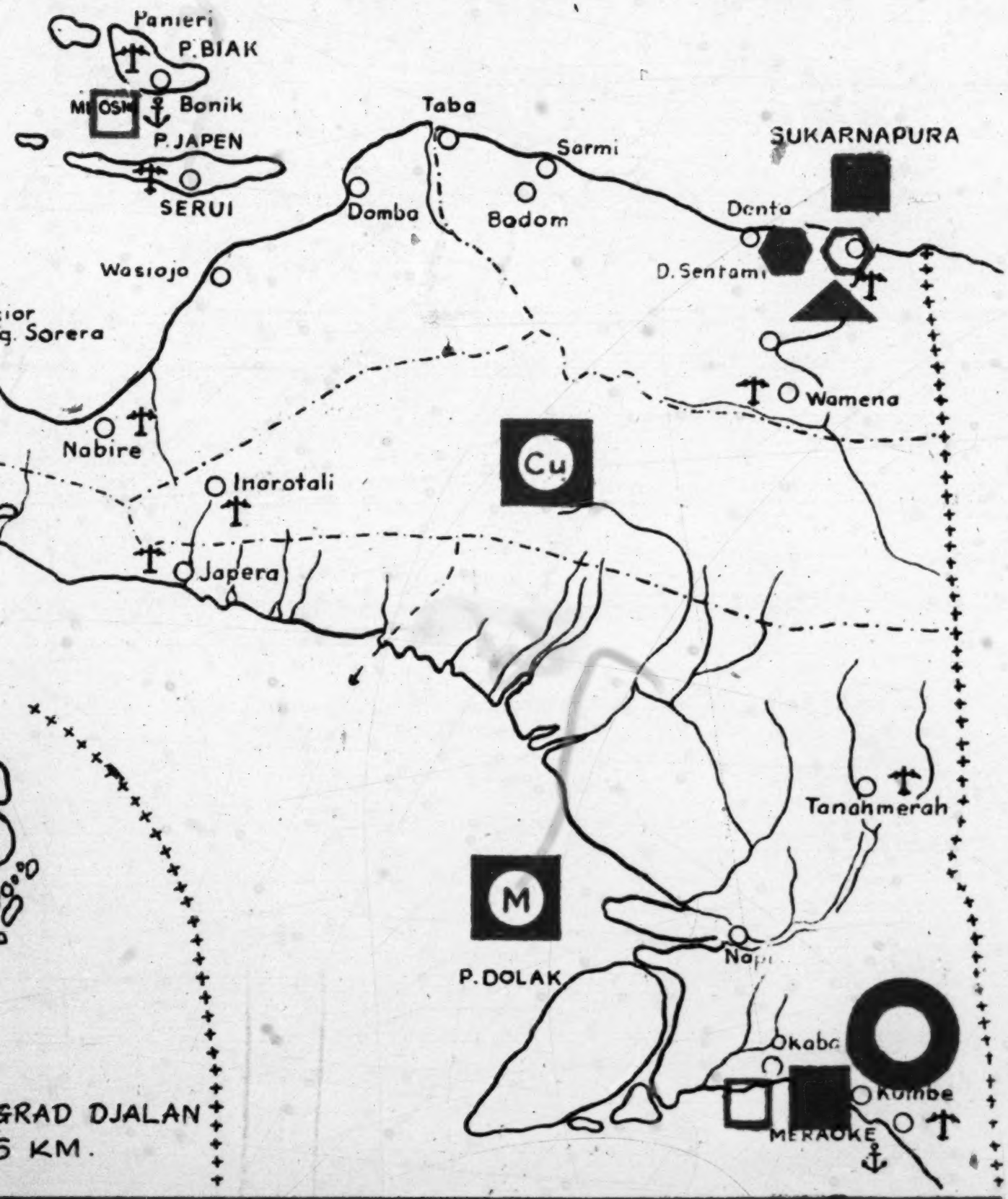
Panieri
P. BIAK
Bonik
P. JAPEN
SERUI
Taba
Sarmi
SUKARNAPURA
Domba
Bodom
Denta
D. Sentani
Wasiojo
Wamena
Nabire
Cu
Inarotali
Japera
Tanahmerah
M
P. DOLAK
Okaba
Kumbe
MERAUKE
GRAD DJALAN
6 KM.

B A R A T

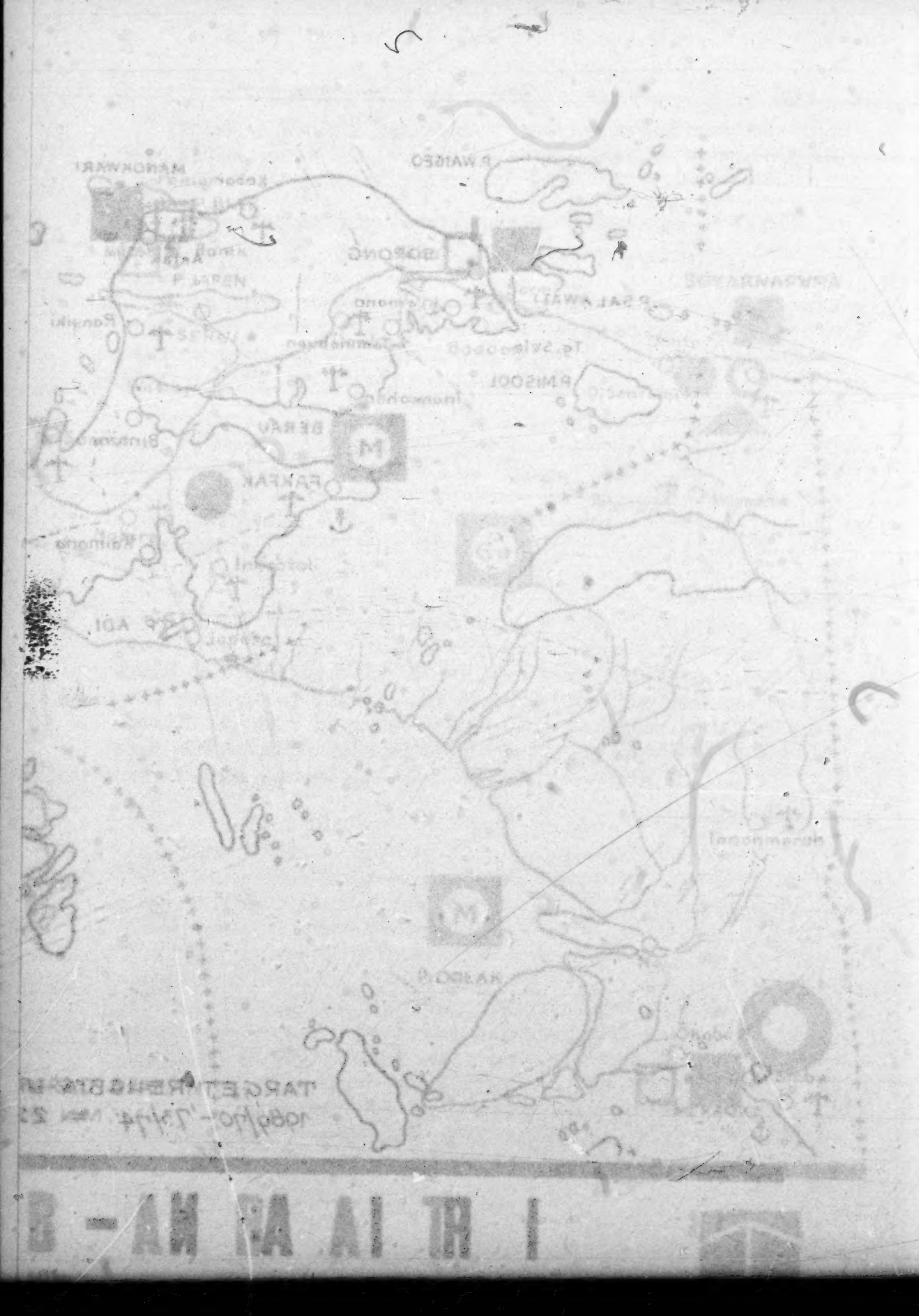

PETUNDJUK HALAMAN BUKU III

BUKU KETIGA **HALAMAN**

Perintjian menurut daerah 11
Legenda ..... 13 a

1. Daerah Atjeh ..... 13 - 15
   Peta Atjeh ..... 17 a
2. Daerah Sumatera Utara ..... 17 - 20
   Peta Sumatera Utara ..... 21 a
3. Daerah Sumatera Barat ..... 21 - 23
   Peta Sumatera Barat ..... 25 a
4. Daerah Riau ..... 25 - 28
   Peta Riau ..... 29 a
5. Daerah Djambi ..... 29 - 31
   Peta Djambi ..... 33 a
6. Daerah Sumatera Selatan ..... 33 - 36
   Peta Sumatera Selatan ..... 37 a
7. Daerah Bengkulu ..... 37 - 38
   Peta Bengkulu ..... 39 a
8. Daerah Lampung ..... 39 - 41
   Peta Lampung ..... 43 a
9. Daerah Djawa Barat ..... 43 - 46
10. Daerah D.C.I. Djakarta-Raya ..... 47 - 50
    Peta Djawa Barat ..... 51 a
11. Daerah Djawa Tengah ..... 51 - 54
    Peta Djawa Tengah ..... 55 a
12. Daerah Istimewa Jogja ..... 55 - 57
    Peta D.I. Jogjakarta ..... 59 a
13. Daerah Djawa Timur ..... 59 - 62
    Peta Djawa Timur ..... 63 a
14. Daerah Kalimantan Barat ..... 63 - 65
    Peta Kalimantan Barat ..... 67 a

15. Daerah Kalimantan Tengah ..... 67 - 69
Peta Kalimantan Tengah ..... 71 a

16. Daerah Kalimantan Selatan ..... 71 - 73
Peta Kalimantan Selatan ..... 75 a

17. Daerah Kalimantan Timur ..... 75 - 77
Peta Kalimantan Timur ..... 79 a

18. Daerah Sulawesi Utara ..... 79 - 80
Peta Sulawesi Utara ..... 81 a

19. Daerah Sulawesi Tengah ..... 81 - 82
Peta Sulawesi Tengah ..... 83 a

20. Daerah Sulawesi Selatan ..... 83 - 85
Peta Sulawesi Selatan ..... 87 a

21. Daerah Sulawesi Tenggara ..... 87 - 88
Peta Sulawesi Tenggara ..... 89 a

22. Daerah Bali ..... 89 - 91
Peta Bali ..... 93 a

23. Daerah Nusa Tenggara Barat ..... 93 - 94
Peta Nusa Tenggara Barat ..... 95 a

24. Daerah Nusa Tenggara Timur ..... 95 - 96
Peta Nusa Tenggara Timur ..... 97 a

25. Daerah Maluku ..... 97 - 98
Peta Maluku ..... 99 a

26. Daerah Irian Barat ..... 99 - 102

A. Pendahuluan 99

B. Kebidjaksanaan Sektoral 99

I. Sektor Perhubungan 100

II. Sektor Sosial/Administrasi Pemerintahan 100

III. Sektor Produksi 101

IV. Sektor Public Utilities 101

C. Pembiajaan 102

Peta Irian Barat ..... 103 a